



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2019**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN**



Nomor : 70.A/LHP/XIX.DPS/05/2020
Tanggal : 28 Mei 2020



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2019**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN**

Nomor : 70.A/LHP/XIX.DPS/05/2020
Tanggal : 29 Mei 2020

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	1
LAPORAN KEUANGAN	3
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	3
2. NERACA	5
3. LAPORAN OPERASIONAL	7
4. LAPORAN ARUS KAS	8
5. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	10
6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	11
7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	12
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN	133
LAMPIRAN	



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2019, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Provinsi Bali bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Provinsi Bali untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Provinsi Bali. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas

ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Bali, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Bali tanggal 31 Desember 2019, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.


Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, disajikan dalam Laporan Nomor 70.B/LHP/XIX.DPS/05/2020 dan Nomor 70.C/LHP/XIX.DPS/05/2020 tanggal 28 Mei 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Denpasar, 28 Mei 2020

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Bali
Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan,



I Gusti Ngurah Satria Perwira, S.E., M.M., Ak., CA. 
Register Negara Akuntan No. RNA-11643



GUBERNUR BALI

Bali, 27 Mei 2020

Nomor : 790/3208/PAPKD.BPKAD

Yth. Kepala Perwakilan BPK

Lampiran : -

Provinsi Bali

Perihal : Surat Representasi
Manajemen

di -

D e n p a s a r

Kami memberikan surat representasi ini sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2019, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca per 31 Desember 2019, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Kami menegaskan bahwa kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Representasi surat ini diberikan terbatas pada hal-hal yang material. Sesuatu dipandang material, tanpa melihat besarnya, namun juga menyangkut salah saji informasi akuntansi yang mempengaruhi pertimbangan wajar pengguna laporan keuangan, yang mengandalkan kepercayaan pada informasi laporan keuangan dimaksud.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, representasi berikut ini telah kami buat kepada Tim BPK selama pemeriksaan:

1. Laporan keuangan yang disebut di atas telah kami sajikan sesuai dengan SAP.
2. Kami telah menyediakan semua data material dan informasi yang diperlukan kepada Tim BPK.
3. Semua transaksi yang material sudah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan.
4. Semua rekening atas nama pejabat terkait dengan jabatannya dalam pemerintahan sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.

5. Pemerintah Provinsi Bali memiliki hak penuh atas aset yang dimiliki, dan tidak terdapat gadai atau penjaminan atas aset tersebut.
6. Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam laporan keuangan.
7. Semua kewajiban material sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.
8. Tidak terdapat tagihan yang belum dinyatakan dan harus dinyatakan tetapi belum diungkapkan.
9. Pemerintah Provinsi Bali telah mematuhi semua aspek perjanjian kontrak yang akan mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan jika terjadi pelanggaran.
10. Tidak terdapat peristiwa atau transaksi material yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 2019 yang belum dicatat dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
11. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan) dan kecurangan lain yang melibatkan pimpinan atau pegawai yang memiliki peran penting dalam pengendalian intern.
12. Kami bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan memelihara sistem pengendalian intern.
13. Kami telah menilai efektifitas sistem pengendalian intern dalam hal:
 - a. Keandalan pelaporan keuangan: transaksi-transaksi telah dicatat, diproses, dan diringkaskan secara memadai untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan aset telah dilindungi dari kehilangan yang disebabkan oleh pengambilalihan, penggunaan atau pelepasan hak yang tidak sah.
 - b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku: transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berdampak langsung dan material terhadap laporan keuangan.
14. Kami telah menyampaikan semua kelemahan signifikan yang ada pada perancangan dan pelaksanaan pengendalian intern yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan Pemerintah Provinsi Bali dalam mencapai tujuan pengendalian intern dan mengindikasikan kelemahan-kelemahan yang material.

15. Kami bertanggungjawab atas penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang keuangan negara dan SAP.
16. Kami telah mengidentifikasi dan mengungkapkan semua peraturan dan undang-undang yang berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah dalam laporan keuangan.
17. Kami telah menyampaikan semua kejadian ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
18. Berkaitan dengan dampak dari pandemi Covid-19:
 - a. Kami telah mengidentifikasi, menilai, mengevaluasi, dan mempertimbangkan semua dampak keuangan dari pandemi Covid-19 dan dampak peristiwa signifikan lainnya pada Laporan Keuangan per 31 Desember 2019.
 - b. Kami telah menyajikan dalam Laporan Keuangan dan/atau telah mengungkapkan semua pengungkapan yang diperlukan terkait dengan dampak dari pandemi Covid-19 tersebut.

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan atas hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan.

**GUBERNUR BALI,**

WAYAN KOSTER



PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
AUDITED

DALAM RUPIAH

URAIAN	REFF CALK	TA 2019			REALISASI TA 2018
		ANGGARAN	REALISASI	%	
PENDAPATAN DAERAH	5.1.1	6.498.850.974.403,00	6.645.538.871.169,59	102,26	6.259.367.608.393,14
PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1	3.762.785.679.903,00	4.023.156.314.134,59	106,92	3.718.499.635.346,14
Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	3.235.176.956.048,00	3.463.996.393.584,00	107,07	3.230.732.169.802,50
Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	49.803.474.650,00	33.841.782.964,00	67,95	40.241.780.029,00
Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	170.885.580.850,00	171.076.247.197,42	100,11	170.219.137.368,48
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.1.4	306.919.668.355,00	354.241.890.389,17	115,42	277.306.548.146,16
PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2	2.730.461.294.500,00	2.616.498.279.035,00	95,83	2.535.479.973.047,00
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	5.1.1.2.1	2.662.026.888.500,00	2.548.063.873.035,00	95,72	2.493.979.973.047,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	5.1.1.2.2	68.434.406.000,00	68.434.406.000,00	100,00	41.500.000.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.1.3	5.604.000.000,00	5.884.278.000,00	105,00	5.388.000.000,00
Pendapatan Hibah		5.604.000.000,00	5.884.278.000,00	105,00	5.388.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN		6.498.850.974.403,00	6.645.538.871.169,59	102,26	6.259.367.608.393,14
BELANJA DAERAH	5.1.2	5.005.329.707.432,27	4.403.625.560.597,87	87,98	4.160.554.856.427,50
BELANJA OPERASI	5.1.2.1	4.232.759.907.784,31	3.845.688.340.311,65	90,86	3.719.657.194.081,10
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	1.699.658.149.841,27	1.590.611.064.913,75	93,58	1.590.437.517.662,00
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	1.387.675.908.224,04	1.195.894.560.327,09	86,18	999.366.106.630,68
Belanja Bunga	5.1.2.1.3			0,00	0,00
Belanja Subsidi	5.1.2.1.4	10.000.000.000,00	9.903.628.000,00	99,04	9.566.400.000,00
Belanja Hibah	5.1.2.1.5	1.125.995.849.719,00	1.040.184.587.070,81	92,38	1.095.268.169.788,42
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.6	9.430.000.000,00	9.094.500.000,00	96,44	25.019.000.000,00
BELANJA MODAL	5.1.2.2	760.471.523.139,96	556.754.502.359,04	73,21	440.710.162.346,40
Belanja Modal - Tanah	5.1.2.2.1	194.088.758.420,00	63.506.862.123,00	32,72	14.849.390.500,00
Belanja Modal - Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	273.084.350.972,05	236.359.501.621,14	86,55	179.946.735.698,34
Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	146.070.457.678,91	128.335.018.713,06	87,86	35.289.346.105,54
Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	132.625.316.115,00	117.877.559.353,84	88,88	195.152.228.280,52
Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	14.602.639.954,00	10.675.560.548,00	73,11	15.110.337.162,00
Belanja Modal - Aset Lainnya	5.1.2.2.6	0,00	0,00	0,00	362.124.600,00
BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3	12.098.276.508,00	1.182.717.927,18	9,78	187.500.000,00
Belanja Tak Terduga		12.098.276.508,00	1.182.717.927,18	9,78	187.500.000,00
TRANSFER	5.1.3	2.195.866.652.337,20	2.114.688.305.724,54	96,30	1.837.992.175.854,31
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	5.1.3.1	1.339.553.585.283,20	1.302.125.715.639,33	97,21	1.207.451.785.444,09
Transfer Bagi Hasil Pajak		1.339.553.585.283,20	1.302.125.715.639,33	97,21	1.207.451.785.444,09
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	5.1.3.2	856.313.067.054,00	812.562.590.085,21	94,89	630.540.390.410,22
Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah	5.1.3.2.1	370.033.724.798,00	330.260.987.829,21	89,25	186.775.668.060,22
Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa	5.1.3.2.2	483.773.275.000,00	479.795.535.000,00	99,18	441.322.088.750,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5.1.3.2.3	2.506.067.256,00	2.506.067.256,00	100,00	2.442.633.600,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		7.201.196.359.769,47	6.518.313.866.322,41	90,52	5.998.547.032.281,81
SURPLUS/DEFISIT		(702.345.385.366,47)	127.225.004.847,18	(18,11)	260.820.576.111,33

URAIAN	REFF CALK	TA 2019			REALISASI TA 2018
		ANGGARAN	REALISASI	%	
PEMBIAYAAN	5.1.4	702.345.385.366,47	704.590.522.601,47	100,32	441.524.809.255,14
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.4.1	702.345.385.366,47	704.590.522.601,47	100,32	441.914.809.255,14
Penggunaan SILPA Tahun Lalu		702.345.385.366,47	702.345.385.366,47	100,00	404.137.168.978,49
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00
Pengembalian Dana Bergulir		0,00	2.245.137.235,00	0,00	37.777.640.276,65
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.4.2	0,00	0,00	0,00	390.000.000,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	0,00	0,00	390.000.000,00
JUMLAH PEMBIAYAAN BERSIH		702.345.385.366,47	704.590.522.601,47	100,32	441.524.809.255,14
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	5.1.5	0,00	831.815.527.448,65	0,00	702.345.385.366,47

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Denpasar, 27Mei 2020


WAYAN KOSTER



PEMERINTAH PROVINSI BALI
NERACA
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
AUDITED

DALAM RUPIAH

URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2019	TAHUN 2018
ASET	5.2.1	10.880.737.340.757,60	10.426.548.615.357,53
ASET LANCAR	5.2.1.1	1.016.403.425.383,22	1.035.138.540.288,81
Kas dan Setara Kas	5.2.1.1.1	831.411.352.968,02	702.345.385.366,47
Kas di Kas Daerah	5.2.1.1.1.1	650.647.578.852,66	155.539.387.397,37
Kas di Bendahara Penerimaan	5.2.1.1.1.2	13.286.000,00	39.726.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.2.1.1.1.3	6.187.328,00	244.875.222,43
Kas di BLUD	5.2.1.1.1.4	135.968.551.038,96	100.992.026.346,86
Kas Lainnya di Bendahara BOS	5.2.1.1.1.5	44.775.749.748,40	45.529.370.399,81
Setara Kas	5.2.1.1.1.6	0,00	400.000.000.000,00
Piutang	5.2.1.1.2	98.088.383.167,94	253.542.360.955,73
Piutang Pajak	5.2.1.1.2.1	37.295.600.983,00	37.015.966.071,00
Piutang Retribusi	5.2.1.1.2.2	129.039.000,00	132.861.000,00
Piutang Hasil Pemakaian Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.2.1.1.2.3	951.680.759,73	171.741.499.697,15
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.2.1.1.2.4	55.391.795.175,16	40.632.622.855,58
Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi	5.2.1.1.2.5	3.912.616.660,00	4.019.411.332,00
Piutang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.2.1.1.2.6	386.341.328,00	0,00
Piutang Jagir BOS	5.2.1.1.2.7	21.309.262,05	0,00
Penyisihan Piutang	5.2.1.1.3	-34.690.843.968,72	-18.792.299.300,18
Penyisihan Piutang Pajak		-371.211.000,92	-460.086.540,86
Penyisihan Piutang Retribusi		-36.468.015,00	-51.799.280,00
Penyisihan Piutang Hasil Pemakaian Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-951.680.759,70	-1.329.789.474,54
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah		-29.416.829.280,15	-14.940.918.338,78
Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi		-3.912.616.660,00	-2.009.705.666,00
Penyisihan Piutang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		-2.038.252,95	0,00
Beban Dibayar dimuka	5.2.1.1.4	112.197.260,27	1.040.694.453,28
Persediaan	5.2.1.1.5	121.482.335.955,71	97.002.398.813,51
Jumlah Aset Lancar		1.016.403.425.383,22	1.035.138.540.288,81
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.2.1.2	1.373.777.524.568,76	1.181.822.481.420,07
Investasi Non Permanen	5.2.1.2.1	774.032.140,00	3.019.169.375,00
Dana Bergulir		774.032.140,00	3.019.169.375,00
Investasi Permanen	5.2.1.2.2	1.373.003.492.428,76	1.178.803.312.045,07
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		1.373.003.492.428,76	1.178.803.312.045,07
Jumlah Investasi Jangka Panjang		1.373.777.524.568,76	1.181.822.481.420,07
ASET TETAP	5.2.1.3	7.743.629.861.229,56	7.473.548.024.902,38
Aset Tetap Tanah	5.2.1.3.1	4.166.232.536.186,23	4.087.270.627.470,23
Aset Tetap Peralatan dan Mesin	5.2.1.3.2	1.600.892.532.185,69	1.352.612.850.236,94
Aset Tetap Gedung dan Bangunan	5.2.1.3.3	2.170.807.551.558,85	1.967.779.583.359,25
Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.2.1.3.4	2.940.133.070.386,02	2.805.863.639.783,15
Aset Tetap Lainnya	5.2.1.3.5	63.719.411.785,25	59.558.717.173,58
Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.2.1.3.6	21.598.209.957,17	8.313.342.350,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	5.2.1.3.7	-3.219.753.450.829,65	-2.807.850.735.470,76
Jumlah Aset Tetap		7.743.629.861.229,56	7.473.548.024.902,38
DANA CADANGAN	5.2.1.4	0,00	0,00
Dana Cadangan		0,00	0,00
Jumlah Dana Cadangan		0,00	0,00
ASET LAINNYA	5.2.1.5	746.926.529.576,05	736.039.568.746,26
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.2.1.5.1	593.288.127.933,53	590.320.160.599,33
Aset Tidak Berwujud	5.2.1.5.2	12.328.266.365,00	9.593.834.604,00
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.2.1.5.3	-6.289.862.588,00	-5.795.431.274,00
Aset Lain - Lain	5.2.1.5.4	147.599.997.865,52	141.921.004.816,93
Jumlah Aset Lainnya			736.039.568.746,26
JUMLAH ASET		10.880.737.340.757,60	10.426.548.615.357,53

URAIAN	REF KALK	TAHUN 2019	TAHUN 2018
KEWAJIBAN	5.2.2	168.312.600.949,02	156.762.314.144,18
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.2.2.1	168.312.600.949,02	156.762.314.144,18
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	5.2.2.1.1	22.509.092,34	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	5.2.2.1.2	18.824.792.711,97	18.094.914.131,86
Utang Belanja	5.2.2.1.4	42.095.671.395,66	30.454.038.973,20
Utang Transfer bagi Hasil Pajak	5.2.2.1.3	102.648.742.691,91	107.729.716.049,60
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.2.2.1.5	4.720.885.057,14	483.644.989,52
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		168.312.600.949,02	156.762.314.144,18
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.2.2.2	0,00	0,00
Utang Dalam Negeri		0,00	0,00
Utang Luar Negeri		0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		168.312.600.949,02	156.762.314.144,18
EKUITAS	5.2.3	10.712.424.739.808,60	10.269.786.301.213,35
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		10.880.737.340.757,60	10.426.548.615.357,53

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Denpasar, 27 Mei 2020



GUBERNUR BALI,
WAYAN KOSTER



PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
AUDITED

DALAM RUPIAH

URAIAN	REFF CALK	2019	2018	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN - LO	5.3.1	6.797.776.422.589,34	6.466.826.846.047,97	330.949.576.541,37	5,12
PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO	5.3.1.1	4.058.754.068.089,33	3.757.410.726.409,97	301.343.341.679,36	8,02
Pendapatan Pajak Daerah - LO	5.3.1.1.1	3.464.363.116.496,00	3.236.842.425.880,50	227.520.690.615,50	7,03
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	5.3.1.1.2	35.940.388.706,45	43.235.935.117,49	-7.295.546.411,04	-16,87
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	5.3.1.1.3	196.270.207.473,69	194.225.579.550,32	2.044.627.923,37	1,05
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO	5.3.1.1.4	362.180.355.413,19	283.106.785.861,66	79.073.569.551,53	27,93
PENDAPATAN TRANSFER - LO	5.3.1.2	2.616.498.279.035,00	2.535.479.973.047,00	81.018.305.988,00	3,20
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LO	5.3.1.2.1	2.548.063.873.035,00	2.493.979.973.047,00	54.083.899.988,00	2,17
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	5.3.1.2.2	68.434.406.000,00	41.500.000.000,00	26.934.406.000,00	64,90
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LO	5.3.1.3	122.524.075.465,01	173.936.146.591,00	-51.412.071.125,99	-29,56
Pendapatan Hibah - LO	5.3.1.3.1	122.524.075.465,01	172.770.933.280,26	-50.246.857.815,25	-29,08
Pendapatan Lainnya - LO	5.3.1.3.2	0,00	1.165.213.310,74	-1.165.213.310,74	-100,00
JUMLAH PENDAPATAN - LO		6.797.776.422.589,34	6.466.826.846.047,97	330.949.576.541,37	5,12
BEBAN	5.3.2	6.371.781.637.922,96	6.470.568.984.482,34	-348.424.384.403,71	-5,38
BEBAN OPERASI	5.3.2.1	4.262.174.305.556,11	4.610.598.689.959,82	-348.424.384.403,71	-7,56
Beban Pegawai	5.3.2.1.1	1.602.554.031.323,23	1.593.933.241.285,00	8.620.790.038,23	0,54
Beban Barang dan Jasa	5.3.2.1.2	1.196.784.312.613,06	1.007.689.550.058,44	189.094.762.554,62	18,77
Beban Bunga	5.3.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi	5.3.2.1.4	9.903.628.000,00	9.566.400.000,00	337.228.000,00	0,00
Beban Hibah	5.3.2.1.5	1.015.294.225.523,05	1.591.244.520.425,95	-575.950.294.902,90	-36,19
Beban Bantuan Sosial	5.3.2.1.6	9.094.500.000,00	25.121.052.913,00	-16.026.552.913,00	-63,80
Beban Penyusutan	5.3.2.1.7	410.642.980.415,42	378.285.541.681,43	32.357.438.733,99	8,55
Beban Amortisasi	5.3.2.1.8	1.211.359.903,00	1.540.273.155,00	-328.913.252,00	-21,35
Beban Penyisihan Piutang	5.3.2.1.9	16.689.267.778,35	3.218.110.440,99	13.471.157.337,36	418,60
Beban Lain-Lain	5.3.2.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN TRANSFER	5.3.2.2	2.109.607.332.366,85	1.859.970.294.522,52	249.637.037.844,33	13,42
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak	5.3.2.2.1	1.297.044.742.281,64	1.229.429.904.112,30	67.614.838.169,34	5,50
Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Lainnya	5.3.2.2.2	330.260.987.829,21	186.775.668.060,22	143.485.319.768,99	76,82
Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa	5.3.2.2.3	479.795.535.000,00	441.322.088.750,00	38.473.446.250,00	8,72
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5.3.2.2.4	2.506.067.256,00	2.442.633.600,00	63.433.656,00	2,60
JUMLAH BEBAN		6.371.781.637.922,96	6.470.568.984.482,34	-98.787.346.559,38	-1,53
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		425.994.784.666,38	-3.742.138.434,37	429.736.923.100,75	-11.483,73
KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.3.3	-12.360.005.453,45	-4.452.545.786,17	-7.907.459.667,28	0,00
Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO		-2.078.557.727,21	-96.396.561,00	-1.982.161.166,21	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO		-14.524.610.325,05	-4.985.644.394,16	-9.538.965.930,89	0,00
Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO		3.539.527.489,00	629.495.168,99	2.910.032.320,01	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO		703.635.109,81	0,00	703.635.109,81	0,00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-12.360.005.453,45	-4.452.545.786,17	-7.907.459.667,28	0,00
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		413.634.779.212,93	-8.194.684.220,54	421.829.463.433,47	-5.147,60
POS LUAR BIASA	5.3.4	1.182.717.927,18	187.500.000,00	995.217.927,18	0,00
Beban Luar Biasa	5.3.4.1	1.182.717.927,18	187.500.000,00	995.217.927,18	0,00
JUMLAH POS LUAR BIASA		1.182.717.927,18	187.500.000,00	995.217.927,18	0,00
SURPLUS/(DEFISIT) - LO	5.3.5	412.452.061.285,75	-8.382.184.220,54	420.834.245.506,29	-5.020,58

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Denpasar 27 Mei 2020

GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER



PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
AUDITED

DALAM RUPIAH

URAIAN	REFK CALK	TAHUN 2019	TAHUN 2018
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.4.1		
Arus Masuk Kas	5.4.1.1		
Pendapatan Pajak Daerah		3.463.996.393.584,00	3.230.732.169.802,50
Pendapatan Retribusi Daerah		33.841.782.964,00	40.241.780.029,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		171.076.247.197,42	170.219.137.368,48
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		350.521.972.843,17	276.349.232.351,16
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		2.548.063.873.035,00	2.493.979.973.047,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		68.434.406.000,00	41.500.000.000,00
Pendapatan Hibah		5.884.278.000,00	5.388.000.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		6.641.818.953.623,59	6.258.410.292.598,14
Arus Keluar Kas	5.4.1.2		
Belanja Pegawai		1.590.611.064.913,75	1.590.437.517.662,00
Belanja Barang an Jasa		1.195.894.560.327,09	999.366.106.630,68
Belanja Bunga		0,00	0,00
Belanja Subsidi		9.903.628.000,00	9.566.400.000,00
Belanja Hibah		1.040.184.587.070,81	1.095.268.169.788,42
Belanja Bantuan Sosial		9.094.500.000,00	25.019.000.000,00
Belanja Tak Terduga		1.182.717.927,18	187.500.000,00
Transfer Bagi Hasil Pajak		1.302.125.715.639,33	1.207.451.785.444,09
Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Lainnya		330.260.987.829,21	186.775.668.060,22
Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa		479.795.535.000,00	441.322.088.750,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		2.506.067.256,00	2.442.633.600,00
Jumlah Arus Keluar Kas		5.961.559.363.963,37	5.557.836.869.935,41
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		680.259.589.660,22	700.573.422.662,73
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.4.2		
Arus Masuk Kas	5.4.2.1		
Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
Penjualan atas Aset Tetap - Tanah		0,00	0,00
Penjualan atas Aset Tetap - Peralatan dan Mesin		3.678.416.546,00	895.600.795,00
Penjualan atas Aset Tetap - Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Penjualan atas Aset Tetap - Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
Penjualan atas Aset Tetap - Lainnya		0,00	0,00
Penjualan atas Aset Lainnya		41.501.000,00	61.715.000,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		3.719.917.546,00	957.315.795,00
Arus Keluar Kas	5.4.2.2		
Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
Belanja Modal - Tanah		63.506.862.123,00	14.849.390.500,00
Belanja Modal - Peralatan dan Mesin		236.359.501.621,14	179.946.735.698,34
Belanja Modal - Gedung dan Bangunan		128.335.018.713,06	35.289.346.105,54
Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan		117.877.559.353,84	195.152.228.280,52
Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya		10.675.560.548,00	15.110.337.162,00
Belanja Aset Lainnya		0,00	362.124.600,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	390.000.000,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		556.754.502.359,04	441.100.162.346,40
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		-553.034.584.813,04	-440.142.846.551,40

URAIAN	REF KALK	TAHUN 2019	TAHUN 2018
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.4.3		
Arus Masuk Kas	5.4.3.1		
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri		0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah		2.245.137.235,00	37.777.640.276,65
Penerimaan Pengembalian TGRD		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		2.245.137.235,00	37.777.640.276,65
Arus Keluar Kas	5.4.3.2		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri		0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		2.245.137.235,00	37.777.640.276,65
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.4.4		
Arus Masuk Kas	5.4.4.1		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		241.675.606.775,00	223.555.212.550,00
Jumlah Arus Masuk Kas		241.675.606.775,00	223.555.212.550,00
Arus Keluar Kas	5.4.4.2		
Pembayaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		241.675.606.775,00	223.555.212.550,00
Jumlah Arus Keluar Kas		241.675.606.775,00	223.555.212.550,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		0,00	0,00
Kenaikan / (Penurunan) Kas	5.4.5	129.470.142.082,18	298.208.216.387,98
Saldo Awal Kas	5.4.6	702.345.385.366,47	404.236.331.368,74
Koreksi SILPA Tahun Lalu	5.4.7	0,00	-99.162.390,25
Saldo Akhir Kas	5.4.8	831.815.527.448,65	702.345.385.366,47
Terdiri dari:			
Kas di Kas Daerah		650.647.578.852,66	155.539.387.397,37
Kas di Bendahara Penerimaan		13.286.000,00	39.726.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		6.187.328,00	244.875.222,43
Kas di BLUD			
Kas di BLUD UPT RS Bali Mandara		35.699.522.957,60	15.695.518.786,54
Kas di BLUD RS Mata Bali Mandara		73.980.126.269,51	56.913.571.167,47
Kas di BLUD RS Jiwa Provinsi Bali		7.697.907.923,08	10.201.853.478,01
Kas di BLUD UPT Pengelolaan Air Limbah		13.964.405.447,59	12.707.471.752,73
Kas di BLUD UPT Pengelolaan Air Minum		4.626.588.441,18	5.473.611.162,11
Kas Lainnya di Bendahara BOS		44.775.749.748,40	45.529.370.399,81
Setara Kas (Deposito Jangka Waktu < 1 Bulan)		0,00	400.000.000.000,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Denpasar, 27 Mei 2020



GUBERNUR BALI,
WAYAN KOSTER



PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
AUDITED

DALAM RUPIAH

URAIAN	REF KALK	TAHUN	
		2019	2018
Saldo Anggaran Lebih Awal	5.5.1	702.345.385.366,47	408.311.832.886,74
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.5.2	702.345.385.366,47	404.137.168.978,49
Subtotal		0,00	4.174.663.908,25
Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	5.5.3	831.815.527.448,65	702.345.385.366,47
Subtotal		831.815.527.448,65	706.520.049.274,72
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.5.4	0,00	-4.174.663.908,25
Saldo Anggaran Lebih Akhir	5.5.5	831.815.527.448,65	702.345.385.366,47

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Denpasar, 27 Mei 2020


GUBERNUR BALI,
WAYAN KOSTER



PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
AUDITED

DALAM RUPIAH

URAIAN	REF KALK	TAHUN	
		2019	2018
Ekuitas Awal	5.6.1	10.269.786.301.213,35	8.596.911.437.292,78
Surplus/(Defisit) LO	5.6.2	412.452.061.285,75	-8.382.184.220,54
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	5.6.3	30.186.377.309,52	1.681.257.048.141,11
Koreksi Ekuitas - Kas		-19.032.982,92	-99.162.390,25
Koreksi Ekuitas - Piutang		141.962.472,00	1.734.569.352,57
Koreksi Ekuitas - Persediaan		16.200.286,00	36.146.324.189,60
Koreksi Ekuitas - Investasi		0,00	-636.480.799,83
Koreksi Ekuitas - Aset Tetap		31.414.485.821,46	1.672.076.160.508,87
Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya		-1.197.834.172,22	-25.779.559.731,87
Koreksi Ekuitas - Kewajiban Jangka Pendek		-169.404.114,80	-2.184.802.987,98
Ekuitas Akhir	5.6.4	10.712.424.739.808,60	10.269.786.301.213,35

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Denpasar, 27 Mei 2020

GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER



PEMERINTAH PROVINSI BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan tahun 2019 ini kami sajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai (*full disclosure*).

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan

Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas pemerintah daerah.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);

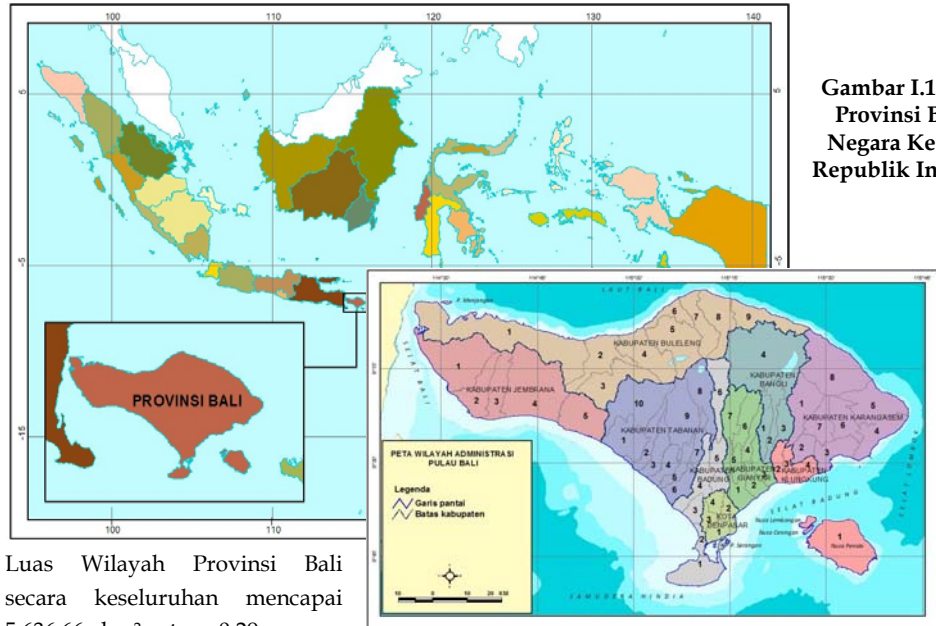
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165)
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- k. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7).

1.3. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan atau Entitas Akuntansi

a. Letak Geografi

Secara geografis, Letak Wilayah Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang dikenal dengan sebutan Pulau Dewata (paradise island). Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Provinsi Bali terdiri dari beberapa pulau, yakni Pulau Bali sebagai pulau terbesar, Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Ceningan, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Serangan (terletak di sekitar kaki Pulau Bali), serta Pulau Menjangan yang terletak di bagian barat Pulau Bali. Secara astronomis, Provinsi Bali terletak pada posisi titik koordinat 08°03'40" - 08°50'48" Lintang Selatan dan 114°25'53" - 115°42'40" Bujur Timur yang membuatnya beriklim tropis layaknya wilayah lain di Indonesia.

Letak wilayah Provinsi Bali sebagai bagian dari Negara Kesatuan RI disajikan pada Gambar I.1.



Gambar I.1 Posisi Provinsi Bali di Negara Kesatuan Republik Indonesia

Luas Wilayah Provinsi Bali secara keseluruhan mencapai 5.636,66 km² atau 0,29 persen dari luas kepulauan Indonesia. Provinsi Bali terbagi ke dalam delapan kabupaten dan satu kota meliputi Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Buleleng Karangasem, dan Kota Denpasar. Diantara kesembilan kabupaten/kota tersebut, Kabupaten Buleleng memiliki luas terbesar 1.365,88 km² (24,23%) dari luas provinsi, diikuti oleh Jembrana 841,80 km² (14,93%), Karangasem 839,54 km² (14,89%), dan Tabanan 839,33 km² (14,89%). Sisanya berturut-turut adalah Bangli 520,81 km², Badung 418,52 km², Gianyar 368,00 km², Klungkung 315,00 km², dan Kota Denpasar 127,78 km².

Secara administratif, Provinsi Bali terdiri atas 8 (delapan) kabupaten dan 1 (satu) kota, 57 kecamatan dan 716 desa/kelurahan. Jumlah kecamatan tiap Kabupaten/Kota berkisar 4-10 kecamatan.

Luas wilayah, jumlah kecamatan dan jumlah desa/kelurahan menurut Kabupaten/Kota disajikan pada **Tabel I.1**

Tabel I.1
Luas Wilayah Kab/Kota dan Kec. di Provinsi Bali

NO	KABUPATEN/ KECAMATAN	DESA 2012	LUAS (KM ²)	NO	KABUPATEN/ KECAMATAN	DESA 2012	LUAS (KM ²)
I.	KAB. JEMBRANA	51	841,8	V.	KAB. KLUNGKUNG	59	315
1	MELAYA	10	197,19	1	NUSA PENIDA	16	202,84
2	NEGARA	12	126,5	2	BANJARANGKAN	13	45,73
3	MENDOYO	11	294,49	3	KLUNGKUNG	18	29,05
4	PEKUTATAN	8	129,65	4	DAWAN	12	37,38
5	JEMBRANA	10	93,97	VI.	KAB. BANGLI	72	520,81
II.	KAB. TABANAN	133	839,33	1	SUSUT	9	49,31
1	SELEMADEG BARAT	11	120,15	2	BANGLI	9	56,26
2	SELEMADEG	11	52,05	3	TEMBUKU	6	48,32
3	SELEMADEG TIMUR	11	54,78	4	KINTAMANI	48	366,92
4	KERAMBITAN	15	42,39	VII.	KAB. KARANGASEM	78	839,54
5	TABANAN	12	51,4	1	RENDANG	6	109,7
6	KEDIRI	15	53,6	2	SEDEMEN	10	35,15
7	MARGA	15	44,79	3	MANGGIS	12	69,83
8	BATURITI	12	99,17	4	KARANGASEM	11	94,23
9	PENEBEL	18	141,98	5	ABANG	14	134,05
10	PUPUAN	13	179,02	6	BEBANDEM	8	81,51
III.	KAB. BADUNG	62	418,52	7	SELAT	8	80,35
1	KUTA SELATAN	6	101,13	8	KUBU	9	234,72
2	KUTA	5	17,52	VIII.	KAB. BULELENG	148	1365,88
3	KUTA UTARA	6	33,86	1	GEROKGAK	14	356,57
4	MENGWI	20	82	2	SERIRIT	21	111,78
5	ABIANSEMAL	18	69,01	3	BUSUNGBIU	15	196,62
6	PETANG	7	115	4	BANJAR	17	172,6
IV.	KAB. GIANYAR	70	368	5	SUKASADA	15	172,93
1	SUKAWATI	12	55,02	6	BULELENG	29	46,94
2	BLAHBATUH	9	39,7	7	SAWAN	14	92,52
3	GIANYAR	17	50,59	8	KUBUTAMBAHAN	13	118,24
4	TAMPAKSIRING	8	42,63	9	TEJAKULA	10	97,68
5	UBUD	8	42,38	IX.	KOTA DENPASAR	43	127,78
6	TEGALLALANG	7	61,8	1	DENPASAR SELATAN	10	49,99
7	PAYANGAN	9	75,88	2	DENPASAR TIMUR	11	22,54
				3	DENPASAR BARAT	11	24,13
				4	DENPASAR UTARA	11	31,12
					TOTAL	716	5.636,66

Sumber: BPS Provinsi Bali

Namun demikian, jika dilihat dari struktur pemerintahannya, agak berbeda dengan daerah lain. Jika dalam struktur pemerintahan umumnya, terdiri dari kepala desa/lurah, kepala dusun/kepala lingkungan, ketua RW kemudian ketua RT. Di Bali struktur pemerintahannya adalah kepala desa/lurah, kepala dusun/kepala lingkungan, dan yang terbawah adalah Kelian Banjar. Banjar mirip dengan kampung, bisa terdiri dari 50-200 KK (kepala keluarga), keanggotaannya biasanya bersifat turun temurun.

Untuk struktur pemerintahan adat, tiap desa di Bali dipimpin oleh bendesa adat (kelian desa) yang kedudukan hampir setara dengan kepala desa/lurah, hanya saja bendesa adat adalah pemimpin adat yang bertugas untuk menjalankan awig-awig (undang-undang adat) di desa bersangkutan. Di bawah bendesa adat, ada kelian adat/kelian banjar. Di beberapa banjar di Bali, jabatan antara kelian banjar dan kelian adat biasanya dirangkap oleh satu orang, namun ada juga yang membedakannya. Dalam satu desa administratif bisa terdapat beberapa desa adat. Maksudnya adalah desa A bisa terdiri dari desa adat B, desa adat C, dan desa adat D atau sebaliknya. Hal ini kaitannya dengan historis. Desa adat sudah ada sejak zaman kerajaan, setelah berakhirnya era kerajaan, maka pemerintah republik membentuk desa administratif.

b. Demografi

Penduduk merupakan aset pembangunan bila mereka dapat diberdayakan secara optimal. Kendati begitu, mereka juga bisa menjadi beban pembangunan jika tidak dibarengi dengan kualitas penduduk (SDM) yang memadai pada wilayah/daerah bersangkutan.

Berdasarkan angka proyeksi penduduk tahun 2014 tercatat jumlah penduduk di Bali sebanyak 4.104,9 ribu jiwa yang terdiri dari 2.066,7 ribu jiwa (50,35%) penduduk laki-laki dan 2.038,2 ribu jiwa (49,65%) penduduk perempuan.

Di antara kabupaten/kota yang ada di Bali, Kabupaten Buleleng memiliki luas wilayah terbesar dengan jumlah penduduk mencapai 642,3 ribu jiwa atau 15,65 persen dari seluruh penduduk Bali. Dengan luas wilayah yang mencapai 1.365,88 km², dan kepadatan penduduknya sebesar 470 jiwa/km² atau masih di bawah rata-rata kepadatan penduduk Bali secara umum. Semua potensi tadi tentu akan sangat menunjang dalam pelaksanaan program-program pembangunan di Kabupaten Buleleng. Sebaliknya, Kota Denpasar menunjukkan fenomena lain. Kepadatan penduduk di daerah ini adalah yang tertinggi di Bali yaitu 675 jiwa/km², dimana jumlah penduduk Kota Denpasar mencapai 863,6 ribu jiwa, dengan luas wilayah yang hanya sebesar 127,78 km². Dengan ini masuk akal apabila problem kependudukan menjadi sorotan penting bagi kelangsungan pembangunan Kota Denpasar yang berwawasan budaya. Hal inilah hendaknya menjadi perhatian pihak/instansi kependudukan di Kota Denpasar dengan melakukan program pendataan ulang penduduknya.

Untuk rasio jenis kelamin (perbandingan jumlah penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan) di Bali di tahun menunjukkan angka 101,40. Rasio jenis kelamin tertinggi dicapai oleh Kota Denpasar sebesar 104,31. Sedangkan rasio jenis kelamin terendah berada di Kabupaten Klungkung sebesar 98,53.

1.4. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Dengan letak geografi dan struktur demografi yang demikian Pemerintah Provinsi Bali menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan batas wilayah dan kewenangan. Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali meliputi urusan wajib dan urusan pilihan dengan masing-masing urusan sebagai berikut:

- a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar meliputi:
 - 1) Pendidikan

- 2) Kesehatan
 - 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - 5) Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
 - 6) Sosial
 - 7) Bencana
- b. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
- 1) Tenaga Kerja
 - 2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 3) Pangan
 - 4) Lingkungan Hidup
 - 5) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 6) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 7) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - 8) Perhubungan
 - 9) Komunikasi dan Informatika
 - 10) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
 - 11) Penanaman Modal
 - 12) Kepemudaan dan Olahraga
 - 13) Statistik
 - 14) Kebudayaan
 - 15) Perpustakaan
 - 16) Kearsipan
- c. Urusan Pilihan
- 1) Kelautan dan Perikanan
 - 2) Pariwisata
 - 3) Pertanian
 - 4) Kehutanan
 - 5) Energi dan Sumber Daya Mineral
 - 6) Perdagangan
 - 7) Perindustrian
 - 8) Ketransmigrasian
- d. Penunjang Urusan Pemerintah
- 1) Pemerintah Daerah
 - 2) Perencanaan
 - 3) Keuangan Sub Pengelolaan Keuangan dan Aset
 - 4) Keuangan Sub Pengelolaan Pendapatan
 - 5) Kepegawaian
 - 6) Pendidikan dan Pelatihan
 - 7) Sekretariat DPRD
 - 8) Sekretariat Daerah
 - 9) Inspektorat
 - 10) Koordinasi dengan Pemerintah Pusat
 - 11) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka ditetapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan
- b. Dinas Kesehatan
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- e. Satuan Polisi Pamong Praja
- f. Dinas Sosial
- g. Badan Penanggulangan Bencana
- h. Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral
- i. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- j. Dinas Ketahanan Pangan
- k. Dinas Lingkungan Hidup
- l. Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Keluarga Berencana
- m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- n. Dinas Perhubungan
- o. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
- p. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
- q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- r. Dinas Kepemudaan dan Olahraga
- s. Dinas Kebudayaan
- t. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
- u. Dinas Kelautan dan Perikanan
- v. Dinas Pariwisata
- w. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
- x. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
- y. Dinas Kehutanan
- z. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
- aa. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
- bb. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
- cc. Badan Pendapatan Daerah
- dd. Badan Kepegawaian Daerah
- ee. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- ff. Sekretariat DPRD
- gg. Sekretariat Daerah
- hh. Inspektorat
- ii. Badan Penghubung
- jj. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tugas pokok dan fungsi setiap OPD selaku entitas akuntansi juga melakukan pengelolaan dalam bidang keuangan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Bali yang dilaksanakan oleh PPKD.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Adapun sistematika isi catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan catatan atas laporan keuangan
- 1.3. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
- 1.4. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1. Ekonomi makro
- 2.2. Kebijakan keuangan
- 2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
- 3.3. Prosedur Penyusunan Informasi Kinerja Keuangan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas akuntansi/pelaporan keuangan daerah
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah

Bab V Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan

- 5.1. Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2. Neraca
- 5.3. Laporan Operasional
- 5.4. Laporan Arus Kas
- 5.5. Laporan Perubahan SAL
- 5.6. Laporan Perubahan Ekuitas

Bab VI Penutup

BAB II

**Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target
Kinerja APBD**

2.1. Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2019 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (minimal) :

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 3,61%
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 1,52%.
- c. Gini Ratio sebesar 0,37
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 75,38
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,63 %
- f. Tingkat Inflasi Kota Denpasar sebesar 2,37%
- g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp. 162,78 Triliun;

2.1.1. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan - kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan diwilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin disatu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 2.1.1.1. Persentase Penduduk Miskin Provinsi Bali

No	Tingkat Kemiskinan (keadaan September)	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Naik/turun 2018-2019 (%)
1	Persentase Tingkat Kemiskinan (%)	4,14	3,91	3,61	-0,30 poin
2	Jumlah penduduk miskin (Ribuan Orang)	176,48	168,34	156,91	-6,79 persen
3	Tingkat Kemiskinan Nasional (%)	10,12	9,66	9,22	-0,44 poin
4	Peringkat Provinsi	2	2	2	-

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Bali

Persentase penduduk miskin Provinsi Bali pada Tahun 2018 sebesar 3,91% mengalami penurunan dimana pada Tahun 2019 persentase penduduk miskin berhasil ditekan hingga menjadi 3,61%. Persentase penduduk miskin Provinsi Bali masih dibawah nasional, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 2.1.1.2. Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Bali

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Naik/Turun 2018-2019 (poin)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Bali (keadaan September)	0,55	0,52	0,50	-0,02
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional (keadaan September)	1,79	1,63	1,50	-0,13
3	Peringkat Provinsi	1	2		

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Bali

Tabel 2.1.1.3. Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Bali

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Naik/Turun (poin)
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,12	0,12	0,10	-0,02
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,46	0,41	0,36	-0,05
3	Peringkat Provinsi	2	1		

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Bali

2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bali Tahun 2019 adalah sebesar 1,52%, sebagaimana dijelaskan tabel dibawah ini.

Tabel 2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bali

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Naik/Turun 2018-2019 (poin)
1	Tingkat Pengangguran Provinsi Bali (%)	1,48	1,37	1,52	0,15
2	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	5,50	5,34	5,28	-0,06
3	Peringkat Provinsi	1	1	1	

Sumber Dokumen: BPS

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Bali Tahun 2019 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 1,52%, sedangkan TPT pada Tahun 2018 adalah sebesar 1,37% atau lebih tinggi dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2018. Namun demikian TPT Provinsi Bali masih lebih rendah dibandingkan TPT Nasional yang sebesar 5,28%.

2.1.3. Indeks Gini (Gini Ratio)

Indek Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indek Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- Indek Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama.
- Indek Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali realisasi pencapaian Gini Ratio Provinsi Bali Tahun 2019 adalah sebesar 0,37 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.3. Gini Ratio Provinsi Bali

No	Gini Ratio	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Naik/turun 2018-2019 (poin)
1	Tingkat Provinsi	0,38	0,36	0,37	0,01
2	Tingkat Nasional	0,39	0,38	0,38	-
3	Peringkat Provinsi	23	21		

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Bali

Pada Tahun 2019, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Provinsi Bali yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,37 Angka ini naik 0,01 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2018 yang sebesar 0,36 dan lebih tinggi/rendah jika dibandingkan dengan Gini Ratio Provinsi dan Nasional.

2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standart of living). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu :

- Rendah (< 60)
- Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali realisasi pencapaian IPM Provinsi Bali Tahun 2019 adalah sebesar 75,38 poin dengan kategori tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel.2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Naik/turun 2018-2019 (%)
1	Jembrana	70,72	71,65	72,35	0,98
2	Tabanan	74,86	75,45	76,16	0,94
3	Badung	80,54	80,87	81,59	0,89
4	Gianyar	76,09	76,61	77,14	0,56
5	Klungkung	70,13	70,90	71,71	1,14
6	Bangli	68,24	68,96	69,35	0,57
7	Karangasem	65,57	66,49	67,34	1,28
8	Buleleng	71,11	71,70	72,30	0,84
9	Denpasar	83,01	83,30	83,68	0,46
10	Provinsi Bali	74,30	74,77	75,38	0,82
11	Indonesia/Nasional	70,81	71,39	71,92	0,74
12	Peringkat Provinsi	5	5	5	-

Sumber Dokumen BPS Provinsi Bali

Realisasi pencapaian IPM Provinsi Bali adalah sebesar 75,38 poin, dibandingkan Tahun 2018 sebesar 74,77 poin mengalami kenaikan sebesar 0,61 poin. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (AHH), harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan standar hidup. Umur harapan hidup saat lahir mencapai 71,99 tahun pada Tahun 2019, lebih Panjang 0,31 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, rata-rata lama sekolah selama 8,84 tahun dengan harapan lama sekolah 13,27 tahun. Sementara, Standar Hidup, pengeluaran per kapita disesuaikan per tahun sebesar Rp14.146 ribu atau meningkat Rp260 ribu dibandingkan tahun sebelumnya.

IPM di Provinsi Bali pada saat ini berada pada urutan kelima untuk peringkat nasional (Indonesia) dari 34 provinsi yang ada di Indonesia.

2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi Prov/Kab/Kota di Bali

No	Uraian	Kabupaten/Kota		
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	PDRB (harga konstan 2010) (Triliun Rp.)			
	Jembrana	8,45	8,92	9,42
	Tabanan	14,14	14,95	15,79
	Badung	33,05	35,28	37,34
	Gianyar	17,01	18,03	19,05
	Klungkung	5,39	5,68	5,99
	Bangli	4,12	4,35	4,59
	Karangasem	10,01	10,55	11,13
	Buleleng	21,02	22,20	23,44
	Denpasar	32,11	34,17	36,16
	Provinsi Bali	144,93	154,11	162,78
	Indonesia	9.912,9	10.425,4	10.949,2
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)			
	Jembrana	5,28	5,59	5,56
	Tabanan	5,37	5,73	5,60
	Badung	6,08	6,74	5,83
	Gianyar	5,46	6,03	5,64
	Klungkung	5,32	5,50	5,44
	Bangli	5,31	5,50	5,47
	Karangasem	5,06	5,48	5,50
	Buleleng	5,38	5,62	5,55
	Denpasar	6,05	6,43	5,84
	Provinsi Bali	5,56	6,33	5,63
	Indonesia	5,07	5,17	5,02
3	Peringkat Provinsi (Nasional)			
	Jembrana	8	6	5
	Tabanan	5	4	4
	Badung	1	1	2
	Gianyar	3	3	3
	Klungkung	6	8	9
	Bangli	7	7	8
	Karangasem	9	9	7
	Buleleng	4	5	6
	Denpasar	2	2	1
4	Peringkat Nasional	13	6	13

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Bali

Selama kurun waktu Tahun 2017 - Tahun 2019 perekonomian Provinsi Bali mengalami peningkatan rata-rata 5,94%. Pada periode Tahun 2017 - Tahun 2018 pertumbuhan perekonomian Provinsi Bali sebesar 6,33% dan pada kurun waktu Tahun 2018- Tahun 2019 pertumbuhan perekonomian Provinsi Bali sebesar 5,63%. Pada tahun 2019, dalam skala provinsi laju pertumbuhan Kota Denpasar menempati urutan pertama dari laju pertumbuhan kota atau kabupaten lain dalam wilayah Provinsi Bali, sedangkan skala nasional laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali menempati urutan 13 dari laju pertumbuhan provinsi di wilayah Indonesia.

2.1.6. Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Provinsi Bali dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) inflasi ringan (*creeping inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) Inflasi Berat (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Dan (iv) Hiperinflasi (*Hyper Inflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Tingkat Inflasi Kota Denpasar dan Singaraja Tahun 2019 adalah sebesar 2,37% dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel.2.1.6. Tingkat Inflasi Kota Denpasar dan Singaraja

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Naik/Turun 2018-2019 (%)
1	Tingkat Inflasi Denpasar (%)	3,31	3,40	2,37	-1,03
2	Tingkat Inflasi Singaraja (%)	3,38	1,88	2,42	0,54
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	3,61	3,13	2,72	-0,41
4	Peringkat Provinsi (Denpasar)	2	1	2	-
5	Peringkat Nasional	-	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Bali

Tingkat inflasi di Kota Denpasar Tahun 2019 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 2,37%, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2018 adalah sebesar 3,40% atau lebih rendah dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2018. Dengan demikian inflasi Kota Denpasar masih lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi Nasional yang sebesar 2,72%.

2.1.7. Struktur Perekonomian Prov/Kab/Kota di Bali

Struktur perekonomian Kab/Kota di Bali dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel.2.1.7. PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

(dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Jembrana			
	1.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.430.151,28	2.666.600,01	2.893.019,17
	2. Pertambangan dan Penggalian	112.752,00	124.025,00	123.406,55
	3. Industri Pengolahan	587.342,01	625.411,49	667.264,54
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	17.451,51	18.645,00	19.359,19
	5.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10.522,00	10.863,32	11.124,37
	6. Konstruksi	1.159.390,00	1.326.865,00	1.417.691,89
	7.Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.208.468,00	1.311.004,00	1.424.148,01
	8. Transportasi dan Pergudangan	1.971.136,00	2.073.043,00	2.210.824,94
	9.Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.879.639,00	2.003.881,00	2.158.130,11
	10. Informasi dan Komunikasi	653.536,00	723.402,00	800.093,66
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	390.531,00	416.358,34	467.361,75
	12. Real Estate	588.319,00	608.680,00	629.050,74
	13. Jasa Perusahaan	94.288,00	101.909,00	108.386,01
	14.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	319.436,89	365.625,48	382.136,04
	15. Jasa Pendidikan	257.489,00	288.355,00	321.293,46
	16.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	263.242,27	290.834,00	316.953,17
	17. Jasa lainnya	172.787,00	187.577,00	212.085,05
	PDRB ADH Berlaku	12.116.480,97	13.143.078,65	14.162.328,65
2	Tabanan			
	1.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.488.404,98	4.848.712,30	5.166.027,51
	2. Pertambangan dan Penggalian	237.349,28	256.840,79	264.964,48
	3. Industri Pengolahan	1.169.418,06	1.253.638,55	1.345.773,35
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	23.950,97	25.503,06	26.892,41
	5.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	31.886,60	33.685,60	36.127,50
	6. Konstruksi	2.037.093,31	2.215.902,86	2.431.074,43
	7.Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.749.179,79	1.911.516,22	2.066.609,45
	8. Transportasi dan Pergudangan	329.153,31	358.170,02	384.522,04
	9.Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.493.931,26	4.887.865,15	5.245.369,16
	10. Informasi dan Komunikasi	1.132.249,88	1.229.587,30	1.308.246,85
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	745.318,14	782.413,86	875.592,99
	12. Real Estate	1.001.705,63	1.076.589,09	1.148.859,25
	13. Jasa Perusahaan	206.769,00	223.985,85	241.970,79

	14.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.470.370,02	1.634.722,07	1.808.170,26
	15. Jasa Pendidikan	377.145,85	414.692,67	451.917,93
	16.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	478.924,84	533.439,73	580.683,33
	17. Jasa lainnya	403.729,90	451.422,53	502.828,38
	PDRB ADH Berlaku	20.376.580,82	22.138.687,65	23.885.630,11
3	Badung			
	1.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.289.449,95	3.440.189,79	3.655.800,87
	2. Pertambangan dan Penggalian	153.151,94	160.428,43	168.722,78
	3. Industri Pengolahan	1.935.991,34	2.102.106,81	2.279.126,65
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	105.046,90	113.050,08	120.695,80
	5.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	118.399,91	123.236,42	131.212,49
	6. Konstruksi	4.367.436,83	5.020.409,87	5.517.282,89
	7.Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.303.196,78	3.646.377,22	4.003.287,03
	8. Transportasi dan Pergudangan	13.506.249,00	15.157.368,05	16.321.487,72
	9.Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	15.111.899,52	16.564.216,96	18.004.056,57
	10. Informasi dan Komunikasi	2.902.345,46	3.201.001,85	3.517.861,17
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.307.706,62	1.386.770,10	1.543.421,54
	12. Real Estate	1.635.471,48	1.800.528,53	1.973.191,23
	13. Jasa Perusahaan	353.555,17	386.100,77	417.671,99
	14.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.639.198,38	1.808.755,39	1.963.477,33
	15. Jasa Pendidikan	1.562.223,75	1.723.287,85	1.880.328,83
	16.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	663.408,91	727.759,75	805.009,29
	17. Jasa lainnya	388.921,72	437.693,22	491.949,05
	PDRB ADH Berlaku	52.343.653,65	57.799.281,08	62.794.583,23
4	Gianyar			
	1.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.049.512,54	3.313.617,63	3.433.792,01
	2. Pertambangan dan Penggalian	379.893,26	399.304,90	386.403,36
	3. Industri Pengolahan	2.837.309,58	3.049.167,76	3.327.913,26
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	30.556,79	32.669,78	35.105,15
	5.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	31.808,53	32.890,76	34.934,44
	6. Konstruksi	2.715.229,41	3.046.036,44	3.326.653,92
	7.Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.878.492,97	2.067.673,58	2.256.531,94
	8. Transportasi dan Pergudangan	230.831,72	249.666,31	267.022,27
	9.Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.186.758,84	6.814.048,16	7.437.040,13
	10. Informasi dan Komunikasi	1.495.067,59	1.630.676,45	1.750.880,91
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	959.811,04	1.012.728,77	1.119.327,27
	12. Real Estate	1.062.740,99	1.127.505,41	1.197.938,07
	13. Jasa Perusahaan	287.978,52	313.280,62	337.504,55
	14.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.253.122,06	1.377.783,16	1.480.014,15
	15. Jasa Pendidikan	573.542,16	635.860,50	681.134,52

	16.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	809.746,91	902.937,35	972.987,93
	17. Jasa lainnya	441.816,10	482.217,69	536.154,18
	PDRB ADH Berlaku	24.224.219,01	26.488.065,24	28.581.338,06
5	Klungkung			
	1.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.720.719,04	1.839.948,98	1.923.236,61
	2. Pertambangan dan Penggalian	280.186,41	295.279,94	294.596,41
	3. Industri Pengolahan	721.968,41	786.712,86	845.762,27
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	9.566,79	10.597,41	11.741,95
	5.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	15.711,39	16.521,00	17.965,03
	6. Konstruksi	731.071,42	807.587,50	892.884,02
	7.Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	623.897,65	689.573,75	748.554,99
	8. Transportasi dan Pergudangan	232.052,74	248.407,22	278.217,70
	9.Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.121.210,04	1.227.618,00	1.329.256,73
	10. Informasi dan Komunikasi	661.243,81	720.255,47	774.028,98
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	304.453,90	319.375,63	353.230,77
	12. Real Estate	185.822,51	198.175,01	212.602,72
	13. Jasa Perusahaan	75.981,59	82.235,82	87.619,04
	14.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	404.945,57	455.621,51	506.066,38
	15. Jasa Pendidikan	187.607,57	206.860,47	228.083,93
	16.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	333.058,11	364.394,24	400.072,19
	17. Jasa lainnya	175.122,17	193.726,99	215.906,74
	PDRB ADH Berlaku	7.784.619,12	8.462.891,80	9.119.826,45
6	Bangli			
	1.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.637.541,04	1.743.065,56	1.873.997,96
	2. Pertambangan dan Penggalian	126.754,09	129.261,75	128.041,91
	3. Industri Pengolahan	558.327,12	592.491,33	632.886,18
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	2.441,94	2.619,22	2.709,11
	5.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.651,72	4.105,54	4.289,14
	6. Konstruksi	468.255,24	520.953,12	562.388,81
	7.Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	601.405,49	662.653,81	714.297,60
	8. Transportasi dan Pergudangan	71.993,21	75.158,70	79.935,57
	9.Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	802.442,08	874.177,52	975.612,34
	10. Informasi dan Komunikasi	249.266,09	275.046,51	292.758,65
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	164.646,93	174.211,57	193.279,92
	12. Real Estate	185.426,58	202.501,55	215.141,70
	13. Jasa Perusahaan	33.399,41	36.099,65	38.129,53
	14.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	657.670,45	734.668,94	774.933,90
	15. Jasa Pendidikan	142.469,68	158.077,99	171.732,51
	16.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	87.545,02	98.095,71	106.933,38
	17. Jasa lainnya	183.337,19	209.987,68	232.346,25

	PDRB ADH Berlaku	5.976.573,29	6.493.176,17	6.999.414,46
7	Karangasem			
	1.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.776.101,90	4.002.763,67	4.209.683,98
	2. Pertambangan dan Penggalian	454.936,70	476.152,34	503.987,83
	3. Industri Pengolahan	578.949,63	631.557,26	676.529,81
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	14.399,00	15.673,74	16.882,36
	5.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	19.234,04	20.394,79	22.106,43
	6. Konstruksi	879.830,72	1.003.686,81	1.099.394,52
	7.Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	783.382,18	871.438,15	940.821,50
	8. Transportasi dan Pergudangan	2.547.870,10	2.795.204,58	3.028.978,58
	9.Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.633.116,02	1.801.214,81	2.011.222,99
	10. Informasi dan Komunikasi	456.715,38	502.110,08	544.074,04
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	647.050,74	685.749,92	752.889,05
	12. Real Estate	580.489,22	616.499,91	658.421,90
	13. Jasa Perusahaan	111.296,82	121.021,57	129.386,08
	14.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.148.712,10	1.249.592,40	1.311.101,16
	15. Jasa Pendidikan	353.870,21	393.794,24	440.261,96
	16.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	291.816,89	326.659,04	357.866,63
	17. Jasa lainnya	320.612,98	359.384,32	403.026,12
	PDRB ADH Berlaku	14.598.384,61	15.872.897,60	17.106.634,92
8	Buleleng			
	1.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.587.611,97	7.029.198,75	7.582.064,21
	2. Pertambangan dan Penggalian	334.929,64	338.319,70	322.778,64
	3. Industri Pengolahan	1.776.026,07	1.943.236,97	2.069.442,11
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	50.914,13	56.054,91	61.230,14
	5.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	41.608,26	42.544,26	43.776,54
	6. Konstruksi	2.536.543,69	2.850.612,34	3.172.301,38
	7.Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.465.573,79	3.844.872,18	4.198.272,81
	8. Transportasi dan Pergudangan	358.823,99	388.816,21	420.900,81
	9.Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.625.860,56	6.155.785,33	6.607.086,51
	10. Informasi dan Komunikasi	1.642.447,02	1.792.498,65	1.918.287,84
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.287.267,78	1.353.946,40	1.486.062,90
	12. Real Estate	1.373.673,46	1.454.221,67	1.535.726,20
	13. Jasa Perusahaan	203.744,83	220.713,29	236.800,70
	14.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.588.566,32	1.721.009,11	1.822.215,91
	15. Jasa Pendidikan	2.237.080,13	2.443.717,10	2.615.617,41
	16.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	647.025,22	708.011,69	772.766,37
	17. Jasa lainnya	561.058,26	597.484,76	644.011,10
	PDRB ADH Berlaku	30.318.755,13	32.941.043,33	35.509.341,58

9	Kota Denpasar			
	1.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.168.289,97	3.454.854,78	3.653.011,33
	2. Pertambangan dan Penggalian	-	-	-
	3. Industri Pengolahan	2.946.129,38	3.192.249,44	3.458.502,71
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	264.089,81	277.699,46	293.678,06
	5.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	119.726,08	122.840,08	132.674,79
	6. Konstruksi	4.330.118,01	5.011.091,18	5.639.686,52
	7.Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.377.317,33	4.801.264,64	5.282.912,71
	8. Transportasi dan Pergudangan	1.416.788,69	1.530.926,31	1.670.154,05
	9.Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	13.573.281,58	14.737.172,73	15.662.504,22
	10. Informasi dan Komunikasi	1.998.008,69	2.219.890,61	2.458.742,18
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	2.785.057,33	2.973.866,52	3.204.145,05
	12. Real Estate	1.927.101,72	2.042.048,64	2.159.322,43
	13. Jasa Perusahaan	870.190,50	957.717,32	1.017.176,80
	14.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.171.133,55	2.408.059,74	2.663.859,64
	15. Jasa Pendidikan	5.167.298,48	5.744.915,87	6.246.278,91
	16.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.049.970,92	1.182.750,17	1.303.739,48
	17. Jasa lainnya	671.252,84	753.207,78	830.095,75
	PDRB ADH Berlaku	46.835.754,88	51.410.555,29	55.676.484,64
10	Provinsi Bali			
	1.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	29.782.342,06	32.211.427,50	34.175.155,96
	2. Pertambangan dan Penggalian	2.108.907,83	2.207.439,51	2.199.874,98
	3. Industri Pengolahan	12.901.700,85	14.036.103,66	15.238.290,64
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	518.444,37	552.511,82	588.181,91
	5.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	386.523,20	399.124,03	426.615,73
	6. Konstruksi	19.047.144,94	21.958.085,76	24.323.373,94
	7.Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17.986.762,29	19.818.662,68	21.628.388,00
	8. Transportasi dan Pergudangan	20.546.737,36	22.777.123,69	24.568.918,47
	9.Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	50.040.101,13	54.544.991,94	58.747.107,76
	10. Informasi dan Komunikasi	11.190.396,06	12.332.511,81	13.399.411,56
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	8.590.045,32	9.070.918,92	10.041.625,65
	12. Real Estate	8.499.715,60	9.083.704,27	9.694.092,31
	13. Jasa Perusahaan	2.232.593,48	2.464.554,45	2.629.432,59
	14.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10.493.057,34	11.554.483,73	12.391.563,65
	15. Jasa Pendidikan	10.815.796,68	11.996.636,57	12.984.974,47
	16.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.561.049,36	5.076.069,84	5.485.769,14
	17. Jasa lainnya	3.334.537,45	3.707.506,10	4.074.727,28
	PDRB ADH Berlaku	213.035.855,32	233.791.856,28	252.597.504,04

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Bali

2.2. Kebijakan Keuangan

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik.

2.2.1. Arah dan Kebijakan Umum Bagian Pendapatan

Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran “horisontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak/non pajak (retribusi) untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:
 - a. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Rokok dan Pemanfaatan Air Permukaan.
 - b. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah, Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta, dan Bagian Laba Lembaga Keuangan Non Bank.
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Pendapatan Denda Retribusi,

Pendapatan dari Kerjasama Penyelenggaraan Diklat, Pemakaian Barang Milik Daerah, Lain-lain, dan Pendapatan Usaha BLUD.

2. Dana Perimbangan, terdiri dari:
 - a. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak merupakan bagian dana perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Bagi Hasil Sumberdaya Alam.
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer yang bersifat umum (block grant) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar Daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah. Jumlah DAU setiap daerah provinsi dipengaruhi oleh jumlah keseluruhan DAU untuk daerah provinsi, bobot daerah provinsi yang bersangkutan dan jumlah bobot dari seluruh daerah provinsi.
 - c. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari:
 - a. Hibah, terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah, Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri seperti sumbangan dari Dealer/Main Dealer Otomotif, PT Sarihusada dan PT. Jasa Raharja.
 - b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.

Peningkatan pendapatan daerah diupayakan melalui sumber-sumber pendapatan daerah baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan maupun lain-lain pendapatan yang sah. Adapun kebijakan yang dapat ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, yaitu :

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dilakukan melalui :

Dalam rangka meningkatkan PAD diupayakan melalui kebijakan penataan peraturan daerah di bidang Pendapatan Asli Daerah; intensifikasi; dan ekstensifikasi yaitu sebagai berikut :

 - a. Penataan Peraturan Daerah di bidang Pendapatan Asli Daerah

Dalam pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah) yaitu :

 - 1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
 - 2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
 - 3) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
 - 4) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan tertentu.

- b. Kebijakan intensifikasi dilakukan dengan kegiatan-kegiatan seperti :
- 1) Menata, mengkaji dan memperbaharui kebijakan yang dijadikan dasar hukum pemungutan Pendapatan Asli Daerah;
 - 2) Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi produk hukum kepada masyarakat wajib pajak dan wajib lainnya;
 - 3) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pegawai melalui pelatihan fungsional dan bimbingan teknis (bimtek);
 - 4) Meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait melalui Rapat Kerja Tim Pembina Samsat Provinsi Bali dengan pelaksana Samsat di seluruh Bali ;
 - 5) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui SAMSAT ONLINE;
 - 6) Mengembangkan akses pelayanan SAMSAT di wilayah Kabupaten/Kota se-Bali melalui SAMSAT Pembantu, Gerai SAMSAT, SAMSAT *Corner* dan SAMSAT Keliling;
 - 7) Melakukan inovasi pelayanan SAMSAT seperti Samdes Beryadnya, Pelayanan SMS *Centre* dan bekerja sama dengan BUMDes di Seluruh Desa se-Bali melalui fasilitasi kredit pembayaran pajak kendaraan bermotor.
- c. Kebijakan ekstensifikasi, dilakukan dengan kegiatan-kegiatan prioritas sebagai berikut :
- 1) Mengadakan peninjauan dan pendataan obyek yang akan diangkat;
 - 2) Membuat kajian-kajian terkait pengembangan potensi obyek pajak dan obyek lainnya;
 - 3) Mengadakan konsultasi khususnya mengenai potensi komponen-komponen PAD yang bisa dikembangkan; dan
 - 4) Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka menggali sumber-sumber PAD.
- d. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.
2. Peningkatan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah
- Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. Sedangkan peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah. Salah satu langkah yang dapat dilaksanakan dalam rangka optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi adalah dengan melalui peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan Kabupaten/Kota dalam mengoptimalkan bagi hasil dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

2.2.2. Arah dan Kebijakan Umum Bagian Belanja.

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola. Belanja daerah pada Tahun 2019 diarahkan untuk

dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan. Belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil).

Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
2. Prioritas Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, budaya, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.
3. Optimalisasi belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
4. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Transparansi dan Akuntabel setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemerintah daerah; dan klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sementara menurut kelompok belanja, belanja dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Belanja Tidak Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari: Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga; dan
2. Belanja Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang dianggarkan pada belanja SKPD berkenaan, terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal.

2.2.3. Arah dan Kebijakan Umum Bagian Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang diperoleh dari pelampauan target pendapatan dan efisiensi penggunaan anggaran.

Selisih Penerimaan Pembiayaan dengan Pengeluaran Pembiayaan diarahkan untuk menutupi kekurangan dana (defisit) baik untuk keperluan belanja langsung maupun belanja tidak langsung, sehingga antara pendapatan dengan belanja terjadi keseimbangan.

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
2. Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan, dengan jumlah yang dianggarkan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan.
3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.
4. Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.
6. Penerimaan piutang digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.

Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan dapat berupa Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Daerah, Pembayaran Utang Pokok serta Pemberian pinjaman daerah.

1. Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan yang ditetapkan dengan peraturan daerah, guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Peraturan daerah tersebut mencakup penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian

tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan; ditempatkan pada rekening tersendiri. Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

2. Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Pembayaran pokok utang digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Disamping juga untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan di daerah Bali dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan dapat dicapai. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, agenda prioritas, sasaran pembangunan nasional dan issue serta permasalahan yang ada, maka prioritas pembangunan daerah pada Tahun 2019 ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|--------------|--|
| Prioritas 1 | : Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran |
| Prioritas 2 | : Kesehatan |
| Prioritas 3 | : Pendidikan |
| Prioritas 4 | : Infrastruktur |
| Prioritas 5 | : Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana |
| Prioritas 6 | : Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| Prioritas 7 | : Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| Prioritas 8 | : Investasi, Industri Kecil, Koperasi dan UMKM |
| Prioritas 9 | : Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan |
| Prioritas 10 | : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola |

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

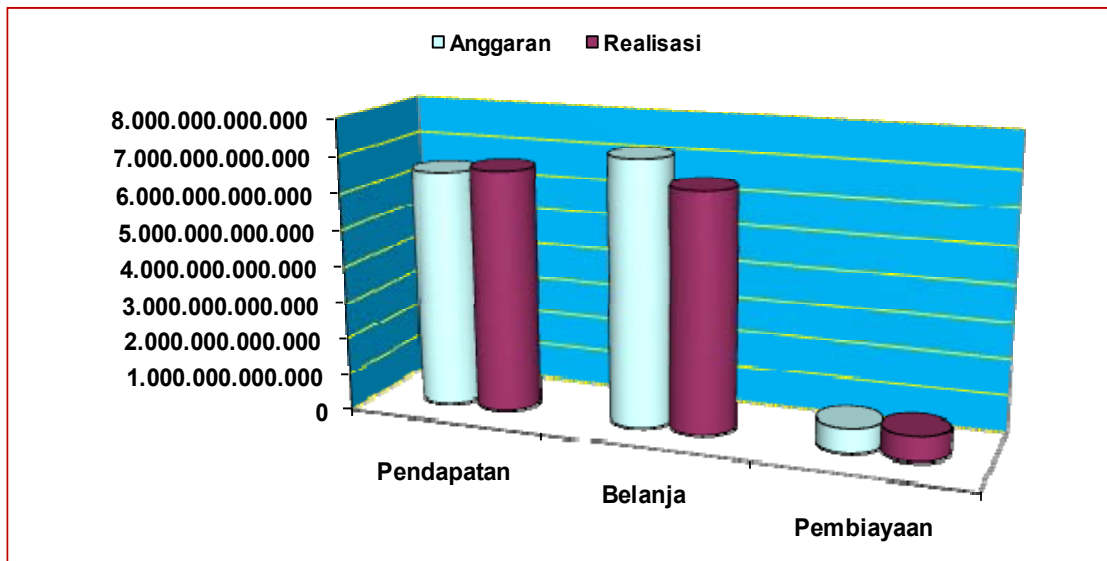
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Berikut disajikan gambaran realisasi APBD Tahun Anggaran 2019.

Tabel III.1
Realisasi APBD TA 2019

(dalam rupiah)

No	Uraian	2019			2018
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Realisasi
1.	Pendapatan	6.498.850.974.403,00	6.645.538.871.169,59	102,26	6.259.367.608.393,14
2.	Belanja dan Transfer	7.201.196.359.769,47	6.518.313.866.322,41	90,52	5.998.547.032.281,81
	Surplus (Defisit)	(702.345.385.366,47)	127.225.004.847,18	(18,11)	260.820.576.111,33
3.	Penerimaan Pembiayaan	702.345.385.366,47	704.590.522.601,47	100,32	441.914.809.255,14
4.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	390.000.000,00
5.	Pembiayaan Netto	702.345.385.366,47	704.590.522.601,47	100,32	441.524.809.255,14
	Silpa (Sikpa)	0,00	831.815.527.448,65	0,00	702.345.385.366,47

Grafik III.1

Pada bagian pendapatan terjadi peningkatan target dari Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp299.029.330.998,00 atau 4,82%. Sedangkan realisasinya mengalami peningkatan dari Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp386.171.262.776,45 atau 6,17%. Dari sisi belanja dan transfer terdapat efisiensi pengeluaran sebesar Rp605.483.814.462,51 atau 9,18%. Sedangkan realisasi belanja dan transfer mengalami peningkatan dari Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp519.766.834.040,60 atau 8,66%. Akibat dari pelampauan target pendapatan dan efisiensi belanja dari anggarannya, pada tahun 2019 Pemerintah Provinsi Bali mengalami surplus anggaran sebesar Rp127.225.004.847,18 dari defisit yang

direncanakan sebesar Rp702.345.385.366,47, bila dibandingkan dengan realisasi TA 2018 defisit sebesar Rp395.890.901.901,96 mengalami peningkatan sebesar Rp306.454.483.464,51 atau 77,41%. Realisasi Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp704.590.522.601,47 bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp441.524.889.255,14 mengalami peningkatan sebesar Rp263.065.713.346,33 atau 59,58%.

Terlampaiunya anggaran pendapatan dan efisiensi belanja serta pembiayaan menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp831.815.527.448,65. Saldo SiLPA ini akan memberikan fleksibilitas pengelolaan APBD untuk tahun mendatang.

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Secara umum tidak terdapat hambatan yang signifikan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Realisasi belanja Tahun Anggaran 2019 dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Bali sesuai dengan bidang, fungsi yang terkait adalah sebagai berikut :

Tabel III.2
Realisasi Belanja TA 2019 Sesuai Bidang dan Fungsi

(dalam rupiah)

REKENING	URUSAN/DINAS PELAKSANA	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI BELANJA	%
1	2	3	4	5
01.00	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	2.553.146.994.470,58	2.206.165.328.028,96	86,41
01.01	PENDIDIKAN	1.291.558.997.908,56	1.200.847.187.463,16	92,98
01.01.01	DINAS PENDIDIKAN	1.291.558.997.908,56	1.200.847.187.463,16	92,98
01.02	KESEHATAN	616.227.809.297,00	544.554.048.143,13	88,37
01.02.01	DINAS KESEHATAN	616.227.809.297,00	544.554.048.143,13	88,37
01.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	524.561.564.968,00	362.379.765.728,68	69,08
01.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	524.561.564.968,00	362.379.765.728,68	69,08
01.04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	9.110.539.047,13	7.980.053.661,87	87,59
01.04.01	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	9.110.539.047,13	7.980.053.661,87	87,59
01.05	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	40.295.297.716,89	38.367.783.977,41	95,22
01.05.01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	40.295.297.716,89	38.367.783.977,41	95,22
01.06	SOSIAL	28.397.573.244,00	26.971.585.845,00	94,98
1.05.1.08.02.	DINAS SOSIAL	28.397.573.244,00	26.971.585.845,00	94,98
01.07	BENCANA	28.732.212.289,00	25.064.903.209,71	87,24
1.07.1.07.01.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	28.732.212.289,00	25.064.903.209,71	87,24
02.00	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR	316.222.658.209,97	285.454.627.483,78	90,27
02.01	TENAGA KERJA	38.892.791.305,88	34.138.653.787,83	87,78
02.01.01	DINAS TENAGA KERJA DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	38.892.791.305,88	34.138.653.787,83	87,78

REKENING	URUSAN/DINAS PELAKSANA	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI BELANJA	%
1	2	3	4	5
02.02	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	9.421.525.748,75	8.894.964.402,88	94,41
02.02.01	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	9.421.525.748,75	8.894.964.402,88	94,41
02.03	PANGAN	12.416.494.350,13	11.457.885.279,08	92,28
02.03.01	DINAS KETAHANAN PANGAN	12.416.494.350,13	11.457.885.279,08	92,28
02.04	PERTANAHAN	49.600.000,00	37.828.900,00	76,27
02.04.01	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	49.600.000,00	37.828.900,00	76,27
02.05	LINGKUNGAN HIDUP	16.439.560.476,00	15.321.515.738,69	93,20
02.05.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	16.439.560.476,00	15.321.515.738,69	93,20
02.06	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8.912.459.746,00	7.637.966.763,00	85,70
02.06.01	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL, DAN KELUARGA BERENCANA	8.912.459.746,00	7.637.966.763,00	85,70
02.07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	24.751.803.348,38	23.337.161.255,20	94,28
02.07.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	24.751.803.348,38	23.337.161.255,20	94,28
02.08	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	322.536.000,00	266.595.695,00	82,66
02.08.01	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL, DAN KELUARGA BERENCANA	322.536.000,00	266.595.695,00	82,66
02.09	PERHUBUNGAN	29.658.843.017,00	27.718.778.145,60	93,46
02.09.01	DINAS PERHUBUNGAN	29.658.843.017,00	27.718.778.145,60	93,46
02.10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	23.968.342.575,00	22.224.928.139,50	92,73
02.10.01	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	23.968.342.575,00	22.224.928.139,50	92,73
02.11	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	19.946.333.683,50	17.788.877.561,11	89,18
02.11.01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	19.946.333.683,50	17.788.877.561,11	89,18
02.12	PENANAMAN MODAL	15.353.574.150,13	13.454.783.534,88	87,63
02.12.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	15.353.574.150,13	13.454.783.534,88	87,63
02.13	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	24.627.450.696,00	21.646.920.898,04	87,90
02.13.01	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	24.627.450.696,00	21.646.920.898,04	87,90
02.14	STATISTIK	640.380.200,00	613.455.850,00	95,80
02.10.01	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	640.380.200,00	613.455.850,00	95,80
02.15	PERSANDIAN	790.482.340,00	715.953.279,00	90,57
02.10.01.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	790.482.340,00	715.953.279,00	90,57

REKENING	URUSAN/DINAS PELAKSANA	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI BELANJA	%
1	2	3	4	5
02.16	KEBUDAYAAN	74.503.558.594,20	65.065.563.035,97	87,33
02.16.01	DINAS KEBUDAYAAN	74.503.558.594,20	65.065.563.035,97	87,33
02.17	PERPUSTAKAAN	15.108.540.679,00	14.726.923.899,00	97,47
02.17.01	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	15.108.540.679,00	14.726.923.899,00	97,47
02.18	KEARSIPAN	418.381.300,00	405.871.319,00	97,01
02.17.01	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	418.381.300,00	405.871.319,00	97,01
03.00	URUSAN PILIHAN	222.594.121.719,01	197.979.446.191,02	88,94
03.01	KELAUTAN DAN PERIKANAN	22.297.388.484,00	19.202.115.696,03	86,12
03.01.01	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	22.297.388.484,00	19.202.115.696,03	86,12
03.02	PARIWISATA	18.164.319.488,88	15.833.730.699,79	87,17
03.02.01	DINAS PARIWISATA	18.164.319.488,88	15.833.730.699,79	87,17
03.03	PERTANIAN	90.086.801.165,13	76.568.376.327,75	84,99
03.03.01	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	66.438.176.717,00	54.468.809.928,27	81,98
03.03.02	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	23.648.624.448,13	22.099.566.399,48	93,45
03.04	KEHUTANAN	36.420.728.243,00	34.491.632.402,99	94,70
03.04.01	DINAS KEHUTANAN	36.420.728.243,00	34.491.632.402,99	94,70
03.05	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	36.420.728.243,00	34.491.632.402,99	94,70
03.05.2.01.01.	DINAS TENAGA KERJA DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	36.420.728.243,00	34.491.632.402,99	94,70
03.06	PERDAGANGAN	1.273.686.786,00	1.208.972.572,99	94,92
03.06.3.07.01.	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	1.273.686.786,00	1.208.972.572,99	94,92
03.07	PERINDUSTRIAN	17.772.489.309,00	16.082.782.788,48	90,49
03.07.3.07.01.	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	17.772.489.309,00	16.082.782.788,48	90,49
03.08	KETRANSMIGRASIAN	157.980.000,00	100.203.300,00	63,43
03.08.2.01.01.	DINAS TENAGA KERJA DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	157.980.000,00	100.203.300,00	63,43
04.00	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	4.158.624.372.496,91	3.862.069.791.541,26	92,87
04.01	PEMERINTAH DAERAH	3.355.327.476.299,05	3.164.342.206.339,53	94,31
04.01.01	PPKD	3.301.988.971.445,20	3.111.426.807.227,53	94,23
04.01.02	DPRD	47.359.600.000,00	47.043.087.984,00	99,33
04.01.03	KEPALA DAERAH	5.978.904.853,85	5.872.311.128,00	98,22
04.02	PERENCANAAN	31.896.314.963,75	28.203.504.576,18	88,42
04.02.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	31.896.314.963,75	28.203.504.576,18	88,42

REKENING	URUSAN/DINAS PELAKSANA	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI BELANJA	%
1	2	3	4	5
04.03	KEUANGAN SUB PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	31.896.314.963,75	28.203.504.576,18	88,42
04.03.01	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	47.944.741.496,00	43.281.494.151,63	90,27
04.04	KEUANGAN SUB PENGELOLA PENDAPATAN	188.132.493.444,45	174.168.789.376,26	92,58
04.04.01	BADAN PENDAPATAN DAERAH	188.132.493.444,45	174.168.789.376,26	92,58
04.05	KEPEGAWAIAN	21.032.713.734,00	18.378.413.881,22	87,38
04.05.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	21.032.713.734,00	18.378.413.881,22	87,38
04.06	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	67.201.058.645,00	53.082.447.757,37	78,99
04.06.01	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	67.201.058.645,00	53.082.447.757,37	78,99
04.07	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	16.125.111.324,00	13.045.168.821,89	80,90
4.07.4.02.01.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	16.125.111.324,00	13.045.168.821,89	80,90
04.08	SEKRETARIAT DPRD	163.853.750.000,00	129.337.069.934,11	78,93
04.08.01	SEKRETARIAT DPRD	163.853.750.000,00	129.337.069.934,11	78,93
04.09	SEKRETARIAT DAERAH	216.394.568.399,16	190.031.044.619,57	87,82
04.09.01	SEKRETARIAT DAERAH	216.394.568.399,16	190.031.044.619,57	87,82
04.10	INSPEKTORAT	30.896.412.884,00	29.894.734.712,16	96,76
04.10.01	INSPEKTORAT	30.896.412.884,00	29.894.734.712,16	96,76
04.11	KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT	9.278.814.511,50	8.816.058.030,00	95,01
04.11.01	BADAN PENGHUBUNG	9.278.814.511,50	8.816.058.030,00	95,01
04.12	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	10.540.916.796,00	9.488.859.341,34	90,02
04.12.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	10.540.916.796,00	9.488.859.341,34	90,02
JUMLAH		7.201.196.359.769,47	6.518.313.866.322,41	90,52

3.3. Prosedur Penyusunan Informasi Kinerja Keuangan OPD

Penyusunan informasi kinerja keuangan merupakan bagian dari prosedur penyusunan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan menggunakan sistem akuntansi yang terdiri dari Sistem Akuntansi SKPD (SA SKPD) yang dilaksanakan pada masing-masing SKPD dan Sistem Akuntansi SKPKD (SA SKPKD) yang dilaksanakan pada SKPKD/PPKD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali). Laporan keuangan yang dihasilkan SA SKPD akan dikonsolidasikan dengan laporan keuangan yang dihasilkan SA SKPKD sehingga menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Untuk memberikan keyakinan atas keandalan informasi keuangan, dalam penyusunan laporan keuangan telah dilakukan rekonsiliasi antara pembukuan SKPD dengan PPKD setiap bulannya, dan rekonsiliasi antara pembukuan PPKD dengan B IX/rekening koran Kas Umum Daerah.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan. Pemerintah Provinsi Bali selaku entitas pelaporan terdiri dari 39 (tiga puluh sembilan) entitas akuntansi yang meliputi 38 (tiga puluh delapan) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 1 (satu) Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)/PPKD yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Sehingga pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Bali merupakan konsolidasian dari laporan keuangan entitas-entitas akuntansi tersebut di atas.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali adalah Basis Akrual untuk pengakuan pada Laporan Neraca, Operasional, Perubahan Ekuitas. Basis Akrual adalah pendapatan, beban dan kewajiban diakui pada saat terjadinya transaksi atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah bukan pada saat kas diterima/dibayar oleh kas daerah.

Basis akrual tercermin pada pendapatan-LO dan beban dalam Laporan Operasional, pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca. Basis akrual mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun LRA disusun berdasarkan basis kas. Artinya bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, demikian pula belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Periode akuntansi yang digunakan adalah jangka waktu satu tahun anggaran dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019. Periode berkenaan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.

Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

4.4.1. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan

Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode

- a. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
- b. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
 - 1) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
 - 2) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
 - 3) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - 4) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
 - 5) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
 - 6) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - 7) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
- c. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
 - 1) indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
 - 2) indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh Gubernur dan DPRD.
- d. Untuk memenuhi tujuan umum, laporan keuangan menyediakan informasi entitas dalam hal:
 - 1) Aset;
 - 2) Kewajiban;
 - 3) Ekuitas;
 - 4) Pendapatan-LRA;
 - 5) Belanja;
 - 6) Transfer;
 - 7) Pembiayaan;
 - 8) Saldo Anggaran Lebih;
 - 9) Pendapatan-LO;
 - 10) Beban; dan
 - 11) Arus Kas.
- e. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.
- f. Entitas pelaporan menyajikan informasi tambahan untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam

pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rincian mengenai output entitas dan outcomes dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan.

4.4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Pendapatan terdiri dari Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan LO diakui pada saat:

- a. timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau
- b. pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi yang sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui dengan ketentuan :

- a. diterima di rekening Kas Umum Daerah;
- b. diterima di Kas atau rekening BLUD berdasarkan penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP2BP) oleh BUD/Kuasa BUD sesuai Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP3BP) yang diajukan oleh BLUD;
- c. adanya menerbitkan SPB oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SP2B yang disampaikan Dinas Pendidikan untuk sisa dana BOS di SMAN dan SMKN yang sebelumnya belum diakui sebagai SiLPA; dan
- d. dalam transaksi online atau non tunai, dimana wajib pajak atau wajib retribusi membayar melalui transfer, pengakuan pendapatan-LRA diakui sesuai tanggal transfer diterima di RKUD, dan penerbitan SKPD atau SKRD dilakukan sesuai dengan tanggal dalam bukti transfer yang sekaligus digunakan dasar bahwa wajib pajak/wajib retribusi telah memenuhi kewajibannya.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan atau pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan kedalam beberapa alternatif:

- a. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan-LO diakui ketika dokumen penetapan beserta kelengkapannya tersebut telah disahkan/ditandatangani oleh pejabat berwenang sehubungan pekerjaan jasa telah dilaksanakan atau barang telah diserahkan. Pendapatan-LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan dan diterima di kas daerah.
- b. Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan.
 - 1) Pendapatan LO dan Pendapatan LRA ketika uang diterima di kas daerah dari wajib pajak.
 - 2) Jika saat penelitian/pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, dan jika ditemukan lebih bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO. Sedangkan pendapatan-LRA diakui ketika uang diterima di kas daerah.

- c. Pengakuan pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.
- d. Pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu, maka pengakuan pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA diakui pada saat pembayaran telah diterima di kas daerah.
- e. Jika pada akhir tahun terdapat penerimaan yang masih ada di Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Kasir Penerimaan, atau Juru Pungut, akan dicatat sebagai Kas di Bendahara Penerimaan dan Pendapatan-LO.
- f. Khusus pendapatan-LO pada SKPD yang menerapkan PPK BLUD seperti Rumah Sakit diakui pada saat pasien sudah mendapatkan pelayanan, dengan ketentuan jika pasien menggunakan jaminan kesehatan maka besarnya pendapatan-LO dan piutang disesuaikan dengan hasil verifikasi penjamin sampai batas waktu penerbitan laporan keuangan, dan jika laporan keuangan telah diterbitkan, diakui sebagai koreksi surplus (defisit) tahun lalu pada LPE dan akun ekuitas.
- g. Hibah berupa aset non kas diakui sebagai Pendapatan-LO ketika barang/jasa telah diterima disertai dokumen hibah seperti berita acara serah terima barang/jasa atau naskah hibah telah ditandatangani kedua belah pihak, jika dokumen hibah belum ditandatangani cukup diungkapkan dalam CaLK.
- h. Pendapatan Transfer-LO baik dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Lainnya diakui bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Pada akhir periode pelaporan jika kas yang diterima di kas daerah kurang dari yang seharusnya sesuai penetapan definitif oleh pejabat yang berwenang diakui sebagai piutang transfer dan pendapatan transfer-LO.
- i. Mutasi aset antar SKPD pada Pemerintah Provinsi Bali tidak diakui sebagai pendapatan- LO, melainkan dicatat sebagai penambah aset dan penambah ekuitas bagi SKPD penerima.

Pengukuran

- a. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- c. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- e. Pendapatan hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- f. Hibah aset tetap yang tidak diketahui nilainya, diukur dengan menggunakan nilai wajar atau harga taksiran aset sejenis.

4.4.3. Kebijakan Akuntansi Beban Dan Belanja

Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyebutnya dengan belanja, sedangkan Laporan Operasional (LO) menyebut dengan beban. LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan

anggaran berbasis kas, sedangkan LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*).

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Beban dan belanja diklasifikasi menurut:

- a. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban lain-lain seperti beban tak terduga.
- b. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi pada pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.
- c. Klasifikasi beban dan belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk pemerintah daerah, belanja sekretariat DPRD, belanja sekretariat daerah, belanja dinas pemerintah provinsi dan lembaga teknis daerah.

Beban diakui pada saat:

- a. Timbulnya kewajiban
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah (LS) atas kas di Bendahara Pengeluaran (UP/GU).
- b. Terjadinya konsumsi aset
Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah seperti pemakaian persediaan.
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

Pengeluaran yang memberikan manfaat lebih dari satu periode pelaporan atau memberikan manfaat melewati akhir periode pelaporan diakui sebagai beban yang menjadi kewajiban periode pelaporan berdasarkan alokasi sistematis, dan sisa pengeluaran yang belum dibebankan pada periode pelaporan diakui sebagai belanja dibayar dimuka.

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan SP2D untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS).
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (uang persediaan) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban pengeluaran disahkan oleh pengguna anggaran. Dan penerbitan SP2D atas pemakaian uang persediaan (UP) atau diterimanya SPJ Fungsional oleh BUD/Kuasa BUD.
- c. Belanja yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah seperti Belanja yang bersumber dari Dana BLUD diakui sebagai Belanja berdasarkan penerbitan SP2BP oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SP3BP yang diajukan oleh BLUD.

- d. Belanja yang bersumber dari Sisa Dana BOS pada SMAN/SMKN yang belum dilaporkan sebagai SiLPA, diakui sebagai belanja berdasarkan SPB yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SP2B yang diajukan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pengukuran

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan baik yang telah dibayar maupun telah menimbulkan kewajiban.

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS) dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran menggunakan uang persediaan setelah mendapatkan pengesahan dari fungsi perbendaharaan.

Penyajian

Beban diajikan dalam Laporan Operasional sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan belanja langsung dan tidak langsung atau Belanja Operasi.

4.4.4. Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

- a. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.
- b. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta Bantuan Keuangan.

Pengakuan

- a. Pendapatan Transfer-LO dan Pendapatan Transfer-LRA diakui pada saat diterimanya transfer di rekening Kas Daerah.
- b. Beban transfer dan belanja transfer diakui pada saat keluar dari Kas Daerah berdasarkan Keputusan Kepala Daerah atau dokumen lainnya.
- c. Jika sampai akhir tahun anggaran jumlah yang ditransfer dari Kas Daerah lebih kecil dari penetapan transfer maka kekurangannya diakui sebagai Hutang Transfer dan Beban Transfer.
- d. Jika sampai akhir tahun anggaran jumlah yang ditransfer dari Kas Daerah lebih besar dari penetapan transfer masuk berdasarkan Keputusan Gubernur maka diakui sebagai Piutang Kelebihan Transfer dan pengurang Beban Transfer.

Pengukuran

- a. Pendapatan Transfer-LO dan Pendapatan Transfer-LRA diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah ditambah sisa hak tagih kepada pemberi transfer berdasarkan penetapan pemberi transfer untuk Pendapatan Transfer-LO.
- b. Beban Transfer atau Belanja Transfer diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah ditambah sisa kewajiban kepada penerima transfer berdasarkan penetapan pemberi transfer untuk Beban Transfer.

4.4.5. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran

pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pengakuan

- a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

4.4.6. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Persediaan (UP) yang wajib dipertanggungjawabkan dan disajikan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran.

Pengukuran.

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.4.7. Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang salah satu aset yang cukup penting bagi pemerintah daerah, baik dari sudut pandang potensi kemanfaatannya maupun dari sudut pandang akuntabilitasnya.

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

- a. Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas:
 - 1) Piutang Pajak Daerah;
 - 2) Piutang Retribusi Daerah ;
 - 3) Piutang Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - 4) Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.

b. Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas:

- 1) Pemberian Pinjaman;
- 2) Penjualan;
- 3) Kemitraan;
- 4) Pemberian fasilitas.

c. Transfer antar Pemerintahan

Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas:

1) Piutang Dana Bagi Hasil;

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

2) Piutang Dana Alokasi Umum;

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu

3) Piutang Dana Alokasi Khusus;

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemerintah Daerah adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat

4) Piutang Dana Otonomi Khusus;

5) Piutang Transfer Lainnya;

Piutang transfer lainnya diakui apabila:

- a) dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
- b) dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

6) Piutang Bagi Hasil;

7) Piutang Transfer Antar Daerah;

Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah penerima yang bersangkutan.

8) Piutang Kelebihan Transfer.

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan

transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya.

d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas:

- 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
- 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.

Kualitas piutang sebagai dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang, ditetapkan sebesar:

- a. Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
- b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Pengukuran

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

- a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut :

a. Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

b. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

c. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d. Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- a. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- b. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;
- c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut :

- a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

4.4.8. Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah.
- b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi.
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
- e. Persediaan dalam kondisi rusak, usang, hilang, atau kadaluarsa (*expired*) direklas ke aset lain-lain berdasarkan berita acara reklasifikasi dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, serta selanjutnya diusulkan penghapusan dengan Keputusan Gubernur.

Penyajian barang persediaan sebagai bagian dari aset lancar, sedangkan persediaan yang rusak atau kadaluarsa (*expired*) namun belum dihapuskan disajikan dalam aset lain-lain didukung dengan Berita Acara Reklasifikasi.

Persediaan diakui

- a. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- b. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Persediaan dicatat dengan metode perpetual atau metode periodik.

a. Metode Perpetual

Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama OPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat, seperti persediaan obat-obatan di Rumah Sakit dan bahan material untuk pemeliharaan aset tetap di dinas PU. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian barang persediaan dihitung berdasarkan pencatatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan dengan kewajiban melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada setiap akhir periode pelaporan.

b. Metode Periodik

Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan OPD, seperti: persediaan ATK. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai persediaan sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

4.4.9. Kebijakan Akuntansi Investasi

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya antara lain:

a. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

- 1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.
- 2) Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

a. Metode biaya

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar

biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b. Metode ekuitas

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentasi kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk deviden yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan.

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
- 2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- 4) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Pengukuran

Pengukuran investasi berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan pengukuran investasi untuk masing-masing jenis.

a. Pengukuran Investasi Jangka Pendek:

- 1) Investasi dalam bentuk Surat Berharga:
 - a) Apabila terdapat nilai perolehan, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
 - b) Apabila tidak terdapat biaya perolehan, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.
- 2) Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 (enam) bulan.

b. Pengukuran investasi jangka panjang:

- 1) Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
- 2) Investasi nonpermanen:
 - a) investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - b) investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - c) penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
- 3) Investasi nonpermanen dalam bentuk dana bergulir dinilai:
 - a) Dana bergulir dengan kelola sendiri:
 - (1) Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
 - (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - (c) Penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (d) Penerima dana kooperatif.

- (2) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - (b) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau (4) Penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.
- (3) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a) Umur dana bergulir lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c) Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau (4) Penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.
- (4) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - b) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun dan/atau
 - c) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - d) Penerima dana tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - e) Penerima dana mengalami kesulitan bangkrut dan/atau meninggal dunia; dan/atau
 - f) Penerima dana mengalami musibah (force majeure).
- b) Dana bergulir dengan executing agency;
 - (1) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya menyetorkan pengembalian dana bergulir sesuai dengan perjanjian dengan pemerintah daerah; dan/atau
 - (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
 - (2) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan Lembaga Keuangan lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan; dan/atau
 - (b) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (c) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya bangkrut; dan/atau
 - (d) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya mengalami musibah (force majeure).
- c) Dana bergulir dengan channelling agency
 - (1) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau (2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
 - (2) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - (b) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.
 - (3) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (b) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.

(4) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:

- (a) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun; dan/atau
- (b) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
- (c) Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
- (d) Penerima dana bergulir bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
- (e) Penerima dana bergulir mengalami musibah (force majeure).

Besaran Penyisihan dana bergulir Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:

- 1) Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
 - 2) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
 - 3) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - 4) Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- c. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- d. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

4.4.10. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, disewakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- a. Tanah
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- b. Peralatan dan Mesin
Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- c. Gedung dan Bangunan
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- e. Aset Tetap Lainnya
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai termasuk aset tetap renovasi.
- f. Konstruksi Dalam Pengerjaan
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan/konstruksi namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak ketiga dalam operasi normal entitas;
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan atau disewakan;
- f. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- g. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pengukuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai persediaan/aset lainnya.

a. Komponen Biaya

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, perencanaan, pengawasan, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian/ perolehan.

b. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

c. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

d. Pertukaran Aset

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

e. Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

f. Kapitalisasi Aset Tetap

- 1) Kriteria batasan minimal jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi.
- 2) Kapitalisasi aset tetap diberlakukan baik terhadap aset yang diperoleh pada saat dan/atau setelah Peraturan Gubernur ini diundangkan, maupun terhadap aset tetap yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya.
- 3) Khusus aset tetap yang diperoleh melalui tahapan perencanaan, maka biaya yang berhubungan dengan perencanaan dengan output berupa Gambar, DED, Master Plan, dan sejenisnya, tidak ada nilai kapitalisasinya yang berarti seluruh nilainya masuk sebagai bagian dari aset tetap yang akan dibangun yang disajikan dalam Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

g. Pengeluaran Setelah Perolehan Awal

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Kriteria seperti pada paragraph diatas dan/atau suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.

h. Penambahan masa manfaat

Terhadap pemeliharaan aset tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7 tersebut di atas, maka penambahan masa manfaat karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi disajikan dengan ketentuan masa manfaat aset setelah dilakukan *overhaul* dan renovasi setinggi-tingginya sama dengan masa manfaat aset tetap perolehan baru.

Dasar nilai perhitungan penyusutan aset tetap setelah *overhaul* dan renovasi adalah nilai buku pada saat aset tetap selesai *overhaul* dan renovasi ditambah nilai *overhaul* dan renovasi aset

tetap, dibagi dengan masa manfaat aset tetap setelah overhaul dan renovasi, dimana masa manfaat aset tetap setelah overhaul dan renovasi sama dengan sisa masa manfaat aset tetap sebelum overhaul dan renovasi ditambah tambahan masa manfaat akibat overhaul dan renovasi. Dengan tetap memperhatikan hal-hal berikut:

a. Pengukuran berikutnya terhadap aset setelah pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali (*appraisal*), maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap, dan akun ekuitas.

b. Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Metode penyusutan dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan formula harga perolehan dibagi dengan perkiraan manfaat ekonomis tanpa nilai sisa. Aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut, kecuali hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

- 1) Penghitungan beban dan akumulasi penyusutan aset tetap dilakukan setiap bulan dan pelaporannya dilakukan secara periodik disesuaikan dengan kebutuhan pelaporan triwulanan, semesteran dan tahunan.
- 2) Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan pembulatan hingga satuan Rupiah terkecil tanpa nilai sisa.
- 3) Penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tetap.
- 4) Pencatatan Penyusutan Aset Tetap dalam Neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan Aset Tetap tersebut dihapuskan.
- 5) Aset Tetap Lainnya berupa buku, terbitan, barang perpustakaan, hewan, dan tanaman, tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
- 6) Aset tetap yang diperoleh melalui tahapan perencanaan, maka biaya yang berhubungan dengan perencanaan dengan output berupa Gambar, DED, Master Plan, dan sejenisnya yang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun belum dibangun konstruksinya, direklasifikasi ke aset lain-lain dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, untuk selanjutnya diusulkan penghapusan dengan Keputusan Gubernur.
- 7) Jika terdapat pengadaan/pekerjaan aset tetap yang sudah dikeluarkan pembayaran uang muka atau termin pembayaran untuk tahun tertentu dan tidak dilanjutkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kemudian, maka atas aset tetap dimaksud direklasifikasi ke aset lain-lain dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, untuk selanjutnya dapat diusulkan penghapusan dengan Keputusan Gubernur.

c. Aset Bersejarah

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

d. Penghentian dan Pelepasan

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

4.4.11. Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut biasanya kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Konstruksi secara substansi telah selesai di kerjakan; dan
- b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- c. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
- b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan kelokasi pelaksanaan konstruksi;

d. Biaya penyewaan sarana dan peralatan;
 e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.
 Biaya-biaya yang dapat didistribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:

- a. Asuransi;
- b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
- c. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Metode alokasi biaya yang digunakan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
- c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.

Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi force majeure atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi forcemajeur, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi sebagai biaya pinjaman.

4.4.12. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup:

- a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
- d. Sumber dana cadangan; dan
- e. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Dana cadangan masuk kedalam bagian dari aset. Dana cadangan dapat diklasifikasikan atau dirinci lagi menurut tujuan pembentukannya.

Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.

Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

4.4.13. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

a. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

2) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

2) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).

3) Bangun Guna Serah - BGS (*Build, Operate, Transfer - BOT*)

Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

4) Bangun Serah Guna- BSG (*Build, Transfer, Operate - BTO*)

Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

c. Aset Tidak Berwujud (ATB)

Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

1) Goodwill

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

- 2) Hak Paten atau Hak Cipta
Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah daerah. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.
 - 3) Royalti
Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.
 - 4) Software
Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. Software yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas software berkenaan.
 - 5) Lisensi
Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
 - 6) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang
Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.
 - 7) Aset Tak Berwujud Lainnya
Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.
 - 8) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan
Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset - work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.
Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:
 - a) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
 - b) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
 - d. Aset Lain-Lain
Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.
- Pengukuran
- 1) Tagihan Jangka Panjang

- a) Tagihan Penjualan Angsuran
Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
 - b) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).
- 2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga
- a) Sewa
Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
 - b) Kerjasama Pemanfaatan (KSP)
Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
 - c) Bangun Guna Serah - BGS (*Build, Operate, Transfer - BOT*)
BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.
 - d) Bangun Serah Guna - BSG (*Build, Transfer, Operate - BTO*)
BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
- 3) Aset Tidak Berwujud
- Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut. Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:
- a) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
 - b) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - (1) Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - (2) Biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - (3) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.
- Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:
- a) Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
 - b) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
 - c) Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
- Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

4) Aset Lain-lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

5) Amortisasi

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Amortisasi dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus selama 5 tahun tanpa nilai sisa. Metode amortisasi yang digunakan harus menggambarkan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, digunakan metode garis lurus. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode.

4.4.14. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban antara lain:

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- 1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan
- 2) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- 3) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

a. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.

b. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.

c. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*)

Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.

d. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*)

Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal pemerintah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

Pengukuran

Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal necara. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban.

Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek.

a. Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contoh: Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

b. Pengukuran Utang Transfer

Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Pengukuran Utang Bunga

Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

d. Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.

e. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. misal pemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

f. Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya

Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh: biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Kewajiban atau utang jangka panjang pemerintah daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang pemerintah daerah, yaitu:

- a. Utang yang tidak diperjualbelikan
Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari *World Bank*.
- b. Utang yang diperjualbelikan
Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

4.4.15. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

Akun ini terdiri dari:

- a. Ekuitas
- b. Ekuitas SAL
Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit - LRA.
- c. Ekuitas untuk Dikonsolidasikan
Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat reciprocal account untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup antara lain Rekening Koran PPKD.

4.4.16. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan

Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan peyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Ada beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah sebabnya akan ada perbedaan perlakuan terhadap beberapa kesalahan tersebut.

Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:

- a. Kesalahan tidak berulang
Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis:
 - 1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun

- pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban
- 2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda
 - b. Kesalahan berulang
Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

4.4.17. Kebijakan Akuntansi Laporan Keuangan Konsolidasian

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

- a. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
- b. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- c. Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.
- d. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Provinsi Bali yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan. Secara lebih rinci Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Bali pada TA 2019 diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

TA 2019			TA 2018
Anggaran	Realisasi	%	Realisasi

5.1.1 Pendapatan

	6.498.850.974.403,00	6.645.538.871.169,59	102,26	6.259.367.608.393,14
--	-----------------------------	-----------------------------	---------------	-----------------------------

Pendapatan Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2019 serta yang direalisasikan pada TA 2018. Jumlah tersebut di atas menunjukkan Pendapatan Daerah TA 2019 mengalami kenaikan dari TA 2018 sebesar Rp 386.171.262.776,45 atau 6,17%, dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah	3.762.785.679.903,00	4.023.156.314.134,59	106,93	3.718.499.635.346,14
Pendapatan Transfer	2.730.461.294.500,00	2.616.498.279.035,00	95,83	2.535.479.973.047,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	5.604.000.000,00	5.884.278.000,00	100,54	5.388.000.000,00
Jumlah	6.498.850.974.403,00	6.645.538.871.169,59	102,26	6.259.367.608.393,14

Uraian masing-masing jenis pendapatan tersebut diungkapkan sebagai berikut ini.

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

	3.762.785.679.903,00	4.023.156.314.134,59	106,92	3.718.499.635.346,14
--	-----------------------------	-----------------------------	---------------	-----------------------------

Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2019 serta yang direalisasikan pada TA 2018. Jumlah tersebut di atas menunjukkan realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2019 mengalami kenaikan dari TA 2018 sebesar Rp 305.121.607.475,06 atau 8,19%, dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Pajak Daerah	3.235.176.956.048,00	3.463.996.393.584,00	107,07	3.230.732.169.802,50
Pendapatan Retribusi Daerah	49.803.474.650,00	33.841.782.964,00	67,95	40.241.780.029,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	170.885.580.850,00	171.076.247.197,42	100,11	170.219.137.368,48
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	306.919.668.355,00	354.241.890.389,17	115,57	277.306.548.146,16
Jumlah	3.762.785.679.903,00	4.023.156.314.134,59	106,92	3.718.499.635.346,14

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

	3.235.176.956.048,00	3.463.996.393.584,00	107,07	3.230.732.169.802,50
--	-----------------------------	-----------------------------	---------------	-----------------------------

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Pajak Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2019 serta yang direalisasikan pada TA 2018. Jumlah tersebut di atas menunjukkan realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2019 mengalami peningkatan dari TA 2018 sebesar Rp 233.264.223.781,50 atau 7,22%, dengan rincian sebagai berikut:

Pajak Kendaraan Bermotor	1.420.000.000.000,00	1.560.964.729.126,00	109,93	1.434.941.880.650,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.160.200.000.000,00	1.256.433.265.300,00	108,29	1.143.576.816.200,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan	401.000.000.000,00	398.841.411.716,00	99,46	389.200.457.073,00

Bermotor				
Pajak Air Permukaan	3.600.000.000,00	3.669.053.842,00	101,92	3.375.680.274,00
Pajak Rokok	250.376.956.048,00	244.087.933.600,00	97,49	259.637.335.605,50
Jumlah	3.235.176.956.048,00	3.463.996.393.584,00	107,07	3.230.732.169.802,50

Rincian masing-masing anggaran dan realisasi dari Pendapatan pada Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di atas dapat dilihat pada *lampiran 1*.

Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok tersebut diatas dipungut berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah :

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

49.803.474.650,00 33.841.782.964,00 67,95 40.241.780.029,00

Pendapatan Retribusi Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2019 serta yang direalisasikan pada TA 2018. Jumlah tersebut di atas menunjukkan bahwa Pendapatan Retribusi Daerah TA 2019 mengalami penurunan dari TA 2018 sebesar Rp 6.399.997.065,00 atau 15,90%, dengan rincian sebagai berikut:

Retribusi Jasa Umum:	5.643.437.500,00	5.462.442.697,00	96,79	4.740.715.700,00
- Retribusi Pelayanan Kesehatan	5.575.000.000,00	5.462.442.697,00	97,98	4.740.715.700,00
- Retribusi Persampahan	68.437.500,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Jasa Usaha:	25.631.537.150,00	17.390.557.867,00	67,85	20.791.169.329,00
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	23.650.598.700,00	15.222.810.367,00	64,37	18.669.740.329,00
- Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	252.000.000,00	121.950.000,00	48,39	154.650.000,00
- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	198.910.000,00	128.776.000,00	64,74	154.785.500,00
- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.530.028.450,00	1.917.021.500,00	125,29	1.811.993.500,00
Retribusi Perizinan Tertentu	18.528.500.000,00	10.988.782.400,00	59,31	14.709.895.000,00
- Retribusi Izin Usaha Perikanan	532.500.000,00	12.985.000,00	2,44	191.650.000,00
- Retribusi Izin Trayek	0,00	0,00	0,00	396.295.000,00
- Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	17.796.000.000,00	10.802.747.400,00	60,70	14.121.950.000,00
- Retribusi Perizinan SIPI dan SIKPI	200.000.000,00	173.050.000,00	86,53	0,00
Jumlah	49.803.474.650,00	33.841.782.964,00	67,95	40.241.780.029,00

Pendapatan Retribusi Daerah dikelola oleh masing-masing OPD yang merupakan unit penghasil. Pendapatan Retribusi Daerah dibagi menjadi 3 jenis yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum yang diatur melalui Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Provinsi Bali No 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
2. Retribusi Jasa Usaha yang diatur melalui Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha; dan
3. Retribusi Perizinan Tertentu yang diatur melalui Perda Provinsi Bali No 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Perda 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu.

5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

170.885.580.850,00 171.076.247.197,42 100,11 170.219.137.368,48

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2019 serta yang direalisasikan pada TA 2018. Jumlah tersebut di atas menunjukkan bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2019 mengalami peningkatan dari TA 2018 sebesar Rp857.109.828,94 atau 0,50%, dengan rincian sebagai berikut:

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan atas Penyertaan Modal pada Perusahaan BUMD	168.977.493.300,00	169.751.089.072,42	100,46	168.203.465.518,48
- Perusahaan Daerah	955.000.000,00	0,00	0,00	0,00
- PT. Bank BPD Bali	166.381.407.300,00	168.927.224.490,42	101,53	167.272.768.440,48
- PT. Bali Semesta Mandiri	141.086.000,00	0,00	0,00	0,00
- PT. Jamkrida Bali Mandara	1.500.000.000,00	823.864.582,00	54,92	930.697.078,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta	1.908.087.550,00	1.325.158.125,00	98,32	2.015.671.850,00
- PT. Asuransi Bangun Askrida	399.671.550,00	286.428.260,00	71,67	365.128.582,00
- Rumah Sakit Puri Maharaja	1.508.416.000,00	1.038.729.865,00	68,86	1.650.543.268,00
Jumlah	170.885.580.850,00	171.076.247.197,42	100,11	170.219.137.368,48

5.1.1.1.4 Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

306.919.668.355,00 354.241.890.389,17 115,42 277.306.548.146,16

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2019 serta yang direalisasikan pada TA 2018. Jumlah tersebut di atas menunjukkan bahwa Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2019 mengalami peningkatan dari TA 2018 sebesar Rp76.935.342.243,01 atau 27,74%, dengan rincian:

Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	509.760.000,00	3.719.917.546,00	729,74	957.315.795,00
Hasil Penjualan Aset Lainnya	1.500.000,00	9.175.000,00	611,67	0,00
Jasa Giro	7.500.000.000,00	13.987.416.309,13	186,50	7.897.498.564,58
Bunga Deposito	38.025.000.000,00	53.405.625.000,00	140,45	38.910.416.666,54
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	37.246.250,00	106.794.672,00	286,73	56.090.186,00
Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00	0,00	104.517.359,77
Denda Pajak	58.935.161.500,00	55.204.579.825,00	93,67	50.185.169.600,00
Denda Retribusi	48.898.000,00	183.759.979,00	375,80	30.529.734,00
Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	0,00	1.200.033.700,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian	20.122.191.600,00	2.220.144.031,00	11,03	13.674.679.086,47
Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	36.250.101.000,00	32.297.547.000,00	89,10	11.734.495.000,00
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	8.354.629.775,00	15.363.290.965,71	183,89	19.731.471.499,55
Pendapatan dari Pengelolaan BLUD	135.136.782.680,00	174.804.816.763,33	129,35	130.852.644.158,25
Lain - Lain PAD yang Sah Lainnya	1.998.397.550,00	1.738.789.598,00	87,01	3.171.720.496,00
Pendapatan dari Penjualan Hasil Produksi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	306.919.668.355,00	354.241.890.389,17	115,42	277.306.548.146,16

Uraian dari rincian objek pendapatan tersebut diungkapkan sebagai berikut ini.

5.1.1.1.4.1 Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan

	509.760.000,00	3.719.917.546,00	729,74	957.315.795,00
<p>Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2019 serta yang direalisasikan pada TA 2018. Jumlah tersebut di atas menunjukkan Pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan TA 2019 mengalami peningkatan dari TA 2018 sebesar Rp2.762.601.751,00 atau 288,58%, dengan rincian sebagai berikut:</p>				
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	494.760.000,00	3.678.416.546,00	743,47	895.600.795,00
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	15.000.000,00	41.501.000,00	276,67	61.715.000,00
Jumlah	509.760.000,00	3.719.917.546,00	729,74	957.315.795,00

Rincian Pendapatan Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan pada masing - masing OPD dapat dilihat pada lampiran 2. Rincian Pendapatan Penjualan Aset Daerah tersebut juga diungkapkan dalam Surplus Penjualan Aset Non Lancar dan Defisit Penjualan Aset Non Lancar dalam Catatan atas Laporan Operasional pada poin 5.3.3.1 dan 5.3.3.3

5.1.1.1.4.2 Hasil Penjualan Aset Lainnya

	1.500.000,00	9.175.000,00	611,67	0,00
<p>Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Hasil Penjualan Aset Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2019 serta yang direalisasikan pada TA 2018. Jumlah tersebut diatas menunjukkan Pendapatan Hasil Penjualan Aset Lainnya TA 2019 mengalami peningkatan dari TA 2018 sebesar Rp 9.175.000,00 atau 100,00%.</p>				

5.1.1.1.4.3 Jasa Giro

	7.500.000.000,00	13.987.416.309,13	186,50	7.897.498.564,58
<p>Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Jasa Giro yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2019 serta yang direalisasikan pada TA 2018. Jumlah tersebut diatas menunjukkan Pendapatan Jasa Giro TA 2019 mengalami peningkatan dari TA 2018 sebesar Rp6.089.917.744,55 atau 77,11%. Pendapatan Jasa Giro tersebut merupakan pendapatan atas kepemilikan dana Pemerintah Provinsi Bali dalam bentuk rekening giro selama TA 2019.</p>				

5.1.1.1.4.4 Bunga Deposito

	38.025.000.000,00	53.405.625.000,00	140,45	38.910.416.666,54
<p>Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Bunga Deposito yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2019 serta yang direalisasikan pada TA 2018. Jumlah tersebut di atas menunjukkan Pendapatan Bunga Deposito TA 2019 mengalami peningkatan dari TA 2018 sebesar Rp14.495.208.333,46 atau 37,25%.</p>				

5.1.1.1.4.5 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

	37.246.250,00	106.794.672,00	286,73	56.090.186,00
<p>Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2019 serta yang direalisasikan pada TA 2018. Jumlah tersebut di atas menunjukkan Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah TA 2019 mengalami peningkatan dari TA 2018 sebesar Rp50.704.486,00 atau 90,40%. Jumlah tersebut diatas merupakan pengembalian atas Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Provinsi Bali sebesar Rp41.800.000,00 dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Biro Aset Sekretariat Daerah Provinsi Bali sebesar Rp64.994.672,00.</p>				

5.1.1.1.4.6 Pendapatan Denda Pajak

	58.935.161.500,00	55.204.579.825,00	93,67	50.185.169.600,00
--	--------------------------	--------------------------	--------------	--------------------------

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Denda Pajak yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2019 serta yang direalisasikan pada TA 2018. Jumlah tersebut di atas menunjukkan Pendapatan Denda Pajak TA 2019 mengalami peningkatan dari TA 2018 sebesar Rp5.019.410.225,00 atau 10,00% dengan rincian realisasi sebagai berikut:

Pendapatan Denda Pajak kendaraan bermotor	57.678.028.300,0	53.721.915.525,00	93,14	49.324.684.800,00
Pendapatan Denda Pajak Bea Balik Nama Kendaraan bermotor	1.257.133.200,00	1.482.664.300,00	117,94	860.452.400,00
Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	0,00	0,00	0,00	32.400,00
Jumlah	58.935.161.500,00	55.204.579.825,00	93,67	50.185.169.600,00

5.1.1.1.4.7 Pendapatan Denda Retribusi

	48.898.000,00	183.759.979,00	375,80	30.529.734,00
--	----------------------	-----------------------	---------------	----------------------

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Denda Retribusi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2019 serta yang direalisasikan pada TA 2018. Jumlah tersebut di atas menunjukkan Pendapatan Denda Retribusi TA 2019 mengalami penurunan dari TA 2018 sebesar Rp153.230.245,00 atau 501,90% dengan rincian realisasi sebagai berikut:

Denda Retribusi Jasa Usaha	47.558.000,00	178.157.491,00	374,61	29.212.734,00
Denda Retribusi Perizinan tertentu	1.340.000,00	5.602.488,00	418,10	1.317.000,00
Jumlah	48.898.000,00	183.759.979,00	375,80	30.529.734,00

5.1.1.1.4.8 Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan

	0,00	1.200.033.700,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------------------	-------------	-------------

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan yang direalisasikan pada TA 2019 yang merupakan setoran pencairan jaminan pelaksanaan putus kontrak pada Dinas PU.

Jumlah	0,00	1.200.033.700,00	0,00	0,00
---------------	-------------	-------------------------	-------------	-------------

5.1.1.1.4.9 Pendapatan dari Pengembalian

	20.122.191.600,00	2.220.144.031,00	11,03	13.674.679.086,47
--	--------------------------	-------------------------	--------------	--------------------------

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan dari Pengembalian yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2019 serta yang direalisasikan pada TA 2018. Jumlah tersebut di atas menunjukkan Pendapatan dari Pengembalian TA 2019 mengalami penurunan dari TA 2018 sebesar Rp11.454.535.055,47 atau 83,76%, dengan rincian realisasi sebagai berikut:

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	116.894.600,00	130.380.208,00	111,54	311.978.728,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	25.836.600,00	28.136.605,00	108,90	61.055.500,00
Pendapatan dari Pengembalian Pembay. Belanja Barang dan Jasa	142.554.800,00	165.451.189,97	116,06	4.512.624.877,58
Pendapatan dari Pengembalian	271.685.300,00	126.362.790,43	46,51	151.188.076,96

Pembay. Belanja Modal				
Pendapatan dari Pengembalian Pembay. Belanja Bantuan Keuangan	19.412.824.800,00	1.680.227.260,98	8,66	4.982.177.190,31
Pendapatan dari Kelebihan Pengembalian	1.326.850,00	3.260.190,62	245,71	117.574.313,62
Pendapatan dari Pengembalian Belanja Transfer	63.040.075,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Taspen	81.851.075,00	86.325.786,00	105,47	38.080.400,00
Pendapatan dari Pembebanan Kerugian Daerah	6.177.500,00	0,00	0,00	3.500.000.000,00
Jumlah	20.122.191.600,00	2.220.144.031,00	11,03	13.674.679.086,47

5.1.1.1.4.10 Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

36.250.101.000,00	32.297.547.000,00	89,10	11.734.495.000,00
--------------------------	--------------------------	--------------	--------------------------

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2019 serta yang direalisasikan pada TA 2018. Jumlah tersebut di atas menunjukkan Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan TA 2019 mengalami peningkatan dari TA 2018 sebesar Rp6.20.563.052.000,00 atau 175,24%.

5.1.1.1.4.11 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah

8.354.629.775,00	15.363.290.965,71	183,89	19.731.471.499,55
-------------------------	--------------------------	---------------	--------------------------

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2019 serta yang direalisasikan pada TA 2018. Jumlah tersebut di atas menunjukkan Pendapatan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah TA 2019 mengalami penurunan dari TA 2018 sebesar Rp4.368.180.533,84 atau 22,14%.

5.1.1.1.4.12 Pendapatan dari Pengelolaan BLUD

135.136.782.680,00	174.804.816.763,33	129,35	130.852.644.158,25
---------------------------	---------------------------	---------------	---------------------------

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan dari Pengelolaan BLUD yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2019 serta yang direalisasikan pada TA 2018. Jumlah tersebut di atas menunjukkan Pendapatan dari Pengelolaan BLUD TA 2019 mengalami peningkatan dari TA 2018 sebesar Rp43.952.172.605,08 atau 33,59%, dengan rincian realisasi sebagai berikut:

UPTD. Rumah Sakit Bali Mandara	35.000.000.000,00	55.694.715.658,06	159,13	32.730.642.237,54
UPTD Rumah Sakit Mata Bali Mandara	40.629.714.280,00	56.299.222.027,82	138,57	39.734.332.791,14
UPTD Rumah Sakit Jiwa	25.500.000.000,00	23.408.160.776,22	91,80	22.795.660.922,85
UPTD Pengelolaan Air Limbah	13.500.000.000,00	14.787.978.982,86	109,54	14.580.642.445,61
UPTD Pengelolaan Air Minum	20.507.068.400,00	24.614.739.318,37	120,03	21.011.365.761,11
Jumlah	135.136.782.680,00	174.804.816.763,33	129,35	130.852.644.158,25

5.1.1.1.4.13 Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya

	1.998.397.550,00	1.738.789.598,00	87,01	3.171.720.496,00
<p>Jumlah tersebut merupakan Pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2019 serta yang direalisasikan pada TA 2018. Jumlah tersebut di atas menunjukkan Pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Lainnya TA 2019 mengalami penurunan dari TA 2018 sebesar Rp1.432.930.898,00 atau 45,18%, dengan rincian realisasi sebagai berikut:</p>				
Penjualan Tiket Bus	579.813.500,00	526.304.000,00	90,77	1.080.418.000,00
Dana Penguatan Modal (DPM)	6.080.050,00	10.885.598,00	179,04	61.326.532,00
Denda Pengembalian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	3.078.600,00
Buku Perpustakaan				
Dana Kompensasi Pemanfaatan Tanah Hutan Raya	1.412.504.000,00	1.201.600.000,00	85,07	2.011.600.000,00
Denda Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	15.297.364,00
Jumlah	1.998.397.550,00	1.738.789.598,00	87,01	3.171.720.496,00

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

	2.730.461.294.500,00	2.616.498.279.035,00	95,83	2.535.479.973.047,00
<p>Jumlah tersebut merupakan Pendapatan dari Transfer yang dianggarkan berdasarkan Perpres No 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 dan direalisasikan pada TA 2019 serta yang direalisasikan pada TA 2018. Jumlah tersebut di atas menunjukkan Pendapatan Transfer TA 2019 mengalami peningkatan dari TA 2018 sebesar Rp81.018.305.988,00 atau 3,20%. Pendapatan Transfer terdiri dari :</p>				
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	2.662.026.888.500,00	2.548.063.873.035,00	95,72	2.493.979.973.047,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	68.434.406.000,00	68.434.406.000,00	100,00	41.500.000.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten / Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	2.730.461.294.500,00	2.616.498.279.035,00	95,83	2.535.479.973.047,00

5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

	2.662.026.888.500,00	2.548.063.873.035,00	95,72	2.493.979.973.047,00
<p>Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2019 serta yang direalisasikan pada TA 2018. Jumlah tersebut di atas menunjukkan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan TA 2019 mengalami penurunan dari TA 2018 sebesar Rp54.083.899.988,00 atau 2,17% terdiri dari :</p>				
Dana Bagi Hasil Pajak	185.994.009.500,00	126.532.557.975,00	68,03	182.554.549.512,00
Dana Alokasi Umum	1.325.847.555.000,00	1.325.847.555.000,00	100,00	1.268.585.388.000,00
Dana Alokasi Khusus	1.150.185.324.000,00	1.095.683.760.060,00	79,85	1.042.840.035.535,00
Jumlah	2.662.026.888.500,00	2.548.063.873.035,00	95,72	2.493.979.973.047,00

5.1.1.2.1.1 Bagi Hasil Pajak

	185.994.009.500,00	126.532.557.975,00	68,03	182.554.549.512,00
<p>Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2019 serta yang direalisasikan pada TA 2018. Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2019 mengalami penurunan dari TA 2018 sebesar Rp56.021.991.537,00 atau 30,69% terdiri dari :</p>				

Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	3.411.651.000,00	2.321.129.100,00	68,04	3.670.947.361,00
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21	178.847.549.000,00	120.473.173.834,00	67,36	175.334.969.151,00
Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau	3.734.809.500,00	3.738.255.041,00	100,00	3.548.633.000,00
Jumlah	185.994.009.500,00	126.532.557.975,00	68,03	182.554.549.512,00

5.1.1.2.1.2 Dana Alokasi Umum

1.325.847.555.000,00 1.325.847.555.000,00 100,00 1.268.585.388.000,00

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Dana Alokasi Umum yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2019 serta yang direalisasikan pada TA 2018. Pendapatan Dana Alokasi Umum TA 2019 mengalami peningkatan dari TA 2018 sebesar Rp57.262.167.000,00 atau 4,51%.

5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Khusus

1.150.185.324.000,00 1.095.683.760.060,00 94,59 1.042.840.035.535,00

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Dana Alokasi Khusus yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2019 serta yang direalisasikan pada TA 2018. Pendapatan Dana Alokasi Khusus TA 2019 mengalami peningkatan dari TA 2018 sebesar Rp52.843.724.525,00 atau 5,07%, terdiri dari :

Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1.080.230.258.000,00	1.039.821.919.237,00	95,26	991.668.448.160,00
BOS Satuan Pendidikan Provinsi Bali	843.861.959.000,00	811.058.279.000,00	96,11	767.923.800.000,00
Tambahan Penghasilan Guru (PNSD)	2.442.000.000,00	2.409.945.000,00	98,69	405.000.000,00
Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM	5.468.830.000,00	4.890.428.038,00	89,42	4.838.614.900,00
Tunjangan Profesi Guru	219.466.573.000,00	213.007.217.000,00	97,06	215.447.647.000,00
Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.830.896.000,00	1.600.547.620,00	87,42	1.410.761.260,00
BOS Kesehatan	2.583.000.000,00	2.278.502.579,00	88,21	1.642.625.000,00
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya	4.577.000.000,00	4.577.000.000,00	100,00	0,00
Dana Alokasi Khusus Fisik	69.955.066.000,00	55.861.840.823,00	72,07	51.171.587.375,00
DAK Reguler	46.654.169.000,00	36.278.974.270,00	72,07	10.024.485.999,00
1) Pendidikan	9.105.149.000,00	9.062.018.180,00	97,37	1.719.279.000,00
2) Kesehatan	5.937.499.000,00	5.800.245.090,00	97,69	8.305.206.999,00
3) Pertanian	11.000.000.000,00	7.700.000.000,00	55,88	0,00
4) Kelautan dan Perikanan	1.580.786.000,00	395.196.500,00	14,40	0,00
5) Jalan	19.030.735.000,00	13.321.514.500,00	66,13	0,00
DAK Penugasan	23.300.897.000,00	19.582.866.553,00	72,07	41.147.101.376,00
1) Pendidikan	8.661.522.000,00	8.601.501.593,00	97,37	18.147.859.876,00
2) Kesehatan	7.989.760.000,00	5.750.225.660,00	97,69	
2) Jalan	0,00	0,00	0,00	17.453.512.000,00
3) Irigasi	4.228.252.000,00	2.959.776.400,00	55,88	2.399.271.000,00
4) Energi	0,00	0,00	0,00	976.101.500,00
5) Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.421.363.000,00	2.271.362.900,00	14,40	2.170.357.000,00

Jumlah	1.150.185.324.000,00	1.095.683.760.060,00	95,26	1.042.840.035.535,00
---------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------	-----------------------------

5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

	68.434.406.000,00	68.434.406.000,00	100,00	41.500.000.000,00
--	--------------------------	--------------------------	---------------	--------------------------

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya berupa Dana Insentif Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2019 serta yang direalisasikan pada TA 2018. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya TA 2019 mengalami peningkatan dari TA 2018 sebesar Rp26.934.406.000,00 atau 64,90%, dengan rincian sebagai berikut:

Pendidikan	12.565.582.000,00	12.565.582.000,00	100,00	8.000.000.000,00
Kesehatan	12.054.618.000,00	12.054.618.000,00	100,00	9.500.000.000,00
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	9.785.362.000,00	9.785.362.000,00	100,00	7.250.000.000,00
Inovasi Pelayanan Publik (perencanaan)	8.985.653.000,00	8.985.653.000,00	100,00	7.500.000.000,00
Kesejahteraan	12.619.782.000,00	12.619.782.000,00	100,00	0,00
Infrastruktur	12.423.409.000,00	12.423.409.000,00	100,00	9.250.000.000,00
Jumlah	68.434.406.000,00	68.434.406.000,00	100,00	41.500.000.000,00

5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

	5.604.000.000,00	5.884.278.000,00	105,00	5.388.000.000,00
--	-------------------------	-------------------------	---------------	-------------------------

Jumlah tersebut diatas merupakan Pendapatan Hibah dari PT. Jasa Raharja (Persero) sesuai dengan NPHD antara PT Jasa Raharja dan Gubernur Bali Nomor P/07/SP/2019 dan 932 Tahun 2019 tentang Hibah Uang kepada Pemprov Bali untuk Mendukung Operasional Kantor Bersama Samsat. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2019 mengalami peningkatan dari TA 2018 sebesar Rp496.278.000,00 atau 9,21% terdiri dari :

Pendapatan Hibah dari Pemerintah	0,00	250.000.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	5.604.000.000,00	5.634.278.000,00	100,54	5.388.000.000,00

5.1.2. Belanja Daerah

	5.005.329.707.432,27	4.403.625.560.597,87	87,98	4.160.554.856.427,50
--	-----------------------------	-----------------------------	--------------	-----------------------------

Jumlah tersebut merupakan Belanja Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2019 serta yang direalisasikan pada TA 2018. Belanja Daerah TA 2019 mengalami peningkatan dari TA 2018 sebesar Rp243.070.704.170,37 atau 5,84%, dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Operasi	4.232.759.907.784,31	3.845.688.340.311,65	90,86	3.719.657.194.081,10
Belanja Modal	760.471.523.139,96	556.754.502.359,04	73,21	440.710.162.346,40
Belanja Tak Terduga	12.098.276.508,00	1.182.717.927,18	9,78	187.500.000,00
Jumlah	5.005.329.707.432,27	4.403.625.560.597,87	87,98	4.160.554.856.427,50

5.1.2.1 Belanja Operasi

	4.232.759.907.784,31	3.845.688.340.311,65	90,86	3.719.657.194.081,10
--	-----------------------------	-----------------------------	--------------	-----------------------------

Jumlah tersebut merupakan Belanja Operasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2019 serta yang direalisasikan pada TA 2018. Belanja Operasi TA 2019 mengalami peningkatan dari TA 2018 sebesar Rp126.031.146.230,55 atau 3,39%, dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Pegawai	1.699.658.149.841,27	1.590.611.064.913,75	93,58	1.590.437.517.662,00
Belanja Barang dan Jasa	1.387.675.908.224,04	1.195.894.560.327,09	86,18	999.366.106.630,68
Belanja Subsidi	10.000.000.000,00	9.903.628.000,00	99,04	9.566.400.000,00
Belanja Hibah	1.125.995.849.719,00	1.040.184.587.070,81	92,38	1.095.268.169.788,42
Belanja Bantuan Sosial	9.430.000.000,00	9.094.500.000,00	96,44	25.019.000.000,00
Jumlah	4.232.759.907.784,31	3.845.688.340.311,65	90,86	3.719.657.194.081,10

Rincian Belanja Operasi pada masing-masing OPD dapat dilihat pada *lampiran 3*.

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

1.699.658.149.841,27 1.590.611.064.913,75 93,58 1.590.437.517.662,00

Jumlah tersebut merupakan Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2019 serta yang direalisasikan pada TA 2018. Belanja Pegawai TA 2019 mengalami peningkatan dari TA 2018 sebesar Rp173.547.251,75 atau 0,01%, dengan rincian sebagai berikut:

Gaji dan Tunjangan	1.038.601.994.647,81	1.019.368.278.070,00	98,15	1.019.748.248.218,00
Tambahan Penghasilan PNS	544.145.082.828,61	463.021.845.750,00	85,09	471.090.289.157,00
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	16.654.178.519,85	16.611.950.000,00	99,75	15.162.775.000,00
Insentif Pemungutan Pajak Daerah	70.001.451.946,00	66.384.805.965,00	94,83	62.886.986.957,00
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	3.694.511.495,00	2.403.941.948,00	65,07	2.493.039.836,00
Honorarium PNS	12.108.919.050,00	9.130.160.000,00	75,40	8.915.023.850,00
Honorarium Non PNS	882.754.392,00	678.614.376,75	76,87	920.360.400,00
Honorarium Pengelolaan Dana BOS	81.000.000,00	81.000.000,00	100,00	81.000.000,00
Belanja Pegawai BLUD	11.267.546.962,00	10.879.823.804,00	96,56	8.289.438.744,00
Belanja Pegawai PNS dan Non PNS	2.153.460.000,00	1.992.395.000,00	92,52	792.105.500,00
Belanja Pegawai BOS	67.250.000,00	58.250.000,00	86,62	58.250.000,00
Jumlah	1.699.658.149.841,27	1.590.611.064.913,75	93,58	1.590.437.517.662,00

Rincian Belanja Pegawai pada masing-masing OPD dapat dilihat pada *lampiran 4*.

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

1.387.675.908.224,04 1.195.894.560.327,09 86,18 999.366.106.630,68

Jumlah tersebut merupakan Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2019 serta yang direalisasikan pada TA 2018. Belanja Barang dan Jasa TA 2019 mengalami peningkatan dari TA 2018 sebesar Rp196.528.453.696,41 atau 19,67%, dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Bahan Pakai Habis	68.204.861.735,70	62.407.252.467,00	91,50	43.721.943.113,00
Belanja Bahan/Material	40.597.842.069,20	35.268.710.595,20	86,87	17.863.859.551,00
Belanja Jasa Kantor	351.664.471.521,34	323.176.111.044,05	91,90	241.214.933.476,18
Belanja Premi Asuransi	1.349.300.000,00	6.450.000,00	0,48	963.903.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16.313.951.722,52	11.970.083.110,00	73,37	11.833.955.841,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	16.785.416.232,00	14.794.403.340,60	88,14	12.108.367.376,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/Parkir	14.032.625.000,00	10.334.829.858,00	73,65	5.527.196.362,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.403.230.309,00	1.366.041.000,00	56,84	1.696.420.390,00

Belanja Sewa Alat Berat	26.500.000,00	26.500.000,00	100,00	0,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.363.824.570,00	7.045.898.200,00	95,68	3.666.043.600,00
Belanja Makanan dan Minuman	50.952.475.118,00	43.937.918.766,00	86,23	34.107.863.680,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	2.006.595.000,00	1.704.774.600,00	84,96	1.329.115.000,00
Belanja Pakaian Kerja	2.063.684.000,00	1.801.838.500,00	87,31	967.937.300,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.891.883.000,00	7.524.770.750,00	95,35	3.050.554.100,00
Belanja Perjalanan Dinas	253.391.448.159,00	193.400.137.774,00	76,32	150.802.466.227,00
Belanja Perjalanan Pindah Tugas	0,00	0,00	84,32	2.951.100,00
Belanja Pemeliharaan	43.439.606.257,28	38.049.644.812,33	87,59	33.793.448.700,91
Belanja Jasa Konsultansi	19.163.205.732,00	14.005.803.627,24	73,09	6.688.713.537,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	606.000.000,00	442.600.000,00	73,04	892.000.000,00
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	939.537.384,00	701.749.587,00	74,69	982.961.688,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	310.418.745.604,00	272.553.545.056,44	87,80	246.872.052.641,95
Belanja Barang dan Jasa BLUD	135.482.397.560,00	123.231.722.125,23	90,96	160.599.154.051,56
Belanja Pemeliharaan Kesehatan	632.400.000,00	89.171.165,00	14,10	103.425.690,00
Belanja Pendidikan Bagi Siswa Miskin/Yatim Piatu	95.000.000,00	91.829.000,00	96,66	86.393.000,00
Belanja Jasa Audit	39.500.000,00	39.300.000,00	99,49	0,00
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	33.069.440.000,00	26.397.247.500,00	79,82	17.171.688.526,00
Belanja Sewa Tanah	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Bahan Praktek Latihan	1.019.888.350,00	1.007.581.140,00	98,79	1.522.382.830,00
Belanja Bahan Material Praktek/Praktikum	100.000.000,00	98.910.900,00	98,91	1.101.353.659,08
Belanja Keperluan Rumah Tangga KDH/Wakil KDH	780.000.000,00	776.004.440,00	99,49	651.338.000,00
Belanja Pengadaan Barang Dibawah Kapitalisasi Aset	724.078.900,00	543.730.969,00	75,09	44.233.190,00
Belanja Jasa Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD dan Tenaga Ahli Fraksi	3.210.000.000,00	2.700.000.000,00	84,11	0,00
Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS	2.208.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Kesehatan	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1.387.675.908.224,04	1.195.894.560.327,09	86,18	999.366.106.630,68

Rincian Belanja Barang dan Jasa pada masing-masing OPD dapat dilihat pada *lampiran 5*.

5.1.2.1.3 Belanja Subsidi

	10.000.000.000,00	9.903.628.000,00	99,04	9.566.400.000,00
Jumlah tersebut merupakan Belanja Subsidi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2019 serta yang direalisasikan pada TA 2018. Realisasi Belanja Subsidi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar Rp337.228.000,00 atau 3,53%. Subsidi diberikan kepada kelompok tani/subak pelaksana pemupukan pupuk organik yang disubsidi oleh Pemerintah Provinsi Bali dan disalurkan melalui pihak penyedia pupuk organik bersubsidi sesuai Keputusan Gubernur Bali Nomor 1513/03-M/HK/2019, tanggal 29 Mei 2019 sebagai berikut :				
CV. Kerambitan Agro, Desa Kukuh, Kerambitan Tabanan	1.520.800.000,00	1.500.000.000,00	98,63	1.637.200.000,00
Koperasi Produksi Panca Kawi Artha, Br Selat, Desa Sobangan Badung	1.556.400.000,00	1.556.400.000,00	100,00	1.227.200.000,00
CV. Timan Agung, Desa Kelating, Kecamatan Kerambitan Tabanan	560.000.000,00	560.000.000,00	100,00	720.000.000,00
CV. Ananta Winangun, Desa Penarukan, Kerambitan Tabanan.	841.200.000,00	841.200.000,00	100,00	828.000.000,00
CV. Dharma Pertiwi, Br. Kurubaya, Kelurahan Lukluk Badung	1.640.000.000,00	1.628.000.000,00	99,27	1.628.000.000,00
Yayasan Pemilah Sampah Temesi	1.416.400.000,00	1.360.828.000,00	96,08	1.218.000.000,00
Koperasi Tani Nandini, Br Dinas Dangin Yeh, Desa Giri Emas, Kec. Sawan, Buleleng	240.000.000,00	240.000.000,00	100,00	240.000.000,00
CV. Dharma Kerti Sedana, Desa Banjarangkan Klungkung.	1.025.200.000,00	1.017.200.000,00	99,22	950.400.000,00
CV. Amerta Jaya, Br. Selat, Desa Sobangan, Mengwi	480.000.000,00	480.000.000,00	100,00	401.600.000,00
CV. Kantih Tani, Ds Subamia Tabanan.	320.000.000,00	320.000.000,00	100,00	276.000.000,00
CV. Setiawan, Br. Sangging, Ds Kelanting, Kerambitan Tabanan	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	440.000.000,00
Jumlah	10.000.000.000,00	9.903.628.000,00	99,04	9.566.400.000,00

5.1.2.1.4 Belanja Hibah

	1.125.995.849.719,	1.040.184.587.070,81	92,38	1.095.268.169.788,42
Jumlah tersebut merupakan Belanja Hibah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2019 serta yang direalisasikan pada TA 2018. Belanja Hibah TA 2019 mengalami penurunan dari TA 2018 sebesar Rp55.083.582.717,61 atau 5,03%. Belanja Hibah diberikan kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan dan Satuan Pendidikan Dasar baik Negeri maupun Swasta serta Satuan Pendidikan Menengah Swasta, dengan rincian sebagai berikut:				
Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga / Organisasi Kemasyarakatan	397.500.000.000,00	355.801.655.575,81	89,51	465.228.532.482,33
Belanja Hibah BOS kepada Satuan Pendidikan Dasar Kab/Kota	453.304.058.600,00	436.024.800.000,00	96,19	439.709.400.000,00
Belanja Hibah BOS Kepada Satuan Pendidikan Dasar Masyarakat/Swasta	64.810.800.000,00	61.878.840.000,00	95,48	64.383.440.000,00
Belanja Hibah BOS Kepada Satuan Pendidikan Menengah Masyarakat/Swasta Kab/Kota	133.671.025.000,00	111.861.360.000,00	83,68	103.459.082.406,63

Belanja Hibah Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	60.454.807.119,0	58.416.931.495,00	96,63	22.487.714.899,46
Belanja Hibah BOS Afirmasi dan BOS Kinerja	16.255.159.000,00	16.201.000.000,00	99,67	0,00
Jumlah	1.125.995.849.719,	1.040.184.587.070,81	92,38	1.095.268.169.788,42

5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

9.430.000.000,00 9.094.500.000,00 96,44 25.019.000.000,00

Jumlah tersebut merupakan Belanja Bantuan Sosial yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2019 serta yang direalisasikan pada TA 2018. Belanja Bantuan Sosial TA 2019 mengalami penurunan dari TA 2018 sebesar Rp15.924.500.000,00 atau 63,65%, dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi/Kelompok/Anggota Kemasyarakatan	4.220.000.000,00	3.884.500.000,00	92,05	3.189.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.210.000.000,00	5.210.000.000,00	100,00	21.830.000.000,00
Jumlah	9.430.000.000,00	9.094.500.000,00	96,44	25.019.000.000,00

5.1.2.2. Belanja Modal

760.471.523.139,96 556.754.502.359,04 73,21 440.710.162.346,40

Jumlah tersebut merupakan Belanja Modal yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2019 serta yang direalisasikan pada TA 2018. Belanja Modal TA 2019 mengalami penurunan dari TA 2018 sebesar Rp116.044.340.012,64 atau 26,33%, dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Modal Tanah	194.088.758.420,00	63.506.862.123,00	32,72	14.849.390.500,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	273.084.350.972,05	236.359.501.621,14	86,55	179.946.735.698,34
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	146.070.457.678,91	128.335.018.713,06	87,86	35.289.346.105,54
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	132.625.316.115,00	117.877.559.353,84	88,88	195.152.228.280,52
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14.602.639.954,00	10.675.560.548,00	73,11	15.110.337.162,00
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	362.124.600,00
Jumlah	760.471.523.139,96	556.754.502.359,04	73,21	440.710.162.346,40

Rincian Belanja Modal pada masing-masing OPD dapat dilihat pada *lampiran 6*.

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

194.088.758.420,00 63.506.862.123,00 32,72 14.849.390.500,00

Jumlah tersebut merupakan Belanja Modal Tanah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2019 serta yang direalisasikan pada TA 2018. Belanja Modal Tanah TA 2019 mengalami peningkatan dari TA 2018 sebesar Rp48.657.471.623,00 atau 327,67%. Belanja Modal Tanah sebesar tersebut diatas berupa Pembayaran Ganti Rugi pengadaan / pembebasan lahan pada ruas Pembangunan Shortcut jalan Bts. kota Singaraja Mengwitani pada kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Provinsi. Rincian Belanja Modal pada masing-masing OPD dapat dilihat pada *lampiran 7*.

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

	273.084.350.972,05	236.359.501.621,14	86,55	179.946.735.698,34
Jumlah tersebut merupakan Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2019 serta yang direalisasikan pada TA 2018. Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2019 mengalami penurunan dari TA 2018 sebesar Rp56.412.765.922,80 atau 31,35%, dengan rincian sebagai berikut :				
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	4.231.200.000,00	4.202.534.000,00	99,32	3.310.006.986,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bantu	1.262.260.000,00	1.210.265.556,00	95,88	343.954.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	7.487.498.040,00	7.208.304.100,00	96,27	4.717.519.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	248.000.000,00	225.879.100,00	91,08	637.331.797,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur	305.830.000,00	219.887.218,96	71,90	25.273.000,00
Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan	314.910.000,00	278.787.200,00	88,53	0,00
Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	190.000.000,00	175.163.450,00	92,19	0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	1.012.707.800,00	920.691.735,00	90,91	577.958.275,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	11.728.977.631,00	10.343.194.052,64	88,18	5.249.394.077,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer	17.780.226.356,00	16.559.684.014,00	93,14	7.255.203.175,00
Belanja Modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	13.800.260.200,00	8.587.567.659,00	62,23	4.266.461.242,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	5.321.139.801,00	4.963.370.184,00	93,28	3.091.266.900,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi	606.905.000,00	528.214.800,00	87,03	188.984.000,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar	247.500.000,00	231.650.000,00	93,60	66.890.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran	71.526.510.610,05	63.209.108.322,71	88,37	1.435.432.169,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan	46.250.000,00	45.890.000,00	99,22	0,00
Belanja Modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	21.897.666.300,00	14.795.034.804,00	67,56	9.113.965.275,00
Belanja Modal Pengadaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	691.996.000,00	614.158.800,00	88,75	256.850.000,00
Belanja Modal Pengadaan Senjata Api	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Non Senjata Api	350.500,00	335.000,00	95,58	2.200.000,00
Belanja Modal BLUD	6.332.007.700,00	5.716.746.142,00	90,28	91.890.391.967,54
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	79.914.735.034,00	70.545.930.950,83	88,28	47.517.653.834,80
Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Tradisional	5.820.000,00	5.720.000,00	98,28	00,00
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Rumah Sakit	28.131.600.000,00	25.771.384.532,00	91,61	00,00

Jumlah	273.084.350.972,05	236.359.501.621,14	86,55	179.946.735.698,34
---------------	---------------------------	---------------------------	--------------	---------------------------

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada masing-masing OPD dapat dilihat pada *lampiran 8*.

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

	146.070.457.678,91	128.335.018.713,06	87,86	35.289.346.105,54
Jumlah tersebut merupakan Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2019 serta yang direalisasikan pada TA 2018. Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2019 mengalami penurunan dari TA 2018 sebesar Rp93.045.672.607,52 atau 263,67%, dengan rincian sebagai berikut :				
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	145.385.142.678,91	127.654.629.713,06	87,80	34.062.191.105,54
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	00,00	1.001.655.000,00
Belanja Modal Pengadaan Monumen / Bangunan Bersejarah	685.315.000,00	680.389.000,00	99,28	225.500.000,00
Jumlah	146.070.457.678,91	128.335.018.713,06	87,86	35.289.346.105,54

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada masing-masing OPD dapat dilihat pada *lampiran 9*.

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

	132.625.316.115,00	117.877.559.353,84	88,88	195.152.228.280,52
Jumlah tersebut merupakan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2019 serta yang direalisasikan pada TA 2018. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2019 mengalami penurunan dari TA 2018 sebesar Rp77.274.668.926,68 atau 39,60%, dengan rincian sebagai berikut :				
Belanja Modal Pengadaan Jalan	89.255.205.690,00	89.012.920.745,00	99,73	154.545.395.274,22
Belanja Modal Pengadaan Jembatan	0,00	0,00	0,00	194.821.500,00
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	7.427.554.000,00	5.972.285.314,14	80,41	17.908.259.000,00
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	716.000.000,00	714.456.000,00	99,78	4.505.556.000,00
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Kotor	800.000.000,00	800.000.000,00	100,00	2.192.254.006,30
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih	31.375.779.000,00	18.757.924.419,70	59,78	13.223.090.800,00
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Kotor	148.500.000,00	148.200.000,00	99,80	0,00
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	65.000.000,00	45.500.000,00	70,00	0,00
Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air Minum	1.798.338.225,00	1.597.197.525,00	88,82	2.347.753.000,00
Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik	394.000.000,00	268.170.500,00	68,06	175.574.700,00
Belanja Modal Pengadaan Jaringan Telepon	644.939.200,00	560.904.850,00	86,97	59.524.000,00
Jumlah	132.625.316.115,00	117.877.559.353,84	88,88	195.152.228.280,52

Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada masing-masing OPD dapat dilihat pada *lampiran 10*.

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

	14.602.639.954,00	10.675.560.548,00	73,11	15.110.337.162,00
Jumlah tersebut merupakan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2019 serta yang direalisasikan pada TA 2018. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2019 mengalami penurunan dari TA 2018 sebesar Rp4.434.776.614,00 atau 29,35%, dengan rincian sebagai berikut :				
Belanja Modal Pengadaan Buku	9.549.081.854,00	6.622.486.732,00	69,35	14.858.579.742,00
Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	60.000.000,00	59.872.981,00	99,79	205.850.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	386.783.300,00	215.714.635,00	55,77	13.907.420,00
Belanja Modal Pengadaan Hewan	47.250.000,00	45.060.000,00	95,37	32.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Tanaman	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Pengadaan Software	4.559.524.800,00	3.732.426.200,00	81,86	0,00
Jumlah	14.602.639.954,00	10.675.560.548,00	73,11	15.110.337.162,00

Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada masing-masing OPD dapat dilihat pada *lampiran 11*.

5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

	0,00	0,00	00,00	362.124.600,00
Jumlah tersebut merupakan Belanja Modal Aset Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2019 serta yang direalisasikan pada TA 2018. Belanja Modal Aset Lainnya TA 2019 mengalami penurunan dari TA 2018 sebesar Rp362.124.600,00 atau 100,00%, dengan rincian sebagai berikut :				
Pengadaan Software Windows	0,00	0,00	0,00	31.421.600,00
Pengadaan Software Antivirus	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengadaan Aplikasi Sistem Integrasi Data Satu untuk Semua - Semua untuk Satu	0,00	0,00	0,00	24.777.500,00
Pengadaan Aplikasi Katalog Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
Pengadaan Sistem Informasi Pemanfaatan Aset	0,00	0,00	0,00	19.635.000,00
Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi dan Audit Tata Ruang	0,00	0,00	0,00	97.075.000,00
Pengadaan Sistem Aplikasi e-Monitoring	0,00	0,00	0,00	41.800.000,00
Pengadaan Sistem Aplikasi Bank Data	0,00	0,00	0,00	90.849.000,00
Pengadaan Sistem Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	44.566.500,00
Pengadaan Sistem Aplikasi SIMWASDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	00,00	362.124.600,00

Rincian Belanja Modal Aset Lainnya pada masing-masing OPD dapat dilihat pada *lampiran 12*.

5.1.2.3 Belanja Tak Terduga

12.098.276.508,00	1.182.717.927,18	9,78	187.500.000,00
--------------------------	-------------------------	-------------	-----------------------

Jumlah tersebut merupakan Belanja Tak Terduga yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2019 serta yang direalisasikan pada TA 2018. Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2019 digunakan untuk :

1. Pengembalian sisa dana hibah pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi Bali pada kegiatan program hibah bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, sesuai Kep.Gub Bali No 911/04-D/HK/2019, tanggal 27 Februari 2019.
2. Pengembalian pembayaran retribusi sewa tanah kavlingan pegawai negeri sipil eselon I dan II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali atas nama Drs. I Ketut Adiarsa, MH beserta 29 penerima lainnya, sesuai Keputusan Gububernur Bali Nomor 1801/04-D/HK/2019, tgl 5 angustus 2019.
3. Pengembalian pembayaran ganti rugi dan bunga dalam perkara Nomor 585/PDT.G/2010/PN.DPS jo 133/PDT/2011/PT.DPS jo 2687 K/PDT/2012 jo Nomor 181.3/4195/BAG.III/B.KUMHAM antara PT Aria Multi Graphia melawan Gubernur Bali dkk kepada rekening Giro an. RPL 037 PN Denpasar Nomor Rekening 00007-01-30-000743-9 untuk dilanjutkan dilakukan transfer pembayaran ke PT Aria Multi Graphia ke no Rekening 130-000-313121-9 pada Bank Mandiri Cabang Kiaracondong-Bandung.
4. Pengembalian Pembayaran Kelebihan Setoran Bunga Tabungan Dana Operasional Sekolah Tahun 2018 di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Bali kepada SMK 1 Amlapura beserta 5 sekolah lainnya Sesuai Keputusan Gubernur Bali No 2198/04-D/HK/2019 Tgl 4 November 2019.
5. Pengembalian pembayaran retribusi sewa tanah kavlingan pegawai negeri sipil eselon II atas nama Ni Luh Made Wiratmi, sesuai Keputusan Gubernur Bali Nomor 2236/04-D/HK/2019, tgl 18 November 2019.

5.1.3 Transfer

2.195.866.652.337,20	2.114.688.305.724,54	96,30	1.837.992.175.854,31
-----------------------------	-----------------------------	--------------	-----------------------------

Jumlah tersebut merupakan Transfer yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2019 serta yang direalisasikan pada TA 2018. Transfer TA 2019 mengalami peningkatan dari TA 2018 sebesar Rp276.696.129.870,23 atau 15,05%, dengan rincian sebagai berikut :

Transfer Bagi Hasil Pendapatan	1.339.553.585.283,20	1.302.125.715.639,33	97,21	1.207.451.785.444,09
Transfer Bantuan Keuangan	856.313.067.054,00	812.562.590.085,21	94,89	630.540.390.410,22
Jumlah	2.195.866.652.337,20	2.114.688.305.724,54	96,30	1.837.992.175.854,31

5.1.3.1 Transfer Bagi Hasil Pendapatan

1.339.553.585.283,20	1.302.125.715.639,33	97,21	1.207.451.785.444,09
-----------------------------	-----------------------------	--------------	-----------------------------

Jumlah tersebut merupakan Transfer Bagi Hasil Pendapatan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2019 serta yang direalisasikan pada TA 2018. Transfer Bagi Hasil Pendapatan TA 2019 mengalami peningkatan dari TA 2018 sebesar Rp94.673.930.195,24 atau 7,84%, dengan rincian sebagai berikut :

Kabupaten Buleleng	179.872.709.915,00	174.670.617.177,02	97,11	162.184.905.120,45
Kabupaten Jembrana	121.773.029.285,07	118.190.796.763,42	97,06	109.763.361.932,73
Kabupaten Tabanan	147.495.966.034,91	143.315.225.636,98	97,17	133.166.486.271,71
Kabupaten Badung	198.488.727.197,49	193.092.099.489,76	97,28	178.566.781.113,53
Kabupaten Gianyar	146.403.276.829,94	142.350.997.768,12	97,23	132.021.258.412,61
Kabupaten Bangli	105.212.098.416,79	102.144.468.664,02	97,08	99.306.687.101,12
Kabupaten Klungkung	104.400.073.528,96	101.474.011.109,53	97,20	94.025.543.289,74
Kabupaten Karangasem	139.001.965.053,96	135.036.636.865,81	97,15	120.562.375.437,24
Kota Denpasar	196.905.739.021,08	191.850.862.164,67	97,43	177.854.386.764,96
Jumlah	1.339.553.585.283,20	1.302.125.715.639,33	97,21	1.207.451.785.444,09

5.1.3.2 Transfer Bantuan Keuangan

856.313.067.054,00 812.562.590.085,21 94,89 630.540.390.410,22

Jumlah tersebut merupakan Transfer Bantuan Keuangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2019 serta yang direalisasikan pada TA 2018. Transfer Bantuan Keuangan TA 2019 mengalami peningkatan dari TA 2018 sebesar Rp182.022.199.674,99 atau 28,87%, dengan rincian sebagai berikut :

Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	370.033.724.798,00	330.260.987.829,21	89,25	186.775.668.060,22
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	483.773.275.000,00	479.795.535.000,00	99,18	441.322.088.750,00
Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.506.067.256,00	2.506.067.256,00	100,00	2.442.633.600,00
Jumlah	856.313.067.054,00	812.562.590.085,21	94,89	630.540.390.410,22

5.1.3.2.1 Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya

370.033.724.798,00 330.260.987.829,21 89,25 186.775.668.060,22

Jumlah tersebut merupakan Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2019 serta yang direalisasikan pada TA 2018. Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya TA 2019 mengalami peningkatan dari TA 2018 sebesar Rp143.485.319.768,99 atau 76,82%, dengan rincian sebagai berikut :

Kabupaten Buleleng	102.012.507.198,00	95.952.240.089,00	94,06	30.935.665.973,40
Kabupaten Tabanan	83.839.724.496,00	75.812.169.601,06	90,43	58.126.081.599,68
Kabupaten Badung	7.000.000.000,00	6.700.000.000,00	95,71	6.330.000.000,00
Kabupaten Gianyar	38.571.216.160,00	27.367.140.936,15	70,95	12.229.155.783,20
Kabupaten Bangli	43.190.770.400,00	34.746.559.083,00	80,45	17.195.644.150,33
Kabupaten Klungkung	18.140.160.200,00	17.558.745.730,00	96,79	15.814.160.075,81
Kabupaten Karangasem	40.140.798.802,00	35.684.172.770,00	88,90	26.475.192.330,60
Kabupaten Jembrana	30.641.547.542,00	30.242.959.620,00	98,70	14.319.768.147,20
Kota Denpasar	6.497.000.000,00	6.197.000.000,00	95,38	5.350.000.000,00
Jumlah	370.033.724.798,00	330.260.987.829,21	89,25	186.775.668.060,22

5.1.3.2.2 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

483.773.275.000,00 479.795.535.000,00 99,18 441.322.088.750,00

Jumlah tersebut merupakan Transfer Bantuan Keuangan ke Desa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2019 serta yang direalisasikan pada TA 2018. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa TA 2019 mengalami peningkatan dari TA 2018 sebesar Rp38.473.446.250,00 atau 8,72%, yang diberikan kepada 607 Desa yang ada di Bali.

5.1.3.2.3 Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

2.506.067.256,00 2.506.067.256,00 100,00 2.442.633.600,00

Jumlah tersebut merupakan Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2019 serta yang direalisasikan pada TA 2018. Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik TA 2019 mengalami peningkatan dari TA 2018 sebesar Rp63.433.656,00,00 atau 2,60%, dengan rincian sebagai berikut :

Partai Hanura	111.624.684,00	111.624.684,00	100,00	131.967.600,00
Partai Gerindra	242.080.968,00	242.080.968,00	100,00	264.075.600,00
Partai PKPI	44.996.664,00	44.996.664,00	100,00	67.159.200,00
Partai Golkar	430.884.744,00	430.884.744,00	100,00	455.035.200,00

Partai PDI Perjuangan	1.227.944.556,00	1.227.944.556,00	100,00	1.059.066.000,00
Partai Demokrat	286.139.580,00	286.139.580,00	100,00	323.876.400,00
Partai Amanat Nasional	20.908.020,00	20.908.020,00	100,00	31.206.000,00
Partai Nasional Demokrat	124.044.636,00	124.044.636,00	100,00	110.247.600,00
Partai Solidaritas Indonesia	17.443.404,00	17.443.404,00	100,00	0,00
Jumlah	2.506.067.256,00	2.506.067.256,00	100,00	2.442.633.600,00

5.1.4. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Provinsi Bali baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

5.1.4.1. Penerimaan Pembiayaan

702.345.385.366,47 704.590.522.601,47 100,32 441.914.809.255,14

Jumlah tersebut merupakan Penerimaan Pembiayaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2019 serta yang direalisasikan pada TA 2018. Penerimaan Pembiayaan dalam TA 2019 ditetapkan setelah perubahan sebesar Rp.702.345.385.366,47 dan terealisasi sebesar Rp.704.590.522.601,47 atau 100,32%, dengan rincian sebagai berikut :

Penggunaan SiLPA	702.345.385.366,47	702.345.385.366,47	100,00	404.137.168.978,49
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengembalian Dana Bergulir	0,00	2.245.137.235,00	0,00	37.777.640.276,65
Jumlah	702.345.385.366,47	704.590.522.601,47	100,32	441.914.809.255,14

5.1.4.2. Pengeluaran Pembiayaan

0,00 0,00 0,00 390.000.000,00

Untuk TA 2019 tidak ada pengalokasian penganggaran untuk penambahan penyertaan modal.

5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

0,00 831.815.527.448,65 0,00 702.345.385.366,47

Berdasarkan realisasi Pendapatan dan Belanja serta realisasi Pembiayaan Netto TA 2019, terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berjalan sebesar Rp831.815.527.448,65. Dengan rincian fisik Kas dan setara Kas sebagai berikut:

Uraian SiLPA	Jumlah
Kas di Kas Daerah (Rekening Giro pada Bank BPD Bali)	650.647.578.852,66
Kas di Bendahara Penerimaan pada Dinas Kebudayaan	13.286.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan	6.187.328,00
Kas di BLUD:	
- Kas pada BLUD UPTD Rumah Sakit Bali Mandara	35.699.522.957,60
- Kas pada BLUD UPTD RS Mata Bali Mandara	73.980.126.269,51
- Kas pada BLUD UPTD Rumah Sakit Jiwa	7.697.907.923,08
- Kas pada BLUD UPTD Pengelolaan Air Limbah	13.964.405.447,59
- Kas pada BLUD UPTD Pengelolaan Air Minum	4.626.588.441,18
Kas Lainnya di Bendahara BOS SMA/SMK Negeri	44.775.749.748,40
Jumlah	831.411.352.968,02

Selisih kurang atas saldo Kas dan Setara Kas terhadap SiLPA TA 2019 sebesar Rp404.174.480,63 dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah
1	Kelebihan pembayaran PPh Pasal 22 dan PPN telah dicatat sebagai Piutang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) pada Neraca sebagaimana dijelaskan dalam Catatan atas Neraca pada point 5.2.1.1.2.6 berdasarkan Surat dari Kawil DJP Bali KPP Pratama Singaraja Nomor S-1014/WPJ.17/KP.03/2020 tanggal 2 Maret 2020 perihal Persetujuan Pemindahbukuan dari Ditjen Pajak untuk kompensasi penyetoran PFK atas kelebihan setor PPh sebesar Rp385.322.928,00 pada SMAN 1 Singaraja dan sebesar Rp1.018.400,00 pada SMKN 1 Seririt sehingga mengurangi Kas BOS	(386.341.328,00)
2	Utang PFK BOS pada SMKN 3 Kintamani sebesar Rp22.134.093,00, dan SLBN 1 Denpasar sebesar Rp374.999,34 sehingga menambah Kas BOS	22.509.092,34
3	Koreksi saldo awal BOS atas kelebihan setoran jasa giro 2018 dan berdasarkan konfirmasi sekolah bukan kelebihan setor jagir dan memang pendapatan jagir yaitu SMAN 1 Sukawati sebesar Rp17.858.222,16 dan SMKN 2 Tegallalang Rp27.565,85, SMKN 3 Negara sebesar Rp1.147.194,91 sehingga mengurangi Kas BOS	(19.032.982,92)
4	Kelebihan setoran jasa giro BOS ke Kas Daerah yang akan dikembalikan dari Kasda kepada masing-masing Kas BOS sekolah berdasarkan SK No.280/04-E/HK/2020 tanggal 8 April 2020 yaitu untuk SMAN 4 Singaraja sebesar Rp1.353.321,87, SMKN 1 Denpasar sebesar Rp19.646.378,19; SMAN 1 Banjarangkan sebesar Rp309.561,99 sehingga mengurangi Kas BOS	(21.309.262,05)
	Jumlah	(404.174.480,63)

5.2. NERACA

Neraca merupakan laporan yang menyajikan informasi menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
5.2.1 Aset	10.880.737.340.757,60	10.426.548.615.357,53
Saldo tersebut merupakan saldo Aset yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal neraca yang terdiri dari:		
Aset Lancar	1.016.403.425.383,22	1.035.138.540.288,81
Investasi Jangka Panjang	1.373.777.524.568,76	1.181.822.481.420,07
Aset Tetap	7.743.629.861.229,56	7.473.548.024.902,38
Dana Cadangan	0,00	0,00
Aset Lainnya	746.926.529.576,05	736.039.568.746,26
Jumlah	10.880.737.340.757,60	10.426.548.615.357,53

5.2.1.1 Aset Lancar

	1.016.403.425.383,22	1.035.138.540.288,81
Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Saldo tersebut merupakan saldo Aset Lancar yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal neraca yang terdiri dari:		
Kas dan Setara Kas	831.411.352.968,02	702.345.385.366,47
Piutang	98.088.383.167,94	253.542.360.955,73
Penyisihan Piutang	(34.690.843.968,72)	(18.792.299.300,18)
Beban Dibayar Dimuka	112.197.260,27	1.040.694.453,28
Persediaan	121.482.335.955,71	97.002.398.813,51
Jumlah	1.016.403.425.383,22	1.035.138.540.288,81

5.2.1.1.1 Kas dan Setara Kas

	831.411.352.968,02	702.345.385.366,47
Saldo tersebut merupakan saldo Kas dan Setara Kas yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal neraca, yang terdiri dari:		
Kas di Kas Daerah	650.647.578.852,66	155.539.387.397,37
Kas di Bendahara Penerimaan	13.286.000,00	39.726.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	6.187.328,00	244.875.222,43
Kas di BLUD	135.968.551.038,96	100.992.026.346,86
Kas Lainnya di Bendahara BOS	44.775.749.748,40	45.529.370.399,81
Setara Kas	0,00	400.000.000.000,00
Jumlah	831.411.352.968,02	702.345.385.366,47

5.2.1.1.1.1Kas di Kas Daerah

	650.647.578.852,66	155.539.387.397,37
	650.647.578.852,66	155.539.387.397,37

Saldo tersebut merupakan saldo Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Bali per tanggal neraca berdasarkan hasil rekonsiliasi antara Buku Kas Umum Daerah dengan Rekening Kas Daerah Nomor 010.01.00.00000-1 di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. Saldo tersebut merupakan saldo pada rekening Kas Umum Daerah. Saldo per tanggal 31 Desember 2019 termasuk sisa dana transfer yang sifatnya mengikat (mandatoris) sebesar Rp19.424.993.464,00 yang terdiri dari:

1. Sisa Dana DAK Fisik sebesar Rp2.812.675.451,00;
2. Sisa Dana DAK Non Fisik sebesar Rp15.861.180.662,00 yang terdiri dari:
 - a. Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler sebesar Rp6.852.920.000,00;
 - b. Dana Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi sebesar Rp4.000.000,00;
 - c. Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja sebesar Rp50.159.000,00;
 - d. Dana Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp5.301.255.070,00;
 - e. Dana Tambahan Penghasilan PNSD sebesar Rp996.000.000,00;
 - f. Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp358.920.973,00;
 - g. Administrasi Kependudukan sebesar Rp370.434.710,00;
 - h. Museum sebesar Rp397.432.632,00;
 - i. Monumen Perjuangan Rakyat Bali sebesar Rp408.375.500,00;
 - j. Taman Budaya sebesar Rp167.609.525,00;
 - k. Bantuan Operasional Sekolah sebesar Rp954.073.252,00;
3. Sisa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp751.137.351,00.

5.2.1.1.1.2Kas di Bendahara Penerimaan

	13.286.000,00	39.726.000,00
	13.286.000,00	39.726.000,00

Saldo tersebut merupakan saldo Kas di Bendahara Penerimaan Pemerintah Provinsi Bali per tanggal neraca, Saldo per tanggal 31 Desember 2019 tersebut merupakan saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada Dinas Kebudayaan sebesar Rp13.286.000,00 yang telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 2 Januari 2020.

5.2.1.1.1.3Kas di Bendahara Pengeluaran

	6.187.328,00	244.875.222,43
	6.187.328,00	244.875.222,43

Saldo tersebut merupakan saldo Kas Bendahara Pengeluaran Pemerintah Provinsi Bali per tanggal neraca. Saldo per tanggal 31 Desember 2019 tersebut merupakan saldo Sisa Uang Persediaan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp6.187.328,00 yang telah disetor pada tanggal 13 Pebruari 2020.

5.2.1.1.1.4Kas di BLUD

	135.968.551.038,96	100.992.026.346,86
	135.968.551.038,96	100.992.026.346,86

Saldo tersebut merupakan saldo Kas di BLUD Pemerintah Provinsi Bali per tanggal neraca. Saldo per tanggal 31 Desember 2019 tersebut merupakan saldo yang terdiri dari:

BLUD UPT RS Bali Mandara	35.699.522.957,60
BLUD RS Mata Bali Mandara	73.980.126.269,51
BLUD RS Jiwa Provinsi Bali	7.697.907.923,08
BLUD UPT Pengelolaan Air Limbah	13.964.405.447,59
BLUD UPT Pengelolaan Air Minum	4.626.588.441,18
Jumlah	135.968.551.038,96

Rincian perhitungan saldo kas di BLUD dan posisi dana kas di BLUD diuraikan sebagai berikut:

1. BLUD UPT RS Bali Mandara

Saldo Awal	: 15.695.518.786,54
Pendapatan	: 55.694.715.658,06
Belanja	: 35.690.711.487,00
Saldo Akhir	: 35.699.522.957,60

Saldo akhir kas tersebut terdapat pada rekening nomor 010.01.05.01677-1 di Bank BPD Bali sebesar Rp.34.501.996.006,72; rekening nomor 145-00-6669000-5 di Bank Mandiri sebesar Rp.1.046.740.822,88 dan rekening nomor 036801002471304 di Bank BRI sebesar Rp.91.653.451,00, Kas Tunai Bendahara Penerimaan sebesar Rp.59.132.677,00

2. BLUD RS Mata Bali Mandara

Saldo Awal	: 56.913.571.167,47
Pendapatan	: 56.299.222.027,82
Belanja	: 39.232.666.925,78
Saldo Akhir	: 73.980.126.269,51

Saldo akhir kas tersebut terdapat pada rekening nomor 010.05.02691-1 di Bank BPD Bali sebesar Rp.71.445.128.941,39; rekening nomor 1450060056005 di Bank Mandiri sebesar Rp.2.534.997.328,12 .

3. BLUD RS Jiwa Provinsi Bali

Saldo Awal	: 10.201.853.478,01
Pendapatan	: 23.408.160.776,22
Belanja	: 25.912.106.331,15
Saldo Akhir	: 7.697.907.923,08

Saldo akhir kas tersebut terdapat pada rekening nomor 020.01.05.00146-9 di Bank BPD Bali sebesar Rp.7.687.900.249,66; rekening nomor 145-00-1297540-1 di Bank Mandiri sebesar Rp.10.007.673,42

4. BLUD UPT Pengelolaan Air Limbah

Saldo Awal	: 12.707.471.752,73
Pendapatan	: 14.787.978.982,86
Belanja	: 13.531.045.288,00
Saldo Akhir	: 13.964.405.447,59

Saldo akhir kas tersebut terdapat pada rekening nomor 010.010.501672-7 di Bank BPD Bali sebesar Rp13.964.405.447,59

5. BLUD UPT Pengelolaan Air Minum

Saldo Awal	: 5.473.611.162,11
Pendapatan	: 24.614.739.318,37
Belanja	: 25.461.762.039,30
Saldo Akhir	: 4.626.588.441,18

Saldo akhir kas tersebut terdapat pada rekening nomor 010.05.01677-2 di Bank BPD Bali sebesar Rp.4.626.588.441,18

Jumlah belanja yang digunakan dalam perhitungan di atas berbeda dengan jumlah belanja BLUD untuk Belanja Pegawai BLUD, Barang dan Jasa BLUD dan Belanja Modal BLUD yang disajikan dalam Catatan atas Laporan Realisasi Anggaran dikarenakan nilai dalam Laporan Realisasi Anggaran tersebut menggabungkan belanja yang bersumber dari dana APBD dengan yang bersumber dari Pendapatan BLUD, sedangkan dalam pengungkapan nilai belanja diatas hanya yang bersumber dari pendapatan BLUD.

5.2.1.1.1.5 Kas Lainnya di Bendahara BOS

44.775.749.748,40

45.529.370.399,81

Saldo tersebut merupakan Saldo Kas Lainnya di Bendahara BOS pada SMAN dan SMKN milik Pemerintah Provinsi Bali per tanggal neraca. Saldo tersebut terdiri dari saldo Kas di Bendahara BOS yang benar-benar merupakan sisa dana BOS sebesar Rp44.775.749.748,40 sebagaimana diuraikan dalam lampiran 36

5.2.1.1.1.6 Setara Kas

	0,00	400.000.000.000,00
--	------	--------------------

Saldo tersebut merupakan saldo Setara Kas yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal neraca. Saldo per tanggal 31 Desember 2019.

5.2.1.1.2 Piutang

	98.088.383.167,94	253.542.360.955,73
--	-------------------	--------------------

Saldo tersebut merupakan saldo Piutang yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal neraca, yang terdiri dari:

Piutang Pajak	37.295.600.983,00	37.015.966.071,00
Piutang Retribusi	129.039.000,00	132.861.000,00
Piutang Hasil Pemakaian Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	951.680.759,73	171.741.499.697,15
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	55.391.795.175,16	40.632.622.855,58
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	3.912.616.660,00	4.019.411.332,00
Piutang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	386.341.328,00	0,00
Piutang Jagir BOS	21.309.262,05	0,00
Jumlah	98.088.383.167,94	253.542.360.955,73

5.2.1.1.2.1 Piutang Pajak

	37.295.600.983,00	37.015.966.071,00
--	-------------------	-------------------

Saldo tersebut merupakan saldo Piutang Pajak yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal neraca, yang terdiri dari:

Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	699.503.700,00	533.333.200,00
Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.120.972.500,00	1.691.716.500,00
Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	35.151.126.613,00	34.499.986.912,00
Piutang Pajak Air Permukaan	323.998.170,00	290.929.459,00
Jumlah	37.295.600.983,00	37.015.966.071,00

5.2.1.1.2.2 Piutang Retribusi

	129.039.000,00	132.861.000,00
--	----------------	----------------

Saldo tersebut merupakan saldo Piutang Retribusi yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal neraca yang terdiri dari:

Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	56.489.000,00	18.686.000,00
Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	65.025.000,00	106.650.000,00
Piutang Retribusi Izin Perikanan	7.525.000,00	7.525.000,00
Jumlah	129.039.000,00	132.861.000,00

5.2.1.1.2.3 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

	951.680.759,73	171.741.499.697,15
--	----------------	--------------------

Saldo tersebut merupakan saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal neraca yang terdiri dari:

Piutang Bagian Laba atas penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	951.680.759,70	170.702.769.832,12
- Perusahaan Daerah	951.680.759,70	951.680.759,70
- PT. BPD Bali	0,00	168.927.224.490,42
- PT. Penjamin Kredit Daerah Provinsi Bali	0,00	823.864.582,00
- PT. Bali Semesta Mandiri	0,00	0,00
Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	0,03	1.038.729.865,03
- PT. Rumah Sakit Puri Raharja	0,03	1.038.729.865,03
- PT. Asuransi Bangun Askrida	0,00	0,00
- PT. Jasa Marga Bali Tol	0,00	0,00
Jumlah	951.680.759,73	171.741.499.697,15

Saldo Piutang disajikan berdasarkan hasil RUPS atas Laba Tahun berjalan masing-masing perusahaan. Hasil RUPS atas Laba tahun 2019 atas semua perusahaan sampai dengan laporan ini disusun belum diperoleh. Saldo piutang sebesar Rp951.680.759,73 merupakan Piutang Deviden pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD tahun 2019 sebesar Rp951.680.759,70 yang sampai dengan laporan ini disusun belum disetor ke Kas Daerah dan kurang setor piutang deviden PT. Rumah Sakit Puri Raharja sebesar Rp0,03.

5.2.1.1.2.4 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

55.391.795.175,16 40.632.622.855,58

Saldo tersebut merupakan saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal neraca yang terdiri dari:

Piutang Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah	26.523.901.204,41	18.722.618.713,83
Piutang dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	92.960.000,00	0,00
Piutang BLUD	28.761.333.970,75	21.896.404.141,75
Bagian Lancar Penjualan Angsuran	13.600.000,00	13.600.000,00
Jumlah	55.391.795.175,16	40.632.622.855,58

Saldo per 31 Desember 2019 tersebut, belum termasuk sisa dana atas realisasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun 2019 yang belum dikembalikan atau disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Bali sesuai Petunjuk Teknis, pada enam Kabupaten senilai total Rp4.793.674.898,92 sebagaimana diungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD Pemerintah Provinsi Bali TA 2019 pada temuan pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

5.2.1.1.2.5 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

3.912.616.660,00 4.019.411.332,00

Saldo tersebut merupakan saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah kepada Bendahara yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal neraca. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah tersebut, merupakan kasus kas tekor di Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah yang telah ditetapkan sebagai Tuntutan Perbendaharaan sesuai SK BPK RI No. 10.TP.07-2018/VIII/2018.SKP dan SK BPK RI No. 09.TP.07-2018/VIII/2018.SKP tanggal 1 Agustus 2018 sebesar Rp4.100.211.518,00 dan telah diangsur sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp187.594.858,00

5.2.1.1.2.6 Piutang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

386.341.328,00	0,00
----------------	------

Saldo tersebut merupakan Piutang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) berupa kelebihan pembayaran pajak PPh Pasal 22 atas Pembelian 5 unit Infocus Projector XGA 1024x768 3800 Lumens IN 1144 xv seharga Rp28.285.300,00 yang seharusnya penyetoran pajak sebesar Rp385.708,00 namun disetor sebesar Rp385.708.636,00 pada SMAN 1 Singaraja. Serta kelebihan pembayaran PPN sebesar Rp1.018.400,00 pada SMKN 1 Seririt, dan telah mendapat persetujuan pemindah bukuan dari Direktorat Jenderal Pajak untuk kompensasi penyetoran PFK atas kelebihan setor tersebut melalui Bukti Pemindahbukuan Nomor PBK-00955/XII/WPJ.06/KP.0903/2019 tanggal 23 Desember 2019, Bukti Pemindahbukuan Nomor PBK-00379/II/WPJ.17/KP.0303/2020 tanggal 26 Februari 2020, dan Bukti Pemindahbukuan Nomor PBK-00378/II/WPJ.17/KP.0303/2020 tanggal 26 Februari 2020

5.2.1.1.2.7 Piutang Jasa Giro BOS

21.309.262,05	0,00
---------------	------

Saldo tersebut merupakan Piutang Jasa Giro BOS atas kelebihan penyetoran jasa giro rekening BOS tiga sekolah ke rekening Kas Daerah dan merupakan hak sekolah dan akan dikembalikan kepada rekening BOS sekolah SMAN 4 Singaraja sebesar Rp1.353.321,87, SMKN 1 Denpasar sebesar Rp19.646.378,19; SMAN 1 Banjarangkan sebesar Rp309.561,99 melalui SK No.280/04-E/HK/2020 tanggal 8 April 2020

5.2.1.1.3 Penyisihan Piutang

(34.690.843.968,72)	(18.792.299.300,18)
---------------------	---------------------

Saldo tersebut merupakan saldo Penyisihan Piutang yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal neraca yang terdiri dari:

Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(371.211.000,92)	(460.086.540,86)
Penyisihan Piutang Retribusi	(36.468.015,00)	(51.799.280,00)
Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	(951.680.759,70)	(1.329.789.474,54)
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(29.416.829.280,15)	(14.940.918.338,78)
Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi	(3.912.616.660,00)	(2.009.705.666,00)
Penyisihan Piutang Perhitungan Pihak Ketiga	(2.038.252,95)	0,00
Jumlah	(34.690.843.968,72)	(18.792.299.300,18)

Rincian piutang dan penyisihan piutang dapat dilihat pada *lampiran 14*.

5.2.1.1.4 Beban Dibayar Dimuka

112.197.260,27	1.040.694.453,28
----------------	------------------

Saldo tersebut merupakan saldo Beban Dibayar Dimuka yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal neraca yang terdiri dari:

Beban Jasa Dibayar Dimuka	0,00	936.087.857,53
Beban Sewa Dibayar Dimuka	112.197.260,27	104.606.595,75
Belanja Dibayar Dimuka	0,00	
Jumlah	112.197.260,27	1.040.694.453,28

Saldo Beban Sewa Dibayar Dimuka senilai Rp112.197.260,27 merupakan saldo sewa dibayar dimuka yang belum jatuh tempo pada Badan Pendapatan Daerah atas sewa gedung untuk tempat pelayanan samsat di Penatih dengan periode belum jatuh tempo 329 hari (s.d 21 November 2019) senilai Rp25.238.356,16 dan gerai samsat di Seirit dengan periode belum jatuh tempo 276 hari senilai Rp86.958.904,11, dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian Sewa Tempat	Nomor dan Tanggal Kontrak	Jangka Waktu Sewa	Nilai Sewa (Rp)	Beban Dibayar Dimuka (Rp)
1	Sewa Gedung Pelayanan Samsat, di Dalung	No. 511 Tahun 2019 Tgl. 11-01-2019	1 tahun	160.000.000,00	0,00
2	Sewa Gedung Pelayanan Samsat, di Jl. Bypass Ngurah Rai Nusa Dua	No. 510 Tahun 2019 Tgl. 11-01-2019	1 tahun	360.000.000,00	0,00
3	Sewa Gedung Pelayanan Gerai Samsat di Penatih	No. 3048 Tahun 2019 Tgl. 21-11-2019	1 tahun	28.000.000,00	25.238.356,16
4	Sewa Gedung Pelayanan Gerai Samsat di Tiara Dewata, Denpasar	No. 509 Tahun 2019 Tgl. 09-01-2019	1 tahun	99.000.000,00	0,00
5	Sewa Gedung Pelayanan Gerai Samsat di Gerai Samsat Ubud	No. 512 Tahun 2019 Tgl. 18-01-2019	1 tahun	59.000.000,00	0,00
6	Sewa Gedung Pelayanan Gerai Samsat di Gerai Samsat Seririt	No. 2526 Tahun 2019 Tgl. 01-10-2019	1 tahun	115.000.000,00	86.958.904,11
	Jumlah				112.197.260,27

5.2.1.1.5 Persediaan

121.482.335.955,71

97.002.398.813,51

Saldo tersebut merupakan saldo Persediaan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal neraca dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Persediaan	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
1	Bahan Pakai Habis	19.413.626.729,97	18.610.610.837,29
2	Bahan Material	36.691.339.759,58	33.586.682.711,65
3	Barang Lainnya	65.377.369.466,16	44.805.105.264,57
	Jumlah	121.482.335.955,71	97.002.398.813,51

Rincian daftar masing-masing jenis persediaan pada masing-masing OPD dapat dilihat pada *lampiran 15*.

Selain saldo Persediaan per 31 Desember 2019 tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Bali selama TA 2019 menerima hibah obat dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan. Atas penerimaan tersebut telah dicatat baik mutasi tambah dan kurang dengan saldo per 31 Desember 2019 senilai Rp12.885.232.656,20, namun demikian belum dilaporkan sebagai Persediaan pada Neraca per 31 Desember 2019 karena belum didukung adanya dokumen hibah serta masih diakui sebagai persediaan Pemerintah Pusat.

Persediaan kadaluarsa per 31 Desember 2019 senilai Rp8.776.908.991,05 berupa persediaan obat, bahan kimia, barang medis habis pakai dan barang cetak, dengan rincian sebagai berikut.

No	Jenis Persediaan	Dinas Kesehatan	UPT RS Mata Bali Mandara	UPT RSUD Bali Mandara	UPT RS Jiwa	UPT Kestrad dan olga	Jumlah
1	Bahan Kimia	343.488.000,00					343.488.000,00
2	Alkes habis pakai		883.282,25	84.280.321,06	4.688.393,93		89.851.997,24
3	Obat Generik	7.114.666,00					7.114.666,00
4	Bahan obat-obatan	5.334.766,00	1.320.007,5	509.843.958,17	25.374.720,45		541.873.452,12
5	Cetak					14.497.000,00	14.497.000,00
6	Persediaan akan Diserahkan ke Pihak Ketiga	7.780.083.875,69					7.780.083.875,69
	Jumlah	8.136.021.307,69	2.203.289,75	594.124.279,23	30.063.114,38	14.497.000,00	8.776.908.991,05

5.2.1.2 Investasi Jangka Panjang

	1.373.777.524.568,76	1.181.822.481.420,07
--	----------------------	----------------------

Saldo tersebut merupakan saldo Investasi Jangka Panjang yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal neraca, yang terdiri dari:

Investasi Non Permanen	774.032.140,00	3.019.169.375,00
Investasi Permanen	1.373.003.492.428,76	1.178.803.312.045,07
Jumlah	1.373.777.524.568,76	1.181.822.481.420,07

5.2.1.2.1 Investasi Non Permanen

	774.032.140,00	3.019.169.375,00
--	----------------	------------------

Saldo tersebut merupakan saldo Investasi Non Permanen berupa dana bergulir yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal neraca yang dikelola oleh 5 (lima) OPD yaitu:

1. Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan	0,00	0,00
Berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Gubernur Bali dengan Direktur Utama PT. BPD Bali Nomor 075/06/PKS/B.PEM/2011/0029B.107.110.2011		
2. Dinas Koperasi UKM	774.032.140,00	3.019.169.375,00
Berdasarkan Adendum Perjanjian Kerjasama antara Gubernur Bali dengan Direktur Utama PT. BPD Bali Nomor 075/08/PKS/B.PEM/2011/029D.107.110.2011		
3. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	0,00	0,00
Berdasarkan Adendum Perjanjian Kerjasama antara Gubernur Bali dengan Direktur Utama PT. BPD Bali Nomor 075/08/PKS/B.PEM/2011/0029D.107.110.2011		
4. Dinas Perkebunan	0,00	0,00
Berdasarkan Adendum Perjanjian Kerjasama antara Gubernur Bali dengan Direktur Utama PT. BPD Bali Nomor 075/07/PKS/B.PEM/2011/0029C.107.110.2011		
5. Sekretariat Daerah pada Biro Perekonomian Pembangunan	0,00	0,00
Berdasarkan Adendum Perjanjian Kerjasama antara Gubernur Bali dengan Direktur Utama PT. BPD Bali Nomor 075/08/PKS/B.PEM/2011/0029D.107.110.2011		
Jumlah	774.032.140,00	3.019.169.375,00

Mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Bali pada Bab IX Kebijakan Akuntansi Investasi, pelaksanaan dana bergulir seluruh resiko ditanggung pihak executing (PT. Bank BPD Bali), maka dana bergulir dinilai dan disajikan sebesar jumlah uang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah/Harga Perolehan dan tidak dilakukan penyisihan atasnya.

Mutasi kurang saldo Investasi Non Permanen pada Dinas Koperasi UKM senilai Rp2.245.137.235,00 dari Rp3.019.169.375,00 menjadi Rp774.032.140,00 merupakan penyetoran selama tahun 2019.

5.2.1.2.2 Investasi Permanen

	1.373.003.492.428,76	1.178.803.312.045,07
--	----------------------	----------------------

Saldo tersebut merupakan saldo Investasi Permanen yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal neraca yang terdiri dari investasi pada:

1. Investasi pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD

a. Perusahaan Daerah

	2.821.173.925,20	4.604.772.755,20
--	-------------------------	-------------------------

Nilai penyertaan modal pada perusahaan daerah disajikan dengan menggunakan metode ekuitas, karena persentase kepemilikan investasi Pemerintah Provinsi Bali pada Perusahaan Daerah sebesar **100,00%**. Nilai penyertaan modal pada Perusahaan Daerah disajikan dengan penambahan/pengurangan nilai tahun 2018 dari tahun lalu sesuai Laporan Rugi Laba tahun 2018. Laporan Keuangan Perusahaan Daerah telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan dengan Laporan Nomor 00036/3.0225/AU.2/05/0727-1/1/III/2020 tanggal 30 Maret 2020.

Berikut perhitungan nilai penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Tahun 2019:

Modal Disetor	5.282.769.658,00
Akumulasi Laba/(Rugi) s.d. Tahun Lalu Bagian Pemprov. Bali	(677.996.902,80)
Laba/(Rugi) Tahun Berjalan	(1.783.598.830,00)
Deviden yang Dibagikan atas Laba Tahun Berjalan	0,00
Jumlah	2.821.173.925,20

b. PT. BPD Bali

	1.101.557.278.442,58	911.000.398.491,11
--	-----------------------------	---------------------------

Nilai penyertaan modal pada PT. BPD Bali disajikan dengan menggunakan metode ekuitas, karena persentase *kepemilikan* investasi Pemerintah Provinsi Bali pada PT. BPD Bali sebesar **33,74%**. Penambahan nilai penyertaan modal pada PT. BPD Bali tahun 2019 adalah sebesar persentase kepemilikan dari Laba PT BPD Bali tahun 2019 sesuai Laporan Rugi Laba LK Audited yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan & Rekan dengan Laporan Nomor 00003/1.1000/AU.1/07/0136-3/1/I/2020 tanggal 28 Januari 2020 dan dikurangi dengan deviden yang dibagikan atas Laba Tahun 2019 yang telah ditetapkan dengan Akta Notaris I Made Widiada,SH Nomor 6 tanggal 11 Maret 2020 tentang Berita Acara RUPS Tahunan PT BPD Bali dan Berita Acara No. 0373/BA/DIR/TIA/2020 tentang Pembagian Deviden Tahun Buku 2019 tanggal 16 Maret 2020.

Berikut perhitungan nilai penyertaan modal pada PT. BPD Bali Tahun 2019 :

Modal Disetor	614.912.000.000,00
Akumulasi Laba/(Rugi) s.d. Tahun Lalu Bagian PemProv. Bali	296.088.398.491,11
Laba/(Rugi) Tahun Berjalan	564.780.319.951,00
Bagian Laba untuk Pemegang Saham Lainnya	(374.223.439.999,53)
Deviden yang Dibagikan atas Laba Tahun Berjalan	0,00
Jumlah	1.101.557.278.442,58

c. PT. Penjamin Kredit Daerah Provinsi Bali

	134.050.280.764,90	131.060.849.877,69
--	---------------------------	---------------------------

Nilai penyertaan modal pada PT Penjamin Kredit Daerah Provinsi Bali disajikan dengan menggunakan metode ekuitas, karena persentase kepemilikan investasi Pemerintah Provinsi Bali pada PT *Penjamin* Kredit Daerah Provinsi Bali sebesar **91,90%**. Penambahan nilai penyertaan modal pada PT. Penjamin Kredit Daerah Provinsi Bali tahun 2019 adalah sebesar persentase kepemilikan dari Laba tahun 2019 sesuai Laporan Rugi Laba yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan dengan Laporan Nomor 00003/3.0225/AU.1/08/0727-3/1/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 dan telah dikurangi nilai deviden yang dibagikan atas Laba Tahun 2019 sesuai penyeteroran tanggal 15 April 2020.

Berikut perhitungan nilai penyertaan modal pada PT Penjamin Kredit Daerah Provinsi Bali Tahun 2019:

Modal Disetor	120.000.000.000,00
Akumulasi Laba/(Rugi) s.d. Tahun Lalu	11.060.849.877,69
Laba/(Rugi) Tahun Berjalan	3.302.873.591,00
Bagian Laba untuk Pemegang Saham Lainnya	(313.442.703,79)
Deviden yang Dibagikan atas Laba Tahun Berjalan	0,00
Jumlah	134.050.280.764,90

d. PT. Bali Semesta Mandiri

0,00	0,00
-------------	-------------

Nilai penyertaan modal pada PT. Bali Semesta Mandiri disajikan dengan menggunakan metode ekuitas, karena persentase kepemilikan investasi Pemerintah Provinsi Bali pada PT. Bali Semesta Mandiri sebesar 51,00%. Nilai penyertaan modal pada PT. Bali Semesta Mandiri yang disajikan sebesar persentase kepemilikan dikalikan dengan nilai ekuitas yang diungkapkan oleh PT. Bali Semesta Mandiri dalam Neraca *Unaudited* 2019. Akumulasi rugi pada PT. Bali Semesta Mandiri yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali telah melebihi nilai penyertaan yang disetorkan sebesar Rp318.750.000,00, sehingga disajikan sebesar Rp0,00.

Melalui RUPS Luar Biasa, PT. Bali Semesta Mandiri telah dibubarkan dan telah dilaporkan pembubaran tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU - AH.0110-0007188 tanggal 2 Oktober 2018. Saat ini Perda Pembubaran tersebut sudah diusulkan dan dalam pembahasan.

2. Investasi pada Perusahaan Milik Swasta**a. PT. Rumah Sakit Puri Raharja**

33.424.759.296,08	30.987.290.921,07
--------------------------	--------------------------

Nilai penyertaan modal pada PT. Rumah Sakit Puri Raharja disajikan dengan menggunakan metode ekuitas, karena persentase kepemilikan investasi Pemerintah Provinsi Bali pada PT. Rumah Sakit Puri Raharja sebesar 58,24%. Penambahan nilai penyertaan modal pada PT. Rumah Sakit Puri Raharja tahun 2019 adalah sebesar persentase kepemilikan dari Laba tahun 2019 sesuai Laporan Rugi Laba pada LK Audited yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjo, Machdjud Modopuro dan Rekan No. 00001/2.0079/AU.2/05/0822-2/1/IV/2020 tanggal 24 April 2020 dan telah dikurangi nilai deviden yang dibagikan atas Laba Tahun 2019 sesuai pembagian deviden TA 2019 tertanggal 13 Mei 2020.

Berikut perhitungan nilai penyertaan modal pada PT. Rumah Sakit Puri Raharja Tahun 2019:

Modal Disetor	11.408.202.750,00
Akumulasi Laba/(Rugi) s.d. Tahun Lalu	19.579.088.171,07
Koreksi Akumulasi Laba/(Rugi) s.d. Tahun Lalu Bagian PemProv. Bali	0,00
Laba/(Rugi) Tahun Berjalan Bagian PemProv. Bali	4.185.213.556,00
Bagian Laba untuk Pemegang Saham Lainnya	(1.747.745.180,99)
Deviden yang Dibagikan atas Laba Tahun Berjalan	0,00
Jumlah	33.424.759.296,08

b. PT. Asuransi Bangun Askrida

1.150.000.000,00	1.150.000.000,00
-------------------------	-------------------------

Nilai penyertaan modal pada PT. Asuransi Bangun Askrida disajikan dengan menggunakan metode biaya, karena persentase kepemilikan investasi Pemerintah Provinsi Bali pada PT. Asuransi Bangun Askrida sebesar 0,385%.

c. PT. Jasa Marga Bali Tol

100.000.000.000,00 100.000.000.000,00

Nilai penyertaan modal pada PT. Jasa Marga Bali Tol disajikan dengan menggunakan metode biaya, karena persentase kepemilikan investasi Pemerintah Provinsi Bali pada PT. Jasa Marga Bali Tol sebesar 8,01%. Nilai penyertaan modal pada PT. Jasa Marga Bali Tol yang disajikan sebesar biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali yaitu sebesar Rp100.000.000.000,00 yang dikeluarkan berdasarkan Berdasarkan Perda Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah. Di tahun 2018, Pemerintah Provinsi Bali tidak melakukan penambahan investasi pada PT. Jasa Marga Bali Tol.

5.2.1.3 Aset Tetap

7.743.629.861.229,56 7.473.548.024.902,38

Saldo tersebut merupakan saldo Aset Tetap yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal neraca, yang terdiri dari:

Tanah	4.166.232.536.186,23	4.087.270.627.470,23
Peralatan dan Mesin	1.600.892.532.185,69	1.352.612.850.236,94
Gedung dan Bangunan	2.170.807.551.558,85	1.967.779.583.359,25
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.940.133.070.386,02	2.805.863.639.783,15
Aset Tetap Lainnya	63.719.411.785,25	59.558.717.173,58
Konstruksi Dalam Pengerjaan	21.598.209.957,17	8.313.342.350,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(3.219.753.450.829,65)	(2.807.850.735.470,76)
Jumlah	7.743.629.861.229,56	7.473.548.024.902,38

5.2.1.3.1 Aset Tetap Tanah

4.166.232.536.186,23 4.087.270.627.470,23

Saldo tersebut merupakan saldo Aset Tetap Tanah yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal neraca. Rincian mutasi Aset Tetap Tanah Pemerintah Provinsi Bali selama TA 2019 yaitu sebagai berikut:

Saldo Awal		4.087.270.627.470,23
<i>Mutasi Tambah:</i>		
- Belanja Modal	63.506.862.123,00	
- Penerimaan Hibah	823.069.700,00	
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	0,00	
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	11.372.966.000,00	
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	51.352.620.743,00	
- Mutasi antar OPD	28.425.649.125,00	
Jumlah Mutasi Tambah		155.481.167.691,00
<i>Mutasi Kurang:</i>		
- Pengeluaran Hibah	2.485.693.000,00	
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	0,00	
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	18.672.619.350,00	
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	26.935.297.500,00	
- Mutasi antar OPD	28.425.649.125,00	
Jumlah Mutasi Kurang		76.519.258.975,00
Saldo Akhir		4.166.232.536.186,23

Rincian mutasi Aset Tetap Tanah pada masing - masing OPD dapat dilihat pada lampiran 16.

Tambahan informasi signifikan yang diungkapkan dalam catatan ini:

1. Ditahun 2019, Pemerintah Provinsi Bali melakukan belanja modal sebesar Rp63.506.862.123,00 yang digunakan

- untuk pembelian tanah bawah badan jalan untuk *shortcut* ruas jalan Singaraja – Mengwitani;
2. Dari saldo tersebut terdapat tanah yang disewakan sebagian dari keseluruhan luasnya yaitu sebanyak 31 bidang tanah. Daftar tanah yang disewakan sebagian dari keseluruhan luasnya dapat dilihat pada *lampiran 17*;
 3. Pemerintah Provinsi Bali di tahun 2019 telah melakukan penelusuran terhadap 154 bidang tanah yang belum tercatat sebagai Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Bali namun telah dilakukan perjanjian pinjam pakai dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali dan Instansi Vertikal di wilayah Bali, dengan hasil sebagai berikut :
 - a. 83 bidang tanah dicatatkan sebagai Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Bali;
 - b. 38 bidang tanah sudah dicatatkan sebagai Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Bali pada tahun 2018
 - c. 7 bidang tanah tercatat sebagai Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten di Provinsi Bali
 - d. 3 bidang tanah sudah dihibahkan ke Pemerintah Kabupaten
 - e. 6 bidang tanah adalah catatan ganda, dan
 - f. 17 bidang tanah akan dilakukan penelusuran ulang pada tahun 2020

Daftar penelusuran 154 bidang tanah tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini dan daftar secara rinci 17 bidang tanah yang dilakukan penelusuran pada tahun 2020 dimaksud dapat dilihat pada *lampiran 18*.

No	Kabupaten/Kota	Hasil Penelusuran							
		Jumlah	Input 2019	Input 2018	Tercatat di Pemkab	Hibah ke Pemkab	Catatan Ganda	Penelusuran Kembali 2020	Jumlah
1	Karangasem	40	36	1	1	1	-	1	40
2	Klungkung	11	5	1	-	-	1	4	11
3	Bangli	10	2	1	3	2	-	2	10
4	Gianyar	2	2	-	-	-	-	-	2
5	Badung	22	13	8	-	-	-	1	22
6	Tabanan	26	12	8	3	-	-	3	26
7	Buleleng	31	7	14	-	-	5	5	31
8	Jemberana	7	5	2	-	-	-	-	7
9	Denpasar	3	-	2	-	-	-	1	3
10	Instansi Vertikal	2	1	1	-	-	-	-	2
Jumlah		154	83	38	7	3	6	17	154

4. Pemerintah Provinsi Bali memiliki 8 (delapan) permasalahan terkait dengan aset tetap tanah baik secara administrasi hingga hukum dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tanah Eks HGU No. 1 Desa Pemuteran Kecamatan Grogak Kabupaten Buleleng seluas 2.465.000 m² (246,5 Ha), Tanah dikuasai oleh PT Margarana selaku pemegang HGU No.1 yang sudah berakhir pada tanggal 31 Desember 2005, setelah melewati beberapa kali persidangan, Hasil Peninjauan Kembali (PK) ke MA RI pada tanggal 13 Oktober 2017 Pemprov Bali menang dengan agenda selanjutnya melakukan proses eksekusi. Pada tanggal 15 Januari 2020 dilakukan rapat tindak lanjut persiapan eksekusi, namun permohonan eksekusi ditunda sambil menunggu koordinasi dengan DPRD Provinsi Bali.
 - b. Tanah Pemerintah Provinsi Bali SHP No. 4 Desa Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar seluas 3.000 m² (0,3 Ha, diatas tanah tersebut telah terbit sertifikat an. I Nyoman Sondra A yang telah dijual dan dijadikan perumahan, berdasarkan hal tersebut Pemprov Bali menggugat Kantor Pertanahan Kota Denpasar dan I Nyoman Sondra Astawa ke Pengadilan Negeri Denpasar, namun gugatan tidak dikabulkan karena PN Denpasar tidak berwenang mengadili jenis perkara ini dalam proses koordinasi dengan Biro Hukum untuk melakukan gugatan kembali.
 - c. Tanah Pemerintah Provinsi Bali SHP No. 168 Desa Dauh Puri seluas 2.650 m² (0,265 Ha), berlokasi di Jl. Pulau Ayu, digugat oleh perorangan, berdasarkan bukti-bukti kepemilikan / Pipil. Proses peradilan sampai pada tingkat Kasasi, dan Pemprov Bali kalah, karena Sertipikat Hak Pakai Pemerintah Provinsi Bali No. 168 masih berlaku (dalam putusan pengadilan tidak ada pembatalan sertipikat) Pemprov Bali

bersurat ke BPN Kota Denpasar untuk menunda setiap permohonan sertipikat tanah dimaksud sambil menunggu proses pengajuan PK oleh Kuasa Hukum Pemprov Bali yang telah dilakukan pada Bulan Desember 2014.

- d. Tanah HGU No. 2 seluas 2.678.219 m² dan HGU No. 3 seluas 1.519.815 m² Desa Sumberklampok Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng, dikuasai secara turun temurun oleh masyarakat Desa Sumberklampok. Tindak lanjut terakhir dalam rangka mediasi penyelesaian masalah, Desa Sumberklampok sudah membentuk Tim Sembilan selaku perwakilan masyarakat Desa Sumberklampok yang akan bersama-sama menyusun kebijakan penyelesaian masalah. Langkah awal dimulai Pebruari 2020, diawali dengan validasi data penduduk Desa Sumberklampok.
- e. Tanah HPL No.1 Desa Kesiman Kertalangu seluas 120.450 m² dalam proses pemanfaatan kerjasama dengan PT.GNA terdapat kendala di atas bidang tanah tersebut telah terbit 3 (tiga) sertifikat Hak Milik (SHM) yaitu :SHM No. 4476 seluas 2.000 m² an Pura Watu Lumut; SHM No. 4434 seluas 4.000 m² an Pura Praja Pati Buitan; SHM No. 4433 seluas 3.000 m² an Laba Pura Praja Pati Buitan; Permasalahan tersebut terjadi akibat adanya cacat administrasi dalam penerbitan sertifikat yang mana dalam penyelesaian permasalahan tersebut merupakan kewenangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN RI. Berkas permasalahan telah dilimpahkan oleh Kanwil BPN Provinsi Bali ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN RI namun sampai saat ini belum ada tanggapan dari Kementerian Agraria dan Tata ruang/ BPN RI. Pemprov Bali bersurat kepada Menteri ATR / Kepala BPN RI untuk mempertanyakan progres tindaklanjut permohonan pembatalan 3 SHM di atas tanah Pemprov Bali HPL No. 1 Kesiman, terakhir tanggal 28 Nopember 2019.
- f. Tanah HPL No. 2 Desa Kesiman Kertalangu seluas 170.750 m² yang mana di atasnya telah terbit HGB No. 80 an PT.Abdi Persada Nusantara yang saat ini dimiliki oleh Sdr. Hartono (hasil lelang) tidak menemukan kesepakatan pemanfaatan tanah antara Pemprov Bali selaku pemilik HPL dan Sdr.Hartono selaku pemegang HGB No.80. saat ini tanah dalam kondisi terlantar. berdasarkan hal tersebut Pemprov Bali mengajukan gugatan Perdata pembatalan HGB No. 80 namun tidak dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar dengan alasan permasalahan ini bukan kewenangan Pengadilan Negeri Denpasar. Tahun 2019 Hari Boedihartono menggugat Gubernur Bali karena menguasai secara fisik tanah dan bangunan Sertipikat HGB No. 80 / Kesiman Petilan seluas 8,9 Ha. Perkara tersebut saat ini masih dalam proses Mediasi.
- g. Tanah SHP No. 47 Desa Sumerta Klod seluas 1.695 m² Diklaim sebagai tanah milik oleh I Ketut Suteja, dan digugat ke pengadilan Hasil Putusan PN Denpasar setelah Pemprov Bali dinyatakan menang terhadap gugatan tersebut, muncul gugatan baru dari A.A. Gede Putra Jaya yang mengklaim tanah aset SHP Nomor 47 Desa Sumerta Klod, Pemprov Bali kembali menang dalam perkara melawan A.A. Gede Putra Jaya (penggugat). menunggu hasil laporan resmi dari Biro Hukum agar permasalahan ini dapat dinyatakan selesai.
- h. Tanah SHP No. 1 Kelurahan Lukluk Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung seluas 1.515 m² Digugat dan diklaim sebagai hak milik oleh Anjasmoro, Pemprov Bali menang pada tingkat Kasasi melawan Ari Anjasmoro, dan Ari Anjasmoro mengajukan Peninjauan Kembali. Saat ini masih proses PK.

Dari 8 (delapan) permasalahan tanah di atas, 6 (enam) diantaranya sedang diproses secara hukum, dengan rincian yang dapat dilihat pada *lampiran 19*

5.2.1.3.2 Aset Tetap Peralatan dan Mesin

1.600.892.532.185,69

1.352.612.850.236,94

Saldo tersebut merupakan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal neraca. Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Provinsi Bali selama TA 2019 yaitu sebagai berikut:

Saldo Awal		1.352.612.850.236,94
Mutasi Tambah:		
Belanja Modal	236.359.501.621,14	
Kapitalisasi Belanja Non Modal	170.938.588,00	
Penerimaan Hibah	24.152.365.151,00	
Reklasifikasi antar Aset Tetap	11.183.649.838,50	
Reklasifikasi dari Aset Lainnya	354.272.600,00	
Koreksi Pencatatan Saldo Awal	13.217.053.544,01	
Mutasi antar OPD	19.904.270.049,00	
Jumlah Mutasi Tambah		305.342.051.391,65
Mutasi Kurang:		
Salah Pos Belanja Modal (Seharusnya Belanja Non Modal)	447.429.866,36	
Pengeluaran Hibah	516.010.000,00	
Penghapusan	0,00	
Reklasifikasi antar Aset Tetap	3.969.780.943,90	
Reklasifikasi ke Aset Lainnya	25.588.699.358,64	
Koreksi Pencatatan Saldo Awal	1.772.705.913,00	
Dibawah Kapitalisasi	4.863.473.312,00	
Mutasi antar OPD	19.904.270.049,00	
Jumlah Mutasi Kurang		57.062.369.442,90
Saldo Akhir		1.600.892.532.185,69

Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada masing - masing OPD dapat dilihat pada *lampiran 20*.

Tambahan informasi signifikan yang diungkapkan dalam catatan ini :

- Saldo di atas belum termasuk aset tetap peralatan dan mesin yang memiliki nilai di bawah batas kapitalisasi yang telah dicatat sebagai aset tetap ekstrakompabel sebesar Rp 43.483.497.383,88 dikarenakan nilai perolehan awal tiap aset tersebut berada di bawah batas minimal perolehan awal aset tetap peralatan dan mesin, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Bali.
- Terdapat 2 (dua) sepeda motor kehilangan BPKB dengan Nomor Polisi DK 5497 U dan DK 5498 U yang tercatat pada KIB B Peralatan Mesin Dinas Kehutanan Provinsi Bali yang sedang proses pembuatan BPKB baru di Kepolisian Daerah Bali.

Terdapat 13 (tiga belas) kendaraan hibah periode 2013-2017 dari Kementerian Kehutanan yang tercatat pada KIB B Peralatan Mesin Dinas Kehutanan provinsi Bali terdiri dari sepeda motor dan mobil *pick up* yang BPKBnya masih atas nama Kementerian Kehutanan , sedang dalam proses balik nama kendaran di Kepolisian Daerah Bali.

5.2.1.3.3 Aset Tetap Gedung dan Bangunan

2.170.807.551.558,85 1.967.779.583.359,25

Saldo tersebut merupakan saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal neraca. Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah Provinsi Bali selama TA 2019 yaitu sebagai berikut:

Saldo Awal		1.967.779.583.359,25
<i>Mutasi Tambah:</i>		
- Belanja Modal	128.335.018.713,06	
- Kapitalisasi Belanja Non Modal	2.597.104.737,06	
- Penerimaan Hibah	77.560.857.637,00	
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	54.290.581.625,87	
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	2.363.978.825,00	
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	19.861.927.102,78	
- Mutasi antar OPD	39.607.746.210,00	
Jumlah Mutasi Tambah		324.617.214.850,77

Mutasi Kurang:

- Salah Pos Belanja Modal (Seharusnya Belanja Non Modal)	0,00	
- Pengeluaran Hibah	296.700.000,00	
- Penghapusan	2.106.536.877,00	
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	67.074.427.602,24	
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	481.902.170,00	
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	11.387.246.994,93	
- Dibawah Kapitalisasi	634.686.797,00	
- Mutasi antar OPD	39.607.746.210,00	
Jumlah Mutasi Kurang		121.589.246.651,17
Saldo Akhir		2.170.807.551.558,85

Rincian Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada masing – masing OPD dapat dilihat pada *lampiran 21*.

Tambahan informasi signifikan yang diungkapkan dalam catatan ini adalah dari saldo tersebut belum termasuk aset tetap gedung dan bangunan yang memiliki nilai di bawah batas kapitalisasi yang telah dicatat sebagai aset tetap ekstrakompabel sebesar Rp 10.960.682.245,89 dikarenakan nilai perolehan awal tiap aset tersebut berada di bawah batas minimal perolehan awal aset tetap gedung dan bangunan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Bali.

5.2.1.3.4 Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

2.940.133.070.386,02 2.805.863.639.783,15

Saldo tersebut merupakan saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal neraca. Rincian mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Provinsi Bali selama TA 2019 yaitu sebagai berikut:

Saldo Awal		2.805.863.639.783,15
<i>Mutasi Tambah:</i>		
- Belanja Modal	117.877.559.353,84	
- Kapitalisasi Belanja Non Modal	0,00	
- Penerimaan Hibah	19.355.655.300,00	
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	4.182.783.414,00	
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	0,00	
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	10.707.585.035,18	
- Mutasi antar OPD	5.089.928.880,00	
Jumlah Mutasi Tambah		157.213.511.983,02
<i>Mutasi Kurang:</i>		
- Salah Pos Belanja Modal (Seharusnya Belanja Non Modal)	0,00	
- Pengeluaran Hibah	0,00	
- Penghapusan	33.895.000,00	
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	13.132.671.025,00	
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	3.938.949.277,00	
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	542.198.298,15	
- Dibawah Kapitalisasi	206.438.900,00	
- Mutasi antar OPD	5.089.928.880,00	
Jumlah Mutasi Kurang		22.944.081.380,15
Saldo Akhir		2.940.133.070.386,02

Rincian Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada masing – masing OPD dapat dilihat pada *lampiran 22*.

Tambahan informasi signifikan yang diungkapkan dalam catatan ini adalah dari saldo tersebut belum termasuk aset tetap jalan, irigasi dan jaringan yang memiliki nilai di bawah batas kapitalisasi yang telah dicatat sebagai aset tetap ekstrakompabel sebesar Rp 1.490.972.352,29 dikarenakan nilai perolehan awal tiap aset tersebut berada di bawah batas minimal perolehan awal aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Bali

5.2.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

	<u>63.719.411.785,25</u>	<u>59.558.717.173,58</u>
Saldo tersebut merupakan saldo Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal neraca. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya Pemerintah Provinsi Bali selama TA 2019 yaitu sebagai berikut:		
Saldo Awal		59.558.717.173,58
<i>Mutasi Tambah:</i>		
- Belanja Modal	10.675.560.548,00	
- Kapitalisasi Belanja Non Modal	11.300.000,00	
- Penerimaan Hibah	427.963.000,00	
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	2.353.566.392,67	
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	0,00	
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	536.552.000,00	
- Mutasi antar OPD	149.870.000,00	
Jumlah Mutasi Tambah		14.154.811.940,67
<i>Mutasi Kurang:</i>		
- Salah Pos Belanja Modal (Seharusnya Belanja Non Modal)	3.965.712.508,00	
- Pengeluaran Hibah	0,00	
- Penghapusan	0,00	
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	4.868.247.540,00	
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	59.932.000,00	
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	470.828.000,00	
- Dibawah Kapitalisasi	479.527.281,00	
- Mutasi antar OPD	149.870.000,00	
Jumlah Mutasi Kurang		9.994.117.329,00
Saldo Akhir		63.719.411.785,25

Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya pada masing - masing OPD dapat dilihat pada *lampiran 23*.

Tambahan informasi signifikan yang diungkapkan dalam catatan ini adalah dari saldo tersebut belum termasuk aset tetap lainnya yang memiliki nilai di bawah batas kapitalisasi yang telah dicatat sebagai aset tetap ekstrakompabel sebesar Rp24.131.903.533,49 dikarenakan nilai perolehan awal tiap aset tersebut berada di bawah batas minimal perolehan awal aset tetap lainnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Bali.

5.2.1.3.6 Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan

	<u>21.598.209.957,17</u>	<u>8.313.342.350,00</u>
Saldo tersebut merupakan saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal neraca. Rincian mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Provinsi Bali selama TA 2019 yaitu sebagai berikut:		
Saldo Awal		8.313.342.350,00
<i>Mutasi Tambah:</i>		
- Belanja Modal	153.572.460,03	
- Kapitalisasi Belanja Non Modal	1.160.520.449,00	
- Penerimaan Hibah	0,00	
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	68.718.173.102,74	
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	0,00	
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	0,00	
- Mutasi antar OPD	48.400.000,00	
Jumlah Mutasi Tambah		71.080.666.011,77
<i>Mutasi Kurang:</i>		
- Salah Pos Belanja Modal (Seharusnya Belanja Non Modal)	0,00	

- Pengeluaran Hibah	0,00	
- Penghapusan	0,00	
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	57.402.609.071,90	
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	0,00	
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	344.789.332,70	
- Mutasi antar OPD	48.400.000,00	
Jumlah Mutasi Kurang		57.795.798.404,60
Saldo Akhir		21.598.209.957,17

Rincian Mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada masing - masing OPD dapat dilihat pada *lampiran 24*.

5.2.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(3.219.753.450.829,65) (2.807.850.735.470,76)

Saldo tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal neraca. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Provinsi Bali selama tahun 2019 diuraikan sebagai berikut:

Saldo Awal		(2.807.850.735.470,76)
<i>Mutasi Tambah:</i>		
- Beban Penyusutan	(410.643.690.766,42)	
- Penyusutan Barang Hibah	(16.889.489.596,00)	
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	(13.992.157.965,18)	
- Reklasifikasi dari Akumulasi Aset Lainnya	(1.247.228.792,09)	
- Mutasi antar OPD	(12.464.374.455,00)	
Jumlah Mutasi Tambah		(455.236.941.574,69)
<i>Mutasi Kurang:</i>		
- Akumulasi atas Aset Tetap yang Dihilangkan	497.139.452,00	
- Akumulasi atas Aset Tetap yang Dihapuskan Langsung	328.336.603,00	
- Reklasifikasi ke Akumulasi Aset Lainnya	25.166.689.688,33	
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	4.876.975.667,47	
- Mutasi antar OPD	12.464.374.455,00	
- Dibawah Kapitalisasi	710.350,00	
Jumlah Mutasi Kurang		43.334.226.215,80
Saldo Akhir		(3.219.753.450.829,65)

Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada masing - masing OPD dapat dilihat pada *lampiran 25*.

5.2.1.5 Aset Lainnya

746.926.529.576,05 736.039.568.746,26

Saldo tersebut merupakan saldo Aset Lainnya milik Pemerintah Provinsi Bali per tanggal neraca, yang terdiri dari:

Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga	593.288.127.933,53	590.320.160.599,33
Aset Tidak Berwujud	12.328.266.365,00	9.593.834.604,00
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(6.289.862.588,00)	(5.795.431.274,00)
Aset Lain - Lain	147.599.997.865,52	141.921.004.816,93
Jumlah	746.926.529.576,05	736.039.568.746,26

5.2.1.5.1 Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga

	593.288.127.933,53	590.320.160.599,33
--	--------------------	--------------------

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Digunakan Pihak Ketiga Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2019 dan saldo awal per 31 Desember 2018, dengan rincian sebagai berikut:

Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga Berupa Tanah	590.903.092.100,00	587.188.678.638,89
Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga Berupa Gedung dan Bangunan		
- Harga Perolehan	3.230.296.840,00	4.883.222.547,00
- Akm. Peny. Aset Kemitraan Gedung dan Bangunan	(845.261.006,47)	(1.751.740.586,56)
Jumlah	593.288.127.933,53	590.320.160.599,33

Rincian mutasi Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dapat dilihat pada uraian dibawah ini:

1. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga Berupa Tanah:

Saldo Awal		587.188.678.638,89
<i>Mutasi Tambah:</i>		
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Tahun Berjalan	18.422.554.461,11	
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	0,00	
Jumlah Mutasi Tambah		18.422.554.461,11
<i>Mutasi Kurang:</i>		
- Penghapusan	14.708.141.000,00	
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	0,00	
Jumlah Mutasi Kurang		14.708.141.000,00
Saldo Akhir		590.903.092.100,00

2. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga Berupa Gedung dan Bangunan

Saldo Awal		
- Gedung dan Bangunan		4.883.222.547,00
- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		(1.751.740.586,56)
<i>Mutasi Tambah:</i>		
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Tahun Berjalan	14.367.573,00	
- Reklasifikasi dari Akm. Peny. Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun Berjalan	0,00	
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal		
✓ Gedung dan Bangunan	0,00	
✓ Akm. Peny. Aset Tetap Gedung dan Bangunan	0,00	
Jumlah Mutasi Tambah		14.367.573,00
<i>Mutasi Kurang:</i>		
- Penghapusan		
✓ Gedung dan Bangunan	1.652.925.707,00	
✓ Akm. Peny. Gedung dan Bangunan	(906.479.580,09)	
- Dibawah Kapitalisasi	14.367.573,00	
Jumlah Mutasi Kurang		1.667.293.280,00
Saldo Akhir		3.230.296.840,00
- Harga Perolehan		3.230.296.840,00
- Akumulasi Penyusutan		(845.261.006,47)

Rincian Aset Tetap Tanah dan Gedung yang dikerjasamakan sebagai Aset Kemitraan dapat dilihat pada lampiran 26.

5.2.1.5.2 Aset Tidak Berwujud

12.328.266.365,00 **9.593.834.604,00**

Saldo tersebut merupakan saldo Aset Tidak Berwujud Pemerintah Provinsi Bali per tanggal neraca. Rincian mutasi Aset Tidak Berwujud Pemerintah Provinsi Bali selama TA 2019 yaitu sebagai berikut:

Saldo Awal		9.593.834.604,00
<i>Mutasi Tambah:</i>		
- Belanja Modal	3.610.946.200,00	
- Kapitalisasi Belanja Non Modal	0,00	
- Penerimaan Hibah	0,00	
- Reklasifikasi antar Aset Lainnya	0,00	
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Tahun Berjalan	412.565.600,00	
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	1.633.238.961,00	
- Mutasi antar OPD	0,00	
Jumlah Mutasi Tambah		5.656.750.761,00
<i>Mutasi Kurang:</i>		
- Salah Pos Belanja Modal (Seharusnya Belanja Non Modal)	0,00	
- Pengeluaran Hibah	0,00	
- Penghapusan	0,00	
- Reklasifikasi antar Aset Lainnya	0,00	
- Reklasifikasi ke Aset Tetap	2.922.319.000,00	
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	0,00	
- Mutasi antar OPD	0,00	
Jumlah Mutasi Kurang		2.922.319.000,00
Saldo Akhir		12.328.266.365,00

Rincian mutasi Aset Tidak Berwujud pada masing-masing OPD dapat dilihat pada *lampiran 27*.

5.2.1.5.3 Amortisasi Aset Tidak Berwujud

(6.289.862.588,00) **(5.795.431.274,00)**

Saldo tersebut merupakan saldo Amortisasi Aset Tidak Berwujud Pemerintah Provinsi Bali per tanggal neraca. Rincian mutasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Pemerintah Provinsi Bali selama TA 2019 yaitu sebagai berikut:

Saldo Awal		(5.795.431.274,00)
<i>Mutasi Tambah:</i>		
- Beban Amortisasi	(1.211.359.903,00)	
- Amortisasi Aset Tidak Berwujud dari Perolehan Hibah	(0,00)	
- Reklasifikasi dari Akumulasi Aset Tetap	(0,00)	
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	(1.669.632.128,00)	
- Mutasi antar OPD	(0,00)	
Jumlah Mutasi Tambah		(2.880.992.031,00)
<i>Mutasi Kurang:</i>		
- Amortisasi atas Aset Tidak Berwujud yang D hibah	0,00	
- Amortisasi atas Aset Tidak Berwujud yang Dihapuskan Langsung	0,00	
- Reklasifikasi ke Akumulasi Aset Tetap	0,00	
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	2.386.560.717,00	
- Mutasi antar OPD	0,00	
Jumlah Mutasi Kurang		2.386.560.717,00
Saldo Akhir		(6.289.862.588,00)

Rincian mutasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada masing-masing OPD dapat dilihat pada *lampiran 28*.

5.2.1.5.4 Aset Lain - Lain

	147.599.997.865,52	141.921.004.816,93
Saldo tersebut merupakan saldo Aset Lain - Lain milik Pemerintah Provinsi Bali per tanggal neraca, yang terdiri dari:		
Aset Tetap Rusak Berat	25.935.779.644,40	40.018.031.922,49
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rusak Berat	(20.107.114.966,50)	(36.484.507.828,55)
Aset Tetap yang akan Dihibahkan	215.323.214.999,00	216.258.672.998,99
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang akan Dihibahkan	(81.549.938.107,00)	(81.651.734.787,00)
Aset Lain - Lain Lainnya	7.998.056.295,62	3.780.542.511,00
Jumlah	147.599.997.865,52	141.921.004.816,93

Rincian mutasi Aset Lain - Lain Pemerintah Provinsi Bali selama TA 2019 dan penjelasan yang menyertainya yaitu sebagai berikut:

1. Aset Tetap Rusak Berat:

Saldo Awal

- Peralatan dan Mesin Rusak Berat	36.666.304.336,49	
- Gedung dan Bangunan Rusak Berat	2.709.566.986,00	
- Jalan, Irigasi dan Jaringan Rusak Berat	97.795.000,00	
- Aset Tetap Lainnya Rusak Berat	544.365.600,00	
Jumlah Saldo Awal		40.018.031.922,49

Mutasi Tambah:

- Reklasifikasi dari:		
✓ Aset Tetap Peralatan dan Mesin	25.588.699.359,36	
✓ Aset Tetap Gedung dan Bangunan	481.902.170,00	
✓ Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.938.949.277,00	
✓ Aset Tetap Lainnya	59.932.000,00	
Jumlah Mutasi Tambah		30.069.482.806,36

Mutasi Kurang:

- Reklas ke Aset Tetap Kondisi Baik	354.272.600,00	
- Penghapusan:		
✓ Aset Tetap Peralatan dan Mesin	41.371.832.809,61	
✓ Aset Tetap Gedung dan Bangunan	481.902.170,00	
✓ Aset Tetap Jalan, Irigasi, Jaringan	250.671.897,00	
✓ Aset Tetap Lainnya	274.767.490,00	
- Koreksi pencacatan Saldo Awal		
✓ Aset Tetap Peralatan dan Mesin	85.000.000,00	
✓ Aset Tetap Gedung dan Bangunan	1.333.288.117,84	

Jumlah Mutasi Kurang		44.151.735.084,45
-----------------------------	--	--------------------------

Saldo Akhir		25.935.779.644,40
--------------------	--	--------------------------

- Aset Tetap Peralatan dan Mesin	20.443.898.286,24	
- Aset Tetap Gedung dan Bangunan	1.376.278.868,16	
- Aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.786.072.380,00	
- Aset Tetap Lainnya	329.530.110,00	

Rincian mutasi Aset Tetap Rusak Berat pada masing-masing OPD dapat dilihat pada *lampiran 29*.

2. Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat**Saldo Awal**

- Aset Tetap Peralatan dan Mesin	(35.044.238.660,00)	
- Aset Tetap Gedung dan Bangunan	(661.538.933,44)	
- Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	(36.318.000,00)	
- Aset Tetap Lainnya	(742.412.235,11)	

Jumlah Saldo Awal (36.484.507.828,55)

Mutasi Tambah:

- Reklasifikasi dari:		
✓ Akm. Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	(25.350.388.728,16)	
✓ Akm. Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	(137.586.736,00)	
✓ Akm. Penyusutan Aset tetap Jalan Irigasi Jaringan	(695.882.721,00)	
✓ Akm. Penyusutan Aset tetap Lainnya	(52.065.333,33)	

Jumlah Mutasi Tambah (26.235.923.518,49)

Mutasi Kurang:

- Reklasifikasi ke Aset Tetap:		
✓ Akm. Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	337.967.414,00	
✓ Akm. Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	375.248.233,44	
- Penghapusan:		
✓ Akm. Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	40.860.738.072,66	
✓ Akm. Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	137.586.736,00	
✓ Akm. Penyusutan Aset Tetap Jalan Irigasi Jaringan	107.298.356,00	
✓ Akm. Penyusutan Aset Tetap Aset Tetap Lainnya	794.477.568,44	

Jumlah Mutasi Kurang 42.613.316.380,54

Saldo Akhir (20.107.114.966,50)

- Aset Tetap Peralatan dan Mesin	(19.195.921.901,50)	
- Aset Tetap Gedung dan Bangunan	(286.290.700,00)	
- Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	(624.902.365,00)	
- Aset Tetap Lainnya	(0,00)	

Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat pada masing-masing OPD dapat dilihat pada lampiran 30.

3. Aset Tetap yang Akan Dihilangkan:

Pemerintah Provinsi Bali di tahun 2019 mencatat aset tetap yang akan dihilangkan sebesar **Rp 215.323.214.999,00** dengan rincian sebagai berikut:

a. Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang akan Dihilangkan Sebesar Rp 270.500.000,00

Saldo tersebut merupakan nilai aset tetap peralatan dan mesin yang akan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Gianyar yang tercatat di Sekretariat Daerah. Aset tersebut direncanakan akan dihilangkan kepada Pemerintah Kabupaten Gianyar, namun masih menunggu Perubahan tentang Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Daerah yang sampai saat ini sedang dibahas di DPRD Provinsi Bali.

b. Gedung dan Bangunan yang akan Dihilangkan Sebesar Rp 5.213.958.000,00

Saldo tersebut merupakan nilai aset tetap gedung dan bangunan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga yang tercatat di Sekretariat Daerah sebanyak 9 unit dengan nilai sebesar Rp 5.213.958.000,00. Aset tetap gedung dan bangunan yang tercatat di Sekretariat Daerah merupakan aset yang akan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Gianyar.

c. Jalan, Irigasi dan Jaringan yang akan Dihilangkan Sebesar Rp 182.790.250.999,00

Saldo tersebut merupakan nilai aset tetap jalan, irigasi dan jaringan yang akan diserahkan kepada pihak

ketiga yang tercatat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang terdiri dari:

No	Jenis Jalan, Irigasi dan Jaringan	Jumlah Uni	Nilai
1	Jalan dan konstruksi pelengkapannya		56.367.895.454,00
2	Instalasi jaringan		809.950.000,00
3	Saluran Induk		108.652.125.545,00
4	Jembatan Beton dan Baja	169	8.588.819.000,00
5	Bangunan Pengaman Irigasi dan Sungai		8.371.461.000,00
Jumlah		282	182.790.250.999,00

Rincian aset tetap jalan, irigasi dan jaringan yang akan dihibahkan dapat dilihat pada *lampiran 31*

d. Konstruksi Dalam Pengerjaan yang akan Dihibahkan Sebesar Rp 27.048.506.000,00

Konstruksi dalam pengerjaan yang akan dihibahkan merupakan konstruksi Pelabuhan Gunaksa senilai Rp27.048.506.000,00 masih dalam proses untuk dihibahkan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 224 Tahun 2016 bahwa Pelabuhan Gunaksa ditetapkan sebagai lintas penyeberangan antar provinsi.

Rincian Aset Lain-lain yang akan dihibahkan pada masing-masing OPD dapat dilihat pada *lampiran 31*.

4. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang akan Dihibahkan

a. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin yang akan Dihibahkan Sebesar Rp 270.500.000,00

Saldo tersebut merupakan nilai akumulasi penyusutan peralatan dan mesin yang akan diserahkan/dihibahkan kepada pihak ketiga yang tercatat di Sekretariat Daerah sebesar Rp 270.500.000,00 sebagaimana diungkapkan pada poin sebelumnya. Di tahun 2019 tidak terdapat reklasifikasi penambahan beban penyusutan atas aset yang akan diserahkan/dihibahkan kepada pihak ketiga dikarenakan masa manfaat dari aset tersebut seluruhnya telah habis.

b. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan yang akan Dihibahkan Sebesar Rp 1.051.481.532,00

Saldo tersebut merupakan nilai akumulasi penyusutan gedung dan bangunan yang akan diserahkan/dihibahkan kepada pihak ketiga yang tercatat di Sekretariat Daerah sebesar Rp 5.213.958.000,00 sebagaimana diungkapkan pada poin sebelumnya.

c. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang akan Dihibahkan Sebesar Rp 80.227.956.575,00

Saldo tersebut merupakan nilai akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang akan diserahkan/dihibahkan kepada pihak ketiga yang tercatat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp 182.790.250.999,00 sebagaimana diungkapkan pada poin sebelumnya.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain yang akan dihibahkan pada masing-masing OPD dapat dilihat pada *lampiran 32*.

5. Aset Lain - Lain Lainnya Sebesar Rp 7.998.056.295,62

a. Saldo aset lain - lain lainnya tersebut merupakan jaminan reklamasi dan pasca tambang per 31 Desember 2019 yang dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Bali. Jaminan tersebut dipungut oleh Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral berdasarkan Pergub Nomor 37 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda nomor 4 Tahun 2017 tentang pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp 4.677.461.095,62.

b. Kapal Penangkap Ikan \geq 30GT sebanyak 4 unit di Dinas Kelautan dan Perikanan, dimana tersebut diadakan di tahun 2014, namun dikarenakan keterlambatan penyelesaian pekerjaan, sesuai dengan saran dari konsultan pengawas, pelaksanaan pekerjaan tersebut diputus kontrak. Pada saat pemutusan kontrak fisik pekerjaan yang sudah diselesaikan sebesar 55,64% dengan nilai Rp3.320.595.200,00 (55,64% x Rp5.968.000.000,00), namun yang dibayarkan sebesar 50% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp2.984.000.000,00 (50% x Rp5.968.000.000,00). Pada APBD-P TA 2015, Dinas Kelautan dan Perikanan

mengusulkan untuk melanjutkan pekerjaan tersebut dengan menggunakan sisa anggaran DAK Tahun 2014 dan telah disetujui dalam APBD-P. Dalam rangka persiapan proses pelelangan, dilakukan inspeksi fisik pekerjaan tersebut diketahui terdapat sebageaian dari peralatan dari kapal tersebut telah hilang dan telah dilaporkan ke Kepolisian (Polres Banyuwangi) dengan Tanda Bukti Lapor Nomor STTLP/167/VI/2015/JTM/RES.BWI tanggal 9 Juli 2015. Sampai dengan saat ini pekerjaan tersebut tidak dapat dilanjutkan, karena mekanisme untuk melanjutkan pekerjaan tersebut tidak dapat dilakukan terkendala ketentuan yang berlaku saat ini terkait dengan pedoman penggunaan SILPA DAK.

Rincian Aset Lain-lain Lainnya pada masing-masing OPD dapat dilihat pada lampiran 33.

5.2.2 Kewajiban

	168.312.600.949,02	156.762.314.144,18
Saldo tersebut merupakan saldo Kewajiban Pemerintah Provinsi Bali per tanggal neraca, yang terdiri dari:		
Kewajiban Jangka Pendek	168.312.600.949,02	156.762.314.144,18
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
Jumlah	168.312.577.949,02	156.762.314.144,18

5.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

	168.312.600.949,02	156.762.314.144,18
Saldo tersebut merupakan Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Provinsi Bali per tanggal neraca, yang terdiri dari:		
Utang Perhitungan Fihak Ketiga	22.509.092,34	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	18.824.792.711,97	18.094.914.131,86
Utang Belanja	42.095.671.395,66	30.454.038.973,20
Utang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	102.648.742.691,91	107.729.716.049,60
Utang Jangka Pendek Lainnya	4.720.885.057,14	483.644.989,52
Jumlah	168.312.600.949,02	156.762.314.144,18

5.2.2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga

	22.509.092,34	0,00
--	----------------------	-------------

Saldo tersebut merupakan saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga Pemerintah Provinsi Bali per tanggal neraca pada SMKN 3 Kintamani atas Utang PPN yang baru disetorkan ke Kas Negara tanggal 7 Januari 2020 dengan total sebesar Rp22.134.093,00 dan SLB Negeri 1 Denpasar atas Utang PPN yang baru disetorkan ke Kas Negara tanggal 14 Februari 2020 dengan total sebesar Rp374.999,34. Seluruh kewajiban Fihak Ketiga selain nilai tersebut telah disetorkan di tahun berjalan sebagaimana diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Arus Kas pada poin 5.4.4.

5.2.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka

	18.824.792.711,97	18.094.914.131,86
Saldo tersebut merupakan saldo Pendapatan Diterima Dimuka Pemerintah Provinsi Bali per tanggal neraca. Rincian saldo Pendapatan Diterima Dimuka atas saldo per 31 Desember 2019, terdiri dari:		
Pendapatan Diterima Dimuka atas Retribusi IMTA	6.043.860.745,14	8.000.599.960,18
Pendapatan Diterima Dimuka atas Retribusi Izin Perikanan	98.462.485,97	91.624.380,94
Pendapatan Diterima Dimuka atas Pemanfaatan Kekayaan Daerah	12.682.469.480,86	10.002.689.790,74
Jumlah	18.824.792.711,97	18.094.914.131,86

5.2.2.1.3 Utang Belanja

	42.095.671.395,66	30.454.038.973,20
--	-------------------	-------------------

Saldo tersebut merupakan saldo Utang Belanja Pemerintah Provinsi Bali per tanggal neraca yang terdiri dari:

Utang Belanja Pegawai	25.175.197.297,53	14.784.947.866,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	16.410.451.638,10	15.669.091.107,20
Utang Belanja Modal	510.022.460,03	0,00
Jumlah	42.095.671.395,66	30.454.038.973,20

5.2.2.1.3.1 Utang Belanja Pegawai

	25.175.197.297,53	14.784.947.866,00
--	-------------------	-------------------

Saldo tersebut merupakan saldo Utang Belanja Pegawai Pemerintah Provinsi Bali per tanggal neraca. Rincian saldo Utang Belanja Pegawai atas saldo per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada *lampiran 13*.

5.2.2.1.3.2 Utang Belanja Barang dan Jasa

	16.410.451.638,10	15.669.091.107,20
--	-------------------	-------------------

Saldo tersebut merupakan saldo Utang Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Bali per tanggal neraca. Rincian saldo Utang Belanja Barang dan Jasa atas saldo per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada *lampiran 13*.

Selain saldo Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2019 tersebut, terdapat utang piutang antar OPD per 31 Desember 2019 senilai Rp400.000.000,00 yaitu atas pemanfaatan TAHURA Ngurah Rai antara UPTD PAL Dinas Pekerjaan Umum dengan UPTD Tahura Dinas Kehutanan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Nomor No.522/148/THR.NR-3 dan No.602.1/108/UPT.PAL-DPU tanggal 13 September 2016 tentang Kerjasama Pemanfaatan Kawasan Hutan Tahura Ngurah Rai Untuk Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (PAL). Kerjasama tersebut dalam rangka penempatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk menjaga kelestarian lingkungan.

5.2.2.1.3.3 Utang Belanja Modal

	510.022.460,03	0,00
--	----------------	------

Saldo tersebut merupakan kemajuan fisik yang belum dibayarkan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal neraca. Terdapat selisih antara realisasi pembayaran dengan kemajuan fisik pekerjaan sebagai berikut:

Pekerjaan	OPD	Fisik	Keuangan	Utang
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK Kubu Kab.Karangasem dengan Nomor Kontrak : 602.1/10545/CK-DISPUPR tanggal 12 Agustus 2019	Dinas PUPR	5.893.609.500,00	5.537.159.500,00	356.450.000,00
Pekerjaan pada Bangunan Gedung Laboratorium (Bangli)	Dinas Kesehatan	1.222.668.200,00	1.161.534.790,00	61.133.410,00
Bangunan Gedung Laboratorium (Tabanan)	Dinas Kesehatan	1.347.631.934,33	1.255.192.884,30	92.439.050,03
Jumlah				510.022.460,03

5.2.2.1.4 Utang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

102.648.742.691,91 **107.729.716.049,60**

Saldo tersebut merupakan saldo Utang Transfer Pemerintah Provinsi Bali per tanggal neraca. Utang transfer tersebut merupakan utang atas Transfer Bagi Hasil Pajak yang belum disalurkan per tanggal neraca. Rincian saldo Utang Transfer Pemerintah Provinsi Bali atas saldo per 31 Desember 2019 terdiri dari:

Kabupaten Badung	15.425.736.258,32	16.169.268.808,27
Kabupaten Tabanan	11.165.273.815,26	11.738.458.965,41
Kabupaten Jembrana	9.323.083.033,35	9.793.569.445,65
Kabupaten Buleleng	13.616.072.996,26	14.368.103.503,79
Kabupaten Gianyar	11.162.349.216,78	11.732.894.136,63
Kabupaten Bangli	8.140.624.429,19	8.469.440.051,40
Kabupaten Karangasem	10.735.473.057,68	11.296.921.584,45
Kabupaten Klungkung	8.012.371.000,33	8.423.406.921,50
Kota Denpasar	15.067.758.884,74	15.737.652.632,50
Jumlah	102.648.742.691,91	

5.2.2.1.5 Utang Jangka Pendek Lainnya

4.720.885.057,14 **483.644.989,52**

Saldo tersebut merupakan saldo Utang Jangka Pendek Lainnya Pemerintah Provinsi Bali per tanggal neraca.

Saldo tersebut terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan sebesar Rp.22.423.961,52
2. Dinas Kesehatan sebesar Rp.21.000.000,00
3. Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Menieral sebesar Rp.4.677.461.095,62

5.2.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

0,00

0,00

Saldo tersebut merupakan saldo Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Provinsi Bali per tanggal neraca.

5.2.3 Ekuitas

10.712.424.739.808,60

10.269.786.301.213,35

Saldo tersebut saldo merupakan saldo ekuitas atau kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Bali yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah per tanggal neraca. Saldo tersebut telah sama dengan Saldo Ekuitas Akhir sebagaimana disajikan dan diungkapkan dalam *Catatan atas Laporan Perubahan Ekuitas poin 5.6.4*

5.3 LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan Laporan Operasional Pemerintah Provinsi Bali diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

	Tahun 2019	Tahun 2018
5.3.1 Pendapatan - LO	6.797.776.422.589,34	6.466.826.846.047,97

Saldo tersebut adalah pengakuan Pendapatan - LO Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di tahun 2019 dan 2018, yang terdiri dari:

Pendapatan Asli Daerah - LO	4.058.754.068.089,33	3.757.410.726.409,97
Pendapatan Transfer - LO	2.616.498.279.035,00	2.535.479.973.047,00
Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO	122.524.075.465,01	173.936.146.591,00
Jumlah	6.797.776.422.589,34	6.466.826.846.047,97

5.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LO

4.058.754.068.089,33	3.757.410.726.409,97
-----------------------------	-----------------------------

Saldo tersebut adalah pengakuan Pendapatan Asli Daerah - LO Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di tahun 2019 dan 2018, yang terdiri dari:

Pendapatan Pajak Daerah - LO	3.464.363.116.496,00	3.236.842.425.880,50
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	35.940.388.706,45	43.235.935.117,49
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	196.270.207.473,69	194.225.579.550,32
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO	362.180.355.413,19	283.106.785.861,66
Jumlah	4.058.754.068.089,33	3.757.410.726.409,97

5.3.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LO

3.464.363.116.496,00	3.236.842.425.880,50
-----------------------------	-----------------------------

Saldo tersebut adalah pengakuan Pendapatan Pajak Daerah - LO Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di tahun 2019 dan 2018, yang terdiri dari:

Pajak Kendaraan Bermotor - LO	1.561.177.286.626,00	1.435.060.549.750,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO	1.255.903.222.300,00	1.144.828.141.500,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	399.492.551.417,00	393.923.470.682,00
Pajak Air Permukaan - LO	3.702.122.553,00	3.392.928.343,00
Pajak Rokok - LO	244.087.933.600,00	259.637.335.605,50
Jumlah	3.464.363.116.496,00	3.236.842.425.880,50

5.3.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO

35.940.388.706,45	43.235.935.117,49
--------------------------	--------------------------

Saldo tersebut adalah pengakuan Pendapatan Retribusi Daerah - LO Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di tahun 2019 dan 2018, yang terdiri dari:

Retribusi Jasa Umum:		
- Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	5.500.245.697,00	4.740.180.000,00
- Retribusi Pelayanan Pendidikan - LO	0,00	0,00
Retribusi Jasa Usaha:		
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	15.179.685.367,00	19.898.687.091,05
- Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	121.950.000,00	154.650.000,00
- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	128.776.000,00	154.785.500,00
- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.918.521.500,00	1.811.693.500,00
Retribusi Perizinan Tertentu		
- Retribusi Izin Trayek	12.985.000,00	396.295.000,00
- Retribusi Izin Usaha Perikanan	186.851.311,85	100.025.619,06
- Retribusi IMTA	12.891.373.830,60	15.979.618.407,38
Jumlah	35.940.388.706,45	43.235.935.117,49

5.3.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

196.270.207.473,69 194.225.579.550,32

Saldo tersebut adalah pengakuan Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2019 dan 2018, yang terdiri dari:

Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LO

- PT. BPD Bali	190.556.879.951,47	188.266.620.095,91
- Perusahaan Daerah	0,00	0,00
- PT. Penjamin Kredit Daerah Provinsi Bali	2.989.430.887,21	2.496.526.570,97
- PT Bali Semesta Mandiri	0,00	0,00

Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta - LO

- PT. Rumah Sakit Puri Raharja	2.437.468.375,01	3.462.432.883,44
- PT. Asuransi Bangun Askrida	286.428.260,00	0,00
- PT. Jasa Marga Bali Toll	0,00	0,00
Jumlah	196.270.207.473,69	194.225.579.550,32

5.3.1.1.4 Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO

362.180.355.413,19 283.106.785.861,66

Saldo tersebut adalah pengakuan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di tahun 2019 dan 2018, yang terdiri dari:

Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO	9.175.000,00	0,00
Penerimaan Jasa Giro - LO	13.987.416.309,13	7.870.764.785,90
Pendapatan Bunga - LO	53.405.625.000,00	38.910.416.666,54
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	0,00	104.517.359,77
Pendapatan Denda Pajak - LO	55.204.579.825,00	50.185.169.600,00
Pendapatan Denda Retribusi - LO	183.759.979,00	30.529.734,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO	1.200.033.700,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian LO	2.220.144.031,00	10.177.954.761,48

Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan - LO	32.390.507.000,00	11.734.495.000,00
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO	20.192.410.998,85	6.926.304.187,43
Pendapatan BLUD - LO	181.634.115.869,25	141.403.066.490,99
Lain - Lain PAD yang Sah Lainnya - LO	1.752.587.700,96	15.763.567.275,55
Jumlah	362.180.355.413,19	283.106.785.861,66

5.3.1.2 Pendapatan Transfer - LO

2.616.498.279.035,00 2.535.479.973.047,00

Saldo tersebut adalah pengakuan Pendapatan Transfer - LO Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di tahun 2019 dan 2018, yang terdiri dari:

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LO	2.548.063.873.035,00	2.493.979.973.047,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	68.434.406.000,00	41.500.000.000,00
Jumlah	2.616.498.279.035,00	2.535.479.973.047,00

5.3.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LO

2.548.063.873.035,00 2.493.979.973.047,00

Saldo tersebut adalah pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LO Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di tahun 2019 dan 2018, yang terdiri dari:

Dana Bagi Hasil Pajak - LO	126.532.557.975,00	182.554.549.512,00
Dana Alokasi Umum - LO	1.325.847.555.000,00	1.268.585.388.000,00
Dana Alokasi Khusus - LO		
- Dana Alokasi Khusus Non Fisik - LO		
1. BOS Satuan Pendidikan Provinsi Bali	811.058.279.000,00	767.923.800.000,00
2. Tambahan Penghasilan Guru (PNSD)	2.409.945.000,00	405.000.000,00
3. Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM	4.890.428.038,00	4.838.614.900,00
4. Tunjangan Profesi Guru	213.007.217.000,00	215.447.647.000,00
5. Dana Pelay. Adminstrasi Kependudukan	1.600.547.620,00	1.410.761.260,00
6. BOS Kesehatan	2.278.502.579,00	1.642.625.000,00
7. Bantuan Operasional Penyelenggara Museum dan Taman Budaya	4.577.000.000,00	0,00
- Dana Alokasi Khusus Fisik - LO		
1. DAK Reguler		
a. Pendidikan	9.062.018.180,00	1.719.279.000,00
b. Kesehatan	5.800.245.090,00	8.305.206.999,00
c. Pertanian	7.700.000.000,00	0,00
d. Kelautan dan Perikanan	395.196.500,00	0,00
e. Jalan	13.321.514.500,00	0,00
2. DAK Penugasan		
a. Pendidikan	8.601.501.593,00	18.147.859.876,00
b. Kesehatan	5.750.225.660,00	0,00
b. Jalan	0,00	17.453.512.000,00
c. Irigasi	2.959.776.400,00	2.399.271.000,00
d. Energi	0,00	976.101.500,00
e. Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.271.362.900,00	2.170.357.000,00

Jumlah	2.548.063.873.035,00	2.493.979.973.047,00
---------------	-----------------------------	-----------------------------

5.3.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO

68.434.406.000,00	41.500.000.000,00
--------------------------	--------------------------

Saldo tersebut adalah pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di tahun 2019 dan 2018 yang terdiri dari:

Dana Insentif Daerah	68.434.406.000,00	41.500.000.000,00
Jumlah	68.434.406.000,00	41.500.000.000,00

5.3.1.3 Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO

122.524.075.465,01	173.936.146.591,00
---------------------------	---------------------------

Saldo tersebut adalah pengakuan Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di tahun 2019 dan 2018, yang terdiri dari:

Pendapatan Hibah - LO	122.524.075.465,01	172.770.933.280,26
Transfer Lainnya - LO	0,00	1.165.213.310,74
Jumlah	122.524.075.465,01	173.936.146.591,00

5.3.1.3.1 Pendapatan Hibah - LO

122.524.075.465,01	172.770.933.280,26
---------------------------	---------------------------

Saldo tersebut adalah pengakuan Pendapatan Hibah - LO Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di tahun 2019 dan 2018, yang terdiri dari:

Pendapatan Hibah Barang dari Pemerintah Pusat	102.614.236.043,01	167.309.933.280,26
Pendapatan Hibah Barang dari Pemerintah Daerah Lainnya	839.673.595,00	0,00
Pendapatan Hibah Badan/Lembaga Swasta Dalam Negeri	6.347.045.715,00	5.388.000.000,00
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat	12.723.120.112,00	0,00
Pendapatan Hibah Barang dari Peserta Diklatpim	0,00	73.000.000,00
Jumlah	122.524.075.465,01	172.770.933.280,26

5.3.1.3.2 Pendapatan Lainnya - LO

0,00	1.165.213.310,74
-------------	-------------------------

Saldo tersebut adalah pengakuan Pendapatan Lainnya - LO Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2018 sedangkan di Tahun 2019 pendapatan ini dicatat sebagaimana disajikan dan diungkapkan dalam Kegiatan Non Operasional pada *point* 5.3.3.

Keuntungan atas selisih lebih penyisihan piutang yang tertagih:

- Penyisihan Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00
- Penyisihan Piutang Transfer	0,00	0,00
- Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	0,00	1.165.213.310,74
Jumlah	0,00	1.165.213.310,74

5.3.2 Beban

6.371.781.637.922,96 6.470.568.984.482,34

Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di tahun 2019 dan 2018, yang terdiri dari:

Beban Operasi	4.262.174.305.556,11	4.610.598.689.959,82
Beban Transfer	2.109.607.332.366,85	1.859.970.294.522,52
Jumlah	6.371.781.637.922,96	6.470.568.984.482,34

5.3.2.1 Beban Operasi

4.262.174.305.556,11 4.610.598.689.959,82

Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Operasi Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di tahun 2019 dan 2018, yang terdiri dari:

5.3.2.1.1 Beban Pegawai

1.602.554.031.323,23 1.593.933.241.285,00

Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Pegawai Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di tahun 2019 dan 2018, yang terdiri dari:

Beban Gaji dan Tunjangan – LO	1.019.082.792.820,00	1.019.585.335.159,00
Beban Tambahan Penghasilan PNS – LO	463.492.195.750,00	471.090.289.157,00
Beban Penerimaan Lainnya	0,00	0,00
Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO	16.611.950.000,00	15.162.775.000,00
Insentif Pemungutan Pajak Daerah – LO	77.514.000.000,53	65.145.949.404,00
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah – LO	2.303.251.385,0	2.753.215.896,00
Beban Honorarium PNS	8.306.906.600,00	8.915.023.850,00
Beban Honorarium Non PNS	2.231.465.963,70	920.360.400,00
Honorarium Pengelolaan Dana BOS – LO	81.000.000,00	81.000.000,00
Beban Pegawai BLUD – LO	10.879.823.804,00	9.428.936.919,00
Beban Pegawai PNS dan Non PNS – LO	1.992.395.000,00	792.105.500,00
Belanja Pegawai BOS – LO	58.250.000,00	58.250.000,00
Jumlah	1.602.554.031.323,23	1.593.933.241.285,00

5.3.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

1.196.784.312.613,06 1.007.689.550.058,44

Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di tahun 2019 dan 2018, yang terdiri dari:

5.3.2.1.2.1 Beban Persediaan

350.406.925.409,89 138.766.345.114,28

Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Persediaan Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di tahun 2019 dan 2018, yang terdiri dari:

Beban Bahan Pakai Habis	114.200.232.882,91	50.242.280.068,40
Beban Persediaan Bahan/Material	77.060.860.408,26	19.716.002.137,62
Beban Cetak dan Penggandaan	28.114.302.562,96	12.009.057.490,00
Beban Makanan dan Minuman	63.815.732.656,00	34.121.686.933,00

Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	1.874.983.800,00	1.329.115.000,00
Beban Pakaian Kerja	2.210.236.800,00	967.937.300,00
Beban Pakaian Khusus dan Hari - Hari Tertentu	9.677.942.250,00	3.050.554.100,00
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.235.692.595,40	00,0
Beban Bahan Praktek Latihan	13.976.439.237,00	1.522.382.830,00
Beban Bahan Praktek/Praktikum	7.347.150.665,00	405.652.600,00
Beban Keperluan Rumah Tangga KDH/Wakil KDH	776.004.440,00	651.338.000,00
Beban Pengadaan Barang Dibawah Kapitalisasi Aset	30.117.347.112,36	14.750.338.655,26
Jumlah	350.406.925.409,89	138.766.345.114,28

5.3.2.1.2.2 Beban Jasa

581.283.962.764,49 **686.635.528.492,25**

Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Persediaan Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di tahun 2019 dan 2018, yang terdiri dari:

Beban Jasa Kantor	490.903.327.206,18	241.407.062.180,18
Beban Premi Asuransi	942.537.857,53	1.039.692.142,47
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	12.906.687.823,00	11.923.863.441,00
Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.911.896.194,48	5.460.923.099,58
Beban Sewa Sarana Mobilitas	2.716.601.622,00	1.696.420.390,00
Beban Sewa Alat Berat	26.500.000,00	0,00
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.431.214.400,00	3.666.043.600,00
Beban Jasa Tenaga Kerja Pihak Ketiga	14.702.689.465,02	6.670.503.037,00
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	442.600.000,00	892.000.000,00
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	1.503.883.603,40	982.961.688,00
Beban Pendidikan bagi siswa miskin/yatim piatu	386.388.200,00	86.393.000,00
Beban Jasa Audit	132.800.000,00	0,00
Beban Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	33.937.235.227,88	7.659.762.250,00
Beban Sewa Tanah	416.000.000,00	0,00
Beban Honorarium Non PNS (Pemeliharaan Kesehatan)	223.601.165,00	103.425.690,00
Beban Jasa Instruktur	0,00	2.844.318.776,00
Beban Jasa Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD dan Tenaga Ahli Fraksi	2.700.000.000,00	4.398.000.000,00
Beban Jasa Tenaga Ahli	0,00	1.567.607.500,00
Beban Jasa Penanganan Perkara	0,00	702.000.000,00
Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	238.638.908.079,14
Beban Barang dan Jasa BLUD	0,00	156.999.069.308,88
Jumlah	581.283.962.764,49	686.635.528.492,25

5.3.2.1.2.3 Beban Pemeliharaan

61.693.231.605,68 **31.378.833.434,91**

Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Persediaan Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di tahun 2019 dan 2018, yang terdiri dari:

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	24.645.615.500,92	7.578.901.045,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	16.279.422.211,61	7.250.134.490,67

Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	13.808.274.424,00	16.254.297.899,24
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	14.200.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Taman dan Halaman	6.945.719.469,15	295.500.000,00
Jumlah	61.693.231.605,68	31.378.833.434,91

5.3.2.1.2.4 Beban Perjalanan Dinas

203.400.192.833,00 150.805.417.327,00

Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Persediaan Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di tahun 2019 dan 2018, yang terdiri dari:

Beban Perjalanan Dinas	203.379.442.833,00	150.802.466.227,00
Beban Perjalanan Pindah Tugas	20.750.000,00	2.951.100,00
Jumlah	203.400.192.833,00	150.805.417.327,00

5.3.2.1.3 Beban Bunga

0,00 0,00

Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Bunga Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di tahun 2019 dan 2018. Pemerintah Provinsi Bali tidak memiliki hutang yang disertai dengan bunga, sehingga tidak terdapat pembebanan bunga. Saldo Beban Bunga sama dengan Saldo Belanja Bunga dikarenakan perbedaan pengakuan kejadian - kejadian yang mempengaruhi saldo Beban Bunga.

5.3.2.1.4 Beban Subsidi

9.903.628.000,00 9.566.400.000,00

Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Subsidi Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di tahun 2019 dan 2018. Saldo Beban Subsidi sama dengan Saldo Belanja Subsidi dikarenakan perbedaan pengakuan kejadian - kejadian yang mempengaruhi saldo Beban Subsidi.

5.3.2.1.5 Beban Hibah

1.015.294.225.523,05 1.591.244.520.425,95

Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Hibah Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di tahun 2019 dan 2018, yang terdiri dari:

Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya	27.961.169.452,24	0,00
Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat	355.801.655.575,81	0,00
Beban Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar	609.765.000.000,00	0,00
Hibah Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.565.400.495,00	0,00
Beban Hibah BOS Afiriasi dan BOS Kinerja	16.201.000.000,00	0,00
Beban Hibah kepada Badan/ Lembaga / Organisasi Kemasyarakatan	0,00	465.228.532.482,33
Beban Hibah BOS kepada Satuan Pendidikan Dasar Kab/Kota	0,00	439.709.400.000,00
Beban Hibah BOS Kepada Satuan Pendidikan Dasar Masyarakat/ Swasta	0,00	64.383.440.000,00
Beban Hibah BOS Kepada Satuan Pendidikan Menengah Masyarakat/ Swasta Kab/Kota	0,00	103.459.082.406,63
Beban Hibah Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	0,00	518.464.065.536,99
Jumlah	1.015.294.225.523,05	1.591.244.520.425,95

5.3.2.1.6 Beban Bantuan Sosial

9.094.500.000,00 **25.121.052.913,00**

Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di tahun 2019 dan 2018, yang terdiri dari:

Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	9.094.500.000,00	220.000.000,00
Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat	0,00	24.901.052.913,00
Jumlah	9.094.500.000,00	25.121.052.913,00

5.3.2.1.7 Beban Penyusutan

410.642.980.415,42 **378.285.541.681,43**

Saldo tersebut adalah pengakuan Beban penyusutan Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di tahun 2019 dan 2018, yang terdiri dari:

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	180.059.684.312,62	157.945.261.344,91
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	42.436.530.714,00	39.431.784.743,94
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	185.553.387.416,00	178.546.575.623,82
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	2.593.377.972,80	2.361.919.968,76
Jumlah	410.642.980.415,42	378.285.541.681,43

5.3.2.1.8 Beban Amortisasi

1.211.359.903,00 **1.540.273.155,00**

Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Amortisasi Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di tahun 2019 dan 2018.

5.3.2.1.9 Beban Penyisihan Piutang

16.689.267.778,35 **3.218.110.440,99**

Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Penyisihan Piutang Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di tahun 2019 dan 2018, yang terdiri dari:

Beban Penyisihan Piutang Pajak	22.692.905,03	128.064.146,89
Beban Penyisihan Piutang Retribusi	12.784.045,00	19.195.540,00
Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	476.941.975,94
Beban Penyisihan Piutang Lain - Lain PAD yang Sah	14.748.841.581,37	991.753.262,96
Beban Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi	1.904.837.608,64	1.602.155.515,20
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	111.638,31	0,00
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	16.689.267.778,35	3.218.110.440,99

5.3.2.2 Beban Transfer

2.109.607.332.366,85 **1.859.970.294.522,52**

Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Transfer Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di tahun 2019 dan 2018, yang terdiri dari:

5.3.2.2.1 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak

1.297.044.742.281,64 1.229.429.904.112,30

Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di tahun 2019 dan 2018.

5.3.2.2.2 Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Lainnya

330.260.987.829,21 186.775.668.060,22

Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Lainnya Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di tahun 2019 dan 2018.

5.3.2.2.3 Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa

479.795.535.000,00 441.322.088.750,00

Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di tahun 2019 dan 2018.

5.3.2.2.4 Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

2.506.067.256,00 2.442.633.600,00

Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di tahun 2019 dan 2018. Bantuan tersebut berupa bantuan kepada partai politik.

5.3.3 Kegiatan Non Operasional

(12.360.005.453,45) (4.452.545.786,17)

Saldo tersebut adalah pengakuan Kegiatan Non Operasional Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan non operasional di tahun 2019 dan 2018, yang terdiri dari

Defisit Penjualan Aset Non Lancar	(2.078.557.727,21)	(96.396.561,00)
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(14.524.610.325,05)	(4.985.644.394,16)
Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	3.539.527.489,00	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	703.635.109,81	629.495.168,99
Jumlah	(12.360.005.453,45)	(4.452.545.786,17)

Rincian surplus dan defisit atas penjualan aset non lancar dapat dilihat pada *lampiran 2*.

5.3.4 Pos Luar Biasa - LO

1.182.717.927,18 187.500.000,00

Saldo tersebut adalah pengakuan Pos Luar Biasa Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan non operasional di tahun 2019 dan 2018.

5.3.4.1 Beban Luar Biasa - LO

	1.182.717.927,18	187.500.000,00
--	------------------	----------------

Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Luar Biasa Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan non operasional di tahun 2019 dan 2018. Beban Luar Biasa - LO TA 2019 sebesar tersebut merupakan Belanja Tak Terduga.

5.3.5 Surplus/(Defisit) - LO

	412.452.061.285,75	(8.382.184.220,54)
--	--------------------	--------------------

Saldo tersebut adalah pengakuan Surplus/(Defisit) - LO Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di tahun 2019 dan 2018. Saldo Surplus/(Defisit) - LO tersebut di atas telah sama dengan yang diungkapkan dalam Catatan atas Perubahan Ekuitas *point* 5.6.4.

5.4. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan Arus Kas Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 diungkapkan dan disajikan sebagai berikut:

Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
----------------------	----------------------

5.4.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Nilai arus kas dari aktivitas operasi Pemerintah Provinsi Bali selama tahun 2019 dan 2018, yaitu sebagai berikut:

680.259.589.660,22	700.573.422.662,73
--------------------	--------------------

Jumlah tersebut merupakan arus kas bersih dari aktivitas operasi yaitu arus kas masuk dari aktivitas operasi dikurangi dengan arus kas keluar dari aktivitas operasi. Rincian arus kas dari aktivitas operasi sebagai berikut:

5.4.1.1. Arus Masuk Kas

Pendapatan Pajak Daerah	3.463.996.393.584,00	3.230.732.169.802,50
Pendapatan Retribusi Daerah	33.841.782.964,00	40.241.780.029,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	171.076.247.197,42	170.219.137.368,48
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	350.521.972.843,17	276.349.232.351,16
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	2.548.063.873.035,00	2.493.979.973.047,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	68.434.406.000,00	41.500.000.000,00
Transfer Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Lainnya	0,00	0,00
Pendapatan Hibah	5.884.278.000,00	5.388.000.000,00
Jumlah	6.641.818.953.623,59	6.258.410.292.598,14

5.4.1.2. Arus Keluar Kas

Belanja Pegawai	1.590.611.064.913,75	1.590.437.517.662,00
Belanja Barang dan Jasa	1.195.894.560.327,09	999.366.106.630,68
Belanja Subsidi	9.903.628.000,00	9.566.400.000,00
Belanja Hibah	1.040.184.587.070,81	1.095.268.169.788,42
Belanja Bantuan Sosial	9.094.500.000,00	25.019.000.000,00
Belanja Tak Terduga	1.182.717.927,18	187.500.000,00
Transfer Bagi Hasil Pajak	1.302.125.715.639,33	1.207.451.785.444,09
Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Lainnya	330.260.987.829,21	186.775.668.060,22
Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa	479.795.535.000,00	441.322.088.750,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	2.506.067.256,00	2.442.633.600,00
Jumlah	5.961.559.363.963,37	5.557.836.869.935,41

5.4.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Nilai arus kas dari aktivitas investasi Pemerintah Provinsi Bali selama tahun 2019 dan 2018, yaitu sebagai berikut:

(553.034.584.813,04) (440.142.846.551,40)

Jumlah tersebut merupakan arus kas bersih dari aktivitas investasi yaitu arus kas masuk dari aktivitas investasi dikurangi dengan arus kas keluar dari aktivitas investasi. Rincian arus kas dari aktivitas investasi sebagai berikut:

5.4.2.1. Arus Masuk Kas

Penjualan atas Aset Tetap - Peralatan dan Mesin	3.678.416.546,00	895.600.795,00
Penjualan atas Aset Tetap - Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Penjualan atas Aset Lainnya	41.501.000,00	61.715.000,00
Jumlah	3.719.917.546,00	957.315.795,00

5.4.2.2. Arus Keluar Kas

Belanja Modal - Tanah	63.506.862.123,00	14.849.390.500,00
Belanja Modal - Peralatan dan Mesin	236.359.501.621,14	179.946.735.698,34
Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	128.335.018.713,06	35.289.346.105,54
Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan	117.877.559.353,84	195.152.228.280,52
Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya	10.675.560.548,00	15.110.337.162,00
Belanja Aset Lainnya	0,00	362.124.600,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	390.000.000,00
Jumlah	556.754.502.359,04	441.100.162.346,40

5.4.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Nilai arus kas dari aktivitas pendanaan Pemerintah Provinsi Bali selama tahun 2019 dan 2018, yaitu sebagai berikut:

2.245.137.235,00 37.777.640.276,65

Jumlah tersebut merupakan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan yaitu arus kas masuk dari aktivitas pendanaan dikurangi dengan arus kas keluar dari aktivitas pendanaan. Rincian arus kas dari aktivitas pendanaan sebagai berikut:

5.4.3.1. Arus Masuk Kas

Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	2.245.137.235,00	37.777.640.276,65
Penerimaan Pengembalian TGRD	0,00	0,00
Jumlah	2.245.137.235,00	37.777.640.276,65

5.4.3.2. Arus Keluar Kas

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

5.4.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan Pemerintah Provinsi Bali. Nilai arus kas dari aktivitas transitoris Pemerintah Provinsi Bali selama tahun 2019 dan 2018, yaitu sebagai berikut:

0,00 0,00

Jumlah tersebut merupakan arus kas bersih dari aktivitas transitoris yaitu arus kas masuk dari aktivitas transitoris dikurangi dengan arus kas keluar dari aktivitas transitoris. Rincian arus kas dari aktivitas transitoris sebagai berikut:

5.4.4.1 Arus Masuk Kas

Pajak Pertambahan Nilai	64.644.760.619,00	52.148.034.959,00
Pajak Penghasilan Pasal 21	78.756.326.477,00	80.171.945.617,00
Pajak Penghasilan Pasal 22	5.010.157.798,00	3.182.643.269,00
Pajak Penghasilan Pasal 23	2.941.547.556,00	1.304.314.266,00
Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2	8.355.991.948,00	7.303.926.087,00
Potongan BPJS	16.843.807.984,00	22.717.816.215,00
IWP	56.101.349.348,00	55.644.755.137,00
Penerimaan PPh 21	3.048.744.091,00	0,00
Potongan JKK	1.231.038.012,00	0,00
Potongan JKM	3.692.883.942,00	0,00
Taperum	1.048.999.000,00	1.081.777.000,00
Jumlah	241.675.606.775,00	223.555.212.550,00

5.4.4.2. Arus Keluar Kas

Pajak Pertambahan Nilai	64.644.760.619,00	52.148.034.959,00
Pajak Penghasilan Pasal 21	78.756.326.477,00	80.171.945.617,00
Pajak Penghasilan Pasal 22	5.010.157.798,00	3.182.643.269,00
Pajak Penghasilan Pasal 23	2.941.547.556,00	1.304.314.266,00
Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2	8.355.991.948,00	7.303.926.087,00
Potongan BPJS	16.843.807.984,00	22.717.816.215,00
IWP	56.101.349.348,00	55.644.755.137,00
Penerimaan PPh 21	3.048.744.091,00	0,00
Potongan JKK	1.231.038.012,00	0,00
Potongan JKM	3.692.883.942,00	0,00
Taperum	1.048.999.000,00	1.081.777.000,00
Jumlah	241.675.606.775,00	223.555.212.550,00

5.4.5. Kenaikan / (Penurunan) Kas

129.470.142.082,18 298.208.216.387,98

Jumlah kenaikan/(penurunan) kas yang disebabkan keempat aktivitas yang dijabarkan di atas diuraikan sebagai berikut:

Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi	680.259.589.660,22	700.573.422.662,73
Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi	(553.034.584.813,04)	(440.142.846.551,40)
Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan	2.245.137.235,00	37.777.640.276,65
Arus Kas Bersih Aktivitas Transitoris	0,00	0,00
Jumlah	129.470.142.082,18	298.208.216.387,98

5.4.6. Saldo Awal Kas

702.345.385.366,47 404.236.331.368,74

Jumlah tersebut merupakan saldo kas Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2018 dan 2017 sebagaimana yang disajikan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih pada *point* 5.5.1 dengan rincian sebagai berikut:

Kas Di Kas Daerah	155.539.387.397,37	312.003.933.166,37
Kas di Bendahara Penerimaan	39.726.000,00	60.304.200,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	244.875.222,43	23.207.346,14
Kas di BLUD:		
- Kas di BLUD UPT RS Bali Mandara	15.695.518.786,54	0,00
- Kas di BLUD RS Mata Bali Mandara	56.913.571.167,47	44.713.327.810,67
- Kas di BLUD RS Jiwa Provinsi Bali	10.201.853.478,01	8.206.693.200,78

- Kas di BLUD UPT Pengelolaan Air Limbah	12.707.471.752,73	5.981.517.831,12
- Kas di BLUD UPT Pengelolaan Air Minum	5.473.611.162,11	0,00
Kas Lainnya di Bendahara BOS SMA/SMK Negeri	45.529.370.399,81	33.247.346.813,66
Setara Kas (Deposito Jangka Waktu < 1 Bulan)	400.000.000.000,00	0,00
Jumlah	702.345.385.366,47	404.236.331.368,74

5.4.7. Koreksi Silpa Tahun Lalu

0,00 **(99.162.390,25)**

5.4.8. Saldo Akhir Kas

831.815.527.448,65 **702.345.385.366,47**

Saldo Akhir Kas Tahun 2019 di atas telah sama nilai dengan SiLPA sebagaimana disajikan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Realisasi Anggaran pada *point* 5.1.5, Kas dan Setara Kas sebagaimana disajikan dan diungkapkan dalam Catatan atas Neraca pada *point* 5.2.1.1 dan Saldo Anggaran Lebih Akhir sebagaimana disajikan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Perubahan SAL pada *point* 5.5.5. Namun secara fisik kas berbeda dengan SiLPA sebesar Rp404.174.480,63 sebagaimana dijelaskan pada saldo SiLPA dalam Catatan atas Laporan Realisasi Anggaran pada *point* 5.1.5, dengan rincian kas sebagai berikut:

Kas Di Kas Daerah	650.647.578.852,66	155.539.387.397,37
Kas di Bendahara Penerimaan	13.286.000,00	39.726.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	6.187.328,00	244.875.222,43
Kas di BLUD:		
- Kas di BLUD UPT RS Bali Mandara	35.699.522.957,60	15.695.518.786,54
- Kas di BLUD RS Mata Bali Mandara	73.980.126.269,51	56.913.571.167,47
- Kas di BLUD RS Jiwa Provinsi Bali	7.697.907.923,08	10.201.853.478,01
- Kas di BLUD UPT Pengelolaan Air Limbah	13.964.405.447,59	12.707.471.752,73
- Kas di BLUD UPT Pengelolaan Air Minum	4.626.588.441,18	5.473.611.162,11
Kas Lainnya di Bendahara BOS SMA/SMK Negeri	44.775.749.748,40	45.529.370.399,81
Setara Kas (Deposito Jangka Waktu < 1 Bulan)	0,00	400.000.000.000,00
Jumlah	831.411.352.968,02	702.345.385.366,47

Dari saldo akhir kas tersebut termasuk dana yang bersifat mandatoris (tidak dapat digunakan untuk pengeluaran selain alokasi yang sudah disediakan) sebesar Rp19.674.993.464,00 yaitu terdiri dari:

1. Sisa Dana DAK Fisik sebesar Rp2.812.675.451,00;
2. Sisa Dana DAK Non Fisik sebesar Rp15.861.180.662,00 yang terdiri dari:
 - a. Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler sebesar Rp6.852.920.000,00;
 - b. Dana Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi sebesar Rp4.000.000,00;
 - c. Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja sebesar Rp50.159.000,00;
 - d. Dana Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp5.301.255.070,00;
 - e. Dana Tambahan Penghasilan PNSD sebesar Rp996.000.000,00;
 - f. Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp358.920.973,00;
 - g. Administrasi Kependudukan sebesar Rp370.434.710,00;
 - h. Museum sebesar Rp397.432.632,00;
 - i. Monumen Perjuangan Rakyat Bali sebesar Rp408.375.500,00;
 - j. Taman Budaya sebesar Rp167.609.525,00;
 - k. Bantuan Operasional Sekolah sebesar Rp954.073.252,00;
3. Sisa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp751.137.351,00;
4. Sisa Dana Hibah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rp250.000.000,00.

5.5 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan laporan yang menyajikan gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih Pemerintah Provinsi Bali diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

Tahun 2019	Tahun 2018
------------	------------

5.5.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

	702.345.385.366,47	408.311.832.886,74
Saldo anggaran lebih awal di atas merupakan saldo akhir saldo anggaran lebih tahun 2018 dan 2017 yang terdiri dari:		
Kas di Kas Daerah	155.539.387.397,37	312.003.933.166,37
Kas di Bendahara Penerimaan	39.726.000,00	60.304.200,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	244.875.222,43	23.207.346,14
Kas di BLUD		
- Kas di BLUD UPT RS Bali Mandara	15.695.518.786,54	0,00
- Kas di BLUD RS Mata Bali Mandara	56.913.571.167,47	44.713.327.810,67
- Kas di BLUD RS Jiwa Provinsi Bali	10.201.853.478,01	8.206.693.200,78
- Kas di BLUD UPT Pengelolaan Air Limbah	12.707.471.752,73	5.981.518.831,12
- Kas di BLUD UPT Pengelolaan Air Minum	5.473.611.162,11	0,00
Kas Lainnya di Bendahara BOS	45.529.370.399,81	33.247.346.813,66
Setara Kas (Deposito Jangka Waktu < 3 Bulan)	400.000.000.000,00	0,00
Piutang TGR	0,00	4.075.501.518,00
Jumlah	702.345.385.366,47	408.311.832.886,74

5.5.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

702.345.385.366,47	404.137.168.978,49
--------------------	--------------------

Saldo tersebut adalah SiLPA Pemerintah Provinsi Bali pada TA 2018 dan 2017 yang dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada TA 2019 dan 2018 dan digunakan seluruhnya dalam kegiatan operasional serta pembiayaan Pemerintah Provinsi Bali selama TA 2019 dan 2018.

5.5.3 Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

831.815.527.448,65	702.345.385.366,47
--------------------	--------------------

Saldo tersebut adalah SiLPA Pemerintah Provinsi Bali pada TA 2019 dan 2018 yang dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada TA 2020 dan 2019 dan digunakan seluruhnya dalam kegiatan operasional serta pembiayaan Pemerintah Provinsi Bali selama TA 2019 dan 2018. Saldo tersebut sama dengan jumlah SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing - masing Laporan Realisasi Anggaran pada tahun berkenaan.

5.5.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

0,00	(4.174.663.908,25)
------	--------------------

Saldo tersebut adalah koreksi atas pengakuan SiLPA Pemerintah Provinsi Bali pada TA 2018.

5.5.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

	<u>831.815.527.448,65</u>	<u>702.345.385.366,47</u>
Saldo Anggaran Lebih Akhir di atas diuraikan berdasarkan komponen kas terdiri dari:		
Kas di Kas Daerah	650.647.578.852,66	155.539.387.397,37
Kas di Bendahara Penerimaan	13.286.000,00	39.726.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	6.187.328,00	244.875.222,43
Kas di BLUD		
Kas di BLUD UPT RS Bali Mandara	35.699.522.957,60	15.695.518.786,54
Kas di BLUD RS Mata Bali Mandara	73.980.126.269,51	56.913.571.167,47
Kas di BLUD RS Jiwa Provinsi Bali	7.697.907.923,08	10.201.853.478,01
Kas di BLUD UPT Pengelolaan Air Limbah	13.964.405.447,59	12.707.471.752,73
Kas di BLUD UPT Pengelolaan Air Minum	4.626.588.441,18	5.473.611.162,11
Kas Lainnya di Bendahara BOS SMA/SMK Negeri	44.775.749.748,40	45.529.370.399,81
Setara Kas (Deposito Jangka Waktu < 1 Bulan)	0,00	400.000.000.000,00
Piutang TGR	0,00	0,00
Jumlah	831.411.352.968,02	702.345.385.366,47
Selisih	(404.174.480,63)	0,00

Selisih kurang atas saldo Kas dan Setara Kas terhadap Saldo Anggaran Lebih Akhir TA 2019 sebesar Rp404.174.480,63 terdapat pada selisih Kas di Bendahara BOS dapat dijelaskan sebagai berikut sebagaimana dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan 5.1.5 :

No	Keterangan	Jumlah
1	Kelebihan pembayaran PPh Pasal 22 dan PPN telah dicatat sebagai Piutang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) pada Neraca sebagaimana dijelaskan dalam Catatan atas Neraca pada point 5.2.1.1.2.6 berdasarkan Surat dari Kawil DJP Bali KPP Pratama Singaraja Nomor S-1014/WPJ.17/KP.03/2020 tanggal 2 Maret 2020 perihal Persetujuan Pemindahbukuan dari Ditjen Pajak untuk kompensasi penyetoran PFK atas kelebihan setor PPh sebesar Rp385.322.928,00 pada SMAN 1 Singaraja dan sebesar Rp1.018.400,00 pada SMKN 1 Seririt sehingga mengurangi Kas BOS	(386.341.328,00)
2	Utang PFK BOS pada SMKN 3 Kintamani sebesar Rp22.134.093,00, dan SLBN 1 Denpasar sebesar Rp374.999,34 sehingga menambah Kas BOS	22.509.092,34
3	Koreksi saldo awal BOS atas kelebihan setoran jasa giro 2018 dan berdasarkan konfirmasi sekolah bukan kelebihan setor jagir dan memang pendapatan jagir yaitu SMAN 1 Sukawati sebesar Rp17.858.222,16 dan SMKN 2 Tegallalang Rp27.565,85, SMKN 3 Negara sebesar Rp1.147.194,91 sehingga mengurangi Kas BOS	(19.032.982,92)
4	Kelebihan setoran jasa giro BOS ke Kas Daerah yang akan dikembalikan dari Kasda kepada masing-masing Kas BOS sekolah berdasarkan SK No.280/04-E/HK/2020 tanggal 8 April 2020 yaitu untuk SMAN 4 Singaraja sebesar Rp1.353.321,87, SMKN 1 Denpasar sebesar Rp19.646.378,19; SMAN 1 Banjarangkan sebesar Rp309.561,99 sehingga mengurangi Kas BOS	(21.309.262,05)
	Jumlah	(404.174.480,63)

5.6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Provinsi Bali diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

	Tahun 2019	Tahun 2018
5.6.1 Ekuitas Awal	10.269.786.301.213,35	8.596.911.437.292,78

Saldo tersebut di atas merupakan saldo Ekuitas Awal tahun 2019 dan 2018 yang merupakan saldo ekuitas akhir tahun 2018 dan 2017.

5.6.2 Surplus/(Defisit) LO

424.452.061.285,75	(8.382.184.220,54)
--------------------	--------------------

Saldo tersebut di atas merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang mengurangi nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Provinsi Bali.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

30.186.377.309,52	1.681.257.048.141,11
-------------------	----------------------

Saldo tersebut di atas merupakan transaksi penyesuaian aset dan kewajiban yang disebabkan oleh adanya koreksi baik lebih catat maupun kurang catat dari tahun-tahun sebelumnya sehingga pada tahun 2018 Pemerintah Provinsi Bali melakukan Penyesuaian. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dapat dirinci sebagai berikut:

Koreksi Nilai Kas	(19.032.982,92)	(99.162.390,25)
Koreksi Nilai Piutang	141.962.472,00	1.734.569.352,57
Koreksi Nilai Persediaan	16.200.286,00	36.146.324.189,60
Koreksi Nilai Investasi	0,00	(636.480.799,83)
Koreksi Nilai Aset Tetap	31.414.485.821,46	1.672.076.160.508,87
Koreksi Nilai Aset Lainnya	(1.197.834.172,22)	(25.779.559.731,87)
Koreksi Nilai Kewajiban Jangka Pendek	(169.404.114,80)	(2.184.802.987,98)
Jumlah	30.186.377.309,52	1.681.257.048.141,11

5.6.4 Ekuitas Akhir

10.712.424.739.808,60	10.269.786.301.213,26
-----------------------	-----------------------

Saldo tersebut di atas merupakan saldo Ekuitas Akhir milik Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2019 dan 2018. Saldo ekuitas akhir yang tersaji dalam Laporan Ekuitas ini sama besarnya dengan nilai Ekuitas yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2019 dan 2018 sebagaimana dijelaskan pada Catatan atas Neraca pada *point* 5.2.3.

BAB VI

PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan ini kami sajikan untuk memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Denpasar, 27 Mei 2020


GUBERNUR BALI,
WAYAN KOSTER

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Tujuan Pemeriksaan

Tujuan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2019 adalah untuk memberikan opini berdasarkan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) apakah LKPD telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan didasarkan kriteria:

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- b. Kecukupan pengungkapan;
- c. Efektivitas sistem pengendalian intern; dan
- d. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

3. Sasaran Pemeriksaan

Sasaran pemeriksaan LKPD TA 2019 meliputi pengujian atas:

- a. Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca per 31 Desember 2019;
- b. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada LRA, LAK, LO, LPE, dan Laporan Perubahan SAL Tahun 2019;
- c. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada CaLK;
- d. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- e. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan; dan
- f. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pengujian atas Laporan Keuangan bertujuan untuk menguji semua pernyataan manajemen (asersi manajemen) dalam informasi keuangan, efektifitas pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi:

- a. Keberadaan dan keterjadian
Bahwa seluruh aset dan kewajiban yang disajikan dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2019 dan seluruh transaksi penerimaan, belanja dan pembiayaan anggaran yang disajikan dalam LRA dan LO TA 2019 benar-benar ada dan terjadi selama periode tersebut serta telah didukung dengan bukti-bukti yang memadai.
- b. Kelengkapan
Bahwa seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana yang dimiliki telah dicatat dalam Neraca dan seluruh transaksi penerimaan daerah, belanja daerah dan pembiayaan yang terjadi selama Tahun Anggaran 2019 telah dicatat dalam LRA dan LO.

- c. Hak dan Kewajiban
Bahwa seluruh aset yang tercatat dalam neraca benar-benar dimiliki atau merupakan hak dari pemerintah daerah dan utang yang tercatat merupakan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan.
- d. Penilaian dan Alokasi
Bahwa seluruh aset, utang, penerimaan dan belanja daerah, serta pembiayaan telah disajikan dengan jumlah dan nilai semestinya; diklasifikasikan sesuai dengan standar/ketentuan yang telah ditetapkan; dan merupakan alokasi biaya/anggaran Tahun Anggaran 2019.
- e. Penyajian dan Pengungkapan
Bahwa seluruh komponen laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan ketentuan dan telah diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan Keuangan dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksa Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dalam Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yaitu pada:

- a. Pernyataan Standar Pemeriksaan 100 Standar Umum;
- b. Pernyataan Standar Pemeriksaan 200 Standar Pelaksanaan Pemeriksaan;
- c. Pernyataan Standar Pemeriksaan 300 Standar Pelaporan Pemeriksaan.

5. Metodologi Pemeriksaan

Metodologi pemeriksaan atas LKPD TA 2019 dilakukan dengan pendekatan audit berbasis risiko, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan, yaitu sebagai berikut:

a. Perencanaan

1) Pemahaman Tujuan Pemeriksaan dan Harapan Penugasan

Pemahaman atas tujuan pemeriksaan dan harapan penugasan perlu diperoleh untuk mengetahui fokus atau sasaran yang harus diperhatikan pemeriksa. Pengembangan prosedur pemeriksaan dapat dilaksanakan oleh tim pemeriksa berdasarkan fokus atau sasaran pemeriksaan yang telah dirumuskan tersebut.

2) Pemahaman Entitas dan Sistem Pengendalian Intern

Pemahaman atas entitas dan sistem pengendalian intern dapat diperoleh dari laporan hasil pemeriksaan sebelumnya, laporan hasil pemeriksaan interim, catatan atas laporan keuangan yang diperiksa, pemantauan tindak lanjut, dan *database* yang telah dimiliki serta peraturan atau kebijakan tertulis/formal kepala daerah terkait.

Pemahaman atas entitas tersebut meliputi pemahaman atas latar belakang/dasar hukum pendirian pemerintah daerah, kegiatan utama entitas termasuk sumber pendapatan daerah, lingkungan yang mempengaruhi, pejabat terkait sampai dengan dua (2) tingkat vertikal ke bawah di bawah kepala daerah, dan kejadian luar biasa yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Pemeriksa perlu mengidentifikasi kelemahan-kelemahan signifikan atau area-area kritis yang memerlukan perhatian mendalam, sehingga membantu pemeriksa untuk (1) mengidentifikasi jenis potensi kesalahan, (2) mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi risiko salah saji yang material, (3) mendesain pengujian sistem pengendalian intern, dan (4) mendesain prosedur pengujian substantif.

3) Pertimbangan Hasil Pemeriksaan Sebelumnya

Pemeriksa harus mempertimbangkan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Pemeriksa harus meneliti pengaruh hasil pemeriksaan sebelumnya dan tindak lanjutnya terhadap LKPD yang diperiksa, terutama terkait dengan kemungkinan temuan-temuan pemeriksaan yang berulang dan keyakinan pemeriksa atas saldo awal akun atau perkiraan pada neraca yang diperiksa.

4) Pemahaman dan Penilaian Risiko

Hasil pemahaman dan pengujian SPI dari pemeriksaan pendahuluan digunakan sebagai penilaian risiko. Prosedur penilaian risiko dilakukan untuk level entitas dan setiap akun atau kelompok/siklus akun.

Hasilnya akan digunakan sebagai berikut.

- a) Pengukuran risiko di tingkat proses bisnis menghasilkan tingkat risiko pengendalian (*Control Risk, CR*) yang akan digunakan sebagai gambaran umum atas SPI entitas, mengidentifikasi SKPD berisiko tinggi, dan menentukan tingkat risiko pengendalian atas akun individual.
- b) Hasil penilaian AR, IR dan CR akun selanjutnya akan digunakan untuk menghitung besaran risiko deteksi (*DR*) tingkat akun. Risiko deteksi ditetapkan untuk menentukan berapa besar lingkup pemeriksaan (*Acov*) dan strategi pemeriksaan yang akan diterapkan pemeriksa.

Penilaian risiko kecurangan (*Fraud Risk*) digunakan sebagai dasar dalam menetapkan prosedur pemeriksaan tambahan untuk mendeteksi salah saji dalam laporan keuangan yang bersifat material yang disebabkan oleh kecurangan.

5) Penentuan Tingkat Materialitas

Pertimbangan atas tingkat materialitas meliputi kegiatan: (1) Penetapan Tingkat Materialitas Perencanaan (*Planning Materiality/PM*) dan (2) Penetapan Salah saji tertolerir (*Tolerable Misstatement/TM*). PM merupakan tingkat materialitas pada keseluruhan laporan keuangan, sementara TM merupakan materialitas pada tingkat transaksi akun.

6) Penentuan Metode Uji Petik

Penentuan metode uji petik berdasarkan pertimbangan profesional pemeriksa dengan memperhatikan beberapa aspek antara lain:

- a) Tingkat risiko

Jika hasil pengujian SPI disimpulkan pengendalian intern suatu akun lemah, maka sampel untuk pengujian substantif atas akun tersebut harus lebih besar. Jika akun-akun tertentu mempunyai risiko bawaan (*inherent*

risk) yang lebih tinggi dari akun-akun lainnya, maka sampel untuk pengujian substantif untuk akun-akun tersebut harus lebih besar.

- b) Tingkat materialitas yang telah ditentukan. Jika tingkat materialitas kecil, maka sampel yang diambil harus lebih besar dan begitu juga sebaliknya.
- c) Jumlah sampel tidak hanya didasarkan pada nilai saldo akun, tetapi memperhatikan transaksi-transaksi yang membentuk saldo tersebut. Saldo akun yang kecil bisa dibentuk dari transaksi-transaksi positif dan negatif yang besar.
- d) *Cost and benefit*, manfaat uji petik atas suatu transaksi atau saldo akun harus lebih besar dari biaya pengujian tersebut.

b. Pelaksanaan Pemeriksaan

1) Pengujian Analitis

Pengujian analitis dalam pelaksanaan pemeriksaan dapat dilakukan dengan (1) Analisa Data, (2) Analisa Rasio dan Tren, sesuai dengan area yang telah ditetapkan sebagai uji petik.

Pengujian analitis terinci ini diharapkan dapat membantu pemeriksa untuk menemukan hubungan logis penyajian akun pada LKPD dan menilai kecukupan pengungkapan atas setiap perubahan pada pos/akun/unsur pada laporan keuangan yang diperiksa, serta membantu menentukan area-area signifikan dalam pengujian sistem pengendalian intern dan pengujian substantif atas transaksi dan saldo.

2) Pengujian Pengendalian

Petunjuk pengujian pengendalian meliputi pengujian yang dilakukan pemeriksa terhadap efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Dalam pengujian desain sistem pengendalian intern, pemeriksa mengevaluasi apakah sistem pengendalian intern telah didesain secara memadai dan dapat meminimalisasi secara relatif salah saji dan kecurangan. Sementara, pengujian implementasi sistem pengendalian intern dilakukan dengan melihat pelaksanaan pengendalian pada kegiatan atau transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Pengujian sistem pengendalian intern merupakan dasar pengujian substantif selanjutnya. Pengujian tersebut dilakukan baik pada saat pemeriksaan interim, maupun pemeriksaan laporan keuangan. Pengujian pengendalian secara umum telah dilaksanakan pada saat pemeriksaan interim, sementara langkah-langkah pengujian pengendalian per akun atau transaksi akan dilaksanakan dalam pemeriksaan LKPD ini.

3) Pengujian Substantif atas transaksi dan saldo

Pengujian substantif meliputi pengujian atas transaksi dan saldo-saldo akun/perkiraan serta pengungkapannya dalam laporan keuangan yang diperiksa. Pengujian tersebut dilakukan setelah pemeriksa memperoleh LKPD (*unaudited*) dan dilakukan untuk meyakini asersi manajemen atas LKPD, yaitu: (1) keberadaan dan keterjadian, (2) kelengkapan, (3) hak dan

kewajiban, (4) penilaian dan pengalokasian, serta (5) penyajian dan pengungkapan.

4) Penyelesaian Penugasan

Hal-hal yang terkait dengan pekerjaan dalam penyelesaian penugasan beserta form-form pelaporan pemeriksaan (Daftar Koreksi, Form Risalah Temuan, Form Pembahasan Temuan, Form Tanggapan).

c. Pelaporan

Setelah melakukan pengujian terinci di atas, pemeriksa menyimpulkan hasil pemeriksaan dan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan.

6. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan atas LKPD Pemerintah Provinsi Bali TA 2019 dilakukan selama 29 hari kalender (dari tanggal 13 April sampai dengan 18 Mei 2020).

7. Objek Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan atas LKPD Pemerintah Provinsi Bali, meliputi Neraca per tanggal 31 Desember 2019, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 serta Catatan atas Laporan Keuangan.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Lampiran 1

**Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah
Pemerintah Provinsi Bali TA 2019**

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	Jumlah	3.235.176.956.048,00	3.463.996.393.584,00	107,07
I	Pajak Kendaraan Bermotor	1.420.000.000.000,00	1.560.964.729.126,00	109,93
1	PKB - Mobil Penumpang - Sedan	41.783.071.602,00	41.771.876.600,00	99,97
2	PKB - Mobil Penumpang - Jeep	114.733.077.490,00	124.647.929.200,00	108,64
3	PKB - Mobil Penumpang - Minibus	660.331.517.751,00	733.966.835.292,00	111,15
4	PKB - Mobil Bus - Microbus	12.654.107.732,00	14.781.593.950,00	116,81
5	PKB - Mobil Bus - Bus	4.138.284.409,00	3.471.823.400,00	83,9
6	PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up	99.620.060.170,00	105.679.493.061,00	106,08
7	PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck	51.591.659.970,00	56.502.501.000,00	109,52
8	PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck	24.732.555.721,00	28.260.353.675,00	114,26
9	PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2	410.415.665.155,00	451.882.322.948,00	110,1
II	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.160.200.000.000,00	1.256.433.265.300,00	108,29
1	BBNKB -Mobil Penumpang - Sedan	5.732.280.259,00	5.426.610.000,00	94,67
2	BBNKB -Mobil Penumpang - Jeep	69.499.493.151,00	68.786.660.000,00	98,97
3	BBNKB -Mobil Penumpang - Minibus	487.003.485.165,00	513.458.212.500,00	105,43
4	BBNKB -Mobil Bus - Microbus	12.046.470.754,00	12.573.602.000,00	104,38
5	BBNKB -Mobil Bus - Bus	2.186.390.245,00	1.797.122.000,00	82,2
6	BBNKB -Mobil Barang/Bebar - Pick Up	59.360.237.037,00	65.97.172.500,00	109,83
7	BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Light Truck	26.386.637.349,00	32.977.635.000,00	122,33
8	BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Truck	16.056.277.938,00	18.954.296.300,00	118,05
9	BBNKB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2	481.928.728.102,00	537.961.955.000,00	111,63
III	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	401.000.000.000,00	398.841.411.716,00	99,46
1	Pajak Bahan Bakar Premium	78.313.639.937,00	94.031.399.256,00	120,07
2	Pajak Bahan Bakar Pertamina	102.802.683.016,00	71.489.957.435,00	69,54
3	Pajak Bahan Bakar Solar	18.549.203.454,00	2.400.173.353,00	12,94
4	Pajak Bahan Bakar Gas	1.859.475,00	1.804.759,00	97,06
5	Pajak Bahan Bakar Bio Solar	44.672.514.919,00	57.234.922.025,00	128,12
6	Pajak Bahan Bakar Pertamina	148.965.116.965,00	165.962.619.834,00	111,41
7	Pajak Bahan Bakar Pertamina Dex	1.016.152.522,00	1.493.319.549,00	146,96
8	Pajak Bahan Bakar Dex Lite	5.630.199.522,00	5.069.693.796,00	90,04
9	Pajak Bahan Bakar Pertamina Turbo	1.048.630.190,00	1.157.521.709,00	110,38
IV	Pajak Air Permukaan.	3.600.000.000,00	3.669.053.842,00	101,92
V	Pajak Rokok.	250.376.956.048,00	244.087.933.600,00	97,49

**Rincian Pendapatan Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
Pemerintah Provinsi Bali TA 2019**

NO	OPD	Gedung dan Bangunan yang Dihapuskan					Surplus / (Defisit)	Hasil Pengujian	Nilai Perolehan
		Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku	Penjualan				
	Jumlah	2.361.137.682,00	872.598.069,00	1.488.539.613,00	35.301.000,00	(1.453.238.613,00)	(1.453.238.613,00)	34.389.868.355,66	
1	1.01.01. Dinas Pendidikan	1.794.681.430,00	780.490.876,00	1.014.190.554,00	10.298.000,00	(1.003.892.554,00)	(1.003.892.554,00)	1.018.726.000,00	
2	1.02.01. Dinas Kesehatan	84.554.082,00	34.185.987,00	50.368.095,00	7.000.000,00	-43.368.095,00	(43.368.095,00)	3.448.378.068,28	
3	1.03.01. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						-	208.316.133,00	
4	1.05.01 Satuan Polisi Pamong Praja						-	119.004.000,00	
5	1.06.01. Dinas Sosial						-		
6	1.07.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah						-	21.701.666,00	
7	2.01.01. Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral						-	191.731.000,00	
8	2.02.01. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						-		
9	2.03.01 Dinas Ketahanan Pangan						-	150.801.500,00	
10	2.05.01. Dinas Lingkungan Hidup						-	528.402.571,00	
11	2.07.01. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						-	77.671.500,00	
12	2.09.01. Dinas Perhubungan						-	14.426.775.797,00	
13	2.10.01 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik						-	42.559.090,00	
14	2.11.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						-	292.131.470,00	
15	2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						-	327.003.179,00	
16	2.16.01. Dinas Kebudayaan	481.902.170,00	57.921.206,00	423.980.964,00	18.003.000,00	-405.977.964,00	(405.977.964,00)	2.063.223.827,19	
17	2.17.01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan						-	165.567.636,36	
18	3.01.01. Dinas Kelautan dan Perikanan						-	224.231.000,00	
19	3.03.01. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan						-	188.644.057,00	
20	3.03.02. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan						-	360.040.000,00	
21	3.04.01. Dinas Kehutanan						-	258.517.000,00	
22	3.07.01 Dinas Perdagangan dan Perindustrian						-	432.330.350,00	
23	4.02.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan						-	770.047.500,00	
24	4.03.01. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah						-	1.355.018.159,00	
25	4.04.01. Badan Pendapatan Daerah						-	610.511.900,00	
26	4.05.01. Badan Kepegawaian Daerah						-	405.939.901,50	
27	4.06.01. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia						-		
28	4.08.01. Sekretariat DPRD						-	325.674.314,00	
29	4.09.01. Sekretariat Daerah						-	5.760.283.161,33	
30	4.10.01 Inspektorat						-	303.520.800,00	
31	4.11.01. Badan Penghubung						-	60.115.000,00	
32	4.12.01. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						-	253.001.775,00	

NO	OPD	Aset Rusak Berat yang Dihapuskan				
		Akm. Penyusutan	Nilai Buku	Penjualan	Surplus / (Defisit)	Nilai Di Buku Besar
	Jumlah	33.619.460.184,45	770.408.171,21	3.684.616.546,00	2.914.208.374,79	1.460.969.761,79
1	1.01.01. Dinas Pendidikan	700.860.384,79	317.865.615,21	0,00	-317.865.615,21	-1.321.758.169,21
2	1.02.01. Dinas Kesehatan	3.352.901.339,28	95.476.729,00	162.552.228,00	67.075.499,00	23.707.404,00
3	1.03.01. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	171.842.853,00	36.473.280,00	33.200.000,00	-3.273.280,00	-3.273.280,00
4	1.05.01. Satuan Polisi Pamong Praja	119.004.000,00	0,00	4.902.055,00	4.902.055,00	4.902.055,00
5	1.06.01. Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1.07.01. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	20.843.666,00	858.000,00	500.000,00	-358.000,00	-358.000,00
7	2.01.01. Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral	191.731.000,00	0,00	15.715.383,85	15.715.383,85	15.715.383,85
8	2.02.01. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2.03.01. Dinas Ketahanan Pangan	148.301.500,00	2.500.000,00	2.150.000,00	-350.000,00	-350.000,00
10	2.05.01. Dinas Lingkungan Hidup	528.402.571,00	0,00	134.048.019,00	134.048.019,00	134.048.019,00
11	2.07.01. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	77.671.500,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
12	2.09.01. Dinas Perhubungan	14.392.255.430,00	34.520.367,00	3.059.874.334,55	3.025.353.967,55	3.025.353.967,55
13	2.10.01. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	42.559.090,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
14	2.11.01. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	292.131.470,00	0,00	24.060.496,75	24.060.496,75	24.060.496,75
15	2.12.01. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	327.003.179,00	0,00	14.997.099,00	14.997.099,00	14.997.099,00
16	2.16.01. Dinas Kebudayaan	2.055.202.343,19	8.021.484,00	11.000.000,00	2.978.516,00	-402.999.448,00
17	2.17.01. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	165.567.636,36	0,00	5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00
18	3.01.01. Dinas Kelautan dan Perikanan	166.982.356,00	57.248.644,00	850.000,00	-56.398.644,00	-56.398.644,00
19	3.03.01. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	186.727.390,00	1.916.667,00	42.136.300,00	40.219.633,00	40.219.633,00
20	3.03.02. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	360.040.000,00	0,00	21.208.000,00	21.208.000,00	21.208.000,00
21	3.04.01. Dinas Kehutanan	254.655.357,00	3.861.643,00	41.971.000,00	38.109.357,00	38.109.357,00
22	3.07.01. Dinas Perdagangan dan Perindustrian	428.862.225,00	3.468.125,00	45.110.000,00	41.641.875,00	41.641.875,00
23	4.02.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	768.217.292,00	1.830.208,00	1.775.000,00	-55.208,00	-55.208,00
24	4.03.01. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.301.651.180,00	53.366.979,00	26.438.376,00	-26.928.603,00	-26.928.603,00
25	4.04.01. Badan Pendapatan Daerah	610.511.900,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
26	4.05.01. Badan Kepegawaian Daerah	405.939.901,50	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00
27	4.06.01. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	4.08.01. Sekretariat DPRD	325.674.314,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
29	4.09.01. Sekretariat Daerah	5.607.510.898,33	152.772.263,00	22.828.253,85	-129.944.009,15	-129.944.009,15
30	4.10.01. Inspektorat	303.467.633,00	53.167,00	1.750.000,00	1.696.833,00	1.696.833,00
31	4.11.01. Badan Penghubung	59.940.000,00	175.000,00	1.000.000,00	825.000,00	825.000,00
32	4.12.01. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	253.001.775,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00

**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi
Pemerintah Provinsi Bali TA 2019**

No.	OPD	Anggaran						Belanja Tak Terduga	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Modal			
	Jumlah	1.699.658.149.841,27	1.387.675.908.224,04	10.000.000.000,00	1.125.995.849.719,00	9.430.000.000,00	760.471.523.139,96	12.098.276.508,00	1.590.611.064.913,75	1.195.894.560.327,09
1	DINAS PENDIDIKAN	839.478.549.898,56	353.134.112.199,00	0,00	3.057.675.549,00	0,00	110.151.660.262,00	-	792.740.262.252,00	309.771.261.815,41
2	DINAS KESEHATAN	127.185.638.295,00	257.454.737.546,04	0,00	0,00	0,00	231.587.433.455,96	-	121.512.422.214,56	220.463.550.586,20
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	38.803.304.335,00	79.324.982.432,00	0,00	54.302.747.000,00	0,00	352.130.531.201,00	-	35.114.889.613,00	72.754.113.081,68
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4.759.752.355,13	3.833.086.692,00	0,00	0,00	210.000.000,00	357.300.000,00	-	3.917.812.926,00	3.542.924.635,87
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	17.258.263.140,89	22.580.034.576,00	0,00	0,00	0,00	457.000.000,00	-	15.826.523.718,00	22.131.239.479,41
6	DINAS SOSIAL	15.041.113.176,00	7.829.125.068,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00	527.335.000,00	-	14.417.823.864,00	7.041.984.781,00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	11.354.578.965,00	16.052.292.324,00	0,00	0,00	0,00	1.325.341.000,00	-	9.222.496.785,00	14.620.695.288,71
8	DINAS TENAGA KERJA DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	23.154.224.906,88	16.571.580.965,00	0,00	0,00	0,00	616.906.550,00	-	21.227.740.634,00	13.545.754.840,51
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.186.651.518,75	4.163.874.230,00	0,00	0,00	0,00	71.000.000,00	-	4.936.935.161,00	3.888.229.241,88
10	DINAS KETAHANAN PANGAN	8.461.187.830,13	3.389.120.836,00	0,00	0,00	0,00	566.185.684,00	-	7.801.157.787,00	3.129.295.742,08
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	9.319.270.436,00	6.888.995.640,00	0,00	0,00	0,00	231.294.400,00	-	8.761.498.038,00	6.335.385.700,69
12	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA	5.379.898.469,00	3.582.997.396,00	0,00	0,00	0,00	272.099.881,00	-	4.698.630.547,00	2.936.629.851,00
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8.222.360.791,38	16.181.642.557,00	0,00	0,00	0,00	347.800.000,00	-	7.601.698.697,63	15.392.797.439,57
14	DINAS PERHUBUNGAN	13.648.590.316,00	14.674.429.701,00	0,00	0,00	0,00	1.335.823.000,00	-	12.649.597.646,00	13.791.033.299,60
15	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	7.853.164.565,00	15.345.090.550,00	0,00	0,00	0,00	2.200.950.000,00	-	7.586.854.334,00	13.837.123.030,50
16	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	9.877.474.851,50	10.008.430.000,00	0,00	0,00	0,00	60.428.832,00	-	8.147.291.319,00	9.598.916.242,11
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	11.204.010.249,13	3.924.563.901,00	0,00	0,00	0,00	225.000.000,00	-	9.810.404.961,00	3.427.428.573,88
18	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	8.236.095.000,00	16.163.646.096,00	0,00	0,00	0,00	227.709.600,00	-	7.705.521.997,00	13.718.067.301,04
19	DINAS KEBUDAYAAN	21.871.645.788,20	48.471.924.190,00	0,00	0,00	0,00	4.159.988.616,00	-	19.030.798.372,00	42.315.335.433,97
20	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	12.755.860.411,00	2.699.061.568,00	0,00	0,00	0,00	72.000.000,00	-	12.414.649.635,00	2.647.971.933,00
21	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	14.360.041.900,00	6.776.574.584,00	0,00	85.320.000,00	0,00	1.075.452.000,00	-	13.287.952.716,00	5.579.172.980,03
22	DINAS PARIWISATA	10.455.918.912,88	7.620.800.576,00	0,00	0,00	0,00	87.600.000,00	-	9.498.990.761,00	6.280.653.838,79
23	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	35.929.982.855,00	19.511.530.861,00	0,00	1.055.364.600,00	0,00	9.941.298.401,00	-	30.577.274.401,00	17.711.302.326,89
24	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	12.181.672.735,13	9.674.488.046,00	0,00	143.700.000,00	0,00	1.648.763.667,00	-	11.064.121.583,00	9.347.942.816,48
25	DINAS KEHUTANAN	30.801.372.788,00	5.554.355.455,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	-	29.241.101.422,00	5.194.853.480,99
26	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	11.917.158.765,00	7.029.017.330,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	-	11.416.310.859,00	5.776.444.502,47
27	PPKD	0,00	0,00	10.000.000.000,00	1.065.541.042.600,00	4.220.000.000,00	-	12.098.276.508,00	-	-
28	DPRD	47.359.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	47.043.087.984,00	-
29	KEPALA DAERAH	5.978.904.853,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	5.872.311.128,00	-
30	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	18.409.728.940,75	29.064.197.347,00	0,00	0,00	0,00	547.500.000,00	-	17.378.431.560,00	23.360.201.938,07
31	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	33.916.583.090,00	12.665.118.406,00	0,00	0,00	0,00	1.363.040.000,00	-	32.765.769.031,00	9.203.414.620,63
32	BADAN PENDAPATAN DAERAH	147.473.997.991,45	33.427.345.655,00	0,00	0,00	0,00	7.231.149.798,00	-	136.045.927.432,00	31.407.391.914,26
33	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	10.569.696.276,00	9.630.344.258,00	0,00	0,00	0,00	832.673.200,00	-	9.088.160.997,00	8.534.054.184,22
34	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	11.761.988.730,00	53.501.117.415,00	0,00	0,00	0,00	1.937.952.500,00	-	11.108.946.909,00	40.233.897.758,37
35	SEKRETARIAT DPRD	9.722.742.104,00	151.837.292.819,00	0,00	0,00	0,00	2.293.715.077,00	-	8.718.469.166,56	118.444.836.540,58
36	SEKRETARIAT DAERAH	67.051.592.265,16	122.487.518.149,00	0,00	1.809.999.970,00	0,00	25.045.458.015,00	-	60.812.716.981,00	104.582.785.986,70
37	INSPEKTORAT	21.642.589.852,00	8.289.373.032,00	0,00	0,00	0,00	964.450.000,00	-	21.343.273.771,00	7.675.644.961,16
38	BADAN PENGHUBUNG	4.860.185.687,50	4.103.945.824,00	0,00	0,00	0,00	314.683.000,00	-	4.461.615.545,00	4.043.381.004,00
39	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6.212.756.796,00	4.229.160.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000.000,00	-	5.761.592.166,00	3.628.843.175,34

Lampiran 3

Realisasi				
Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga
9.903.628.000,00	1.040.184.587.070,81	9.094.500.000,00	556.754.502.359,04	1.182.717.927,18
-	3.054.129.745,00	-	95.281.533.650,75	-
-	-	-	202.578.075.342,37	-
-	52.851.531.000,00	-	201.659.232.034,00	-
-	-	210.000.000,00	347.145.000,00	-
-	-	-	410.020.780,00	-
-	-	5.000.000.000,00	511.777.200,00	-
-	-	-	1.221.711.136,00	-
-	-	-	601.667.093,70	-
-	-	-	69.800.000,00	-
-	-	-	527.431.750,00	-
-	-	-	224.632.000,00	-
-	-	-	269.302.060,00	-
-	-	-	342.665.118,00	-
-	-	-	1.278.147.200,00	-
-	-	-	2.130.359.904,00	-
-	-	-	42.670.000,00	-
-	-	-	216.950.000,00	-
-	-	-	223.331.600,00	-
-	-	-	3.719.429.230,00	-
-	-	-	70.173.650,00	-
-	84.390.000,00	-	250.600.000,00	-
-	-	-	54.086.100,00	-
-	893.680.750,00	-	5.286.552.450,38	-
-	143.700.000,00	-	1.543.802.000,00	-
-	-	-	55.677.500,00	-
-	-	-	99.000.000,00	-
9.903.628.000,00	981.767.655.575,81	3.884.500.000,00	-	1.182.717.927,18
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	510.039.900,00	-
-	-	-	1.312.310.500,00	-
-	-	-	6.715.470.030,00	-
-	-	-	756.198.700,00	-
-	-	-	1.739.603.090,00	-
-	-	-	2.173.764.226,97	-
-	1.389.500.000,00	-	23.246.041.651,87	-
-	-	-	875.815.980,00	-
-	-	-	311.061.481,00	-
-	-	-	98.424.000,00	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
Pemerintah Provinsi Bali TA 2019**

No.	OPD	TA 2019			TA 2018
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	Jumlah	1.699.658.149.841,27	1.590.611.064.913,75	93,58	1.590.437.517.662,00
I	Jumlah Belanja Gaji dan Tunjangan	1.038.601.994.647,81	1.019.368.278.070,00	98,15	1.019.748.248.218,00
1	Dinas Pendidikan	673.093.008.898,56	665.728.416.282,00	98,91	667.197.693.740,00
2	Dinas Kesehatan	64.297.595.653,00	63.564.754.140,00	98,86	56.514.826.031,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13.157.360.373,00	13.008.247.288,00	98,87	14.644.456.251,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.946.434.746,13	1.844.491.221,00	94,76	1.944.966.997,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	7.838.863.140,89	7.814.736.745,00	99,69	7.831.327.969,00
6	Dinas Sosial	7.368.605.096,00	7.303.073.023,00	99,11	7.168.110.611,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.490.383.665,00	4.180.749.359,00	93,10	4.823.797.609,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral	10.075.028.481,88	9.911.098.415,00	98,37	10.214.804.808,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.158.035.918,75	2.100.783.523,00	97,35	2.071.825.353,00
10	Dinas Ketahanan Pangan	3.769.887.830,13	3.683.434.102,00	97,71	3.613.495.007,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	4.221.492.936,00	3.998.449.627,00	94,72	3.550.293.163,00
12	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana	2.333.339.394,00	2.113.204.086,00	90,57	2.279.873.862,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.416.961.175,38	3.399.168.091,00	99,48	3.967.224.890,00
14	Dinas Perhubungan	6.284.790.316,00	6.019.931.405,00	95,79	5.582.574.788,00
15	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	3.368.129.565,00	3.312.326.774,00	98,34	3.426.795.692,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.890.124.851,50	3.823.197.092,00	98,28	3.936.560.466,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.204.179.249,13	4.086.006.037,00	97,19	4.289.646.329,00
18	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	3.705.320.000,00	3.665.597.602,00	98,93	3.640.383.610,00
19	Dinas Kebudayaan	9.964.837.622,20	9.286.443.883,00	93,19	9.517.187.457,00
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	6.283.910.411,00	6.246.372.295,00	99,40	6.325.081.288,00
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	6.703.371.900,00	6.505.590.999,00	97,05	6.025.426.892,00
22	Dinas Pariwisata	4.936.961.670,00	4.788.166.321,00	96,99	4.945.807.576,00
23	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	17.210.555.501,00	16.322.685.420,00	94,84	17.916.985.087,00
24	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	5.567.796.985,13	5.402.624.800,00	97,03	5.507.266.171,00
25	Dinas Kehutanan	16.254.312.788,00	15.743.692.268,00	96,86	17.557.810.580,00
26	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	5.524.878.765,00	5.535.122.035,00	100,19	5.801.873.584,00
27	DPRD	36.709.600.000,00	36.400.137.984,00	99,16	38.493.119.589,00
28	Kepala Daerah	334.726.334,00	233.311.128,00	69,70	233.196.052,00
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	5.690.208.035,02	5.556.095.846,00	97,64	5.442.939.348,00
30	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	10.010.733.090,00	9.771.645.082,00	97,61	9.579.918.128,00
31	Badan Pendapatan Daerah	42.041.786.045,45	37.806.588.080,00	89,93	35.251.053.059,00
32	Badan Kepegawaian Daerah	4.246.756.276,00	4.137.578.071,00	97,43	4.283.128.709,00
33	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.510.118.730,00	4.469.631.074,00	99,10	4.386.393.950,00
34	Sekretariat DPRD	4.319.567.137,00	4.162.121.504,00	96,36	4.224.295.486,00
35	Sekretariat Daerah	27.583.690.902,16	26.564.870.529,00	96,31	27.441.871.898,00
36	Inspektorat	6.983.439.852,00	6.944.994.203,00	99,45	6.150.440.446,00
37	Badan Penghubung	1.349.468.687,50	1.269.923.545,00	94,11	1.204.249.480,00
38	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.755.732.626,00	2.663.018.191,00	96,64	2.761.546.272,00
II	Jumlah Tambahan Penghasilan PNS	544.145.082.828,61	463.021.845.750,00	85,09	471.090.289.157,00
1	Dinas Pendidikan	165.686.326.000,00	126.689.540.970,00	76,46	132.962.920.725,00
2	Dinas Kesehatan	58.712.971.000,00	54.700.818.545,00	93,17	54.370.626.953,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14.197.044.000,00	11.258.404.109,00	79,30	13.015.883.612,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.768.527.609,00	2.035.571.705,00	73,53	2.197.737.700,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	9.284.800.000,00	7.883.936.973,00	84,91	7.980.522.316,00
6	Dinas Sosial	7.524.400.000,00	6.969.092.761,00	92,62	6.868.360.955,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.139.480.000,00	4.049.822.426,00	78,80	5.718.988.562,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral	12.839.735.000,00	11.133.633.469,00	86,71	11.340.972.475,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.806.830.600,00	2.623.336.638,00	93,46	2.505.060.750,00
10	Dinas Ketahanan Pangan	4.663.850.000,00	4.099.773.685,00	87,91	3.982.072.421,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	5.081.757.500,00	4.748.528.411,00	93,44	3.739.859.125,00
12	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana	3.022.114.075,00	2.560.981.461,00	84,74	2.530.108.842,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.296.527.500,00	3.717.668.509,00	86,53	4.259.401.864,00
14	Dinas Perhubungan	7.215.680.000,00	6.483.121.241,00	89,85	6.032.972.345,00
15	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	4.218.480.000,00	4.025.977.560,00	95,44	4.069.207.804,00

No.	OPD	TA 2019			TA 2018
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.967.600.000,00	4.319.294.227,00	72,38	4.363.610.315,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.440.331.000,00	5.718.398.924,00	88,79	6.000.600.156,00
18	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	4.318.080.000,00	3.843.264.395,00	89,00	4.113.486.967,00
19	Dinas Kebudayaan	10.654.940.000,00	8.825.699.489,00	82,83	9.083.079.170,00
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	6.401.680.000,00	6.110.407.340,00	95,45	6.303.208.906,00
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	7.603.280.000,00	6.759.521.717,00	88,90	5.895.150.997,00
22	Dinas Pariwisata	5.465.762.242,88	4.666.994.440,00	85,39	4.991.746.448,00
23	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	18.589.500.000,00	14.154.878.981,00	76,14	15.380.497.072,00
24	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	6.532.700.000,00	5.586.045.033,00	85,51	5.503.412.251,00
25	Dinas Kehutanan	14.498.060.000,00	13.497.409.154,00	93,10	14.817.065.297,00
26	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	6.309.380.000,00	5.811.823.824,00	92,11	5.915.989.723,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	11.808.380.905,73	11.076.420.714,00	93,80	10.600.608.105,00
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	20.185.580.000,00	19.434.418.949,00	96,28	19.649.585.427,00
29	Badan Pendapatan Daerah	34.734.760.000,00	31.190.033.387,00	89,79	29.440.086.679,00
30	Badan Kepegawaian Daerah	5.443.700.000,00	4.440.322.926,00	81,57	4.658.253.373,00
31	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.654.300.000,00	6.131.621.229,00	92,15	5.571.893.470,00
32	Sekretariat DPRD	4.820.432.863,00	4.089.565.563,00	84,84	4.129.007.785,00
33	Sekretariat Daerah	38.959.381.363,00	33.900.646.452,00	87,02	33.468.398.138,00
34	Inspektorat	14.567.900.000,00	14.312.279.568,00	98,25	13.543.563.944,00
35	Badan Penghubung	3.495.627.000,00	3.191.692.000,00	91,31	3.017.557.202,00
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.235.184.170,00	2.980.898.975,00	92,14	3.068.791.283,00
III	Jumlah Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	16.654.178.519,85	16.611.950.000,00	99,75	15.162.775.000,00
1	DPRD	10.650.000.000,00	10.642.950.000,00	99,93	9.705.000.000,00
2	Kepala Daerah	5.644.178.519,85	5.639.000.000,00	99,91	5.115.775.000,00
3	Sekretariat DPRD	360.000.000,00	330.000.000,00	91,67	342.000.000,00
IV	Jumlah Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	70.001.451.946,00	66.384.805.965,00	94,83	62.886.986.957,00
1	Badan Pendapatan Daerah	70.001.451.946,00	66.384.805.965,00	94,83	62.886.986.957,00
V	Jumlah Belanja Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan	2.343.413.800,00	2.172.941.842,00	92,73	0,00
1	Dinas Kesehatan	2.343.413.800,00	2.172.941.842,00	92,73	0,00

No.	OPD	TA 2019			TA 2018
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
VI	Jumlah Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.351.097.695,00	231.000.106,00	17,10	2.493.039.836,00
1	Dinas Kesehatan	45.000.000,00	0,00	0,00	1.631.100.950,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	168.600.000,00	3.820.000,00	2,27	0,00
3	Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral	40.351.425,00	16.878.750,00	41,83	13.072.950,00
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	553.500.000,00	0,00	0,00	405.000.000,00
5	Dinas Kebudayaan	357.598.166,00	156.220.000,00	43,69	416.293.350,00
6	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Dinas Kelautan dan Perikanan	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Pariwisata	90.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	17.987.354,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	24.630.750,00	20.091.750,00	81,57	0,00
11	Dinas Kehutanan	49.000.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	44.250.000,00	33.989.606,00	76,81	27.572.586,00
13	Badan Penghubung	15.090.000,00	0,00	0,00	0,00
VII	Jumlah Belanja Honorarium PNS	12.108.919.050,00	9.130.160.000,00	75,40	8.915.023.850,00
1	Dinas Pendidikan	550.965.000,00	183.055.000,00	33,22	293.045.000,00
2	Dinas Kesehatan	914.683.750,00	401.360.000,00	43,88	84.235.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	268.875.000,00	208.290.000,00	77,47	188.520.000,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5.000.000,00	4.750.000,00	95,00	1.000.000,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	134.600.000,00	127.850.000,00	94,99	92.860.000,00
6	Dinas Sosial	8.700.000,00	6.250.000,00	71,84	9.650.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.595.415.300,00	869.355.000,00	54,49	57.180.000,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral	199.110.000,00	166.130.000,00	83,44	155.930.000,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	103.285.000,00	94.315.000,00	91,32	96.030.000,00
10	Dinas Ketahanan Pangan	27.450.000,00	17.950.000,00	65,39	19.600.000,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	16.020.000,00	14.520.000,00	90,64	16.600.000,00
12	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana	24.445.000,00	24.445.000,00	100,00	43.480.000,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	90.020.000,00	81.010.000,00	89,99	347.650.000,00
14	Dinas Perhubungan	148.120.000,00	146.545.000,00	98,94	166.465.000,00
15	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	240.155.000,00	231.720.000,00	96,49	215.040.000,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	19.750.000,00	4.800.000,00	24,30	5.800.000,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	3.050.000,00
18	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	212.695.000,00	196.660.000,00	92,46	762.765.000,00
19	Dinas Kebudayaan	433.080.000,00	390.475.000,00	90,16	97.655.000,00
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	58.270.000,00	57.870.000,00	99,31	59.285.000,00
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	30.390.000,00	22.840.000,00	75,16	40.690.000,00
22	Dinas Pariwisata	51.385.000,00	42.610.000,00	82,92	20.805.000,00
23	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	111.940.000,00	99.710.000,00	89,07	203.560.000,00
24	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	56.545.000,00	55.360.000,00	97,90	49.870.000,00
25	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	5.150.000,00	2.000.000,00	38,83	23.585.000,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	911.140.000,00	745.915.000,00	81,87	464.315.000,00
27	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3.720.270.000,00	3.559.705.000,00	95,68	3.594.535.000,00
28	Badan Pendapatan Daerah	146.200.000,00	120.200.000,00	82,22	471.375.000,00
29	Badan Kepegawaian Daerah	879.240.000,00	510.260.000,00	58,03	274.100.000,00
30	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	202.320.000,00	122.705.000,00	60,65	119.985.000,00
31	Sekretariat DPRD	185.870.000,00	103.050.000,00	55,44	88.770.000,00
32	Sekretariat Daerah	438.740.000,00	308.780.000,00	70,38	640.973.850,00
33	Inspektorat	91.250.000,00	86.000.000,00	94,25	92.900.000,00
34	Badan Penghubung	0,00	0,00	0,00	20.595.000,00
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	221.840.000,00	117.675.000,00	53,04	93.125.000,00
VIII	Jumlah Belanja Honorarium Non Pns	882.754.392,00	678.614.376,75	76,87	920.360.400,00
1	Dinas Kesehatan	357.852.092,00	170.852.099,56	47,74	33.894.416,00
2		0,00	0,00	0,00	410.401.824,00
3	Dinas Sosial	139.408.080,00	139.408.080,00	100,00	138.377.664,00
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	118.500.000,00	118.500.000,00	100,00	126.000.000,00
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	34.852.116,00	34.852.097,63	100,00	53.594.416,00
6	Dinas Kebudayaan	118.250.000,00	117.250.000,00	99,15	0,00
7	Dinas Pariwisata	1.720.000,00	1.220.000,00	70,93	500.000,00
8	Badan Pendapatan Daerah	55.800.000,00	55.800.000,00	100,00	0,00
9	Sekretariat DPRD	36.872.104,00	33.732.099,56	91,48	155.592.080,00
10	Sekretariat Daerah	19.500.000,00	7.000.000,00	35,90	0,00

No.	OPD	TA 2019			TA 2018
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
11		0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
IX	Jumlah Belanja Honorarium Pengelolaan dana Bos	81.000.000,00	81.000.000,00	100,00	81.000.000,00
1	Dinas Pendidikan	81.000.000,00	81.000.000,00	100,00	81.000.000,00
X	Jumlah Belanja Pegawai Blud	11.267.546.962,00	10.879.823.804,00	96,56	8.289.438.744,00
1	Dinas Kesehatan	256.122.000,00	243.695.588,00	95,15	551.966.244,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11.011.424.962,00	10.636.128.216,00	96,59	7.737.472.500,00
XI	Jumlah Belanja Pegawai Pns dan Non Pns	2.153.460.000,00	1.992.395.000,00	92,52	792.105.500,00
1	Dinas Pendidikan	0	0	0	38.040.000,00
2	Dinas Kesehatan	258.000.000,00	258.000.000,00	100,00	171.500.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	62.580.000,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	39.790.000,00	33.000.000,00	82,94	50.030.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	129.300.000,00	122.570.000,00	94,80	48.170.000,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	18.660.000,00
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	384.000.000,00	369.000.000,00	96,09	56.100.000,00
8	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	26.400.000,00	16.830.000,00	63,75	0,00
9	Dinas Kebudayaan	342.940.000,00	254.710.000,00	74,27	191.950.500,00
10	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	77.750.000,00	67.365.000,00	86,64	0,00
11	Badan Pendapatan Daerah	494.000.000,00	488.500.000,00	98,89	0,00
12	Badan Kepegawaian Daerah	0,00	0,00	0,00	99.000.000,00
13	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	351.000.000,00	351.000.000,00	100,00	0,00
14	Sekretariat Daerah	50.280.000,00	31.420.000,00	62,49	56.075.000,00
XII	Jumlah Belanja Pegawai Bos	67.250.000,00	58.250.000,00	86,62	58.250.000,00
1	Dinas Pendidikan	67.250.000,00	58.250.000,00	86,62	58.250.000,00

**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Pemerintah Provinsi Bali TA 2019**

No.	OPD	TA 2019			TA 2018
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	Jumlah	1.387.675.908.224,04	1.195.894.560.327,09	86,18	999.366.106.630,68
I	Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis	68.204.861.735,70	62.407.252.467,00	91,50	43.721.394.113,00
1	Dinas Pendidikan	1.525.113.839,00	1.401.180.724,00	91,87	1.884.251.818,00
2	Dinas Kesehatan	10.518.532.640,70	8.152.070.216,00	77,50	1.919.214.950,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.266.244.666,00	3.092.632.055,00	94,68	2.017.394.122,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	261.757.600,00	234.337.600,00	89,52	205.473.684,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	925.062.400,00	912.535.300,00	98,65	717.317.900,00
6	Dinas Sosial	1.616.562.704,00	1.603.419.350,00	99,19	1.993.849.236,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.241.217.990,00	1.221.273.100,00	98,39	1.131.351.550,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral	1.269.007.464,00	1.219.949.975,00	96,13	1.378.844.868,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	473.061.000,00	471.124.900,00	99,59	338.872.085,00
10	Dinas Ketahanan Pangan	247.939.188,00	247.016.834,00	99,63	242.023.800,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	1.268.309.308,00	1.161.798.482,00	91,60	391.083.900,00
12	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana	348.552.828,00	337.084.678,00	96,71	279.879.668,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.347.921.751,00	1.287.935.548,00	95,55	658.682.736,00
14	Dinas Perhubungan	693.284.558,00	677.425.800,00	97,71	834.534.300,00
15	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	819.391.672,00	806.446.450,00	98,42	556.215.374,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	555.525.917,00	548.021.855,00	98,65	538.928.750,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	525.041.810,00	509.208.750,00	96,98	476.401.973,00
18	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	716.659.100,00	650.535.650,00	90,77	713.699.874,00
19	Dinas Kebudayaan	3.217.064.728,00	2.842.325.942,00	88,35	2.139.699.480,00
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	334.443.100,00	332.711.350,00	99,48	396.557.500,00
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	565.056.356,00	539.767.350,00	95,52	448.346.950,00
22	Dinas Pariwisata	683.419.815,00	670.405.015,00	98,10	513.048.993,00
23	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	1.131.896.085,00	901.844.439,00	79,68	1.448.504.322,00
24	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	674.782.600,00	643.363.350,00	95,34	473.701.491,00
25	Dinas Kehutanan	561.751.636,00	556.638.884,00	99,09	518.822.814,00
26	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	502.678.573,00	334.576.749,00	66,56	393.016.400,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	930.262.340,00	901.008.105,00	96,86	693.293.150,00
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.146.705.500,00	1.068.634.860,00	93,19	1.203.119.930,00
29	Badan Pendapatan Daerah	4.037.140.352,00	3.846.393.555,00	95,28	3.212.854.976,00
30	Badan Kepegawaian Daerah	490.120.184,00	469.894.177,00	95,87	480.462.700,00
31	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.083.758.900,00	1.977.498.000,00	94,90	710.867.800,00
32	Sekretariat DPRD	2.394.187.600,00	2.081.360.300,00	86,93	2.367.691.560,00
33	Sekretariat Daerah	19.924.425.941,00	18.812.315.274,00	94,42	10.868.384.037,00
34	Inspektoral	804.821.994,00	794.614.480,00	98,73	792.174.492,00
35	Badan Penghubung	694.334.512,00	694.309.270,00	100,00	497.504.830,00
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	408.825.104,00	405.594.100,00	99,21	285.322.100,00
II	Jumlah Belanja Bahan/Material	40.597.842.069,20	35.268.710.595,20	86,87	17.863.859.551,00
1	Dinas Pendidikan	15.537.800,00	7.837.000,00	50,44	28.402.450,00
2	Dinas Kesehatan	29.011.343.322,20	24.355.864.478,20	83,95	7.950.993.396,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.513.777.180,00	4.507.815.180,00	99,87	5.383.259.900,00
4	Dinas Sosial	81.378.700,00	80.930.000,00	99,45	41.597.800,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	320.128.656,00	307.177.656,00	95,95	18.036.185,00
6	Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral	296.854.000,00	296.027.300,00	99,72	280.625.500,00
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	135.000.000,00	134.775.000,00	99,83	0,00
8	Dinas Ketahanan Pangan	145.086.500,00	141.613.400,00	97,61	72.531.200,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	568.242.350,00	565.820.100,00	99,57	102.459.600,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	235.500.000,00
11	Dinas Perhubungan	3.233.322,00	3.230.000,00	99,90	0,00
12	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.914.000,00	1.914.000,00	100,00	0,00
14	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	84.075.600,00	69.468.700,00	82,63	97.094.560,00
15	Dinas Kebudayaan	479.616.760,00	467.669.000,00	97,51	305.278.900,00
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	20.551.800,00	20.551.799,00	100,00	23.502.000,00
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.031.931.900,00	566.567.300,00	54,90	205.005.100,00
18	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	1.105.012.000,00	1.054.923.150,00	95,47	1.118.904.850,00
19	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.218.586.329,00	1.205.404.332,00	98,92	951.763.910,00
20	Dinas Kehutanan	1.062.742.150,00	992.665.800,00	93,41	565.891.600,00
21	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	20.846.700,00	20.746.700,00	99,52	18.242.400,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	0,00
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	20.000.000,00	19.357.000,00	96,79	31.187.000,00
24	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.470.500,00	-	0,00	0,00
25	Sekretariat DPRD	54.000.000,00	49.378.000,00	91,44	37.266.500,00
26	Sekretariat Daerah	370.182.000,00	362.644.200,00	97,96	392.013.700,00
27	Badan Penghubung	330.500,00	330.500,00	100,00	103.000,00
III	Jumlah Belanja Jasa Kantor	351.664.471.521,34	323.176.111.044,05	91,90	241.214.933.476,18

No.	OPD	TA 2019			TA 2018
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	Jumlah	1.387.675.908.224,04	1.195.894.560.327,09	86,18	999.366.106.630,68
1	Dinas Pendidikan	28.920.227.946,00	27.194.086.155,97	94,03	26.181.086.383,00
2	Dinas Kesehatan	75.944.750.485,34	66.060.672.374,46	86,99	16.424.594.378,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19.498.143.352,00	19.225.976.174,38	98,60	17.324.269.674,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.923.123.006,00	1.876.002.215,87	97,55	1.426.341.847,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	16.812.924.840,00	16.665.295.976,41	99,12	14.152.681.427,00
6	Dinas Sosial	3.460.073.684,00	3.257.716.227,00	94,42	3.470.837.225,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.133.213.053,00	5.817.156.845,71	94,85	5.597.464.350,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral	5.449.804.531,00	5.165.688.209,51	94,79	4.389.228.512,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.369.209.394,00	1.307.369.256,88	96,19	1.252.515.478,00
10	Dinas Ketahanan Pangan	1.310.691.388,00	1.240.518.068,08	94,65	980.627.074,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	2.823.090.610,00	2.676.455.466,69	94,81	1.006.156.166,00
12	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana	778.435.568,00	711.700.576,00	91,43	638.036.710,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.676.445.492,00	5.512.220.970,57	97,11	2.764.072.074,00
14	Dinas Perhubungan	7.860.772.312,00	7.472.376.693,60	95,18	7.695.740.806,00
15	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	8.977.876.120,00	8.196.904.593,50	91,30	5.661.053.634,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.376.937.197,00	5.279.968.433,59	98,20	3.633.913.143,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.691.573.891,00	1.626.823.177,83	96,17	1.754.483.756,00
18	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	6.178.830.688,00	5.788.600.312,04	93,68	4.161.357.632,00
19	Dinas Kebudayaan	25.185.768.890,00	23.420.208.142,97	92,99	18.732.740.814,18
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.005.293.884,00	983.791.365,00	97,86	1.013.159.971,00
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.644.048.560,00	2.436.420.034,03	92,15	1.870.108.744,00
22	Dinas Pariwisata	2.369.231.607,00	2.279.772.029,68	96,22	1.019.086.635,00
23	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	11.402.730.336,00	10.785.107.627,89	94,58	10.859.180.134,00
24	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	5.875.238.500,00	5.765.213.833,48	98,13	6.131.131.969,00
25	Dinas Kehutanan	2.197.697.606,00	2.057.154.682,99	93,60	1.821.461.203,00
26	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.595.024.835,00	1.460.811.354,47	91,59	1.228.554.267,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	7.614.320.664,00	6.857.953.403,07	90,07	3.503.387.019,00
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.478.592.693,00	2.055.578.885,63	82,93	1.544.226.439,00
29	Badan Pendapatan Daerah	17.670.236.323,00	16.939.280.257,26	95,86	14.752.577.393,00
30	Badan Kepegawaian Daerah	4.237.748.094,00	3.915.946.201,22	92,41	8.248.807.931,00
31	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.186.756.596,00	7.265.762.112,37	79,09	5.853.804.656,00
32	Sekretariat DPRD	10.521.282.740,00	9.165.725.552,86	87,12	7.391.236.156,00
33	Sekretariat Daerah	42.660.120.074,00	37.976.707.434,70	89,02	34.342.131.676,00
34	Inspektorat	1.953.298.746,00	1.916.964.609,00	98,14	1.692.241.689,00
35	Badan Penghubung	1.939.090.824,00	1.917.638.687,00	98,89	1.830.722.673,00
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	971.866.992,00	900.543.102,34	92,66	865.913.838,00

No.	OPD	TA 2019			TA 2018
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	Jumlah	1.387.675.908.224,04	1.195.894.560.327,09	86,18	999.366.106.630,68
IV	Jumlah Belanja Premi Asuransi	1.349.300.000,00	6.450.000,00	0,48	963.903.000,00
1	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	7.300.000,00	6.450.000,00	88,36	4.150.000,00
2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.342.000.000,00	-	0,00	959.753.000,00
V	Jumlah Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16.313.951.722,52	11.970.083.110,00	73,37	11.833.955.841,00
1	Dinas Pendidikan	207.100.000,00	165.610.000,00	79,97	276.540.900,00
2	Dinas Kesehatan	1.139.093.531,52	605.992.535,00	53,20	465.285.576,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.310.005.584,00	1.087.348.425,00	83,00	1.741.521.400,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	115.925.248,00	96.352.120,00	83,12	69.050.860,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	377.300.544,00	342.162.600,00	90,69	181.977.800,00
6	Dinas Sosial	255.914.008,00	214.038.918,00	83,64	170.037.769,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	872.560.088,00	508.983.346,00	58,33	614.166.400,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral	459.857.504,00	384.212.500,00	83,55	425.306.002,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	161.000.000,00	127.576.300,00	79,24	100.515.050,00
10	Dinas Ketahanan Pangan	120.820.000,00	110.071.600,00	91,10	87.667.700,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	526.360.312,00	470.724.400,00	89,43	117.491.500,00
12	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana	93.300.800,00	81.940.600,00	87,82	42.882.750,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	178.000.000,00	160.922.600,00	90,41	156.519.108,00
14	Dinas Perhubungan	711.413.164,00	551.505.570,00	77,52	239.000.737,00
15	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	251.302.868,00	241.320.200,00	96,03	198.499.200,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	124.673.584,00	122.496.000,00	98,25	85.625.100,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	128.408.000,00	117.215.818,00	91,28	75.547.602,00
18	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	181.772.512,00	76.737.300,00	42,22	110.468.000,00
19	Dinas Kebudayaan	336.057.920,00	177.575.000,00	52,84	272.598.920,00
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	113.750.000,00	112.926.700,00	99,28	88.975.455,00
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	220.991.368,00	182.437.100,00	82,55	137.793.342,00
22	Dinas Pariwisata	136.925.000,00	122.058.284,00	89,14	101.254.700,00
23	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	696.294.000,00	543.263.600,00	78,02	516.986.426,00
24	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	302.680.000,00	279.884.350,00	92,47	271.439.700,00
25	Dinas Kehutanan	352.648.209,00	334.123.000,00	94,75	289.879.050,00
26	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	203.140.000,00	127.534.017,00	62,78	86.035.928,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	196.800.000,00	133.284.841,00	67,73	126.714.901,00
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	202.084.000,00	164.261.329,00	81,28	123.762.350,00
29	Badan Pendapatan Daerah	552.414.706,00	450.390.779,00	81,53	353.834.459,00
30	Badan Kepegawaian Daerah	184.885.000,00	154.906.500,00	83,79	174.503.200,00
31	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	158.394.752,00	131.920.800,00	83,29	91.624.600,00
32	Sekretariat DPRD	1.157.500.000,00	674.497.100,00	58,27	766.628.600,00
33	Sekretariat Daerah	3.775.939.020,00	2.483.497.263,00	65,77	2.866.197.861,00
34	Inspektorat	298.500.000,00	288.649.353,00	96,70	204.099.648,00
35	Badan Penghubung	83.740.000,00	66.513.262,00	79,43	116.318.647,00
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	126.400.000,00	77.149.000,00	61,04	87.204.600,00
VI	Jumlah Belanja Cetak dan Penggandaan	16.785.416.232,00	14.794.403.340,60	88,14	12.108.367.376,00
1	Dinas Pendidikan	583.561.200,00	443.447.530,00	75,99	755.669.180,00
2	Dinas Kesehatan	3.006.111.532,00	2.720.673.108,60	90,50	1.003.052.800,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	323.394.800,00	298.452.000,00	92,29	322.504.550,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.518.200,00	40.706.200,00	95,74	20.973.000,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	78.520.400,00	69.327.400,00	88,29	59.102.000,00
6	Dinas Sosial	58.057.500,00	45.009.800,00	77,53	97.154.830,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	174.203.400,00	161.179.400,00	92,52	103.811.600,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral	300.883.700,00	270.523.100,00	89,91	264.454.400,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	92.716.000,00	82.615.950,00	89,11	62.142.200,00
10	Dinas Ketahanan Pangan	50.193.800,00	48.068.100,00	95,77	32.952.200,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	53.338.400,00	50.338.800,00	94,38	54.536.400,00
12	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana	117.678.000,00	114.091.700,00	96,95	81.057.813,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	309.433.600,00	295.000.400,00	95,34	344.363.200,00
14	Dinas Perhubungan	121.811.000,00	91.131.000,00	74,81	221.763.600,00
15	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	220.815.700,00	214.223.350,00	97,01	172.621.000,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	163.702.100,00	158.410.500,00	96,77	134.025.900,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	90.263.700,00	76.323.400,00	84,59	77.191.800,00
18	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	175.463.200,00	160.088.700,00	91,24	246.351.200,00
19	Dinas Kebudayaan	1.561.757.052,00	1.286.547.600,00	82,38	845.815.750,00
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	97.464.700,00	93.172.099,00	95,60	103.019.000,00
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	103.680.600,00	90.549.800,00	87,34	109.557.200,00
22	Dinas Pariwisata	193.832.490,00	183.931.390,00	94,89	99.645.640,00
23	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	221.711.700,00	193.048.350,00	87,07	254.795.100,00
24	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	228.896.100,00	217.605.600,00	95,07	361.721.890,00
25	Dinas Kehutanan	66.041.884,00	62.491.150,00	94,62	74.957.400,00
26	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	102.577.200,00	85.975.700,00	83,82	70.106.000,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1.016.708.700,00	874.173.125,00	85,98	820.872.975,00
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	692.794.324,00	649.161.925,00	93,70	618.972.350,00
29	Badan Pendapatan Daerah	2.196.280.550,00	2.059.711.513,00	93,78	1.752.448.298,00
30	Badan Kepegawaian Daerah	127.598.400,00	121.156.600,00	94,95	97.992.300,00
31	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.239.084.000,00	1.144.540.900,00	92,37	401.170.300,00
32	Sekretariat DPRD	965.052.400,00	736.196.500,00	76,29	716.220.600,00

No.	OPD	TA 2019			TA 2018
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	Jumlah	1.387.675.908.224,04	1.195.894.560.327,09	86,18	999.366.106.630,68
33	Sekretariat Daerah	1.713.742.200,00	1.362.904.050,00	79,53	1.425.109.900,00
34	Inspektorat	169.422.100,00	160.493.700,00	94,73	176.429.200,00
35	Badan Penghubung	48.715.200,00	48.711.100,00	99,99	50.650.000,00
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	87.390.400,00	84.421.800,00	96,60	75.155.800,00
VII	Jumlah Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	14.032.625.000,00	10.334.829.858,00	73,65	5.527.196.362,00
1	Dinas Pendidikan	138.400.000,00	91.620.000,00	66,20	252.214.000,00
2	Dinas Kesehatan	191.350.000,00	89.149.000,00	46,59	67.560.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.000.000,00	3.600.000,00	36,00	8.500.000,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	14.600.000,00	8.299.000,00	56,84	1.176.000,00
6	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	9.800.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	210.000.000,00	207.500.000,00	98,81	193.500.000,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral	17.400.000,00	17.400.000,00	100,00	23.400.000,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.575.000,00	6.300.000,00	83,17	1.500.000,00
10	Dinas Ketahanan Pangan	29.650.000,00	26.150.000,00	88,20	27.500.000,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	400.000,00
12	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana	3.000.000,00	2.400.000,00	80,00	0,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	35.500.000,00	35.200.000,00	99,15	38.600.000,00
14	Dinas Perhubungan	12.250.000,00	12.175.000,00	99,39	8.850.000,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	115.000.000,00	113.800.000,00	98,96	389.750.000,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	22.000.000,00	16.600.000,00	75,45	17.000.000,00
17	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	197.500.000,00	124.050.000,00	62,81	96.250.000,00
18	Dinas Kebudayaan	15.100.000,00	15.100.000,00	100,00	9.976.000,00
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	4.000.000,00
20	Dinas Pariwisata	79.300.000,00	59.300.000,00	74,78	26.250.000,00
21	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	600.000,00	600.000,00	100,00	1.800.000,00
22	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	480.200.000,00	414.906.500,00	86,40	80.697.362,00
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.500.000,00	1.960.358,00	78,41	1.500.000,00
24	Badan Pendapatan Daerah	848.000.000,00	823.500.000,00	97,11	564.500.000,00
25	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	0,00	1.500.000,00
26	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.913.550.000,00	5.683.570.000,00	63,76	1.280.325.000,00
27	Sekretariat DPRD	2.670.000.000,00	2.571.000.000,00	96,29	2.308.500.000,00
28	Sekretariat Daerah	10.350.000,00	2.850.000,00	27,54	92.900.000,00
29	Inspektorat	-	-	0,00	15.000.000,00
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.300.000,00	5.300.000,00	100,00	4.248.000,00

No.	OPD	TA 2019			TA 2018
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	Jumlah	1.387.675.908.224,04	1.195.894.560.327,09	86,18	999.366.106.630,68
VIII	Jumlah Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.403.230.309,00	1.366.041.000,00	56,84	1.696.420.390,00
1	Dinas Pendidikan	115.650.000,00	99.600.000,00	86,12	122.375.000,00
2	Dinas Kesehatan	113.582.000,00	64.745.000,00	57,00	20.500.000,00
3	Dinas Sosial	10.550.000,00	10.550.000,00	100,00	15.850.000,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	31.200.000,00	30.300.000,00	97,12	500.000,00
5	Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	22.500.000,00
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
7	Dinas Ketahanan Pangan	1.400.000,00	350.000,00	25,00	0,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	11.920.000,00
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	55.700.000,00	43.030.000,00	77,25	264.885.000,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	4.000.000,00	3.200.000,00	80,00	2.250.000,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	85.000.000,00	49.368.000,00	58,08	129.500.000,00
12	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	280.550.000,00	180.570.000,00	64,36	115.800.000,00
13	Dinas Kebudayaan	170.300.000,00	78.000.000,00	45,80	34.800.000,00
14	Dinas Kelautan dan Perikanan	18.000.000,00	12.950.000,00	71,94	10.050.000,00
15	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	15.300.000,00	15.300.000,00	100,00	18.900.000,00
16	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	28.000.000,00	26.500.000,00	94,64	500.000,00
17	Dinas Kehutanan	30.500.000,00	24.840.000,00	81,44	19.590.000,00
18	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	5.500.000,00
19	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	11.498.309,00	7.900.000,00	68,71	60.000.000,00
20	Badan Pendapatan Daerah	-	-	0,00	1.300.000,00
21	Badan Kepegawaian Daerah	8.000.000,00	7.200.000,00	90,00	3.600.000,00
22	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	432.250.000,00	124.500.000,00	28,80	0,00
23	Sekretariat DPRD	5.000.000,00	-	0,00	0,00
24	Sekretariat Daerah	968.200.000,00	569.638.000,00	58,83	795.600.390,00
25	Inspektorat	4.550.000,00	3.500.000,00	76,92	500.000,00
IX	Jumlah Belanja Sewa Alat Berat	26.500.000,00	26.500.000,00	100,00	0,00
1	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	26.500.000,00	26.500.000,00	100,00	0,00
X	Jumlah Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.363.824.570,00	7.045.898.200,00	95,68	3.666.043.600,00
1	Dinas Pendidikan	712.319.200,00	706.700.200,00	99,21	759.320.200,00
2	Dinas Kesehatan	69.500.000,00	57.125.000,00	82,19	54.250.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	931.273.000,00	918.511.500,00	98,63	247.825.500,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	128.250.000,00	102.125.000,00	79,63	0,00
5	Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral	86.120.000,00	85.520.000,00	99,30	77.120.000,00
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.150.000,00	6.150.000,00	100,00	2.700.000,00
7	Dinas Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00	21.650.000,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	2.750.000,00	1.250.000,00	45,45	0,00
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	20.700.000,00	15.600.000,00	75,36	48.600.000,00
10	Dinas Perhubungan	22.100.000,00	22.100.000,00	100,00	22.100.000,00
11	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	276.200.000,00	232.575.000,00	84,21	40.700.000,00
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	249.800.000,00	218.560.000,00	87,49	189.920.000,00
13	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	201.390.000,00	197.210.000,00	97,92	150.050.400,00
14	Dinas Kebudayaan	771.284.500,00	737.180.000,00	95,58	466.000.000,00
15	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	3.000.000,00
16	Dinas Kelautan dan Perikanan	40.895.000,00	30.395.000,00	74,32	8.060.000,00
17	Dinas Pariwisata	80.975.000,00	73.287.500,00	90,51	31.900.000,00
18	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	-	-	0,00	82.520.000,00
19	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	28.000.000,00	28.000.000,00	100,00	0,00
20	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	373.700.000,00	340.100.000,00	91,01	64.800.000,00
21	Badan Pendapatan Daerah	14.000.000,00	10.500.000,00	75,00	0,00
22	Badan Kepegawaian Daerah	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00	0,00
23	Sekretariat DPRD	145.600.000,00	144.828.000,00	99,54	121.052.500,00
24	Sekretariat Daerah	3.082.934.870,00	2.998.198.000,00	97,25	1.118.890.000,00
25	Badan Penghubung	116.283.000,00	116.283.000,00	100,00	155.585.000,00
XI	Jumlah Belanja Makanan dan Minuman	50.952.475.118,00	43.937.918.766,00	86,23	34.107.863.680,00
1	Dinas Pendidikan	2.127.769.800,00	1.766.417.400,00	83,02	2.556.424.800,00
2	Dinas Kesehatan	3.351.355.000,00	2.492.820.000,00	74,38	1.467.035.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	274.351.000,00	244.501.000,00	89,12	244.680.000,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	51.950.000,00	50.900.000,00	97,98	30.155.000,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	247.735.000,00	235.700.000,00	95,14	143.770.000,00
6	Dinas Sosial	249.660.000,00	233.690.000,00	93,60	273.290.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	517.482.500,00	496.207.500,00	95,89	357.759.000,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral	451.720.000,00	402.518.000,00	89,11	672.020.000,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	277.275.000,00	254.685.000,00	91,85	48.290.000,00
10	Dinas Ketahanan Pangan	209.150.000,00	200.060.000,00	95,65	27.640.000,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	158.287.500,00	153.522.500,00	96,99	116.600.000,00
12	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana	167.940.000,00	163.525.000,00	97,37	77.975.000,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.247.785.000,00	1.231.228.000,00	98,67	441.336.800,00
14	Dinas Perhubungan	199.690.000,00	189.065.000,00	94,68	156.260.000,00
15	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	453.260.000,00	427.665.000,00	94,35	345.795.000,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	493.360.000,00	490.568.200,00	99,43	738.190.000,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	81.495.000,00	77.830.000,00	95,50	21.275.000,00

No.	OPD	TA 2019			TA 2018
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	Jumlah	1.387.675.908.224,04	1.195.894.560.327,09	86,18	999.366.106.630,68
18	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.160.161.900,00	1.021.242.650,00	88,03	911.950.720,00
19	Dinas Kebudayaan	2.235.630.000,00	1.871.792.800,00	83,73	1.400.866.500,00
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	160.655.000,00	155.910.000,00	97,05	131.330.000,00
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	157.245.000,00	138.260.000,00	87,93	311.290.375,00
22	Dinas Pariwisata	233.405.000,00	218.590.000,00	93,65	94.825.000,00
23	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	478.935.000,00	413.990.000,00	86,44	461.382.500,00
24	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	119.800.000,00	119.090.000,00	99,41	549.525.000,00
25	Dinas Kehutanan	94.395.000,00	93.870.000,00	99,44	94.968.000,00
26	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	132.195.000,00	116.590.000,00	88,20	89.540.000,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1.019.580.000,00	907.270.000,00	88,98	568.365.000,00
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	599.570.000,00	431.895.000,00	72,03	322.925.000,00
29	Badan Pendapatan Daerah	1.087.430.000,00	991.285.000,00	91,16	733.302.000,00
30	Badan Kepegawaian Daerah	285.685.000,00	273.770.000,00	95,83	130.265.000,00
31	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.937.235.000,00	8.726.836.650,00	87,82	2.455.784.300,00
32	Sekretariat DPRD	11.590.105.000,00	10.098.135.000,00	87,13	9.476.639.000,00
33	Sekretariat Daerah	9.965.257.418,00	8.142.089.066,00	81,70	7.641.814.685,00
34	Inspektorat	618.385.000,00	613.485.000,00	99,21	714.175.000,00
35	Badan Penghubung	334.675.000,00	334.480.000,00	99,94	184.035.000,00
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	181.865.000,00	158.435.000,00	87,12	116.385.000,00
	XII Jumlah Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	2.006.595.000,00	1.704.774.600,00	84,96	1.329.115.000,00
1	Satuan Polisi Pamong Praja	175.600.000,00	148.798.100,00	84,74	142.635.000,00
2	Badan Pendapatan Daerah	142.500.000,00	111.500.000,00	78,25	0,00
3	Badan Kepegawaian Daerah	113.300.000,00	107.541.500,00	94,92	0,00
4	Sekretariat DPRD	1.331.195.000,00	1.298.935.000,00	97,58	814.530.000,00
5	Sekretariat Daerah	244.000.000,00	38.000.000,00	15,57	371.950.000,00
	XIII Jumlah Belanja Pakaian Kerja	2.063.684.000,00	1.801.838.500,00	87,31	967.937.300,00
1	Dinas Kesehatan	660.775.000,00	446.270.500,00	67,54	240.887.500,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	56.907.400,00
3	Satuan Polisi Pamong Praja	277.100.000,00	252.587.500,00	91,15	201.920.000,00
4	Dinas Sosial	17.500.000,00	17.475.000,00	99,86	11.000.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	304.675.000,00	300.714.000,00	98,70	54.350.000,00
6	Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral	40.800.000,00	40.704.000,00	99,76	91.680.000,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	5.789.400,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	66.000.000,00	65.850.000,00	99,77	12.000.000,00
9	Dinas Perhubungan	-	-	0,00	16.500.000,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	7.500.000,00
11	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	110.825.000,00	110.367.500,00	99,59	124.178.000,00
12	Dinas Kebudayaan	-	-	0,00	9.750.000,00
13	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	63.800.000,00	63.800.000,00	100,00	27.900.000,00
14	Badan Pendapatan Daerah	312.500.000,00	302.200.000,00	96,70	-
15	Badan Kepegawaian Daerah	39.884.000,00	39.170.000,00	98,21	11.750.000,00
16	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	4.000.000,00
17	Sekretariat DPRD	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	4.800.000,00
18	Sekretariat Daerah	126.025.000,00	118.900.000,00	94,35	87.025.000,00
19	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	-
	XIV Jumlah Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	7.891.883.000,00	7.524.770.750,00	95,35	3.050.554.100,00
1	Dinas Pendidikan	667.075.000,00	626.835.250,00	93,97	867.123.000,00
2	Dinas Kesehatan	291.050.000,00	190.756.500,00	65,54	15.395.100,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.000.000,00	5.800.000,00	96,67	0,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	49.200.000,00	48.800.000,00	99,19	48.160.000,00
5	Dinas Sosial	164.550.000,00	163.450.000,00	99,33	188.590.000,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	84.500.000,00	83.960.000,00	99,36	12.500.000,00
7	Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral	199.800.000,00	199.304.000,00	99,75	124.944.000,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00	4.000.000,00
9	Dinas Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	150.000.000,00	144.650.000,00	96,43	21.750.000,00
11	Dinas Perhubungan	26.400.000,00	26.255.000,00	99,43	20.455.000,00
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	23.200.000,00
13	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.227.960.000,00	1.207.773.700,00	98,36	857.437.000,00
14	Dinas Kebudayaan	2.924.978.000,00	2.856.493.000,00	97,66	256.000.000,00
15	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3.300.000,00	3.300.000,00	100,00	3.300.000,00
16	Dinas Kelautan dan Perikanan	30.000.000,00	28.000.000,00	93,33	0,00
17	Dinas Pariwisata	117.500.000,00	116.475.000,00	99,13	0,00
18	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	103.000.000,00	88.560.000,00	85,98	15.000.000,00
19	Badan Kepegawaian Daerah	104.375.000,00	101.087.500,00	96,85	0,00
20	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.193.940.000,00	1.110.713.300,00	93,03	115.875.000,00
21	Sekretariat DPRD	187.000.000,00	185.487.500,00	99,19	237.250.000,00
22	Sekretariat Daerah	288.000.000,00	263.820.000,00	91,60	174.250.000,00
23	Badan Penghubung	66.750.000,00	66.750.000,00	100,00	61.125.000,00
	XV Jumlah Belanja Perjalanan Dinas	253.391.448.159,00	193.400.137.774,00	76,32	150.802.466.227,00
1	Dinas Pendidikan	4.704.383.854,00	3.869.617.825,00	82,26	4.461.861.009,00

No.	OPD	TA 2019			TA 2018
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	Jumlah	1.387.675.908.224,04	1.195.894.560.327,09	86,18	999.366.106.630,68
2	Dinas Kesehatan	11.050.646.675,00	7.621.981.158,00	68,97	4.151.963.803,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.553.777.061,00	3.992.498.651,00	71,89	3.972.113.895,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	902.743.374,00	717.292.850,00	79,46	492.213.789,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	3.295.491.392,00	3.171.978.203,00	96,25	2.065.381.423,00
6	Dinas Sosial	781.450.000,00	628.786.770,00	80,46	1.189.091.771,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.437.533.664,00	2.965.098.405,00	86,26	1.774.740.260,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral	3.130.930.590,00	2.592.447.686,00	82,80	2.866.610.920,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.201.446.230,00	1.058.297.835,00	88,09	462.730.740,00
10	Dinas Ketahanan Pangan	1.204.280.960,00	1.046.747.740,00	86,92	527.964.285,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	960.124.160,00	754.713.371,00	78,61	845.173.698,00
12	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana	1.843.840.200,00	1.307.536.660,00	70,91	1.389.202.921,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.749.756.706,00	6.280.039.921,00	93,04	3.179.262.154,00
14	Dinas Perhubungan	1.909.996.345,00	1.727.107.786,00	90,42	1.283.568.966,00
15	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	2.715.949.858,00	2.332.660.397,00	85,89	1.696.071.811,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.550.008.132,00	1.405.789.863,00	90,70	870.943.771,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	645.375.000,00	522.025.580,00	80,89	454.505.938,00
18	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	5.107.847.000,00	3.665.212.789,00	71,76	1.370.166.057,00
19	Dinas Kebudayaan	5.097.521.932,00	3.330.932.274,00	65,34	1.960.897.677,00
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	823.354.000,00	809.060.220,00	98,26	615.404.755,00
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.363.668.800,00	1.032.672.395,00	75,73	556.486.800,00
22	Dinas Pariwisata	3.133.638.155,00	1.973.611.068,00	62,98	941.312.016,00
23	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	3.227.273.376,00	2.644.601.511,00	81,95	2.174.708.063,00
24	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	954.860.767,00	820.743.861,00	85,95	663.360.060,00
25	Dinas Kehutanan	997.409.970,00	896.071.964,00	89,84	1.232.047.066,00
26	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2.572.372.182,00	1.887.464.562,00	73,37	932.601.292,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	11.141.871.811,00	6.881.495.045,00	61,76	4.745.892.562,00
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3.493.969.580,00	2.252.500.713,00	64,47	2.599.743.379,00
29	Badan Pendapatan Daerah	3.767.268.000,00	3.200.870.257,00	84,97	2.264.538.508,00
30	Badan Kepegawaian Daerah	2.734.509.100,00	2.283.297.254,00	83,50	1.207.336.112,00
31	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.036.092.000,00	3.439.205.781,00	56,98	3.111.070.968,00
32	Sekretariat DPRD	115.468.164.439,00	87.856.020.938,00	76,09	70.616.000.247,00
33	Sekretariat Daerah	29.343.866.102,00	22.833.408.995,00	77,81	20.356.408.414,00
34	Inspektorat	3.831.865.888,00	3.372.748.088,00	88,02	2.485.521.427,00
35	Badan Penghubung	653.284.000,00	639.193.185,00	97,84	536.271.600,00
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.004.876.856,00	1.586.406.173,00	79,13	749.298.070,00
XVI	Jumlah Belanja Perjalanan Pindah Tugas	0,00	0,00	0,00	2.951.100,00
		-	-	0,00	2.951.100,00
XVII	Belanja Pemeliharaan	43.439.606.257,28	38.049.644.812,33	87,59	33.793.448.700,91
1	Dinas Pendidikan	419.822.956,00	314.923.774,00	75,01	398.131.000,00
2	Dinas Kesehatan	8.825.671.923,28	6.829.598.568,01	77,38	1.121.761.840,42
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.331.482.829,00	7.078.434.075,00	96,55	12.077.123.166,52
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	83.551.764,00	76.942.150,00	92,09	407.739.810,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	269.000.000,00	223.250.400,00	82,99	171.366.000,00
6	Dinas Sosial	475.427.872,00	428.480.616,00	90,13	248.217.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.433.257.973,00	2.273.781.036,00	93,45	1.910.356.800,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral	538.727.676,00	532.478.580,00	98,84	891.386.310,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	328.741.606,00	326.935.000,00	99,45	233.910.000,00
10	Dinas Ketahanan Pangan	47.409.000,00	46.200.000,00	97,45	195.415.000,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	373.353.000,00	352.585.481,00	94,44	94.311.000,00
12	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana	90.000.000,00	87.350.637,00	97,06	21.817.250,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	150.000.008,00	149.395.000,00	99,60	78.005.000,00
14	Dinas Perhubungan	704.046.000,00	677.402.450,00	96,22	1.625.779.475,00
15	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	696.286.036,00	604.363.040,00	86,80	707.186.254,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	159.134.070,00	158.929.390,52	99,87	122.332.000,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	343.906.500,00	335.706.848,05	97,62	154.195.600,00
18	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	99.416.096,00	31.705.000,00	31,89	87.306.500,00
19	Dinas Kebudayaan	4.598.975.408,00	3.803.395.075,00	82,70	2.753.678.228,72
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	91.634.184,00	88.964.200,00	97,09	83.720.000,00
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	152.376.000,00	143.861.001,00	94,41	51.726.000,00
22	Dinas Pariwisata	519.173.509,00	512.231.052,11	98,66	78.247.408,00
23	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	400.412.004,00	387.493.289,00	96,77	286.132.000,00
24	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	172.050.000,00	171.100.065,00	99,45	123.962.670,00
25	Dinas Kehutanan	105.169.000,00	105.048.000,00	99,88	108.147.000,00
26	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	285.632.840,00	274.178.920,00	95,99	172.314.000,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	751.853.832,00	639.359.500,00	85,04	443.377.028,25
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.174.400.000,00	2.075.264.050,00	95,44	1.034.206.500,00
29	Badan Pendapatan Daerah	2.749.275.724,00	2.625.610.553,00	95,50	1.716.753.660,00
30	Badan Kepegawaian Daerah	501.955.000,00	495.938.476,00	98,80	323.776.000,00
31	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	630.035.667,00	616.152.600,00	97,80	452.776.000,00
32	Sekretariat DPRD	1.140.807.400,00	671.086.486,48	58,83	560.742.825,00
33	Sekretariat Daerah	5.036.075.524,00	4.171.023.964,00	82,82	4.361.176.375,00
34	Inspektorat	310.066.420,00	303.959.535,16	98,03	207.296.000,00
35	Badan Penghubung	161.342.788,00	154.092.000,00	95,51	274.258.000,00

No.	OPD	TA 2019			TA 2018
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	Jumlah	1.387.675.908.224,04	1.195.894.560.327,09	86,18	999.366.106.630,68
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	289.135.648,00	282.424.000,00	97,68	214.819.000,00

No.	OPD	TA 2019			TA 2018
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	Jumlah	1.387.675.908.224,04	1.195.894.560.327,09	86,18	999.366.106.630,68
XVIII	Belanja Jasa Konsultansi	19.163.205.732,00	14.005.803.627,24	73,09	6.688.713.537,00
1	Dinas Kesehatan	2.063.712.476,00	1.768.505.365,00	85,70	0,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.044.228.360,00	6.025.500.610,00	74,90	3.376.542.937,00
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	446.517.500,00	446.391.500,00	99,97	275.043.350,00
4	Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral	2.259.450.500,00	302.450.500,00	13,39	703.478.000,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	29.240.000,00	28.777.100,00	98,42	704.541.000,00
6	Dinas Perhubungan	2.388.928.000,00	2.313.709.000,00	96,85	297.518.000,00
7	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	355.608.296,00	225.465.000,00	63,40	0,00
8	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	195.000.000,00	187.990.000,00	96,41	0,00
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	375.000.000,00	114.345.000,00	30,49	20.707.500,00
10	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	23.320.000,00	23.035.000,00	98,78	26.500.000,00
11	Dinas Kebudayaan	226.000.000,00	224.297.600,00	99,25	68.620.000,00
12	Dinas Kelautan dan Perikanan	349.081.000,00	313.518.000,00	89,81	420.155.200,00
13	Dinas Pariwisata	16.000.000,00	15.500.000,00	96,88	24.825.000,00
14	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	617.306.360,00	585.830.360,00	94,90	39.600.000,00
15	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	10.725.000,00	10.168.675,00	94,81	8.000.000,00
16	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	550.000.000,00	548.350.000,00	99,70	70.000.000,00
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	102.000.000,00	89.067.919,00	87,32	243.367.000,00
18	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	135.000.000,00	133.174.500,00	98,65	112.714.500,00
19	Badan Pendapatan Daerah	33.000.000,00	29.700.000,00	90,00	0,00
20	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	0,00	20.000.000,00
21	Sekretariat DPRD	361.598.240,00	94.822.298,24	26,22	39.820.550,00
22	Sekretariat Daerah	461.000.000,00	409.850.000,00	88,90	237.280.500,00
23	Inspektorat	120.490.000,00	115.355.200,00	95,74	0,00
XIX	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	606.000.000,00	442.600.000,00	73,04	892.000.000,00
1	Badan Kepegawaian Daerah	506.000.000,00	344.600.000,00	68,10	892.000.000,00
2	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	100.000.000,00	98.000.000,00	98,00	0,00
XX	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	939.537.384,00	701.749.587,00	74,69	982.961.688,00
1	Dinas Kesehatan	110.000.000,00	36.946.000,00	33,59	40.000.000,00
2	Badan Pendapatan Daerah	149.884.500,00	89.420.976,00	59,66	422.095.545,00
3	Badan Kepegawaian Daerah	568.680.000,00	521.317.615,00	91,67	487.786.143,00
4	Inspektorat	110.972.884,00	54.064.996,00	48,72	33.080.000,00
XXI	Jumlah Belanja Barang dan Jasa Bos	310.418.745.604,00	272.553.545.056,44	87,80	246.872.052.641,95
1	Dinas Pendidikan	310.418.745.604,00	272.553.545.056,44	87,80	246.872.052.641,95
XXII	Belanja Barang dan Jasa BLUD	135.482.397.560,00	123.231.722.125,23	90,96	160.599.154.051,56
1	Dinas Kesehatan	107.797.872.960,00	97.481.308.713,93	90,43	128.565.034.324,56
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	27.684.524.600,00	25.750.413.411,30	93,01	32.034.119.727,00
XXIII	Belanja Pemeliharaan Kesehatan	632.400.000,00	89.171.165,00	14,10	103.425.690,00
1	Dinas Kesehatan	416.400.000,00	39.152.000,00	9,40	0,00
2	Sekretariat DPRD	121.000.000,00	37.463.865,00	30,96	70.461.230,00
3	Sekretariat Daerah	95.000.000,00	12.555.300,00	13,22	32.964.460,00
XXIV	Belanja Pendidikan bagi siswa miskin/yatim piatu	95.000.000,00	91.829.000,00	96,66	86.393.000,00
1	Dinas Sosial	95.000.000,00	91.829.000,00	96,66	86.393.000,00
XXVI	Belanja Jasa Audit	39.500.000,00	39.300.000,00	99,49	0,00
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	25.000.000,00	24.850.000,00	99,40	0,00
2	Dinas Kelautan dan Perikanan	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	0,00
3	Badan Pendapatan Daerah	7.500.000,00	7.450.000,00	99,33	0,00
XXVII	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	33.069.440.000,00	26.397.247.500,00	79,82	17.171.688.526,00
1	Dinas Pendidikan	678.405.000,00	430.930.000,00	63,52	1.059.645.000,00
2	Dinas Kesehatan	1.978.400.000,00	1.118.500.000,00	56,54	701.853.776,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	173.780.000,00	118.630.000,00	68,26	181.800.000,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	-
5	Satuan Polisi Pamong Praja	57.500.000,00	52.505.000,00	91,31	30.415.000,00
6	Dinas Sosial	95.600.000,00	91.350.000,00	95,55	149.595.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	137.700.000,00	119.250.000,00	86,60	55.275.000,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral	1.206.025.000,00	1.179.035.000,00	97,76	1.872.745.000,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	115.200.000,00	105.900.000,00	91,93	67.720.000,00
10	Dinas Ketahanan Pangan	22.500.000,00	22.500.000,00	100,00	-
11	Dinas Lingkungan Hidup	125.900.000,00	119.400.000,00	94,84	86.000.000,00
12	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana	140.250.000,00	131.000.000,00	93,40	76.250.000,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	194.400.000,00	171.725.000,00	88,34	37.110.000,00
14	Dinas Perhubungan	30.500.000,00	27.550.000,00	90,33	26.380.000,00
15	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	562.400.000,00	540.300.000,00	96,07	485.580.000,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	938.375.000,00	863.100.000,00	91,98	787.900.000,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00	2.000.000,00
18	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	410.575.000,00	405.020.000,00	98,65	563.435.000,00
19	Dinas Kebudayaan	1.649.500.000,00	1.201.450.000,00	72,84	1.153.375.000,00

No.	OPD	TA 2019			TA 2018
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	Jumlah	1.387.675.908.224,04	1.195.894.560.327,09	86,18	999.366.106.630,68
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	12.650.000,00	12.650.000,00	100,00	6.500.000,00
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	92.600.000,00	56.775.000,00	61,31	73.675.000,00
22	Dinas Pariwisata	57.400.000,00	55.492.500,00	96,68	89.325.000,00
23	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	101.260.000,00	72.700.000,00	71,80	110.450.000,00
24	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	41.270.000,00
25	Dinas Kehutanan	86.000.000,00	71.950.000,00	83,66	42.000.000,00
26	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	102.650.000,00	71.650.000,00	69,80	108.475.000,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	6.254.800.000,00	6.040.590.000,00	96,58	2.030.750.000,00
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	352.800.000,00	330.700.000,00	93,74	300.000.000,00
29	Badan Pendapatan Daerah	9.800.000,00	9.000.000,00	91,84	60.200.000,00
30	Badan Kepegawaian Daerah	144.300.000,00	128.025.000,00	88,72	147.415.000,00
31	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12.942.370.000,00	9.318.730.000,00	72,00	2.539.177.250,00
32	Sekretariat DPRD	510.000.000,00	75.000.000,00	14,71	1.726.500.000,00
33	Sekretariat Daerah	3.633.400.000,00	3.243.880.000,00	89,28	2.081.207.500,00
34	Inspektorat	67.000.000,00	51.810.000,00	77,33	369.530.000,00
35	Badan Penghubung	5.400.000,00	5.080.000,00	94,07	-
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	133.500.000,00	108.570.000,00	81,33	108.135.000,00
XXVIII	Belanja Sewa Tanah	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	0,00
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	0,00
XXIX	Jumlah Belanja Bahan Praktek Latihan	1.019.888.350,00	1.007.581.140,00	98,79	1.522.382.830,00
1	Dinas Pendidikan	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00
2	Dinas Sosial	128.450.600,00	127.347.400,00	99,14	29.757.680,00
3	Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral	855.200.000,00	848.495.990,00	99,22	1.356.438.900,00
4	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	71.541.000,00
5	Dinas Kebudayaan	2.369.000,00	2.369.000,00	100,00	10.859.500,00
6	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	0,00	0,00	0,00	1.247.500,00
7	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	24.868.750,00	24.868.750,00	100,00	36.088.250,00
8	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	0,00	1.950.000,00
9	Sekretariat Daerah	9.000.000,00	4.500.000,00	50,00	4.000.000,00
XXX	Jumlah Belanja Bahan Material Praktek/Praktikum	100.000.000,00	98.910.900,00	98,91	1.101.353.659,08
1	Dinas Pendidikan	100.000.000,00	98.910.900,00	98,91	404.997.600,00
2	Dinas Kesehatan	-	-	0,00	695.701.059,08
3	Dinas Sosial	-	-	0,00	655.000,00

No.	OPD	TA 2019			TA 2018
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	Jumlah	1.387.675.908.224,04	1.195.894.560.327,09	86,18	999.366.106.630,68
XXXI	Belanja Keperluan Rumah Tangga KDH/Wakil KDH	780.000.000,00	776.004.440,00	99,49	651.338.000,00
1	Sekretariat Daerah	780.000.000,00	776.004.440,00	99,49	651.338.000,00
XXXII	Belanja Pengadaan Barang dibawah kapitalisasi aset	724.078.900,00	543.730.969,00	75,09	44.233.190,00
1	Dinas Kesehatan	506.590.000,00	331.420.069,00	65,42	1.290.000,00
2	Dinas Sosial	48.950.000,00	47.911.700,00	97,88	0,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	26.370.000,00	25.989.000,00	98,56	13.523.990,00
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	250.000,00
5	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	31.964.900,00	30.934.200,00	96,78	21.161.200,00
6	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	22.500.000,00	22.300.000,00	99,11	0,00
7	Dinas Kehutanan	-	-	0,00	4.168.000,00
8	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	13.204.000,00	13.026.000,00	98,65	3.840.000,00
9	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	74.500.000,00	72.150.000,00	96,85	0,00
XXXIII	Belanja Jasa Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD dan Tenaga Ahli Fraksi	3.210.000.000,00	2.700.000.000,00	84,11	0,00
1	Sekretariat DPRD	3.210.000.000,00	2.700.000.000,00	84,11	0,00
XXXIV	Jumlah Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS	2.208.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1	Dinas Pendidikan	1.800.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	408.000.000,00	0,00	0,00	0,00
XXXV	Belanja Jasa Kesehatan	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1	Dinas Sosial	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00

**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
Pemerintah Provinsi Bali TA 2019**

No.	OPD	Anggaran						Realisasi					
		Tanah	Peralatan Mesin	Gedung Bangunan	Jalan, Irigasi Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Aset Lainnya	Tanah	Peralatan Mesin	Gedung Bangunan	Jalan, Irigasi Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Aset Lainnya
	Jumlah	194.088.758.420,00	273.084.350.972,05	146.070.457.678,91	132.625.316.115,00	14.602.639.954,00	-	63.506.862.123,00	236.359.501.621,14	128.335.018.713,06	117.877.559.353,84	10.675.560.548,00	-
1	Dinas Pendidikan	-	84.633.841.034,00	15.953.487.374,00	-	9.564.331.854,00	-	-	75.106.173.319,83	13.528.043.398,92	-	6.647.316.932,00	-
2	Dinas Kesehatan	-	138.530.893.758,05	89.315.120.497,91	144.939.200,00	3.596.480.000,00	-	-	114.272.046.253,31	85.401.794.854,06	45.500.000,00	2.858.734.235,00	-
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	194.088.758.420,00	7.547.004.021,00	21.120.099.845,00	129.374.668.915,00	-	-	63.506.862.123,00	7.337.422.700,00	15.826.989.875,00	114.987.957.336,00	-	-
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	133.800.000,00	-	148.500.000,00	75.000.000,00	-	-	124.728.000,00	-	148.200.000,00	74.217.000,00	-
5	Satuan Polisi Pamong Praja	-	457.000.000,00	-	-	-	-	-	410.020.780,00	-	-	-	-
6	Dinas Sosial	-	497.310.000,00	26.625.000,00	-	3.400.000,00	-	-	481.852.200,00	26.625.000,00	-	3.300.000,00	-
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	967.586.000,00	237.755.000,00	120.000.000,00	-	-	-	873.973.660,00	228.409.476,00	119.328.000,00	-	-
8	Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral	-	516.906.550,00	-	100.000.000,00	-	-	-	502.254.240,00	-	99.412.853,70	-	-
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	71.000.000,00	-	-	-	-	-	69.800.000,00	-	-	-	-
10	Dinas Ketahanan Pangan	-	566.185.684,00	-	-	-	-	-	527.431.750,00	-	-	-	-
11	Dinas Lingkungan Hidup	-	231.294.400,00	-	-	-	-	-	224.632.000,00	-	-	-	-
12	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana	-	256.555.081,00	-	-	15.544.800,00	-	-	253.962.860,00	-	-	15.339.200,00	-
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	198.800.000,00	85.000.000,00	-	64.000.000,00	-	-	194.887.100,00	84.000.518,00	-	63.777.500,00	-
14	Dinas Perhubungan	-	410.700.000,00	65.050.000,00	810.573.000,00	49.500.000,00	-	-	396.094.000,00	64.890.000,00	807.163.200,00	10.000.000,00	-
15	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	-	2.050.950.000,00	-	150.000.000,00	-	-	-	1.980.869.904,00	-	149.490.000,00	-	-
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	60.428.832,00	-	-	-	-	-	42.670.000,00	-	-	-	-
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	225.000.000,00	-	-	-	-	-	216.950.000,00	-	-	-	-
18	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-	227.709.600,00	-	-	-	-	-	223.331.600,00	-	-	-	-
19	Dinas Kebudayaan	-	3.807.883.616,00	250.000.000,00	25.105.000,00	77.000.000,00	-	-	3.473.242.230,00	157.687.000,00	21.500.000,00	67.000.000,00	-
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	17.000.000,00	-	55.000.000,00	-	-	-	17.000.000,00	-	53.173.650,00	-	-
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	471.280.000,00	449.192.000,00	-	154.980.000,00	-	-	250.600.000,00	-	-	-	-
22	Dinas Pariwisata	-	62.600.000,00	-	-	25.000.000,00	-	-	54.086.100,00	-	-	-	-
23	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	-	2.034.050.000,00	7.227.248.401,00	680.000.000,00	-	-	-	1.902.119.700,00	2.850.177.436,24	534.255.314,14	-	-
24	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	1.520.800.000,00	80.713.667,00	-	47.250.000,00	-	-	1.420.205.000,00	78.537.000,00	-	45.060.000,00	-
25	Dinas Kehutanan	-	65.000.000,00	-	-	-	-	-	55.677.500,00	-	-	-	-
26	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	-	-	-	-	100.000.000,00	-	-	-	-	-	99.000.000,00	-
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	-	487.500.000,00	-	-	60.000.000,00	-	-	451.959.900,00	-	-	58.080.000,00	-
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	1.098.040.000,00	-	165.000.000,00	100.000.000,00	-	-	1.060.310.500,00	-	161.000.000,00	91.000.000,00	-
29	Badan Pendapatan Daerah	-	5.195.958.976,00	1.468.660.822,00	566.530.000,00	-	-	-	4.830.607.530,00	1.418.181.500,00	466.681.000,00	-	-
30	Badan Kepegawaian Daerah	-	728.673.200,00	-	-	104.000.000,00	-	-	652.773.700,00	-	-	103.425.000,00	-
31	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	1.173.050.000,00	594.879.600,00	150.000.000,00	20.022.900,00	-	-	1.125.988.920,00	445.586.170,00	149.528.000,00	18.500.000,00	-
32	Sekretariat DPRD	-	1.485.408.800,00	805.425.877,00	-	2.880.400,00	-	-	1.365.457.950,00	805.425.876,97	-	2.880.400,00	-
33	Sekretariat Daerah	-	16.509.191.420,00	8.076.016.595,00	135.000.000,00	325.250.000,00	-	-	15.694.589.244,00	7.104.133.107,87	134.370.000,00	312.949.300,00	-
34	Inspektorat	-	766.450.000,00	-	-	198.000.000,00	-	-	690.707.980,00	-	-	185.108.000,00	-
35	Badan Penghubung	-	78.500.000,00	216.183.000,00	-	20.000.000,00	-	-	75.075.000,00	216.113.500,00	-	19.872.981,00	-
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	99.000.000,00	-	-	-	-	-	98.424.000,00	-	-	-

**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tanah
Pemerintah Provinsi Bali TA 2019**

No.	OPD	TA 2019			TA 2018
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	Jumlah	194.088.758.420,00	63.506.862.123,00	32,72	14.849.390.500,00
I	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	194.088.758.420,00	63.506.862.123,00	32,72	14.849.390.500,00
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	194.088.758.420,00	63.506.862.123,00	32,72	14.849.390.500,00

**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Peralatan dan Mesin
Pemerintah Provinsi Bali TA 2019**

No.	OPD	TA 2019			TA 2018
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	Jumlah	273.084.350.972,05	236.359.501.621,14	86,55	179.946.735.698,34
I	Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	4.231.200.000,00	4.202.534.000,00	99,32	3.310.006.986,00
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.171.200.000,00	4.152.572.000,00	99,55	3.310.006.986,00
2	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	60.000.000,00	49.962.000,00	83,27	0,00
II	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu	1.262.260.000,00	1.210.265.556,00	95,88	343.954.000,00
1	Dinas Kesehatan	500.000.000,00	467.800.556,00	93,56	34.500.000,00
2	Dinas Sosial	7.760.000,00	6.950.000,00	89,56	0,00
	Dinas Lingkungan Hidup	200.000.000,00	194.080.000,00	97,04	0,00
3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
4	Dinas Kebudayaan	88.500.000,00	81.845.000,00	92,48	8.074.000,00
	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	74.000.000,00	70.600.000,00	95,41	
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	0,00	0,00	0,00	15.950.000,00
6	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	6.000.000,00	5.995.000,00	99,92	6.850.000,00
7	Badan Pendapatan Daerah	386.000.000,00	382.995.000,00	99,22	195.580.000,00
8	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00
9	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	19.800.000,00
III	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	7.487.498.040,00	7.208.304.100,00	96,27	4.717.519.000,00
1	Dinas Kesehatan	725.476.000,00	679.476.000,00	93,66	0,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	387.052.000,00
	Satuan Polisi Pamong Praja	77.000.000,00	63.112.000,00	81,96	0,00
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	76.000.000,00	75.220.000,00	98,97	0,00
3	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	22.350.000,00
	Dinas Kelautan dan Perikanan	99.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	335.340.000,00	302.000.000,00	90,06	0,00
5	Badan Pendapatan Daerah	1.197.500.000,00	1.114.296.100,00	93,05	459.207.000,00
6	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	1.077.210.000,00
7	Sekretariat Daerah	4.977.182.040,00	4.974.200.000,00	99,94	2.771.700.000,00
IV	Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	248.000.000,00	225.879.100,00	91,08	637.331.797,00
1	Dinas Kesehatan	144.600.000,00	136.655.700,00	94,51	0,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	72.900.000,00	71.500.000,00	98,08	151.712.000,00
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	30.500.000,00	17.723.400,00	58,11	0,00
3	Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral	0,00	0,00	0,00	454.619.797,00
4	Dinas Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00
6	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
V	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur	305.830.000,00	219.887.218,96	71,90	25.273.000,00
1	Dinas Kesehatan	278.000.000,00	212.623.818,96	76,48	3.400.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	20.988.000,00
3	Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00
4	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	885.000,00

No.	OPD	TA 2019			TA 2018
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	Dinas Kelautan dan Perikanan	20.480.000,00	0,00	0,00	0,00
	Inspektorat	1.350.000,00	1.263.400,00	93,59	0,00
VI	Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan	314.910.000,00	278.787.200,00	88,53	0,00
1	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	314.910.000,00	278.787.200,00	88,53	0,00
VII	Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	190.000.000,00	175.163.450,00	92,19	0,00
1	Dinas Kebudayaan	190.000.000,00	175.163.450,00	92,19	0,00
VIII	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	1.012.707.800,00	920.691.735,00	90,91	577.958.275,00
1	Dinas Pendidikan	21.000.000,00	15.500.000,00	73,81	0,00
2	Dinas Kesehatan	397.784.600,00	368.484.835,00	92,63	29.829.000,00
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5.000.000,00	4.843.000,00	96,86	18.849.000,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.500.000,00	3.300.000,00	44,00	
5	Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral	0,00	0,00	0,00	59.251.200,00
6	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana	29.400.000,00	27.844.200,00	94,71	0,00
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	7.900.100,00
8	Dinas Kebudayaan	24.000.000,00	22.000.000,00	91,67	2.981.000,00
9	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00	0,00
10	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.500.000,00	1.485.000,00	99,00	0,00
11	Dinas Pariwisata	14.600.000,00	10.600.000,00	72,60	0,00
12	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	0,00	0,00	0,00	7.472.000,00
13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	21.890.000,00
14	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	39.233.175,00
15	Badan Pendapatan Daerah	306.500.000,00	274.292.000,00	89,49	151.169.000,00
16	Badan Kepegawaian Daerah	43.223.200,00	40.000.000,00	92,54	0,00
17	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.200.000,00	8.101.600,00	88,06	107.577.100,00
18	Sekretariat DPRD	22.000.000,00	21.750.000,00	98,86	131.806.700,00
19	Sekretariat Daerah	98.000.000,00	89.491.100,00	91,32	0,00
IX	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	11.728.977.631,00	10.343.194.052,64	88,18	5.249.394.077,00
1	Dinas Pendidikan	184.600.000,00	162.611.165,00	88,09	122.177.600,00
2	Dinas Kesehatan	4.589.985.000,00	3.756.099.617,64	81,83	95.447.500,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	73.900.000,00	73.735.000,00	99,78	195.516.500,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	51.355.000,00	42.990.000,00	83,71	105.980.000,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	40.000.000,00	36.300.000,00	90,75	0,00
6	Dinas Sosial	95.000.000,00	94.245.000,00	99,21	0,00
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	166.411.000,00	126.645.000,00	76,10	156.859.100,00
7	Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral	137.578.750,00	136.284.280,00	99,06	298.075.000,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12.500.000,00	12.500.000,00	100,00	12.150.000,00
9	Dinas Ketahanan Pangan	36.574.184,00	32.820.000,00	89,74	0,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	31.294.400,00	30.552.000,00	97,63	0,00
11	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana	57.949.881,00	57.633.060,00	99,45	93.282.600,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10.000.000,00	9.780.000,00	97,80	0,00
13	Dinas Perhubungan	49.875.000,00	47.690.000,00	95,62	74.460.000,00
14	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,00	0,00	0,00	16.340.000,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	54.460.000,00	53.100.000,00	97,50	41.750.000,00
17	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	49.381.100,00
18	Dinas Kebudayaan	1.001.388.616,00	955.417.150,00	95,41	297.155.000,00
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	250.500.000,00	249.115.000,00	99,45	0,00
22	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	161.100.000,00	144.080.000,00	89,44	167.625.000,00

No.	OPD	TA 2019			TA 2018
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
23	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	5.800.000,00	5.780.000,00	99,66	4.500.000,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	109.500.000,00	107.624.000,00	98,29	40.755.000,00
26	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	133.900.000,00	130.354.200,00	97,35	348.869.300,00
27	Badan Pendapatan Daerah	754.916.000,00	698.621.430,00	92,54	574.754.650,00
28	Badan Kepegawaian Daerah	146.749.800,00	131.239.000,00	89,43	31.350.000,00
29	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	326.900.000,00	311.275.000,00	95,22	436.725.000,00
30	Sekretariat DPRD	353.440.000,00	293.663.750,00	83,09	67.960.000,00
31	Sekretariat Daerah	2.770.100.000,00	2.525.881.600,00	91,18	1.978.430.720,00
32	Inspektorat	87.200.000,00	81.157.800,00	93,07	39.850.007,00
33	Badan Penghubung	31.000.000,00	31.000.000,00	100,00	0,00

No.	OPD	TA 2019			TA 2018
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
X	Belanja modal Pengadaan Komputer	17.780.226.356,00	16.559.684.014,00	93,14	7.255.203.175,00
1	Dinas Pendidikan	417.400.000,00	391.287.800,00	93,74	530.346.560,00
2	Dinas Kesehatan	5.285.883.548,00	4.829.907.570,00	91,37	61.199.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15.000.000,00	14.800.000,00	98,67	241.660.160,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	10.347.500,00	10.347.500,00	100,00	258.959.000,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	90.000.000,00	83.246.780,00	92,50	0,00
6	Dinas Sosial	173.800.000,00	161.492.200,00	92,92	87.338.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	281.475.000,00	265.381.020,00	94,28	123.819.200,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral	171.907.800,00	163.065.900,00	94,86	210.142.720,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	58.500.000,00	57.300.000,00	97,95	13.226.000,00
10	Dinas Ketahanan Pangan	137.110.500,00	137.110.500,00	100,00	22.958.200,00
11	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana	42.300.000,00	42.052.600,00	99,42	51.004.200,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	145.800.000,00	142.220.100,00	97,54	9.250.200,00
13	Dinas Perhubungan	281.000.000,00	276.380.000,00	98,36	167.370.000,00
14	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1.770.950.000,00	1.708.981.200,00	96,50	412.456.840,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	60.428.832,00	42.670.000,00	70,61	38.606.000,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	50.040.000,00	46.100.000,00	92,13	241.786.620,00
17	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	6.000.000,00	5.362.000,00	89,37	33.211.200,00
18	Dinas Kebudayaan	560.884.500,00	525.385.080,00	93,67	232.473.600,00
19	Dinas Kelautan dan Perikanan	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00
20	Dinas Pariwisata	48.000.000,00	43.486.100,00	90,60	0,00
21	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	368.250.000,00	349.250.000,00	94,84	35.245.000,00
22	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	0,00	0,00	0,00	36.540.040,00
23	Dinas Kehutanan	50.000.000,00	40.878.500,00	81,76	0,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	338.500.000,00	308.024.900,00	91,00	326.213.700,00
25	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	286.300.000,00	282.649.800,00	98,73	816.191.200,00
26	Badan Pendapatan Daerah	1.323.683.996,00	1.262.182.000,00	95,35	854.441.005,00
27	Badan Kepegawaian Daerah	268.159.800,00	261.707.500,00	97,59	118.170.800,00
28	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	435.000.000,00	408.700.020,00	93,95	78.500.000,00
29	Sekretariat DPRD	72.200.000,00	69.214.000,00	95,86	476.942.930,00
30	Sekretariat Daerah	4.467.804.880,00	4.125.937.764,00	92,35	1.364.212.900,00
31	Inspektorat	501.500.000,00	487.561.180,00	97,22	412.938.100,00
32	Badan Penghubung	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00	0,00
XI	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	13.800.260.200,00	8.587.567.659,00	62,23	4.266.461.242,00
1	Dinas Pendidikan	314.700.000,00	306.429.815,00	97,37	65.840.000,00
2	Dinas Kesehatan	6.196.050.000,00	1.510.674.044,00	24,38	150.446.284,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	155.000.000,00	153.350.000,00	98,94	0,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	17.810.000,00	17.760.000,00	99,72	229.975.000,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	180.000.000,00	167.900.000,00	93,28	0,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	129.500.000,00	128.425.000,00	99,17	62.465.000,00
7	Dinas Sosial	45.400.000,00	35.149.750,00	77,42	149.400.000,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral	185.370.000,00	182.085.000,00	98,23	371.257.000,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	600.000,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	301.725.000,00	275.463.250,00	91,30	0,00
11	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana	126.905.200,00	126.433.000,00	99,63	53.157.500,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	33.000.000,00	32.990.000,00	99,97	4.600.000,00
13	Dinas Perhubungan	7.200.000,00	7.172.000,00	99,61	19.900.000,00
14	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	50.000.000,00	49.440.000,00	98,88	0,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	70.000.000,00	69.250.000,00	98,93	0,00

No.	OPD	TA 2019			TA 2018
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
17	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	109.800.000,00	107.760.000,00	98,14	149.790.000,00
18	Dinas Kebudayaan	677.860.000,00	526.533.000,00	77,68	6.000.000,00
19	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	446.450.000,00	439.314.500,00	98,40	187.930.000,00
20	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	55.000.000,00	50.050.000,00	91,00	0,00
21	Dinas Kehutanan	0,00	0,00	0,00	75.165.000,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	17.500.000,00	14.311.000,00	81,78	0,00
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	435.140.000,00	411.423.000,00	94,55	421.010.500,00
24	Badan Pendapatan Daerah	600.000.000,00	575.939.000,00	95,99	592.028.000,00
25	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	35.000.000,00	34.400.000,00	98,29	21.350.000,00
26	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	107.950.000,00	105.125.000,00	97,38	0,00
27	Sekretariat Daerah	3.316.000.000,00	3.128.402.500,00	94,34	1.602.145.000,00
28	Inspektorat	156.400.000,00	104.712.800,00	66,95	95.601.958,00
29	Badan Penghubung	30.500.000,00	27.075.000,00	88,77	0,00
XII	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	5.321.139.801,00	4.963.370.184,00	93,28	3.091.266.900,00
1	Dinas Pendidikan	182.400.000,00	149.105.000,00	81,75	16.237.000,00
2	Dinas Kesehatan	554.350.000,00	544.116.600,00	98,15	36.718.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	118.974.021,00	116.900.000,00	98,26	0,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	49.287.500,00	48.787.500,00	98,99	46.005.000,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	49.000.000,00	42.660.000,00	87,06	0,00
6	Dinas Sosial	45.000.000,00	44.850.000,00	99,67	29.550.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	134.300.000,00	127.934.490,00	95,26	59.227.300,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral	16.050.000,00	14.819.060,00	92,33	299.321.000,00
9	Dinas Ketahanan Pangan	90.776.000,00	82.038.000,00	90,37	0,00
10	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10.000.000,00	9.897.000,00	98,97	23.000.000,00
12	Dinas Perhubungan	28.625.000,00	26.902.000,00	93,98	21.360.000,00
13	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	230.000.000,00	222.448.704,00	96,72	181.748.600,00
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	50.500.000,00	48.500.000,00	96,04	0,00
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	106.909.600,00	105.209.600,00	98,41	41.580.000,00
16	Dinas Kebudayaan	638.900.000,00	618.764.750,00	96,85	685.395.500,00
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	21.800.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	111.000.000,00	108.549.000,00	97,79	233.852.500,00
19	Dinas Kehutanan	15.000.000,00	14.799.000,00	98,66	0,00
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	0,00	0,00	0,00	166.728.900,00
21	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	236.700.000,00	229.888.500,00	97,12	0,00
22	Badan Pendapatan Daerah	589.358.980,00	496.673.000,00	84,27	86.375.000,00
23	Badan Kepegawaian Daerah	235.540.400,00	185.427.200,00	78,72	0,00
24	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	69.000.000,00	68.637.300,00	99,47	0,00
25	Sekretariat DPRD	964.563.800,00	912.197.200,00	94,57	0,00
26	Sekretariat Daerah	761.104.500,00	734.476.280,00	96,50	1.163.168.100,00
27	Inspektorat	12.000.000,00	9.790.000,00	81,58	0,00
XIII	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	606.905.000,00	528.214.800,00	87,03	188.984.000,00
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	32.800.000,00	32.800.000,00	100,00	4.499.000,00
2	Satuan Polisi Pamong Praja	21.000.000,00	16.800.000,00	80,00	0,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	199.900.000,00	196.625.000,00	98,36	110.660.000,00
4	Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral	0,00	0,00	0,00	1.994.500,00
5	Dinas Perhubungan	44.000.000,00	37.950.000,00	86,25	0,00
6	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,00	0,00	0,00	5.346.000,00
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00

No.	OPD	TA 2019			TA 2018
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
8	Dinas Kebudayaan	22.000.000,00	20.000.000,00	90,91	24.400.000,00
9	Dinas Kelautan dan Perikanan	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	0,00	0,00	0,00	5.895.000,00
11	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	10.000.000,00	1.375.000,00	13,75	0,00
12	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00
13	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
14	Badan Pendapatan Daerah	38.000.000,00	25.609.000,00	67,39	14.839.500,00
15	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	14.750.000,00
16	Sekretariat DPRD	73.205.000,00	68.633.000,00	93,75	0,00
17	Sekretariat Daerah	119.000.000,00	116.200.000,00	97,65	0,00
18	Inspektorat	8.000.000,00	6.222.800,00	77,79	0,00

No.	OPD	TA 2019			TA 2018
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
XIV	Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar	247.500.000,00	231.650.000,00	93,60	66.890.000,00
1	Dinas Kesehatan	15.000.000,00	0,00	0,00	15.240.000,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	0,00
3	Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral	0,00	0,00	0,00	7.900.000,00
4	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	7.250.000,00
5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	36.500.000,00
6	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	225.000.000,00	224.150.000,00	99,62	0,00
XV	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran	71.526.510.610,05	63.209.108.322,71	88,37	1.435.432.169,00
1	Dinas Kesehatan	71.507.910.610,05	63.190.613.322,71	88,37	1.383.578.169,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18.600.000,00	18.495.000,00	99,44	18.920.000,00
3	Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral	0,00	0,00	0,00	32.934.000,00
XVI	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan	46.250.000,00	45.890.000,00	99,22	0,00
1	Dinas Sosial	46.250.000,00	45.890.000,00	99,22	0,00
XVII	Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	21.897.666.300,00	14.795.034.804,00	67,56	9.113.965.275,00
1	Dinas Pendidikan	3.507.010.000,00	3.464.998.589,00	98,80	7.347.701.355,00
2	Dinas Kesehatan	16.651.156.300,00	9.688.009.215,00	58,18	1.252.283.120,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	122.500.000,00	115.500.000,00	94,29	43.450.000,00
4	Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral	0,00	0,00	0,00	463.130.800,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	7.400.000,00
6	Dinas Kebudayaan	4.000.000,00	3.950.000,00	98,75	0,00
7	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	163.000.000,00	159.577.000,00	97,90	0,00
8	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.450.000.000,00	1.363.000.000,00	94,00	0,00
XVIII	Belanja modal Pengadaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	691.996.000,00	614.158.800,00	88,75	256.850.000,00
1	Dinas Pendidikan	91.996.000,00	70.310.000,00	76,43	0,00
2	Badan Penghubung	0,00	0,00	0,00	256.850.000,00
3	Dinas Kebudayaan	600.000.000,00	543.848.800,00	90,64	0,00
XIX	Belanja modal Pengadaan Peralatan Non Senjata Api	350.500,00	335.000,00	95,58	2.200.000,00
1	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
2	Dinas Kebudayaan	350.500,00	335.000,00	95,58	0,00
XX	Belanja Modal BLUD	6.332.007.700,00	5.716.746.142,00	90,28	91.890.391.967,54
1	Dinas Kesehatan	3.547.277.700,00	3.110.480.442,00	87,69	88.253.004.087,54
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.784.730.000,00	2.606.265.700,00	93,59	3.637.387.880,00
XXI	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	79.914.735.034,00	70.545.930.950,83	88,28	47.517.653.834,80
1	Dinas Pendidikan	79.914.735.034,00	70.545.930.950,83	88,28	47.517.653.834,80
XXII	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Tradisional	5.820.000,00	5.720.000,00	98,28	0,00
1	Dinas Kesehatan	5.820.000,00	5.720.000,00	98,28	0,00
XXIII	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Rumah Sakit	28.131.600.000,00	25.771.384.532,00	91,61	0,00
1	Dinas Kesehatan	28.131.600.000,00	25.771.384.532,00	91,61	0,00

**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Gedung dan Bangunan
Pemerintah Provinsi Bali TA 2019**

No.	OPD	TA 2019			TA 2018
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	Jumlah	146.070.457.678,91	128.335.018.713,06	87,86	35.289.346.105,54
I	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	145.385.142.678,91	127.654.629.713,06	87,80	34.062.191.105,54
1	Dinas Pendidikan	15.953.487.374,00	13.528.043.398,92	84,80	17.097.023.615,52
2	Dinas Kesehatan	89.315.120.497,91	85.401.794.854,06	95,62	562.535.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	21.120.099.845,00	15.826.989.875,00	74,94	5.990.896.425,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	47.685.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	237.755.000,00	228.409.476,00	96,07	15.825.000,00
6	Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral	0,00	0,00	0,00	459.041.548,26
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	85.000.000,00	84.000.518,00	98,82	19.998.000,00
8	Dinas Perhubungan	65.050.000,00	64.890.000,00	99,75	99.377.000,00
9	Dinas Kebudayaan	250.000.000,00	157.687.000,00	63,07	1.015.366.558,82
10	Dinas Kelautan dan Perikanan	449.192.000,00	0,00	0,00	0,00
11	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	6.872.248.401,00	2.497.016.436,24	36,33	112.508.000,00
12	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	80.713.667,00	78.537.000,00	97,30	0,00
13	Dinas Kehutanan	0,00	0,00	0,00	590.200.500,00
14	Badan Pendapatan Daerah	1.164.970.822,00	1.117.578.500,00	95,93	2.106.668.550,00
15	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	594.879.600,00	445.586.170,00	74,90	215.700.303,62
16	Sekretariat DPRD	805.425.877,00	805.425.876,97	100,00	0,00
17	Sekretariat Daerah	8.076.016.595,00	7.104.133.107,87	87,97	5.394.646.948,32
18	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	24.847.000,00
19	Badan Penghubung	216.183.000,00	216.113.500,00	99,97	309.871.656,00
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	99.000.000,00	98.424.000,00	99,42	0,00
II	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00	1.001.655.000,00
1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	1.001.655.000,00
III	Belanja modal Pengadaan Monumen/Bangunan Bersejarah	685.315.000,00	680.389.000,00	99,28	225.500.000,00
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	148.500.000,00
2	Dinas Sosial	26.625.000,00	26.625.000,00	100,00	0,00
3	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	355.000.000,00	353.161.000,00	99,48	77.000.000,00
4	Badan Pendapatan Daerah	303.690.000,00	300.603.000,00	98,98	0,00

**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jembatan
Pemerintah Provinsi Bali TA 2019**

No.	OPD	TA 2019			TA 2018
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	Jumlah	132.625.316.115,00	117.877.559.353,84	88,88	195.152.228.280,52
I	Belanja modal Pengadaan Jalan	89.255.205.690,00	89.012.920.745,00	99,73	154.545.395.274,22
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	87.768.802.690,00	87.651.102.245,00	99,87	153.601.187.500,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	120.000.000,00	119.328.000,00	99,44	0,00
3	Dinas Perhubungan	610.573.000,00	607.992.000,00	99,58	944.207.774,22
4	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	223.300.000,00	198.700.000,00	88,98	0,00
5	Badan Pendapatan Daerah	397.530.000,00	301.428.500,00	75,83	0,00
6	Sekretariat Daerah	135.000.000,00	134.370.000,00	99,53	0,00
II	Belanja modal Pengadaan Jembatan	0,00	0,00	0,00	194.821.500,00
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	194.821.500,00
III	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	7.427.554.000,00	5.972.285.314,14	80,41	17.908.259.000,00
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.090.854.000,00	5.636.730.000,00		17.908.259.000,00
2	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	336.700.000,00	335.555.314,14		0,00
IV	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	716.000.000,00	714.456.000,00	99,78	4.505.556.000,00
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	716.000.000,00	714.456.000,00		4.505.556.000,00
V	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor	800.000.000,00	800.000.000,00	100,00	2.192.254.006,30
1	Dinas Kesehatan	0,00	0,00		711.835.006,30
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	800.000.000,00	800.000.000,00		1.480.419.000,00
VI	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih	31.375.779.000,00	18.757.924.419,70	59,78	13.223.090.800,00
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	31.200.674.000,00	18.588.471.566,00		12.985.769.000,00
2	Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral	100.000.000,00	99.412.853,70		197.781.800,00
3	Dinas Kebudayaan	25.105.000,00	21.500.000,00		0,00
4	Badan Pendapatan Daerah	50.000.000,00	48.540.000,00		0,00
5	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00		39.540.000,00
VII	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor	148.500.000,00	148.200.000,00	99,80	0,00
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	148.500.000,00	148.200.000,00		0,00
VIII	Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	65.000.000,00	45.500.000,00	70,00	0,00
1	Dinas Kesehatan	65.000.000,00	45.500.000,00		0,00
IX	Belanja modal Pengadaan Jaringan Air Minum	1.798.338.225,00	1.597.197.525,00	88,82	2.347.753.000,00
1	Dinas Kesehatan	0,00	0,00		61.896.500,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.798.338.225,00	1.597.197.525,00		2.285.856.500,00
X	Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik	394.000.000,00	268.170.500,00	68,06	175.574.700,00
1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00		30.207.200,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00		19.000.000,00
3	Dinas Perhubungan	10.000.000,00	9.958.000,00		0,00
4	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	120.000.000,00	0,00		0,00

No.	OPD	TA 2019			TA 2018
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	165.000.000,00	161.000.000,00		24.470.000,00
6	Badan Pendapatan Daerah	99.000.000,00	97.212.500,00		93.197.500,00
7	Inspektorat	0,00	0,00		8.700.000,00
IX	Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon	644.939.200,00	560.904.850,00	86,97	59.524.000,00
1	Dinas Kesehatan	79.939.200,00	0,00		0,00
2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00		4.180.000,00
3	Dinas Perhubungan	190.000.000,00	189.213.200,00		0,00
4	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	150.000.000,00	149.490.000,00		0,00
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00		49.582.500,00
6	Dinas Kebudayaan	0,00	0,00		5.761.500,00
7	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	55.000.000,00	53.173.650,00		0,00
8	Badan Pendapatan Daerah	20.000.000,00	19.500.000,00		0,00
9	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	150.000.000,00	149.528.000,00		0,00

**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Pemerintah Provinsi Bali TA 2019**

No.	OPD	TA 2019			TA 2018
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	Jumlah	14.602.639.954,00	10.675.560.548,00	73,11	15.110.337.162,00
I	Belanja modal Pengadaan Buku	9.549.081.854,00	6.622.486.732,00	69,35	14.858.579.742,00
1	Dinas Pendidikan	9.534.331.854,00	6.617.756.932,00	69,41	14.846.137.342,00
2	Dinas Kebudayaan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	7.698.900,00
4	Sekretariat Daerah	4.750.000,00	4.729.800,00	99,57	4.743.500,00
II	Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	60.000.000,00	59.872.981,00	99,79	205.850.000,00
1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	26.500.000,00
2	Dinas Kebudayaan	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	0,00
3	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	31.400.000,00
4	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	147.950.000,00
5	Badan Penghubung	20.000.000,00	19.872.981,00	99,36	0,00
III	Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	386.783.300,00	215.714.635,00	55,77	13.907.420,00
1	Dinas Pendidikan	30.000.000,00	29.560.000,00	98,53	0,00
2	Dinas Kesehatan	135.000.000,00	122.874.235,00	91,02	11.027.420,00
3	Dinas Sosial	3.400.000,00	3.300.000,00	97,06	0,00
4	Dinas Kelautan dan Perikanan	154.980.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	20.022.900,00	18.500.000,00	92,39	0,00
6	Sekretariat DPRD	2.880.400,00	2.880.400,00	100,00	2.880.000,00
7	Sekretariat Daerah	40.500.000,00	38.600.000,00	95,31	0,00
IV	Belanja modal Pengadaan Hewan	47.250.000,00	45.060.000,00	95,37	32.000.000,00
1	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	47.250.000,00	45.060.000,00	95,37	32.000.000,00

No.	OPD	TA 2019			TA 2018
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
V	Belanja Modal Seluruh Aset Lainnya (Pengadaan Software)	4.559.524.800,00	3.732.426.200,00	81,86	0,00
1	Dinas Kesehatan	3.461.480.000,00	2.735.860.000,00	79,04	0,00
2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	75.000.000,00	74.217.000,00	98,96	0,00
3	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana	15.544.800,00	15.339.200,00	98,68	0,00
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	64.000.000,00	63.777.500,00	99,65	0,00
5	Dinas Perhubungan	49.500.000,00	10.000.000,00	20,20	0,00
6	Dinas Kebudayaan	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00	0,00
7	Dinas Pariwisata	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	100.000.000,00	99.000.000,00	99,00	0,00
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	60.000.000,00	58.080.000,00	96,80	0,00
10	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	100.000.000,00	91.000.000,00	91,00	0,00
11	Badan Kepegawaian Daerah	104.000.000,00	103.425.000,00	99,45	0,00
12	Sekretariat Daerah	280.000.000,00	269.619.500,00	96,29	0,00
13	Inspektorat	198.000.000,00	185.108.000,00	93,49	0,00

**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya
Pemerintah Provinsi Bali TA 2019**

No.	OPD	TA 2019			TA 2018
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	362.124.600,00
1	Dinas Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	187.924.000,00
4	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	41.800.000,00
5	Dinas Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	0,00	0,00	0,00	24.777.500,00
7	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	51.056.600,00
8	Badan Kepegawaian Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	44.566.500,00
11	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00

**Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2019**

NO	Nama OPD	Utang Belanja Pegawai	Utang Belanja Barang Jasa
	Jumlah	25.175.197.297,53	16.410.451.638,10
1	Dinas Pendidikan	34.310.672,00	974.178.484,53
2	Dinas Kesehatan	442.692.025,00	12.928.554.563,57
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.892.538.525,00	1.481.880.954,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	5.815.926,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	6.215.000,00	9.852.769,00
6	Dinas Sosial	-	27.661.152,00
7	Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral	-	45.616.063,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	9.513.737,00
9	Dinas Ketahanan Pangan	-	10.479.901,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	-	2.041.541,00
11	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana	-	5.358.660,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	12.425.341,00
13	Dinas Perhubungan	-	26.733.853,00
14	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	920.000,00	21.010.214,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	14.538.239,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18.128.247,00	8.891.759,00
17	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-	60.767,00
18	Dinas Kebudayaan	-	110.614.447,00
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	10.777.617,00
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	70.000,00
21	Dinas Pariwisata	6.000.000,00	12.006.496,00
22	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	-	-
23	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	503.880,00	15.209.908,00
24	Dinas Kehutanan	2.327.679,00	11.578.749,00
25	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	-	11.562.483,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1.130.000,00	23.121.643,00
27	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	27.981.699,00
28	Badan Pendapatan Daerah	22.300.533.982,53	204.246.082,00
29	Badan Kepegawaian Daerah	-	18.165.948,00
30	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	43.801.200,00
31	Sekretariat DPRD	-	65.103.496,00
32	Sekretariat Daerah	3.256.000,00	188.856.016,00
33	Inspektorat	466.641.287,00	27.063.954,00
34	Badan Penghubung	-	13.871.349,00
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	7.955.282,00
36	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	33.851.345,00

**Rincian Piutang dan Penyisihan Piutang
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2019**

No	Uraian	Piutang					Penyisihan					Piutang Bersih
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah	
	Jumlah	66.703.877.449,08	24.056.182.436,00	6.430.791.940,00	56.182.766.518,02	98.088.383.167,94	333.519.387,25	2.405.618.243,60	5.171.704.300,00	56.182.766.518,02	34.690.843.968,72	63.397.539.199,22
A	Piutang Pajak Daerah	36.982.660.183,00	4.794.000,00	244.657.000,00	63.489.800,00	37.295.600.983,00	184.913.300,92	479.400,00	122.328.500,00	63.489.800,00	371.211.000,92	36.924.389.982,09
1	PKB	550.613.400,00	4.794.000,00	108.386.500,00	35.709.800,00	699.503.700,00	2.753.067,00	479.400,00	54.193.250,00	35.709.800,00	93.135.517,00	606.368.183,00
2	BBNKB	956.922.000,00	0,00	136.270.500,00	27.780.000,00	1.120.972.500,00	4.784.610,00	0,00	68.135.250,00	27.780.000,00	100.699.860,00	1.020.272.640,00
3	PBBKB	35.151.126.613,00	0,00	0,00	0,00	35.151.126.613,00	175.755.633,07	0,00	0,00	0,00	175.755.633,07	34.975.370.979,94
4	PP AP	323.998.170,00	0,00	0,00	0,00	323.998.170,00	1.619.990,85	0,00	0,00	0,00	1.619.990,85	322.378.179,15
5	P. Rokok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Piutang Retribusi Daerah	17.743.000,00	57.578.000,00	46.193.000,00	7.525.000,00	129.039.000,00	88.715,00	5.757.800,00	23.096.500,00	7.525.000,00	36.468.015,00	92.570.985,00
1	Ret. Pelayanan Kesehatan	9.268.000,00	43.478.000,00	3.743.000,00	0,00	56.489.000,00	46.340,00	4.347.800,00	1.871.500,00	0,00	6.265.640,00	50.223.360,00
2	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	8.475.000,00	14.100.000,00	42.450.000,00	0,00	65.025.000,00	42.375,00	1.410.000,00	21.225.000,00	0,00	22.677.375,00	42.347.625,00
3	Retribusi Izin Perikanan	0,00	0,00	0,00	7.525.000,00	7.525.000,00	0,00	0,00	0,00	7.525.000,00	7.525.000,00	0,00
C	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan	0,03	0,00	0,00	951.680.759,70	951.680.759,73	0,00	0,00	0,00	951.680.759,70	951.680.759,70	0,03
1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	0,00	0,00	0,00	951.680.759,70	951.680.759,70	0,00	0,00	0,00	951.680.759,70	951.680.759,70	0,00
	- PT. BPD Bali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- PT. Jamkrida Bali Mandara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Perusahaan Daerah Prov. Bali	0,00	0,00	0	951.680.759,70	951.680.759,70	0,00	0,00	0	951.680.759,70	951.680.759,70	0,00
2	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
	- PT. Asuransi Bangun Askrida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- PT. Rumkit. Puri Raharja	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
D	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	29.295.823.676,00	23.993.810.436,00	2.227.325.280,00	55.160.070.958,32	55.391.795.175,16	146.479.118,38	2.399.381.043,60	1.113.662.640,00	55.160.070.958,32	29.416.829.280,15	25.974.965.895,01
1	Piutang Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah	470.699.040,00	299.520.000,00	306.812.488,00	25.446.869.676,41	26.523.901.204,41	2.353.495,20	29.952.000,00	153.406.244,00	25.446.869.676,41	25.632.581.415,61	891.319.788,80
	- Perjanjian Sewa	70.699.040,00	299.520.000,00	306.812.488,00	6.849.267.215,00	7.526.298.743,00	353.495,20	29.952.000,00	153.406.244,00	6.849.267.215,00	7.032.978.954,20	493.319.788,80
	- Kerjasama Pemanfaatan	400.000.000,00	0,00	0,00	18.597.602.461,41	18.997.602.461,41	2.000.000,00	0,00	0,00	18.597.602.461,41	18.599.602.461,41	398.000.000,00
2	Piutang dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (BPSDM)	92.960.000,00	0,00	0,00	0,00	92.960.000,00	464.800,00	0,00	0,00	0,00	464.800,00	92.495.200,00
3	Piutang BLUD	14.130.732.798,00	11.697.385.218,00	806.850.152,00	2.126.365.802,75	28.761.333.970,75	70.653.663,99	1.169.738.521,80	403.425.076,00	2.126.365.802,75	3.770.183.064,54	24.991.150.906,21
	- BLUD RS Mata Bali Mandara	6.889.449.600,00	4.260.722.400,00	0,00	0,00	11.150.172.000,00	34.447.248,00	426.072.240,00	0,00	0,00	460.519.488,00	10.689.652.512,00
	- BLUD RS Jiwa Prov. Bali	1.576.602.362,00	2.564.300.332,00	297.374.344,00	2.016.046.935,75	6.454.323.973,75	7.883.011,81	256.430.033,20	148.687.172,00	2.016.046.935,75	2.429.047.152,76	4.025.276.820,99
	- BLUD RS Bali Mandara	3.119.412.566,00	4.685.807.486,00	147.555.808,00	110.318.867,00	8.063.094.727,00	15.597.062,83	468.580.748,60	73.777.904,00	110.318.867,00	668.274.582,43	7.394.820.144,57
	- BLUD UPT PAL	151.235.000,00	186.555.000,00	361.920.000,00	0,00	699.710.000,00	756.175,00	18.655.500,00	180.960.000,00	0,00	200.371.675,00	499.338.325,00
	- BLUD UPT PAM	2.394.033.270,00	0,00	0,00	0,00	2.394.033.270,00	11.970.166,35	0,00	0,00	0,00	11.970.166,35	2.382.063.103,65
4	Bagian Lancar Penjualan Anguran	0,00	0,00	0,00	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	0,00	0,00	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00
E	Piutang Lainnya	407.650.590,05	0,00	3.912.616.660,00	0,00	4.320.267.250,05	2.038.252,95	0,00	3.912.616.660,00	0,00	3.914.654.912,95	405.612.337,10
1	Tuntutan Perbendaharaan	0,00	0,00	3.912.616.660,00	0,00	3.912.616.660,00	0,00	0,00	3.912.616.660,00	0,00	3.912.616.660,00	0,00
2	Piutang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	386.341.328,00	0,00	0,00	0,00	386.341.328,00	1.931.706,64	0,00	0,00	0,00	1.931.706,64	384.409.621,36
3	Piutang Jasa Giro BOS	21.309.262,05	0,00	0,00	0,00	21.309.262,05	106.546,31	0,00	0,00	0,00	106.546,31	21.202.715,74

**RINCIAN PERSEDIAAN BARANG
PEMERINTAH PROVINSI BALI
PER 31 DESEMBER 2019**

BAHAN PAKAI HABIS																
No	KODE SKPD	NAMA SKPD	ALAT TULIS KANTOR	ALAT LISTRIK	PERANGKO DAN BENDA POS	PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH	BAHAN BAKAR MINYAK/ GAS	ISI TABUNG PEMADAM KEBAKARAN	ISI TABUNG GAS	SESAJEN	VENDEL/PLAKAT	LINEN	JUMLAH	BAHAN BAKU BANGUNAN	BAHAN KIMIA	BAHAN ALAT KERJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Jumlah	6.666.494.202,94	788.727.370,82	171.214.017,03	3.206.361.051,38	7.496.332.811,80	19.140.600,00	15.604.800,00	200.000,00	235.315.000,00	814.236.876,00	19.413.626.729,97	276.488.850,00	9.006.608.734,86	555.343.691,44
1	1.01.01.	Dinas Pendidikan	3.704.230.899,46	177.989.470,24	61.515.000,30	1.147.337.132,78	302.177.228,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.393.249.721,34	0,00	4.274.855.697,86	0,00
2	1.02.01.	Dinas Kesehatan	976.422.726,48	432.465.360,18	24.235.000,00	1.821.381.488,60	2.057.053.070,00	5.308.100,00	15.604.800,00	0,00	0,00	814.236.876,00	6.146.707.421,26	0,00	3.471.563.592,00	277.536.005,40
3	1.03.01.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	12.194.010,00	2.847.000,00	2.127.000,00	0,00	354.239.696,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.407.706,26	276.488.850,00	1.114.291.755,00	23.073.908,00
4	1.04.01.	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	498.200,00	60.000,00	0,00	0,00	12.962.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.520.800,00	0,00	0,00	0,00
5	1.05.01.	Satuan Polisi Pamong Praja	412.000,00	0,00	348.000,00	0,00	29.561.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.321.300,00	0,00	0,00	0,00
6	1.06.01.	Dinas Sosial	16.238.500,00	6.438.000,00	843.836,73	905.800,00	446.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.431.136,73	0,00	0,00	0,00
7	1.07.01.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.095.200,00	2.098.750,00	21.792.000,00	0,00	516.418.800,00	4.053.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.458.250,00	0,00	0,00	0,00
8	2.01.01.	Dinas Tenaga Kerja Dan Energi Sumber Daya Mineral	15.058.802,00	8.242.700,00	216.000,00	11.868.800,00	683.313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718.699.302,00	0,00	17.138.000,00	0,00
9	2.02.01.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1.115.800,00	370.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.800,00	0,00	0,00	0,00
10	2.03.01.	Dinas Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2.05.01.	Dinas Lingkungan Hidup	12.753.500,00	2.820.000,00	1.605.000,00	0,00	66.733.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.911.650,00	0,00	794.200,00	0,00
12	2.06.01.	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil Dan Keluarga Berencana	1.451.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451.700,00	0,00	0,00	0,00
13	2.07.01.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	5.645.900,00	2.323.800,00	540.000,00	6.844.350,00	374.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.728.350,00	0,00	0,00	0,00
14	2.09.01.	Dinas Perhubungan	63.292.776,00	1.903.300,00	151.500,00	3.246.500,00	144.820.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.414.626,00	0,00	0,00	0,00
15	2.10.01.	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	2.449.600,00	0,00	1.905.000,00	0,00	2.652.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.006.600,00	0,00	0,00	0,00
16	2.11.01.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	2.025.170,00	220.500,00	534.000,00	136.000,00	837.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.752.920,00	0,00	0,00	0,00
17	2.12.01.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18.044.050,00	326.200,00	429.000,00	0,00	3.023.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.823.200,00	0,00	0,00	0,00
18	2.13.01.	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	0,00	960.000,00	7.425.000,00	0,00	5.508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.893.000,00	0,00	0,00	0,00
19	2.16.01.	Dinas Kebudayaan	21.728.800,00	53.521.525,00	729.000,00	0,00	121.904.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.884.175,00	0,00	51.940.000,00	5.267.000,00
20	2.17.01.	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	806.000,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998.000,00	0,00	0,00	170.000,00
21	3.01.01.	Dinas Kelautan Dan Perikanan	3.716.800,00	645.200,00	0,00	0,00	46.296.500,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	50.858.500,00	0,00	5.105.200,00	62.864.050,00
22	3.02.01.	Dinas Pariwisata	4.334.600,00	318.000,00	1.302.000,00	0,00	150.337.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.292.100,00	0,00	0,00	0,00
23	3.03.01.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	33.972.950,00	1.048.750,00	3.858.000,00	0,00	325.691.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.571.355,00	0,00	0,00	0,00
24	3.03.02.	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Ternak	918.000,00	90.000,00	3.150.000,00	586.500,00	58.101.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.845.750,00	0,00	54.767.840,00	92.417.478,04
25	3.04.01.	Dinas Kehutanan	0,00	0,00	0,00	0,00	68.674.200,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.674.200,98	0,00	0,00	0,00
26	3.07.01.	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	20.190.500,00	8.842.340,00	5.092.000,00	0,00	201.676.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.801.340,00	0,00	16.152.450,00	0,00
27	4.02.01.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	37.450.285,00	863.900,00	5.535.000,00	0,00	111.358.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.207.685,00	0,00	0,00	0,00
28	4.03.01.	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	195.105.500,00	0,00	5.145.680,00	1.730.500,00	55.195.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.177.530,00	0,00	0,00	0,00
29	4.04.01.	Badan Pendapatan Daerah	445.783.868,00	38.103.455,40	2.870.000,00	0,00	196.451.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.208.523,40	0,00	0,00	0,00
30	4.05.01.	Badan Kepegawaian Daerah	54.190.400,00	24.583.120,00	936.000,00	2.138.300,00	44.516.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.364.420,00	0,00	0,00	0,00
31	4.06.01.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.677.000,00	11.130.300,00	3.756.000,00	3.150.000,00	15.109.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.823.200,00	0,00	0,00	0,00
32	4.08.01.	Sekretariat DPRD	416.587.549,00	0,00	600.000,00	16.726.000,00	310.892.100,00	0,00	0,00	0,00	55.755.000,00	0,00	800.560.649,00	0,00	0,00	0,00
33	4.09.01.	Sekretariat Daerah	509.967.577,00	0,00	4.440.000,00	180.284.700,00	960.550.106,00	9.779.000,00	0,00	0,00	179.560.000,00	0,00	1.844.581.383,00	0,00	0,00	94.015.250,00
34	4.10.01.	Inspektorat	26.936.010,00	71.600,00	186.000,00	8.342.680,00	72.204.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.740.295,00	0,00	0,00	0,00
35	4.11.01.	Badan Penghubung	962.600,00	690.100,00	0,00	1.682.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.335.000,00	0,00	0,00	0,00
36	4.12.01.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	53.236.940,00	9.754.000,00	9.666.000,00	0,00	131.692.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.349.140,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	6.666.494.202,94	788.727.370,82	171.214.017,03	3.206.361.051,38	7.496.332.811,80	19.140.600,00	15.604.800,00	200.000,00	235.315.000,00	814.236.876,00	19.413.626.729,97	276.488.850,00	9.006.608.734,86	555.343.691,44

Lampiran 15

BAHAN MATERIAL																
No	KODE SKPD	NAMA SKPD	MATERIAL PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	BAHAN ALAT KESEHATAN HABIS PAKAI	REAGEN	OBAT GENERIK	OBAT HEWAN	BAHAN PAKAIAN	BAHAN OBAT-OBATAN	BAHAN MAKANAN	PERSEDIAAN OBAT-OBATAN	PAKAN TERNAK	JUMLAH	BARANG CETAKAN	PENGGANDAAN DAN PENJILIDAN	OLI DAN PELUMAS
1	2	3	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
		Jumlah	1.995.580.050,00	9.981.448.247,24	2.050.521.045,59	4.122.282,00	183.716.344,00	153.591.200,00	660.000,00	548.957.115,00	11.814.125.854,45	120.176.345,00	36.691.339.759,58	2.840.421.844,52	56.095.200,00	135.997.830,00
1	1.01.01.	Dinas Pendidikan	0,00	73.596.773,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.348.452.471,33	50.970.825,00	0,00	0,00
2	1.02.01.	Dinas Kesehatan	101.233.200,00	9.880.195.389,77	2.010.874.145,59	2.217.122,00	0,00	153.591.200,00	0,00	548.957.115,00	11.814.125.854,45	0,00	28.260.293.624,21	909.956.882,60	0,00	0,00
3	1.03.01.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.894.346.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	3.308.861.363,00	1.000.000,00	0,00	134.887.830,00
4	1.04.01.	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1.05.01.	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1.06.01.	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	1.905.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905.160,00	2.453.700,00	0,00	0,00
7	1.07.01.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	25.167.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.167.384,00	10.520.000,00	0,00	0,00
8	2.01.01.	Dinas Tenaga Kerja Dan Energi Sumber Daya Mineral	0,00	1.976.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.114.800,00	8.960.000,00	0,00	0,00
9	2.02.01.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246.300,00	0,00	0,00
10	2.03.01.	Dinas Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2.05.01.	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	511.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.100,00	271.000,00	4.235.000,00	0,00
12	2.06.01.	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil Dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	2.07.01.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190.000,00	0,00	0,00
14	2.09.01.	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.739.500,00	0,00	0,00
15	2.10.01.	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2.11.01.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.100,00	0,00	0,00
17	2.12.01.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318.300,00	0,00	0,00
18	2.13.01.	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.182.100,00	0,00	0,00
19	2.16.01.	Dinas Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.207.000,00	306.471.927,92	0,00	0,00
20	2.17.01.	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	497.100,00	0,00	0,00
21	3.01.01.	Dinas Kelautan Dan Perikanan	0,00	0,00	39.646.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.438.750,00	132.054.900,00	378.500,00	0,00	1.110.000,00
22	3.02.01.	Dinas Pariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782.100,00	51.860.200,00	0,00
23	3.03.01.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	3.03.02	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Ternak	0,00	0,00	0,00	0,00	183.716.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.737.595,00	426.639.257,04	57.176.140,00	0,00	0,00
25	3.04.01.	Dinas Kehutanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	3.07.01.	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.152.450,00	9.467.750,00	0,00	0,00
27	4.02.01.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.063.000,00	0,00	0,00
28	4.03.01.	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	4.04.01.	Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744.645.969,00	0,00	0,00
30	4.05.01.	Badan Kepegawaian Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.058.800,00	0,00	0,00
31	4.06.01.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	4.08.01.	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.334.000,00	0,00	0,00
33	4.09.01.	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.015.250,00	183.755.850,00	0,00	0,00
34	4.10.01.	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939.000,00	0,00	0,00
35	4.11.01.	Badan Penghubung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	4.12.01.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.778.000,00	0,00	0,00
		Jumlah	1.995.580.050,00	9.981.448.247,24	2.050.521.045,59	4.122.282,00	183.716.344,00	153.591.200,00	660.000,00	548.957.115,00	11.814.125.854,45	120.176.345,00	36.691.339.759,58	2.840.421.844,52	56.095.200,00	135.997.830,00

BARANG LAINNYA											
No	KODE SKPD	NAMA SKPD	HIBAH BARANG JALAN, IRRIGASI DAN JARINGAN	HIBAH BARANG GEDUNG DAN BANGUNAN	HIBAH BARANG ASET TETAP LAHANNYA	E-TOLL	HIBAH PERSEDIAAN (OBAT, VAKSIN, BAHAN KIMIA DAN ALKES)	BARANG DIBAWAH KAPITALISASI	MAKANAN DAN MINUMAN LOMBA, SELEKSI DAN KEGIATAN LAPANGAN	JUMLAH	TOTAL PERSEDIAAN
1	2	3	30	31	32	33	34	35	36		37
		Jumlah	8.014.951.000,00	44.836.580.000,00	239.873.040,00	7.506.879,00	9.173.014.652,64	11.967.500,00	60.961.520,00	65.377.369.466,16	121.482.335.955,71
1	1.01.01.	Dinas Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.961.520,00	111.932.345,00	9.853.634.537,67
2	1.02.01.	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	9.173.014.652,64	11.967.500,00	0,00	10.094.939.035,24	44.501.940.080,71
3	1.03.01.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	8.014.951.000,00	44.836.580.000,00	239.873.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.227.291.870,00	56.907.560.939,26
4	1.04.01.	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.520.800,00
5	1.05.01.	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.321.300,00
6	1.06.01.	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453.700,00	474.789.996,73
7	1.07.01.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.520.000,00	585.145.634,00
8	2.01.01.	Dinas Tenaga Kerja Dan Energi Sumber Daya Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.960.000,00	746.774.102,00
9	2.02.01.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246.300,00	2.822.100,00
10	2.03.01.	Dinas Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2.05.01.	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.506.000,00	89.723.750,00
12	2.06.01.	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil Dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451.700,00
13	2.07.01.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190.000,00	17.918.350,00
14	2.09.01.	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.739.500,00	225.154.126,00
15	2.10.01.	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.006.600,00
16	2.11.01.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.100,00	4.018.020,00
17	2.12.01.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318.300,00	25.141.500,00
18	2.13.01.	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.182.100,00	22.075.100,00
19	2.16.01.	Dinas Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.471.927,92	561.563.102,92
20	2.17.01.	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.100,00	1.665.100,00
21	3.01.01.	Dinas Kelautan Dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488.500,00	184.401.900,00
22	3.02.01.	Dinas Pariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.642.300,00	209.934.400,00
23	3.03.01.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.571.355,00
24	3.03.02.	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Ternak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.176.140,00	546.661.147,04
25	3.04.01.	Dinas Kehutanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.674.200,98
26	3.07.01.	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.467.750,00	261.421.540,00
27	4.02.01.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.063.000,00	191.270.685,00
28	4.03.01.	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.177.530,00
29	4.04.01.	Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744.645.969,00	1.427.854.492,40
30	4.05.01.	Badan Kepegawaian Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.058.800,00	152.423.220,00
31	4.06.01.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.823.200,00
32	4.08.01.	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.334.000,00	1.247.894.649,00
33	4.09.01.	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.755.850,00	2.122.352.483,00
34	4.10.01.	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939.000,00	109.679.295,00
35	4.11.01.	Badan Penghubung	0,00	0,00	0,00	7.506.879,00	0,00	0,00	0,00	7.506.879,00	10.841.879,00
36	4.12.01.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.778.000,00	218.127.140,00
		Jumlah	8.014.951.000,00	44.836.580.000,00	239.873.040,00	7.506.879,00	9.173.014.652,64	11.967.500,00	60.961.520,00	65.377.369.466,16	121.482.335.955,71

No	SKPD	Salah Pos Belanja Modal	Pengeluaran Hibah	Penghapusan	Mutasi Kurang Reklasifikasi		Koreksi Pencatatan Saldo Awal	Dibawah Kapitalisasi	Mutasi Antar OPD	Saldo Akhir
					Antar Aset Tetap Tahun Berjalan	Ke Aset Lainnya				
	Jumlah	-	2.485.693.000,00	-	-	18.672.619.350,00	26.935.297.500,00	-	28.425.649.125,00	4.166.232.536.186,23
1	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-	52.595.040.000,00
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	76.782.900.000,00
5	DINAS PERBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	-	-	-	-	-	-	6.223.789.000,00
6	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	-	-	-	-	-	-	-	2.286.375.000,00
7	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	-	-	-	-	-	-	-	1.346.976.051.158,00
8	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	16.022.800.000,00
9	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000,00
10	DINAS KESEHATAN	-	-	-	-	-	9.977.500.000,00	-	-	61.186.667.500,00
11	DINAS PENDIDIKAN	-	-	-	-	-	-	230.125,00	-	297.423.855.790,50
12	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.094.880.000,00
13	DINAS KEBUDAYAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	196.031.405.000,00
14	DINAS SOSIAL	-	-	-	-	-	84.260.000,00	-	5.947.260.000,00	24.168.507.500,00
15	DINAS TENAGA KERJA DAN ESDM	-	-	-	-	-	-	-	-	11.037.600.000,00
16	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	-	-	-	-	-	-	74.781.145.820,73
17	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	-	-	-	-	-	-	-	91.000.000,00	70.545.615.475,00
18	DINAS KEHUTANAN	-	-	-	-	-	-	-	91.455.000,00	5.959.888.650,00
19	DINAS KETAHANAN PANGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	-	-	-	-	-	-	-	-	4.349.156.250,00
21	DINAS KOPERASI DAN UKM	-	-	-	-	-	-	-	-	9.392.215.000,00
22	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	13.289.504.000,00
23	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	-	-	-	-	-	-	-	-	6.689.550.000,00
24	BADAN PENDAPATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	13.862.630.500,00
25	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	2.485.693.000,00	-	-	18.672.619.350,00	16.873.537.500,00	-	16.598.204.000,00	1.788.380.338.542,00
26	INSPEKTORAT	-	-	-	-	-	-	-	-	5.908.000.000,00
27	BAPPEDA LITBANG	-	-	-	-	-	-	-	-	10.561.600.000,00
28	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-	-	-	-	-	5.840.000.000,00
29	DINAS PARIWISATA	-	-	-	-	-	-	-	5.697.500.000,00	6.155.360.000,00
30	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000,00
31	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.779.200.000,00
32	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	5.735.000.000,00
33	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	-	-	-	-	-	-	28.601.814.000,00
34	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	7.239.680.000,00
35	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI	-	-	-	-	-	-	-	-	205.680.000,00
36	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	5.009.216.000,00
37	DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROV BALI	-	-	-	-	-	-	-	-	1.917.071.000,00

**Rincian Aset Tetap Tanah yang Disewakan Sebagian dari Keseluruhan Luasnya
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2019**

No.	Nomor Kode Barang	Nomor Register	Jenis Aset Tetap	Dok. Kepemilikan	Lokasi Aset Tetap	Luas (M2)	Luas Disewa (M2)	Penyewa
Jumlah						163.832,00	42.119,40	
1	1.1.11.8.1	0080	Tanah	shp 36	Jln.Ir.Juanda Denpasar Timur	7.750,00	7.550,00	Kerjasama Pengelolaan Parkir dg Kota Denpasar
2	1.1.13.2.6	0001	Tanah	shp 88	Jln.Tantular Denpasar Timur	3.725,00	3.265,00	kerjasama dg Kota Denpasar,A.A.Manik Sumarajaya,A.A.Gede Agung Barus,Purana
3	1.1.11.2.1	0003	Tanah	15 dan 25	Desa Tanjung Benoa/Kec.Kuta/ Badung Jln.Segara Windu 27 Tanjung Benoa	2.650,00	1.800,00	Sewa Desa Pekraman Tanjung Benoa
4	1.1.11.4.9	0002	Tanah	shp 24	Banjar Apuan Singapadu Sukawati Gianyar	15.422,00	11.622,00	Bali Zoo
5	1.1.11.5.3	1889	Tanah	shp 17	Jln. Tukad Citarum Denpasar	2.000,00	1.400,00	I Ketut Suwandi, S.Sos.I Dewa Gede Wibawa Putra
6	1.1.11.2.1	0004	Tanah	-	Desa Rendang Kec.Rendang Kab. Karangasem	35.350,00	2.400,00	Pemkab.Karangasem
7	1.1.11.5.3	1894	Tanah	SHP 35	Kelurahan Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan	7.103,00	923,72	PT. Wisnukarya Internasional
8	1.1.11.5.3	1851	Tanah	SHP 78	Jalan Raya Puputan Renon Desa Sumerta Kelod Denpasar Timur	449,00	348,00	Kadek Nuartana, Desak Amertani
9	1.1.11.5.2	0789	Tanah	SHP 3	Desa Beraban Kabupaten Tabanan	550,00	100,00	LPD Beraban
10	1.1.11.5.3	0687	Tanah	SHP 7	Desa Temesi Kabupaten Gianyar	2.350,00	100,00	Koperasi Krama Subak Lumbung Sari
11	1.1.11.5.3	1703	Tanah	SHP 10	Klungkung \Nusa Penida\Ds. Sakti	2.500,00	1.475,00	PT. Empora Dhanalaksmi
12	1.1.11.5.3	1478	Tanah	SHP 43	Klungkung \Klungkung\Ds. Akah	1.960,00	300,00	Badan Pengelola Air Minum Desa Akah
13	01.01.11.05.03	1867	Tanah	SHP 129	Denpasar \Denpasar Timur\Kel Dangin Puri Klod	909,00	467,00	ni ketut dewi ayu indah
14	01.01.11.05.03	1811	Tanah	SHP 19	Denpasar \Denpasar Barat\Ds. Padangsambian Klod	755,00	150,00	I Nengah Suartaman
15	1.1.11.5.3	1654	Tanah	SHP 20	Klungkung \Dawan\Ds. Sampalan Klod	1.947,00	947,00	Gede Putrawan
16	01.01.11.05.03	1789	Tanah	SHP 32	Klungkung\Nusa Penida\Ds. Ped	7.830,00	125,00	I Wayan Leser, Yenni Yonain, I Wayan Lugra
17	01.01.11.05.03	1599	Tanah	SHP 52	Klungkung\Dawan\Ds. Pesinggahan	375,00	102,00	Wayan Sudiansana
18	01.01.11.05.03	1603	Tanah	SHP 56	Klungkung\Dawan\Ds. Pesinggahan	897,00	400,00	I Gede Raka Adnyana
19	01.01.13.01.12	2	Tanah	SHP 11	Badung\Kuta Tengah\Kel Seminyak	1.200,00	1.000,00	Gede Ray Ardian Mancini Yasa
20	01.01.11.05.03	938	Tanah	SHP 2	Gianyar\Tampaksiring\Ds. Pejeng Kaja	10.830,00	250,00	PDAM Gianyar
21	01.01.11.05.03	1805	Tanah	12	Denpasar\Denpasar Barat\Ds. Padangsambian Klod	1.200,00	300,00	Ida Bagus Kompyang Gede
22	01.01.11.05.02	1715	Tanah	Persil Nomor 41	Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung	5.720,00	2.800,00	Made Arie Satryawan, I Gede Ray Ardian Mancini Yasa, Dewa Komang Indra
23	01.01.11.05.02	1716	Tanah	Persil 31	desa ped nusa penida	1.200,00	120,00	I Made Sukarta
24	01.01.11.05.02	1717	Tanah	DN 22	Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung	9.000,00	500,00	Rambias Sastra
25	01.01.11.01.01	0007	Tanah	SHP 91	Jalan Kapten Cok Agung Tresna Desa Sumerta Denpasar	6.970,00	169,68	PT. Bali Ekspres
26	01.01.11.04.01	0001	Tanah	SHP 92	Jalan Gurita IV Denpasar	5.448,00	600,00	I Gede Putu Agus Wistama Putra
27	01.01.11.05.02	1577	Tanah	SHP 73	Desa Gelgel Klungkung	340,00	280,00	I Nengah Madra
28	01.01.11.05.02	139	Tanah	SHP 24	Desa Mambal Kecamatan Abiansemal Badung	2220	300	Ida Bagus Pada Kesurma
29	01.01.11.01.06	2	Tanah	HPL 4	Desa Candikuning Kecamatan Baturiti Tabanan	23500	1500	PT. Nindya Karya
30	01.01.11.01.04	22	Tanah	SHP 3	Jl. Tukad Yeh Aya Denpasar	850	325	Made Sueta Satrya Gunaksa
31	01.01.11.05.02	433	Tanah	SHP 34	Desa Takmung Banjarangkan Klungkung	832	500	Komang Artisti Sekar Linuwih

**Rincian Aset Tetap Tanah yang Dipinjampakaikan Namun Belum Tercatat Dalam Kartu Inventaris Barang atas Tanah
Pemerintah Provinsi Bali TA 2019
Per 31 Desember 2019**

No.	Letak/Lokasi Tanah	Nomor Sertifikat / Pipil / Persil	Luas Tanah (m ²)	Luas yang Dipinjam Pakai (m ²)	Jumlah Bidang	Nomor Kode Barang	Nomor Register	Tahun Perolehan	Peruntukan
Karangasem									
1	Jln Ngurah Rai Amlapura		400,00	400,00	1	01.01.13.13.03			Pura Padmasana RSUD Karangasem
Klungkung									
1	Gelgel, Klungkung		2.400,00	2.400,00	1				Poskeswan
2	Subak Selisihan Kawan		0,00	0,00	1				Tanah Kuburan dan Tanah Lapang Desa Selisihan
3	Jl. Gajah Mada no 50 Semarapura		160,00	160,00	1				Kantor Ketahanan Pangan
4	Subak Tangkas/ Pengoncangan Klungkung	Pipil 194, Persil11	2.700,00	2.700,00	1	01.01.11.04.10			Pembangunan Banjar Tegal dan Balai Banjar Peken Desa Tangkas
Bangli									
1	Br.Pande, Kel. Cempaga		230,00	230,00	1				Kantor Dishubkominfo kab. Bangli
2	Jln. Brigjen Ngurah Rai no 87		360,00	360,00	1				Rumah Dinas RSUD Bangli
Badung									
1	Kel. Seminyak , Kec. Kuta	SHP 38	3.500,00	3.500,00	1	01.01.11.04.02	-		TK Kemuda Sari dan Gedung Serbaguna
Tabanan									
1	Batungsel	SHP 65	9.300,00	9.300,00	1				Tanah BP3K Pupuan
2	Ds Dauh Peken	SHP 33	15.000,00	15.000,00	1				Terminal/Stasiun Bus Pesiapan
3	Subak Ume Bhayam	Persil 56	361,50	361,50	1	04.13.01.04.02			Jalan Masuk Menuju Pura Beji Subak Ume Bhayam, Tabanan
Buleleng									
1	Jln. Ahmad Yani No 99 Singaraja	-	-	-	1	-	-		Gedung kantor pertanian
2	Ds. Panjianom, Kec. Sukasada	-	678,00	678,00	1	-	-		Kantor RPH
3	Ds. Panjianom, Kec. Sukasada	-	2.340,00	2.340,00	1	-	-		RPH SAPI
4	Ringdikit, Seririt	-	-	-	1	-	-		Bangunan Kantor Pemerintahan
5	Jln. Samudra, Banyuasri	-	-	-	1	-	-		Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Buleleng
Denpasar									
1	Jl. Piranha Kel Sesetan	-	182,00	182,00	1	01.01.11.04.10			Digunakan Untuk Pos kaming

**Rincian Permasalahan Hukum Terkait dengan Aset Tetap Tanah
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2019**

No	Nomor Perkara	Para Pihak		Objek Sengketa	Tahun	Upaya Hukum		Keterangan	Kuasa Hukum
		Penggugat	Tergugat						
1	92/Pdt.G/2016/PN.Dps	Ari Anjasromo	Gubernur Bali	Aset Tanah Pemerintah Provinsi Bali SHP. No.1 Kelurahan Lukluk – Tanah Kosong	2016	PN	Kalah		
	23/Pdt/2017/PT.Dps	PEMBANDING	TERBANDING		2017	Banding	Kalah		Pokbankum
		Termohon Kasasi	Pemohon Kasasi		2017	Kasasi	Menang		
2	15/Pdt.G/2018/PN.Bli	Banjar Adat/Pekraman Blumbang Bali	Kadis Pekerjaan Umum Provinsi Bali	SHP Nomor 54/Desa KAWan, Luas 860m2 atas Nama Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali yang diatasnya berdiri Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangli)	2018	PN	Menang		
		Pembanding	Terbanding III		2018	Banding	Kalah	Inkracht tahun 2018 (kewenangan mendadili)	Tim Biro Hukum
3	No. 238/Pdt.G/2018/PN.Dps	Gubernur Bali	PT. Abdi Persada Nusantara (APN)	Tanah HPL. NO. 2 Desa Kesiman Kertalangu	2018	PN	Gubernur Bali Kalah (N.O)	Inkracht tahun 2018	Pok Bankum
4	No. 239/Pdt.G/2018/PN.DPs	Gubernur Bali	I Nyoman Sondra Astawa	Tumpang Tindih SHP Nomor 4/ Desa Sidakarya, luas 3000 M2 di Desa Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan.	2018	PN	Gubernur Bali Kalah (N.O)	Inkracht tahun 2018	Pok Bankum
5	No. 806/Pdt/G/2018/PN.Dps	AA. Ngurah Alit Wiraputra	Gubernur Bali	Kesepakatan Saling Pengertian antara AA, Nourah Wira Putra dengan Sastro Lukito	2018	PN	Dalam Proses Sidang		Pok Bankum
6	No. 995/Pdt.G/2018/PN.Dps	Dinas tenaga Kerja dan ESDM Prov. Bali (Pelawan)	A.A. Gede Putra Jaya, SE (Terlawan)	Sertifikat Hak Pakai Nomor 47, Kecamatan Denpasar Timur, Desa Sumerta Kelod, Gambar Situasi Tanggal 25 Nopember 1996 Nomor 12106/1996 Luas 1.695 m2 atas nama Pemegang Hak Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia, Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan Perambah Hutan Provinsi Bali di Denpasar	2019	PN	Dalam Proses Sidang (Verzet)		Pok bankum

**Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan Mesin
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun Anggaran 2019**

No	SKPD	Saldo Awal	Mutasi Tambah							Mutasi Antar OPD	Salah Pos Belanja Modal
			Belanja Modal	Kapitaliasi Belanja Non Modal	Penerimaan Hibah	Reklasifikasi		Koreksi Pencatatan Saldo Awal			
						Antar Aset Tetap Tahun Berjalan	Dari Aset Lainnya				
	Jumlah	1.352.612.850.236,94	236.359.501.621,14	170.938.588,00	24.152.365.151,00	11.183.649.838,50	354.272.600,00	13.217.053.544,01	19.904.270.049,00	447.429.866,36	
1	Sekretariat DPRD	30.843.216.619,00	1.365.457.950,00	-	-	-	-	-	-	-	
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	7.564.618.217,80	-	-	-	-	-	-	134.184.000,00	-	
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	1.239.423.666,67	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Sekretariat Daerah	86.647.850.325,09	15.694.589.244,00	-	31.735.000,00	-	-	-	583.831.000,00	-	
5	DINAS PERMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.588.722.369,00	194.887.100,00	-	-	-	-	-	-	-	
6	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.441.916.130,00	69.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
7	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	60.888.450.439,38	7.337.422.700,00	-	4.651.606.402,00	4.955.721.000,00	-	237.704.000,00	280.700.000,00	-	
8	DINAS PERHUBUNGAN	19.627.917.506,00	396.094.000,00	-	-	189.213.200,00	-	244.897.000,00	42.000.000,00	-	
9	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	42.942.287.357,67	1.980.869.904,00	-	-	149.490.000,00	-	-	138.864.000,00	-	
10	DINAS KESEHATAN	451.892.198.581,50	114.272.046.253,31	8.460.000,00	257.764.100,00	4.831.250.942,50	-	4.642.100,00	608.800.000,00	218.687.500,00	
11	DINAS PENDIDIKAN	304.706.191.341,55	75.106.173.319,83	161.828.888,00	8.131.872.330,00	920.146.696,00	-	3.507.205.500,00	4.094.481.369,00	228.742.366,36	
12	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	4.361.213.181,00	223.331.600,00	-	133.890.000,00	-	-	-	340.700.000,00	-	
13	DINAS KEBUDAYAAN	42.965.480.758,22	3.473.242.230,00	-	60.000.000,00	-	-	-	280.700.000,00	-	
14	DINAS SOSIAL	6.154.632.016,40	481.852.200,00	-	4.670.300,00	-	-	-	208.000.000,00	-	
15	DINAS TENAGA KERJA DAN ESDM	17.394.969.708,67	502.254.240,00	-	-	-	354.272.600,00	3.230.869.960,00	280.700.000,00	-	
16	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	9.506.851.238,00	250.600.000,00	-	4.148.748.118,00	-	-	5.097.201.134,01	-	-	
17	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	17.754.278.654,00	1.902.119.700,00	-	1.069.742.400,00	-	-	307.908.750,00	-	-	
18	DINAS KEHUTANAN	12.704.333.469,02	55.677.500,00	-	371.670.000,00	-	-	-	33.700.000,00	-	
19	DINAS KETAHANAN PANGAN	2.826.108.158,00	527.431.750,00	-	-	-	-	-	328.100.000,00	-	
20	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	16.347.285.282,00	1.420.205.000,00	-	29.921.501,00	-	-	950.000,00	-	-	
21	DINAS KOPERASI DAN UKM	5.331.086.000,00	42.670.000,00	-	-	-	-	-	180.850.000,00	-	
22	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	5.771.608.738,00	-	-	87.225.000,00	-	-	401.875.100,00	-	-	
23	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	4.736.636.608,00	216.950.000,00	-	-	-	-	-	34.180.000,00	-	
24	BADAN PENDAPATAN	26.669.070.267,53	4.830.607.530,00	-	-	-	-	-	-	-	
25	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	15.357.629.009,90	1.060.310.500,00	-	-	-	-	-	183.800.000,00	-	
26	INSPEKTORAT	10.382.985.207,00	690.707.980,00	649.700,00	-	-	-	-	-	-	
27	BAPPEDA LITBANG	14.340.747.792,00	451.959.900,00	-	-	-	-	-	280.700.000,00	-	
28	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	7.710.029.740,00	224.632.000,00	-	-	-	-	-	9.422.329.680,00	-	
29	DINAS PARIWISATA	3.522.099.120,00	54.086.100,00	-	-	-	-	-	177.950.000,00	-	
30	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	12.756.132.374,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	8.592.757.768,00	410.020.780,00	-	-	-	-	183.800.000,00	472.600.000,00	-	
32	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	60.403.043.602,20	873.973.660,00	-	5.110.520.000,00	119.328.000,00	-	-	-	-	
33	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	11.127.878.516,66	1.125.988.920,00	-	5.200.000,00	18.500.000,00	-	-	432.000.000,00	-	
34	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	4.770.031.473,50	652.773.700,00	-	-	-	-	-	61.200.000,00	-	
35	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI	5.389.170.200,00	75.075.000,00	-	-	-	-	-	1.270.200.000,00	-	
36	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	7.301.819.231,18	17.000.000,00	-	57.800.000,00	-	-	-	-	-	
37	DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL KELUARGA BERENCANA	2.087.704.543,00	253.962.860,00	-	-	-	-	-	-	-	
38	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN	1.964.475.027,00	124.728.000,00	-	-	-	-	-	33.700.000,00	-	

Lampiran 20

Pengeluaran Hibah	Penghapusan	Mutasi Kurang					Saldo Akhir
		Reklasifikasi		Koreksi Pencatatan Saldo Awal	Dibawah Kapitalisasi	Mutasi Antar OPD	
		Antar Aset Tetap Tahun Berjalan	Ke Aset Lainnya				
516.010.000,00	-	3.969.780.943,90	25.588.699.358,64	1.772.705.913,00	4.863.473.312,00	19.904.270.049,00	1.600.892.532.185,69
-	-	-	325.674.314,00	-	-	17.160.000,00	31.865.840.255,00
-	-	-	143.295.000,00	-	-	-	7.555.507.217,80
-	-	-	87.765.000,00	-	-	-	1.151.658.666,67
-	-	25.536.000,00	11.207.378.351,00	-	148.442.200,00	5.430.198.000,00	86.146.451.018,09
-	-	-	77.671.500,00	-	3.000.000,00	-	4.702.937.969,00
-	-	-	-	-	-	-	3.511.716.130,00
-	-	49.295.000,00	100.370.000,00	-	434.500,00	9.492.333.680,00	68.709.171.361,38
-	-	-	4.694.956.000,00	244.897.000,00	-	34.180.000,00	15.526.088.706,00
-	-	327.485.600,00	-	-	-	594.282.780,00	44.289.742.881,67
-	-	718.499.412,24	2.044.745.502,28	-	737.142.853,00	-	568.156.086.709,79
-	-	1.751.232.131,47	969.766.345,50	236.348.913,00	3.298.541.504,00	3.687.848.589,00	386.455.419.595,05
-	-	-	108.177.250,00	-	-	-	4.950.957.531,00
-	-	939.817.800,19	2.063.223.827,00	-	75.080.000,00	-	43.701.301.361,03
-	-	-	-	-	6.950.000,00	-	6.842.204.516,40
-	-	-	-	-	136.584.280,00	-	21.626.482.228,67
-	-	-	75.391.000,00	-	12.131.875,00	-	18.915.877.615,01
-	-	14.390.000,00	-	-	126.937.000,00	-	20.892.722.504,00
-	-	-	545.255.925,00	-	-	-	12.620.125.044,02
-	-	-	-	-	37.345.000,00	-	3.644.294.908,00
-	-	-	133.190.000,00	-	-	-	17.665.171.783,00
-	-	-	-	-	-	-	5.554.606.000,00
-	-	-	-	37.400.000,00	-	-	6.223.308.838,00
-	-	-	-	-	37.750.000,00	-	4.950.016.608,00
-	-	-	610.511.900,00	-	207.419.750,00	-	30.681.746.147,53
-	-	99.500.000,00	929.593.331,00	584.160.000,00	5.995.000,00	1.500.000,00	14.980.991.178,90
-	-	-	483.408.200,00	-	819.600,00	-	10.590.115.087,00
-	-	-	-	-	-	6.300.000,00	15.067.107.692,00
-	-	-	-	-	-	-	17.356.991.420,00
-	-	-	-	-	-	190.837.000,00	3.563.298.220,00
-	-	-	253.001.775,00	669.900.000,00	-	-	11.833.230.599,00
-	-	-	119.004.000,00	-	-	-	9.540.174.548,00
-	-	-	-	-	2.499.750,00	-	66.504.365.512,20
-	-	44.025.000,00	-	-	26.400.000,00	-	12.639.142.436,66
-	-	-	397.939.901,50	-	-	150.100.000,00	4.935.965.272,00
516.010.000,00	-	-	-	-	-	299.530.000,00	5.918.905.200,00
-	-	-	218.380.236,56	-	-	-	7.158.238.994,82
-	-	-	-	-	-	-	2.341.667.403,00
-	-	-	-	-	-	-	2.122.903.027,00

**Rincian Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun Anggaran 2019**

No	SKPD	Saldo Awal	Mutasi Tambah						Koreksi Pencatatan Saldo Awal	Mutasi Antar OPD
			Belanja Modal	Kapitaliasi Belanja Non Modal	Penerimaan Hibah	Reklasifikasi				
						Antar Aset Tetap Tahun Berjalan	Dari Aset Lainnya			
	Jumlah	1.967.779.583.359,25	128.335.018.713,06	2.597.104.737,06	77.560.857.637,00	54.290.581.625,87	2.363.978.825,00	19.861.927.102,78	39.607.746.210,00	
1	Sekretariat DPRD	11.025.142.430,14	805.425.876,97	-	-	-	-	-	-	
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	15.637.699.198,32	-	-	-	-	161.730.000,00	-	5.680.174.584,00	
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	590.483.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
4	Sekretariat Daerah	31.120.155.512,00	7.104.133.107,87	-	-	3.052.036.500,00	-	-	-	
5	DINAS PERBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.058.645.000,00	84.000.518,00	-	-	-	-	-	-	
6	DINAS PERBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	997.212.600,00	-	-	-	-	-	-	-	
7	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	43.102.880.379,60	15.826.989.875,00	623.943.129,00	68.569.243.637,00	602.645.000,00	-	1.125.068.974,00	1.311.261.000,00	
8	DINAS PERHUBUNGAN	4.844.528.604,56	64.890.000,00	-	-	-	-	274.470.000,00	-	
9	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	2.760.676.021,04	-	-	-	-	-	-	-	
10	DINAS KESEHATAN	490.551.938.262,99	85.401.794.854,06	256.966.000,00	-	49.362.429.694,40	-	174.815.332,70	1.306.428.360,00	
11	DINAS PENDIDIKAN	940.336.558.220,53	13.528.043.398,92	32.696.000,00	4.108.003.000,00	962.777.431,47	549.323.118,00	11.841.781.689,08	27.602.157.869,00	
12	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	8.064.226.614,88	-	-	-	-	-	-	-	
13	DINAS KEBUDAYAAN	65.850.100.092,58	157.687.000,00	-	337.700.000,00	196.803.000,00	-	-	144.202.170,00	
14	DINAS SOSIAL	13.263.168.904,00	26.625.000,00	-	-	-	-	-	-	
15	DINAS TENAGA KERJA DAN ESDM	32.628.621.721,83	-	-	-	-	-	-	-	
16	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	16.143.977.390,62	-	-	289.051.000,00	-	-	4.398.748.156,00	-	
17	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	67.070.966.344,98	2.850.177.436,24	-	-	14.390.000,00	-	2.023.242.951,00	-	
18	DINAS KEHUTANAN	4.763.603.856,08	-	-	-	-	-	-	114.770.000,00	
19	DINAS KETAHANAN PANGAN	2.011.700.136,00	-	-	-	-	-	-	-	
20	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	10.992.539.565,00	78.537.000,00	-	-	-	-	-	-	
21	DINAS KOPERASI DAN UKM	7.014.123.244,00	-	-	-	-	-	-	-	
22	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.236.774.652,00	-	-	-	-	-	-	-	
23	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	4.721.933.000,00	-	151.798.608,06	-	-	-	-	-	
24	BADAN PENDAPATAN	49.346.816.034,51	1.418.181.500,00	-	-	-	-	-	-	
25	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	75.745.881.781,64	-	1.531.701.000,00	4.211.860.000,00	99.500.000,00	1.652.925.707,00	-	942.156.500,00	
26	INSPEKTORAT	9.811.908.036,03	-	-	-	-	-	-	-	
27	BAPPEDA LITBANG	2.095.408.632,00	-	-	-	-	-	-	-	
28	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4.643.515.000,00	-	-	-	-	-	-	2.506.595.727,00	
29	DINAS PARIWISATA	1.497.951.900,00	-	-	-	-	-	-	-	
30	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.911.964.753,42	98.424.000,00	-	-	-	-	-	-	
31	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.573.221.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
32	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6.320.708.500,00	228.409.476,00	-	-	-	-	23.800.000,00	-	
33	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	15.023.998.702,61	445.586.170,00	-	45.000.000,00	-	-	-	-	
34	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	4.862.559.832,95	-	-	-	-	-	-	-	
35	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI	7.909.319.427,43	216.113.500,00	-	-	-	-	-	-	
36	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	5.754.427.007,51	-	-	-	-	-	-	-	
37	DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA	1.238.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
38	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROV BALI	1.256.248.000,00	-	-	-	-	-	-	-	

Lampiran 21

No	SKPD	Saldo Akhir
	Jumlah	2.170.807.551.558,85
1	Sekretariat DPRD	11.830.568.307,11
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	21.330.253.782,32
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	590.483.000,00
4	Sekretariat Daerah	39.602.474.129,87
5	DINAS PERBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.142.645.518,00
6	DINAS PERBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	997.212.600,00
7	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	113.036.171.027,60
8	DINAS PERHUBUNGAN	4.909.418.604,56
9	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	2.760.676.021,04
10	DINAS KESEHATAN	570.731.833.283,91
11	DINAS PENDIDIKAN	975.427.224.436,00
12	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	8.064.226.614,88
13	DINAS KEBUDAYAAN	66.204.590.092,58
14	DINAS SOSIAL	13.263.168.904,00
15	DINAS TENAGA KERJA DAN ESDM	32.628.621.721,83
16	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	20.750.967.618,62
17	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	69.175.873.508,29
18	DINAS KEHUTANAN	4.761.567.356,08
19	DINAS KETAHANAN PANGAN	2.011.700.136,00
20	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	11.059.458.565,00
21	DINAS KOPERASI DAN UKM	7.014.123.244,00
22	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.236.774.652,00
23	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	4.745.488.608,06
24	BADAN PENDAPATAN	50.290.820.534,51
25	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	67.247.276.127,64
26	INSPEKTORAT	9.811.908.036,03
27	BAPPEDA LITBANG	2.095.408.632,00
28	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	7.150.110.727,00
29	DINAS PARIWISATA	1.277.838.900,00
30	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.010.388.753,42
31	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.573.221.000,00
32	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6.572.917.976,00
33	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	15.481.584.872,61
34	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	4.862.559.832,95
35	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI	7.909.319.427,43
36	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	5.754.427.007,51
37	DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA	1.238.000.000,00
38	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROV BALI	1.256.248.000,00

**Rincian Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun Anggaran 2019**

No	SKPD	Saldo Awal	Mutasi Tambah						
			Belanja Modal	Kapitaliasi Belanja Non Modal	Penerimaan Hibah	Reklasifikasi		Koreksi Pencatatan Saldo Awal	Mutasi Antar OPD
Antar Aset Tetap Tahun Berjalan	Dari Aset Lainnya								
	Jumlah	2.805.863.639.783,15	117.877.559.353,84	-	19.355.655.300,00	4.182.783.414,00	-	10.707.585.035,18	5.089.928.880,00
1	Sekretariat DPRD	1.525.996.580,00	-	-	-	-	-	-	-
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sekretariat Daerah	96.462.900,00	134.370.000,00	-	-	1.624.998.940,00	-	-	623.762.000,00
5	DINAS PERBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	120.103.800,00	-	-	-	-	-	-	-
6	DINAS PERBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	-	-	-	-	-	-	-
7	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.744.940.231.838,13	114.987.957.336,00	-	19.333.879.700,00	154.149.000,00	-	3.567.183.400,00	-
8	DINAS PERHUBUNGAN	21.077.974.332,71	807.163.200,00	-	-	-	-	-	-
9	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	17.280.000,00	149.490.000,00	-	-	-	-	-	-
10	DINAS KESEHATAN	6.946.670.030,07	45.500.000,00	-	-	1.635.903.674,00	-	-	-
11	DINAS PENDIDIKAN	7.435.012.682,94	-	-	-	723.706.800,00	-	-	59.787.500,00
12	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	-	-	-	-	-	-	-	-
13	DINAS KEBUDAYAAN	2.700.031.170,00	21.500.000,00	-	-	-	-	-	-
14	DINAS SOSIAL	18.089.000,00	-	-	-	-	-	-	-
15	DINAS TENAGA KERJA DAN ESDM	4.904.499.703,00	99.412.853,70	-	-	-	-	-	3.688.277.380,00
16	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.290.654.334,28	-	-	-	-	-	6.739.686.635,18	-
17	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	4.918.051.453,02	534.255.314,14	-	-	-	-	400.715.000,00	-
18	DINAS KEHUTANAN	43.273.000,00	-	-	-	-	-	-	-
19	DINAS KETAHANAN PANGAN	-	-	-	-	-	-	-	-
20	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	441.157.600,00	-	-	-	-	-	-	-
21	DINAS KOPERASI DAN UKM	303.252.000,00	-	-	21.775.600,00	-	-	-	-
22	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	88.047.500,00	-	-	-	-	-	-	-
23	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	114.978.234,00	-	-	-	-	-	-	-
24	BADAN PENDAPATAN	1.297.520.420,00	466.681.000,00	-	-	-	-	-	-
25	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	4.132.255.050,00	161.000.000,00	-	-	-	-	-	-
26	INSPEKTORAT	52.360.000,00	-	-	-	-	-	-	-
27	BAPPEDA LITBANG	385.044.100,00	-	-	-	-	-	-	-
28	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	64.991.000,00	-	-	-	-	-	-	718.102.000,00
29	DINAS PARIWISATA	149.406.255,00	-	-	-	-	-	-	-
30	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	22.755.000,00	-	-	-	-	-	-	-
31	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	34.380.000,00	-	-	-	-	-	-	-
32	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	533.585.000,00	119.328.000,00	-	-	-	-	-	-
33	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	899.283.600,00	149.528.000,00	-	-	44.025.000,00	-	-	-
34	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	230.746.000,00	-	-	-	-	-	-	-
35	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI	-	-	-	-	-	-	-	-
36	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	53.173.650,00	-	-	-	-	-	-
37	DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA	-	-	-	-	-	-	-	-
38	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROV BALI	1.079.547.200,00	148.200.000,00	-	-	-	-	-	-

Lampiran 22

No	SKPD	Saldo Akhir
	Jumlah	2.940.133.070.386,02
1	Sekretariat DPRD	1.525.996.580,00
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	-
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	-
4	Sekretariat Daerah	2.345.223.840,00
5	DINAS PERBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	120.103.800,00
6	DINAS PERBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-
7	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.865.659.185.090,98
8	DINAS PERHUBUNGAN	21.145.901.435,71
9	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	17.280.000,00
10	DINAS KESEHATAN	8.524.630.384,07
11	DINAS PENDIDIKAN	8.215.091.082,94
12	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	-
13	DINAS KEBUDAYAAN	2.721.531.170,00
14	DINAS SOSIAL	18.089.000,00
15	DINAS TENAGA KERJA DAN ESDM	5.003.912.556,70
16	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	7.857.823.969,46
17	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	5.853.021.767,16
18	DINAS KEHUTANAN	43.273.000,00
19	DINAS KETAHANAN PANGAN	-
20	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	441.157.600,00
21	DINAS KOPERASI DAN UKM	325.027.600,00
22	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	88.047.500,00
23	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	114.978.234,00
24	BADAN PENDAPATAN	1.764.201.420,00
25	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3.783.467.550,00
26	INSPEKTORAT	52.360.000,00
27	BAPPEDA LITBANG	385.044.100,00
28	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	783.093.000,00
29	DINAS PARIWISATA	149.406.255,00
30	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	22.755.000,00
31	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	34.380.000,00
32	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	533.585.000,00
33	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.092.836.600,00
34	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	230.746.000,00
35	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI	-
36	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	53.173.650,00
37	DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA	-
38	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROV BALI	1.227.747.200,00

**Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun Anggaran 2019**

No	SKPD	Saldo Awal	Mutasi Tambah							Salah Pos Belanja Modal
			Belanja Modal	Kapitaliasi Belanja Non Modal	Penerimaan Hibah	Reklasifikasi		Koreksi Pencatatan Saldo Awal	Mutasi Antar OPD	
Antar Aset Tetap Tahun Berjalan	Dari Aset Lainnya									
	Jumlah	59.558.717.173,58	10.675.560.548,00	11.300.000,00	427.963.000,00	2.353.566.392,67	-	536.552.000,00	149.870.000,00	3.965.712.508,00
1	Sekretariat DPRD	347.521.550,00	2.880.400,00	-	-	-	-	-	-	-
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	143.500.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000.000,00	-
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sekretariat Daerah	761.126.800,00	312.949.300,00	-	-	88.399.250,00	-	-	-	-
5	DINAS PERBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	26.300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6	DINAS PERBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	63.777.500,00	-	-	-	-	-	-	-
7	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.132.749.635,00	-	-	-	387.587.000,00	-	-	-	-
8	DINAS PERHUBUNGAN	20.620.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
9	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	12.437.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
10	DINAS KESEHATAN	498.071.520,00	2.858.734.235,00	-	-	-	-	-	-	-
11	DINAS PENDIDIKAN	41.462.137.887,45	6.647.316.932,00	11.300.000,00	386.963.000,00	500.271.500,00	-	536.552.000,00	99.870.000,00	3.965.712.508,00
12	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARAHAGA	815.480.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
13	DINAS KEBUDAYAAN	1.621.261.536,90	67.000.000,00	-	-	716.014.800,00	-	-	-	-
14	DINAS SOSIAL	163.263.277,00	3.300.000,00	-	-	-	-	-	-	-
15	DINAS TENAGA KERJA DAN ESDM	4.696.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
16	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	714.124.122,23	-	-	-	661.293.842,67	-	-	-	-
18	DINAS KEHUTANAN	552.408.526,00	-	-	-	-	-	-	-	-
19	DINAS KETAHANAN PANGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	407.183.600,00	45.060.000,00	-	40.000.000,00	-	-	-	-	-
21	DINAS KOPERASI DAN UKM	13.477.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
22	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	21.000.000,00	99.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
23	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	BADAN PENDAPATAN	550.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
25	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	24.500.000,00	91.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
26	INSPEKTORAT	8.457.505,00	185.108.000,00	-	-	-	-	-	-	-
27	BAPPEDA LITBANG	246.994.400,00	58.080.000,00	-	-	-	-	-	-	-
28	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	150.226.010,00	-	-	-	-	-	-	-	-
29	DINAS PARIWISATA	45.232.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
30	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	90.475.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
31	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	142.630.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
32	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	78.452.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
33	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	339.239.870,00	18.500.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-
34	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	705.262.770,00	103.425.000,00	-	-	-	-	-	-	-
35	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI	560.302.500,00	19.872.981,00	-	-	-	-	-	-	-
36	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	8.422.535.664,00	-	-	-	-	-	-	-	-
37	DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA	-	15.339.200,00	-	-	-	-	-	-	-
38	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROV BALI	26.500.000,00	74.217.000,00	-	-	-	-	-	-	-

No	SKPD	Mutasi Kurang						Saldo Akhir	
		Pengeluaran Hibah	Penghapusan	Reklasifikasi		Koreksi Pencatatan Saldo Awal	Dibawah Kapitalisasi		Mutasi Antar OPD
				Antar Aset Tetap Tahun Berjalan	Ke Aset Lainnya				
	Jumlah	-	-	4.868.247.540,00	59.932.000,00	470.828.000,00	479.527.281,00	149.870.000,00	63.719.411.785,25
1	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	-	-	350.401.950,00
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	193.500.000,00
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sekretariat Daerah	-	-	149.260.700,00	37.500.000,00	462.853.000,00	978.800,00	50.000.000,00	461.882.850,00
5	DINAS PERMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	-	-	-	-	-	26.300.000,00
6	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	-	63.777.500,00	-	-	-	-	-
7	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	-	122.842.609,00	-	-	-	-	1.397.494.026,00
8	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	10.000.000,00	-	-	-	-	20.620.000,00
9	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	-	-	-	-	-	-	-	12.437.000,00
10	DINAS KESEHATAN	-	-	2.825.214.235,00	14.432.000,00	-	-	-	517.159.520,00
11	DINAS PENDIDIKAN	-	-	1.052.483.296,00	-	-	460.387.700,00	99.870.000,00	44.065.957.815,45
12	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	-	-	-	-	-	-	-	815.480.700,00
13	DINAS KEBUDAYAAN	-	-	-	-	-	6.652.800,00	-	2.397.623.536,90
14	DINAS SOSIAL	-	-	-	-	-	-	-	166.563.277,00
15	DINAS TENAGA KERJA DAN ESDM	-	-	-	-	-	-	-	4.696.000,00
16	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	-	-	-	-	-	-
17	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	-	-	-	-	-	-	-	1.375.417.964,90
18	DINAS KEHUTANAN	-	-	-	-	-	-	-	552.408.526,00
19	DINAS KETAHANAN PANGAN	-	-	-	-	-	-	-	-
20	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	-	-	-	-	-	11.025.000,00	-	481.218.600,00
21	DINAS KOPERASI DAN UKM	-	-	-	-	-	-	-	13.477.000,00
22	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	-	99.000.000,00	-	-	-	-	21.000.000,00
23	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	-	-	-	-	-	-	-	-
24	BADAN PENDAPATAN	-	-	-	-	-	-	-	550.000,00
25	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-	91.000.000,00	-	-	-	-	24.500.000,00
26	INSPEKTORAT	-	-	185.108.000,00	-	-	-	-	8.457.505,00
27	BAPPEDA LITBANG	-	-	58.080.000,00	-	-	-	-	246.994.400,00
28	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-	-	-	-	150.226.010,00
29	DINAS PARIWISATA	-	-	-	-	-	-	-	45.232.000,00
30	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	-	-	-	-	-	90.475.000,00
31	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-	-	-	-	-	-	142.630.000,00
32	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-	-	7.975.000,00	-	-	70.477.300,00
33	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	18.500.000,00	-	-	-	-	340.239.870,00
34	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-	103.425.000,00	8.000.000,00	-	-	-	697.262.770,00
35	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI	-	-	-	-	-	482.981,00	-	579.692.500,00
36	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	-	-	-	-	-	-	8.422.535.664,00
37	DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA	-	-	15.339.200,00	-	-	-	-	-
38	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROV BALI	-	-	74.217.000,00	-	-	-	-	26.500.000,00

No	SKPD	Mutasi Kurang					Saldo Akhir	
		Penghapusan	Reklasifikasi		Koreksi Pencatatan Saldo Awal	Dibawah Kapitalisasi		Mutasi Antar OPD
			Antar Aset Tetap Tahun Berjalan	Ke Aset Lainnya				
	Jumlah	-	57.402.609.071,90	-	344.789.332,70	-	48.400.000,00	21.598.209.957,17
1	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	-	-
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-
4	Sekretariat Daerah	-	3.052.036.500,00	-	-	-	-	-
5	DINAS PERMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	-	-	-	-	-
6	DINAS PERMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	-	-	-	-	-	-
7	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	452.306.400,00	-	154.149.000,00	-	48.400.000,00	17.051.705.950,00
8	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-	-	-	-	-
9	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	-	-	-	-	-	-	-
10	DINAS KESEHATAN	-	53.640.441.171,90	-	174.815.332,70	-	-	3.157.365.250,67
11	DINAS PENDIDIKAN	-	257.825.000,00	-	-	-	-	164.020.400,00
12	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	-	-	-	-	-	-	-
13	DINAS KEBUDAYAAN	-	-	-	-	-	-	88.949.000,00
14	DINAS SOSIAL	-	-	-	-	-	-	-
15	DINAS TENAGA KERJA DAN ESDM	-	-	-	-	-	-	-
16	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	-	-	-	-	-
17	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	-	-	-	-	-	-	45.786.856,50
18	DINAS KEHUTANAN	-	-	-	-	-	-	-
19	DINAS KETAHANAN PANGAN	-	-	-	-	-	-	-
20	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	-	-	-	-	-	-	-
21	DINAS KOPERASI DAN UKM	-	-	-	-	-	-	-
22	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	-	-	-	-	-	-
23	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	-	-	-	-	-	-	114.345.000,00
24	BADAN PENDAPATAN	-	-	-	-	-	-	-
25	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-	-	-	-	-	-
26	INSPEKTORAT	-	-	-	-	-	-	-
27	BAPPEDA LITBANG	-	-	-	-	-	-	-
28	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-	-	-	48.400.000,00
29	DINAS PARIWISATA	-	-	-	-	-	-	-
30	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	-	-	-	-	-
31	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-	-	-	-	-	-
32	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-	15.825.000,00	-	-	-
33	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	-	-	-	-	-
34	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-	-	-	-	-	-
35	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI	-	-	-	-	-	-	927.637.500,00
36	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	-	-	-	-	-	-
37	DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA	-	-	-	-	-	-	-
38	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROV BALI	-	-	-	-	-	-	-

**Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun Anggaran 2019**

No	SKPD	Saldo Awal					B. Penyusutan		
		Total	PM	GB	JIJ	ATL	PM	GB	JIJ
	Jumlah	2.807.850.735.470,76	795.531.340.772,19	364.514.128.894,32	1.631.653.676.210,55	16.151.589.593,70	180.059.684.316,62	42.436.530.712,00	185.553.387.416,00
1	Sekretariat DPRD	27.228.482.104,00	21.756.824.202,00	5.202.493.327,00	213.194.175,00	55.970.400,00	3.209.623.644,00	220.015.411,00	54.318.225,00
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	2.976.412.329,00	2.452.614.417,00	380.297.912,00	-	143.500.000,00	1.326.922.362,00	429.296.325,00	-
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	711.741.647,67	653.943.336,67	57.798.311,00	-	-	160.316.386,00	16.689.860,00	-
4	Sekretariat Daerah	81.647.427.502,12	62.742.871.636,12	18.296.832.593,00	19.220.273,00	588.503.000,00	7.941.796.148,00	705.885.363,00	68.735.422,00
5	DINAS PERMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.229.373.840,00	3.798.629.376,00	374.225.848,00	30.218.616,00	26.300.000,00	310.392.631,00	22.801.078,00	3.326.820,00
6	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.199.013.346,00	2.369.451.981,00	829.561.365,00	-	-	301.720.837,00	19.358.930,00	-
7	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.661.548.531.792,22	37.998.893.778,33	10.255.860.897,00	1.613.279.250.274,55	14.526.842,34	4.851.577.847,00	2.438.841.426,00	181.797.979.699,00
8	DINAS PERHUBUNGAN	24.066.271.254,00	13.246.064.369,00	808.615.354,00	9.998.356.531,00	13.235.000,00	1.582.605.776,00	97.539.472,00	1.370.268.469,00
9	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	39.223.342.097,34	38.962.159.117,67	250.896.313,00	6.120.000,00	4.166.666,67	2.389.079.372,00	55.190.540,00	864.000,00
10	DINAS KESEHATAN	220.829.757.654,10	182.051.208.650,07	37.574.037.282,00	856.417.162,00	348.094.560,03	78.339.684.910,00	9.903.120.916,00	242.098.655,00
11	DINAS PENDIDIKAN	361.400.785.979,93	170.834.534.945,00	178.011.945.806,00	1.467.518.010,00	11.086.787.218,93	48.442.137.859,62	19.899.979.463,00	381.437.490,00
12	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	5.691.454.597,33	2.814.580.818,00	2.350.116.922,00	-	526.756.857,33	568.096.917,00	167.722.902,00	-
13	DINAS KEBUDAYAAN	64.882.459.864,62	38.963.964.865,23	23.689.959.582,32	992.427.651,00	1.236.107.766,07	1.487.342.608,00	1.568.930.876,00	162.707.468,00
14	DINAS SOSIAL	12.020.719.729,40	4.604.993.617,40	7.255.363.255,00	3.065.080,00	157.297.777,00	610.466.425,00	270.570.284,00	602.966,00
15	DINAS TENAGA KERJA DAN ESDM	14.567.728.083,67	11.916.902.370,67	2.248.028.314,00	402.797.399,00	-	1.915.414.500,00	652.635.929,00	254.517.886,00
16	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	10.576.668.777,00	6.119.621.819,00	3.891.383.476,00	565.663.482,00	-	1.167.130.844,00	402.608.612,00	244.507.531,00
17	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	17.840.378.170,00	10.459.231.990,00	5.677.700.383,00	1.584.513.120,00	118.932.677,00	2.602.366.874,00	1.359.532.560,00	489.859.886,00
18	DINAS KEHUTANAN	11.613.921.704,00	10.157.028.946,00	917.450.208,00	9.736.425,00	529.706.125,00	1.050.912.818,00	91.329.705,00	4.327.300,00
19	DINAS KETAHANAN PANGAN	2.842.965.777,00	2.353.107.427,00	489.858.350,00	-	-	225.020.809,00	42.571.340,00	-
20	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	14.346.806.695,00	12.173.478.973,00	2.020.944.851,00	152.382.871,00	-	1.480.831.107,00	219.962.322,00	15.951.648,00
21	DINAS KOPERASI DAN UKM	5.195.340.631,00	4.017.584.385,00	1.139.476.792,00	38.279.454,00	-	491.292.563,00	140.324.716,00	8.330.106,00
22	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	6.026.816.644,00	4.708.676.212,00	1.270.091.638,00	27.048.794,00	21.000.000,00	305.458.550,00	59.745.210,00	3.168.041,00
23	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	4.573.918.499,00	3.749.652.495,00	812.572.745,00	11.693.259,00	-	335.368.721,00	92.845.719,00	4.514.019,00
24	BADAN PENDAPATAN	32.971.009.722,79	20.409.296.488,79	12.421.919.612,00	139.793.622,00	-	2.566.189.249,00	976.359.410,00	112.411.403,00
25	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	44.268.365.043,90	11.455.987.957,90	31.518.696.259,00	1.269.180.827,00	24.500.000,00	1.256.549.058,00	1.248.521.942,00	89.551.071,00
26	INSPEKTORAT	7.150.579.947,00	6.156.706.046,00	990.311.582,00	3.562.319,00	-	1.475.357.302,00	189.085.936,00	1.439.166,00
27	BAPPEDA LITBANG	13.409.041.629,67	12.458.299.017,00	802.620.752,00	73.155.344,00	74.966.516,67	684.673.674,00	41.908.172,00	13.965.467,00
28	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	5.944.189.906,00	5.011.656.918,00	921.962.740,00	10.570.248,00	-	1.620.230.537,00	142.714.518,00	57.020.375,00
29	DINAS PARIWISATA	3.383.859.179,00	2.699.452.271,00	611.262.842,00	27.912.066,00	45.232.000,00	270.338.168,00	25.624.118,00	6.536.032,00
30	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	13.372.903.839,00	12.043.438.338,00	1.323.198.220,00	5.167.281,00	1.100.000,00	235.892.039,00	53.412.089,00	568.875,00
31	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	7.908.210.194,00	7.100.647.919,00	657.960.775,00	6.971.500,00	142.630.000,00	630.657.073,00	31.464.420,00	1.146.000,00
32	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	45.613.322.780,67	44.701.295.492,00	817.606.410,00	93.490.462,00	930.416,67	7.124.772.227,00	127.090.784,00	26.863.794,00
33	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	12.412.116.040,66	9.186.256.900,66	2.795.824.124,00	293.062.016,00	136.973.000,00	978.193.376,00	302.166.583,00	30.701.115,00
34	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	5.674.500.194,50	3.823.295.898,50	1.088.813.874,00	57.567.652,00	704.822.770,00	470.428.537,00	97.403.121,00	6.191.875,00
35	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI	8.154.611.651,66	4.031.264.353,00	3.974.680.632,00	-	148.666.666,66	459.552.809,00	158.301.568,00	-

No	SKPD	Saldo Awal					B. Penyusutan		
		Total	PM	GB	JIJ	ATL	PM	GB	JIJ
36	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	7.751.278.251,18	5.895.724.003,18	1.855.554.248,00	-	-	530.055.943,00	115.094.132,00	221.557,00
37	DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA	1.416.872.494,00	944.369.161,00	472.503.333,00	-	-	349.513.159,00	24.760.000,00	-
38	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROV BALI	1.179.555.878,33	707.630.281,00	455.701.967,00	15.340.297,00	883.333,33	311.720.657,00	25.124.960,00	99.255.055,00

Lampiran 25

No	SKPD	Penyusutan Barang Hibah			
		ATL	PM	GB	JJU
	Jumlah	2.594.088.321,80	9.374.464.065,00	7.317.211.061,00	197.814.470,00
1	Sekretariat DPRD	21.442.453,33	-	-	-
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	-	-	-	-
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	-	-	-	-
4	Sekretariat Daerah	9.212.433,33	-	-	-
5	DINAS PERMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	-	-
6	DINAS PERBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	-	-	-
7	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	12.735.894,27	3.475.530.370,00	7.085.488.509,00	192.642.765,00
8	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-	-
9	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	2.000.000,00	-	-	-
10	DINAS KESEHATAN	14.252.680,00	410.882,00	-	-
11	DINAS PENDIDIKAN	1.988.734.000,25	-	-	-
12	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	147.702.273,34	-	-	-
13	DINAS KEBUDAYAAN	187.005.591,67	-	-	-
14	DINAS SOSIAL	495.000,00	-	-	-
15	DINAS TENAGA KERJA DAN ESDM	-	-	-	-
16	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	4.093.773.814,00	231.722.552,00	-
17	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	61.062.220,61	-	-	-
18	DINAS KEHUTANAN	18.682.875,00	369.562.977,00	-	-
19	DINAS KETAHANAN PANGAN	-	-	-	-
20	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	-	4.747.569,00	-	-
21	DINAS KOPERASI DAN UKM	-	-	-	5.171.705,00
22	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	3.634.372,00	-	-
23	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	-	-	-	-
24	BADAN PENDAPATAN	-	-	-	-
25	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-	-	-
26	INSPEKTORAT	-	-	-	-
27	BAPPEDA LITBANG	42.733.400,00	-	-	-
28	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-
29	DINAS PARIWISATA	-	-	-	-
30	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	-	-
31	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-	-	-
32	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	1.426.804.081,00	-	-
33	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	800.000,00	-	-	-
34	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-	-	-
35	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI	81.929.500,00	-	-	-

No	SKPD				
		Penyusutan Barang Hibah			
		ATL	PM	GB	JIJ
36	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	-	-	-
37	DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA	-	-	-	-
38	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROV BALI	5.300.000,00	-	-	-

Lampiran 25

No	SKPD	OPD		Akumulasi Penyusutan Aset	
		JIJ	ATL	PM	GB
	Jumlah	894.051.481,00	50.000.000,00	362.140.952,00	134.998.500,00
1	Sekretariat DPRD	-	-	-	-
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	-	50.000.000,00	-	-
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	-	-	-	-
4	Sekretariat Daerah	169.544.272,00	-	-	-
5	DINAS PERMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	-	-
6	DINAS PERMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	-	-	-
7	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	-	-	-
8	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-	-
9	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	-	-	-	-
10	DINAS KESEHATAN	-	-	-	-
11	DINAS PENDIDIKAN	1.889.627,00	-	-	-
12	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	-	-	-	-
13	DINAS KEBUDAYAAN	-	-	-	-
14	DINAS SOSIAL	-	-	-	-
15	DINAS TENAGA KERJA DAN ESDM	588.584.365,00	-	-	-
16	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	-	-
17	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	-	-	-	-
18	DINAS KEHUTANAN	-	-	-	-
19	DINAS KETAHANAN PANGAN	-	-	-	-
20	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	-	-	-	-
21	DINAS KOPERASI DAN UKM	-	-	-	-
22	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	-	-	-
23	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	-	-	-	-
24	BADAN PENDAPATAN	-	-	-	-
25	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-	-	134.998.500,00
26	INSPEKTORAT	-	-	-	-
27	BAPPEDA LITBANG	-	-	-	-
28	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	134.033.217,00	-	-	-
29	DINAS PARIWISATA	-	-	-	-
30	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	-	-
31	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-	-	-
32	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-	-
33	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	-	-
34	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-	-	-
35	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI	-	-	362.140.952,00	-

No	SKPD	r OPD		Akumulasi Penyusutan Aset y	
		JJJ	ATL	PM	GB
		36	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	-
37	DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA	-	-	-	-
38	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROV BALI	-	-	-	-

Lampiran 25

No	SKPD	Saldo Kurang			
		Koreksi Pencatatan Saldo Awal			PM
		GB	JJJ	ATL	
	Jumlah	2.038.940.500,09	469.466.557,00	491.848.218,38	5.558.385.303,00
1	Sekretariat DPRD	-	-	-	17.160.000,00
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	-	-	-	-
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	-	-	-	-
4	Sekretariat Daerah	-	-	462.853.000,00	781.115.678,00
5	DINAS PERMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	9.703.333,00	-	-	-
6	DINAS PERBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	-	-	-
7	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	254.863,00	-	11.358.175,81	3.830.639.833,00
8	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-	4.945.558,00
9	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	-	-	-	128.761.401,00
10	DINAS KESEHATAN	5.678.929,00	23.104.269,00	-	-
11	DINAS PENDIDIKAN	1.957.776.387,00	85.424.788,00	16.706.625,90	147.495.833,00
12	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	-	-	-	-
13	DINAS KEBUDAYAAN	-	-	-	-
14	DINAS SOSIAL	-	-	-	-
15	DINAS TENAGA KERJA DAN ESDM	-	-	-	-
16	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	-	-
17	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	61.842.975,00	-	-	-
18	DINAS KEHUTANAN	2.591.083,00	-	-	-
19	DINAS KETAHANAN PANGAN	-	-	-	-
20	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	-	-	-	-
21	DINAS KOPERASI DAN UKM	-	-	-	-
22	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	-	-	-
23	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	-	-	-	-
24	BADAN PENDAPATAN	-	-	-	-
25	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.092.930,09	360.937.500,00	-	1.500.000,00
26	INSPEKTORAT	-	-	-	-
27	BAPPEDA LITBANG	-	-	-	6.300.000,00
28	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-
29	DINAS PARIWISATA	-	-	-	190.837.000,00
30	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	-	-
31	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-	-	-
32	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	930.416,67	-
33	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	-	-
34	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-	-	150.100.000,00
35	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI	-	-	-	299.530.000,00

No	SKPD	Saldo Kurang			
		Koreksi Pencatatan Saldo Awal			PM
		GB	JJ	ATL	
36	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	-	-	-
37	DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA	-	-	-	-
38	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROV BALI	-	-	-	-

No	SKPD	Koreksi Saldo Awal Akumulasi krn Mutasi Antar OPD						Koreksi Saldo Atas Aset Di Bawah Kapitalisasi	
		GB	JJJ	ATL	PM	GB	JJJ	ATL	PM
	Jumlah	5.961.937.671,00	894.051.481,00	50.000.000,00	19.100,00	-	-	691.250,00	966.162.567.359,48
1	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	-	-	24.623.613.532,00
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	254.863,00	-	-	-	-	-	-	3.770.425.779,00
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	742.167.043,67
4	Sekretariat Daerah	-	-	50.000.000,00	-	-	-	-	59.401.578.024,12
5	DINAS PERMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	-	-	-	-	-	4.031.350.507,00
6	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	-	-	-	-	-	-	2.671.172.818,00
7	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.461.375.969,00	892.161.854,00	-	-	-	-	-	42.605.861.294,33
8	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-	-	-	-	-	10.170.768.587,00
9	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	-	-	-	-	-	-	-	41.319.683.171,67
10	DINAS KESEHATAN	-	-	-	19.100,00	-	-	-	258.617.135.835,79
11	DINAS PENDIDIKAN	-	-	-	-	-	-	691.250,00	218.249.716.619,62
12	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	-	-	-	-	-	-	-	3.274.893.944,00
13	DINAS KEBUDAYAAN	-	-	-	-	-	-	-	38.507.575.004,04
14	DINAS SOSIAL	-	-	-	-	-	-	-	5.423.460.042,40
15	DINAS TENAGA KERJA DAN ESDM	-	-	-	-	-	-	-	16.194.832.044,67
16	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	-	-	-	-	-	15.832.724.251,00
17	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	-	-	-	-	-	-	-	13.077.020.755,00
18	DINAS KEHUTANAN	67.500.649,00	-	-	-	-	-	-	11.033.786.066,00
19	DINAS KETAHANAN PANGAN	-	-	-	-	-	-	-	2.578.128.236,00
20	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	-	-	-	-	-	-	-	13.526.817.649,00
21	DINAS KOPERASI DAN UKM	-	-	-	-	-	-	-	4.614.372.781,00
22	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	-	-	-	-	-	-	5.400.009.234,00
23	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	-	-	-	-	-	-	-	4.089.966.774,00
24	BADAN PENDAPATAN	58.168.064,00	-	-	-	-	-	-	22.364.973.837,79
25	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	4.211.387.651,00	1.889.627,00	-	-	-	-	-	11.712.329.459,90
26	INSPEKTORAT	-	-	-	-	-	-	-	7.145.289.270,00
27	BAPPEDA LITBANG	-	-	-	-	-	-	-	13.136.672.691,00
28	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-	-	-	-	10.419.358.156,00
29	DINAS PARIWISATA	163.250.475,00	-	-	-	-	-	-	2.908.179.034,00
30	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	-	-	-	-	-	11.356.428.602,00
31	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-	-	-	-	-	-	7.629.490.277,00
32	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	53.252.871.800,00
33	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	-	-	-	-	-	10.349.450.276,66
34	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	3.773.184.534,00
35	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI	-	-	-	-	-	-	-	3.829.146.210,00

No	SKPD								
		Koreksi Saldo Awal Akumulasi krn Mutasi Antar OPD			Koreksi Saldo Atas Aset Di Bawah Kapitalisasi				
		GB	JIJ	ATL	PM	GB	JIJ	ATL	
36	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	-	-	-	-	-	-	6.207.399.709,82
37	DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA	-	-	-	-	-	-	-	1.293.882.320,00
38	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROV BALI	-	-	-	-	-	-	-	1.026.851.188,00

No	SKPD	Saldo Akhir			
		GB	JIJ	ATL	TOTAL
	Jumlah	414.351.619.670,32	1.820.953.871.728,73	18.285.392.071,12	3.219.753.450.829,65
1	Sekretariat DPRD	5.422.508.738,00	267.512.400,00	77.412.853,33	30.391.047.523,33
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	2.478.375.830,00	-	193.500.000,00	6.442.301.609,00
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	74.488.171,00	-	-	816.655.214,67
4	Sekretariat Daerah	19.002.717.956,00	257.499.967,00	47.362.433,33	78.709.158.380,45
5	DINAS PERMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	387.323.593,00	33.545.436,00	26.300.000,00	4.478.519.536,00
6	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	848.920.295,00	-	-	3.520.093.113,00
7	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	20.334.585.777,00	1.794.393.148.929,55	15.904.560,80	1.857.349.500.561,68
8	DINAS PERHUBUNGAN	906.154.826,00	11.288.959.470,00	13.235.000,00	22.379.117.883,00
9	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	306.086.853,00	6.984.000,00	6.166.666,67	41.638.920.691,34
10	DINAS KESEHATAN	47.656.724.455,00	1.041.516.548,00	347.915.240,03	307.663.292.078,82
11	DINAS PENDIDIKAN	198.138.293.011,00	1.765.420.339,00	13.058.123.343,28	431.211.553.312,90
12	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.517.839.824,00	-	674.459.130,67	6.467.192.898,67
13	DINAS KEBUDAYAAN	25.258.890.458,32	1.155.135.119,00	1.423.113.357,74	66.344.713.939,10
14	DINAS SOSIAL	7.525.933.539,00	3.668.046,00	157.792.777,00	13.110.854.404,40
15	DINAS TENAGA KERJA DAN ESDM	2.900.664.243,00	657.315.285,00	-	19.752.811.572,67
16	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.164.076.718,00	5.455.230.802,18	-	26.452.031.771,18
17	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	7.065.463.759,00	2.134.480.256,00	272.180.521,61	22.549.145.291,61
18	DINAS KEHUTANAN	1.026.104.664,00	14.063.725,00	548.389.000,00	12.622.343.455,00
19	DINAS KETAHANAN PANGAN	532.429.690,00	-	-	3.110.557.926,00
20	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	2.240.907.173,00	168.334.519,00	-	15.936.059.341,00
21	DINAS KOPERASI DAN UKM	1.279.801.508,00	51.781.265,00	-	5.945.955.554,00
22	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.329.836.848,00	30.216.835,00	21.000.000,00	6.781.062.917,00
23	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	899.679.964,00	16.207.278,00	-	5.005.854.016,00
24	BADAN PENDAPATAN	13.340.110.958,00	252.205.025,00	-	35.957.289.820,79
25	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	29.615.137.888,00	995.904.771,00	24.500.000,00	42.347.872.118,90
26	INSPEKTORAT	1.179.397.518,00	5.001.485,00	-	8.329.688.273,00
27	BAPPEDA LITBANG	844.528.924,00	87.120.811,00	117.699.916,67	14.186.022.342,67
28	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.224.338.764,00	201.623.840,00	-	11.845.320.760,00
29	DINAS PARIWISATA	473.636.485,00	34.448.098,00	45.232.000,00	3.461.495.617,00
30	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.376.610.309,00	5.736.156,00	1.100.000,00	12.739.875.067,00
31	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	689.425.195,00	8.117.500,00	142.630.000,00	8.469.662.972,00
32	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	944.697.194,00	120.354.256,00	-	54.317.923.250,00
33	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3.097.990.707,00	323.763.131,00	137.773.000,00	13.908.977.114,66
34	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1.186.216.995,00	63.759.527,00	696.822.770,00	5.719.983.826,00
35	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI	4.132.982.200,00	-	230.596.166,66	8.192.724.576,66

No	SKPD	Saldo Akhir			
		GB	JJJ	ATL	TOTAL
36	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	1.970.648.380,00	221.557,00	-	8.178.269.646,82
37	DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA	497.263.333,00	-	-	1.791.145.653,00
38	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROV BALI	480.826.927,00	114.595.352,00	6.183.333,33	1.628.456.800,33

**Rincian Aset Tetap Tanah dan Gedung yang Dikerjasamakan sebagai Aset Kemitraan
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2019**

No.	Nomor Kode Barang	Nomor Register	Jenis Aset Tetap	Dok. Kepemilikan	Lokasi Aset Tetap	Nomor/tgl perjanjian	Luas (M2)	Penyewa	Posisi Per 31 Desember 2018		penambahan Nilai	
									Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan		
Jumlah Aset Tetap Tanah dan Gedung Dikerjasamakan									592.071.901.185,89	-1.751.740.586,56	18.436.922.034,11	
Jumlah Aset Tetap Tanah Dikerjasamakan									986.071,00	587.188.678.638,89	-	18.422.554.461,11
1			Tanah	HPL 15	Ds. Benoa Kec Kuta Selatan Badung	amandemen IV tanggal 18 September 2017	108.150,00	PT. NII	110.313.000.000,00		-	
2			Tanah	HPL 18	Ds. Benoa Kec Kuta Selatan Badung	amandemen IV tanggal 18 September 2017	178.650,00	PT. NII	182.223.000.000,00		-	
3			Tanah	HPL 50	Ds. Benoa Kec Kuta Selatan Badung	amandemen IV tanggal 18 September 2017	2.000,00	PT. NII	2.040.000.000,00		-	
4			Tanah	HPL 52	Ds. Benoa Kec Kuta Selatan Badung	amandemen IV tanggal 18 September 2017	7.500,00	PT. NII	7.650.000.000,00		-	
5			Tanah	HPL 58	Ds. Benoa Kec Kuta Selatan Badung	amandemen IV tanggal 18 September 2017	860,00	PT. NII	877.200.000,00		-	
6			Tanah	HPL 61	Ds. Benoa Kec Kuta Selatan Badung	amandemen IV tanggal 18 September 2017	12.270,00	PT. NII	12.515.400.000,00		-	
7			Tanah	HPL 85	Ds. Benoa Kec Kuta Selatan Badung	amandemen IV tanggal 18 September 2017	89.560,00	PT. NII	91.351.200.000,00		-	
8			Tanah	HPL 94	Ds. Benoa Kec Kuta Selatan Badung	Akta Notaris No. 5 tanggal 17 Desember 2002 dan Perubahan Akta Notaris No. 5 tanggal 13 April 2015	18.800,00	PT. PRBI	19.176.000.000,00		-	
9	1.1.11.1.6	0005	Tanah	HPL 1	Denpasar Selatan/Sanur Kauh	perubahan I nomor 593.1/11224/PPA.Aset tanggal 22 Desember 2015, addendum II Nomor 593.1/661/PPA.Aset tanggal 25-2-2016, perubahan I nomor 593.1/1480/PPA.Aset tanggal 11 Maret 2015	26.000,00	PT.Industri Perhotelan Surya Beach, PT.Sanur Hasta Mitra, PT. Sanur Dinamika Mentari	4.160.000.000,00		-	
10	1.1.11.1.5	0017	Tanah	SHP 20	Jln. Imambonjol (JB School) Badung	perubahan III nomor 593/4222/UPT.P2.BPKAD tgl 6 Agustus 2018	600,00	Putu Kangen Disastra	2.913.000,00		-	
11	1.1.11.1.5	0018	Tanah	SHP 21	Jln. Imambonjol (JB School) Badung	perubahan III nomor 593/4222/UPT.P2.BPKAD tgl 6 Agustus 2018	400,00	Putu Kangen Disastra	1.525.000,00		-	
12	1.1.11.1.5	0016	Tanah	SHP 17	Jln. Imambonjol (JB School) Badung	perubahan III nomor 593/4222/UPT.P2.BPKAD tgl 6 Agustus 2018	3.000,00	Putu Kangen Disastra	9.000.000,00		-	
13	1.1.11.1.5	0015	Tanah	SHP 18	Jln. Imambonjol (JB School) Badung	perubahan III nomor 593/4222/UPT.P2.BPKAD tgl 6 Agustus 2018	2.000,00	Putu Kangen Disastra	7.260.000,00		-	
14	1.1.11.2.7	0001	Tanah	SHP 3	Jln. Raya Kuta 68 Kuta Badung	addendum Akta Notaris 35 tanggal 26 Februari 2014	29.965,00	PT. Kuta Central Manunggal	22.473.750.000,00		-	
15	1.1.11.2.8	0001	Tanah	SHP 6	Ds. Pengambangan Kec. Negara Jembrana	addendum II no 593/4223/upt.p2.bpkad tgl 6 agustus 2018	14.960,00	PT. Intan Sakti	20.000.000,00		-	

No.	Nomor Kode Barang	Nomor Register	Jenis Aset Tetap	Dok. Kepemilikan	Lokasi Aset Tetap	Nomor/tgl perjanjian	Luas (M2)	Penyewa	Posisi Per 31 Desember 2018		penambahan
									Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	
									Nilai		
16	1.1.11.8.1	0081	Tanah	SHP 62	Jln. Ir.Juanda Denpasar Timur	addendum II no 075/1673/KB/B.Tapem Tanggal 8 Januari 2015	1.125,00	Kerjasama Pengelolaan Parkir dg Kota Denpasar	1.290.375.000,00		-
17	1.1.11.2.14	0001	Tanah	SHP 6	Ds. Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Badung	addendum II nomor 593.1/4275/UPT.P2.BPKAD tgl 14 September 2017	32.300,00	PT. Danau Winata Indah	23.256.000.000,00		-
18	1.1.11.1.5	0019	Tanah	SHP 115	Tabanan/Baturitii/Ds.Candikuning	perpanjangan I no 593.1/3721/UPT.P2.BPKAD tgl 28 Juni 2018	7.050,00	Gde Ketut Nugrahita Pendit	24.675.000,00		-
19	1.1.11.1.5	0020	Tanah	SHP 116	Tabanan/Baturitii/Ds.Candikuning	perpanjangan I no 593.1/3721/UPT.P2.BPKAD tgl 28 Juni 2018	14.300,00	Gde Ketut Nugrahita Pendit	50.050.000,00		-
20	1.1.11.1.5	0021	Tanah	SHP 25	Jln. Raya Kuta No.104 Tuban/Badung	Perpanjangan I nomor 593.1/19581/PPA.Aset tanggal 10 Desember 2014	2.500,00	PT. Orange Kharisma Semarak	1.616.718.000,00		-
21	1.1.11.8.1	0082	Tanah	SHP 104	Jln. Sunset Road Kuta Badung	perpanjangan I nomor 593.1/1421/PPA.Aset tanggal 10 Maret 2015	380,00	AAP.Safrudin M	285.000.000,00		-
22	1.1.13.2.6	0004	Tanah	persil 73	Subak semila Kelurahan Pemecutan Denbar selatan SMA PGRI 2 Denpasar	perpanjangan II 593.1/3569/UPTD.PBMD tgl 23 Desember 2019	1.200,00	SMA PGRI Denpasar	687.600.000,00		-
23	1.1.11.2.3	0005	Tanah	SHP 138	Jln. Tantular Denpasar Timur	perpanjangan I 593.1/19597/PPA.Aset tanggal 23 Desember 2014	2.003,00	I Gd Mahardika	1.013.518.000,00		-
24	1.1.11.2.3	0006	Tanah	SHP 12	Jln. Hayam Wuruk No.151 Denpasar	perpanjangan I No.. 593.1/707/PPA.Aset tanggal 29 Februari 2016	4.700,00	PT. Bali Semesta Mandiri	3.995.000,00		-
25	1.1.11.2.3	0007	Tanah	SHP 2	Jln. Dewi Sri Gang I Kuta Badung	perpanjangan I No.593.1/681/PPA.Aset tanggal 26 Februari 2016	1.255,00	Komang Armoni	494.470.000,00		-
26	1.1.11.2.3	0008	Tanah	SHP 54	Jln. Mawar 8 Denpasar	perpanjangan I no 593.1/8074/PPA.Aset tanggal 19 Nopember 2015	1.300,00	Yayasan Pertiwi Dewata	798.200.000,00		-
27	1.1.11.5.2	1480	Tanah	SHP 37	Jln Tukad Sempol Sidakarya Denpasar	perpanjangan I no. 593.1/1613/PPA.Aset tgl 7 Juni 2016	2.865,00	I Ketut Mundra	6.477.765.000,00		-
28	1.1.11.5.3	1871	Tanah	SHP 137	Ds. Dangin Puri Klod depan Dn. Sosial Denpasar	perpanjangan I no 593.1/3443/UPT.P2.BPKAD tgl 12 Juli 2017	1.002,00	DPD PDIP Provinsi Bali	507.012.000,00		-
29	1.1.11.4.1	0078	Tanah	SHP 39	Jln. Anyelir N0. 6 Denpasar	perpanjangan I nomor 593.1/4664/PPA.Aset tgl 16 Nopember 2016	790,00	I Kt Mandia, SE	3.282.450.000,00		-
30	1.1.11.5.2	0755	Tanah	SHP 28	Jln. Sidakarya Denpasar	perpanjangan I nomor 593.1/2594/PPA.Aset tgl 22 Juni 2016	610,00	I Ketut Subitayasa,SE	78.080.000,00		-
31	1.1.11.5.3	1847	Tanah	SHP 64	Jln. Hayam Wuruk N0. 102 Denpasar	perpanjangan I no 593.1/3541/PPA.Aset tgl 2 September 2016	435,00	I Wayan Tingen	201.840.000,00		-
32	1.1.11.5.3	0001	Tanah	SHP 96	Jln. By Pass Ngurah Rai Simpang Siur Kuta Badung	perpanjangan I No 593.1/443/UPT.P2.BPKAD tgl 16 Februari 2017	325,00	Cahaya Wirawan hadi	243.750.000,00		-
33	1.1.11.5.3	1878	Tanah	SHP 145	Jln. Raya Puputan Ds. Dangin Puri Klod Denpasar	Perubahan I no 593.1/4678/PPA.Aset tgl 8 Juni 2015	400,00	Yayasan Kepustakaan Bung Karno	202.400.000,00		-
34	1.1.11.5.3	1866	Tanah	SHP 124	Jln. Raya Puputan Belakang Rumah Makan Bumbu Ds. Dangin Puri Klod Denpasar	perpanjangan I nomor 593.1/534/UPT.P2.BPKAD tanggal 11 April 2017	182,00	Kt Tompel	84.448.000,00		-

No.	Nomor Kode Barang	Nomor Register	Jenis Aset Tetap	Dok. Kepemilikan	Lokasi Aset Tetap	Nomor/tgl perjanjian	Luas (M2)	Penyewa	Posisi Per 31 Desember 2018		penambahan
									Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	
									Nilai		
35	1.1.11.2.3	0015	Tanah	SHP 10	Jln. Pantai Arjuna Legian Kuta Badung	perpanjangan I no 593.1/2845/PPA.Aset tgl 18 Juli 2017	65,00	I Wayan Rumanitik	25.610.000,00		-
36	1.1.11.5.3	1886	Tanah	SHP 153	Jln. Raya Puputan Renon Denpasar	perpanjangan I 593.1/912/UPT.P2.BPKAD tgl 27 Februari 2018	670,00	Yayasan Kepustakaan Bung Karno/utk mess	339.020.000,00		-
37	1.1.11.4.1	164	Tanah	SHP 98	Ds. Ayunan Denpasar	perpanjangan I 593.1/3316/UPT.P2.BPKAD tanggal 14 Juni 2017	300,00	PDAM Badung	2.142.855.000,00		-
38	1.1.11.4.1	165	Tanah	SHP 97	Ds. Ayunan Denpasar	perpanjangan I 593.1/3316/UPT.P2.BPKAD tanggal 14 Juni 2017	200,00	PDAM Badung	1.428.570.000,00		-
39	1.1.11.5.2	1481	Tanah	SHP 3	Subak Teba Abianbase Mengwi Badung	perpanjangan II nomor 593.1/1032/UPTD.PBMD tgl 5 Mei 2019	940,00	IBP. Whaisnawa,SE	77.080.000,00		-
40	1.1.11.1.1	0002	Tanah	SHP 122	Jln. Sunset Road Imambonjol Kuta Badung	593.1/1306/PPA.Aset tanggal 16 April 2013	440,00	PT. Sanatana Swasmita	-		-
41	1.1.11.2.6	0006	Tanah	HPL 1	Padanggalak Ds. Kertalangu Dentim. Denpasar	perubahan II No. 593.1/1864/PPA.Aset (002/GNA/V/2013/PT GNA) tgg 16 Mei 2013	120.450,00	PT. Graha Nusantara Aji	4.336.200.000,00		-
42	1.1.11.5.2	1458	Tanah	SHP 58	Jln. Perancak Tibubeneng Badung	perpanjangan I no 593.1/2020/UPTD.PBMD tgl 27 Agustus 2019	3.395,00	I Made Wiranatha	217.280.000,00		-
43	1.1.11.5.2	1459	Tanah	SHP 59	Jln. Perancak Tibubeneng Badung	perpanjangan I no 593.1/2020/UPTD.PBMD tgl 27 Agustus 2019	1.200,00	I Made Wiranatha	76.800.000,00		-
44	1.1.11.5.2	0743	Tanah	SHP 16	Jln. A yani Gg.Merepati 16 Denpasar	593.1/255/PPA.Aset tgl 3 Pebruari 2014	310,00	Warga Telengan di Karangasem Denpasar	143.840.000,00		-
45	1.1.11.4.1	0104	Tanah	SHP 31	Jln. Juanda Renon Denpasar	593.1/1526/PPA.Aset tgl 16 Mei 2014	5.260,00	Kantor DPD Demokrat Sewa	2.440.640.000,00		-
46	1.1.11.2.3	0017	Tanah	SHP 68	Jln. Moh. Yamin Renon Denpasar	perpanjangan nomor 593.1/1487/PPA.Aset tanggal 12 Maret 2015	369,00	A.A. Ngurah Anom ST	13.284.000,00		-
47	1.1.11.1.10	0003	Tanah	SHP 3	Jln. Nakula (Depan Pura Ulun Tanjung) Kel. Legian Badung	Peralihan no 593.1/4980/PPA.Aset tgl 13 Desember 2016	585,00	I Made Suardana	311.250.000,00		-
48	1.1.11.5.3	0027	Tanah	SHP 11	Jln. Perancak Tibubeneng Badung	perpanjangan I perjanjian nomor 593.1/2130/UPTD.PBMD tanggal 2 September 2019	3.635,00	I Made Wiranatha	3.635.000.000,00		-
49	1.1.11.5.3	0028	Tanah	SHP 12	Jln. Perancak Tibubeneng Badung	perpanjangan I perjanjian nomor 593.1/2130/UPTD.PBMD tanggal 2 September 2019	4.045,00	I Made Wiranatha	4.045.000.000,00		-
50	1.1.11.5.3	0029	Tanah	SHP 13	Jln. Perancak Tibubeneng Badung	perpanjangan I perjanjian nomor 593.1/2130/UPTD.PBMD tanggal 2 September 2019	4.280,00	I Made Wiranatha	4.280.000.000,00		-
51	1.1.11.5.3	2050	Tanah	SHP 38	Jln. Terompong Tanjung Bungkak Kel.Sumerta. Kota Denpasar	593.1/7619/PPA.Aset tgl 24 Juli 2014	2.085,00	Yayasan Korpri/Universitas Warmadewa	967.440.000,00		-
52	1.1.11.2.3	0039	Tanah	SHP 19	Ds. Baler Bale Agung Kec.Negara Kab. Jembrana	peralihan no 593.1/309/UPT.P2.BPKAD tgl 30 Januari 2017	2.770,00	I Made Sukadayasa	8.300.000,00		-
53	1.1.11.2.6	0007	Tanah	SHP 12	Kel.Tanjung Benoa Kec.Kuta Selatan Kab. Badung	perpanjangan I 593.1/2830/UPTD.PBMD tgl 28 Oktober 2019	2.400,00	PT. Genta Buana Lestari	13.814.888,89		4.048.185.111
54	1.1.11.5.3	0016	Tanah	SHP 47	Jln. Raya Nusa Dua Kel.Jimbaran Kec.Kuta Selatan Kab. Badung	593.1/8218/PPA.Aset tgl 15 September 2014	1.500,00	Andreas Tanudjaja	1.080.000.000,00		-

No.	Nomor Kode Barang	Nomor Register	Jenis Aset Tetap	Dok. Kepemilikan	Lokasi Aset Tetap	Nomor/tgl perjanjian	Luas (M2)	Penyewa	Posisi Per 31 Desember 2018		penambahan Nilai
									Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	
									55	1.1.11.2.3	
56	1.1.11.5.3	2072	Tanah	SHP 93	Ds. Dauh Puri Kaja Kec.Denut. Kota Denpasar	593.1/11267/PPA.Aset tgl 20 Nopember 2014	273,00	KSU Bina Prestasi	191.646.000,00		-
57	1.1.11.2.3	0018	Tanah	SHP 13	Kelurahan Legian Kecamatan Kuta Badung	593.1/19567/PPA.Aset tgl 10 Desember 2014	290,00	I Wayan Adnyana	155.730.000,00		-
58	1.1.11.5.3	0015	Tanah	SHP 4	Kelurahan Legian Kecamatan Kuta Badung	593.1/19548/PPA.Aset tgl 15 Desember 2014	560,00	I Nengah Tamba	420.000.000,00		-
59	1.1.11.5.2	0754	Tanah	SHP 27	Jln. Kertawinangun II No.1 Sidakarya Denpasar	593.1/19554/PPA.Aset tgl 24 Desember 2014	365,00	KSU Dana Rahayu	46.720.000,00		-
60	1.1.11.5.2	0445	Tanah	SHP 46	Pantai Leping Takmung Klungkung	593.1/19655/PPA.Aset tgl 26 Desember 2014	2.885,00	PT. Wika	39.970.000,00		-
61	1.1.11.5.2	0446	Tanah	SHP 47	Pantai Leping Takmung Klungkung	593.1/19655/PPA.Aset tgl 26 Desember 2014	3.120,00	PT. Wika	43.680.000,00		-
62	1.1.11.5.2	0449	Tanah	SHP 50	Pantai Leping Takmung Klungkung	593.1/19655/PPA.Aset tgl 26 Desember 2014	3.950,00	PT. Wika	55.300.000,00		-
63	1.1.11.5.2	0450	Tanah	SHP 51	Pantai Leping Takmung Klungkung	593.1/19655/PPA.Aset tgl 26 Desember 2014	1.600,00	PT. Wika	22.400.000,00		-
64	1.1.11.5.2	0451	Tanah	SHP 52	Pantai Leping Takmung Klungkung	593.1/19655/PPA.Aset tgl 26 Desember 2014	600,00	PT. Wika	8.400.000,00		-
65	1.1.11.5.2	0452	Tanah	SHP 53	Pantai Leping Takmung Klungkung	593.1/19655/PPA.Aset tgl 26 Desember 2014	770,00	PT. Wika	10.780.000,00		-
66	1.1.11.5.3	0004	Tanah	SHP 102	Jln. Pulau Mertasari, Kuta Kabupaten Badung	pengalihan nomor 593.1/5653/UPT.P2.BPKAD tgl 22 Januari 2018	1.420,00	Putu Sukesti	1.065.000.000,00		-
67	1.1.11.5.3	1892	Tanah	SHP 29	Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar	593.1/463/PPA.Aset tanggal21 Januari 2015	225,00	LPM Pedungan	28.800.000,00		-
68	1.1.11.5.3	2059	Tanah	SHP 56	Jln. Kerta Dalem Gang III No. 10 Ds. Sidakarya Denpasar	593.1/ 558 / PPA. Aset tanggal 27 Januari 2015	375,00	Simon Sareng	48.000.000,00		-
69	1.1.11.5.3	1879	Tanah	SHP 146	Ds. Dangin Puri Klod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar	593.1/ 1452 / PPA. Aset tanggal 11 Maret 2015	272,00	DPD Partai Gerindra	137.632.000,00		-
70	1.1.11.5.3	1852	Tanah	SHP 79	Ds. Sumerta Klod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar	593.1/ 874 / PPA. Aset tanggal 20 Februari 2015	414,00	Ni Komang Devi	192.096.000,00		-
71	1.1.11.1.6	0001	Tanah	SHP 5	Ds. Canggü Kecamatan Kuta Utara Pinggir Pantai Batumejan Badung	593.1/ 2337 / PPA. Aset tanggal 10 April 2015	3.677,00	PT. Citrakarya Sukses Bersama	3.677.000.000,00		-
72	1.1.11.5.2	0001	Tanah	SHP 155	Persimpangan Jln. Imam Bonjol dan Sunset Road, Kel. Kuta Badung	No. 593.1/4902/PPA.Aset tanggal 24-6-2015, No. 593.1/6927/PPA.Aset tanggal 9-9-2015	400,00	Ketut Sri Sudarmiani,gana paramananda	1.347.800.000,00		-
73	1.1.11.5.3	0006	Tanah	SHP 105	Jln. Sunset Road Kecamatan Kuta Badung Kabupaten Badung	No. 593.1/2329/PPA.Aset tanggal 9-4-2015	165,00	Ananditha Paramaningrum	123.750.000,00		-
74	1.1.11.1.10	0004	Tanah	SHP 1	Ds. Sawan Kec. Sawan Kab. Buleleng	No. 593.1/6980/PPA.Aset tanggal 14-9-2015	250,00	I Putu Sadiarta	1.248.750.000,00		-
75	1.1.11.1.10	0005	Tanah	SHP 2	Ds. Sawan Kec. Sawan Kab. Buleleng	No. 593.1/6980/PPA.Aset tanggal 14-9-2015	250,00	I Putu Sadiarta	1.248.750.000,00		-
76	1.1.11.5.2	1151	Tanah	SHP 4	Ds. Tibubeneng Kec. Kuta Utara Badung	Peralihan No. 593.1/4120/UPT.P2.BPKAD tanggal 31-8-2017	1.505,00	Ketut Sri Sudarmiani	1.505.000.000,00		-
77	1.1.11.5.2	0760	Tanah	SHP 34	Ds. Sidakarya Denpasar Selatan	59,1/289/PPA.Aset tanggal 12-1-2016	235,00	Kades Sidakarya	30.080.000,00		-
78	1.1.11.5.2	0752	Tanah	SHP 25	Ds. Sidakarya Denpasar Selatan	59,1/288/PPA.Aset tanggal 12-1-2016	160,00	Kades Sidakarya	20.480.000,00		-
79	1.1.11.5.2	0750	Tanah	SHP 21	Ds. Sidakarya Denpasar Selatan	No. 593.1/1214/PPA.Aset tanggal 29-03-2016	1.120,00	Universal School	143.360.000,00		-
80	1.1.11.2.3	37	Tanah	SHP 95	Jln. Ayani Denpasar	593.1/1721/PPA.Aset tgl 19 Mei 2016	3.191,00	Pos Bali	3.366.384.000,00		-

No.	Nomor Kode Barang	Nomor Register	Jenis Aset Tetap	Dok. Kepemilikan	Lokasi Aset Tetap	Nomor/tgl perjanjian	Luas (M2)	Penyewa	Posisi Per 31 Desember 2018		penambahan
									Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	
									Nilai		
81	1.1.11.1.4	0022	Tanah	SHP 3	Jln. Tukad Yeh Aya Denpasar	593.1/2436/PPA.Aset tgl 2 Juni 2016	850,00	Made Sueta Satrya Gunaksa	850.000,00		-
82	1.1.11.5.3	1817	Tanah	SHP 13	Denpasar \Denpasar Timur\Ds. Penatih	593.1/4122/PPA.Aset tgl 18 Oktober 2016	1.990,00	Ida Bagus Ngurah Yama	923.360.000,00		-
83	1.1.11.5.3	708	Tanah	SHP 3	Gianyar \Gianyar\Ds. Siangan	593.1/3746/PPA.Aset tgl 22 September 2016	1.450,00	Yayasan Putra Sentana	10.367.500,00		-
84	1.1.11.5.3	1848	Tanah	SHP 66	Denpasar \Denpasar Timur\Ds. Sumerta Kelod	593.1/3543/PPA.Aset tgl 5 September 2016	5.188,00	I Gusti Ngurah Arie Pidada	2.407.232.000,00		-
85	1.1.11.5.3	1875	Tanah	SHP 142	Denpasar \Denpasar Timur\Kel Dangin Puri Klod	593.1/3634/PPA.Aset tgl 15 September 2016	425,00	Yayasan Kepustakaan Bung Karno	215.050.000,00		-
86	1.1.11.5.3	1702	Tanah	SHP 9	Klungkung \Nusa Penida\Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2016	4.400,00	PT. Empora Dhanalaksmi	10.780.000,00		-
87	1.1.11.5.3	1704	Tanah	SHP 11	Klungkung \Nusa Penida\Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2016	2.500,00	PT. Empora Dhanalaksmi	6.125.000,00		-
88	1.1.11.5.3	1705	Tanah	SHP 12	Klungkung \Nusa Penida\Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2016	2.900,00	PT. Empora Dhanalaksmi	7.105.000,00		-
89	1.1.11.5.3	1706	Tanah	SHP 13	Klungkung \Nusa Penida\Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2016	3.320,00	PT. Empora Dhanalaksmi	8.134.000,00		-
90	1.1.11.5.3	1718	Tanah	SHP 25	Klungkung \Nusa Penida\Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2016	3.760,00	PT. Empora Dhanalaksmi	9.212.000,00		-
91	1.1.11.5.3	1720	Tanah	SHP 27	Klungkung \Nusa Penida\Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2016	3.300,00	PT. Empora Dhanalaksmi	8.085.000,00		-
92	1.1.11.5.3	1721	Tanah	SHP 28	Klungkung \Nusa Penida\Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2016	2.000,00	PT. Empora Dhanalaksmi	4.900.000,00		-
93	1.1.11.5.3	1722	Tanah	SHP 29	Klungkung \Nusa Penida\Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2016	2.000,00	PT. Empora Dhanalaksmi	4.900.000,00		-
94	1.1.11.5.3	1723	Tanah	SHP 30	Klungkung \Nusa Penida\Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2016	800,00	PT. Empora Dhanalaksmi	1.960.000,00		-
95	1.1.11.5.3	1724	Tanah	SHP 31	Klungkung \Nusa Penida\Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2016	2.300,00	PT. Empora Dhanalaksmi	5.635.000,00		-
96	1.1.11.5.3	1725	Tanah	SHP 32	Klungkung \Nusa Penida\Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2016	890,00	PT. Empora Dhanalaksmi	2.180.500,00		-
97	1.1.11.5.3	1726	Tanah	SHP 33	Klungkung \Nusa Penida\Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2016	3.930,00	PT. Empora Dhanalaksmi	9.628.500,00		-
98	1.1.11.5.3	1727	Tanah	SHP 34	Klungkung \Nusa Penida\Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2016	800,00	PT. Empora Dhanalaksmi	1.960.000,00		-
99	1.1.11.5.3	1728	Tanah	SHP 35	Klungkung \Nusa Penida\Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2016	1.315,00	PT. Empora Dhanalaksmi	3.221.750,00		-
100	1.1.11.5.3	1729	Tanah	SHP 36	Klungkung \Nusa Penida\Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2016	520,00	PT. Empora Dhanalaksmi	1.274.000,00		-
101	1.1.11.5.3	1730	Tanah	SHP 37	Klungkung \Nusa Penida\Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2016	520,00	PT. Empora Dhanalaksmi	1.274.000,00		-
102	1.1.11.5.3	1731	Tanah	SHP 38	Klungkung \Nusa Penida\Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2017	1.550,00	PT. Empora Dhanalaksmi	3.797.500,00		-
103	1.1.11.5.3	1732	Tanah	SHP 39	Klungkung \Nusa Penida\Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2018	3.635,00	PT. Empora Dhanalaksmi	8.905.750,00		-
104	1.1.11.5.3	1733	Tanah	SHP 40	Klungkung \Nusa Penida\Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2019	2.520,00	PT. Empora Dhanalaksmi	6.174.000,00		-
105	1.1.11.5.3	1734	Tanah	SHP 41	Klungkung \Nusa Penida\Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2020	1.550,00	PT. Empora Dhanalaksmi	3.797.500,00		-
106	1.1.11.5.3	1735	Tanah	SHP 42	Klungkung \Nusa Penida\Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2021	580,00	PT. Empora Dhanalaksmi	1.421.000,00		-
107	1.1.11.5.3	1736	Tanah	SHP 43	Klungkung \Nusa Penida\Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2022	2.290,00	PT. Empora Dhanalaksmi	5.610.500,00		-
108	1.1.11.5.3	1737	Tanah	SHP 44	Klungkung \Nusa Penida\Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2023	1.105,00	PT. Empora Dhanalaksmi	2.707.250,00		-
109	1.1.11.5.3	1738	Tanah	SHP 45	Klungkung \Nusa Penida\Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2024	380,00	PT. Empora Dhanalaksmi	931.000,00		-

No.	Nomor Kode Barang	Nomor Register	Jenis Aset Tetap	Dok. Kepemilikan	Lokasi Aset Tetap	Nomor/tgl perjanjian	Luas (M2)	Penyewa	Posisi Per 31 Desember 2018		penambahan
									Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	
									Nilai		
110	1.1.11.5.3	1739	Tanah	SHP 46	Klungkung \Nusa Penida\Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2025	2.000,00	PT. Empora Dhanalaksmi	4.900.000,00		-
111	1.1.11.5.3	1740	Tanah	SHP 47	Klungkung \Nusa Penida\Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2026	2.590,00	PT. Empora Dhanalaksmi	6.345.500,00		-
112	1.1.11.5.3	1741	Tanah	SHP 48	Klungkung \Nusa Penida\Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2027	2.400,00	PT. Empora Dhanalaksmi	5.880.000,00		-
113	1.1.11.5.3	1742	Tanah	SHP 49	Klungkung \Nusa Penida\Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2028	2.000,00	PT. Empora Dhanalaksmi	4.900.000,00		-
114	1.1.11.5.3	1743	Tanah	SHP 50	Klungkung \Nusa Penida\Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2029	2.000,00	PT. Empora Dhanalaksmi	4.900.000,00		-
115	1.1.11.5.3	1744	Tanah	SHP 51	Klungkung \Nusa Penida\Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2030	2.000,00	PT. Empora Dhanalaksmi	4.900.000,00		-
116	1.1.11.5.3	1766	Tanah	SHP 73	Klungkung \Nusa Penida\Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2031	790,00	PT. Empora Dhanalaksmi	1.935.500,00		-
117	1.1.11.5.3	1767	Tanah	SHP 74	Klungkung \Nusa Penida\Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2032	2.630,00	PT. Empora Dhanalaksmi	6.443.500,00		-
118	1.1.11.5.3	1768	Tanah	SHP 75	Klungkung \Nusa Penida\Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2033	2.970,00	PT. Empora Dhanalaksmi	7.276.500,00		-
119	1.1.11.5.3	1745	Tanah	SHP 52	Klungkung \Nusa Penida\Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2034	2.520,00	PT. Empora Dhanalaksmi	6.174.000,00		-
120	1.1.11.5.3	1746	Tanah	SHP 53	Klungkung \Nusa Penida\Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2035	250,00	PT. Empora Dhanalaksmi	612.500,00		-
121	1.1.11.5.3	1747	Tanah	SHP 54	Klungkung \Nusa Penida\Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2036	195,00	PT. Empora Dhanalaksmi	477.750,00		-
122	1.1.11.5.3	1748	Tanah	SHP 55	Klungkung \Nusa Penida\Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2037	1.160,00	PT. Empora Dhanalaksmi	2.842.000,00		-
123	1.1.11.5.3	1749	Tanah	SHP 56	Klungkung \Nusa Penida\Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2038	1.305,00	PT. Empora Dhanalaksmi	3.197.250,00		-
124	1.1.11.5.3	1750	Tanah	SHP 57	Klungkung \Nusa Penida\Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2039	410,00	PT. Empora Dhanalaksmi	1.004.500,00		-
125	1.1.11.5.3	1752	Tanah	SHP 59	Klungkung \Nusa Penida\Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2040	1.850,00	PT. Empora Dhanalaksmi	4.532.500,00		-
126	1.1.11.5.3	1753	Tanah	SHP 60	Klungkung \Nusa Penida\Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2041	2.360,00	PT. Empora Dhanalaksmi	5.782.000,00		-
127	1.1.11.5.3	1754	Tanah	SHP 61	Klungkung \Nusa Penida\Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2042	320,00	PT. Empora Dhanalaksmi	784.000,00		-
128	1.1.11.5.3	1755	Tanah	SHP 62	Klungkung \Nusa Penida\Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2043	1.385,00	PT. Empora Dhanalaksmi	3.393.250,00		-
129	1.1.11.5.3	1756	Tanah	SHP 63	Klungkung \Nusa Penida\Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2044	305,00	PT. Empora Dhanalaksmi	747.250,00		-
130	1.1.11.5.3	1757	Tanah	SHP 64	Klungkung \Nusa Penida\Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2045	495,00	PT. Empora Dhanalaksmi	1.212.750,00		-
131	1.1.11.5.3	1758	Tanah	SHP 65	Klungkung \Nusa Penida\Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2046	20,00	PT. Empora Dhanalaksmi	49.000,00		-
132	1.1.11.5.3	1759	Tanah	SHP 66	Klungkung \Nusa Penida\Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2047	2.030,00	PT. Empora Dhanalaksmi	4.973.500,00		-
133	1.1.11.5.3	1760	Tanah	SHP 67	Klungkung \Nusa Penida\Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2048	4.375,00	PT. Empora Dhanalaksmi	10.718.750,00		-
134	1.1.11.5.3	1761	Tanah	SHP 68	Klungkung \Nusa Penida\Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2049	1.930,00	PT. Empora Dhanalaksmi	4.728.500,00		-
135	1.1.11.5.3	1762	Tanah	SHP 69	Klungkung \Nusa Penida\Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2050	1.350,00	PT. Empora Dhanalaksmi	3.307.500,00		-
136	1.1.11.5.3	1763	Tanah	SHP 70	Klungkung \Nusa Penida\Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2051	2.640,00	PT. Empora Dhanalaksmi	6.468.000,00		-
137	1.1.11.5.3	1764	Tanah	SHP 71	Klungkung \Nusa Penida\Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2052	1.690,00	PT. Empora Dhanalaksmi	4.140.500,00		-
138	1.1.11.5.3	1765	Tanah	SHP 72	Klungkung \Nusa Penida\Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2053	250,00	PT. Empora Dhanalaksmi	612.500,00		-

No.	Nomor Kode Barang	Nomor Register	Jenis Aset Tetap	Dok. Kepemilikan	Lokasi Aset Tetap	Nomor/tgl perjanjian	Luas (M2)	Penyewa	Posisi Per 31 Desember 2018		penambahan	
									Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan		Nilai
												-
139	1.1.11.5.3	1769	Tanah	SHP 76	Klungkung \Nusa Penida\Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2054	2.000,00	PT. Empora Dhanalaksmi	4.900.000,00		-	
140	1.1.11.5.3	1770	Tanah	SHP 77	Klungkung \Nusa Penida\Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2055	1.240,00	PT. Empora Dhanalaksmi	3.038.000,00		-	
141	1.1.11.5.3	1771	Tanah	SHP 78	Klungkung \Nusa Penida\Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2056	925,00	PT. Empora Dhanalaksmi	2.266.250,00		-	
142	1.1.11.5.3	1773	Tanah	SHP 80	Klungkung \Nusa Penida\Ds. Sakti	593.1/3829/PPA.Aset tgl 30 September 2057	1.100,00	PT. Empora Dhanalaksmi	2.695.000,00		-	
143	1.1.11.5.3	2111	Tanah	SHP 48	Des. Jimbaran/Kuta Selatan/ Badung (Jln. Bay Pass Ngurah Rai Jimbaran)	593.1/1348/PPA.Aset tanggal 18 April 2016	420,00	Yudi Kurnianingsih	302.400.000,00		-	
144	1.1.11.1.11	0011	Tanah	SHP 53	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.1/4692/PPA.Aset tanggal 17 Nopember 2016	450,00	Wayan Rumiada	177.300.000,00		-	
145	1.1.11.5.2	738	Tanah	SHP 4	Denpasar \Denpasar Utara\Ds. Ubung Kaja	593.1/4306/PPA.Aset tgl 31 Oktober 2016	740,00	Yayasan Pendidikan Nusantara	118.400.000,00		-	
146	1.1.11.5.5	1	Tanah	HPL 1	Badung \Kuta Selatan\Ds. Unggasan	593.1/5283/PPA.Aset tgl 29 Desember 2016	34.700,00	PT. Garuda Adhimatra Indonesia	14.261.700.000,00		-	
147	01.01.11.05.03	1885	Tanah	SHP 152	Denpasar \Denpasar Timur\Kel Dangin Puri Klod	593.1/191/UPT.PPA-BPKAD tanggal 18 Januari 2017	220,00	Putu Mahardika	111.320.000,00		-	
148	01.01.11.05.07	3	Tanah	SHP 121	Ds. Kuta, Kc. Kuta, Kab. Badung	593.1/528/UPT.P2.BPKAD tgl 1 Maret 2017	140,00	Gusti Ketut Merta	222.740.000,00		-	
149	01.01.11.05.02	448	Tanah	SHP 49	Klungkung \Banjarangkan\Ds. Takmung	593.1/680/UPT.P2.BPKAD tgl 24 Maret 2017	1.190,00	Made Sandia	54.740.000,00		-	
150	01.01.11.05.03	1873	Tanah	SHP 140	Denpasar \Denpasar Timur\Kel Dangin Puri Klod	593.1/929/UPT.P2.BPKAD tanggal 21 April 2017	275,00	I Made Herdyana Hermawan	139.150.000,00		-	
151	01.01.11.05.03	1858	Tanah	79	Denpasar \Denpasar Timur\Kel Dangin Puri Klod	593.1/1256/UPT.P2.BPKAD tanggal 23 Mei 2017	1.120,00	Suka Duka Korpri Provinsi Bali	1.284.640.000,00		-	
152	01.01.11.01.11	0058	Tanah	100	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.1/4661/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	250,00	I Nyoman Sika	38.375.000,00		-	
153	01.01.11.01.11	0059	Tanah	101	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.1/4675/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	315,00	Kadek Astiti	48.352.500,00		-	
154	01.01.11.01.11	0003	Tanah	45	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.1/4569/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	340,00	dr. Ni Made Arimas. Sp. PK	52.190.000,00		-	
155	01.01.11.01.11	0004	Tanah	46	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.1/4649/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	300,00	Nyoman Sareng	46.050.000,00		-	
156	01.01.11.01.11	0047	Tanah	89	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.1/4639/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	270,00	Gusti Ngurah Yama/ I Gst. Ayu Sri Witari	41.445.000,00		-	
157	01.01.11.01.11	0066	Tanah	108	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.1/4575/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	90,00	Gede Arnawa	13.815.000,00		-	
158	01.01.11.01.11	0042	Tanah	84	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.1/4593/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	85,00	Made Sukamara	13.047.500,00		-	
159	01.01.11.01.11	0073	Tanah	115	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.1/4581/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	380,00	dr Ketut Ngurah Alit W. SPA	58.330.000,00		-	
160	01.01.11.01.11	0065	Tanah	107	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.1/4573/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	600,00	Putu Yastini Inten	92.100.000,00		-	
161	01.01.11.01.11	0010	Tanah	52	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.1/4571/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	225,00	Ni Made Kawini	34.537.500,00		-	
162	01.01.11.01.11	0018	Tanah	60	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.1/4637/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	560,00	Drs. I Nyoman Wisandika	85.960.000,00		-	
163	01.01.11.01.11	0043	Tanah	85	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.1/4677/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	340,00	Ketut Sudibya	52.190.000,00		-	
164	01.01.11.01.11	0061	Tanah	103	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.1/4579/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	100,00	Ketut Susinta Yasa	15.350.000,00		-	
165	01.01.11.01.11	0067	Tanah	109	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.1/5674/UPT.P2.BPKAD tanggal 22 Desember 2017	140,00	PR Mundarto	21.490.000,00		-	
166	01.01.11.01.11	0060	Tanah	102	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.1/4645/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	70,00	Suliyono, Moh Harun	10.745.000,00		-	
167	01.01.11.01.11	0016	Tanah	58	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.1/5689/UPT.P2.BPKAD tanggal 22 Desember 2017	70,00	Ketut Oka/ Gede Wijaya	10.745.000,00		-	

No.	Nomor Kode Barang	Nomor Register	Jenis Aset Tetap	Dok. Kepemilikan	Lokasi Aset Tetap	Nomor/tgl perjanjian	Luas (M2)	Penyewa	Posisi Per 31 Desember 2018		penambahan
									Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	
									Nilai		
168	01.01.11.01.11	0031	Tanah	73	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.1/4643/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	40,00	Suliyono	6.140.000,00		-
169	01.01.11.01.11	0013	Tanah	55	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.1/4647/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	60,00	Suliyono	9.210.000,00		-
170	01.01.11.01.11	0057	Tanah	99	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.1/4589/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	365,00	I Putu Serangan	56.027.500,00		-
171	01.01.11.01.11	0064	Tanah	106	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.1/4621/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	260,00	I Putu Mawat	39.910.000,00		-
172	01.01.11.01.11	0071	Tanah	113	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.1/4659/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	430,00	Made Sutarsana	66.005.000,00		-
173	01.01.11.01.11	0015	Tanah	57	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.1/4597/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	340,00	Drs. Made Sukanata/ Ni Wayan Supadi	52.190.000,00		-
174	01.01.11.01.11	0063	Tanah	105	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.1/4679/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	370,00	Drs. I Nyoman Wenten	56.795.000,00		-
175	01.01.11.01.11	0068	Tanah	110	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.1/5609/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	360,00	Samata Sujarwo	55.260.000,00		-
176	01.01.11.01.11	0045	Tanah	87	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.1/4607/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	355,00	Gusti Agus Erman Jaya	54.492.500,00		-
177	01.01.11.01.11	0012	Tanah	54	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.1/4583/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017, 593.1/5676/UPT.P2.BPKAD tanggal 22 Desember 2017, 593.1/4653/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	415,00	Komang Suhendra, I Ketut Minten, dan Wayan Cenong/I Ketut Indrayasa	63.702.500,00		-
178	01.01.11.01.11	0022	Tanah	64	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.1/4617/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	190,00	Putu Darmawan	29.165.000,00		-
179	01.01.11.01.11	0024	Tanah	66	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.1/4655/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	195,00	Nyoman Swastiningsih	29.932.500,00		-
180	01.01.11.01.11	0030	Tanah	72	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.1/4615/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	385,00	Ketut Katon	59.097.500,00		-
181	01.01.11.01.11	0019	Tanah	61	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.1/4563/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	270,00	Ketut Korea	41.445.000,00		-
182	01.01.11.01.11	0062	Tanah	104	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.1/4683/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	310,00	Sang Made Wisaya/ Sang Ayu Nyoman Mahadewi	47.585.000,00		-
183	01.01.11.01.11	0074	Tanah	116	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.1/4689/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	80,00	Nyoman Gentur	12.280.000,00		-
184	01.01.11.01.11	0039	Tanah	81	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.1/4905/UPT.P2.BPKAD tanggal 30 Oktober 2017	300,00	Made Widiasta Wardana	46.050.000,00		-
185	01.01.11.01.11	0048	Tanah	90	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.1/4901/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	280,00	I Ketut Sukawan	42.980.000,00		-
186	01.01.11.01.11	0026	Tanah	68	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.1/4599/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	290,00	I Made Ardika	44.515.000,00		-
187	01.01.11.01.11	0033	Tanah	75	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.1/4613/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	200,00	I Wayan Sangka	30.700.000,00		-
188	01.01.11.01.11	0036	Tanah	78	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.1/4657/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	90,00	Gede Suwidja	13.815.000,00		-
189	01.01.11.01.11	0053	Tanah	95	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.1/4657/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	310,00	Putu Nova Evendiana	47.585.000,00		-
190	01.01.11.01.11	0023	Tanah	65	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.1/4603/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	330,00	Made Kartini	50.655.000,00		-
191	01.01.11.01.11	0020	Tanah	62	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.1/4601/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	330,00	I Wayan Patriot	50.655.000,00		-
192	01.01.11.01.11	0040	Tanah	82	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.1/4605/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	310,00	Ni Made Gerijani	47.585.000,00		-
193	01.01.11.01.11	0054	Tanah	96	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.1/4595/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	320,00	Made Wilastri	49.120.000,00		-

No.	Nomor Kode Barang	Nomor Register	Jenis Aset Tetap	Dok. Kepemilikan	Lokasi Aset Tetap	Nomor/tgl perjanjian	Luas (M2)	Penyewa	Posisi Per 31 Desember 2018		penambahan Nilai
									Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	
									194	01.01.11.01.11	
195	01.01.11.01.11	0041	Tanah	83	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.1/5680/UPT.P2.BPKAD tanggal 22 Desember 2017	45,00	Putu Wage	6.907.500,00		-
196	01.01.11.01.11	0038	Tanah	80	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.1/4641/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	80,00	Ketut Dana	12.280.000,00		-
197	01.01.11.01.11	0051	Tanah	93	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.1/4635/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	70,00	Made Gari	10.745.000,00		-
198	01.01.11.01.11	0056	Tanah	98	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.1/4617/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	65,00	Ketut Aken / Putu Darmawan	9.977.500,00		-
199	01.01.11.01.11	0006	Tanah	48	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.1/4623/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	50,00	I Nyoman Sudiartawan	7.675.000,00		-
200	01.01.11.01.11	0049	Tanah	91	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.1/4627/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	150,00	Drs. I Nengah Seriawan	23.025.000,00		-
201	01.01.11.01.11	0005	Tanah	47	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.1/4619/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	500,00	Ida Kade Kemenuh	76.750.000,00		-
202	01.01.11.01.11	0069	Tanah	111	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.1/4577/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	450,00	Luh Putu Ariani, ST	177.300.000,00		-
203	01.01.11.01.11	0052	Tanah	94	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.1/4585/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	375,00	Ketut Agus Widiadnyana	57.562.500,00		-
204	01.01.11.01.11	0032	Tanah		Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.1/4633/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	440,00	Ketut Suweca	67.540.000,00		-
205	01.01.11.01.11	0046	Tanah	88	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.1/4559/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	320,00	I Gede Kompyang	49.120.000,00		-
206	01.01.11.01.11	0028	Tanah	70	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.1/4565/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	300,00	Putu Maheri	46.050.000,00		-
207	01.01.11.01.11	0035	Tanah	77	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.1/4631/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	300,00	Made Sutresna/ I Gede Ngurah Arya Sastrawan	46.050.000,00		-
208	01.01.11.01.11	0055	Tanah	97	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.1/4591/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	300,00	I Nyoman Wirna	46.050.000,00		-
209	01.01.11.01.11	0029	Tanah	71	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.1/4629/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	300,00	I Ketut Wiratjana	46.050.000,00		-
210	01.01.11.01.11	0037	Tanah	79	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.1/4685/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	330,00	Djapan	50.655.000,00		-
211	01.01.11.01.11	0017	Tanah	59	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.1/5682/UPT.P2.BPKAD tanggal 22 Desember 2017	340,00	Luh Ayu Rusmiati	52.190.000,00		-
212	01.01.11.01.11	0007	Tanah	49	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.1/4587/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	435,00	Ni Ketut KOMPIANG	66.772.500,00		-
213	01.01.11.01.11	0009	Tanah	51	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.1/4681/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	270,00	Rudolf Neno Baaf	41.445.000,00		-
214	01.01.11.01.11	0014	Tanah	56	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.1/4685/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	370,00	Ni Putu Taman	56.795.000,00		-
215	01.01.11.05.02	1158	Tanah	SHP 14	Badung \Kuta Utara\Ds. Tibubeneng	593.1/4542/UPT.P2.BPKAD tanggal 9 Oktober 2017	3.225,00	PT. Bali Bounty	882.037.500,00		-
216	01.01.11.04.01	106	Tanah	SHP 36	Jln. Surapati Denpasar	593.1/5043/PPA.Aset tgl 15 Desember 2016	967,00	PT. Jamkrida Bali Mandara	519.729.000,00		-
217	01.01.11.01.11	72	Tanah	SHP 114	Kel. Banjar Jawa/Buleleng/ Buleleng	593.1/4687/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2017	550,00	Ir. Wayan Pasek Swastika, M.P	84.425.000,00		-
218	01.01.11.05.04	5	Tanah	SHP 3	Kab.Buleleng\Kec.Seririt\Ds. Tangguwisia	593.1/148/UPT.PPA.BPKAD tanggal 17 Januari 2018, 593.1/146/UPT.P2.BPKAD tanggal 17 Januari 2018, 593.1/146/UPT.P2.BPKAD tanggal 17 Januari 2018	1.400,00	Ketut Jengiskan/ Ketut Mastrining/ Gede Ray Ardian Mancini Yasa	701.407.500,00		-
219	01.01.11.05.03	1598	Tanah	SHP 51	Klungkung\Dawan\Ds. Pesinggahan	593.1/971/UPT.P2.BPKAD tanggal 28 Februari 2018	59,00	Ni Nengah Rapeg	1.563.500,00		-
220	01.01.11.05.03	1601	Tanah	SHP 54	Klungkung\Dawan\Ds. Pesinggahan	593.1/971/UPT.P2.BPKAD tanggal 28 Februari 2018	26,00	Ni Nengah Rapeg	689.000,00		-

No.	Nomor Kode Barang	Nomor Register	Jenis Aset Tetap	Dok. Kepemilikan	Lokasi Aset Tetap	Nomor/tgl perjanjian	Luas (M2)	Penyewa	Posisi Per 31 Desember 2018		penambahan
									Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	
									Nilai		
221	01.01.11.05.03	21	Tanah	SHP 3	Badung\Kuta Utara\Ds. Tibubeneng	perpanjangan I perjanjian nomor 593.1/2130/UPTD.PBMD tanggal 2 September 2019	3.810,00	I Made Wiranatha	1.042.035.000,00		-
222	01.01.11.05.03	625	Tanah	SHP 9	Gianyar\Gianyar\Ds. Lebih	593.1/4294/UPT.P2.BPKAD tanggal 9 Agustus 2018	350,00	Drs. I Nyoman Bawa	2.502.500,00		-
223	01.01.11.01.04	33	Tanah	SHP 86	Banjar Bali Kab.Buleleng	593.1/4327/UPT.P2.BPKAD tanggal 13 Agustus 2018	1.800,00	DPC Organda	540.000.000,00		-
224	01.01.11.05.03	1	Tanah	1	Ds. Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung	593.1/1849/UPT.P2.BPKAD tanggal 18 April 2018	28.200,00	ASPEHORTI BALI	7.769.100.000,00		-
225	01.01.11.05.03	1837	Tanah	16	Denpasar\Denpasar Timur\Kel. Kesiman	593.1/5110/UPT.P2.BPKAD tgl 30 Nopember 2018	1.525,00	gapoktan sedana bakti pertiwi	707.600.000,00		-
226	01.01.11.04.01	83	Tanah	76	Des.Sesetan,Kec.Densel,Kota Dps	593.1/4599/UPT.P2.BPKAD tgl 24 September 2018	1.615,00	Desa Adat Pakraman Sesetan	867.255.000,00		-
227	01.01.06.02.01	3	Tanah	10	Karangasem\Sidemen\Ds. Sidemen	593.1/4588/UPT.P2.BPKAD tanggal 21 September 2018	1.825,00	Perbekel Desa Sinduwati	13.048.750,00		-
228	01.01.11.05.03	1800	Tanah	15	Denpasar\Denpasar Barat\Ds. Pemecutan Klod	perpanjangan II 593.1/3569/UPTD.PBMD tgl 23 Desember 2019	490,00	SMA PGRI 2 DPS	263.130.000,00		-
229	01.01.11.05.02	1692	Tanah	135	Jln. ByPass Ngurah Rai Kelurahan Jimbaran Kabupaten Badung	593.1/3946/UPT.P2.BPKAD tanggal 18 September 2017, 593.1/4350/UPT.P2.BPKAD tanggal 19 September 2017	1.435,00	I B Gde Budi Hartawan, I Wayan Utama Asmara	2.283.085.000,00		-
230	01.01.11.05.01	3	Tanah	81	Jln. Perancah Tibubeneng Badung	perpanjangan I no 593.1/2020/UPTD.PBMD tgl 27 Agustus 2019	2.100,00	I Made Wiranatha	13.983.900.000,00		-
231			Tanah	Persil 56	Desa Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar	593.1/4731/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Oktober 2018	700,00	Ni Wayan Meri	89.600.000,00		-
232	01.01.11.01.04	36	Tanah	SHP 122	Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung	593/1269/UPTD.PBMD tgl 10 Juni 2019	440,00	Gana Paramananda	-		1.647.800.000,00
233	01.01.11.05.03	13	Tanah	SHP 12	Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung	593.1/42/UPT.P2.BPKAD tgl 9 Januari 2019, 593.1/3171/UPTD.PBMD tgl 12 Nopember 2019	1.200,00	I Kadek Andy Asmarajaya, I Kadek Andy Asmarajaya	-		878.400.000,00
234	01.01.11.05.02	1700	Tanah	SHP 53	Desa Baha Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung	593.1/1006/UPTD.PBMD tanggal 2 Mei 2019	105,00	PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung	-		25.777.500,00
235	01.01.11.05.03	369	Tanah	SHP 27	Desa Abiansemal Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung	593.1/1006/UPTD.PBMD tanggal 2 Mei 2019	158,00	PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung	-		10.676.850,00
236	01.01.11.05.03	1597	Tanah	SHP 50	Desa Pesinggahan Kabupaten Klungkung	593.1/1624/UPTD.PBMD tanggal 1 Juli 2019	600,00	Suci Ambarsari	-		15.900.000,00
237	01.01.11.05.03	12	Tanah	SHP 9	Subak Seminyak, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung	593.1/1606/UPTD.PBMD tanggal 10 Juli 2019	1.270,00	TPST Desa Adat Seminyak, TPST Desa Adat Seminyak	-		952.500.000,00
238	01.01.11.05.03	3	Tanah	SHP 101	Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung	593.1/1668/UPTD.PBMD tanggal 15 Juli 2019	900,00	Rudy Alianto	-		675.000.000,00
239	01.01.11.05.03	1877	Tanah	SHP 144	Desa Dangin Puri Klod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar	593.1/2122/UPTD.PBMD tanggal 2 September 2019	245,00	Yayasan Kepustakaan Bung Karno	-		286.160.000,00
240	01.01.11.05.03	23	Tanah	SHP 6	Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung	593.1/2669/UPTD.PBMD tanggal 15 Oktober 2019	1.310,00	PT. Bali Pawiwahan	-		358.285.000,00
241	01.01.11.05.03	24	Tanah	SHP 8	Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung	593.1/2669/UPTD.PBMD tanggal 15 Oktober 2019	1.730,00	PT. Bali Pawiwahan	-		473.155.000,00
242	01.01.11.05.03	25	Tanah	SHP 9	Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung	593.1/2669/UPTD.PBMD tanggal 15 Oktober 2019	5.170,00	PT. Bali Pawiwahan	-		1.413.995.000,00
243	01.01.11.05.01	5	Tanah	SHP 15	Desa Tegat Kertha Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar	593.1/2648/UPTD.PBMD tgl 14 Oktober 2019	2.120,00	Yayasan Corti	-		2.608.660.000,00

No.	Nomor Kode Barang	Nomor Register	Jenis Aset Tetap	Dok. Kepemilikan	Lokasi Aset Tetap	Nomor/tgl perjanjian	Luas (M2)	Penyewa	Posisi Per 31 Desember 2018		penambahan
									Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	
											Nilai
244	01.01.11.05.02	1690	Tanah	SHP 27	Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung	593.1/5084/UPT.P2.BPKAD tgl 28 Nopember 2018, 593.1/5084/UPT.P2.BPKAD tgl 28 Nopember 2018, 593.1/954/UPT.P2.BPKAD tanggal 28 Februari 2018	800,00	Dinda Paramaningtyas, Kadek Yasa, I Nyoman Adnyana,SH,MH	-		4.279.200.000,00
245	01.01.11.05.02	1689	Tanah	SHP 29	Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung	593.1/954/UPT.P2.BPKAD tanggal 28 Februari 2018	140,00	I Nyoman Adnyana,SH,MH	-		748.860.000,00
Jumlah Aset Tetap Gedung Dikerjasamakan									4.883.222.547,00	-1.751.740.586,56	14.367.573,00
1	3.11.1.1.1	0019	Bangunan	-	Jln Juanda no. 2 Denpasar	593.1/1526/PPA.Aset tgl 16 Mei 2014	70,80	Kantor DPD Demokrat Sewa	153.049.776,00	(70.657.979,92)	-
2	3.11.1.1.1	0020	Bangunan	-	Jln Juanda no. 2 Denpasar	593.1/1526/PPA.Aset tgl 16 Mei 2014	270,15	Kantor DPD Demokrat Sewa	861.112.562,00	(397.546.966,13)	-
3	03.11.01.01.01	24	Bangunan	-	Jln. Surapati Denpasar	593.1/5043/PPA.Aset tgl 15 Desember 2016	531,20	PT. Jamkrida Bali Mandara	1.061.147.700,00	(277.666.981,50)	-
4	3.11.1.1.1	25	Bangunan	-	Jl. Ahmad Yani Denpasar (Gedung Wanita Karya Graha)	593.1/1721/PPA.Aset tgl 19 Mei 2016	1.106,00	Pos Bali	2.169.149.140,00	(567.594.024,97)	-
5	3.11.1.14.1	0001	Bangunan	-	Jln. Mohamad Yamin Renon Denpasar	perpanjangan nomor 593.1/1487/PPA.Aset tanggal 12 Maret 2015	369,00	A.A. Ngurah Anom ST	16.081.369,00	(321.627,38)	-
6	3.11.2.4.1	0002	Gedung	-	Jln. Raya Kuta No.104 Tuban/Badung	Perpanjangan I nomor 593.1/19581/PPA.Aset tanggal 10 Desember 2014	740,00	PT. Orange Kharisma Semarak	258.282.000,00	(181.658.340,00)	-
7	3.11.2.2.1	0006	Gedung	-	Jln. Raya Kuta No.104 Tuban/Badung	Perpanjangan I nomor 593.1/19581/PPA.Aset tanggal 10 Desember 2014	70,00	PT. Orange Kharisma Semarak	182.200.000,00	(128.147.333,33)	-
8	3.11.2.2.1	0005	Gedung	-	Jln. Raya Kuta No.104 Tuban/Badung	Perpanjangan I nomor 593.1/19581/PPA.Aset tanggal 10 Desember 2014	70,00	PT. Orange Kharisma Semarak	182.200.000,00	(128.147.333,33)	-
9	3.11.1.1.1	31	Bangunan	-	Jl. Imam Bonjol No. 603 Denpasar.	593/1269/UPTD.PBMD tgl 10 Juni 2019	180,00	Gana Paramananda	-	-	14.367.573,00

Lampiran 26

Mutasi 2019			Posisi Per 31 Desember 2019	
pengurangan	Akumulasi Penyusutan Pengurangan	ekstra kompatibel penambahan	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan
Nilai		nilai		
16.361.066.707,00	906.479.580,09	14.367.573,00	594.133.388.940,00	(845.261.006,47)
14.708.141.000,00	-	-	590.903.092.100,00	-
-			110.313.000.000,00	
-			182.223.000.000,00	
-			2.040.000.000,00	
-			7.650.000.000,00	
-			877.200.000,00	
-			12.515.400.000,00	
-			91.351.200.000,00	
-			19.176.000.000,00	
-			4.160.000.000,00	
-			2.913.000,00	
-			1.525.000,00	
-			9.000.000,00	
-			7.260.000,00	
-			22.473.750.000,00	
-			20.000.000,00	

Mutasi 2019			Posisi Per 31 Desember 2019	
pengurangan	Akumulasi Penyusutan Pengurangan	ekstra kompatibel penambahan	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan
Nilai		nilai		
-			1.290.375.000,00	
-			23.256.000.000,00	
-			24.675.000,00	
-			50.050.000,00	
1.616.718.000,00			-	
285.000.000,00			-	
-			687.600.000,00	
1.013.518.000,00			-	
-			3.995.000,00	
-			494.470.000,00	
-			798.200.000,00	
-			6.477.765.000,00	
-			507.012.000,00	
-			3.282.450.000,00	
-			78.080.000,00	
-			201.840.000,00	
-			243.750.000,00	
-			202.400.000,00	
-			84.448.000,00	

Mutasi 2019			Posisi Per 31 Desember 2019	
pengurangan	Akumulasi Penyusutan Pengurangan	ekstra kompatibel penambahan	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan
Nilai		nilai		
-			25.610.000,00	
-			339.020.000,00	
2.001.105.000,00			141.750.000,00	
1.334.070.000,00			94.500.000,00	
-			77.080.000,00	
-			-	
-			4.336.200.000,00	
-			217.280.000,00	
-			76.800.000,00	
143.840.000,00			-	
2.440.640.000,00			-	
13.284.000,00			-	
311.250.000,00			-	
-			3.635.000.000,00	
-			4.045.000.000,00	
-			4.280.000.000,00	
967.440.000,00			-	
8.300.000,00			-	
-			4.062.000.000,00	
1.080.000.000,00			-	

Mutasi 2019			Posisi Per 31 Desember 2019	
pengurangan	Akumulasi Penyusutan Pengurangan	ekstra kompatibel penambahan	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan
Nilai		nilai		
-			3.718.000,00	
191.646.000,00			-	
155.730.000,00			-	
420.000.000,00			-	
46.720.000,00			-	
39.970.000,00			-	
43.680.000,00			-	
55.300.000,00			-	
22.400.000,00			-	
8.400.000,00			-	
10.780.000,00			-	
-			1.065.000.000,00	
-			28.800.000,00	
-			48.000.000,00	
-			137.632.000,00	
-			192.096.000,00	
-			3.677.000.000,00	
-			1.347.800.000,00	
-			123.750.000,00	
1.248.750.000,00			-	
1.248.750.000,00			-	
-			1.505.000.000,00	
-			30.080.000,00	
-			20.480.000,00	
-			143.360.000,00	
-			3.366.384.000,00	

Mutasi 2019			Posisi Per 31 Desember 2019	
pengurangan	Akumulasi Penyusutan Pengurangan	ekstra kompatibel penambahan	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan
Nilai		nilai		
850.000,00			-	
-			923.360.000,00	
-			10.367.500,00	
-			2.407.232.000,00	
-			215.050.000,00	
-			10.780.000,00	
-			6.125.000,00	
-			7.105.000,00	
-			8.134.000,00	
-			9.212.000,00	
-			8.085.000,00	
-			4.900.000,00	
-			4.900.000,00	
-			1.960.000,00	
-			5.635.000,00	
-			2.180.500,00	
-			9.628.500,00	
-			1.960.000,00	
-			3.221.750,00	
-			1.274.000,00	
-			1.274.000,00	
-			3.797.500,00	
-			8.905.750,00	
-			6.174.000,00	
-			3.797.500,00	
-			1.421.000,00	
-			5.610.500,00	
-			2.707.250,00	
-			931.000,00	

Mutasi 2019			Posisi Per 31 Desember 2019	
pengurangan	Akumulasi Penyusutan Pengurangan	ekstra kompatibel penambahan	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan
Nilai		nilai		
-			4.900.000,00	
-			6.345.500,00	
-			5.880.000,00	
-			4.900.000,00	
-			4.900.000,00	
-			4.900.000,00	
-			1.935.500,00	
-			6.443.500,00	
-			7.276.500,00	
-			6.174.000,00	
-			612.500,00	
-			477.750,00	
-			2.842.000,00	
-			3.197.250,00	
-			1.004.500,00	
-			4.532.500,00	
-			5.782.000,00	
-			784.000,00	
-			3.393.250,00	
-			747.250,00	
-			1.212.750,00	
-			49.000,00	
-			4.973.500,00	
-			10.718.750,00	
-			4.728.500,00	
-			3.307.500,00	
-			6.468.000,00	
-			4.140.500,00	
-			612.500,00	

Mutasi 2019			Posisi Per 31 Desember 2019	
pengurangan	Akumulasi Penyusutan Pengurangan	ekstra kompatibel penambahan	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan
Nilai		nilai		
-			4.900.000,00	
-			3.038.000,00	
-			2.266.250,00	
-			2.695.000,00	
-			302.400.000,00	
-			177.300.000,00	
-			118.400.000,00	
-			14.261.700.000,00	
-			111.320.000,00	
-			222.740.000,00	
-			54.740.000,00	
-			139.150.000,00	
-			1.284.640.000,00	
-			38.375.000,00	
-			48.352.500,00	
-			52.190.000,00	
-			46.050.000,00	
-			41.445.000,00	
-			13.815.000,00	
-			13.047.500,00	
-			58.330.000,00	
-			92.100.000,00	
-			34.537.500,00	
-			85.960.000,00	
-			52.190.000,00	
-			15.350.000,00	
-			21.490.000,00	
-			10.745.000,00	
-			10.745.000,00	

Mutasi 2019			Posisi Per 31 Desember 2019	
pengurangan	Akumulasi Penyusutan Pengurangan	ekstra kompatibel penambahan	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan
Nilai		nilai		
-			6.140.000,00	
-			9.210.000,00	
-			56.027.500,00	
-			39.910.000,00	
-			66.005.000,00	
-			52.190.000,00	
-			56.795.000,00	
-			55.260.000,00	
-			54.492.500,00	
-			63.702.500,00	
-			29.165.000,00	
-			29.932.500,00	
-			59.097.500,00	
-			41.445.000,00	
-			47.585.000,00	
-			12.280.000,00	
-			46.050.000,00	
-			42.980.000,00	
-			44.515.000,00	
-			30.700.000,00	
-			13.815.000,00	
-			47.585.000,00	
-			50.655.000,00	
-			50.655.000,00	
-			47.585.000,00	
-			49.120.000,00	

Mutasi 2019			Posisi Per 31 Desember 2019	
pengurangan	Akumulasi Penyusutan Pengurangan	ekstra kompatibel penambahan	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan
Nilai		nilai		
-			92.100.000,00	
-			6.907.500,00	
-			12.280.000,00	
-			10.745.000,00	
-			9.977.500,00	
-			7.675.000,00	
-			23.025.000,00	
-			76.750.000,00	
-			177.300.000,00	
-			57.562.500,00	
-			67.540.000,00	
-			49.120.000,00	
-			46.050.000,00	
-			46.050.000,00	
-			46.050.000,00	
-			46.050.000,00	
-			50.655.000,00	
-			52.190.000,00	
-			66.772.500,00	
-			41.445.000,00	
-			56.795.000,00	
-			882.037.500,00	
-			519.729.000,00	
-			84.425.000,00	
-			701.407.500,00	
-			1.563.500,00	
-			689.000,00	

Mutasi 2019			Posisi Per 31 Desember 2019	
pengurangan	Akumulasi Penyusutan Pengurangan	ekstra kompatibel penambahan	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan
Nilai		nilai		
-			1.042.035.000,00	
-			2.502.500,00	
-			540.000.000,00	
-			7.769.100.000,00	
-			707.600.000,00	
-			867.255.000,00	
-			13.048.750,00	
-			263.130.000,00	
-			2.283.085.000,00	
-			13.983.900.000,00	
-			89.600.000,00	
-			1.647.800.000,00	
-			878.400.000,00	
-			25.777.500,00	
-			10.676.850,00	
-			15.900.000,00	
-			952.500.000,00	
-			675.000.000,00	
-			286.160.000,00	
-			358.285.000,00	
-			473.155.000,00	
-			1.413.995.000,00	
-			2.608.660.000,00	

Mutasi 2019			Posisi Per 31 Desember 2019	
pengurangan	Akumulasi Penyusutan Pengurangan	ekstra kompatibel penambahan	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan
Nilai		nilai		
-			4.279.200.000,00	
-			748.860.000,00	
1.652.925.707,00	906.479.580,09	14.367.573,00	3.230.296.840,00	-845.261.006,47
153.049.776,00	70.657.979,92		-	
861.112.562,00	397.546.966,13		-	
-			1.061.147.700,00	(277.666.981,50)
-			2.169.149.140,00	(567.594.024,97)
16.081.369,00	321.627,38		-	
258.282.000,00	181.658.340,00		-	
182.200.000,00	128.147.333,33		-	
182.200.000,00	128.147.333,33		-	
0,00		14.367.573,00	-	

Lampiran 28

No	SKPD	Penghapusan/ Penjualan	Mutasi Antar SKPD	Saldo Akhir
	Jumlah	-	-	6.289.862.588,00
1	Sekretariat DPRD			8.488.333,00
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali			-
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali			-
4	Sekretariat Daerah			162.436.400,00
5	DINAS PERBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			3.188.875,00
6	DINAS PERBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN AN			-
7	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			1.704.439.061,00
8	DINAS PERHUBUNGAN			333.333,00
9	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK			168.104.135,00
10	DINAS KESEHATAN			2.153.386.725,00
11	DINAS PENDIDIKAN			22.384.205,00
12	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			-
13	DINAS KEBUDAYAAN			5.100.000,00
14	DINAS SOSIAL			-
15	DINAS TENAGA KERJA DAN ESDM			86.900.000,00
16	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			-
17	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN			1.100.000,00
18	DINAS KEHUTANAN			-
19	DINAS KETAHANAN PANGAN			-
20	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN			-
21	DINAS KOPERASI DAN UKM			-
22	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			39.050.000,00
23	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP			-
24	BADAN PENDAPATAN			45.600.500,00
25	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			174.937.788,00
26	INSPEKTORAT			40.590.733,00
27	BAPPEDA LITBANG			308.824.377,00
28	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			-
29	DINAS PARIWISATA			-
30	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			-
31	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			-
32	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			950.750.000,00
33	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			36.908.333,00
34	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH			212.944.583,00
35	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI			-
36	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN			152.353.333,00
37	DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERE			9.567.974,00
38	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PR			2.473.900,00

**Rincian Mutasi Aset Tetap Rusak Berat
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun Anggaran 2019**

No	SKPD	Saldo Awal							PM
		SALDO AWAL	PM	GB	JIJ	ATL	KDP	ATB	
	Jumlah	40.018.031.922,49	36.666.304.336,49	2.709.566.986,00	97.795.000,00	544.365.600,00	-	-	25.588.699.359,36
1	Sekretariat DPRD	-	-						325.674.314,0000
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	-	-						143.294.999,9970
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	404.561.133,5300	353.311.133,5300			51.250.000,0000			87.765.000,0000
4	Sekretariat Daerah	94.957.500,0000	94.957.500,0000						11.207.378.351,0013
5	DINAS PERMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-						77.671.500,0000
6	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	10.000.000,0000	10.000.000,0000						-
7	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	399.891.132,9634	399.891.132,9634						100.370.000,0000
8	DINAS PERHUBUNGAN	14.120.681.900,0000	14.120.681.900,0000						4.694.956.000,0000
9	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	127.559.090,0000	127.559.090,0000						-
10	DINAS KESEHATAN	1.565.384.566,0000	1.565.384.566,0000						2.044.745.503,0000
11	DINAS PENDIDIKAN	18.863.934.879,0000	15.563.457.293,0000	2.709.566.986,0000	97.795.000,0000	493.115.600,0000			969.766.345,5000
12	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	-	-						108.177.250,0000
13	DINAS KEBUDAYAAN	-	-						2.063.223.827,0000
14	DINAS SOSIAL	-	-						-
15	DINAS TENAGA KERJA DAN ESDM	546.003.600,0000	546.003.600,0000						-
16	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	59.663.000,0000	59.663.000,0000						75.391.000,0000
17	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	188.644.057,0000	188.644.057,0000						-
18	DINAS KEHUTANAN	195.187.000,0000	195.187.000,0000						545.255.925,0000
19	DINAS KETAHANAN PANGAN	150.801.500,0000	150.801.500,0000						-
20	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	226.850.000,0000	226.850.000,0000						133.190.000,0000
21	DINAS KOPERASI DAN UKM	292.131.470,0000	292.131.470,0000						-
22	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	432.330.350,0000	432.330.350,0000						-
23	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	327.003.179,0000	327.003.179,0000						-
24	BADAN PENDAPATAN	-	-						610.511.899,9962
25	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	615.139.828,0000	615.139.828,0000						929.593.331,0008
26	INSPEKTORAT	-	-						483.408.200,0000
27	BAPPEDA LITBANG	787.088.500,0000	787.088.500,0000						-
28	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	528.402.571,0000	528.402.571,0000						-
29	DINAS PARIWISATA	-	-						-
30	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-						253.001.775,0000
31	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-						119.004.000,0000
32	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	21.701.666,0000	21.701.666,0000						-
33	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-						-
34	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-						397.939.901,5000
35	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI	60.115.000,0000	60.115.000,0000						-
36	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	-						218.380.236,3612
37	DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA	-	-						-
38	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROV BALI	-	-						-

Lampiran 29

No	SKPD	nghapusan
	Jumlah	250.671.897,00
1	Sekretariat DPRD	
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	
4	Sekretariat Daerah	
5	DINAS PERMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
6	DINAS PERBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
7	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
8	DINAS PERHUBUNGAN	86.124.897,0000
9	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
10	DINAS KESEHATAN	
11	DINAS PENDIDIKAN	
12	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
13	DINAS KEBUDAYAAN	
14	DINAS SOSIAL	
15	DINAS TENAGA KERJA DAN ESDM	
16	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	164.547.000,0000
17	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
18	DINAS KEHUTANAN	
19	DINAS KETAHANAN PANGAN	
20	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
21	DINAS KOPERASI DAN UKM	
22	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
23	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	
24	BADAN PENDAPATAN	
25	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
26	INSPEKTORAT	
27	BAPPEDA LITBANG	
28	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
29	DINAS PARIWISATA	
30	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
31	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
32	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
33	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
34	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
35	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI	
36	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
37	DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA	
38	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROV BALI	

No	SKPD	Mutasi Kurang														Saldo Akhir			
					Koreksi Saldo Awal Akibat Inventarisasi Aset						Mutasi Antar SKPD					PM	GB	JIJ	
		ATL	KDP	ATB	PM	GB	JIJ	ATL	KDP	ATB	PM	GB	JIJ	ATL	KDP				ATB
	Jumlah	274.767.490,00	-	-	85.000.000,00	1.333.288.117,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.443.898.286,24	1.376.278.868,16	3.786.072.380,00
1	Sekretariat DPRD																-	-	-
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali																143.294.999,9970	-	-
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	51.250.000,0000															87.765.000,0000	-	-
4	Sekretariat Daerah	37.500.000,0000															5.984.113.823,0013	-	-
5	DINAS PERBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																-	-	-
6	DINAS PERBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																-	-	-
7	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																291.945.000,0000	-	-
8	DINAS PERHUBUNGAN																4.474.987.000,0000	-	-
9	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK				85.000.000,0000												-	-	-
10	DINAS KESEHATAN	14.432.000,0000															116.854.000,0000	-	-
11	DINAS PENDIDIKAN	163.585.490,0000															8.316.713.288,2400	1.376.278.868,1600	97.795.000,0000
12	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA																108.177.250,0000	-	-
13	DINAS KEBUDAYAAN																-	-	-
14	DINAS SOSIAL																-	-	-
15	DINAS TENAGA KERJA DAN ESDM																-	-	-
16	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																15.707.000,0000	-	3.688.277.380,0000
17	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN																-	-	-
18	DINAS KEHUTANAN																481.925.925,0000	-	-
19	DINAS KETAHANAN PANGAN																-	-	-
20	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN																-	-	-
21	DINAS KOPERASI DAN UKM																-	-	-
22	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																-	-	-
23	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP																-	-	-
24	BADAN PENDAPATAN																-	-	-
25	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH																189.715.000,0000	-	-
26	INSPEKTORAT																179.887.400,0000	-	-
27	BAPPEDA LITBANG																-	-	-
28	DINAS LINGKUNGAN HIDUP																-	-	-
29	DINAS PARIWISATA																-	-	-
30	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																-	-	-
31	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA																-	-	-
32	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																-	-	-
33	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																-	-	-
34	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	8.000.000,0000															-	-	-
35	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI																-	-	-
36	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN																52.812.600,0000	-	-
37	DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA																-	-	-
38	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROV BALI																-	-	-

Lampiran 29

No	SKPD	r			
		ATL	KDP	ATB	TOTAL
	Jumlah	329.530.110,00	-	-	25.935.779.644,40
1	Sekretariat DPRD	-	-	-	-
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	-	-	-	143.294.999,9970
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	-	-	-	87.765.000,0000
4	Sekretariat Daerah	-	-	-	5.984.113.823,0013
5	DINAS PERMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	-	-
6	DINAS PERBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	-	-	-
7	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	-	-	291.945.000,0000
8	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-	4.474.987.000,0000
9	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	-	-	-	-
10	DINAS KESEHATAN	-	-	-	116.854.000,0000
11	DINAS PENDIDIKAN	329.530.110,0000	-	-	10.120.317.266,4000
12	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	-	-	-	108.177.250,0000
13	DINAS KEBUDAYAAN	-	-	-	-
14	DINAS SOSIAL	-	-	-	-
15	DINAS TENAGA KERJA DAN ESDM	-	-	-	3.688.277.380,0000
16	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	-	15.707.000,0000
17	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	-	-	-	-
18	DINAS KEHUTANAN	-	-	-	481.925.925,0000
19	DINAS KETAHANAN PANGAN	-	-	-	-
20	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	-	-	-	-
21	DINAS KOPERASI DAN UKM	-	-	-	-
22	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	-	-	-
23	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	-	-	-	-
24	BADAN PENDAPATAN	-	-	-	-
25	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-	-	189.715.000,0000
26	INSPEKTORAT	-	-	-	179.887.400,0000
27	BAPPEDA LITBANG	-	-	-	-
28	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-
29	DINAS PARIWISATA	-	-	-	-
30	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	-	-
31	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-	-	-
32	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-	-
33	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	-	-
34	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-	-	-
35	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI	-	-	-	-
36	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	-	-	52.812.600,0000
37	DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA	-	-	-	-
38	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROV BALI	-	-	-	-

No	SKPD	Koreksi Saldo Awal Peyusutan krm Reklas dr. Akm. Aset tetap					Koreksi Saldo Awal Akumulasi krm Mutasi Antar SKPD					Akumulasi RB krm Mutasi Antar SKPD					Saldo Akhir						
		PM	GB	JJI	ATL	KDP	PM	GB	JJI	ATL	KDP	PM	GB	JJI	ATL	KDP	PM	GB	JJI	ATL	KDP	Total	
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.195.921.901,50	286.290.700,00	624.902.365,00	-	-	-	20.107.114.966,50
1	Sekretariat DPRD																-	-	-	-	-	-	
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali																143.295.000,00	-	-	-	-	143.295.000,00	
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali																72.092.679,00	-	-	-	-	72.092.679,00	
4	Sekretariat Daerah																5.983.468.489,00	-	-	-	-	5.983.468.489,00	
5	DINAS PERMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																-	-	-	-	-	-	
6	DINAS PERMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																-	-	-	-	-	-	
7	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																291.798.589,00	-	-	-	-	291.798.589,00	
8	DINAS PERHUBUNGAN																4.474.987.000,00	-	-	-	-	4.474.987.000,00	
9	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK																-	-	-	-	-	-	
10	DINAS KESEHATAN																116.854.000,00	-	-	-	-	116.854.000,00	
11	DINAS PENDIDIKAN																7.086.627.178,50	286.290.700,00	36.318.000,00	-	-	7.409.235.878,50	
12	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																107.783.791,00	-	-	-	-	107.783.791,00	
13	DINAS KEBUDAYAAN																-	-	-	-	-	-	
14	DINAS SOSIAL																-	-	-	-	-	-	
15	DINAS TENAGA KERJA DAN ESDM																-	-	588.584.365,00	-	-	588.584.365,00	
16	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																15.707.000,00	-	-	-	-	15.707.000,00	
17	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN																-	-	-	-	-	-	
18	DINAS KEHUTANAN																480.893.175,00	-	-	-	-	480.893.175,00	
19	DINAS KETAHANAN PANGAN																-	-	-	-	-	-	
20	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN																-	-	-	-	-	-	
21	DINAS KOPERASI DAN UKM																-	-	-	-	-	-	
22	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																-	-	-	-	-	-	
23	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP																-	-	-	-	-	-	
24	BADAN PENDAPATAN																-	-	-	-	-	-	
25	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH																189.715.000,00	-	-	-	-	189.715.000,00	
26	INSPEKTORAT																179.887.400,00	-	-	-	-	179.887.400,00	
27	BAPPEDA LITBANG																-	-	-	-	-	-	
28	DINAS LINGKUNGAN HIDUP																-	-	-	-	-	-	
29	DINAS PARIWISATA																-	-	-	-	-	-	
30	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																-	-	-	-	-	-	
31	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA																-	-	-	-	-	-	
32	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																-	-	-	-	-	-	
33	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																-	-	-	-	-	-	
34	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH																-	-	-	-	-	-	
35	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI																-	-	-	-	-	-	
36	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN																52.812.600,00	-	-	-	-	52.812.600,00	
37	DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA																-	-	-	-	-	-	
38	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROV BALI																-	-	-	-	-	-	

Lampiran 31

No	SKPD		
		KDP	Total
	Jumlah	27.048.506.000,00	215.323.214.999,00
1	Sekretariat DPRD	-	-
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	-	-
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	-	-
4	Sekretariat Daerah	-	5.484.458.000,00
5	DINAS PERMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-
6	DINAS PERBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	-
7	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	182.790.250.999,00
8	DINAS PERHUBUNGAN	27.048.506.000,00	27.048.506.000,00
9	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	-	-
10	DINAS KESEHATAN	-	-
11	RUMAH SAKIT JIWA BANGLI	-	-
12	RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA	-	-
13	DINAS PENDIDIKAN	-	-
14	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	-	-
15	DINAS KEBUDAYAAN	-	-
16	DINAS SOSIAL	-	-
17	DINAS TENAGA KERJA DAN ESDM	-	-
18	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-
19	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	-	-
20	DINAS KEHUTANAN	-	-
21	DINAS KETAHANAN PANGAN	-	-
22	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	-	-
23	DINAS KOPERASI DAN UKM	-	-
24	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	-
25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	-	-
26	BADAN PENDAPATAN	-	-
27	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-
28	INSPEKTORAT	-	-
29	BAPPEDA LITBANG	-	-
30	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-
31	DINAS PARIWISATA	-	-
32	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-
33	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-
34	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-
35	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-
36	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-
37	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI	-	-
38	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	-
39	DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA	-	-
40	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROV BALI	-	-

Pemerintah Provinsi Bali
Daftar Aset lain lain Lainnya
Tahun Anggaran 2019

No	SKPD	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Saldo Akhir
	Jumlah	3.780.542.511,00	4.217.513.784,62	7.998.056.295,62
1	Sekretariat DPRD	-	-	-
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	-	-	-
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	-	-	-
4	Sekretariat Daerah	-	-	-
5	DINAS PERMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	-
6	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	-	-
7	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	-	-
8	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-
9	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	-	-	-
10	DINAS KESEHATAN	-	-	-
11	RUMAH SAKIT JIWA BANGLI	-	-	-
12	RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA	-	-	-
13	DINAS PENDIDIKAN	-	-	-
14	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	-	-	-
15	DINAS KEBUDAYAAN	-	-	-
16	DINAS SOSIAL	-	-	-
17	DINAS TENAGA KERJA DAN ESDM	459.947.311,00	4.217.513.784,62	4.677.461.095,62
18	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.320.595.200,00	-	3.320.595.200,00
19	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	-	-	-
20	DINAS KEHUTANAN	-	-	-
21	DINAS KETAHANAN PANGAN	-	-	-
22	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	-	-	-
23	DINAS KOPERASI DAN UKM	-	-	-
24	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	-	-
25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	-	-	-
26	BADAN PENDAPATAN	-	-	-
27	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-	-
28	INSPEKTORAT	-	-	-
29	BAPPEDA LITBANG	-	-	-
30	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-
31	DINAS PARIWISATA	-	-	-
32	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	-
33	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-	-
34	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-
35	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	-
36	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-	-

37	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI	-	-	-
38	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	-	-
39	DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA	-	-	-
40	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROV BALI	-	-	-

**Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang akan Dihilangkan
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2019**

No	Kode Aset	No. Register	Jenis Aset	Lokasi	Perolehan	Nilai Perolehan	Sisa Manfaat		Akumulasi Penyusutan Per 1 Januari 2018	Penyusutan		Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2018	Nilai Buku
							Tahun	Bulan		Semester I	Semester II		
Jumlah						182.790.250.999,00			77.109.835.712,00	1.564.779.348,00	1.553.341.515,00	80.227.956.575,00	102.562.294.424,00
1	4.13.1.2.1	31	Jalan Propinsi Kelas I	Jl Darmawangsa (Semarapura)	12 2000	257.400.000,00	0	0	257.400.000,00	0,00	0,00	257.400.000,00	0,00
2	4.13.1.2.1	32	Jalan Propinsi Kelas I	Jl Jempiring (Semarapura)	12 2000	471.900.000,00	0	0	471.900.000,00	0,00	0,00	471.900.000,00	0,00
3	4.13.1.2.1	36	Jalan Propinsi Kelas I	Simp Mengwi-Blahkiuh	12 2000	11.932.362.000,00	0	0	11.932.362.000,00	0,00	0,00	11.932.362.000,00	0,00
4	4.13.1.2.1	59	Jalan Propinsi Kelas I	Jimbaran-Uluwatu	12 2000	1.796.342.000,00	0	0	1.796.342.000,00	0,00	0,00	1.796.342.000,00	0,00
5	4.13.1.2.1	62	Jalan Propinsi Kelas I	Jl Gunung Merapi (Semarapura)	12 2000	546.975.000,00	0	0	546.975.000,00	0,00	0,00	546.975.000,00	0,00
6	4.13.1.2.1	77	Jalan Propinsi Kelas I	Jalan Nusa Lembongan	12 2006	250.000.000,00	0	0	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00
7	4.13.1.2.1	83	Jalan Propinsi Kelas I	Jalan dan Jembatan Tangkup (lanjutan)	12 2007	2.678.357.000,00	0	0	2.678.357.000,00	0,00	0,00	2.678.357.000,00	0,00
8	4.13.1.2.1	84	Jalan Propinsi Kelas I	Jalan Menuju Pura Bisbis	12 2007	1.740.000.000,00	0	0	1.740.000.000,00	0,00	0,00	1.740.000.000,00	0,00
9	4.13.1.2.1	85	Jalan Propinsi Kelas I	Jalan Menuju Pura Taman sari/Toh Langkir	12 2007	2.980.000.000,00	0	0	2.980.000.000,00	0,00	0,00	2.980.000.000,00	0,00
10	4.13.1.2.1	86	Jalan Propinsi Kelas I	Jalan Pujungan	12 2007	749.999.000,00	0	0	749.999.000,00	0,00	0,00	749.999.000,00	0,00
11	4.13.1.2.1	89	Jalan Propinsi Kelas I	Jalan Tampaksiring - Selat	12 2007	5.348.957.000,00	0	0	5.348.957.000,00	0,00	0,00	5.348.957.000,00	0,00
12	4.13.1.2.1	91	Jalan Propinsi Kelas I	Jln. Menuju SD No.8 Seraya , areal parkir Pura Bisbis	12 2007	119.652.000,00	0	0	119.652.000,00	0,00	0,00	119.652.000,00	0,00
13	4.13.1.2.1	92	Jalan Propinsi Kelas I	Dusun Kubukelod Desa Bungkulun	12 2007	308.104.000,00	0	0	308.104.000,00	0,00	0,00	308.104.000,00	0,00
14	4.13.1.2.1	103	Jalan Propinsi Kelas I	Kampus UNHI Denpasar	12 2008	56.746.000,00	0	0	51.544.283,00	2.837.300,00	2.364.417,00	56.746.000,00	0,00
15	4.13.1.2.1	110	Jalan Propinsi Kelas I	Jalan lintas Undisan-Pura Dalem Undisan di Kabupaten Bangli	12 2008	565.635.000,00	0	0	513.785.125,00	28.281.750,00	23.568.125,00	565.635.000,00	0,00
16	4.13.1.2.1	113	Jalan Propinsi Kelas I	Bangli	12 2009	213.552.454,00	0	11	172.621.567,00	10.677.623,00	10.677.623,00	193.976.813,00	19.575.641,00
17	4.13.1.2.1	123	Jalan Propinsi Kelas I	Bangli	12 2011	1.873.803.000,00	2	11	1.139.896.825,00	93.690.150,00	93.690.150,00	1.327.277.125,00	546.525.875,00
18	4.13.1.2.8	2	Jalan Propinsi Lokal	Kampus Universitas Udayana Denpasar	12 2008	745.359.000,00	0	0	677.034.425,00	37.267.950,00	31.056.625,00	745.359.000,00	0,00
19	4.13.1.2.10	2	Jalan Propinsi Lain-lain	Buleleng	12 2009	49.515.000,00	0	11	40.024.625,00	2.475.750,00	2.475.750,00	44.976.125,00	4.538.875,00
20	4.13.1.2.11	1	Lampu Lalulintas dan Marka Jalan Provinsi	Tohpati - Kusamba	12 2006	920.000.000,00	0	0	920.000.000,00	0,00	0,00	920.000.000,00	0,00
21	4.13.1.2.11	3	Lampu Lalulintas dan Marka Jalan Provinsi	Tohpati - Kusamba	12 2007	56.032.000,00	0	0	56.032.000,00	0,00	0,00	56.032.000,00	0,00
22	4.13.1.2.11	4	Lampu Lalulintas dan Marka Jalan Provinsi	Tohpati - Kusamba	12 2007	932.500.000,00	0	0	932.500.000,00	0,00	0,00	932.500.000,00	0,00
23	4.13.1.3.6	1	Jalan Kabupaten Lokal	Jalan Arteri Sanglah-Sumuh	12 1995	583.718.000,00	0	0	583.718.000,00	0,00	0,00	583.718.000,00	0,00
24	4.13.1.3.6	3	Jalan Kabupaten Lokal	Bangli/Sidem Bunut	12 1997	94.887.000,00	0	0	94.887.000,00	0,00	0,00	94.887.000,00	0,00
25	4.13.1.3.6	4	Jalan Kabupaten Lokal	Buleleng/Pengaringan	12 1997	37.906.000,00	0	0	37.906.000,00	0,00	0,00	37.906.000,00	0,00
26	4.13.1.3.6	6	Jalan Kabupaten Lokal	Gianyar / Medahan	12 1997	28.400.000,00	0	0	28.400.000,00	0,00	0,00	28.400.000,00	0,00
27	4.13.1.3.6	7	Jalan Kabupaten Lokal	Klungkung/Banjarangkang	12 1997	94.880.000,00	0	0	94.880.000,00	0,00	0,00	94.880.000,00	0,00
28	4.13.1.3.6	8	Jalan Kabupaten Lokal	Tabanan Sungsang	12 1997	70.150.000,00	0	0	70.150.000,00	0,00	0,00	70.150.000,00	0,00
29	4.13.1.3.6	10	Jalan Kabupaten Lokal	Jembrana /Sidem Bunut	12 2000	117.660.000,00	0	0	117.660.000,00	0,00	0,00	117.660.000,00	0,00
30	4.13.1.3.6	11	Jalan Kabupaten Lokal	Jembrana /Tibu Beleng	12 2000	151.536.000,00	0	0	151.536.000,00	0,00	0,00	151.536.000,00	0,00
31	4.13.1.3.6	12	Jalan Kabupaten Lokal	Klungkung/ Aan Dangin	12 2000	67.000.000,00	0	0	67.000.000,00	0,00	0,00	67.000.000,00	0,00
32	4.13.1.3.6	14	Jalan Kabupaten Lokal	Buleleng/Busungbiu/tunju	12 2001	236.600.000,00	0	0	236.600.000,00	0,00	0,00	236.600.000,00	0,00
33	4.13.1.3.6	15	Jalan Kabupaten Lokal	Buleleng/Puluran&Badung Bulan	12 2001	187.230.000,00	0	0	187.230.000,00	0,00	0,00	187.230.000,00	0,00
34	4.13.1.3.6	16	Jalan Kabupaten Lokal	Buleleng/Sankan Gunung	12 2001	123.173.000,00	0	0	123.173.000,00	0,00	0,00	123.173.000,00	0,00
35	4.13.1.3.6	17	Jalan Kabupaten Lokal	Buleleng/Tirta Gangga	12 2001	117.625.000,00	0	0	117.625.000,00	0,00	0,00	117.625.000,00	0,00
36	4.13.1.3.6	18	Jalan Kabupaten Lokal	Sinagaraja	12 2001	88.000.000,00	0	0	88.000.000,00	0,00	0,00	88.000.000,00	0,00
37	4.13.1.3.6	19	Jalan Kabupaten Lokal	Belok-Sidan II	12 2002	14.111.300.000,00	0	0	14.111.300.000,00	0,00	0,00	14.111.300.000,00	0,00
38	4.13.1.3.6	22	Jalan Kabupaten Lokal	Kedungdung Menange	12 2002	1.592.019.000,00	0	0	1.592.019.000,00	0,00	0,00	1.592.019.000,00	0,00
39	4.13.1.3.6	24	Jalan Kabupaten Lokal	Lingkar Bukit (Badung)	12 2002	2.403.098.000,00	0	0	2.403.098.000,00	0,00	0,00	2.403.098.000,00	0,00
40	4.13.1.3.6	25	Jalan Kabupaten Lokal	Tohpati - Kusamba	12 2002	1.604.805.000,00	0	0	1.604.805.000,00	0,00	0,00	1.604.805.000,00	0,00
41	4.13.1.3.6	28	Jalan Kabupaten Lokal	Jln. Tegalinggah-Pura Muncak Sari Km.36.80 & Km.39.70 (kab.Tabanan)	12 2007	64.718.000,00	0	0	64.718.000,00	0,00	0,00	64.718.000,00	0,00
42	4.13.2.2.1	2	Jembatan Beton Propinsi	Tk Bukit Tittiles	12 1954	15.000.000,00	0	0	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
43	4.13.2.2.1	6	Jembatan Beton Propinsi	Tk Banyu Asri II	12 1954	129.910.000,00	0	0	129.910.000,00	0,00	0,00	129.910.000,00	0,00
44	4.13.2.2.1	7	Jembatan Beton Propinsi	Tk Brombang II	12 1954	15.000.000,00	0	0	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
45	4.13.2.2.1	8	Jembatan Beton Propinsi	Tk Grokqak II	12 1954	69.500.000,00	0	0	69.500.000,00	0,00	0,00	69.500.000,00	0,00
46	4.13.2.2.1	9	Jembatan Beton Propinsi	Tk Grokqak III	12 1954	12.100.000,00	0	0	12.100.000,00	0,00	0,00	12.100.000,00	0,00
47	4.13.2.2.1	10	Jembatan Beton Propinsi	Tk Pemuteran	12 1954	12.000.000,00	0	0	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00
48	4.13.2.2.1	11	Jembatan Beton Propinsi	Tk Pejarakan I	12 1954	17.200.000,00	0	0	17.200.000,00	0,00	0,00	17.200.000,00	0,00
49	4.13.2.2.1	12	Jembatan Beton Propinsi	Tk Pejarakan II	12 1954	24.000.000,00	0	0	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00

No	Kode Aset	No. Register	Jenis Aset	Lokasi	Perolehan	Nilai Perolehan	Sisa Manfaat		Akumulasi Penyusutan Per 1 Januari 2018	Penyusutan		Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2018	Nilai Buku	
							Tahun	Bulan		Semester I	Semester II			
50	4.13.2.2.1	13	Jembatan Beton Propinsi	Tk Pejajaran III	12	1954	16.000.000,00	0	0	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00
51	4.13.2.2.1	14	Jembatan Beton Propinsi	Tk Tegak Muara	12	1954	24.000.000,00	0	0	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00
52	4.13.2.2.1	15	Jembatan Beton Propinsi	Tk Lebuah Lalang	12	1954	24.000.000,00	0	0	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00
53	4.13.2.2.1	16	Jembatan Beton Propinsi	Tk Sumber Batok III	12	1954	49.861.000,00	0	0	49.861.000,00	0,00	0,00	49.861.000,00	0,00
54	4.13.2.2.1	17	Jembatan Beton Propinsi	Tk Sumber Batok IV	12	1954	12.000.000,00	0	0	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00
55	4.13.2.2.1	18	Jembatan Beton Propinsi	Tk Gondol I	12	1954	15.000.000,00	0	0	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
56	4.13.2.2.1	19	Jembatan Beton Propinsi	Tk Yeh Aya	12	1954	20.000.000,00	0	0	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
57	4.13.2.2.1	23	Jembatan Beton Propinsi	Tk Banyumala	12	1954	92.500.000,00	0	0	92.500.000,00	0,00	0,00	92.500.000,00	0,00
58	4.13.2.2.1	24	Jembatan Beton Propinsi	Tk Yeh Kuning	12	1954	8.391.000,00	0	0	8.391.000,00	0,00	0,00	8.391.000,00	0,00
59	4.13.2.2.1	25	Jembatan Beton Propinsi	Tk Temukus I	12	1954	8.391.000,00	0	0	8.391.000,00	0,00	0,00	8.391.000,00	0,00
60	4.13.2.2.1	26	Jembatan Beton Propinsi	Tk Langking	12	1954	23.500.000,00	0	0	23.500.000,00	0,00	0,00	23.500.000,00	0,00
61	4.13.2.2.1	27	Jembatan Beton Propinsi	Tk Bangka	12	1954	84.376.000,00	0	0	84.376.000,00	0,00	0,00	84.376.000,00	0,00
62	4.13.2.2.1	28	Jembatan Beton Propinsi	Tk Tubuh	12	1954	7.500.000,00	0	0	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00
63	4.13.2.2.1	29	Jembatan Beton Propinsi	Tk Bedugul	12	1954	6.000.000,00	0	0	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
64	4.13.2.2.1	30	Jembatan Beton Propinsi	Tk Kambing	12	1954	17.157.000,00	0	0	17.157.000,00	0,00	0,00	17.157.000,00	0,00
65	4.13.2.2.1	31	Jembatan Beton Propinsi	Tk Celincing	12	1954	2.500.000,00	0	0	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
66	4.13.2.2.1	32	Jembatan Beton Propinsi	Tk Cangu	12	1954	6.000.000,00	0	0	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
67	4.13.2.2.1	33	Jembatan Beton Propinsi	Tk Batang	12	1954	15.600.000,00	0	0	15.600.000,00	0,00	0,00	15.600.000,00	0,00
68	4.13.2.2.1	34	Jembatan Beton Propinsi	Tk Galar	12	1954	35.600.000,00	0	0	35.600.000,00	0,00	0,00	35.600.000,00	0,00
69	4.13.2.2.1	35	Jembatan Beton Propinsi	Tk Bui	12	1954	32.000.000,00	0	0	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00	0,00
70	4.13.2.2.1	36	Jembatan Beton Propinsi	Bon Bui	12	1954	24.600.000,00	0	0	24.600.000,00	0,00	0,00	24.600.000,00	0,00
71	4.13.2.2.1	37	Jembatan Beton Propinsi	Tk Tambak	12	1954	10.500.000,00	0	0	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00	0,00
72	4.13.2.2.1	38	Jembatan Beton Propinsi	Tk Puseh	12	1954	13.500.000,00	0	0	13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00	0,00
73	4.13.2.2.1	40	Jembatan Beton Propinsi	Tk Pintu	12	1954	24.000.000,00	0	0	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00
74	4.13.2.2.1	41	Jembatan Beton Propinsi	Tk Praya	12	1954	31.775.000,00	0	0	31.775.000,00	0,00	0,00	31.775.000,00	0,00
75	4.13.2.2.1	42	Jembatan Beton Propinsi	Tk Pengawan	12	1954	30.750.000,00	0	0	30.750.000,00	0,00	0,00	30.750.000,00	0,00
76	4.13.2.2.1	43	Jembatan Beton Propinsi	Tk Eya	12	1954	9.000.000,00	0	0	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00
77	4.13.2.2.1	44	Jembatan Beton Propinsi	Tk Berata	12	1954	10.886.000,00	0	0	10.886.000,00	0,00	0,00	10.886.000,00	0,00
78	4.13.2.2.1	45	Jembatan Beton Propinsi	Tk Tenga	12	1954	9.977.000,00	0	0	9.977.000,00	0,00	0,00	9.977.000,00	0,00
79	4.13.2.2.1	46	Jembatan Beton Propinsi	Tk Banda	12	1958	24.000.000,00	0	0	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00
80	4.13.2.2.1	47	Jembatan Beton Propinsi	Tk Takmung I	12	1958	11.000.000,00	0	0	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00
81	4.13.2.2.1	48	Jembatan Beton Propinsi	Tk Takmung II	12	1958	24.000.000,00	0	0	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00
82	4.13.2.2.1	49	Jembatan Beton Propinsi	Tk Tib Cau	12	1958	38.000.000,00	0	0	38.000.000,00	0,00	0,00	38.000.000,00	0,00
83	4.13.2.2.1	50	Jembatan Beton Propinsi	Tk Pendem	12	1958	15.000.000,00	0	0	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
84	4.13.2.2.1	51	Jembatan Beton Propinsi	Tk Cutak	12	1958	14.000.000,00	0	0	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00
85	4.13.2.2.1	52	Jembatan Beton Propinsi	Tk Delod Pangeh	12	1958	30.000.000,00	0	0	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
86	4.13.2.2.1	53	Jembatan Beton Propinsi	Tk Kutuh	12	1958	26.500.000,00	0	0	26.500.000,00	0,00	0,00	26.500.000,00	0,00
87	4.13.2.2.1	54	Jembatan Beton Propinsi	Tk Candi Negara	12	1958	33.000.000,00	0	0	33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00	0,00
88	4.13.2.2.1	57	Jembatan Beton Propinsi	Tk Pengumbahan	12	1958	116.000.000,00	0	0	116.000.000,00	0,00	0,00	116.000.000,00	0,00
89	4.13.2.2.1	58	Jembatan Beton Propinsi	Tk Buluh	12	1958	10.000.000,00	0	0	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
90	4.13.2.2.1	59	Jembatan Beton Propinsi	Tk Pengojangan	12	1958	19.200.000,00	0	0	19.200.000,00	0,00	0,00	19.200.000,00	0,00
91	4.13.2.2.1	60	Jembatan Beton Propinsi	Tk Pedung	12	1958	27.000.000,00	0	0	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	0,00
92	4.13.2.2.1	61	Jembatan Beton Propinsi	Tk Lawan	12	1958	32.000.000,00	0	0	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00	0,00
93	4.13.2.2.1	62	Jembatan Beton Propinsi	Tk Teluk Terima I	12	1959	25.000.000,00	0	0	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00
94	4.13.2.2.1	63	Jembatan Beton Propinsi	Tk Teluk Terima II	12	1959	30.000.000,00	0	0	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
95	4.13.2.2.1	64	Jembatan Beton Propinsi	Tk Sumber Batok I	12	1959	30.000.000,00	0	0	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
96	4.13.2.2.1	65	Jembatan Beton Propinsi	Tk Sumber Batok II	12	1959	72.420.000,00	0	0	72.420.000,00	0,00	0,00	72.420.000,00	0,00
97	4.13.2.2.1	66	Jembatan Beton Propinsi	Tk Tegak	12	1959	26.750.000,00	0	0	26.750.000,00	0,00	0,00	26.750.000,00	0,00
98	4.13.2.2.1	67	Jembatan Beton Propinsi	Tk Teluk Terima	12	1960	84.000.000,00	0	0	84.000.000,00	0,00	0,00	84.000.000,00	0,00
99	4.13.2.2.1	68	Jembatan Beton Propinsi	Tk Ketapang	12	1960	25.000.000,00	0	0	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00
100	4.13.2.2.1	69	Jembatan Beton Propinsi	Tk Sampalan	12	1965	35.000.000,00	0	0	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00
101	4.13.2.2.1	72	Jembatan Beton Propinsi	Tk Hea	12	1968	24.000.000,00	0	0	23.560.000,00	240.000,00	200.000,00	24.000.000,00	0,00
102	4.13.2.2.1	73	Jembatan Beton Propinsi	Tk Kali Untu	12	1969	16.250.000,00	0	11	15.627.083,00	162.500,00	162.500,00	15.952.083,00	297.917,00
103	4.13.2.2.1	74	Jembatan Beton Propinsi	Tk Bugbug	12	1974	96.000.000,00	5	11	82.720.000,00	960.000,00	960.000,00	84.640.000,00	11.360.000,00
104	4.13.2.2.1	76	Jembatan Beton Propinsi	Tk Sumber Batok V	12	1975	25.000.000,00	6	11	21.041.667,00	250.000,00	250.000,00	21.541.667,00	3.458.333,00
105	4.13.2.2.1	77	Jembatan Beton Propinsi	Tk Sumber Batok VI	12	1975	35.496.000,00	6	11	29.875.800,00	354.960,00	354.960,00	30.585.720,00	4.910.280,00
106	4.13.2.2.1	78	Jembatan Beton Propinsi	Tk Sumber Batok VII	12	1975	15.000.000,00	6	11	12.625.000,00	150.000,00	150.000,00	12.825.000,00	2.075.000,00
107	4.13.2.2.1	79	Jembatan Beton Propinsi	Tk Sumber Batok VIII	12	1975	15.000.000,00	6	11	12.625.000,00	150.000,00	150.000,00	12.825.000,00	2.075.000,00
108	4.13.2.2.1	80	Jembatan Beton Propinsi	Tk Sumber Batok IX	12	1975	66.500.000,00	6	11	55.970.833,00	665.000,00	665.000,00	57.300.833,00	9.199.167,00
109	4.13.2.2.1	81	Jembatan Beton Propinsi	Tk Batok	12	1975	25.000.000,00	6	11	21.041.667,00	250.000,00	250.000,00	21.541.667,00	3.458.333,00
110	4.13.2.2.1	82	Jembatan Beton Propinsi	Tk Kelompok I	12	1975	21.000.000,00	6	11	17.675.000,00	210.000,00	210.000,00	18.095.000,00	2.905.000,00
111	4.13.2.2.1	83	Jembatan Beton Propinsi	Tk Kelompok II	12	1975	25.000.000,00	6	11	21.041.667,00	250.000,00	250.000,00	21.541.667,00	3.458.333,00
112	4.13.2.2.1	84	Jembatan Beton Propinsi	Tk Kelompok III	12	1975	26.000.000,00	6	11	21.883.333,00	260.000,00	260.000,00	22.403.333,00	3.596.667,00
113	4.13.2.2.1	85	Jembatan Beton Propinsi	Tk Kelompok IV	12	1975	15.000.000,00	6	11	12.625.000,00	150.000,00	150.000,00	12.825.000,00	2.075.000,00
114	4.13.2.2.1	86	Jembatan Beton Propinsi	Tk Bunut Panggang	12	1975	20.700.000,00	6	11	17.422.500,00	207.000,00	207.000,00	17.836.500,00	2.863.500,00
115	4.13.2.2.1	87	Jembatan Beton Propinsi	Tk Sawah Ketapang	12	1975	15.000.000,00	6	11	12.625.000,00	150.000,00	150.000,00	12.825.000,00	2.075.000,00
116	4.13.2.2.1	88	Jembatan Beton Propinsi	Tk Padang Kerta	12	1975	179.161.000,00	6	11	150.793.842,00	1.791.610,00	1.791.610,00	154.377.062,00	24.783.938,00
117	4.13.2.2.1	89	Jembatan Beton Propinsi	Tk Gelulung	12	1977	22.700.000,00	8	11	18.197.833,00	227.000,00	227.000,00	18.651.833,00	4.048.167,00
118	4.13.2.2.1	90	Jembatan Beton Propinsi	Tk Jinah	12	1977	96.000.000,00	8	11	76.960.000,00	960.000,00	960.000,00	78.880.000,00	17.120.000,00
119	4.13.2.2.1	92	Jembatan Beton Propinsi	Tk Banyu Mumbul	12	1977	7.883.000,00	8	11	6.319.538,00	78.830,00	78.830,00	6.477.198,00	1.405.802,00
120	4.13.2.2.1	96	Jembatan Beton Propinsi	Tk Pulu	12	1977	12.100.000,00	8	11	9.700.167,00	121.000,00	121.000,00	9.942.167,00	2.157.833,00
121	4.13.2.2.1	97	Jembatan Beton Propinsi	Tk Banyupoh	12	1977	18.000.000,00	8	11	14.430.000,00	180.000,00	180.000,00	14.790.000,00	3.210.000,00
122	4.13.2.2.1	98	Jembatan Beton Propinsi	Tk Uma Panji	12	1977	10.349.000,00	8	11	8.296				

No	Kode Aset	No. Register	Jenis Aset	Lokasi	Perolehan	Nilai Perolehan	Sisa Manfaat		Akumulasi Penyusutan Per 1 Januari 2018	Penyusutan		Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2018	Nilai Buku	
							Tahun	Bulan		Semester I	Semester II			
123	4.13.2.2.1	99	Jembatan Beton Propinsi	Tk Manuk	12	1977	8.218.000,00	8	11	6.588.097,00	82.180,00	82.180,00	6.752.457,00	1.465.543,00
124	4.13.2.2.1	100	Jembatan Beton Propinsi	Tk Tanjung Sangiang	12	1977	30.234.000,00	8	11	24.237.590,00	302.340,00	302.340,00	24.842.270,00	5.391.730,00
125	4.13.2.2.1	101	Jembatan Beton Propinsi	Tk Temukus II	12	1977	20.000.000,00	8	11	16.033.333,00	200.000,00	200.000,00	16.433.333,00	3.566.667,00
126	4.13.2.2.1	102	Jembatan Beton Propinsi	Tk Tampak	12	1977	9.440.000,00	8	11	7.567.733,00	94.400,00	94.400,00	7.756.533,00	1.683.467,00
127	4.13.2.2.1	103	Jembatan Beton Propinsi	Tk Mendaung	12	1977	31.395.000,00	8	11	25.168.325,00	313.950,00	313.950,00	25.796.225,00	5.598.775,00
128	4.13.2.2.1	104	Jembatan Beton Propinsi	Tk Mumbul	12	1977	10.000.000,00	8	11	8.016.667,00	100.000,00	100.000,00	8.216.667,00	1.783.333,00
129	4.13.2.2.1	105	Jembatan Beton Propinsi	Tk Tirta Gangga	12	1977	11.244.000,00	8	11	9.013.940,00	112.440,00	112.440,00	9.238.820,00	2.005.180,00
130	4.13.2.2.1	106	Jembatan Beton Propinsi	Tk Uma Anyar	12	1978	24.000.000,00	9	11	18.760.000,00	240.000,00	240.000,00	19.240.000,00	4.760.000,00
131	4.13.2.2.1	107	Jembatan Beton Propinsi	Tk Carik Desa	12	1978	11.150.000,00	9	11	8.715.583,00	111.500,00	111.500,00	8.938.583,00	2.211.417,00
132	4.13.2.2.1	108	Jembatan Beton Propinsi	Tk Musi I	12	1978	12.280.000,00	9	11	9.598.867,00	122.800,00	122.800,00	9.844.467,00	2.435.533,00
133	4.13.2.2.1	109	Jembatan Beton Propinsi	Tk Musi II	12	1978	12.280.000,00	9	11	9.598.867,00	122.800,00	122.800,00	9.844.467,00	2.435.533,00
134	4.13.2.2.1	110	Jembatan Beton Propinsi	Tk Penyabangan	12	1978	43.855.000,00	9	11	34.279.992,00	438.550,00	438.550,00	35.157.092,00	8.697.908,00
135	4.13.2.2.1	111	Jembatan Beton Propinsi	Tk Pengiris	12	1978	9.230.000,00	9	11	7.214.783,00	92.300,00	92.300,00	7.399.383,00	1.830.617,00
136	4.13.2.2.1	112	Jembatan Beton Propinsi	Tk Serumbang	12	1978	13.844.000,00	9	11	10.821.393,00	138.440,00	138.440,00	11.098.273,00	2.745.727,00
137	4.13.2.2.1	113	Jembatan Beton Propinsi	Tk Cangging	12	1978	9.703.000,00	9	11	7.584.512,00	97.030,00	97.030,00	7.778.572,00	1.924.428,00
138	4.13.2.2.1	114	Jembatan Beton Propinsi	Tk Culuk	12	1978	15.331.000,00	9	11	11.983.732,00	153.310,00	153.310,00	12.290.352,00	3.040.648,00
139	4.13.2.2.1	115	Jembatan Beton Propinsi	Tk Kali Genit	12	1978	5.000.000,00	9	11	3.908.333,00	50.000,00	50.000,00	4.008.333,00	991.667,00
140	4.13.2.2.1	116	Jembatan Beton Propinsi	Tk Penitis	12	1978	27.000.000,00	9	11	21.105.000,00	270.000,00	270.000,00	21.645.000,00	5.355.000,00
141	4.13.2.2.1	119	Jembatan Beton Propinsi	Tk Anyar I	12	1979	32.500.000,00	10	11	24.754.167,00	325.000,00	325.000,00	25.404.167,00	7.095.833,00
142	4.13.2.2.1	122	Jembatan Beton Propinsi	Tk Banyu Asri I	12	1979	11.200.000,00	10	11	8.530.667,00	112.000,00	112.000,00	8.754.667,00	2.445.333,00
143	4.13.2.2.1	123	Jembatan Beton Propinsi	Tk Gondol II	12	1979	12.500.000,00	10	11	9.520.833,00	125.000,00	125.000,00	9.770.833,00	2.729.167,00
144	4.13.2.2.1	124	Jembatan Beton Propinsi	Tk Batan Bekul	12	1979	18.761.000,00	10	11	14.289.628,00	187.610,00	187.610,00	14.664.848,00	4.096.152,00
145	4.13.2.2.1	125	Jembatan Beton Propinsi	Tk Ababi	12	1979	19.000.000,00	10	11	14.471.667,00	190.000,00	190.000,00	14.851.667,00	4.148.333,00
146	4.13.2.2.1	126	Jembatan Beton Propinsi	Tk Lodpah	12	1980	16.000.000,00	11	11	11.866.667,00	160.000,00	160.000,00	12.186.667,00	3.813.333,00
147	4.13.2.2.1	127	Jembatan Beton Propinsi	Tk Sampian	12	1980	16.975.000,00	11	11	12.589.792,00	169.750,00	169.750,00	12.929.292,00	4.045.708,00
148	4.13.2.2.1	128	Jembatan Beton Propinsi	Tk Brombang I	12	1980	18.000.000,00	11	11	13.350.000,00	180.000,00	180.000,00	13.710.000,00	4.290.000,00
149	4.13.2.2.1	129	Jembatan Beton Propinsi	Tk Patas	12	1980	25.000.000,00	11	11	18.541.667,00	250.000,00	250.000,00	19.041.667,00	5.958.333,00
150	4.13.2.2.1	130	Jembatan Beton Propinsi	Tk Batu Pulu	12	1980	36.052.000,00	11	11	26.738.567,00	360.520,00	360.520,00	27.459.607,00	8.592.393,00
151	4.13.2.2.1	131	Jembatan Beton Propinsi	Tk Peladung	12	1980	32.695.000,00	11	11	24.248.792,00	326.950,00	326.950,00	24.902.692,00	7.792.308,00
152	4.13.2.2.1	132	Jembatan Beton Propinsi	Tk Tanke	12	1980	6.000.000,00	11	11	4.450.000,00	60.000,00	60.000,00	4.570.000,00	1.430.000,00
153	4.13.2.2.1	133	Jembatan Beton Propinsi	Tk Tinga-Tinga	12	1981	59.710.000,00	12	11	43.090.717,00	597.100,00	597.100,00	44.284.917,00	15.425.083,00
154	4.13.2.2.1	135	Jembatan Beton Propinsi	Tk Anyar II	12	1982	45.000.000,00	13	11	31.575.000,00	450.000,00	450.000,00	32.475.000,00	12.525.000,00
155	4.13.2.2.1	137	Jembatan Beton Propinsi	Tk Anyar	12	1982	29.000.000,00	13	11	20.348.333,00	290.000,00	290.000,00	20.928.333,00	8.071.667,00
156	4.13.2.2.1	138	Jembatan Beton Propinsi	Tk Mangga	12	1982	149.048.000,00	13	11	104.582.013,00	1.490.480,00	1.490.480,00	107.562.973,00	41.485.027,00
157	4.13.2.2.1	139	Jembatan Beton Propinsi	Tk Pengapalan	12	1982	16.775.000,00	13	11	11.770.458,00	167.750,00	167.750,00	12.105.958,00	4.669.042,00
158	4.13.2.2.1	140	Jembatan Beton Propinsi	Tk Desa II	12	1982	28.000.000,00	13	11	19.646.667,00	280.000,00	280.000,00	20.206.667,00	7.793.333,00
159	4.13.2.2.1	141	Jembatan Beton Propinsi	Tk Puana	12	1982	20.000.000,00	13	11	14.033.333,00	200.000,00	200.000,00	14.433.333,00	5.566.667,00
160	4.13.2.2.1	143	Jembatan Beton Propinsi	Tk Prapak	12	1983	67.180.000,00	14	11	45.794.367,00	671.800,00	671.800,00	47.137.967,00	20.042.033,00
161	4.13.2.2.1	144	Jembatan Beton Propinsi	Tk Bangas	12	1983	67.180.000,00	14	11	45.794.367,00	671.800,00	671.800,00	47.137.967,00	20.042.033,00
162	4.13.2.2.1	145	Jembatan Beton Propinsi	Tk Cicing	12	1984	70.690.000,00	15	11	46.773.217,00	706.900,00	706.900,00	48.187.017,00	22.502.983,00
163	4.13.2.2.1	146	Jembatan Beton Propinsi	Tk Tanahampo	12	1984	53.990.000,00	15	11	35.723.383,00	539.900,00	539.900,00	36.803.183,00	17.186.817,00
164	4.13.2.2.1	147	Jembatan Beton Propinsi	Tk Manggis	12	1984	140.648.000,00	15	11	93.062.093,00	1.406.480,00	1.406.480,00	95.875.053,00	44.772.947,00
165	4.13.2.2.1	148	Jembatan Beton Propinsi	Pacuan	12	1984	38.857.000,00	15	11	25.710.382,00	388.570,00	388.570,00	26.497.522,00	12.369.478,00
166	4.13.2.2.1	149	Jembatan Beton Propinsi	Tk Pati	12	1984	119.890.000,00	15	11	79.327.217,00	1.198.900,00	1.198.900,00	81.725.017,00	38.164.983,00
167	4.13.2.2.1	150	Jembatan Beton Propinsi	Tk Ambangan	12	1984	36.000.000,00	15	11	23.820.000,00	360.000,00	360.000,00	24.540.000,00	11.460.000,00
168	4.13.2.2.1	151	Jembatan Beton Propinsi	Pesedahan	12	1985	34.500.000,00	16	11	22.137.500,00	345.000,00	345.000,00	22.827.500,00	11.672.500,00
169	4.13.2.2.1	152	Jembatan Beton Propinsi	Tk Sakenan Jasi	12	1985	139.590.000,00	16	11	89.570.250,00	1.395.900,00	1.395.900,00	92.362.050,00	47.227.950,00
170	4.13.2.2.1	153	Jembatan Beton Propinsi	Tk Kubu Jati	12	1985	92.354.000,00	16	11	59.280.483,00	923.540,00	923.540,00	61.107.563,00	31.246.437,00
171	4.13.2.2.1	154	Jembatan Beton Propinsi	Tk Ampo	12	1985	53.990.000,00	16	11	34.643.583,00	539.900,00	539.900,00	35.723.383,00	18.266.617,00
172	4.13.2.2.1	155	Jembatan Beton Propinsi	Tk Pacuan II	12	1985	38.857.000,00	16	11	24.933.242,00	388.570,00	388.570,00	25.710.382,00	13.146.618,00
173	4.13.2.2.1	156	Jembatan Beton Propinsi	Tk Pesedahan	12	1985	34.500.000,00	16	11	22.137.500,00	345.000,00	345.000,00	22.827.500,00	11.672.500,00
174	4.13.2.2.1	159	Jembatan Beton Propinsi	Tk Panes	12	1985	160.000.000,00	16	11	102.666.667,00	1.600.000,00	1.600.000,00	105.866.667,00	54.133.333,00
175	4.13.2.2.1	160	Jembatan Beton Propinsi	Tk Baas	12	1986	234.952.000,00	17	11	146.061.827,00	2.349.520,00	2.349.520,00	150.760.867,00	84.191.133,00
176	4.13.2.2.1	161	Jembatan Beton Propinsi	Tk Panggang	12	1986	39.510.000,00	17	11	23.940.383,00	385.100,00	385.100,00	24.710.583,00	13.799.417,00
177	4.13.2.2.1	162	Jembatan Beton Propinsi	Tk Bubuh	12	1986	320.000.000,00	17	11	198.933.333,00	3.200.000,00	3.200.000,00	205.333.333,00	114.666.667,00
178	4.13.2.2.1	165	Jembatan Beton Propinsi	Yeh Tagtag	12	1986	76.819.000,00	17	11	47.755.812,00	768.190,00	768.190,00	49.292.192,00	27.526.808,00
179	4.13.2.2.1	166	Jembatan Beton Propinsi	Tk Petiwasan	12	1986	501.486.000,00	19	11	291.697.690,00	5.014.860,00	5.014.860,00	301.727.410,00	199.758.590,00
180	4.13.2.2.1	167	Jembatan Beton Propinsi	Tk Groggak I	12	1988	111.829.000,00	19	11	65.047.202,00	1.118.290,00	1.118.290,00	67.283.782,00	44.545.218,00
181	4.13.2.2.1	168	Jembatan Beton Propinsi	Tk Asangak	12	1988	210.760.000,00	19	11	122.592.067,00	2.107.600,00	2.107.600,00	126.807.267,00	83.952.733,00
182	4.13.2.2.1	169	Jembatan Beton Propinsi	Tk Groggak	12	1988	111.829.000,00	19	11	65.047.202,00	1.118.290,00	1.118.290,00	67.283.782,00	44.545.218,00
183	4.13.2.2.1	171	Jembatan Beton Propinsi	Tk Area	12	1989	76.500.000,00	20	11	42.967.500,00	765.000,00	765.000,00	44.497.500,00	32.002.500,00
184	4.13.2.2.1	172	Jembatan Beton Propinsi	Tk Embang	12	1989	311.000.000,00	20	11	174.678.333,00	3.110.000,00	3.110.000,00	180.898.333,00	130.101.667,00
185	4.13.2.2.1	173	Jembatan Beton Propinsi	Tk Banyu Raras	12	1989	174.026.000,00	20	11	97.744.603,00	1.740.260,00	1.740.260,00	101.225.123,00	72.800.877,00
186	4.13.2.2.1	174	Jembatan Beton Propinsi	Tk Bindu	12	1989	150.000.000,00	20	11	84.250.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	87.250.000,00	62.750.000,00
187	4.13.2.2.1	175	Jembatan Beton Propinsi	Tk Penath	12	1989	150.000.000,00	20	11	84.250.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	87.250.000,00	62.750.000,00
188	4.13.2.2.1	178	Jembatan Beton Propinsi	Tk Bakah	12	19								

No	Kode Aset	No. Register	Jenis Aset	Lokasi	Perolehan	Nilai Perolehan	Sisa Manfaat		Akumulasi Penyusutan Per 1 Januari 2018	Penyusutan		Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2018	Nilai Buku			
							Tahun	Bulan		Semester I	Semester II					
196	4.13.2.2.1	186	Jembatan Beton Propinsi	Tk Glebeg	12	1992			4.515.000,00	90.000,00	90.000,00	4.695.000,00	4.305.000,00			
197	4.13.2.2.1	187	Jembatan Beton Propinsi	Tk Puyung	12	1992			26.086.667,00	520.000,00	520.000,00	27.126.667,00	24.873.333,00			
198	4.13.2.2.1	188	Jembatan Beton Propinsi	Tk Bila	12	1992			6.521.667,00	130.000,00	130.000,00	6.781.667,00	6.218.333,00			
199	4.13.2.2.1	189	Jembatan Beton Propinsi	Tk Menanga	12	1992			13.043.333,00	260.000,00	260.000,00	13.563.333,00	12.436.667,00			
200	4.13.2.2.1	190	Jembatan Beton Propinsi	Tk Penyusunan	12	1992			3.511.667,00	70.000,00	70.000,00	3.651.667,00	3.348.333,00			
201	4.13.2.2.1	191	Jembatan Beton Propinsi	Tk Bantes	12	1993			4.498.767,00	93.400,00	93.400,00	4.685.567,00	4.654.433,00			
202	4.13.2.2.1	192	Jembatan Beton Propinsi	Tk Gelantang	12	1993			2.890.000,00	60.000,00	60.000,00	3.010.000,00	2.990.000,00			
203	4.13.2.2.1	193	Jembatan Beton Propinsi	Tk Bantes II	12	1993			3.853.333,00	80.000,00	80.000,00	4.013.333,00	3.986.667,00			
204	4.13.2.2.1	194	Jembatan Beton Propinsi	Tk Bantes	12	1993			4.498.767,00	93.400,00	93.400,00	4.685.567,00	4.654.433,00			
205	4.13.2.2.1	195	Jembatan Beton Propinsi	Tk Tegallinggah	12	1994			16.800.000,00	168.000,00	168.000,00	8.092.000,00	8.708.000,00			
206	4.13.2.2.1	196	Jembatan Beton Propinsi	Tk Sumaga	12	1995			23.805.833,00	539.000,00	539.000,00	24.883.833,00	29.016.167,00			
207	4.13.2.2.1	197	Jembatan Beton Propinsi	Tk Bulakan	12	1995			11.660.000,00	264.000,00	264.000,00	12.188.000,00	14.212.000,00			
208	4.13.2.2.1	198	Jembatan Beton Propinsi	Tk Les	12	1995			5.631.250,00	127.500,00	127.500,00	5.886.250,00	6.863.750,00			
209	4.13.2.2.1	199	Jembatan Beton Propinsi	Tk Pojok Batu	12	1995			5.520.833,00	125.000,00	125.000,00	5.770.833,00	6.729.167,00			
210	4.13.2.2.2	1	Jembatan Baja Propinsi	Tk Unda	12	1985			290.031.000,00	16	11	250.269.892,00	3.900.310,00	3.900.310,00	258.070.512,00	131.960.488,00
211	4.14.1.3.2	1	Bendung dengan Pintu Bilas	Gianyar	6	2009			262.000.000,00	40	5	44.976.667,00	2.620.000,00	2.620.000,00	50.216.667,00	211.783.333,00
212	4.14.1.3.2	1	Saluran Induk	Gianyar/Medahan	12	1997			28.400.000,00	28	11	11.407.333,00	284.000,00	284.000,00	11.975.333,00	16.424.667,00
213	4.14.1.3.2	2	Saluran Induk	Bangli/Sidembunut	12	1997			94.887.000,00	28	11	38.112.945,00	948.870,00	948.870,00	40.010.685,00	54.876.315,00
214	4.14.1.3.2	4	Saluran Induk	Buleleng/Pengaringan	12	1997			37.906.000,00	28	11	15.225.577,00	379.060,00	379.060,00	15.983.697,00	21.922.303,00
215	4.14.1.3.2	5	Saluran Induk	Denpasar/Lange	12	1997			23.925.000,00	28	11	9.609.875,00	239.250,00	239.250,00	10.088.375,00	13.836.625,00
216	4.14.1.3.2	6	Saluran Induk	Tabanan/Sungsang	12	1997			70.150.000,00	28	11	28.176.917,00	701.500,00	701.500,00	29.579.917,00	40.570.083,00
217	4.14.1.3.2	7	Saluran Induk	Jembrana/Sidembunut	12	2000			117.660.000,00	31	11	40.200.500,00	1.176.600,00	1.176.600,00	42.553.700,00	75.106.300,00
218	4.14.1.3.2	8	Saluran Induk	Jembrana/Tibubeleng	12	2000			151.536.000,00	31	11	51.774.800,00	1.515.360,00	1.515.360,00	54.805.520,00	96.730.480,00
219	4.14.1.3.2	9	Saluran Induk	Klungkung/Aan Dangin	12	2000			67.000.000,00	31	11	22.891.667,00	670.000,00	670.000,00	24.231.667,00	42.768.333,00
220	4.14.1.3.2	10	Saluran Induk	Gianyar/Ubud	12	2000			114.825.000,00	31	11	39.231.875,00	1.148.250,00	1.148.250,00	41.528.375,00	73.296.625,00
221	4.14.1.3.2	11	Saluran Induk	Buleleng/Sangkan Gunung	12	2001			123.173.000,00	32	11	39.620.648,00	1.231.730,00	1.231.730,00	42.084.108,00	81.088.892,00
222	4.14.1.3.2	12	Saluran Induk	Buleleng/Busungbiu Tunju	12	2001			236.600.000,00	32	11	76.106.333,00	2.366.000,00	2.366.000,00	80.838.333,00	155.761.667,00
223	4.14.1.3.2	13	Saluran Induk	Buleleng/Tirta Gangga	12	2001			117.625.000,00	32	11	37.836.042,00	1.176.250,00	1.176.250,00	40.188.542,00	77.436.458,00
224	4.14.1.3.2	14	Saluran Induk	Buleleng/Puluran & Bendung Bulan	12	2001			187.230.000,00	32	11	60.225.650,00	1.872.300,00	1.872.300,00	63.970.250,00	123.259.750,00
225	4.14.1.3.2	15	Saluran Induk	Gianyar	12	2002			194.000.000,00	33	11	58.523.333,00	1.940.000,00	1.940.000,00	62.403.333,00	131.596.667,00
226	4.14.1.3.2	16	Saluran Induk	Gianyar	12	2002			143.000.000,00	33	11	43.138.333,00	1.430.000,00	1.430.000,00	45.998.333,00	97.001.667,00
227	4.14.1.3.2	17	Saluran Induk	Negara	12	2002			207.900.000,00	33	11	62.716.500,00	2.079.000,00	2.079.000,00	66.874.500,00	141.025.500,00
228	4.14.1.3.2	18	Saluran Induk	Tabanan	12	2002			93.000.000,00	33	11	28.055.000,00	930.000,00	930.000,00	29.915.000,00	63.085.000,00
229	4.14.1.3.2	19	Saluran Induk	Tabanan	12	2002			172.000.000,00	33	11	51.896.667,00	1.720.000,00	1.720.000,00	55.326.667,00	116.673.333,00
230	4.14.1.3.2	20	Saluran Induk	Klungkung	12	2002			46.500.000,00	33	11	14.027.500,00	465.000,00	465.000,00	14.957.500,00	31.542.500,00
231	4.14.1.3.2	21	Saluran Induk	Buleleng	12	2002			79.800.000,00	33	11	24.073.000,00	798.000,00	798.000,00	25.669.000,00	54.131.000,00
232	4.14.1.3.2	22	Saluran Induk	Karangasem	12	2003			216.000.000,00	34	11	60.840.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	65.160.000,00	150.840.000,00
233	4.14.1.3.2	23	Saluran Induk	Bangli	12	2003			184.000.000,00	34	11	51.826.667,00	1.840.000,00	1.840.000,00	55.506.667,00	128.493.333,00
234	4.14.1.3.2	24	Saluran Induk	DI Silangjana	12	2003			174.500.000,00	34	11	208.855.833,00	7.415.000,00	7.415.000,00	223.685.833,00	517.814.167,00
235	4.14.1.3.2	25	Saluran Induk	Jembrana	12	2003			292.000.000,00	34	11	82.246.667,00	2.920.000,00	2.920.000,00	88.086.667,00	203.913.333,00
236	4.14.1.3.2	26	Saluran Induk	Jembrana	12	2004			348.947.000,00	35	11	91.307.798,00	3.489.470,00	3.489.470,00	98.286.738,00	250.860.282,00
237	4.14.1.3.2	27	Saluran Induk	Tabanan	12	2004			114.002.000,00	35	11	29.830.523,00	1.140.020,00	1.140.020,00	32.110.563,00	81.891.437,00
238	4.14.1.3.2	28	Saluran Induk	Gianyar	12	2004			143.493.000,00	35	11	37.547.335,00	1.434.930,00	1.434.930,00	40.417.195,00	103.075.805,00
239	4.14.1.3.2	29	Saluran Induk	Karangasem	12	2005			166.692.000,00	36	11	40.283.900,00	1.666.920,00	1.666.920,00	43.617.740,00	123.074.280,00
240	4.14.1.3.2	30	Saluran Induk	Bangli	12	2005			159.714.000,00	36	11	38.597.550,00	1.597.140,00	1.597.140,00	41.791.830,00	117.922.170,00
241	4.14.1.3.2	31	Saluran Induk	Tabanan	12	2005			360.887.000,00	36	11	87.214.358,00	3.608.870,00	3.608.870,00	94.432.098,00	266.454.902,00
242	4.14.1.3.2	34	Saluran Induk	Gianyar	12	2006			1.181.697.000,00	37	11	261.942.835,00	11.816.970,00	11.816.970,00	285.576.775,00	896.120.225,00
243	4.14.1.3.2	35	Saluran Induk	Karangasem	12	2006			85.255.000,00	37	11	18.898.192,00	852.550,00	852.550,00	20.603.292,00	64.651.708,00
244	4.14.1.3.2	43	Saluran Induk	Tabanan	12	2007			379.968.000,00	38	11	76.626.880,00	3.799.680,00	3.799.680,00	84.226.240,00	295.741.760,00
245	4.14.1.3.2	44	Saluran Induk	Gianyar	12	2007			292.675.000,00	38	11	59.022.792,00	2.926.750,00	2.926.750,00	64.876.292,00	227.798.708,00
246	4.14.1.3.2	45	Saluran Induk	Gianyar	12	2007			208.042.000,00	38	11	42.156.803,00	2.090.420,00	2.090.420,00	46.337.643,00	162.704.357,00
247	4.14.1.3.2	46	Saluran Induk	Tabanan	12	2007			90.214.000,00	38	11	18.193.157,00	902.140,00	902.140,00	19.897.437,00	70.216.563,00
248	4.14.1.3.2	54	Saluran Induk	Badung	12	2008			1.979.982.000,00	39	11	359.696.730,00	19.799.820,00	19.799.820,00	399.296.370,00	1.580.686.630,00
249	4.14.1.3.2	63	Saluran Induk	Tabanan	12	2008			94.158.000,00	39	11	17.105.370,00	941.580,00	941.580,00	19.988.530,00	75.169.470,00
250	4.14.1.3.2	65	Saluran Induk	Buleleng	12	2008			4.650.000.000,00	39	11	844.750.000,00	46.500.000,00	46.500.000,00	937.750.000,00	3.712.250.000,00
251	4.14.1.3.2	67	Saluran Induk	Tk. Ayung (DI Tumbak Bayuh)	12	2008			1.699.934.000,00	39	11	308.821.343,00	16.999.340,00	16.999.340,00	342.820.023,00	1.357.113.977,00
252	4.14.1.3.2	68	Saluran Induk	Tk. Daya	12	2008			470.656.000,00	39	11	85.502.507,00	4.706.560,00	4.706.560,00	94.915.627,00	375.740.373,00
253	4.14.1.3.2	69	Saluran Induk	Tk. Banyuning	12	2008			909.875.000,00	39	11	165.293.958,00	9.098.750,00	9.098.750,00	183.491.458,00	726.383.542,00
254	4.14.1.3.2	70	Saluran Induk	Tukad Candigara	12	2008			2.183.998.000,00	39	11	396.759.637,00	21.839.980,00	21.839.980,00	440.439.597,00	1.743.558.403,00
255	4.14.1.3.2	88	Saluran Induk	Nusa Penida Klungkung	12	2014			62.637.380,00	45	11	62.637.380,00	43.195.797,00	43.195.797,00	149.028.974,00	3.966.814.026,00
256	4.14.1.3.2	90	Saluran Induk	Kabupaten Badung dan Kota Denpasar	12	2014			4.849.194.000,00	45	11	299.033.630,00	48.491.940,00	48.491.940,00	396.017.510,00	4.453.176.490,00
257	4.14.1.3.2	106	Saluran Induk		12	2014			49.556.000,00	45	11	3.055.953,00	495.560,00	495.560,00	4.047.073,00	45.508.927,00
258	4.14.1.3.2	107	Saluran Induk		12	2014			73.917.800,00	45	11	4.558.264,00	739.178,00	739.178,00	6.036.620,00	67.881.180,00
259	4.14.1.3.2	108	Saluran Induk		12	2014			49.785.000,00	45	11	3.070.075,00	497.850,00	497.850,00	4.065.775,00	45.719.225,00

No	Kode Aset	No. Register	Jenis Aset	Lokasi	Perolehan		Nilai Perolehan	Sisa Manfaat		Akumulasi Penyusutan Per 1 Januari 2018	Penyusutan		Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2018	Nilai Buku
								Tahun	Bulan		Semester I	Semester II		
267	4.14.1.3.2	132	Saluran Induk	D.I. Pame Paealan	12	2008	4.378.804.800,00	39	11	781.073.328,00	43.964.132,00	43.964.132,00	869.001.592,00	3.509.803.208,00
268	4.14.1.3.2	133	Saluran Induk	D.I. Pejeng	12	2007	1.735.169.000,00	38	11	281.730.060,00	18.205.916,00	18.205.916,00	318.141.892,00	1.417.027.108,00
269	4.14.1.3.2	134	Saluran Induk	D.I. Tengkulak Mawang	12	2008	3.815.808.000,00	39	11	682.327.602,00	38.291.003,00	38.291.003,00	758.909.608,00	3.056.898.392,00
270	4.14.1.3.2	135	Saluran Induk	D.I. Tinjak Menjangan	12	2008	2.169.351.200,00	39	11	385.068.997,00	21.803.856,00	21.803.856,00	428.676.709,00	1.740.674.491,00
271	4.14.1.3.2	136	Saluran Induk	D.I. Tungkub	12	2007	20.604.041.175,00	40	8	1.667.612.364,00	227.237.146,00	227.237.146,00	2.122.086.656,00	18.481.954.519,00
272	4.14.1.5.3	4	Bangunan Pengaman Irigasi Lain-lain		12	2010	5.379.701.000,00	41	11	762.124.308,00	53.797.010,00	53.797.010,00	869.718.328,00	4.509.982.672,00
273	4.14.3.3.2	1	Saluran Induk	Tabanan	8	2009	98.591.000,00	15	7	33.192.303,00	1.971.820,00	1.971.820,00	37.135.943,00	61.455.057,00
274	4.14.4.2.1	1	Bangunan Pengambilan Pengamanan sungai	Jembrana	5	2009	1.263.090.000,00	0	4	1.094.678.000,00	63.154.500,00	63.154.500,00	1.220.987.000,00	42.103.000,00
275	4.14.4.5.12	1	Bangunan Pengaman Sungai Lain-lain	Tabanan	9	2013	193.135.000,00	4	8	83.691.833,00	9.656.750,00	9.656.750,00	103.005.333,00	90.129.667,00
276	4.14.4.5.12	2	Bangunan Pengaman Sungai Lain-lain	Gianyar	10	2013	182.978.000,00	4	9	77.765.650,00	9.148.900,00	9.148.900,00	96.063.450,00	86.914.550,00
277	4.14.4.5.12	3	Bangunan Pengaman Sungai Lain-lain	Gianyar	12	2013	313.710.000,00	4	11	128.098.250,00	15.685.500,00	15.685.500,00	159.469.250,00	154.240.750,00
278	4.14.4.5.12	4	Bangunan Pengaman Sungai Lain-lain	Tabanan	11	2013	274.711.000,00	4	10	114.462.917,00	13.735.550,00	13.735.550,00	141.934.017,00	132.776.983,00
279	4.14.4.5.12	5	Bangunan Pengaman Sungai Lain-lain	Buleleng	12	2013	164.053.000,00	4	11	66.988.308,00	8.202.650,00	8.202.650,00	83.393.608,00	80.659.392,00
280	4.14.4.5.12	6	Bangunan Pengaman Sungai Lain-lain	Bangli	11	2013	144.791.000,00	4	10	60.329.583,00	7.239.550,00	7.239.550,00	74.808.683,00	69.982.317,00
281	4.14.4.6.9	1	Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai Lain-lain	Gianyar	12	2013	193.292.000,00	4	11	78.927.567,00	9.664.600,00	9.664.600,00	98.256.767,00	95.035.233,00
282	4.15.7.1.4	2	Instalasi		12	2012	809.950.000,00	23	11	137.241.528,00	13.499.167,00	13.499.167,00	164.239.862,00	645.710.138,00

DAFTAR INVESTASI JANGKA PANJANG
PEMERINTAH PROVINSI BALI
PER 31 DESEMBER 2019

(dalam rupiah)

No	Perusahaan	Saldo Awal	Piutang Deviden 2019	%	Laba/Rugi Tahun Berjalan	PENAMBAHAN		PENGURANGAN	Saldo Akhir	Metode Penilaian Investasi
						Bagian Laba / Rugi Tahun Berjalan	Penyertaan Modal	Pembagian Deviden 2019		
1	2	3	4	3	6	7	8	9	10	11
1	PT. BPD Bali	911.000.398.491,11	-	34,38%	564.780.319.951,00	190.556.879.951,47	0,00	-	1.101.557.278.442,58	Ekuitas
2	PT. Rumah Sakit Puri Raharia	30.987.290.921,07	0,03	58,24%	4.185.213.556,00	2.437.468.375,01	0,00	-	33.424.759.296,08	Ekuitas
3	Perusahaan Daerah	4.604.772.755,20	951.680.759,70	100,00%	(1.783.598.830,00)	(1.783.598.830,00)	0,00	-	2.821.173.925,20	Ekuitas
4	PT Asuransi Bangun Askrida	1.150.000.000,00	-	0,385%	-	-	0,00	286.428.260,00	1.150.000.000,00	Cost
5	PT. Penjamin Kredit Daerah Provinsi Bali	131.060.849.877,69	-	91,90%	3.302.873.591,00	2.989.430.887,21	0,00	-	134.050.280.764,90	Ekuitas
6	PT. Jasa Marga Bali Tol	100.000.000.000,00	-	8,01%	(79.826.170.625,00)	-	0,00	-	100.000.000.000,00	Cost
	JUMLAH	1.178.803.312.045,07	951.680.759,73		490.658.637.643,00	194.200.180.383,69	0,00	286.428.260,00	1.373.003.492.428,76	

**KAS DI BENDAHARA BOS
PEMERINTAH PROVINSI BALI
PER 31 DESEMBER 2019**

(dalam rupiah)

NO	KAB/KOTA	NAMA SEKOLAH	REKENING	SALDO AWAL	PENDAPATAN BOS REGULER 2019	PENDAPATAN BOS AFIRMASI DAN KINERJA 2019	BELANJA BOS REGULER, AFKIN 2019	BELANJA DARI SISA BOS 2018	SISA DANA BOS 2019
1	Badung	SMKN 1 PETANG	0400105000239	117.299.365,58	499.520.000,00	260.000.000,00	691.969.000,00	45.706.000,00	139.144.365,58
2	Badung	SLB Negeri 1 Badung	0320105000946	269.054.836,13	761.600.000,00	117.000.000,00	612.461.594,00	43.825.233,13	491.368.009,00
3	Badung	SMAN 2 MENGWI	0090105001860	664.134.552,84	2.020.480.000,00	-	2.008.128.783,00	328.315.000,00	348.170.769,84
4	Badung	SMKN 1 KUTA SELATAN	0320105000568	429.792.452,83	2.892.800.000,00	1.245.000.000,00	3.974.346.202,00	194.677.000,00	398.569.250,83
5	Badung	SMAN 2 KUTA	0130105000410	529.250.620,52	1.557.360.000,00	833.000.000,00	2.285.639.988,00	385.437.766,55	248.532.865,97
6	Badung	SMAN 1 MENGWI	0260105000480	139.558.243,88	1.814.400.000,00	-	1.810.858.652,00	63.484.000,00	79.615.591,88
7	Badung	SMAN 1 KUTA UTARA	0360105000040	179.424.593,81	2.101.120.000,00	-	2.093.298.300,00	90.132.535,12	97.113.758,69
8	Badung	SMAN 1 ABIANSEMAL	0400105000529	708.836.593,03	1.996.680.000,00	-	1.959.984.312,00	354.418.297,00	391.113.984,03
9	Badung	SMAN 1 KUTA	0330105000227	506.909.159,68	1.728.720.000,00	-	1.591.770.203,00	246.239.884,14	397.619.072,54
10	Badung	SMAN 1 KUTA SELATAN	0320105000050	877.651.992,01	1.502.760.000,00	-	1.288.021.791,00	404.969.000,00	687.421.201,01
11	Badung	SMAN 1 PETANG	0400105000280	111.688.332,49	1.268.960.000,00	-	1.163.540.735,00	78.088.327,00	139.019.270,49
12	Badung	SMA NEGERI 2 KUTA SELATAN	0320105000958	-	147.840.000,00	-	128.243.500,00	-	19.596.500,00
13	Badung	SMA NEGERI 2 ABIANSEMAL	0400105000883	-	250.320.000,00	-	158.856.040,00	-	91.463.960,00
14	Bangli	SMKN 1 BANGLI	0200105001465	151.737.905,13	1.304.000.000,00	-	1.242.216.086,00	75.768.953,00	137.752.866,13
15	Bangli	SMAN 1 BANGLI	0200105001462	529.965.705,33	1.207.360.000,00	-	886.265.309,00	161.468.000,00	689.592.396,33
16	Bangli	SMKN 3 BANGLI	0200105001464	50.587.985,32	398.400.000,00	-	379.589.286,00	25.293.993,00	44.104.706,32
17	Bangli	SMKN 4 BANGLI	0200105001499	33.122.629,93	749.760.000,00	-	749.585.162,00	16.561.315,00	16.736.152,93
18	Bangli	SMKN 2 KINTAMANI	0480105000089	142.193.983,55	506.880.000,00	-	483.972.600,00	854.876,46	164.246.507,09
19	Bangli	SMKN 2 BANGLI	0200105001452	448.004.352,23	1.802.560.000,00	-	1.386.072.996,00	5.307.261,38	859.184.094,85
20	Bangli	SMKN 1 SUSUT	0200105001490	91.947.452,27	506.560.000,00	-	476.122.967,00	43.854.605,00	78.529.880,27
21	Bangli	SMKN 1 KINTAMANI	0480105000077	19.272.771,44	284.160.000,00	-	273.426.325,00	7.500.000,00	22.506.446,44
22	Bangli	SMAN 2 BANGLI	0200105001468	198.026.637,61	1.107.680.000,00	-	1.037.588.350,00	98.264.000,00	169.854.287,61
23	Bangli	SMAN 1 TEMBUKU	0200105001463	108.177.407,34	837.200.000,00	-	749.955.714,20	49.833.724,00	145.587.969,14
24	Bangli	SMAN 1 SUSUT	0200105001491	259.266.351,92	1.069.880.000,00	591.000.000,00	1.503.442.082,00	131.267.501,92	285.436.768,00
25	Bangli	SMAN 1 KINTAMANI	0480105000053	36.536.292,22	1.209.320.000,00	-	1.208.848.553,00	36.517.107,10	490.632,12
26	Bangli	SLB NEGERI 1 BANGLI	0200105001495	45.803.441,79	220.400.000,00	-	210.410.200,00	22.925.939,54	32.867.302,25
27	Bangli	SMKN 3 KINTAMANI	0480105000065	640.769.760,67	1.142.400.000,00	-	965.268.772,00	280.980.937,10	559.054.144,57
28	Bangli	SMKN 1 TEMBUKU	0200105001501	105.682.962,68	1.030.720.000,00	507.000.000,00	1.532.135.529,42	52.673.399,33	58.594.033,93
29	Buleleng	SMAN 1 SUKASADA	0140105006210	10.238.662,44	624.120.000,00	-	624.016.817,00	5.100.000,00	5.241.845,44
30	Buleleng	SMAN 1 TEJAKULA	0140105006194	152.674.331,18	1.006.600.000,00	-	938.737.945,00	75.646.000,00	144.890.386,18
31	Buleleng	SMAN 2 BANJAR	0150105001337	303.761.445,18	1.230.600.000,00	-	1.130.602.451,00	142.121.104,00	261.637.890,18
32	Buleleng	SMAN 2 BUSUNGBIU	0470105000074	2.292.187,46	471.800.000,00	266.000.000,00	719.979.733,00	757.818,52	19.354.635,94
33	Buleleng	SMAN 2 SINGARAJA	0140212225848	810.233.069,67	1.414.280.000,00	-	1.276.647.663,00	339.680.770,00	608.184.636,67
34	Buleleng	SMAN 3 SINGARAJA	0140105006247	1.272.786.367,95	1.396.360.000,00	-	1.159.174.349,93	322.053.289,42	1.187.918.728,60
35	Buleleng	SMAN 4 SINGARAJA	0140105006285	544.434.852,99	1.533.000.000,00	-	1.270.913.907,00	270.931.786,99	534.235.837,13
36	Buleleng	SMK NEGERI 1 SINGARAJA	0140105006292	8.417.653,86	2.270.080.000,00	-	2.270.080.000,00	4.208.827,00	4.208.826,86
37	Buleleng	SMKN 1 SUKASADA	0140105006259	18.646.202,21	1.657.280.000,00	-	1.657.280.000,00	18.646.202,00	0,21
38	Buleleng	SMK NEGERI 2 SINGARAJA	0140105006260	149.254.198,00	2.208.960.000,00	-	2.204.900.170,00	-	153.314.028,00
39	Buleleng	SMK NEGERI 3 SINGARAJA	0140105006182	322.055.331,68	3.785.920.000,00	-	3.745.154.522,00	157.774.150,00	205.046.659,68

NO	KAB/KOTA	NAMA SEKOLAH	REKENING	SALDO AWAL	PENDAPATAN BOS REGULER 2019	PENDAPATAN BOS AFIRMASI DAN KINERJA 2019	BELANJA BOS REGULER, AFKIN 2019	BELANJA DARI SISA BOS 2018	SISA DANA BOS 2019
40	Buleleng	SMAN 1 SINGARAJA	0140105006235	322.857.917,09	1.445.080.000,00	-	1.184.912.331,00	62.954.000,00	134.748.658,09
41	Buleleng	SMAN 1 BANJAR	0150105000962	172.297.812,61	1.323.000.000,00	-	1.322.511.030,00	10.763.158,77	162.023.623,84
42	Buleleng	SMAN 1 BUSUNGBIU	0150105001331	186.355.376,77	1.132.600.000,00	-	1.016.556.270,00	89.843.600,00	210.555.506,77
43	Buleleng	SMAN 1 GEROKGAK	0150105000960	200.087.692,64	1.172.360.000,00	-	1.162.977.250,00	99.792.044,77	109.678.397,87
44	Buleleng	SMAN 1 KUBUTAMBAHAN	0140105006223	328.197.250,03	1.157.520.000,00	-	963.375.273,00	79.554.500,06	442.787.476,97
45	Buleleng	SMAN 1 SAWAN	0140105006209	71.168.614,76	1.035.720.000,00	-	1.002.990.275,00	67.571.400,00	36.326.939,76
46	Buleleng	SLB NEGERI 2 BULELENG	0140105005566	32.407.608,08	288.400.000,00	-	282.069.930,00	9.163.634,00	29.574.044,08
47	Buleleng	SLB NEGERI 1 BULELENG	0140105006581	25.257.743,77	220.000.000,00	-	212.590.578,00	12.628.865,00	20.038.300,77
48	Buleleng	SMAN 1 SERIRIT	0150105001223	253.176.510,36	1.050.840.000,00	521.000.000,00	1.545.425.909,00	73.601.817,00	205.988.784,36
49	Buleleng	SMAN 2 GEROKGAK	0150105001333	56.895.528,19	455.000.000,00	-	452.172.784,00	28.447.700,00	31.275.044,19
50	Buleleng	SMAN 2 TEJAKULA	0140105006302	143.799.358,18	573.160.000,00	-	507.733.491,00	65.764.500,00	143.461.367,18
51	Buleleng	SMKN 1 SERIRIT	0150105001229	380.471.923,37	1.677.760.000,00	-	1.356.603.942,00	164.402.390,00	536.207.191,37
52	Buleleng	SMKN 2 SERIRIT	0150105001225	155.146.371,58	959.680.000,00	-	920.935.698,00	77.573.186,00	116.317.487,58
53	Buleleng	SMKN 1 TEJAKULA	0140105006273	131.277.215,37	1.303.680.000,00	581.000.000,00	1.728.729.152,00	57.416.704,84	229.811.358,53
54	Buleleng	SMKN 1 KUBUTAMBAHAN	0140105006156	311.080.719,99	1.288.320.000,00	-	1.228.519.953,00	123.483.900,00	247.396.866,99
55	Buleleng	SMAN BALI MANDARA	0460105006555	16.469.755,89	522.760.000,00	-	486.730.230,00	6.254.000,00	46.245.525,89
56	Buleleng	SMK NEGERI 1 SAWAN	0140105006168	104.634.844,04	1.381.440.000,00	-	1.253.610.084,00	52.317.422,00	180.147.338,04
57	Buleleng	SMAN SATU ATAP TEJAKULA	0140105006314	3.096.260,90	113.120.000,00	-	112.070.412,00	1.548.131,00	2.597.717,90
58	Buleleng	SMK NEGERI 1 BUSUNGBIU	0150105001227	216.033.533,47	697.600.000,00	-	561.394.500,00	-	352.239.033,47
59	Buleleng	SMK NEGERI BALI MANDARA	0460105000667	198.560.718,00	723.840.000,00	-	722.126.051,00	-	200.274.667,00
60	Buleleng	SMK NEGERI 1 GEROKGAK	0150105001335	46.880.681,67	1.131.200.000,00	-	1.115.161.082,00	41.940.001,00	20.979.598,67
61	Denpasar	SLB NEGERI 1 DENPASAR	0340105000152	114.296.767,02	381.600.000,00	-	332.910.458,00	37.678.397,02	125.682.911,34
62	Denpasar	SMKN 4 DENPASAR	0100105016789	438.432.446,42	1.653.440.000,00	-	1.640.969.999,00	215.371.000,00	235.531.447,42
63	Denpasar	SMKN 3 DENPASAR	0270105000088	98.530.689,36	2.589.760.000,00	-	2.441.317.119,00	49.265.345,00	197.708.225,36
64	Denpasar	SMKN 2 DENPASAR	0100105006277	379.975.616,67	1.783.680.000,00	795.000.000,00	2.445.123.313,00	189.580.007,45	323.952.296,22
65	Denpasar	SMKN 1 DENPASAR	0500105000210	845.584.459,31	3.592.000.000,00	-	2.945.716.196,00	385.648.699,31	1.086.573.185,81
66	Denpasar	SMAN 7 DENPASAR	0110105006201	2.210.889.459,16	1.876.840.000,00	-	1.463.222.062,00	-	2.624.507.397,16
67	Denpasar	SMAN 6 DENPASAR	0110105006211	581.442.577,97	1.337.840.000,00	-	1.289.398.357,00	234.859.747,85	395.024.473,12
68	Denpasar	SMAN 5 DENPASAR	0490105000018	1.143.788.337,19	1.776.880.000,00	-	1.552.373.688,00	493.893.749,78	874.400.899,41
69	Denpasar	SMAN 4 DENPASAR	0390105000041	601.846.999,76	1.658.440.000,00	-	1.595.731.720,00	294.148.000,00	370.407.279,76
70	Denpasar	SMAN 3 DENPASAR	0100105016788	130.506.057,11	1.304.240.000,00	713.000.000,00	2.013.134.761,00	61.063.500,00	73.547.796,11
71	Denpasar	SMAN 2 DENPASAR	0340105000153	1.252.988.055,02	1.832.600.000,00	-	1.687.097.349,00	559.557.965,02	838.932.741,00
72	Denpasar	SMAN 1 DENPASAR	0270105000091	2.051.394.440,17	1.801.520.000,00	-	1.428.918.963,00	15.511.505,03	2.408.483.972,14
73	Denpasar	SMAN 8 DENPASAR	0110105006195	858.080.344,78	1.822.800.000,00	-	1.716.952.913,00	1.176.915,87	962.750.515,91
74	Denpasar	SMKN 5 DENPASAR	0100105016895	1.370.456.403,97	2.715.200.000,00	-	2.321.456.672,00	577.283.072,87	1.186.916.659,10
75	Denpasar	SLB NEGERI 2 DENPASAR	0340105000151	25.044.927,26	343.200.000,00	-	333.636.400,00	11.011.105,59	23.597.421,67
76	Gianyar	SMAN 1 UBUD	0190212048500	434.736.444,73	1.457.680.000,00	-	1.257.524.795,00	-	634.891.649,73
77	Gianyar	SMKN 1 GIANYAR	0180105002683	596.267.641,90	1.722.560.000,00	-	1.648.897.990,00	259.629.300,96	410.300.350,94
78	Gianyar	SMKN 1 SUKAWATI	0300105000201	87.719.046,71	778.240.000,00	-	654.536.700,00	9.000.000,00	202.422.346,71
79	Gianyar	SMKN 2 SUKAWATI	0300105000202	626.347.798,65	2.235.200.000,00	1.029.000.000,00	2.585.719.180,00	-	1.304.828.618,65
80	Gianyar	SMKN 3 SUKAWATI	0300105000203	141.503.318,39	974.720.000,00	-	883.222.724,00	70.700.000,06	162.300.594,33
81	Gianyar	SMAN 1 BLAHBATHUH	0180105002685	747.823.442,76	1.572.480.000,00	-	1.316.084.700,00	312.430.600,00	691.788.142,76

NO	KAB/KOTA	NAMA SEKOLAH	REKENING	SALDO AWAL	PENDAPATAN BOS REGULER 2019	PENDAPATAN BOS AFIRMASI DAN KINERJA 2019	BELANJA BOS REGULER, AFKIN 2019	BELANJA DARI SISA BOS 2018	SISA DANA BOS 2019
82	Gianyar	SMAN 1 GIANYAR	0180105002684	688.938.678,70	1.447.320.000,00	815.000.000,00	1.938.095.762,53	35.000.000,00	978.162.916,17
83	Gianyar	SMAN 1 PAYANGAN	0310105000084	120.658.765,18	741.160.000,00	-	715.272.152,00	59.784.383,00	86.762.230,18
84	Gianyar	SMAN 1 SUKAWATI	0300105000200	614.633.697,00	1.743.560.000,00	-	1.432.988.949,00	147.388.100,00	777.816.648,00
85	Gianyar	SMAN 1 TAMPAKSIRING	0520105000023	87.314.794,60	1.222.200.000,00	-	1.214.755.716,00	43.059.395,14	51.699.683,46
86	Gianyar	SMAN 1 TEGALLALANG	0190105000298	156.852.405,98	1.095.640.000,00	-	978.929.179,00	61.714.000,08	211.849.226,90
87	Gianyar	SLB NEGERI 1 GIANYAR	0180105002681	58.080.157,00	448.400.000,00	-	442.930.598,00	29.039.200,00	34.510.359,00
88	Gianyar	SMKN 1 TAMPAK SIRING	0520105000010	45.688.180,24	2.225.280.000,00	-	2.158.310.122,00	0,24	112.658.058,00
89	Gianyar	SMKN 1 MAS UBUD	0190105000303	313.459.220,00	1.622.400.000,00	-	1.561.607.535,00	94.782.000,00	279.469.685,00
90	Gianyar	SMKN 1 TEGALLALANG	0190202107029	175.099.678,47	1.784.320.000,00	-	1.639.218.750,00	3.620.328,47	316.580.600,00

NO	KAB/KOTA	NAMA SEKOLAH	REKENING	SALDO AWAL	PENDAPATAN BOS REGULER 2019	PENDAPATAN BOS AFIRMASI DAN KINERJA 2019	BELANJA BOS REGULER, AFKIN 2019	BELANJA DARI SISA BOS 2018	SISA DANA BOS 2019
91	Gianyar	SMKN 2 TEGALLALANG	0190105000286	9.896.837,68	144.320.000,00	-	127.241.000,00	10.737,68	26.965.100,00
92	Jembrana	SMKN 2 NEGARA	0160105000888	810.170.051,00	1.450.880.000,00	-	1.432.826.687,00	56.042.900,00	772.180.464,00
93	Jembrana	SMKN 1 NEGARA	0160105000890	896.486.273,23	1.638.080.000,00	-	1.625.537.193,00	392.740.317,00	516.288.763,23
94	Jembrana	SMAN 2 NEGARA	0160105000734	61.445.694,13	1.347.080.000,00	-	1.346.733.525,00	30.722.500,38	31.069.668,75
95	Jembrana	SMAN 1 PEKUTATAN	0420105000029	236.488.275,25	1.042.720.000,00	-	865.065.733,00	117.919.137,00	296.223.405,25
96	Jembrana	SMAN 1 NEGARA	0160105000725	479.672.131,48	1.474.200.000,00	785.000.000,00	2.248.778.047,00	434.382.000,00	55.712.084,48
97	Jembrana	SMAN 1 MENDOYO	0160105000720	205.308.790,22	1.004.360.000,00	-	900.439.915,00	89.248.000,00	219.980.875,22
98	Jembrana	SMAN 1 MELAYA	0160105000735	385.261.358,48	1.289.400.000,00	-	1.247.604.132,00	81.402.400,00	345.654.826,48
99	Jembrana	SLB NEGERI 1 JEMBRANA	0160105000722	23.014.171,63	271.200.000,00	-	237.897.195,00	11.542.780,63	44.774.196,00
100	Jembrana	SMKN 3 NEGARA	0160105000726	170.582.086,14	735.360.000,00	-	720.779.927,00	82.000.000,00	103.162.159,14
101	Jembrana	SMAN 2 MENDOYO	0160105000724	251.586.025,97	860.440.000,00	-	813.260.287,00	150.031.500,00	148.734.238,97
102	Jembrana	SMKN 4 NEGARA	0160105000727	301.967.994,87	765.760.000,00	351.000.000,00	987.764.695,36	143.200.000,00	287.763.299,51
103	Jembrana	SMKN 5 NEGARA	0420105000030	145.367.841,99	1.010.560.000,00	-	841.225.783,00	50.541.664,00	264.160.394,99
104	Karangasem	SMKN 1 ABANG	0220105002472	456.883.421,23	1.590.720.000,00	-	1.438.666.323,00	35.427.500,00	573.509.598,23
105	Karangasem	SMAN 2 AMLAPURA	0220105002457	674.286.477,56	1.263.640.000,00	637.000.000,00	1.860.478.106,00	332.130.000,00	382.318.371,56
106	Karangasem	SMAN 1 SIDEMEN	0220105002469	402.076.678,50	963.760.000,00	-	860.728.926,00	178.434.000,00	326.673.752,50
107	Karangasem	SMAN 1 SELAT	0220105002473	236.709.805,33	1.001.840.000,00	-	997.646.773,00	118.354.700,00	122.548.332,33
108	Karangasem	SMAN 1 AMLAPURA	0220105002470	50.942.471,89	1.223.600.000,00	-	1.125.960.206,00	11.196.500,00	137.385.765,89
109	Karangasem	SLB NEGERI 1 KARANGASEM	0220105002471	15.667.139,09	276.800.000,00	-	265.596.719,00	7.868.191,52	19.002.228,57
110	Karangasem	SMAN 3 AMLAPURA	0530105000026	378.397.089,47	1.107.120.000,00	-	1.047.321.287,00	184.434.545,00	253.761.257,47
111	Karangasem	SMAN 1 KUBU	0220105002459	264.152.723,82	982.800.000,00	-	807.610.680,00	124.310.250,00	315.031.793,82
112	Karangasem	SMAN 1 MANGGIS	0220105002476	79.503.115,77	953.960.000,00	-	848.312.538,00	39.751.558,00	145.399.019,77
113	Karangasem	SMAN 1 RENDANG	0510105000066	275.237.932,87	1.141.840.000,00	-	947.322.999,00	83.462.500,00	386.292.433,87
114	Karangasem	SMKN 1 MANGGIS	0220105002479	113.502.296,24	1.746.240.000,00	-	1.672.698.081,00	54.351.000,00	132.693.215,24
115	Karangasem	SMAN 1 BEBANDEM	0220105002462	203.221.156,55	1.040.200.000,00	-	1.014.035.062,00	99.010.000,00	130.376.094,55
116	Karangasem	SMKN 1 KUBU	0220105002445	95.770.946,00	1.784.960.000,00	767.000.000,00	2.358.776.850,00	45.384.000,00	243.570.096,00
117	Karangasem	SMKN 1 AMLAPURA	0530105002490	206.501.440,32	1.808.000.000,00	-	1.773.782.516,00	101.038.000,00	139.680.924,32
118	Karangasem	SMK NEGERI 1 BEBANDEM	0220105002477	102.107.588,36	566.080.000,00	-	498.916.300,00	44.045.945,79	125.225.342,57
119	Klungkung	SMKN 1 KLUNGKUNG	0210105002193	947.477.999,30	2.195.840.000,00	1.007.000.000,00	3.134.496.180,00	5.467.392,15	1.010.354.427,15
120	Klungkung	SMAN 2 SEMARAPURA	0210105002226	59.453.189,67	1.335.040.000,00	-	1.278.156.119,00	29.723.000,00	86.614.070,67
121	Klungkung	SMAN 1 SEMARAPURA	0210105002204	11.473.054,00	1.397.480.000,00	733.000.000,00	2.008.936.678,00	1.500.000,00	131.516.376,00
122	Klungkung	SMAN 1 NUSA PENIDA	0230105000111	276.488.660,06	822.080.000,00	-	657.414.550,45	121.133.000,00	320.021.109,61
123	Klungkung	SMAN 1 BANJARANGKAN	0210105005215	114.416.125,84	1.030.960.000,00	-	955.712.707,00	55.090.173,84	134.263.683,00
124	Klungkung	SLB NEGERI 1 KLUNGKUNG	0210202095068	44.528.944,76	266.000.000,00	-	251.095.000,00	41.056,95	59.392.887,81
125	Klungkung	SMAN 1 DAWAN	0210105002237	640.598.233,16	980.000.000,00	-	867.637.577,00	239.780.392,16	513.180.264,00
126	Klungkung	SMKN 1 NUSA PENIDA	0230105000343	1.351.471.018,23	1.469.120.000,00	-	1.109.253.444,00	9.399.281,35	1.701.938.292,88
127	Klungkung	SMAN SATU ATAP NUSA PENIDA	0230105000348	50.699.844,05	264.880.000,00	-	188.901.846,18	14.245.976,91	112.432.020,96
128	Klungkung	SMAN SATU ATAP KLUMPU	0230105000348	60.609.054,69	219.240.000,00	-	158.744.400,00	9.098.000,01	112.006.654,68
129	Klungkung	SMAN SATU ATAP LEMBONGAN	0230105000357	103.817.910,23	255.080.000,00	-	170.081.907,00	-	188.816.003,23
130	Tabanan	SMAN 2 TABANAN	0120105001952	329.741.338,28	1.604.120.000,00	-	1.534.962.667,83	240.216.181,12	158.682.489,33
131	Tabanan	SMKN 1 TABANAN	0120105001953	311.012.442,23	1.669.120.000,00	733.000.000,00	2.394.174.635,00	155.505.750,00	163.452.057,23
132	Tabanan	SMKN 2 TABANAN	0580105000019	93.788.177,56	1.318.720.000,00	-	1.316.511.997,00	46.772.000,00	49.224.180,56
133	Tabanan	SMAN 1 TABANAN	0120105001950	156.547.952,18	1.588.160.000,00	-	1.581.102.720,00	40.750.000,00	122.855.232,18
134	Tabanan	SMAN 1 SELEMADEG	0410105000179	204.513.275,00	987.840.000,00	-	985.949.273,00	45.411.958,00	160.992.044,00
135	Tabanan	SMAN 1 KEDIRI	0240100000157	1.087.734.816,47	1.510.320.000,00	977.000.000,00	2.397.404.114,00	72.632.000,00	1.105.018.702,47

NO	KAB/KOTA	NAMA SEKOLAH	REKENING	SALDO AWAL	PENDAPATAN BOS REGULER 2019	PENDAPATAN BOS AFIRMASI DAN KINERJA 2019	BELANJA BOS REGULER, AFKIN 2019	BELANJA DARI SISA BOS 2018	SISA DANA BOS 2019
136	Tabanan	SMAN 1 KERAMBITAN	0120105001957	152.080.432,10	888.160.000,00	-	887.972.323,00	77.168.191,88	75.099.917,22
137	Tabanan	SMAN 1 PENEHEL	0440105000013	88.746.994,26	772.240.000,00	-	738.274.697,00	43.041.620,52	79.670.676,74
138	Tabanan	SMAN 1 BATURITI	0120105001951	114.563.927,20	763.000.000,00	-	732.523.465,44	55.961.075,44	89.079.386,32
139	Tabanan	SMAN 1 MARGA	0580105000020	55.754.715,90	748.720.000,00	-	711.351.331,00	-	93.123.384,90
140	Tabanan	SMAN 1 PUPUAN	0470105000086	107.023.964,97	971.040.000,00	-	928.233.678,00	53.499.936,55	96.330.350,42
141	Tabanan	SLB NEGERI 1 TABANAN	0120105001956	26.409.428,35	315.600.000,00	-	301.426.489,00	13.245.227,20	27.337.712,15
142	Tabanan	SMKN 3 TABANAN	0410105000167	245.142.654,77	2.140.480.000,00	-	2.014.125.056,00	93.341.000,00	278.156.598,77
TOTAL									44.775.749.748,40

<https://denpasar.bpk.go.id>



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2019**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN**



Nomor : 70.B/LHP/XIX.DPS/05/2020
Tanggal : 28 Mei 2020



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2019**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

Nomor : 70.B/LHP/XIX.DPS/05/2020

Tanggal : 28 Mei 2020

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Bali

Jalan D.I. Panjaitan No. 2 Renon Denpasar 80000

Telp. (0361) 229193 Fax. (0361) 229184, 256205

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iii
RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN ...	1
HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN	3
1. Kesalahan Penganggaran atas Realisasi Belanja Modal Sebesar Rp4.413.142.374,36	3
2. Penganggaran dan Pertanggungjawaban Pemberian Hibah Belum Memadai.....	6
3. Penetapan Rekening Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Milik Pemerintah Provinsi Bali Tidak Tertib.....	13
4. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Provinsi Bali Belum Sepenuhnya Memadai	16
5. Penyerahan Penguasaan Kendaraan Bermotor Melebihi 12 Bulan Belum Balik Nama	21
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1	Rekapitulasi Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2019 dan 2018 13
Tabel 2	Pengelompokan Hasil Pengujian terhadap 29 Rekening 14
Tabel 3	Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2019 16
Tabel 4	Pencatatan Barang Secara Gabungan pada Perangkat Daerah 17
Tabel 5	Perangkat Daerah yang Identitas Aset Tak Berwujud Tidak Dicatat Lengkap 18

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Rincian Belanja Modal Peralatan Mesin Bernilai di Bawah Kapitalisasi pada Dinas Pendidikan TA 2019
- Lampiran 2 Rincian Belanja Modal Peralatan Mesin yang di Bawah Batasan Nilai Kapitalisasi pada Dinas Kesehatan TA 2019
- Lampiran 3 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya di Bawah Batasan Nilai Kapitalisasi pada Dinas Pendidikan TA 2019
- Lampiran 4 Rincian Belanja Modal Peralatan Mesin yang Tidak Memenuhi Kriteria Aset Tetap pada Dinas Kesehatan TA 2019
- Lampiran 5 Pemberian Hibah Berulang TA 2018 dan 2019
- Lampiran 6 Pemberian Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang Tidak Tercantum dalam Data E-Planning
- Lampiran 7 Belanja dan Penyelesaian Pekerjaan oleh Penerima Hibah Melewati TA 2019
- Lampiran 8 Perbedaan Nomor Rekening, Nama Pemilik Rekening, dan/atau Status Rekening antara yang Digunakan dengan Tercantum dalam SK
- Lampiran 9 Hasil Pengujian terhadap Sejumlah 29 Rekening yang Tidak Tercantum dalam SK Gubernur Nomor 189/04-D/HK/2019
- Lampiran 10 Daftar Kendaraan Hasil Penerimaan Hibah yang Belum Diserahkan BPKBnya pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
- Lampiran 11 Daftar Aset Tetap yang Tercatat Secara Gabungan/Gelondongan
- Lampiran 12 Daftar Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang Tidak Memuat Informasi Secara Lengkap
- Lampiran 13 Daftar Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang Tidak Memuat Informasi Secara Lengkap
- Lampiran 14 Daftar Aset Tak Berwujud yang Tidak Mencantumkan Informasi Secara Lengkap
- Lampiran 15 Rincian Penguasaan Kendaraan Bermotor Melebihi 12 Bulan Belum Balik Nama dan Dikenakan BBNKB



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2019, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Nomor 70.A/LHP/XIX.DPS/05/2020 tanggal 28 Mei 2020 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 70.C/LHP/XIX.DPS/05/2020 tanggal 28 Mei 2020.

Sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali tersebut di atas, BPK mempertimbangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Bali untuk menentukan prosedur pemeriksaan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan dan tidak ditujukan untuk memberikan keyakinan atas Sistem Pengendalian Intern.

BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan Sistem Pengendalian Intern dan operasinya. Pokok-pokok kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali yang ditemukan BPK adalah sebagai berikut.

1. Kesalahan penganggaran atas realisasi belanja modal sebesar Rp4.413.142.374,36;
2. Penganggaran dan pertanggungjawaban pemberian hibah belum memadai;
3. Penetapan rekening penerimaan dan pengeluaran daerah milik Pemerintah Provinsi Bali belum memadai;
4. Penatausahaan BMD pada Pemerintah Provinsi Bali belum sepenuhnya memadai; dan
5. Penyerahan penguasaan kendaraan bermotor melebihi 12 bulan belum balik nama.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur Bali, antara lain agar memerintahkan:

1. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Kepala Dinas Kesehatan dalam mengajukan RKA mengacu pada ketentuan penyajian belanja sesuai SAP;
2. Kepala Bappeda mengoptimalkan sistem aplikasi *E-Planning* supaya pencantuman alokasi anggaran bagi penerima hibah dalam APBD sesuai dengan data keluaran aplikasi *E-Planning*;
3. Kepala BPKAD lebih optimal dalam mengkoordinasikan izin pembukaan dan penetapan rekening sesuai data rekening yang valid;
4. Kepala BPBD, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas PUPR dan Kawasan Permukiman, serta Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga merinci aset yang dicatat secara gabungan menjadi per item satuan barang sesuai kebijakan akuntansi yang berlaku; dan
5. Kepala Bapenda menyusun SOP pajak BBNKB yang menetapkan antara lain prosedur baku balik nama atas penguasaan kendaraan bermotor melebihi 12 bulan secara berturut-turut sesuai Perda yang berlaku.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Denpasar, 28 Mei 2020
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Bali
Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan,



I Gusti Ngurah Satria Perwira, S.E., M.M., Ak., CA.
Register Negara Akuntan No. RNA-11643

HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern pada Pemerintah Provinsi Bali TA 2019 mengungkapkan sebanyak lima temuan pemeriksaan, dengan rincian sebagai berikut.

1. Kesalahan Penganggaran atas Realisasi Belanja Modal Sebesar Rp4.413.142.374,36

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Provinsi Bali (setelah diperiksa) untuk tahun yang berakhir s.d. 31 Desember 2019 menganggarkan belanja modal sebesar Rp760.471.523.139,96, serta telah terealisasi sebesar Rp556.754.502.359,04. Hasil pemeriksaan terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), realisasi, dan pertanggungjawaban belanja pada Perangkat Daerah, diketahui terdapat kesalahan penganggaran dan realisasi belanja modal sebesar Rp4.413.142.374,36, dengan uraian sebagai berikut.

a. Penganggaran belanja modal peralatan mesin pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan di bawah batasan nilai kapitalisasi

Kapitalisasi adalah penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi. Menurut kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Bali, batasan minimal kapitalisasi atas perolehan aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp500.000,00. Hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen anggaran dan realisasi belanja modal Tahun Anggaran (TA) 2019 serta kertas kerja mutasi tambah aset tetap, diketahui terdapat realisasi belanja modal peralatan dan mesin pada Dinas Pendidikan (perubahan struktur organisasi di Tahun 2020 menjadi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga) dan Dinas Kesehatan masing masing sebesar Rp228.742.366,36 dan Rp89.382.500,00 di bawah batasan nilai kapitalisasi. Belanja modal peralatan mesin tersebut seharusnya dianggarkan dan direalisasikan pada belanja barang dan jasa. Rincian atas nilai tersebut disajikan pada *Lampiran 1 dan Lampiran 2*.

b. Penganggaran belanja modal aset tetap lainnya pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan di bawah batasan nilai kapitalisasi

Menurut kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Bali, batasan minimal kapitalisasi atas perolehan aset tetap lainnya untuk buku dan perpustakaan adalah sebesar Rp100.000,00. Hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen anggaran dan realisasi belanja modal serta kertas kerja mutasi tambah aset tetap, diketahui terdapat anggaran belanja modal aset tetap lainnya TA 2019 pada Dinas Pendidikan sebesar Rp9.564.331.854,00, namun terdapat realisasi sebesar Rp3.965.712.508,00 di bawah batasan nilai kapitalisasi. Belanja modal aset tetap lainnya tersebut seharusnya dianggarkan dan direalisasikan pada belanja barang dan jasa. Rincian atas nilai tersebut disajikan pada *Lampiran 3*.

c. Penganggaran belanja modal peralatan mesin pada Dinas Kesehatan tidak memenuhi definisi aset tetap

Pemeriksaan secara uji petik atas dokumen anggaran dan realisasi belanja modal peralatan dan mesin pada Dinas Kesehatan, diketahui terdapat anggaran belanja modal sebesar Rp138.530.893.758,05, namun terdapat realisasi sebesar Rp129.305.000,00 yang digunakan untuk membeli bahan habis pakai seperti penutup *exhaust fan* dan sarung kasur latex yang telah dicatat pada persediaan pada Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sakit Bali Mandara dan UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Belanja tersebut seharusnya dianggarkan pada belanja barang dan jasa. Rincian atas nilai tersebut disajikan pada **Lampiran 4**.

Hasil wawancara dengan pejabat terkait diperoleh informasi sebagai berikut:

- 1) Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Kepala Bidang Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendidikan Tahun 2019 menjelaskan bahwa pada saat penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), masing-masing sekolah tidak menyampaikan item belanja modalnya secara rinci;
- 2) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kesehatan menjelaskan bahwa pada saat pembahasan anggaran dengan masing-masing UPTD tidak dijelaskan secara rinci item barang pengadaannya;
- 3) Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang merupakan unsur Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menjelaskan bahwa pada saat pengajuan anggaran setiap Perangkat Daerah diminta untuk menjelaskan pekerjaan yang akan dilaksanakan, namun Perangkat Daerah kadang tidak menjelaskan secara rinci belanja yang akan dilaksanakan khususnya belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pada Buletin Teknis Nomor 4 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah, Bab V.C, Butir 2, pada:
 - 1) Huruf a yang menyatakan bahwa Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi;
 - 2) Huruf b yang menyatakan bahwa Belanja modal meliputi, antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan aset lainnya. Komponen belanja modal untuk perolehan aset tetap, meliputi harga beli aset tetap ditambah semua biaya lain yang dikeluarkan sampai aset tetap tersebut siap untuk digunakan, misalnya biaya transportasi, biaya uji coba, dan lain-lain. Demikian juga pengeluaran untuk belanja perjalanan dan jasa

yang terkait dengan perolehan aset tetap atau aset lainnya, termasuk di dalamnya biaya konsultan perencana, konsultan pengawas, dan pengembangan perangkat lunak (*software*), harus ditambahkan pada nilai perolehan. Komponen-komponen tersebut harus dianggarkan dalam APBN/APBD sebagai belanja modal dan bukan sebagai belanja operasional. Tentu harus diperhatikan nilai kewajaran dan kepatutan dari biaya-biaya lain di luar harga beli aset tetap tersebut.

- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 53 ayat (1) yang menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.
- c. Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Lampiran, III. Kebijakan Penyusunan APBD, angka 2. Belanja Daerah, huruf b. Belanja Langsung, angka 4) Belanja Modal, pada:
 - 1) Huruf d yang menyatakan bahwa Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dai 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*);
 - 2) Huruf e yang menyatakan bahwa segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitaltzation threshold*), dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, PP Nomor 71 Tahun 2010 dan Pasal 53 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.
- d. Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Bali, pada Bab X. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap, C. Pengukuran Aset Tetap, Angka 6. Kapitalisasi Aset Tetap, yang menyatakan bahwa Kriteria batasan minimal jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi antara lain peralatan dan mesin (kecuali alat besar darat) senilai Rp500.000,00/satuan dan buku perpustakaan senilai Rp100.000,00/satuan.

Hal tersebut mengakibatkan anggaran dan realisasi belanja modal serta belanja barang dan jasa masing-masing sebesar Rp4.413.142.374,36 tidak menginformasikan realisasi belanja yang sebenarnya.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Kepala Dinas Kesehatan dalam mengajukan Rencana Kerja Anggaran (RKA) TA 2019 belum berpedoman pada ketentuan penyajian belanja sesuai SAP; dan
- b. TAPD dalam menganggarkan belanja modal belum sepenuhnya mengacu pada pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran (TA) 2019.

Atas permasalahan tersebut, Gubernur Bali melalui TAPD menyatakan sependapat dan akan menegaskan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Dinas Kesehatan agar dalam penyusunan anggaran mengacu pada petunjuk teknis anggaran.

BPK merekomendasikan Gubernur Bali agar memerintahkan:

- a. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Kepala Dinas Kesehatan dalam mengajukan RKA mengacu pada ketentuan penyajian belanja sesuai SAP; dan
- b. TAPD menganggarkan belanja modal mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

2. Penganggaran dan Pertanggungjawaban Pemberian Hibah Belum Memadai

LRA Pemerintah Provinsi Bali (setelah diperiksa) untuk tahun yang berakhir s.d. 31 Desember 2019 menganggarkan belanja hibah sebesar Rp1.125.995.849.719,00 dengan realisasi sebesar Rp1.040.184.587.070,81 atau 92,38%. Dalam realisasi tersebut, terdapat belanja hibah berupa uang kepada badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan sebesar Rp355.801.655.575,81.

Ketentuan umum, kriteria dan persyaratan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban belanja hibah yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Bali mengacu pada Pergub Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial. Hasil pemeriksaan atas pemberian hibah selama TA 2019 diketahui hal-hal sebagai berikut.

a. Penganggaran pemberian hibah berupa uang belum sepenuhnya memadai

Pergub Nomor 3 Tahun 2019 menetapkan bahwa badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Gubernur melalui Biro Umum Sekretariat Daerah, dan usulan hibah tersebut didistribusikan kepada Perangkat Daerah/unit kerja terkait. Selanjutnya, Kepala Perangkat Daerah/unit kerja terkait melakukan evaluasi usulan hibah. Hasil

evaluasi atas usulan hibah tersebut berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi selaku unsur TAPD yang memberikan pertimbangan dalam pencantuman alokasi anggaran hibah.

Pemeriksaan terhadap penganggaran pemberian hibah berupa uang ditemukan permasalahan sebagai berikut.

1) Pemberian hibah kepada badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan yang berulang

Hibah diberikan dengan memenuhi kriteria paling sedikit antara lain bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak terus-menerus setiap TA kepada subyek yang sama, kecuali kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan provinsi dan/atau ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, dalam usulan hibah juga dilengkapi dengan surat pernyataan bermaterai bahwa pemohon tidak menerima hibah dalam kurun waktu satu tahun sebelumnya.

Pengujian terhadap daftar realisasi belanja hibah TA 2018 dan 2019 diketahui terdapat pemberian hibah berulang di TA 2018 dan 2019, yaitu kepada delapan penerima hibah yang memiliki kesamaan nama (subyek). Selain itu, pengujian secara uji petik atas rekening bank yang digunakan badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan untuk penerimaan dana Hibah menunjukkan bahwa terdapat penerimaan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Bali pada Tahun 2018 dan 2019. Hibah tersebut bukan kepada Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintah Provinsi untuk keperluan mendesak dan/atau ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Hasil konfirmasi kepada kelompok masyarakat penerima hibah juga dinyatakan bahwa memang telah menerima hibah berulang di TA 2018 dan 2019. Realisasi pemberian Hibah berulang disajikan pada *Lampiran 5*.

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda diperoleh keterangan bahwa pemberian hibah berulang dapat disebabkan aplikasi *E-Planning* belum dapat mendeteksi kesamaan nama calon penerima hibah yang penulisannya berbeda atau terdapat perbedaan karakter (spasi, tanda baca, singkatan). Selain itu, bila peruntukkan dan hibah berbeda bidang kegiatan antara TA 2018 dan 2019, maka Perangkat Daerah *leading sector* yang menangani pemberian hibah juga akan berbeda, sehingga tidak dapat terdeteksi usulan hibah yang berulang.

2) Pemberian hibah kepada badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan yang tidak tercantum dalam data keluaran aplikasi *E-Planning*

Usulan hibah yang diterima oleh Biro Umum, dicatat dan didistribusikan kepada Perangkat Daerah/unit kerja terkait yang menjadi *leading sector* sesuai bidang tugasnya. Pencatatan usulan hibah yang dimaksud adalah melalui penginputan data usulan hibah dalam sistem aplikasi *E-Planning* yang dikelola Bappeda Provinsi Bali.

Penerapan *E-Planning* sejalan dengan Permendagri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah. *E-Planning*, antara lain menetapkan bahwa keluaran *E-Planning* digunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS). Oleh karena itu, usulan hibah yang telah diinput dalam *E-Planning*, alokasi anggarannya akan muncul dalam rancangan KUA dan PPAS yang diikuti proses penganggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Hasil perbandingan data pemberian hibah keluaran aplikasi *E-Planning* dengan data realisasi belanja hibah selama TA 2019, diketahui terdapat realisasi pemberian hibah kepada sebanyak 36 badan/lembaga/kelompok kemasyarakatan yang tidak tercantum dalam keluaran aplikasi *E-Planning* APBD Induk dan Perubahan TA 2019. Lebih lanjut pengujian secara uji petik, diketahui bahwa penerima hibah yang namanya tidak tercantum dalam keluaran aplikasi *E-Planning* tersebut telah didukung dengan usulan atau proposal hibah. Rincian penerima hibah yang tidak tercantum dalam keluaran aplikasi *E-Planning* disajikan pada *Lampiran 6*.

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda diperoleh informasi bahwa dalam proses perencanaan dan penganggaran hibah Tahun 2019, penggunaan aplikasi *E-Planning* sementara difokuskan pada proses penginputan usulan Hibah oleh Biro Umum pada aplikasi agar tidak melewati batas waktu penyampaian usulan hibah (pada bulan Maret tahun berkenaan untuk APBD induk tahun berikutnya, Perubahan APBD pada bulan Juni pada tahun anggaran berkenaan). Namun, hasil evaluasi usulan hibah berupa rekomendasi Perangkat Daerah/unit kerja terkait dan proses berikutnya seperti pencantuman alokasi anggaran hibah di TA 2019 belum memanfaatkan aplikasi *E-Planning* atau masih manual (pengolahan data format excel).

b. Terdapat pertanggungjawaban pemberian hibah yang belum memadai

Pertanggungjawaban pemberian hibah baik berupa uang, meliputi antara lain laporan penggunaan hibah, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), serta bukti pengeluaran yang lengkap dan sah untuk hibah berupa uang. Hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban pemberian hibah berupa uang ditemukan permasalahan sebagai berikut.

- 1) Belanja dan penyelesaian pekerjaan oleh penerima hibah melewati TA 2019

Pemeriksaan bukti pertanggungjawaban hibah berupa uang, konfirmasi kepada penerima hibah dan pengamatan fisik secara uji petik, diketahui bahwa terdapat empat penerima hibah yang membelanjakan dana hibah dan melaksanakan kegiatannya melewati TA 2019, namun laporan penggunaan dana serta bukti pengeluaran telah lengkap disampaikan kepada Gubernur melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebelum tanggal 10 Januari 2020.

Konfirmasi dengan penerima hibah diperoleh informasi bahwa belanja dan penyelesaian kegiatan melewati TA 2019 karena dana hibah diperuntukan untuk kegiatan fisik atau infrastruktur bangunan yang pengerjaannya swakelola sehingga menyesuaikan dengan waktu yang dimiliki masyarakat yang sifatnya membantu penyelesaian pekerjaan yang bersumber dari dana hibah terkait. Lebih lanjut, hasil konfirmasi dan pengumpulan data atau bukti pengeluaran dari keempat penerima hibah tersebut, diketahui pengeluaran dana hibah yang sebenarnya dilakukan pada Tahun 2020 adalah senilai Rp602.727.900,00 dengan rincian penerima hibah disajikan pada **Lampiran 7**.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (perubahan struktur organisasi di Tahun 2020 menjadi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP)) diperoleh keterangan bahwa penyelesaian pekerjaan dapat melewati TA dapat disebabkan *monitoring* oleh Dinas PUPRPKP tidak dapat dilakukan kepada seluruh penerima hibah (kurang lebih berjumlah 3.000 penerima hibah) dan lokasinya berjauhan. Selain itu, pelaksanaan pekerjaan fisik menyesuaikan dengan waktu masyarakat karena bersifat swakelola.

2) Pemindehan dana oleh penerima hibah ke rekening lainnya

Pedoman pemberian hibah menetapkan bahwa penerima hibah berupa uang wajib melampirkan fotokopi rekening bank saat proses pencairan dan surat pernyataan bahwa rekening bank tersebut masih aktif atas nama badan/lembaga penerima hibah. Hal ini dimaksudkan agar badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan selaku penerima hibah dapat mengelola dana hibah dalam rekening tersebut dan Perangkat Daerah/unit kerja *leading sector* dapat memantau penggunaan serta sisa dana hibah dalam rekening bank tersebut.

Hasil pemeriksaan secara uji petik, diketahui terjadi pemindahan dana dari rekening bank penerima hibah ke rekening lainnya, seperti Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan lembaga keuangan lainnya, serta penyimpanan uang tunai oleh bendahara badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan penerima hibah. Hasil wawancara kepada penerima hibah diketahui alasan dilakukannya pemindahan dana hibah tersebut adalah kekuatiran bila rekening bank tidak bersaldo nihil saat akhir periode pelaporan maka dana hibah akan diminta untuk dikembalikan ke Kas Daerah.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Permendagri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, pada Pasal 4 ayat (4) yang menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memenuhi kriteria paling sedikit bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak terus-menerus setiap tahun anggaran, kecuali:

- 1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 2) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- b. Permendagri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah, pada Pasal 14 ayat (2) yang menyatakan bahwa Keluaran dari Perencanaan Berbasis Elektronik/*e-Planning* digunakan sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS yang terdapat dalam aplikasi Penganggaran Berbasis Elektronik/*e-Budgeting* yang dikelola oleh Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah;
- c. Pergub Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, pada:
- 1) Pasal 4 ayat (4) huruf c yang menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit antara lain tidak secara terus-menerus setiap tahun anggaran kepada subyek yang sama, kecuali:
 - a) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintah Provinsi untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - b) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
 - 2) Pasal 8
 - a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Gubernur melalui Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi;
 - b) Ayat (5) yang menyatakan bahwa Usulan tertulis dari calon penerima Hibah selain yang diatur dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a, dilengkapi dengan Surat Pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa memang benar yang bersangkutan tidak menerima Hibah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebelumnya.
 - 3) Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa Rekomendasi Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Hibah dalam rancangan KUA dan PPAS dan rancangan KUA dan PPAS Perubahan;
 - 4) Pasal 17 ayat (1) huruf c angka 7 yang menyatakan bahwa Mekanisme pelaksanaan Belanja Hibah berupa uang dilakukan oleh Perangkat Daerah/unit kerja terkait dengan menyiapkan dokumen permohonan pencairan Hibah beserta kelengkapan persyaratan Hibah kepada Gubernur

melalui Kepala BPKAD Provinsi selaku PPKD dalam rangkap 4 (empat), antara lain fotokopi rekening bank dan surat pernyataan bahwa rekening bank masih aktif atas nama badan, lembaga/organisasi penerima Hibah.

- 5) Pasal 21 ayat (4) yang menyatakan bahwa Pertanggungjawaban penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) laporan penggunaan Hibah;
 - b) surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c) bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai Peraturan Perundang-undangan.
 - 6) Pasal 22 yang menyatakan bahwa Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi atas pemberian Hibah meliputi:
 - a) usulan dari calon penerima Hibah kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait;
 - b) keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima Hibah;
 - c) NPHD;
 - d) Pakta integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
 - e) bukti transfer uang atas pemberian Hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian Hibah berupa barang/jasa.
 - 7) Pasal 51 ayat (1) yang menyatakan bahwa Perangkat Daerah/unit kerja terkait melakukan *monitoring* dan evaluasi atas pemberian Hibah dan Bansos.
- d. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Gubernur Bali dengan masing-masing penerima hibah, antara lain menyatakan bahwa NPHD berlaku sampai dengan 31 Desember 2019;
 - e. Surat Pernyataan Tidak Menerima Hibah Satu Tahun Sebelumnya yang ditandatangani oleh setiap penerima hibah;
 - f. Surat Pernyataan Rekening Bank yang ditandatangani oleh setiap penerima hibah.

Hal tersebut mengakibatkan:

- a. Mengurangi kesempatan calon penerima hibah lainnya untuk memperoleh Hibah dari Pemerintah Provinsi Bali;
- b. Pemberian hibah kepada badan/lembaga/kelompok masyarakat yang namanya tidak tercantum dalam keluaran aplikasi *E-Planning* dapat berpotensi melebihi batas waktu penyampaian usulan hibah sesuai ketentuan;
- c. Laporan pertanggungjawaban atas empat penerima hibah yang melewati TA 2019 senilai total Rp602.727.900,00 tidak informatif; dan

- d. Risiko penyalahgunaan dana hibah yang dipindahbukukan ke rekening lainnya dan menjadi tidak terpantau oleh Perangkat Daerah/unit kerja *leading sector*.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Kepala Dinas PUPRPKP selaku *leading sector* pelaksanaan hibah berupa kegiatan fisik atau infrastruktur bangunan kurang optimal dalam melaksanakan *monitoring* dan evaluasi pemberian hibah untuk menjamin penerima Hibah mengelola dan menggunakan dananya, menyelesaikan kegiatan, serta melaporkan pertanggungjawaban hibah sesuai NPHD;
- b. Kepala Bappeda selaku *leading sector* di bidang perencanaan pembangunan daerah belum mengoptimalkan sistem aplikasi *E-Planning* untuk menjamin ketepatan pencantuman alokasi anggaran bagi penerima hibah dalam APBD sesuai dengan data keluaran aplikasi *E-Planning*; dan
- c. TAPD belum memperoleh informasi yang lengkap dalam memberikan pertimbangan untuk pencantuman alokasi anggaran hibah yang berulang setiap TA kepada subyek yang sama.

Atas permasalahan tersebut, Gubernur Bali melalui Bappeda dan Dinas PUPRPKP menyatakan sependapat serta akan meningkatkan pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi hibah dengan menambah ketersediaan sumber daya.

BPK merekomendasikan Gubernur Bali agar memerintahkan:

- a. Kepala Dinas PUPRPKP lebih optimal dalam melaksanakan *monitoring* dan evaluasi pemberian hibah agar penerima hibah mengelola dan menggunakan dananya, menyelesaikan kegiatan, serta melaporkan pertanggungjawaban hibah sesuai NPHD;
- b. Kepala Bappeda mengoptimalkan sistem aplikasi *E-Planning* supaya pencantuman alokasi anggaran bagi penerima hibah dalam APBD sesuai dengan data keluaran aplikasi *E-Planning*; dan
- c. TAPD lebih aktif berkoordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah *leading sector* mencari informasi lengkap dalam memberikan pertimbangan untuk pencantuman alokasi anggaran belanja hibah supaya tidak berulang kepada subyek yang sama setiap TA.

3. Penetapan Rekening Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Milik Pemerintah Provinsi Bali Tidak Tertib

Neraca Pemerintah Provinsi Bali (setelah diperiksa) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 menyajikan saldo Kas dan Setara Kas masing-masing sebesar Rp831.411.352.968,02 dan Rp702.345.385.366,47, dengan rekapitulasi sebagai berikut.

Tabel 1. Rekapitulasi Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2019 dan 2018

(dalam rupiah)

No.	Jenis Akun Kas	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1.	Kas di Kas Daerah	650.647.578.852,66	155.539.387.397,37
2.	Kas di Bendahara Penerimaan	13.286.000,00	39.726.000,00
3.	Kas di Bendahara Pengeluaran	6.187.328,00	244.875.222,43
4.	Kas di BLUD	135.968.551.038,96	100.992.026.346,86
5.	Kas Lainnya di Bendahara BOS	44.775.749.748,40	45.529.370.399,81
6.	Setara Kas	0,00	400.000.000.000,00
	Jumlah	831.411.352.968,02	702.345.385.366,47

Kas tersebut disimpan dalam rekening yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 189/04-D/HK/2019 tanggal 3 Januari 2019 tentang Nomor Rekening dan Nomor Pokok Wajib Pajak Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan Perangkat Daerah, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019. Rekening-rekening tersebut, khususnya yang digunakan untuk penerimaan dan pengeluaran di setiap Perangkat Daerah, ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan penetapan rekening dari setiap Kepala Perangkat Daerah melalui Bendahara Umum Daerah (BUD).

Pengujian terhadap nomor-nomor rekening yang telah ditetapkan tersebut, diketahui terdapat permasalahan sebagai berikut.

a. Perbedaan nomor rekening, nama pemilik rekening, dan/atau status rekening antara yang digunakan dengan tercantum dalam SK

Hasil pengujian kesesuaian rekening diketahui terdapat 16 rekening yang memiliki perbedaan antara rekening yang digunakan oleh Unit Pelaksana Tugas Daerah (UPTD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan sekolah-sekolah dengan rekening yang tercantum dalam SK. Rekening yang diusulkan untuk dimuat dan telah ditetapkan dalam SK Gubernur memiliki kesalahan pengetikan nomor, kesalahan nama pemilik rekening, dan/atau status rekening tidak aktif atau telah ditutup namun tidak dilakukan perbaikan saat diusulkan penetapan rekening. Rincian rekening tersebut dan penjelasan perbedaan disajikan pada **Lampiran 8**.

Menurut keterangan Kepala UPTD/BLUD/sekolah terkait diperoleh penjelasan bahwa memang terdapat ketidakcermatan dalam menyampaikan daftar nomor rekening untuk ditetapkan dalam SK Gubernur. Selain itu, menurut keterangan Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku

Kuasa BUD menjelaskan bahwa sebelum lampiran SK Gubernur tentang penggunaan rekening TA 2019 ditetapkan, BPKAD tidak melaksanakan verifikasi rekening milik Perangkat Daerah. Proses pengumpulan daftar rekening dari sekolah, UPTD, dan BLUD dilaksanakan oleh Perangkat Daerah induk serta selanjutnya disampaikan kepada BPKAD untuk diajukan kepada Gubernur Bali melalui Biro Hukum untuk ditetapkan dengan SK Gubernur.

b. Terdapat 29 rekening tidak tercantum dalam SK

Hasil pengujian melalui konfirmasi rekening yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kantor Cabang Utama Denpasar, diperoleh hasil konfirmasi bahwa terdapat 29 rekening yang merupakan milik Pemerintah Provinsi Bali namun belum tercantum dalam SK Gubernur Nomor 189/04-D/HK/2019. Pengujian lebih lanjut terhadap 29 rekening tersebut melalui permintaan keterangan mengenai status dan penggunaan rekening kepada Perangkat Daerah/UPTD/sekolah yang tercantum sebagai nama pemilik rekening. Secara umum, hasil pengujian terhadap 29 rekening sampai dengan berakhirnya pemeriksaan dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2. Pengelompokan Hasil Pengujian terhadap 29 Rekening

No.	Pengelompokkan Hasil Pengujian	Jumlah Rekening
1.	Ganti nama pemilik rekening	1
2.	Pembukaan rekening baru dilakukan di Tahun 2019	3
3.	Rekening masih digunakan	1
4.	Rekening masih digunakan, dilakukan perubahan nama pemilik rekening karena perubahan struktur Perangkat Daerah	1
5.	Rekening baru dilakukan penutupan di Tahun 2020	23
	Jumlah	29

Rincian disajikan pada **Lampiran 9**

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:
 - 1) Pasal 127
 - a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan operasional penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung penerimaan daerah setiap hari;
 - c) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir hari;

- d) Ayat (5) yang menyatakan bahwa Rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sebagai rekening yang menampung pagu dana untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah sesuai rencana pengeluaran, yang besarnya ditetapkan dengan Perkada; dan
 - e) Ayat (6) yang menyatakan bahwa Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran pada bank umum ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan atas perintah BUD.
- 2) Pasal 128
- a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Kepala Daerah dapat memberi izin kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk membuka rekening penerimaan melalui BUD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah pada bank umum; dan
 - b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Kepala Daerah dapat memberikan izin kepada Kepala SKPD untuk membuka rekening pengeluaran melalui BUD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah pada bank umum untuk menampung UP.
- b. PP Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, pada:
- 1) Pasal 19 ayat (6) yang menyatakan bahwa Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran pada Bank Umum ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan atas perintah Bendahara Umum Daerah;
 - 2) Pasal 30 ayat (2) yang menyatakan bahwa Gubernur/bupati/walikota dapat memberikan izin pembukaan rekening pengeluaran pada Bank Umum untuk menampung Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada satuan kerja perangkat daerah;
 - 3) Pasal 30 ayat (4) yang menyatakan bahwa dalam rangka pengelolaan kas, BUD dapat memerintahkan pemindahbukuan dan/atau penutupan rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- c. Pergub Nomor 64 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja BPKAD, pada Pasal 10 ayat (1) huruf g yang menyatakan bahwa Kepala Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas mengkoordinasikan izin pembukaan rekening dan menyiapkan bahan rancangan Keputusan Gubernur tentang Rekening Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran.

Hal tersebut mengakibatkan:

- a. Sebanyak 16 rekening yang ditetapkan dalam SK Gubernur Nomor 189/04-D/HK/2019 tidak menunjukkan rekening yang sebenarnya digunakan untuk operasional penerimaan dan pengeluaran daerah oleh Perangkat Daerah, UPTD, BLUD, dan sekolah; dan

- b. Rekening yang tidak tercantum dalam SK Gubernur Nomor 189/04-D/HK/2019 dan tidak dilakukan penutupan rekening jika tidak digunakan oleh Perangkat Daerah terkait menjadi rawan penyalahgunaan.

Permasalahan tersebut disebabkan Kepala Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah pada BPKAD selaku Kuasa BUD:

- a. Belum optimal dalam mengkoordinasikan izin pembukaan dan penetapan rekening sesuai data rekening yang valid; dan
- b. Belum menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur prosedur baku dalam pendaftaran, pembukaan, dan penutupan rekening Perangkat Daerah.

Atas permasalahan tersebut, Gubernur Bali melalui Kepala BPKAD menyatakan sependapat dan telah melaksanakan penutupan rekening serta perbaikan untuk penetapan rekening Tahun 2020.

BPK merekomendasikan Gubernur Bali agar memerintahkan Kepala BPKAD agar:

- a. Lebih optimal dalam mengkoordinasikan izin pembukaan dan penetapan rekening sesuai data rekening yang valid; dan
- b. Menyusun SOP yang mengatur prosedur baku dalam pendaftaran, pembukaan, dan penutupan rekening Perangkat Daerah.

4. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Provinsi Bali Belum Sepenuhnya Memadai

Neraca Pemerintah Provinsi Bali (setelah diperiksa) per 31 Desember 2019 menyajikan saldo Aset Tetap sebesar Rp7.743.629.861.229,56 dengan rekapitulasi sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 3. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2019

Jenis Aset Tetap	Saldo (Rp)
Tanah	4.166.232.536.186,23
Peralatan dan Mesin	1.600.892.532.185,69
Gedung dan Bangunan	2.170.807.551.558,85
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.940.133.070.386,02
Aset Tetap Lainnya	63.719.411.785,25
Konstruksi Dalam Pengerjaan	21.598.209.957,17
Akumulasi Penyusutan	(3.219.753.450.829,65)
Jumlah	7.743.629.861.229,56

Saldo tersebut merupakan hasil konsolidasi Aset Tetap di masing-masing Perangkat Daerah oleh Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali. Dalam penatausahaan aset daerah atau BMD, Pemerintah Provinsi Bali telah menggunakan

sistem aplikasi yang terkomputerisasi yaitu SIMDA BMD, dengan *output* utamanya adalah berupa Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Laporan Inventaris Barang yang berisi data keuangan dan data fisik atas aset daerah yang tersaji dalam Neraca Pemerintah Daerah.

Hasil pemeriksaan atas penatausahaan BMD yang terdaftar dalam KIB di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Terdapat BPKB hasil penerimaan hibah yang belum diterima

Hasil pengujian atas dokumen hasil penerimaan hibah berupa Berita Acara Serah Terima (BAST) hibah dan dokumen pendukungnya, diketahui bahwa sesuai Naskah Perjanjian Hibah Nomor PKS.15/MENLKH-SETJEN/ROUM/KAP.3/1/2019 tanggal 23 Januari 2019 dan BAST Nomor BA.18/MENLHK-SETJEN/ROUM/KAP.3/1/2019 tanggal 23 Januari 2019, Dinas Kehutanan Provinsi Bali (perubahan organisasi di Tahun 2020 menjadi Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup) telah menerima hibah berupa barang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp371.670.000,00. Dalam BAST tersebut memuat hibah senilai Rp156.750.000,00 berupa kendaraan dinas sepeda motor sebanyak 10 unit. Menurut lampiran BAST, sebanyak enam unit sepeda motor perolehan Tahun 2010, tiga unit sepeda motor perolehan Tahun 2011, dan satu unit sepeda motor perolehan Tahun 2012 dengan kondisi seluruh kendaraan adalah baik.

Pengujian lebih lanjut atas hibah kendaraan ini diketahui bahwa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas 10 unit sepeda motor tersebut belum diserahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Bali. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Tahun 2020, menjelaskan bahwa BPKB atas 10 kendaraan tersebut memang belum diserahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Rincian kendaraan dapat dilihat pada **Lampiran 10**.

b. Terdapat item barang yang dicatat secara gabungan

Pengujian atas data KIB diketahui terdapat buku yang tercatat pada KIB Aset Tetap Lainnya senilai Rp10.404.042.443,00 pada empat Perangkat Daerah. Pencatatan buku secara gabungan berupa buku koleksi perpustakaan dan buku pelajaran, dengan nilai terbesar pada Dinas Pendidikan serta Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Rekapitulasi masing-masing Perangkat Daerah dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 4. Pencatatan Barang Secara Gabungan pada Perangkat Daerah

No.	Perangkat Daerah Tahun 2019	Nilai Perolehan (Rp)
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	54.177.300.00
2	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	7.680.319.816.00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)	914.847.000.00
4	Dinas Pendidikan	1.754.698.327.00
	Jumlah	10.404.042.443,00

Rincian item barang disajikan pada **Lampiran 11**

Pencatatan barang harus dilakukan per satuan unit untuk mengidentifikasi penerapan batasan minimal nilai kapitalisasi aset sesuai kebijakan akuntansi. Menurut keterangan pengurus barang Dinas Pendidikan (perubahan organisasi di Tahun 2020 menjadi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga), diperoleh informasi bahwa terkadang terjadi kesalahan/*error* pada aplikasi SIMDA BMD bila dilakukan penginputan item barang yang memiliki kuantitas/jumlah banyak dalam satu kali perolehan.

c. KIB belum memuat informasi lengkap

Menurut sistem dan prosedur (sisdur) pengelolaan BMD Pemerintah Provinsi Bali, khususnya dalam sisdur penatausahaan ditetapkan bahwa kartu atau buku inventaris memuat data meliputi lokasi, jenis/*merk*, tipe, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, keadaan barang, dan informasi lainnya. Manfaat yang diharapkan sesuai sisdur, antara lain kemudahan dalam pengenalan barang.

Berdasarkan hasil pengujian atas daftar barang yang termuat dalam KIB, diketahui bahwa terdapat aset berupa Gedung dan Bangunan yang belum memuat informasi secara lengkap pada 11 Perangkat Daerah, antara lain data lokasi, luas bangunan, struktur bangunan, dan/atau status tanah total senilai Rp210.708.890.916,20. Rincian aset Gedung dan Bangunan pada masing-masing Perangkat Daerah disajikan pada *Lampiran 12*.

Selanjutnya, atas aset berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan juga ditemukan hal yang serupa, yaitu belum memuat informasi secara lengkap pada 14 Perangkat Daerah, antara lain data lokasi, luas (panjang dan lebar jalan), dan/atau status tanah total senilai Rp121.589.744.000.00. Rincian aset Jalan, Irigasi dan Jaringan pada masing-masing Perangkat Daerah disajikan pada *Lampiran 13*.

Menurut keterangan Kepala Sub Bidang Penatausahaan BMD pada BPKAD diperoleh informasi bahwa, beberapa aset dalam KIB belum dicantumkan luasan karena Pemerintah Provinsi Bali belum pernah melaksanakan inventarisasi atau sensus BMD kembali dalam lima tahun terakhir ini.

Selain itu, atas Aset Tak Berwujud, juga ditemukan item barang yang belum memuat informasi secara lengkap seperti data spesifikasi, kondisi, atau penciptanya total senilai Rp1.982.432.570,00. Rekapitulasi atas masing-masing Perangkat Daerah yang belum memuat informasi secara lengkap disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5. Perangkat Daerah yang Identitas Aset Tak Berwujud Tidak Dicatat Lengkap

No.	Nama Perangkat Daerah Tahun 2019	Nilai Perolehan (Rp)
1	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	174.800.000.00
2	Dinas Kesehatan	49.000.000.00
3	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	102.273.200.00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.644.399.961.00
5	Dinas Pendidikan	11.959.409.00
	Jumlah	1.982.432.570,00

Rincian atas item barang disajikan pada *Lampiran 14*

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada:
 - 1) Pasal 12
 - a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Barang;
 - b) Ayat (3) huruf c yang menyatakan bahwa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
 - 2) Pasal 14 ayat (4) yang menyatakan bahwa Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang dan bertanggung jawab meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
 - 3) Pasal 16 ayat (2) huruf c yang menyatakan bahwa Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
 - 4) Pasal 296 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - 5) Pasal 308
 - a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengamanan administrasi kendaraan dinas dilakukan, dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib dan teratur atas dokumen sebagai berikut:
 - (1) bukti pemilik kendaraan bermotor (BPKB);
 - (2) fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK);
 - (3) Berita Acara Serah Terima (BAST);
 - (4) kartu pemeliharaan;
 - (5) data daftar barang; dan
 - (6) dokumen terkait lainnya yang diperlukan.
 - b) Pengamanan hukum Kendaraan Dinas dilakukan, antara lain melakukan pengurusan semua dokumen kepemilikan kendaraan bermotor, seperti BPKB dan STNK, termasuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
- b. Pergub Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Bali, Bab X. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap, C. Pengukuran Aset Tetap yang menyatakan bahwa Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai persediaan/aset lainnya.

- c. Pergub Nomor 39 Tahun 2015 tentang Prosedur Tetap Pengamanan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, pada:
 - 1) Pasal 4 ayat (5) yang menyatakan bahwa Penyimpanan dokumen kepemilikan BMD diluar tanah dan/atau bangunan seperti kendaraan bermotor asli bukti kepemilikan disimpan oleh pengguna barang/kuasa pengguna barang;
 - 2) Pasal 6 ayat (4) yang menyatakan bahwa Pengamanan hukum atas BMD selain tanah adalah melingkupi bukti penguasaan BPKB Kendaraan, IMB Bangunan/gambar gedung, Gambar Instalasi, Dokumen Berita Serah Terima Barang, Surat Keputusan Hibah dan sebagainya.
- d. Pergub Nomor 30 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah, Lampiran V. Sistem dan Prosedur Penatausahaan Barang Milik Daerah, Huruf B. Deskripsi Kegiatan, Angka 2. Inventarisasi BMD, antara lain menyatakan bahwa Buku Inventaris tersebut memuat data meliputi lokasi, jenis/*merk*, tipe, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, keadaan barang, dan sebagainya.

Hal tersebut mengakibatkan:

- a. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup belum dapat melakukan balik nama kepemilikan kendaraan dinas berupa 10 unit sepeda motor yang berasal dari hibah dalam rangka pengamanan administrasi;
- b. Risiko salah saji atas aset yang masih dicatat secara gabungan tidak memenuhi nilai minimum satuan kapitalisasi sesuai kebijakan akuntansi; dan
- c. Kesulitan dalam mengidentifikasi secara cepat dan tepat atas aset yang belum memuat informasi secara lengkap.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup belum berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pengamanan administrasi kendaraan dinas yang berasal dari hibah;
- b. Pengurus Barang pada BPBD, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan belum melaksanakan pencatatan aset per item satuan barang sesuai kebijakan akuntansi yang berlaku; dan
- c. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Perangkat Daerah terkait belum optimal dalam melaksanakan penelitian kelengkapan informasi atas pencatatan BMD yang telah dilakukan oleh Pengurus Barang.

Atas permasalahan tersebut, Gubernur Bali melalui Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kepala BPBD, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala BPKAD,

Kepala Dinas Kebudayaan, Dinas Perhubungan, serta Dinas Kesehatan menyatakan sependapat dan selanjutnya Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang akan meningkatkan pengawasan terhadap pencatatan yang dilakukan Pengurus Barang.

BPK merekomendasikan Gubernur Bali agar memerintahkan:

- a. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup berkoordinasi lebih intensif dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memperoleh BPKB atas 10 kendaraan bermotor dalam rangka pengamanan administrasi;
- b. Kepala BPBD, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas PUPR dan Kawasan Permukiman, serta Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga merinci aset yang dicatat secara gabungan menjadi per item satuan barang sesuai kebijakan akuntansi yang berlaku; dan
- c. Kepala Perangkat Daerah melengkapi informasi dalam KIB sesuai sisur penatausahaan BMD, pada:
 - 1) 11 unit Pengguna Barang untuk aset Gedung dan Bangunan;
 - 2) 14 unit Pengguna Barang untuk aset Jalan, Irigasi dan Jaringan;
 - 3) 5 unit Pengguna Barang untuk Aset Tak Berwujud.

5. Penyerahan Penguasaan Kendaraan Bermotor Melebihi 12 Bulan Belum Balik Nama

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Provinsi Bali (setelah diperiksa) untuk tahun yang berakhir s.d. 31 Desember 2019 menganggarkan Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp1.160.200.000.000,00, serta telah terealisasi sebesar Rp1.256.433.265.300,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp112.856.449.100,00 bila dibandingkan realisasi untuk tahun yang berakhir s.d. 31 Desember 2018 sebesar Rp1.143.576.816.200,00.

Pemungutan BBNKB oleh Pemerintah Provinsi Bali dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemungutan pajak adalah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bali, yaitu dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah pada sembilan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Dalam kegiatan pelayanan pemungutan pajak daerah, Bapenda telah memiliki prosedur baku, antara lain SOP Pengenaan Pajak Progresif untuk kendaraan bermotor. Alur proses pendaftaran pada pengenaan pajak progresif adalah sebagai berikut.

- a. Pada proses pendaftaran, petugas menginput nomor polisi serta nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk menginformasikan urut milik kendaraan bermotor dan mengkonfirmasi urut milik kendaraan tersebut kepada Wajib Pajak (WP). Apabila WP tidak setuju dengan urut milik kendaraannya, WP diarahkan menuju loket pendataan progresif terlebih dahulu;
- b. Setelah WP melakukan pendataan progresif, WP kembali menuju loket pendaftaran;
- c. Apabila tidak ditemukan nomor KTP di sistem aplikasi, maka petugas pendaftaran menginput data KTP WP tersebut sesuai dengan dokumen identitas yang dibawa. Nomor KTP wajib diinput, dan nama pada nomor KTP yang diinput harus sama dengan nama pada Data Kendaraan. Apabila berbeda, maka dilakukan pengecekan tahap berikutnya;
- d. Pengecekan tahap berikutnya yang dimaksud adalah pengecekan nama dengan metode mencari salah satu kata inti, mengabaikan nama Bali, menghilangkan gelar dan menghilangkan tanda baca. Apabila ditemukan salah satu kata inti pada nama di KTP dengan nama di kendaraan, maka diperbolehkan untuk *approval* atau persetujuan pendaftaran;
- e. Apabila tidak ditemukan salah satu kata inti atau dengan kata lain nama di KTP sangat berbeda dengan nama di kendaraan, maka wajib balik nama atau dapat dilakukan *approval* dengan alasan khusus oleh pejabat Kepolisian yang ditunjuk.

Pemeriksaan secara uji petik atas *database* pembayaran pajak Tahun 2019 pada Bapenda Provinsi Bali, diketahui terdapat transaksi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) atas nama dan alamat yang sama dan/atau identik (hanya perbedaan penggunaan tanda baca dan singkatan) namun terdata dengan nomor KTP yang berbeda-beda atas beberapa kendaraan bermotor. Pengujian lebih lanjut terhadap setiap data nomor KTP tersebut, ternyata dapat diketahui nama dan alamat yang valid untuk nomor KTP tertentu karena terjadi pengenaan progresif untuk data WP (nomor KTP, nama, dan alamat) yang sama. Adanya pengenaan progresif berarti WP telah setuju (terkonfirmasi) dengan urut milik kendaraannya sesuai dengan SOP alur proses pendaftaran pengenaan pajak progresif. Hal ini menunjukkan bahwa telah dilakukan perubahan nomor KTP saat pendataan dalam *database* namun tidak diikuti dengan proses balik nama dan alamat sesuai data KTP yang valid.

Pemeriksaan lebih lanjut atas nomor KTP yang terdata dalam *database* pembayaran pajak namun tidak dilakukan perubahan nama dan alamat sesuai data KTP baik dalam transaksi Tahun 2019 maupun Tahun 2018, secara uji petik diketahui terdapat WP yang seharusnya melakukan balik nama pada Tahun 2019 karena penguasaan kendaraan bermotor pada Tahun 2019 telah melebihi 12 bulan (sejak Tahun 2018).

Hal ini menunjukkan, saat proses pendataan progresif tidak ditemukan salah satu kata inti dan/atau memiliki nama di KTP yang sangat berbeda dengan nama menurut data kendaraan, namun petugas pendaftaran melakukan perubahan nomor KTP dalam *database* tanpa disertai perubahan nama dan alamat dalam data

kendaraan atau proses balik nama kendaraan bermotor. Perubahan nomor KTP untuk kendaraan bermotor tersebut telah diterapkan pada Tahun 2018 dan 2019, artinya penguasaan kendaraan telah melebihi 12 bulan secara berturut-turut atau telah terjadi penyerahan menurut Perda, sehingga wajib balik nama dan dikenakan BBNKB. Tarif BBNKB yang dikenakan berdasarkan jumlah kendaraan bermotor yang terdata sesuai nomor KTP dimaksud dalam *database* pembayaran pajak Tahun 2019, sehingga diperoleh nilai BBNKB yang belum dapat dipungut untuk sebanyak 136 nomor KTP, dengan rincian data perhitungan disajikan pada **Lampiran 15**.

Telaah atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, lingkup pelayanan Samsat antara lain regident kendaraan bermotor dan pembayaran pajak atas kendaraan bermotor. Data regident digunakan untuk keperluan forensik kepolisian melalui sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan yang diselenggarakan oleh kepolisian. Sedangkan, pembayaran pajak atas kendaraan bermotor mengacu pada peraturan perundang-undangan, dalam hal ini pemungutan pajak provinsi ditetapkan sesuai Perda yang berlaku.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Perpres Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, pada:
 - 1) Pasal 15 ayat (3) yang menyatakan bahwa Besaran PKB dan/atau BBNKB, SWDKLLJ, dan biaya administrasi STNK dan/atau TNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Pasal 31 ayat (6) yang menyatakan bahwa Data regident kendaraan bermotor merupakan sub sistem dari sistem informasi dan komunikasi Samsat yang digunakan untuk forensik kepolisian sebagai bagian dari Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diselenggarakan oleh Polri.
- b. Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, pada Pasal 18:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Objek Pajak BBNKB adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor;
 - 2) Ayat (4) yang menyatakan bahwa Penguasaan kendaraan bermotor melebihi 12 (dua belas) bulan secara berturut-turut dianggap sebagai penyerahan
- c. Pergub Nomor 94 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pemungutan Pajak pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, Lampiran, Huruf B. SOP Pengenaan Pajak Progresif untuk Kendaraan Bermotor, Romawi IV. Alur Proses, pada:
 - 1) Angka 8 yang menyatakan bahwa apabila tidak ditemukan salah satu kata inti atau dengan kata lain nama di KTP sangat berbeda dengan nama di

kendaraan, maka wajib balik nama atau dapat dilakukan *approval* dengan alasan khusus menggunakan *approval level 1* yang diberikan kepada pejabat Kepolisian yang ditunjuk;

- 2) Bagan Alur Proses, Menu Pendaftaran, proses pelayanan oleh Petugas Pendaftaran adalah Input Pendaftaran, yaitu input nomor polisi, nomor KTP/Paspor, nomor telepon, dan nama kuasa.

Hal tersebut mengakibatkan adanya potensi pendapatan pajak BBNKB yang belum dapat dipungut.

Permasalahan tersebut disebabkan Kepala Bapenda belum menyusun SOP pajak BBNKB yang menetapkan antara lain prosedur baku balik nama atas penguasaan kendaraan bermotor melebihi 12 bulan secara berturut-turut sesuai Perda yang berlaku.

Atas permasalahan tersebut, Gubernur Bali melalui Kepala Bapenda menyatakan bahwa nomor KTP yang digunakan pada saat penetapan pembayaran PKB adalah nomor KTP yang diinput pada saat proses registrasi dan identifikasi oleh Petugas Pendaftaran, selanjutnya Bapenda akan menetapkan BBNKB berdasarkan dokumen kepemilikan kendaraan sesuai hasil registrasi dan identifikasi tersebut. Hasil penelusuran Bapenda ditemukan sebanyak 136 data nama di KTP berbeda dengan nama di kendaraan (STNK).

BPK merekomendasikan Gubernur Bali agar memerintahkan Kepala Bapenda menyusun SOP pajak BBNKB yang menetapkan antara lain prosedur baku balik nama atas penguasaan kendaraan bermotor melebihi 12 bulan secara berturut-turut sesuai Perda yang berlaku.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Rincian Belanja Modal Peralatan Mesin
Bernilai di Bawah Kapitalisasi pada Dinas Pendidikan TA 2019

No.	Unit Kerja	Realisasi Belanja Modal (Rp)
1	SMAN 1 Gianyar	11.370.000,00
2	SMAN 1 PEKUTATAN	2.498.300,00
3	SMAN 2 BANGLI	105.700.566,36
4	SMAN 2 DENPASAR	2.000.000,00
5	SMAN 2 KUTA SELATAN	5.280.000,00
6	SMKN 1 BEBANDEM	19.768.500,00
7	SMKN 1 TEJAKULA	51.295.000,00
8	SMKN 3 KINTAMANI	7.280.000,00
9	SMKN 4 NEGARA	23.550.000,00
	Jumlah	228.742.366,36

**Rincian Belanja Modal Peralatan Mesin yang di Bawah Batasan Nilai Kapitalisasi
pada Dinas Kesehatan TA 2019**

No	Gol	Kode Bidang Barang	Jenis Barang (per Golongan)	Tanggal Perolehan	Jumlah (unit)	Harga Satuan (Rp)	Nilai Perolehan (Rp)	Asal Usul	Dokumen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	2	6								
1			Flashdisk Sandisk Cruzer Blade CZ50 32GB	31 Mei 2019	25	182.500,00	4.562.500	Pembelian	Belanja Modal Pengadaan Komputer Berupa Belanja Modal pengadaan Kelengkapan Komputer (flashdisk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)	
2			Patch Cord 1 meter	12 Desember 2019	100	86.900,00	8.690.000,00	Pembelian	Belanja Modal Pengadaan Komputer berupa Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer Nomor :	
3			Patch Cord 3 meter	12 Desember 2019	200	339.800,00	67.960.000,00	Pembelian	027/71672/UPTD.RSBM.Disket/2019	
4			Connector RJ 45 Cat 6	12 Desember 2019	100	81.700,00	8.170.000,00	Pembelian		
			Jumlah					89.382.500,00		

**Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
di Bawah Batasan Nilai Kapitalisasi
pada Dinas Pendidikan TA 2019**

No	Unit Kerja	Realisasi Belanja Modal (Rp)
1	SLBN 1 GIANYAR	10.900.000,00
2	SMAN 1 BATURITI	19.940.000,00
3	SMAN 1 Gianyar	77.666.500,00
4	SMAN 1 KEDIRI	298.771.000,00
5	SMAN 1 KERAMBITAN	149.598.700,00
6	SMAN 1 KINTAMANI	61.910.100,00
7	SMAN 1 MELAYA	149.870.000,00
8	SMAN 1 PAYANGAN	142.394.100,00
9	SMAN 1 PUPUAN	190.000.000,00
10	SMAN 1 SAWAN	196.107.100,00
11	SMAN 1 SERIRIT	8.957.130,00
12	SMAN 1 SUKAWATI	149.271.300,00
13	SMAN 1 SUSUT	164.417.600,00
14	SMAN 1 TEGALALANG	10.342.980,00
15	SMAN 1 UBUD	24.115.800,00
16	SMAN 2 BANGLI	93.326.448,00
17	SMAN 2 BUSUNGBIU	692.500,00
18	SMAN 2 KUTA SELATAN	197.133.400,00
19	SMAN 5 DENPASAR	332.967.850,00
20	SMKN 1 BUSUNGBIU	113.110.000,00
21	SMKN 1 KINTAMANI	53.004.000,00
22	SMKN 1 KUBU	50.000.000,00
23	SMKN 1 MAS UBUD	296.989.100,00
24	SMKN 1 NUSA PENIDA	192.018.000,00
25	SMKN 1 TABANAN	157.280.500,00
26	SMKN 1 TEGALALANG	284.457.400,00
27	SMKN 1 TEJAKULA	74.410.000,00
28	SMKN 2 NEGARA	142.880.000,00
29	SMKN 2 TABANAN	238.365.000,00
30	SMKN 3 NEGARA	84.816.000,00
	Jumlah	3.965.712.508,00

**Rincian Belanja Modal Peralatan Mesin yang Tidak Memenuhi Kriteria Aset Tetap
pada Dinas Kesehatan TA 2019**

No	Gol	Kode Bidang Barang	Jenis Barang (per Golongan)	Tanggal Perolehan	Jumlah (Unit)	Harga Satuan (Rp)	Nilai Perolehan (Rp)	Asal Usul	Dokumen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	6							
		02.06.02.04.007	Exhaust Fan				-		
1		0001-0024	Exhaust Ceiling Duct 30x30cm	26 Maret 2019	24	715.000,00	17.160.000,00	Pembelian	Belanja modal penutup dan saringan <i>exhaust fan</i>
2		0025-0039	Exhaust Ceiling Duct 40x40cm	26 Maret 2019	15	825.000,00	12.375.000,00	Pembelian	
3		0040	Exhaust Fan portable Ventilator 12" + Flexible Duct 12"	26 Maret 2019	1	4.620.000,00	4.620.000,00	Pembelian	
4		0041-0048	Exhaust Fan standar cooling Fan 16"	26 Maret 2019	8	1.925.000,00	15.400.000,00	Pembelian	
							-		
		02.06.03.06.006	Peralatan Jaringan Lain-lain				-		
		02.06.02.06.50	Sarung kasur latek	06 September 2019	110	725.000,00	79.750.000,00	Pembelian	No : 028/7109/RS.Jiwa 31-12-2019
							-		
Jumlah							129.305.000,00		

Pemberian Hibah Berulang TA 2018 dan 2019

No.	Penerima Hibah (Inisial)	Kabupaten	Kecamatan	Desa	TA	No. SP2D	Tanggal SP2D	Peruntukkan	Realisasi (Rp)
1	Pengempon PKS	Bangli	Susut	Adat Selat Selat	2019	12355/SP2D/LS/4.01.00/2019	02 Agustus 2019	Pengadaan Seperangkat Gambelan Gong beserta 3 penerima lainnya agar ditransfer ke masing-masing rekening daftar penerima terlampir	260.000.000,00
					2018	13658/SP2D/LS/4.01.00/2018	07 Agustus 2018	Pembangunan Penyengker	50.000.000,00
2	Pengempon PKPTJT	Buleleng	Busungbiu	Busungbiu	2019	29867/SP2D/LS/4.01.00/2019	27 Desember 2019	Pengadaan terob Beserta 2 (dua) Penerima Hibah Lainnya Tahun Anggaran 2019 agar ditransfer ke masing-masing rekening	105.000.000,00
					2018	15242/SP2D/LS/4.01.00/2018	29 Agustus 2018	Perehaban Pelinggih Kemulan	50.000.000,00
3	Banjar AdTeng	Buleleng	Busungbiu	Busungbiu	2019	24193/SP2D/LS/4.01.00/2019	05 Desember 2019	Pavingisasi jalan pisang dan jalan pura puseh desa beserta 10 (sepuluh) Penerima Hibah Lainnya Tahun Anggaran 2019 agar ditransfer ke masing-masing rekening	520.000.000,00
					2018	15242/SP2D/LS/4.01.00/2018	29 Agustus 2018	Penyenderan Dan Rabat Beton Jalan Pekiksaan Lama Dan Markisa 3	150.000.000,00
4	Desa Pak Ring	Buleleng	Seririt	Ringdikit	2019	13791/SP2D/LS/4.01.00/2019	20 Agustus 2019	Pengadaan Gamelan beserta 3 penerima hibah lainnya, agar ditransfer ke masing - masing rekening daftar penerima terlampir	420.000.000,00
					2018	21259/SP2D/LS/4.01.00/2018	12 Nopember 2018	Renovasi Pelinggih Padmasana Monumen Pahlawan Kusuma Yudha	50.000.000,00
5	Banjar Ad Teg	Gianyar	Ubud	Pakraman Mas Mas	2019	16554/SP2D/LS/4.01.00/2019	23 September 2019	Pembangunan Jalan Paving beserta 5 (lima) penerima Lainnya Agar ditransfer ke masing masing rekening daftar penerimaan terlampir	270.000.000,00
					2018	15116/SP2D/LS/4.01.00/2018	28 Agustus 2018	Pembangunan Jembatan	47.000.000,00
6	Pengempon PDPG	Karangasem	Rendang	Rendang	2019	29427/SP2D/LS/4.01.00/2019	26 Desember 2019	Pembangunan 1 unit bale pesamuan Beserta 12 Penerima hibah Lainnya, Tahun Anggaran 2019 agar ditransfer ke masing-masing rekening	375.000.000,00
					2018	19858/SP2D/LS/4.01.00/2018	30 Oktober 2018	Pembangunan Pelinggih Gedong Kemulan dan Pelinggih Gedong Penyimpanan Kompiwang	40.000.000,00
7	Pengempon PDP	Kota Denpasar	Denpasar Selatan	Pakraman Kapaon Pemogan	2019	21810/SP2D/LS/4.01.00/2019	19 November 2019	Upacara Mamungkah Ngenteg Linggih, Mendem Pedagingan Tawur Balik Sumpah ring Pura Dalem Penataran Tahun Anggaran 2019	800.000.000,00
					2018	18852/SP2D/LS/4.01.00/2018	12 Oktober 2018	Renovasi Bale Kul Kul	100.000.000,00
8	Banjar Ad Kel Ged	Tabanan	Kediri	Buwit	2019	24333/SP2D/LS/4.01.00/2019	04 Desember 2019	Pengadaan Gambelan Gong Kebyar beserta 2 (dua) penerima Hibah Lainnya agar Ditransfer ke masing masing rekening daftar Penerimaan Terlampir	520.000.000,00
					2018	16778/SP2D/LS/4.01.00/2018	14 September 2018	Pinising Balai Banjar di Banjar Adat Kelakahan Gede	200.000.000,00

Pemberian Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang Tidak Tercantum dalam Data Keluaran Aplikasi *E-Planning*

No.	No. BKU SKPD	No. SP2D	Tanggal SP2D	Uraian SP2D	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Kepada (Inisial)	Peruntukkan	Nomor Keputusan Gubernur	Realisasi Belanja (Rp)
1	00729-B02	12782/SP2D/LS/4.01.00/2019	07/08/2019	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Kepada Pengempon Merajan Pasek Gelgel, Banjar Kauh, Ds. Getasan, Kec. Petang, Kab. Badung untuk Pemugaran Candi dan Penyengker Pelinggih Merajan Pasek Gelgel Sesuai Kep. Gub Bali No. 72/03-D/HK/2019 Tanggal 13 Mei 2019	Badung	Petang	Getasan	Pengempon MPG, Banjar Kauh, Ds. Getasan, Kec. Petang, Kab. Badung	Pemugaran Candi dan Penyengker Pelinggih Merajan Pasek Gelgel	72/03-D/HK/2019	290.000.000,00
2	01936-B02	28464/SP2D/LS/4.01.00/2019	23/12/2019	Belanja Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Kepada Banjar Adat Tabih, Banjar Dinas Tabih, Desa Buahhan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Untuk Pembangunan Bale Gong di Wewidangan Pura Penyungsung Beserta 1 Penerima Hibah Lainnya Tahun Anggaran 2019, sesuai Kep Gub Bali No. 549/03-D/HK/2019, Tgl 5/11/2019 agar ditransfer ke masing-masing rekening	Bangli	Kintamani	Buahan	Banjar Ad Tab, Banjar Dinas Tabih, Desa Buahhan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli	Pembangunan Bale Gong di Wewidangan Pura Penyungsung Beserta 1 Penerima Hibah Lainnya Tahun Anggaran 2019 agar ditransfer ke masing-masing rekening	549/03-D/HK/2019	350.000.000,00
3	01690-B02	23719/SP2D/LS/4.01.00/2019	02/12/2019	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Kepada Kelompok KUBE FM Sari Dana, Banjar Sunting, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli Beserta 2 Penerima Lainnya Tahun Anggaran 2019, sesuai Kep Gub Bali No. 430/03-P/HK/2019, Tgl 21/10/2019 agar ditransfer ke masing-masing rekening	Bangli	Bangli	Pengotan	Kelompok KUBE FM SD, Banjar Sunting, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli Beserta 2 Penerima Lainnya Tahun Anggaran 2019 agar ditransfer ke masing-masing rekening		430/03-P/HK/2019	305.000.000,00
4	01931-B02	28408/SP2D/LS/4.01.00/2019	20/12/2019	Belanja Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Kepada Kelompok Tani Ternak Merta Sari, Banjar Selatnyuhan, Desa Pengiangan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli Untuk Pembelian Bibit Babi, Pakan Ternak, Obat-obatan dan Peralatan Lainnya Beserta 1 Penerima Lainnya Tahun Anggaran 2019, sesuai Kep Gub Bali No. 622/03-P/HK/2019, Tgl 18/11/2019 agar ditransfer ke masing-masing rekening	Bangli	Susut	Pengiangan	Kelompok Tani Ternak MS, Banjar Selatnyuhan, Desa Pengiangan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli	Pembelian Bibit Babi, Pakan Ternak, Obat-obatan dan Peralatan Lainnya Beserta 1 Penerima Lainnya Tahun Anggaran 2019 agar ditransfer ke masing-masing rekening	622/03-P/HK/2019	117.200.000,00
5	01924-B02	28875/SP2D/LS/4.01.00/2019	20/12/2019	Belanja Hibah Badan/Lembaga/Organisasi kemasyarakatan Kepada Pengempon Pura Pedarman Tangkas Teguh Kori Agung, Desa Pakraman Kubu, Kelurahan Kubu, Kecamatan bangli, Kabupaten Bangli Untuk Pembangunan Penyengker dan Piyasan Beserta 8 Penerima Hibah Lainnya Tahun Anggaran 2019, sesuai Kep Gub Bali No. 549/03-D/HK/2019, Tgl 5/11/2019 agar ditransfer ke masing-masing rekening	Bangli	Bangli	Pakraman Kubu Kubu	Pengempon PPTTKA, Desa Pakraman Kubu, Kelurahan Kubu, Kecamatan bangli, Kabupaten Bangli	Pembangunan Penyengker dan Piyasan Beserta 8 Penerima Hibah Lainnya Tahun Anggaran 2019 agar ditransfer ke masing-masing rekening	549/03-D/HK/2019	544.500.000,00
6	01517-B02	21614/SP2D/LS/4.01.00/2019	18/11/2019	Belanja Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Kepada Banjar Dinas Suksuk Desa Bondalem Kecamatan Tejakula Kab Buleleng Untuk Rehabilitasi Balai Serba Guna beserta 1 penerima hibah lainnya Tahun Anggaran 2019, sesuai Kep Gub Bali No. 452/03-D/HK/2019, Tgl 25/10/2019 Agar ditransfer ke masing masing rekening sesuai daftar perincian Terlampir	Buleleng	Tejakula	Bondalem	Banjar Dinas SDB Kecamatan Tejakula Kab Buleleng	Rehabilitasi Balai Serba Guna beserta 1 penerima hibah lainnya Tahun Anggaran 2019 Agar ditransfer ke masing masing rekening daftar perincian Terlampir	452/03-D/HK/2019	500.000.000,00
7	01300-B02	17516/SP2D/LS/4.01.00/2019	07/10/2019	Belanja Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Kepada Desa Pakraman Banjar Tegeha Desa Banjar Tegeha, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng Untuk Pembangunan Piasan, Pelinggih, Meru dan Pintu Paduraksa Beserta 1 Penerima Lainnya Tahun Anggaran 2019, sesuai Kep Gub Bali No. 260/03-D/HK/2019, Tgl 8/8/2019 agar ditransfer ke masing-masing rekening	Buleleng	Banjar	Banjar Tegeha	Desa Pak Banj Teg Desa Banjar Tegeha, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng	Pembangunan Piasan, Pelinggih, Meru dan Pintu Paduraksa Beserta 1 Penerima Lainnya Tahun Anggaran 2019 agar ditransfer ke masing-masing rekening	260/03-D/HK/2019	150.000.000,00

No.	No. BKU SKPD	No. SP2D	Tanggal SP2D	Uraian SP2D	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Kepada (Inisial)	Peruntukkan	Nomor Keputusan Gubernur	Realisasi Belanja (Rp)
8	01322-B02	18361/SP2D/LS/4.01.00/2019	10/10/2019	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Kepada Kelompok Suka Duka Tri Dharma Desa Pedawa, Kec.Banjar, Kab.Buleleng untuk Pengadaan Peralatan Suka Duka beserta 20 Penerima Hibah Lainnya agar di Transfer ke masing-masing rekening sesuai daftar Penerimaan Terlampir Sesuai Kep.Gub Bali No.113/01-B/HK/2019 Tanggal 14 Juni 2019	Buleleng	Banjar	Pedawa	Kelompok Suka Duka Tr Dhr Desa Pedawa, Kec.Banjar, Kab.Buleleng	Pengadaan Peralatan Suka Duka beserta 20 Penerima Hibah Lainnya agar di Transfer ke masing-masing rekening daftar Penerimaan Terlampir	No.113/01-B/HK/2019	495.000.000,00
9	01881-B02	27978/SP2D/LS/4.01.00/2019	18/12/2019	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan kepada Pengempon Pura Dadia Kayu Selem, Banjar Suci, Desa Tejakula Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng Untuk Pembelian Seperangkat Gambelan Gong Tahun Anggaran 2019, sesuai Kep Gub Bali No. 364/03-K/HK/2019, Tgl 7/10/2019	Buleleng	Tejakula	Tejakula	Pengempon Pura Dad Ky Sel, Banjar Suci, Desa Tejakula Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng	Pembelian Seperangkat Gambelan Gong Tahun Anggaran 2019	364/03-K/HK/2019	75.000.000,00
10	01036-B02	15372/SP2D/LS/4.01.00/2019	05/09/2019	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Kepada Suka Duka Arya Paramita, Desa Bungkulan, Kec.Sawan, Kab.Buleleng untuk Pembangunan Balai Kelompok beserta 22 Penerima Hibah Lainnya agar di Transfer ke masing-masing rekening sesuai daftar Penerimaan terlampir sesuai Kep.Gub Bali No.154/03-D/HK/2019 Tanggal 27 Juni 2019	Buleleng	Sawan	Bungkulan	Suka Duka A Par, Desa Bungkulan, Kec.Sawan, Kab.Buleleng	Pembangunan Balai Kelompok beserta 22 Penerima Hibah Lainnya agar di Transfer ke masing-masing rekening daftar Penerimaan terlampir	154/03-D/HK/2019	855.000.000,00
11	00138-B02	06771/SP2D/LS/4.01.00/2019	31/05/2019	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan kepada Banjar Adat Dlod Rurung,Desa Pakraman batuyang,Desa Batibulan Kangin,Kec.Sukawati Kab.Gianyar Untuk Pemb.Balai banjar Tahun Anggaran 2019 beserta 28 (dua puluh delapan) penerima hibah lainnya sesuai SK Gubernur Bali Nomor24/03-D/HK/2019 tanggal 29 Maret 2019	Gianyar	Sukawati	Pakraman Batuyang Batibulan Kangin	Banjar Ad Di Ru,Desa Pakraman batuyang,Desa Batibulan Kangin,Kec.Sukawati Kab.Gianyar	Pemb.Balai banjar Tahun Anggaran 2019 beserta 28 (dua puluh delapan) penerima hibah lainnya	24/03-D/HK/2019	2.565.000.000,00
12	00156-B02	08261/SP2D/LS/4.01.00/2019	17/06/2019	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Kepada Desa Pakraman Gianyar, Kelurahan Gianyar,Kec.Gianyar,Kab.Gianyar untuk Upacara Karya Dirga Yusa Bumi,Taur Agung, Pedanaan, Ngenteg Linggih, Padudusan Agung, Ngusaba Dalem Lan Ngusaba Pitra ring Pura Dalem lan Prajapati TA 2019 Sesuai Kep.Gub Bali No.21/01-B/HK/219 tanggal 27 Maret 2019	Gianyar	Gianyar	Gianyar	Desa Pak Gi, Kelurahan Gianyar,Kec.Gianyar,Kab.Gianyar	Upacara Karya Dirga Yusa Bumi,Taur Agung, Pedanaan, Ngenteg Linggih, Padudusan Agung, Ngusaba Dalem Lan Ngusaba Pitra ring Pura Dalem lan Prajapati TA 2019	21/01-B/HK/219	250.000.000,00
13	01596-B02	22721/SP2D/LS/4.01.00/2019	22/11/2019	Belanja Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan kepada Pengempon Pura Ulun Suwi, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar Untuk Pembangunan Tempat Parkir Beserta 2 Penerima Lainnya Tahun Anggaran 2019, sesuai Kep Gub Bali No. 530/03-D/HK/2019, Tgl 1/11/2019 agar ditransfer ke masing-masing rekening	Gianyar	Tampaksiring	Pejeng Kawan	Pengempon Pu Ul Suw, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar	Pembangunan Tempat Parkir Beserta 2 Penerima Lainnya Tahun Anggaran 2019 agar ditransfer ke masing-masing rekening	530/03-D/HK/2019	400.000.000,00
14	00946-B02	14413/SP2D/LS/4.01.00/2019	27/08/2019	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Kepada Sekeha Taruna Mertha Bhuana Sari,Banjar Mantring, Desa Pakraman Mantring, Kec.Tampaksiring,Kab.Gianyar beserta 2 Penerima Hibah lainnya agar di transfer ke masing-masing rekening sesuai daftar penerimaan terlampir sesuai Kep.Gub Bali No.114/01-B/HK/2019 Tanggal 14 Juni 2019	Gianyar	Tampaksiring	Pakraman Mantring	Sekeha Tar Mer Bhu Sr,Banjar Mantring, Desa Pakraman Mantring, Kec.Tampaksiring,Kab.Gianyar beserta 2 Penerima Hibah lainnya agar di transfer ke masing-masing rekening sesuai daftar penerimaan terlampir		114/01-B/HK/2019	170.000.000,00

No.	No. BKU SKPD	No. SP2D	Tanggal SP2D	Uraian SP2D	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Kepada (Inisial)	Peruntukkan	Nomor Keputusan Gubernur	Realisasi Belanja (Rp)
15	01847-B02	26745/SP2D/LS/4.01.00/2019	13/12/2019	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Kepada Banjar Adat Puana, Desa Pakraman Tegalbadeng Kauh, Desa Tegalbadeng Barat Kec. Negara, Kabupaten Jembrana Untuk Pengadaan Seragam, beserta 4 (empat) Penerima Hibah Lainnya Sesuai Kep Gub Bali No 433/01-B/HK/2019 Tgl 21 Oktober 2019 Agar ditransfer ke masing masing rekening sesuai daftar penerimaan terlampir	Jembrana	Negara	Pakraman Tegalbadeng Kauh Tegalbadeng Barat	Banjar Ad Pu, Desa Pakraman Tegalbadeng Kauh, Desa Tegalbadeng Barat Kec. Negara, Kabupaten Jembrana	Pengadaan Seragam, beserta 4 (empat) Penerima Hibah Lainnya agar ditransfer ke masing masing rekening daftar penerimaan terlampir	433/01-B/HK/2019	46.250.000,00
16	01943-B02	29291/SP2D/LS/4.01.00/2019	26/12/2019	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan kepada Banjar Dinas Anyar, Desa Air Kuning, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana untuk perehaban wantilan Beserta 34 Penerima Hibah Lainnya Tahun Anggaran 2019, sesuai Kep Gub Bali No. 532/03-D/HK/2019, Tgl 1/11/2019 agar ditransfer ke masing-masing rekening	Jembrana	Jembrana	Air Kuning	Banjar Din Any, Desa Air Kuning, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana	Perehaban wantilan Beserta 34 Penerima Hibah Lainnya Tahun Anggaran 2019 agar ditransfer ke masing-masing rekening	532/03-D/HK/2019	755.000.000,00
17	01786-B02	25375/SP2D/LS/4.01.00/2019	09/12/2019	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Kepada Desa Pakraman Dangintukadaya, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana Untuk Pembangunan Wantilan Tahun Anggaran 2019, sesuai Kep Gub Bali No. 532/03-D/HK/2019, Tgl 1/11/2019	Jembrana	Jembrana	Pakraman Dangintukadaya	Desa Pak Dang, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana	Pembangunan Wantilan Tahun Anggaran 2019	532/03-D/HK/2019	700.000.000,00
18	02001-B02	29698/SP2D/LS/4.01.00/2019	26/12/2019	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Kepada Pengempon Pura Beji Gunung Urip Banjar Pakraman Pesatan Desa Pakraman Pohsanten, Desa Pohsanten, Kec. Mendoyo, Kab Jembrana Untuk Pembangunan tembok penyengker beserta 47 Penerima Hibah Lainnya Tahun Anggaran 2019, sesuai Kep Gub Bali no. 526/03-D/HK/2019, tgl 1/11/2019 agar ditransfer ke masing-masing rekening	Jembrana	Mendoyo	Pakraman Pohsanten Pohsanten	Pengempon Pura Bej Gun Ur Banjar Pakraman Pesatan Desa Pakraman Pohsanten, Desa Pohsanten, Kec. Mendoyo, Kab Jembrana	Pembangunan tembok penyengker beserta 47 Penerima Hibah Lainnya Tahun Anggaran 2019 agar ditransfer ke masing-masing rekening	526/03-D/HK/2019	978.000.000,00
19	01989-B02	29683/SP2D/LS/4.01.00/2019	26/12/2019	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Kepada Pengempon Pura Dadia Bagia Rahayu Banjar Adat Ngoneng Desa Pakraman Mendoyo Dauh Tukad, Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana Untuk Pembuatan Piasan Beserta 46 Penerima Lainnya Tahun Anggaran 2019, sesuai Kep Gub Bali No. 525/03-D/HK/2019, Tgl 1/11/2019 agar ditransfer ke masing-masing rekening	Jembrana	Mendoyo	Pakraman Mendoyo Dauh Tukad Mendoyo Dauh Tukad	Pengempon Pura Dad BR Banjar Adat Ngoneng Desa Pakraman Mendoyo Dauh Tukad, Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana	Pembuatan Piasan Beserta 46 Penerima Lainnya Tahun Anggaran 2019 agar ditransfer ke masing-masing rekening	525/03-D/HK/2019	859.000.000,00
20	02005-B02	29701/SP2D/LS/4.01.00/2019	26/12/2019	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Kepada Pengempon Pura Dadia Batur Paketan Banjar Adat Nusamara, Desa Pakraman Nusamara, Desa Yehembang Kangin, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana Untuk Pembangunan Balai Piasan Beserta 41 Penerima Lainnya Tahun Anggaran 2019, sesuai Kep Gub Bali No. 524/03-D/HK/2019, Tgl 1/11/2019 agar ditransfer ke masing-masing rekening	Jembrana	Mendoyo	Pakraman Nusamara Yehembang Kangin	Pengempon Pura Dad Bt Pak Banjar Adat Nusamara, Desa Pakraman Nusamara, Desa Yehembang Kangin, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana	Pembangunan Balai Piasan Beserta 41 Penerima Lainnya Tahun Anggaran 2019 agar ditransfer ke masing-masing rekening	524/03-D/HK/2019	833.000.000,00
21	01928-B02	28891/SP2D/LS/4.01.00/2019	20/12/2019	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan kepada Pengempon Pura Dadia Pasek Gelgel Pegatepan Banjar Munduk Kendung, Desa Pakraman Berangbang, Desa Berangbang, Kec. Negara, Kab. Jembrana Untuk Pembangunan Bale Banten Saka Enam Beserta 28 Penerima Hibah Lainnya Perubahan Tahun Anggaran 2019, sesuai Kep Gub Bali No. 529/03-D/HK/2019, Tgl 01/11/2019 agar ditransfer ke masing-masing rekening	Jembrana	Negara	Pakraman Berangbang Berangbang	Pengempon Pura Dad Psk Gelgel Pegatepan Banjar Munduk Kendung, Desa Pakraman Berangbang, Desa Berangbang, Kec. Negara, Kab. Jembrana	Pembangunan Bale Banten Saka Enam Beserta 28 Penerima Hibah Lainnya Perubahan Tahun Anggaran 2019 agar ditransfer ke masing-masing rekening	529/03-D/HK/2019	970.500.000,00

No.	No. BKU SKPD	No. SP2D	Tanggal SP2D	Uraian SP2D	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Kepada (Inisial)	Peruntukkan	Nomor Keputusan Gubernur	Realisasi Belanja (Rp)
22	01999-B02	29696/SP2D/LS/4.01.00/2019	26/12/2019	Belanja Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan kepada Takmir Masjid Jami Nurul Huda, Banjar Pulukan, Desa Pakraman Pulukan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana Untuk Pembangunan Menara Masjid Beserta 34 Penerima Hibah Lainnya Tahun anggaran 2019, sesuai kep Gub Bali No. 527/03-D/HK/2019, Tgl 1/11/2019 agar ditransfer ke masing-masing rekening	Jembrana	Pekutatan	Pakraman Pulukan Pulukan	Takmir Masjid Jam Nr H, Banjar Pulukan, Desa Pakraman Pulukan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana	Pembangunan Menara Masjid Beserta 34 Penerima Hibah Lainnya Tahun anggaran 2019 agar ditransfer ke masing-masing rekening	527/03-D/HK/2019	855.500.000,00
23	00835-B02	13666/SP2D/LS/4.01.00/2019	19/08/2019	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Kepada Desa Pakraman Batu Dawa Desa Tulamben Kec. Kubu Kab Karangasem untuk Pengadaan Gong Kebyar beserta 2 penerima hibah lainnya sesuai dengan Kep. Gub Bali Nomor 136/03-K/HK/2019 tgl 19 Juni 2019, agar ditransfer ke masing-masing rekening sesuai daftar penerima terlampir.	Karangasem	Kubu	Pakraman Batu Dawa Tulamben	Desa Pakraman Bt Dw Desa Tulamben Kec. Kubu Kab Karangasem	Pengadaan Gong Kebyar beserta 2 penerima hibah lainnya, agar ditransfer ke masing - masing rekening daftar penerima terlampir.	136/03-K/HK/2019	275.000.000,00
24	00194-B02	08611/SP2D/LS/4.01.00/2019	20/06/2019	Belanja Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan kepada Desa Pakraman Tulamben, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem Untuk Penataan dan Pembangunan Balai Pesandekan di Setra Beserta 2 Penerima Lainnya Tahun Anggaran 2019, sesuai Kep Gub Bali No. 23/03-D/HK/2019, Tgl 27/3/2019	Karangasem	Kubu	Pakraman Tulamben Tulamben	Desa Pakraman Tlbn, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem	Penataan dan Pembangunan Balai Pesandekan di Setra Beserta 2 Penerima Lainnya Tahun Anggaran 2019	23/03-D/HK/2019	1.450.000.000,00
25	01248-B02	17059/SP2D/LS/4.01.00/2019	02/10/2019	Belanja Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Kepada Pengempon Pura Pasek Gelgel, Banjar Adat Pegending, Banjar Pegending, Desa Adat Sangkan Buana, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung untuk Karya NgentegLinggih dan Pedudusan Tahun Anggaran 2019, sesuai Kep Gub Bali No. 180/01-B/HK/2019, Tgl 3/7/2019	Klungkung	Klungkung	Adat Sangkan Buana	Pengempon Pura Psk Ggl, Banjar Adat Pegending, Banjar Pegending, Desa Adat Sangkan Buana, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung	Karya NgentegLinggih dan Pedudusan Tahun Anggaran 2019	180/01-B/HK/2019	60.000.000,00
26	00443-B02	10833/SP2D/LS/4.01.00/2019	12/07/2019	Belanja Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Kepada Pengempon Pura Dalem Penataran Suwung, Desa Pakraman Kapaon, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar Untuk Pembangunan Pura Dalem, Pura Kahyangan dan Jaba Tengah Tahun Anggaran 2019, sesuai Kep Gub Bali No. 36/03-D/HK/2019, Tgl 2/4/2019	Kota Denpasar	Denpasar Selatan	Pakraman Kapaon Pemogan	Pengempon Pura Dal Pen Suw, Desa Pakraman Kapaon, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar	Pembangunan Pura Dalem, Pura Kahyangan dan Jaba Tengah Tahun Anggaran 2019	36/03-D/HK/2019	1.750.000.000,00
27	00001-B02	01043/SP2D/LS/4.01.00/2019	26/02/2019	Belanja Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan kepada Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Bali, Jalan Kapten Tantular Nomor 11 Niti Mandala Renon Denpasar untuk biaya Kegiatan Gerakan Pramuka Bali Tahun Anggaran 2019, sesuai Kep.Gub. Bali No 2/01-B/HK/2019, tgl 22 Januari 2019	Kota Denpasar			Gerakan Pr Kw Daerah Bali, Jalan Kapten Tantular Nomor 11 Niti Mandala Renon Denpasar	Biaya Kegiatan Gerakan Pramuka Bali Tahun Anggaran 2019	2/01-B/HK/2019	1.000.000.000,00
28	01873-B02	26747/SP2D/LS/4.01.00/2019	16/12/2019	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan kepada Pengempon Pura Sari Jl.Imam Bonjol No 107 Br.Tegal Gede Ds Pemecutan Kelod Kec.Denpasar barat Kota Denpasar untuk Renovasi Bale Pancasari beserta 4 Penerima Hibah Lainnya Tahun Anggaran 2019, sesuai Kep Gub Bali No. 447/03-D/HK/2019, Tgl 24/10/2019 agar ditransfer ke masing-masing rekening	Kota Denpasar	Denpasar Barat	Pemecutan Kelod	Pengempon Pura Sr Jl.Imam Bonjol No 107 Br.Tegal Gede Ds Pemecutan Kelod Kec.Denpasar barat Kota Denpasar	Renovasi Bale Pancasari beserta 4 Penerima Hibah Lainnya Tahun Anggaran 2019 agar ditransfer ke masing-masing rekening	447/03-D/HK/2019	425.000.000,00

No.	No. BKU SKPD	No. SP2D	Tanggal SP2D	Uraian SP2D	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Kepada (Inisial)	Peruntukkan	Nomor Keputusan Gubernur	Realisasi Belanja (Rp)
29	01676-B02	23602/SP2D/LS/4.01.00/2019	29/11/2019	Belanja Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan kepada Desa Pakraman Bukitcatu, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan Untuk Karya Agung Memungkah Melaspas Ngenteg Linggih Caru Manca Kelud Ring Pura Luhur Pucak Teratebang Tahun Anggaran 2019, sesuai Kep Gub Bali No. 585/01-B/HK/2019, Tgl 8/11/2019 .	Tabanan	Baturiti	Candikuning	Desa Pakraman Bktct, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan	Karya Agung Memungkah Melaspas Ngenteg Linggih Caru Manca Kelud Ring Pura Luhur Pucak Teratebang Tahun Anggaran 2019	585/01-B/HK/2019	150.000.000,00
30	01732-B02	24436/SP2D/LS/4.01.00/2019	04/12/2019	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan kepada Kelompok Lansia Mawar Merah, Banjar Kedewatan, Desa Mundeh Kauh , Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan Untuk Pembelian Pakaian Seragam Lansia Tahun Anggaran 2019, sesuai Kep Gub Bali No. 503/03-J/HK/2019, Tgl 31 Oktober 2019	Tabanan	Selemadeg Barat	Mundeh Kauh	Kelompok Lns Mw Mr, Banjar Kedewatan, Desa Mundeh Kauh , Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan	Pembelian Pakaian Seragam Lansia Tahun Anggaran 2019	503/03-J/HK/2019	20.000.000,00
31	01731-B02	24435/SP2D/LS/4.01.00/2019	04/12/2019	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan kepada Kelompok Lansia dan Pra Lansia Dahlia, Banjar Dukuh, Desa Mundeh Kauh Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan Untuk Pembelian Pakaian Seragam Lansia Tahun Anggaran 2019, sesuai Kep Gub Bali No. 503/03-J/HK/2019, Tgl 31 Oktober 2019	Tabanan	Selemadeg Barat	Mundeh Kauh	Kelompok Lns dan Pra Lns Dhl, Banjar Dukuh, Desa Mundeh Kauh Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan	Pembelian Pakaian Seragam Lansia Tahun Anggaran 2019	503/03-J/HK/2019	20.000.000,00
32	01589-B02	22658/SP2D/LS/4.01.00/2019	22/11/2019	Belanja Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Kepada Kelompok Seni dan Budaya Ayu Werdhi, Desa Manikyang, Kec. Selemadeg, Kab. Tabanan untuk pengadaan seperangkat gambelan gong Beserta 11 Penerima Hibah Lainnya Tahun Anggaran 2019, sesuai Kep Gub Bali No. 473/03-K/HK/2019, Tgl 28/10/2019 agar ditransfer ke masing-masing rekening	Tabanan	Selemadeg	Manikyang	Kelompok Seni dan Budaya AW, Desa Manikyang, Kec. Selemadeg, Kab. Tabanan	Pengadaan seperangkat gambelan gong Beserta 11 Penerima Hibah Lainnya Tahun Anggaran 2019 agar ditransfer ke masing-masing rekening	473/03-K/HK/2019	1.095.000.000,00
33	01861-B02	26988/SP2D/LS/4.01.00/2019	13/12/2019	Belanja Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Kepada Kelompok Tani Taman Sari, Banjar Dinas Dalang Anyar, Desa Dalang, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan untuk pembelian 2 unit traktor, Tahun Anggaran 2019, sesuai Kep Gub Bali No. 500/03-M/HK/2019, Tgl 30/10/2019	Tabanan	Selemadeg Timur	Dalang	Kelompok Tani Tm Sar, Banjar Dinas Dalang Anyar, Desa Dalang, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan	Pembelian 2 unit traktor, Tahun Anggaran 2019	500/03-M/HK/2019	40.000.000,00
34	00136-B02	07171/SP2D/LS/4.01.00/2019	29/05/2019	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Kepada Pengempon Pura Dalem Banjar Adat Tajen Sedahan, Desa Tajen, Kec. Penebel, Kab. Tabanan untuk Upacara Karya Agung Mamungkah, Ngenteg Linggih lan Tawur Balik Sumpah Sesuai Kep. Gub Bali No. 18/01-B/HK/2019 Tanggal 22 Maret 2019	Tabanan	Penebel	Tajen	Pengempon Pura D Bj Ad Taj Sdh, Desa Tajen, Kec. Penebel, Kab. Tabanan	Upacara Karya Agung Mamungkah, Ngenteg Linggih lan Tawur Balik Sumpah	18/01-B/HK/2019	200.000.000,00
35	00540-B02	11664/SP2D/LS/4.01.00/2019	29/07/2019	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan kepada Pengempon Pura Luhur Kawitan Bhujangga Waisnawa Gunung Sari Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan Untuk Renovasi Bangunan Pura tahun Anggaran 2019, sesuai Kep Gub Bali No. 31/03-D/HK/2019, Tgl 2/4/2019	Tabanan	Penebel	Jatiluwih	Pengempon Pura Lhr Kaw Bhu Wais Gunungsari Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan	Renovasi Bangunan Pura tahun Anggaran 2019	31/03-D/HK/2019	900.000.000,00
36	01678-B02	23611/SP2D/LS/4.01.00/2019	29/11/2019	Belanja Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan kepada Sekehe Gong Gita Kalangen, Banjar Dinas Geluntung Kaja, Desa Geluntung, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan Untuk Pembelian Gambelan Gong Baleganjur Beserta 5 (lima) Penerima Hibah Lainnya Tahun Anggaran 2019, sesuai Kep Gub Bali No. 477/01-B/HK/2019, Tgl 28/10/2019 agar ditransfer ke masing-masing rekening	Tabanan	Marga	Geluntung	Sekehe Gong Gt Kal, Banjar Dinas Geluntung Kaja, Desa Geluntung, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan	Pembelian Gambelan Gong Baleganjur Beserta 5 (lima) Penerima Hibah Lainnya Tahun Anggaran 2019 agar ditransfer ke masing-masing rekening	477/01-B/HK/2019	430.000.000,00
Jumlah											20.878.950.000,00

Belanja dan Penyelesaian Pekerjaan oleh Penerima Hibah Melewati TA 2019

No.	Nama Penerima (Inisial)	Alamat Penerima	Peruntukkan/Penggunaan	Realisasi	Nilai Bukti Pengeluaran/Belanja (Rp)		SKPD Leading Sector	Kab/Kota
					Tahun 2019	Tahun 2020		
1	Bj ADJ	Banjar Adat Dangin Jalan Desa Pakraman Guwang Kec Sukawati Kab Gianyar	Finising Bale Serbaguna	195.000.000,00	44.775.800,00	150.224.200,00	Dinas PUPRPKP	Gianyar
2	Bj AB	Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar	Pembangunan Bale Pesanekan	200.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Dinas PUPRPKP	Gianyar
3	Bj ATT	Desa Pakraman Tembawu, Kelurahan Penatih, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar	Renovasi Tempat Suci (Merajan) Bale Banjar	100.000.000,00	60.000.000,00	40.000.000,00	Dinas PUPRPKP	Denpasar
4	Bj AM	Desa Pakraman Ketewel, Desa Ketewel, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar	Pembangunan Balai Serbaguna	350.000.000,00	37.262.500,00	312.503.700,00	Dinas PUPRPKP	Gianyar
Jumlah				845.000.000,00	242.038.300,00	602.727.900,00		

Perbedaan Nomor Rekening, Nama Pemilik Rekening, dan/atau Status Rekening antara yang Digunakan dengan Tercantum dalam SK

No.	Nama UPTD/BLUD/Sekolah Tercantum dalam SK	Bank Umum	Rekening yang Digunakan	Rekening Tercantum dalam SK	Saldo Rekening per 31 Desember 2019 (Rp)	Tanggal Pembukaan Rekening	Keterangan	
							Penjelasan Perbedaan	Status Rekening
1	UPTD Bapenda Kabupaten Jembrana	BPD Bali	0160105000719	0160202015954	-	11 Februari 2008	UPTD salah menyampaikan nomor rekening yang tidak aktif kepada BPKAD	Tutup
2	UPTD Bapenda Kabupaten Tabanan	BPD Bali	0120105001991	0120202219508	-	20 Februari 2008	UPTD salah menyampaikan nomor rekening yang tidak aktif kepada BPKAD	Tutup
3	UPTD Bapenda Kabupaten Badung	BPD Bali	0100105016763	0100202341616	-	12 Februari 2015	UPTD salah menyampaikan nomor rekening yang tidak aktif kepada BPKAD	Tutup
4	UPTD Bapenda Kabupaten Gianyar	BPD Bali	0100105016764	0180212274574	-	13 Januari 2005	UPTD salah menyampaikan nomor rekening yang tidak aktif kepada BPKAD	Tutup
5	UPTD Bapenda Kabupaten Bangli	BPD Bali	0100105016774	0200222181614	-	15 Februari 2008	UPTD salah menyampaikan nomor rekening yang tidak aktif kepada BPKAD	Tutup
6	UPTD Bapenda Kabupaten Karangasem	BPD Bali	0220105002429	0220202020339	-	29 Februari 2008	UPTD salah menyampaikan nomor rekening yang tidak aktif kepada BPKAD	Tutup
7	BLUD RSUD Bali Mandara	Mandiri	010.01.05.01677-1	1750000559947	-	12 Juni 2017	UPTD salah menyampaikan nomor rekening yang tidak aktif kepada BPKAD	Tutup
		BNI	0652074797	0614116124	-	19 Oktober 2017	UPTD salah menyampaikan nomor rekening yang tidak aktif kepada BPKAD	Tutup pada tanggal 5 Januari 2018
8	SMKN 1 SUSUT	BPD Bali	0200105001490	0200105001491	78.529.880,27	22 Juni 2018	Salah pengetikan nomor rekening pada SK, seharusnya adalah 0200105001490	Aktif
9	SMAN 1 SUKASADA	BPD Bali	0140105006259	0140105006259	0,21	19 Agustus 2018	Salah pengetikan nama sekolah pada SK seharusnya SMKN 1 Sukasada bukan SMAN 1 Sukasada	Aktif
10	SMAN 2 SINGARAJA	BPD Bali	01400105006171	0140212225848	-	17 Mei 2004	Nomor rekening 0140212225848 telah ditutup tanggal 22 Juni 2018 melalui pemberitahuan Surat BPD No.2536/SGR/PNB/2020 tanggal 17 Maret 2020. Sekolah menggunakan rekening bernomor 01400105006171	Tutup
11	SMA NEGERI 1 SINGARAJA	BPD Bali	0140105006297	0140105006297	4.208.826,86	22 Juni 2018	Salah pengetikan nama pemilik rekening pada SK seharusnya SMKN 1 Singaraja bukan SMAN 1 Singaraja untuk nomor rekening 0140105006297	Aktif
12	SMAN 1 UBUD	BPD Bali	0190105000315	0190212048500	-	25 Juli 2000	Nomor rekening 0190212048500 sudah tidak digunakan dan ditutup. Sekolah menggunakan rekening bernomor 0190105000315 namun salah menyampaikan no rekening untuk di SK-kan	Tutup
13	SMKN 1 TEGALLALANG	BPD Bali	0190105000327	0190202107029	752.257,90	17 Februari 2012	Nomor rekening 0190202107029 telah ditutup per 18 Maret 2020 melalui surat BPD Bali No B-1963/UBD/PNB/2020 tanggal 18 Maret 2020, saldo per 31 Des 2019 sebesar Rp752.257,90 telah disetor ke Kas Daerah sebagai Jasa Giro melalui STS Nomor 900/130/SMKN 1 sebesar Rp907.413,34. Sekolah menggunakan rekening bernomor 0190105000327	Tutup

No.	Nama UPTD/BLUD/Sekolah Tercantum dalam SK	Bank Umum	Rekening yang Digunakan	Rekening Tercantum dalam SK	Saldo Rekening per31 Desember 2019 (Rp)	Tanggal Pembukaan Rekening	Keterangan	
							Penjelasan Perbedaan	Status Rekening
14	SMAN 2 PEKUTATAN	BPD Bali	0420105000029	0420105000029	296.223.405,25	08 Juni 2018	Salah pengetikan nama sekolah seharusnya SMAN 1 Pekutatan bukan SMAN 2 Pekutatan untuk nomor rekening 0420105000029	Aktif
15	SMK NEGERI 1 BEBANDEM	BPD Bali	0220105002477	0530105002490	125.225.342,57	7 juni 2018	Salah pengetikan nomor rekening pada SK, seharusnya SMKN 1 Bebandem bernomor rekening 0220105002477, sedangkan nomor rekening 0530105002490 (seharusnya 0220105002490) merupakan milik SMKN 1 Amlapura	Aktif
16	SMAN SATU ATAP KLUMPU	BPD Bali	0230105000344	0230105000357	112.006.654,01	21 Juni 2018	Salah pengetikan nomor rekening pada SK, seharusnya SMAN SATU ATAP KLUMPU bernomor rekening 0230105000344, sedangkan nomor rekening 0230105000357 merupakan milik SMAN SATU ATAP LEMBONGAN	Aktif

Hasil Pengujian terhadap Sejumlah 29 Rekening yang Tidak Tercantum dalam SK Gubernur Nomor 189/04-D/HK/2019

No.	Nomor Rekening	Nama Pemilik Rekening	Tanggal Pembukaan Rekening	Saldo Awal per 1 Januari 2019	Saldo Akhir per 31 Desember 2019	Jenis Rekening	Status Rekening	Keterangan	
								Hasil Pengujian	Pengelompokan Menurut Hasil Pengujian
1	0100022378	BEND PENG SETDA PROV BALI	16 Januari 2003	-	-	Giro Pemerintah Lainnya	Tutup	Rekening sudah tidak digunakan lagi oleh sekolah. Rekening telah ditutup tanggal 16 Maret 2020, dan sisa saldo telah disetor ke Kasda.	Rekening baru dilakukan penutupan di Tahun 2020
2	0105006770	BEND PENERIMAAN DISBUD PROV BALI	01 Juli 2019	-	-	Giro Pemerintah Lainnya	Aktif	Pembukaan rekening tanggal 1 Juli 2019	Pembukaan rekening baru dilakukan di Tahun 2019
3	0400105000883	SMAN 2 ABIANSEMAL	11 Januari 2019	-	91.463.960,00	Giro Pemerintah Lainnya	Aktif	Pendirian sekolah tanggal 3 September 2019, dan pembukaan rekening tanggal 1 Nopember 2019	Pembukaan rekening baru dilakukan di Tahun 2019
4	0320105000958	SMAN 2 KUTA SELATAN (belum ada di SK Ketetapan)	10 Agustus 2019	-	19.692.278,39	Giro Pemerintah Lainnya	Aktif	Pendirian sekolah tanggal 3 September 2019, dan pembukaan rekening tanggal 4 Nopember 2019	Pembukaan rekening baru dilakukan di Tahun 2019
5	0100011344	DIPARDA PROVINSI BALI	25 September 1997	1.313.119.529.98	1.387.372.584.60	Giro Pemerintah Lainnya	Aktif	Rekening milik Badan Kerjasama Pengelolaan Pusat Informasi Pariwisata (<i>Tourism Information Center</i>) Mitra Praja Utama (MPU) di Provinsi Bali. Ditindaklanjuti dengan penggantian nama pemilik rekening menjadi Dewan Pengelola TIC FKD MPU	Ganti nama pemilik rekening
6	0105016755	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU UPT MUSEUM BALI	12 Agustus 2015	-	-	Giro Pemerintah Lainnya	Aktif	Rekening masih aktif karena akan digunakan untuk transaksi non tunai penerimaan sewa gedung museum Bali	Rekening masih digunakan
7	0105016809	BEND PENG PEMB UPT PS DISPUPR PROV BALI	22 Februari 2018	-	-	Giro Pemerintah Lainnya	Aktif	Rekening tidak ada transaksi karena perubahan SOTK dari Dinas PUPR ke Dinas Lingkungan Hidup (awal Tahun 2019). Rekening masih akan digunakan namun dilakukan perubahan nama pemilik rekening menjadi Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Pengelolaan Sampah Dishut dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali. Perubahan nama pemilik rekening tanggal 6 Februari 2020.	Rekening masih digunakan, dilakukan perubahan nama pemilik rekening karena perubahan struktur PD
8	0105010211	BEND PENERIMAAN DISDAGPERIN PROV BALI	16 April 2008	-	-	Giro Pemerintah Lainnya	Tutup	Bendahara Pengeluaran tidak mengetahui adanya rekening tersebut. Rekening telah ditutup pada tanggal 27 Februari 2020	Rekening baru dilakukan penutupan di Tahun 2020
9	0100018016	SMKN 4 DENPASAR RUTIN	17 Mei 2001	15.294.13	15.294.13	Giro Pemerintah Lainnya	Tutup	Rekening sudah tidak digunakan lagi oleh sekolah. Rekening telah ditutup tanggal 21 Februari 2020, dan sisa saldo telah disetor ke Kasda.	Rekening baru dilakukan penutupan di Tahun 2020
10	0100018028	SMK N 4 DENPASAR GAJI	17 Mei 2001	-	-	Giro Pemerintah Lainnya	Tutup	Rekening sudah tidak digunakan lagi oleh sekolah. Rekening telah ditutup tanggal 21 Februari 2020.	Rekening baru dilakukan penutupan di Tahun 2020
11	0105017816	UPT BLK IP BALI (Dinas Tenaga Kerja dan Energi SDM)	22 Juni 2009	7.278.13	7.278.13	Giro Pemerintah Lainnya	Tutup	Bendahara Pengeluaran tidak mengetahui adanya rekening tersebut. Rekening telah ditutup pada tanggal 24 Februari 2020, dan sisa saldo telah disetor ke Kasda.	Rekening baru dilakukan penutupan di Tahun 2020

No.	Nomor Rekening	Nama Pemilik Rekening	Tanggal Pembukaan Rekening	Saldo Awal per 1 Januari 2019	Saldo Akhir per 31 Desember 2019	Jenis Rekening	Status Rekening	Keterangan	
								Hasil Pengujian	Pengelompokan Menurut Hasil Pengujian
12	0105027017	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BLKIP BALI (Dinas Tenaga Kerja dan Energi SDM)	28 Februari 2013	41.582.06	41.582.06	Giro Pemerintah Lainnya	Tutup	Bendahara Pengeluaran Pembantu tidak mengetahui adanya rekening tersebut. Rekening telah ditutup pada tanggal 24 Februari 2020, dan sisa saldo telah disetor ke Kasda.	Rekening baru dilakukan penutupan di Tahun 2020
13	0121026712	BEND PENG DISPAR PROV BALI TP	23 Oktober 2012	-	-	Giro Pemerintah TNP	Tutup	Rekening Dinas Pariwisata tersebut telah ditutup pada tanggal 25 Februari 2020	Rekening baru dilakukan penutupan di Tahun 2020
14	0100017759	BEND PENG K A D PROP BALI	03 Mei 2001	-	-	Giro Pemerintah Lainnya	Tutup	Rekening Dinas Kearsipan tersebut sudah tidak digunakan lagi. Rekening telah ditutup pada tanggal 27 Februari 2020	Rekening baru dilakukan penutupan di Tahun 2020
15	0100002281	BIRO BINA PEMB DRH SETWILDA T	27 Mei 1987	40.439.00	40.439.00	Giro Pemerintah Lainnya	Tutup	Rekening milik Biro Ekbang, sudah tidak digunakan lagi.	Rekening baru dilakukan penutupan di Tahun 2020
16	0100002612	DIN KEBUDAYAAN IGA PT MURTIKA	18 April 1988	46.471.00	46.471.00	Giro Pemerintah Lainnya	Tutup	Rekening milik Dinas Kebudayaan, sudah tidak digunakan lagi.	Rekening baru dilakukan penutupan di Tahun 2020
17	0100003881	DIN KEBUDAYAAN IGA PT MURTIKA	05 Juni 1989	13.034.00	13.034.00	Giro Pemerintah Lainnya	Tutup	Rekening milik Dinas Kebudayaan, sudah tidak digunakan lagi.	Rekening baru dilakukan penutupan di Tahun 2020
18	0100022457	BEND PENG DINAS PERKEBUNAN	28 Januari 2003	-	-	Giro Pemerintah Lainnya	Tutup	Rekening milik Dinas Perkebunan, sudah tidak digunakan lagi. Pada Tahun 2016, Dinas Perkebunan menjadi mengalami perubahan SOTK menjadi Bidang Perkebunan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan. Dan telah ditutup	Rekening baru dilakukan penutupan di Tahun 2020
19	0100022469	BEND PENGELUARAN BPM PROV BALI	29 Januari 2003	-	-	Giro Pemerintah Lainnya	Tutup	Rekening milik Badan Penanaman Modal, sudah tidak digunakan lagi	Rekening baru dilakukan penutupan di Tahun 2020
20	0105016747	BEND PENERIMAAN DINAS KOMINFO DAN STATISTIK BALI	02 Februari 2017	-	-	Giro Pemerintah Lainnya	Tutup	Rekening milik Dinas Kominfo, sudah tidak digunakan lagi	Rekening baru dilakukan penutupan di Tahun 2020
21	100013778	B GJ BD PERTANAHAN PROP BALI	12 November 1999	170.313.93	170.313.93	Giro Pemerintah Lainnya	Tutup	Rekening Bendahara Gaji Bid Pertanahan sudah tidak digunakan lagi dan ditutup 6 Mei 2020	Rekening baru dilakukan penutupan di Tahun 2020
22	100020150	B P PENGK AMD KEPENDUDUKAN LOD	06 Maret 2002	49.246.00	49.246.00	Giro Pemerintah Lainnya	Tutup	Rekening B Pengeluaran AMD Kependudukan Lodera sudah tidak digunakan lagi dan ditutup 6 Mei 2020	Rekening baru dilakukan penutupan di Tahun 2020
23	0100024727	BEND PENG PRG UPAYA KES.PERORA	06 September 2005	-	-	Giro Pemerintah Lainnya	Tutup	Rekening milik Dinas Kesehatan, sudah tidak digunakan lagi	Rekening baru dilakukan penutupan di Tahun 2020
24	0105013339	BEND PENG KPPT PROV BALI	25 September 2008	-	-	Giro Pemerintah Lainnya	Tutup	Rekening milik Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, sudah tidak digunakan.	Rekening baru dilakukan penutupan di Tahun 2020
25	0105016710	BEND PENGL PEMBANTU UPT BPKB PROV BALI	06 April 2015	-	-	Giro Pemerintah Lainnya	Tutup	Rekening sudah tidak digunakan.	Rekening baru dilakukan penutupan di Tahun 2020
26	0105016779	BEND PENG PEMB UPT FET DAN PD PADA BPKAD PROV BALI	30 Januari 2018	-	-	Giro Pemerintah Lainnya	Tutup	Rekening milik UPT Fasilitasi, Evaluasi, Transfer dan Pembiayaan Daerah sudah tidak digunakan lagi	Rekening baru dilakukan penutupan di Tahun 2020
27	0105026415	BEND PENG PEMB UPT KPH BALTIM	24 Mei 2012	-	-	Giro Pemerintah Lainnya	Tutup	Rekening sudah tidak digunakan	Rekening baru dilakukan penutupan di Tahun 2020
28	0105027316	BEND PEN UPT BPKB PROV BALI	18 Oktober 2013	-	-	Giro Pemerintah Lainnya	Tutup	Rekening sudah tidak digunakan	Rekening baru dilakukan penutupan di Tahun 2020
29	0105022512	BEND PENGELUARAN BPPD BALI	15 Februari 2010	-	-	Giro Pemerintah TNP	Tutup	Rekening sudah tidak digunakan	Rekening baru dilakukan penutupan di Tahun 2020

**Daftar Kendaraan Hasil Penerimaan Hibah yang Belum Diserahkan BPKBnya
pada Dinas Kehutanan dan LH**

No.	Plat Nomor	BPKB	Masa Berlaku STNK	Masa Berlaku Pajak
1	B 6376 PRQ	Belum Diserahkan	14 November 2021	Dokumen Belum Diterima BPK
2	B 6307 PRQ	Belum Diserahkan	14 November 2016	14 November 2014
3	B 6344 PTQ	Belum Diserahkan	02 November 2017	Dokumen Belum Diterima BPK
4	B 6419 PNQ	Belum Diserahkan	16 November 2020	16 November 2017
5	B 6558 PNQ	Belum Diserahkan	18 November 2020	18 November 2017
6	B 6780 PNQ	Belum Diserahkan	19 November 2015	19 November 2011
7	B 6570 PNQ	Belum Diserahkan	18 November 2015	18 November 2015
8	B 6571 PNQ	Belum Diserahkan	18 November 2020	18 November 2017
9	B 6569 PNQ	Belum Diserahkan	18 November 2020	18 November 2016
10	B 6376 PRQ	Belum Diserahkan	14 November 2021	14 November 2018

Daftar Aset Tetap yang Tercatat Secara Gabungan/Gelondongan

No	Aset Tetap	Unit Pengguna Barang Tahun 2019	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Bahan/Merk	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Status Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah Barang	Harga/Nilai Perolehan (Rp)
1	Aset Tetap Lainnya	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	05.17.01.01.001	72	Ilmu Pengetahuan umum		Pembelian	2009	1	1	4.194.733.225,00
2	Aset Tetap Lainnya	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	05.17.01.01.001	65	Ilmu Pengetahuan umum	koleksi perpustakaan	Pembelian	2002	1	1	362.022.000,00
3	Aset Tetap Lainnya	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	05.17.01.01.001	68	Ilmu Pengetahuan umum	kertas	Pembelian	2006	1	1	356.600.000,00
4	Aset Tetap Lainnya	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	05.17.01.01.001	67	Ilmu Pengetahuan umum	kertas	Pembelian	2005	1	1	261.000.000,00
5	Aset Tetap Lainnya	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	05.17.01.01.001	66	Ilmu Pengetahuan umum	0	Pembelian	2003	1	1	246.239.980,00
6	Aset Tetap Lainnya	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		1	Buku Umum Lain-lain	Koleksi Perpustakaan	Pembelian	2004	2	1	245.249.500,00
7	Aset Tetap Lainnya	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	05.17.01.01.001	84	Ilmu Pengetahuan umum		Pembelian	2015	1	1	206.454.000,00
8	Aset Tetap Lainnya	Dinas Pendidikan	05.17.01.01.010	17	Buku Umum Lain-lain		Pembelian	2017	1	1	194.632.000,00
9	Aset Tetap Lainnya	Dinas Pendidikan	05.17.01.01.001	4	Ilmu Pengetahuan umum		Hibah	2016	1	1	181.026.865,00
10	Aset Tetap Lainnya	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	05.17.01.01.001	70	Ilmu Pengetahuan umum	kertas	Pembelian	2007	2	1	175.000.000,00
11	Aset Tetap Lainnya	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	05.17.01.01.001	71	Ilmu Pengetahuan umum	Kertas	Pembelian	2008	1	1	166.124.700,00
12	Aset Tetap Lainnya	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	05.17.01.01.001	80	Ilmu Pengetahuan umum		Hibah	2012	1	1	146.657.200,00
13	Aset Tetap Lainnya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	05.17.02.02.006	8	Buku Laporan Lain-lain		Pembelian	2014	1	1	145.832.000,00
14	Aset Tetap Lainnya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	05.17.02.02.006	20	Buku Laporan Lain-lain		Pembelian	2014	1	1	129.688.000,00
15	Aset Tetap Lainnya	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	05.17.01.01.001	82	Ilmu Pengetahuan umum		Hibah	2013	1	1	111.888.000,00
16	Aset Tetap Lainnya	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	05.17.01.03.005	33	Buku Agama Lain-lain		Pembelian	2015	1	1	104.516.000,00
17	Aset Tetap Lainnya	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	05.17.01.01.001	85	Ilmu Pengetahuan umum		Pembelian	2015	1	1	103.227.000,00
18	Aset Tetap Lainnya	Dinas Pendidikan	05.17.01.07.008	1	Ilmu Perdagangan Khusus Industri		Pembelian	2013	1	1	97.343.700,00
19	Aset Tetap Lainnya	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	05.17.01.01.001	79	Ilmu Pengetahuan umum		Pembelian	2012	1	1	92.795.811,00
20	Aset Tetap Lainnya	Dinas Pendidikan	05.17.01.01.010	2	Buku Umum Lain-lain		Hibah	2016	1	1	89.994.100,00
21	Aset Tetap Lainnya	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	05.17.01.01.001	83	Ilmu Pengetahuan umum		Pembelian	2014	1	1	75.592.500,00
22	Aset Tetap Lainnya	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	05.17.01.01.001	64	Ilmu Pengetahuan umum	Buku untuk Bapusda	Pembelian	2001	1	1	72.000.000,00
23	Aset Tetap Lainnya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	05.17.02.02.006	1	Buku Laporan Lain-lain		Pembelian	2011	1	1	49.824.000,00
24	Aset Tetap Lainnya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	05.17.02.02.006	10	Buku Laporan Lain-lain		Pembelian	2014	1	1	49.805.000,00
25	Aset Tetap Lainnya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	05.17.02.02.006	9	Buku Laporan Lain-lain		Pembelian	2014	1	1	49.750.000,00
26	Aset Tetap Lainnya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	05.17.02.02.006	21	Buku Laporan Lain-lain		Pembelian	2014	1	1	49.670.000,00
27	Aset Tetap Lainnya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	05.17.02.02.006	13	Buku Laporan Lain-lain		Pembelian	2014	1	1	49.622.000,00
28	Aset Tetap Lainnya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	05.17.02.02.006	11	Buku Laporan Lain-lain		Pembelian	2014	1	1	49.538.000,00
29	Aset Tetap Lainnya	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	05.17.01.01.001	62	Ilmu Pengetahuan umum	Koleksi perpustakaan	Pembelian	2001	1	1	49.412.000,00
30	Aset Tetap Lainnya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	05.17.02.02.006	17	Buku Laporan Lain-lain		Pembelian	2014	1	1	49.296.000,00
31	Aset Tetap Lainnya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	05.17.02.02.006	19	Buku Laporan Lain-lain		Pembelian	2014	1	1	49.257.000,00
32	Aset Tetap Lainnya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	05.17.02.02.006	18	Buku Laporan Lain-lain		Pembelian	2014	1	1	49.213.000,00
33	Aset Tetap Lainnya	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	05.17.01.01.001	73	Ilmu Pengetahuan umum		Pembelian	2010	1	1	48.887.000,00
34	Aset Tetap Lainnya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	05.17.02.02.006	12	Buku Laporan Lain-lain		Pembelian	2014	1	1	48.581.000,00
35	Aset Tetap Lainnya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	05.17.02.02.006	14	Buku Laporan Lain-lain		Pembelian	2014	1	1	48.257.000,00
36	Aset Tetap Lainnya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	05.17.02.02.006	15	Buku Laporan Lain-lain		Pembelian	2014	1	1	48.257.000,00
37	Aset Tetap Lainnya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	05.17.02.02.006	16	Buku Laporan Lain-lain		Pembelian	2014	1	1	48.257.000,00
38	Aset Tetap Lainnya	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	05.17.01.01.010	2	Buku Umum Lain-lain		Pembelian	2007	1	1	46.700.000,00
39	Aset Tetap Lainnya	Dinas Pendidikan	05.17.01.01.010	1	Buku Umum Lain-lain		Pembelian	2012	1	1	44.341.000,00
40	Aset Tetap Lainnya	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	05.17.01.01.004	23	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	Sosiologi Umum	Pembelian	2003	2	1	44.000.000,00
41	Aset Tetap Lainnya	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	05.17.01.01.001	81	Ilmu Pengetahuan umum		Pembelian	2013	1	1	41.414.400,00
42	Aset Tetap Lainnya	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	05.17.01.01.004	20	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi		Pembelian	2003	2	1	41.250.000,00
43	Aset Tetap Lainnya	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	05.17.01.01.001	76	Ilmu Pengetahuan umum		Pembelian	2011	1	1	38.415.400,00
44	Aset Tetap Lainnya	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	05.17.01.01.001	69	Ilmu Pengetahuan umum	Kertas	Pembelian	2006	1	1	37.500.000,00
45	Aset Tetap Lainnya	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	05.17.01.05.002	18	Pengetahuan Bahasa Indonesia	sastra	Pembelian	1993	2	1	34.528.000,00
46	Aset Tetap Lainnya	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	05.17.01.01.004	18	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	Umum	Pembelian	2003	2	1	33.000.000,00
47	Aset Tetap Lainnya	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	05.17.01.01.004	26	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	Umum	Pembelian	2003	2	1	33.000.000,00
48	Aset Tetap Lainnya	Dinas Pendidikan	05.17.01.01.010	6	Buku Umum Lain-lain		Pembelian	1995	1	1	31.998.000,00
49	Aset Tetap Lainnya	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	05.17.01.01.001	1	Ilmu Pengetahuan umum		Pembelian	2012	1	1	30.670.800,00
50	Aset Tetap Lainnya	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	05.17.01.01.001	63	Ilmu Pengetahuan umum	Buku perpustakaan keliling	Pembelian	2001	1	1	29.975.000,00
51	Aset Tetap Lainnya	Dinas Pendidikan	05.17.01.01.001	2	Ilmu Pengetahuan umum		Pembelian	2013	1	1	26.472.624,00
52	Aset Tetap Lainnya	Dinas Pendidikan	05.17.01.01.010	18	Buku Umum Lain-lain		Hibah	2017	1	1	25.237.650,00
53	Aset Tetap Lainnya	Dinas Pendidikan	05.17.01.06.001	358	Matematika		Pembelian	2015	1	1	25.200.000,00
54	Aset Tetap Lainnya	Dinas Pendidikan	05.17.01.01.010	991	Buku Umum Lain-lain		Pembelian	2016	1	1	25.000.000,00
55	Aset Tetap Lainnya	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	05.17.01.01.001	1	Ilmu Pengetahuan umum		Hibah	2011	1	1	23.506.500,00
56	Aset Tetap Lainnya	Dinas Pendidikan	05.17.01.01.010	1	Buku Umum Lain-lain		Pembelian	2014	1	1	22.556.422,00
57	Aset Tetap Lainnya	Dinas Pendidikan	05.17.01.09.001	16	Geografi, Eksplorasi		Pembelian	2015	1	1	22.350.000,00
58	Aset Tetap Lainnya	Dinas Pendidikan	05.17.01.06.004	21	Kimia		Pembelian	2015	1	1	22.050.000,00
59	Aset Tetap Lainnya	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	05.17.01.01.004	17	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	Teknologi dan ilmu terapan	Pembelian	2003	2	1	22.000.000,00
60	Aset Tetap Lainnya	Dinas Pendidikan	05.17.01.06.001	4	Matematika		Hibah	2015	1	1	21.945.000,00
61	Aset Tetap Lainnya	Dinas Pendidikan	05.17.01.01.001	1	Ilmu Pengetahuan umum		Hibah	2016	1	1	21.573.500,00

No	Aset Tetap	Unit Pengguna Barang Tahun 2019	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Bahan/Merk	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Status Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah Barang	Harga/Nilai Perolehan (Rp)
62	Aset Tetap Lainnya	Dinas Pendidikan	05.17.01.01.001	1	Ilmu Pengetahuan umum		Hibah	2016	1	1	21.573.500,00
63	Aset Tetap Lainnya	Dinas Pendidikan	05.17.01.01.001	1	Ilmu Pengetahuan umum		Hibah	2017	1	1	21.573.500,00
64	Aset Tetap Lainnya	Dinas Pendidikan	05.17.01.06.007	64	Biologi, Antopologi		Pembelian	2015	1	1	21.420.000,00
65	Aset Tetap Lainnya	Dinas Pendidikan	05.17.01.01.010	15	Buku Umum Lain-lain		Pembelian	2014	1	1	19.932.000,00
66	Aset Tetap Lainnya	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	05.17.02.02.005	4	Buku Laporan Penelitian	terbitan pemerintah	Pembelian	1999	2	1	19.850.000,00
67	Aset Tetap Lainnya	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	05.17.01.01.001	78	Ilmu Pengetahuan umum		Pembelian	2011	1	1	19.797.100,00
68	Aset Tetap Lainnya	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	05.17.01.01.001	77	Ilmu Pengetahuan umum		Pembelian	2011	1	1	19.787.500,00
69	Aset Tetap Lainnya	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	05.17.01.01.004	25	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	kesusastraan Indonesi	Pembelian	2003	2	1	19.250.000,00
70	Aset Tetap Lainnya	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	05.17.01.04.001	22	Sosiologi		Pembelian	1999	2	1	18.709.000,00
71	Aset Tetap Lainnya	Dinas Pendidikan	05.17.01.06.010	8	Buku Matematika & Pengetahuan Alam Lain-lain		Pembelian	2015	1	1	18.569.000,00
72	Aset Tetap Lainnya	Dinas Pendidikan	05.17.01.01.001	299	Ilmu Pengetahuan umum	-	Hibah	2014	1	1	17.738.000,00
73	Aset Tetap Lainnya	Dinas Pendidikan	05.17.01.01.001	921	Ilmu Pengetahuan umum		Hibah	2016	1	1	17.400.000,00
74	Aset Tetap Lainnya	Dinas Pendidikan	05.17.01.09.003	2	Sejarah		Hibah	2015	1	1	17.325.000,00
75	Aset Tetap Lainnya	Dinas Pendidikan	05.17.01.05.003	4	Pengetahuan Bahasa Inggris		Hibah	2015	1	1	17.025.000,00
76	Aset Tetap Lainnya	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	05.17.01.04.001	14	Sosiologi		Pembelian	1995	2	1	16.945.500,00
77	Aset Tetap Lainnya	Dinas Pendidikan	05.17.01.01.001	920	Ilmu Pengetahuan umum		Hibah	2016	1	1	16.800.000,00
78	Aset Tetap Lainnya	Dinas Pendidikan	05.17.01.01.001	8	Ilmu Pengetahuan umum		Hibah	2015	1	1	16.650.000,00
79	Aset Tetap Lainnya	Dinas Pendidikan	05.17.01.01.001	922	Ilmu Pengetahuan umum		Hibah	2016	1	1	16.400.000,00
80	Aset Tetap Lainnya	Dinas Pendidikan	05.17.01.06.003	3	Fisika dan Mekanika		Pembelian	2015	1	1	16.320.000,00
81	Aset Tetap Lainnya	Dinas Pendidikan	05.17.01.01.001	919	Ilmu Pengetahuan umum		Hibah	2016	1	1	16.000.000,00
82	Aset Tetap Lainnya	Dinas Pendidikan	05.17.01.06.003	2	Fisika dan Mekanika		Hibah	2015	1	1	15.720.000,00
83	Aset Tetap Lainnya	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	05.17.01.01.004	13	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	fiksi	Pembelian	1995	1	1	15.600.000,00
84	Aset Tetap Lainnya	Dinas Pendidikan	05.17.01.06.001	18	Matematika		Hibah	2015	1	1	15.470.000,00
85	Aset Tetap Lainnya	Dinas Pendidikan	05.17.01.01.010	52	Buku Umum Lain-lain	-	Pembelian	2014	1	1	14.700.000,00
86	Aset Tetap Lainnya	Dinas Pendidikan	05.17.01.01.004	1	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi		Pembelian	2013	1	1	14.619.960,00
87	Aset Tetap Lainnya	Dinas Pendidikan	05.17.01.09.003	417	Sejarah		Pembelian	2015	1	1	14.400.000,00
88	Aset Tetap Lainnya	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	05.17.01.01.001	74	Ilmu Pengetahuan umum		Pembelian	2010	1	1	14.222.000,00
89	Aset Tetap Lainnya	Dinas Pendidikan	05.17.01.06.001	6	Matematika		Hibah	2015	1	1	13.680.000,00
90	Aset Tetap Lainnya	Dinas Pendidikan	05.17.01.06.001	9	Matematika		Hibah	2015	1	1	13.680.000,00
91	Aset Tetap Lainnya	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	05.17.01.05.002	41	Pengetahuan Bahasa Indonesia	sastra	Pembelian	1999	2	1	13.568.000,00
92	Aset Tetap Lainnya	Dinas Pendidikan	05.17.01.06.003	1	Fisika dan Mekanika		Hibah	2014	1	1	13.209.000,00
93	Aset Tetap Lainnya	Dinas Pendidikan	05.17.01.06.003	6	Fisika dan Mekanika		Pembelian	2015	1	1	13.200.000,00
94	Aset Tetap Lainnya	Dinas Pendidikan	05.17.01.06.007	271	Biologi, Antopologi		Hibah	2015	1	1	13.130.000,00
95	Aset Tetap Lainnya	Dinas Pendidikan	05.17.01.06.003	3	Fisika dan Mekanika		Hibah	2014	1	1	13.090.000,00
96	Aset Tetap Lainnya	Dinas Pendidikan	05.17.01.06.001	8	Matematika		Pembelian	2015	1	1	13.056.000,00
97	Aset Tetap Lainnya	Dinas Pendidikan	05.17.01.04.011	4	Buku Ilmu Sosial Lain-lain	Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Sosial	Pembelian	2009	1	1	13.036.806,00
98	Aset Tetap Lainnya	Dinas Pendidikan	05.17.01.01.010	51	Buku Umum Lain-lain	-	Pembelian	2014	1	1	13.000.000,00
99	Aset Tetap Lainnya	Dinas Pendidikan	05.17.01.06.007	1	Biologi, Antopologi		Hibah	2014	1	1	12.960.000,00
100	Aset Tetap Lainnya	Dinas Pendidikan	05.17.01.06.001	7	Matematika		Hibah	2015	1	1	12.576.000,00
101	Aset Tetap Lainnya	Dinas Pendidikan	05.17.01.05.002	95	Pengetahuan Bahasa Indonesia		Hibah	2015	1	1	12.558.000,00
102	Aset Tetap Lainnya	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	05.17.01.01.004	15	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	fiksi	Pembelian	1999	1	1	12.362.250,00
103	Aset Tetap Lainnya	Dinas Pendidikan	05.17.01.06.004	6	Kimia		Hibah	2015	1	1	12.350.000,00
104	Aset Tetap Lainnya	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	05.17.01.07.002	33	Teknologi	terapan	Pembelian	1999	2	1	12.296.000,00
105	Aset Tetap Lainnya	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	05.17.01.07.002	24	Teknologi	terapan	Pembelian	1996	2	1	12.040.000,00
106	Aset Tetap Lainnya	Dinas Pendidikan	05.17.01.06.001	8	Matematika		Hibah	2015	1	1	11.960.000,00
107	Aset Tetap Lainnya	Dinas Pendidikan	05.17.01.05.002	96	Pengetahuan Bahasa Indonesia		Pembelian	2015	1	1	11.868.000,00
108	Aset Tetap Lainnya	Dinas Pendidikan	05.17.01.05.002	13	Pengetahuan Bahasa Indonesia		Hibah	2015	1	1	11.850.000,00
109	Aset Tetap Lainnya	Dinas Pendidikan	05.17.01.05.002	14	Pengetahuan Bahasa Indonesia		Hibah	2015	1	1	11.850.000,00
110	Aset Tetap Lainnya	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	05.17.02.01.002	8	Majalah	terbitan nasional	Pembelian	1998	2	1	11.550.000,00
111	Aset Tetap Lainnya	Dinas Pendidikan	05.17.01.05.004	3	Buku Ilmu Bahasa Lain-lain		Pembelian	2015	1	1	11.550.000,00
112	Aset Tetap Lainnya	Dinas Pendidikan	05.17.01.05.004	4	Buku Ilmu Bahasa Lain-lain		Pembelian	2015	1	1	11.550.000,00
113	Aset Tetap Lainnya	Dinas Pendidikan	05.17.01.05.004	5	Buku Ilmu Bahasa Lain-lain		Pembelian	2015	1	1	11.550.000,00
114	Aset Tetap Lainnya	Dinas Pendidikan	05.17.01.05.002	12	Pengetahuan Bahasa Indonesia		Hibah	2015	1	1	11.440.000,00
115	Aset Tetap Lainnya	Dinas Pendidikan	05.17.01.05.002	94	Pengetahuan Bahasa Indonesia		Hibah	2015	1	1	11.388.000,00
116	Aset Tetap Lainnya	Dinas Pendidikan	05.17.01.05.002	97	Pengetahuan Bahasa Indonesia		Hibah	2015	1	1	11.388.000,00
117	Aset Tetap Lainnya	Dinas Pendidikan	05.17.01.01.003	1	Ilmu Perpustakaan		Pembelian	2013	1	1	11.250.000,00
118	Aset Tetap Lainnya	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	05.17.01.04.001	21	Sosiologi		Pembelian	1999	2	1	11.222.750,00
119	Aset Tetap Lainnya	Dinas Pendidikan	05.17.01.06.007	3	Biologi, Antopologi		Pembelian	2015	1	1	11.152.000,00
120	Aset Tetap Lainnya	Dinas Pendidikan	05.17.01.09.001	9	Geografi, Eksplorasi		Hibah	2015	1	1	11.115.000,00
121	Aset Tetap Lainnya	Dinas Pendidikan	05.17.01.01.010	36	Buku Umum Lain-lain		Pembelian	2014	1	1	11.100.000,00
122	Aset Tetap Lainnya	Dinas Pendidikan	05.17.01.06.001	9	Matematika		Hibah	2014	1	1	11.050.000,00
123	Aset Tetap Lainnya	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	05.17.01.01.004	24	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	Kesenian	Pembelian	2003	2	1	11.000.000,00
124	Aset Tetap Lainnya	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	05.17.01.05.002	37	Pengetahuan Bahasa Indonesia	sastra	Pembelian	1998	2	1	10.995.000,00

Daftar Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang Tidak Memuat Informasi Secara Lengkap

No.	Unit Pengguna Barang Tahun 2019	Jenis Barang / Nama Barang	Kode Barang	Register	Kondisi bangunan (B,KB,RB)	Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak	Luas Lantai (M ²)	Letak/Lokasi Alamat	Tanggal Perolehan	Luas Bangunan (M ²)	Status Tanah	Asal usul	Harga Perolehan (Rp)
1	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI BALI	Bangunan Gudang Terbuka Semi Permanen	03.11.01.02.005	0001	Baik	Tidak	Tidak			17/10/2016			Pembelian	39.796.667,00
2	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI BALI	Bangunan Gudang Terbuka Semi Permanen	03.11.01.02.005	0002	Baik	Tidak	Tidak			17/10/2016			Pembelian	39.796.667,00
3	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI BALI	Bangunan Gudang Terbuka Semi Permanen	03.11.01.02.005	0003	Baik	Tidak	Tidak			17/10/2016			Pembelian	39.796.667,00
4	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.001	0002	Baik	Bertingkat	Beton	500					Pembelian	295.552.000,00
5	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0001	Baik	Bertingkat	Beton	238					Pembelian	866.110.143,40
6	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI BALI	Gedung Pos Jaga Permanen	03.11.01.13.001	0001	Baik	Bertingkat	Beton	48						49.780.000,00
7	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI BALI	Rumah Negara Golongan III Type E Permanen	03.11.02.03.013	0001	Baik		Beton	88					Pembelian	165.120.000,00
8	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI BALI	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	03.11.02.04.001	0003	Baik		Beton	111					Pembelian	28.630.000,00
9	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI BALI	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	03.11.02.04.001	0004	Kurang Baik	Bertingkat	Beton	2448			10090	Tanah Hak Pakai	Pembelian	269.566.000,00
10	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI BALI	Asrama Lain-lain	03.11.02.04.004	0001	Baik		Beton	101					Pembelian	87.777.000,00
11	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.001	0001	Baik	Bertingkat	Beton					Tanah Milik Pemda	Pembelian	129.860.000,00
12	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.001	0001	Baik	Bertingkat	Beton						Hibah	652.015.000,00
13	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.001	0001	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	389.200.000,00
14	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.001	0001	Baik	Tidak	Beton	135			15720	Tanah Hak Pakai	Pembelian	121.500.000,00
15	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.001	0001	Baik	Tidak	Beton			31/12/2014	13700	Tanah Milik Pemda	Hibah	551.939.000,00
16	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.001	0001	Baik								Hibah	721.607.940,00
17	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.001	0001	Baik								Pembelian	235.000.000,00
18	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.001	0002	Baik	Bertingkat	Beton			31/12/2016			Hibah	504.683.000,00
19	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.001	0002	Baik	Tidak	Beton	144		31/12/2015	1015000	Tanah Hak Pakai	Hibah	380.040.000,00
20	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.001	0002	Baik	Tidak	Beton						Hibah	94.438.000,00
21	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.001	0003	Baik		Tidak					Tanah Hak Pakai	Pembelian	148.658.000,00
22	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.001	0004	Baik								Pembelian	220.000.000,00
23	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.001	0004	Baik	Bertingkat	Beton	650			15720	Tanah Hak Pakai	Pembelian	585.000.000,00
24	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.001	0005	Baik	Bertingkat		37620		31/12/2006			Hibah	780.000.000,00

No.	Unit Pengguna Barang Tahun 2019	Jenis Barang / Nama Barang	Kode Barang	Register	Kondisi bangunan (B,KB,RB)	Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak	Luas Lantai (M ²)	Letak/Lokasi Alamat	Tanggal Perolehan	Luas Bangunan (M ²)	Status Tanah	Asal usul	Harga Perolehan (Rp)
25	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.001	0005	Baik	Bertingkat	Beton	540			15720	Tanah Hak Pakai	Pembelian	648.000.000,00
26	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.001	0005	Baik	Tidak	Beton					Tanah Hak Pakai	Hibah	585.000.000,00
27	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.001	0006	Baik	Bertingkat	Beton	540			15720	Tanah Hak Pakai	Pembelian	648.000.000,00
28	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.001	0007	Baik	Bertingkat	Beton	810			15720	Tanah Hak Pakai	Pembelian	972.000.000,00
29	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.001	0008	Baik	Bertingkat	Beton	75			15720	Tanah Hak Pakai	Pembelian	67.500.000,00
30	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.001	0008	Baik	Bertingkat	Beton	40					Hibah	48.083.250,00
31	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.001	0009	Baik	Bertingkat	Beton	162			15720	Tanah Hak Pakai	Pembelian	145.800.000,00
32	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.001	0009	Baik	Tidak	Beton	225					Hibah	37.000.000,00
33	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.001	0011	Baik	Bertingkat	Beton	103			15720	Tanah Hak Pakai	Pembelian	92.700.000,00
34	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.001	0012	Baik	Bertingkat	Beton						Hibah	2.724.928.640,00
35	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.001	0012	Baik	Tidak	Beton	61			15720	Tanah Hak Pakai	Pembelian	38.933.250,00
36	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.001	0013	Baik	Bertingkat	Beton	81			15720	Tanah Hak Pakai	Pembelian	72.900.000,00
37	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.001	0014	Baik	Tidak	Beton	441			15720	Tanah Hak Pakai	Pembelian	463.050.000,00
38	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.001	0014	Baik	Tidak	Beton	93					Hibah	55.000.000,00
39	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.001	0015	Baik	Tidak	Tidak				15720	Tanah Hak Pakai	Pembelian	366.422.000,00
40	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.001	0017	Baik	Bertingkat	Beton	240					Hibah	418.750.000,00
41	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.001	0017	Baik	Bertingkat	Tidak	130			15720	Tanah Hak Pakai	Pembelian	35.750.000,00
42	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.001	0018	Baik	Bertingkat	Beton	144					Hibah	260.000.000,00
43	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.001	0018	Baik	Tidak	Beton	400			10000	Tanah Milik Pemda	Pembelian	519.117.984,00
44	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.001	0019	Baik	Bertingkat	Beton	96					Hibah	315.000.000,00
45	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.001	0020	Baik	Tidak	Beton	10					Hibah	65.878.000,00
46	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.001	0021	Baik	Tidak	Beton	140					Hibah	203.213.000,00
47	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.001	0022	Baik	Tidak	Beton	132					Hibah	184.223.000,00
48	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.001	0023	Baik	Tidak	Beton	162					Hibah	208.212.000,00
49	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.001	0024	Baik	Tidak	Beton	216					Hibah	378.776.000,00
50	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.001	0025	Baik	Tidak	Beton	144					Hibah	233.770.000,00
51	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.001	0026	Baik	Tidak	Beton	140					Hibah	179.657.000,00
52	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.001	0027	Baik	Tidak	Beton	216					Hibah	316.815.000,00
53	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.001	0028	Baik	Tidak	Beton	216					Hibah	347.119.000,00
54	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.001	0029	Baik	Tidak	Beton	144					Hibah	250.883.000,00
55	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.001	0030	Baik	Tidak	Beton	20					Hibah	30.000.000,00

No.	Unit Pengguna Barang Tahun 2019	Jenis Barang / Nama Barang	Kode Barang	Register	Kondisi bangunan (B,KB,RB)	Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak	Luas Lantai (M ²)	Letak/Lokasi Alamat	Tanggal Perolehan	Luas Bangunan (M ²)	Status Tanah	Asal usul	Harga Perolehan (Rp)
56	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.001	0031	Baik	Bertingkat	Beton	144					Hibah	363.020.000,00
57	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	03.11.01.01.004	0001	Baik	Tidak	Beton	278			15000	Tanah Hak Pakai	Pembelian	329.802.000,00
58	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	03.11.01.01.004	0001	Baik		Beton						Pembelian	195.750.000,00
59	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	03.11.01.01.004	0001	Baik	Tidak	Beton	37					Pembelian	193.832.000,00
60	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	03.11.01.01.004	0001	Baik	Tidak	Beton			27/11/2017	20000		Hibah	101.681.280,00
61	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	03.11.01.01.004	0001	Baik	Tidak	Beton			10/10/2017	1015000	Tanah Hak Pakai	Pembelian	49.850.000,00
62	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	03.11.01.01.004	0002	Baik	Tidak	Beton	278					Pembelian	95.785.500,00
63	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	03.11.01.01.004	0003	Baik	Tidak	Beton			26/12/2013		Tanah Hak Pakai	Pembelian	709.292.000,00
64	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	03.11.01.01.004	0003	Baik	Tidak	Beton						Hibah	30.883.600,00
65	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	03.11.01.01.004	0004	Baik	Tidak	Beton	252		01/12/2014		Tanah Hak Pakai	Hibah	549.760.000,00
66	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	03.11.01.01.004	0005	Baik	Tidak	Beton	144		17/12/2015		Tanah Hak Pakai	Hibah	320.726.000,00
67	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	03.11.01.02.001	0001	Baik	Bertingkat	Beton						Pembelian	38.835.000,00
68	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	03.11.01.02.004	0001	Baik	Tidak	Beton						Hibah	25.000.000,00
69	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gudang Lain-lain	03.11.01.02.007	0001	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	96.930.000,00
70	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Bengkel Permanen	03.11.01.03.001	0001	Baik	Tidak	Beton			16/12/2019		Tanah Hak Pakai	Hibah	381.344.000,00
71	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Instalasi Semi Permanen	03.11.01.04.002	0001	Baik	Tidak	Tidak						Pembelian	21.750.000,00
72	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Instalasi Semi Permanen	03.11.01.04.002	0002	Baik	Tidak	Tidak						Pembelian	49.674.532,00
73	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	03.11.01.05.001	0001	Baik	Tidak	Beton	112		23/09/2013		Tanah Hak Pakai	Pembelian	299.792.180,00
74	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	03.11.01.05.001	0001	Baik	Tidak	Beton			26/04/2013	13700	Tanah Milik Pemda	Hibah	320.000.000,00
75	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	03.11.01.05.001	0001	Baik								Pembelian	200.000.000,00
76	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	03.11.01.05.001	0001	Baik	Tidak	Beton	177		31/12/2003	1015000	Tanah Hak Pakai	Hibah	132.914.228,00
77	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	03.11.01.05.001	0002	Baik								Pembelian	220.000.000,00
78	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	03.11.01.05.001	0002	Baik								Pembelian	220.000.000,00
79	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	03.11.01.05.001	0002	Baik	Tidak	Beton			16/09/2019			Hibah	407.040.000,00
80	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	03.11.01.05.001	0002	Baik	Tidak	Beton				20000		Hibah	512.090.413,00
81	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	03.11.01.05.001	0003	Baik	Tidak	Beton				20000		Hibah	283.313.408,00
82	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	03.11.01.05.001	0004	Baik								Pembelian	220.000.000,00
83	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	03.11.01.05.001	0004	Baik								Pembelian	220.000.000,00
84	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	03.11.01.05.001	0005	Baik	Tidak	Beton			17/01/2014	20000		Hibah	917.060.000,00
85	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	03.11.01.05.001	0006	Baik	Tidak	Beton			28/12/2017	20000		Hibah	306.391.000,00
86	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Laboratorium Lain-lain	03.11.01.05.004	0002	Baik	Tidak	Beton	120					Hibah	296.785.500,00

No.	Unit Pengguna Barang Tahun 2019	Jenis Barang / Nama Barang	Kode Barang	Register	Kondisi bangunan (B,KB,RB)	Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak	Luas Lantai (M ²)	Letak/Lokasi Alamat	Tanggal Perolehan	Luas Bangunan (M ²)	Status Tanah	Asal usul	Harga Perolehan (Rp)
87	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Laboratorium Lain-lain	03.11.01.05.004	0002	Baik	Tidak	Beton	84		09/09/2014		Tanah Hak Pakai	Pembelian	175.166.000,00
88	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Laboratorium Lain-lain	03.11.01.05.004	0003	Baik	Tidak	Beton	120					Hibah	200.000.000,00
89	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Kesehatan Lain-lain	03.11.01.06.012	0001	Baik	Bertingkat	Beton	156		31/12/2011		Tanah Hak Pakai	Pembelian	301.829.000,00
90	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Kesehatan Lain-lain	03.11.01.06.012	0001	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	22.000.000,00
91	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	03.11.01.08.001	0001	Baik	Tidak		77		28/12/2012	2000	Tanah Milik Pemda	Pembelian	336.582.400,00
92	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	03.11.01.08.001	0001	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	350.662.634,00
93	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	03.11.01.08.001	0001	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	38.000.000,00
94	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	03.11.01.08.001	0001	Baik	Bertingkat	Tidak	54					Pembelian	284.022.000,00
95	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	03.11.01.08.001	0001	Baik	Tidak	Beton	80					Hibah	40.000.000,00
96	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	03.11.01.08.001	0003	Baik		Beton				6520	Tanah Hak Guna Bangunan	Pembelian	49.900.000,00
97	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen	03.11.01.09.001	0001	Baik	Bertingkat	Beton	473					Hibah	1.440.000.000,00
98	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0001	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	206.400.000,00
99	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0001	Baik	Tidak	Beton						Hibah	639.304.000,00
100	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0001	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	639.304.000,00
101	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0001	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	144.774.750,00
102	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0001	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	125.700.000,00
103	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0001	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	240.593.000,00
104	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0001	Baik	Tidak	Beton						Hibah	84.000.000,00
105	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0001	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	330.846.800,00
106	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0001	Baik	Tidak	Beton						Hibah	431.530.000,00
107	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0001	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	200.000.000,00
108	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0001	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	136.726.600,00
109	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0001	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	500.000.000,00
110	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0001	Baik	Tidak	Beton						Hibah	458.610.000,00
111	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0001	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	35.000.000,00
112	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0001	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	125.000.000,00
113	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0001	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	375.000.000,00
114	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0001	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	30.000.000,00
115	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0001	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	150.000.000,00
116	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0001	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	613.020.000,00

No.	Unit Pengguna Barang Tahun 2019	Jenis Barang / Nama Barang	Kode Barang	Register	Kondisi bangunan (B,KB,RB)	Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak	Luas Lantai (M ²)	Letak/Lokasi Alamat	Tanggal Perolehan	Luas Bangunan (M ²)	Status Tanah	Asal usul	Harga Perolehan (Rp)
117	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0001	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	803.000.000,00
118	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0001	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	100.000.000,00
119	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0001	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	175.000.000,00
120	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0001	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	329.984.000,00
121	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0001	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	346.000.000,00
122	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0001	Baik	Tidak	Beton						Hibah	200.000.000,00
123	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0001	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	40.000.000,00
124	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0001	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	257.820.000,00
125	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0001	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	150.000.000,00
126	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0001	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	154.000.000,00
127	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0001	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	263.410.000,00
128	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0001	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	673.648.000,00
129	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0001	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	328.404.000,00
130	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0001	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	440.477.500,00
131	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0001	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	493.430.557,20
132	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0001	Baik	Tidak	Beton						Hibah	673.648.000,00
133	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0001	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	156.000.000,00
134	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0001	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	30.000.000,00
135	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0001	Baik	Tidak	Beton						Hibah	305.054.000,00
136	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0001	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	2.513.952.000,00
137	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0001	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	961.000.000,00
138	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0001	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	35.000.000,00
139	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0001	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	1.216.760.000,00
140	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0001	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	27.000.000,00
141	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0001	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	200.000.000,00
142	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0001	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	636.211.500,00
143	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0001	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	210.000.000,00
144	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0001	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	125.000.000,00
145	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0001	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	845.331.000,00
146	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0001	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	65.865.424,00
147	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0001	Baik	Tidak	Beton						Hibah	250.000.000,00

No.	Unit Pengguna Barang Tahun 2019	Jenis Barang / Nama Barang	Kode Barang	Register	Kondisi bangunan (B,KB,RB)	Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak	Luas Lantai (M ²)	Letak/Lokasi Alamat	Tanggal Perolehan	Luas Bangunan (M ²)	Status Tanah	Asal usul	Harga Perolehan (Rp)
148	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0001	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	25.000.000,00
149	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0001	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	250.000.000,00
150	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0001	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	140.787.000,00
151	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0001	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	72.000.000,00
152	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0001	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	290.369.943,00
153	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0001	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	265.776.000,00
154	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0001	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	444.038.000,00
155	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0001	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	33.000.000,00
156	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0001	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	25.000.000,00
157	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0001	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	32.000.000,00
158	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0001	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	210.000.000,00
159	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0001	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	66.015.500,00
160	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0001	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	180.000.000,00
161	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0001	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	26.827.000,00
162	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0001	Baik	Tidak	Beton						Hibah	200.000.000,00
163	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0001	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	151.275.350,00
164	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0001	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	68.861.000,00
165	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0001	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	36.000.000,00
166	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0001	Baik	Tidak	Beton						Hibah	335.530.000,00
167	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0001	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	400.000.000,00
168	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0001	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	550.188.000,00
169	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0001	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	200.000.000,00
170	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0002	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	30.000.000,00
171	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0002	Baik	Tidak	Beton						Hibah	330.846.000,00
172	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0002	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	30.500.000,00
173	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0002	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	248.103.556,00
174	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0002	Baik	Tidak	Beton						Hibah	639.304.000,00
175	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0002	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	308.619.000,00
176	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0002	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	443.656.000,00
177	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0002	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	75.000.000,00
178	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0002	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	291.121.000,00

No.	Unit Pengguna Barang Tahun 2019	Jenis Barang / Nama Barang	Kode Barang	Register	Kondisi bangunan (B,KB,RB)	Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak	Luas Lantai (M ²)	Letak/Lokasi Alamat	Tanggal Perolehan	Luas Bangunan (M ²)	Status Tanah	Asal usul	Harga Perolehan (Rp)
179	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0002	Baik	Tidak	Beton						Hibah	150.000.000,00
180	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0002	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	200.000.000,00
181	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0002	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	125.000.000,00
182	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0002	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	300.000.000,00
183	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0002	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	83.625.000,00
184	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0002	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	79.400.000,00
185	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0002	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	82.624.000,00
186	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0002	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	1.235.976.460,00
187	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0002	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	50.000.000,00
188	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0002	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	652.025.576,30
189	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0002	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	283.020.182,00
190	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0002	Baik	Tidak	Beton						Hibah	1.347.296.000,00
191	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0002	Baik	Tidak	Beton						Hibah	321.180.000,00
192	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0002	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	757.188.000,00
193	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0002	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	100.000.000,00
194	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0002	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	155.000.000,00
195	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0002	Baik	Tidak	Beton						Hibah	288.361.000,00
196	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0002	Baik	Tidak	Beton						Hibah	28.000.000,00
197	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0002	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	24.086.360,60
198	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0002	Baik	Tidak	Beton						Hibah	460.910.000,00
199	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0002	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	24.000.000,00
200	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0002	Baik	Tidak	Beton						Hibah	100.000.000,00
201	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0002	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	360.500.000,00
202	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0002	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	90.419.000,00
203	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0002	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	55.999.000,00
204	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0002	Baik	Tidak	Beton						Hibah	143.450.000,00
205	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0002	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	20.000.000,00
206	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0002	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	159.250.000,00
207	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0002	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	65.280.000,00
208	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0002	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	180.750.000,00
209	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0002	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	225.374.200,00

No.	Unit Pengguna Barang Tahun 2019	Jenis Barang / Nama Barang	Kode Barang	Register	Kondisi bangunan (B,KB,RB)	Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak	Luas Lantai (M ²)	Letak/Lokasi Alamat	Tanggal Perolehan	Luas Bangunan (M ²)	Status Tanah	Asal usul	Harga Perolehan (Rp)
210	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0002	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	20.000.000,00
211	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0002	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	52.200.000,00
212	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0002	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	2.158.528.000,00
213	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0002	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	986.459.414,00
214	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0002	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	480.000.000,00
215	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0003	Baik	Tidak	Beton						Hibah	100.000.000,00
216	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0003	Baik	Tidak	Beton						Hibah	295.410.000,00
217	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0003	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	30.500.000,00
218	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0003	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	49.500.000,00
219	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0003	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	25.200.000,00
220	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0003	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	125.000.000,00
221	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0003	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	425.004.000,00
222	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0003	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	35.424.000,00
223	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0003	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	316.288.000,00
224	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0003	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	1.173.646.037,40
225	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0003	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	200.000.000,00
226	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0003	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	2.965.235.630,00
227	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0003	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	316.728.000,00
228	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0003	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	75.000.000,00
229	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0003	Baik	Tidak	Beton						Hibah	292.280.000,00
230	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0003	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	600.000.000,00
231	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0003	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	175.000.000,00
232	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0003	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	1.105.299.000,00
233	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0003	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	849.708.372,40
234	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0003	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	227.746.560,00
235	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0003	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	62.755.500,00
236	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0003	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	65.280.000,00
237	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0003	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	20.000.000,00
238	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0003	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	31.357.000,00
239	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0003	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	49.254.000,00
240	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0003	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	1.076.933.000,00

No.	Unit Pengguna Barang Tahun 2019	Jenis Barang / Nama Barang	Kode Barang	Register	Kondisi bangunan (B,KB,RB)	Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak	Luas Lantai (M ²)	Letak/Lokasi Alamat	Tanggal Perolehan	Luas Bangunan (M ²)	Status Tanah	Asal usul	Harga Perolehan (Rp)
241	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0003	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	200.000.000,00
242	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0003	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	150.000.000,00
243	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0004	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	51.681.412,00
244	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0004	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	237.003.000,00
245	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0004	Baik	Tidak	Beton						Hibah	454.710.000,00
246	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0004	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	510.000.000,00
247	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0004	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	171.000.000,00
248	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0004	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	564.000.000,00
249	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0004	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	372.000.000,00
250	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0004	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	100.000.000,00
251	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0004	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	57.957.829,00
252	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0004	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	400.000.000,00
253	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0004	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	75.000.000,00
254	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0004	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	150.000.000,00
255	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0004	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	836.200.000,00
256	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0004	Baik	Tidak	Beton						Hibah	106.550.000,00
257	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0004	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	60.000.000,00
258	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0004	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	240.000.000,00
259	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0004	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	180.198.000,00
260	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0004	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	61.000.000,00
261	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0004	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	563.519.000,00
262	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0004	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	1.210.000.000,00
263	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0004	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	43.548.500,00
264	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0005	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	192.617.950,00
265	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0005	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	513.427.600,00
266	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0005	Baik	Tidak	Beton						Hibah	673.648.000,00
267	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0005	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	677.484.000,00
268	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0005	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	300.000.000,00
269	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0005	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	750.000.000,00
270	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0005	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	75.000.000,00
271	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0005	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	372.800.000,00

No.	Unit Pengguna Barang Tahun 2019	Jenis Barang / Nama Barang	Kode Barang	Register	Kondisi bangunan (B,KB,RB)	Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak	Luas Lantai (M ²)	Letak/Lokasi Alamat	Tanggal Perolehan	Luas Bangunan (M ²)	Status Tanah	Asal usul	Harga Perolehan (Rp)
272	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0005	Baik	Tidak	Beton						Hibah	576.722.000,00
273	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0005	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	141.390.000,00
274	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0005	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	137.500.000,00
275	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0005	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	436.680.000,00
276	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0005	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	701.500.000,00
277	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0005	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	208.162.000,00
278	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0005	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	140.000.000,00
279	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0006	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	113.000.000,00
280	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0006	Baik	Tidak	Beton						Hibah	56.000.000,00
281	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0006	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	210.000.000,00
282	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0006	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	999.200.000,00
283	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0006	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	45.000.000,00
284	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0006	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	704.572.400,00
285	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0006	Baik	Tidak	Beton						Hibah	454.710.000,00
286	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0006	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	100.000.000,00
287	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0006	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	99.246.650,00
288	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0006	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	461.716.000,00
289	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0006	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	303.141.000,00
290	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0006	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	70.000.000,00
291	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0006	Baik	Tidak	Beton						Hibah	404.352.000,00
292	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0006	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	227.746.560,00
293	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0006	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	600.000.000,00
294	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0006	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	246.088.888,00
295	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0007	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	55.519.000,00
296	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0007	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	2.672.125.000,00
297	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0007	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	270.000.000,00
298	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0007	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	95.264.400,00
299	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0007	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	25.000.000,00
300	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0007	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	270.000.000,00
301	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0007	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	594.330.000,00
302	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0007	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	231.876.000,00

No.	Unit Pengguna Barang Tahun 2019	Jenis Barang / Nama Barang	Kode Barang	Register	Kondisi bangunan (B,KB,RB)	Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak	Luas Lantai (M ²)	Letak/Lokasi Alamat	Tanggal Perolehan	Luas Bangunan (M ²)	Status Tanah	Asal usul	Harga Perolehan (Rp)
303	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0007	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	35.010.000,00
304	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0007	Baik	Tidak	Beton						Hibah	303.141.000,00
305	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0007	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	759.415.900,00
306	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0007	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	72.949.000,00
307	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0007	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	40.000.000,00
308	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0008	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	57.456.000,00
309	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0008	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	135.000.000,00
310	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0008	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	104.200.000,00
311	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0008	Baik	Tidak	Beton						Hibah	316.728.000,00
312	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0008	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	80.000.000,00
313	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0008	Baik	Tidak	Beton						Hibah	150.000.000,00
314	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0008	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	50.000.000,00
315	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0008	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	59.767.470,00
316	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0008	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	35.708.000,00
317	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0008	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	25.000.000,00
318	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0009	Baik	Tidak	Beton						Hibah	200.000.000,00
319	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0009	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	105.000.000,00
320	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0009	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	132.568.000,00
321	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0009	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	250.000.000,00
322	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0009	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	35.839.500,00
323	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0010	Baik	Tidak	Tidak						Hibah	77.054.500,00
324	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0010	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	68.000.000,00
325	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0010	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	38.171.000,00
326	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0010	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	1.000.000.000,00
327	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0010	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	2.571.593.000,00
328	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0010	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	245.700.000,00
329	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0011	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	63.000.000,00
330	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0011	Baik	Tidak	Beton						Hibah	21.089.000,00
331	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0011	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	397.000.000,00
332	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0011	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	540.572.000,00
333	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0011	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	647.277.800,00

No.	Unit Pengguna Barang Tahun 2019	Jenis Barang / Nama Barang	Kode Barang	Register	Kondisi bangunan (B,KB,RB)	Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak	Luas Lantai (M ²)	Letak/Lokasi Alamat	Tanggal Perolehan	Luas Bangunan (M ²)	Status Tanah	Asal usul	Harga Perolehan (Rp)
334	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0012	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	175.000.000,00
335	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0012	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	21.728.500,00
336	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0012	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	380.311.000,00
337	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0013	Baik	Tidak	Beton						Hibah	100.000.000,00
338	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0013	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	375.000.000,00
339	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0013	Baik	Tidak	Beton						Hibah	100.000.000,00
340	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0014	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	180.487.000,00
341	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0014	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	30.956.000,00
342	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0014	Baik	Tidak	Beton						Hibah	100.000.000,00
343	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0015	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	298.161.990,00
344	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0015	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	20.183.500,00
345	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0016	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	2.096.736.000,00
346	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0016	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	207.515.000,00
347	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0017	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	602.980.000,00
348	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0017	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	465.000.000,00
349	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0018	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	469.709.000,00
350	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0018	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	360.000.000,00
351	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0019	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	53.006.576,00
352	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0019	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	302.786.000,00
353	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0021	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	236.636.500,00
354	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	03.11.01.09.007	0022	Baik	Tidak	Beton						Hibah	651.516.000,00
355	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0001	Baik								Pembelian	854.500.000,00
356	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0001	Baik	Bertingkat	Beton						Hibah	1.700.752.000,00
357	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0001	Baik	Bertingkat	Beton	146		31/12/2014	5780	Tanah Hak Pakai	Hibah	479.209.000,00
358	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0001	Baik		Beton	333					Pembelian	399.600.000,00
359	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0001	Kurang Baik		Beton	330		31/12/1997		Tanah Hak Pakai	Pembelian	63.000.000,00
360	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0001	Baik	Tidak							Hibah	678.920.500,00
361	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0001	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	300.300.000,00
362	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0001	Baik	Tidak	Beton	720			4200	Tanah Hak Pakai	Pembelian	82.616.000,00
363	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0001	Baik								Pembelian	176.099.000,00
364	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0001	Baik								Pembelian	449.840.862,00

No.	Unit Pengguna Barang Tahun 2019	Jenis Barang / Nama Barang	Kode Barang	Register	Kondisi bangunan (B,KB,RB)	Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak	Luas Lantai (M ²)	Letak/Lokasi Alamat	Tanggal Perolehan	Luas Bangunan (M ²)	Status Tanah	Asal usul	Harga Perolehan (Rp)
365	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0001	Kurang Baik	Tidak	Beton			31/12/2013	13700	Tanah Milik Pemda	Hibah	920.734.000,00
366	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0001	Baik	Tidak	Beton	216					Pembelian	145.000.000,00
367	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0001	Baik	Tidak	Beton	155					Pembelian	257.016.200,00
368	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0001	Baik	Tidak		48		31/12/2006	2300	Tanah Milik Pemda	Pembelian	217.881.000,00
369	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0002	Baik	Bertingkat	Beton	144			5780	Tanah Hak Pakai	Hibah	215.238.000,00
370	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0002	Baik	Tidak	Beton					Tanah Milik Pemda	Hibah	100.000.000,00
371	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0002	Baik								Pembelian	854.500.000,00
372	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0002	Baik	Tidak	Beton						Hibah	420.000.000,00
373	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0002	Baik		Beton						Pembelian	353.200.000,00
374	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0002	Kurang Baik	Tidak	Beton	330		31/12/1997		Tanah Hak Pakai	Pembelian	63.800.000,00
375	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0002	Baik		Beton	216					Pembelian	259.200.000,00
376	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0002	Baik	Tidak	Beton			31/12/2014	13700	Tanah Milik Pemda	Hibah	287.935.000,00
377	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0002	Baik	Tidak	Beton	144		10/04/2013	4200	Tanah Hak Pakai	Pembelian	240.007.000,00
378	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0002	Baik	Bertingkat	Beton	934					Pembelian	583.275.000,00
379	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0002	Baik			196			2885		Pembelian	210.000.000,00
380	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0002	Baik	Tidak	Beton	144					Hibah	200.166.000,00
381	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0002	Baik	Tidak	Beton	216		31/12/1986		Tanah Hak Pakai	Pembelian	32.880.000,00
382	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0002	Baik								Hibah	75.000.000,00
383	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0003	Kurang Baik	Tidak	Beton					Tanah Milik Pemda	Pembelian	210.074.490,00
384	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0003	Baik	Tidak	Beton	135		08/12/2003		Tanah Hak Pakai	Hibah	202.500.000,00
385	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0003	Baik		Beton	648					Pembelian	777.600.000,00
386	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0003	Baik	Tidak	Beton						Hibah	405.000.000,00
387	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0003	Baik	Tidak	Beton			26/03/2012	13700	Tanah Milik Pemda	Hibah	420.000.000,00
388	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0003	Baik	Tidak	Beton	144		31/12/1995		Tanah Milik Pemda	Pembelian	38.250.000,00
389	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0003	Baik	Bertingkat	Beton	406					Pembelian	583.275.000,00
390	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0003	Baik	Bertingkat	Beton						Pembelian	1.007.230.000,00
391	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0003	Baik		Beton						Pembelian	639.267.178,00
392	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0003	Baik			294					Pembelian	354.755.578,60
393	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0004	Baik	Tidak	Beton					Tanah Milik Pemda	Pembelian	300.877.740,00
394	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0004	Baik	Tidak	Beton						Hibah	359.000.000,00
395	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0004	Baik	Tidak	Beton						Hibah	944.891.417,00

No.	Unit Pengguna Barang Tahun 2019	Jenis Barang / Nama Barang	Kode Barang	Register	Kondisi bangunan (B,KB,RB)	Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak	Luas Lantai (M ²)	Letak/Lokasi Alamat	Tanggal Perolehan	Luas Bangunan (M ²)	Status Tanah	Asal usul	Harga Perolehan (Rp)
396	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0004	Baik		Beton	756					Pembelian	907.200.000,00
397	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0004	Baik	Tidak	Beton	140		31/12/1982	9050	Tanah Hak Pakai	Pembelian	50.400.000,00
398	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0004	Baik	Tidak	Beton			13/10/2015	13700	Tanah Milik Pemda	Hibah	311.542.000,00
399	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0004	Baik	Tidak	Tidak	96		04/08/2003	4200	Tanah Hak Pakai	Hibah	324.000.000,00
400	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0004	Baik	Bertingkat	Tidak	396					Pembelian	833.275.000,00
401	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0004	Baik	Tidak	Beton			16/01/2014	20000		Hibah	457.500.000,00
402	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0004	Baik								Pembelian	106.152.734,00
403	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0005	Baik	Bertingkat	Beton	288		31/12/2009		Tanah Milik Pemda	Hibah	532.679.800,00
404	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0005	Baik	Tidak	Beton					Tanah Milik Pemda	Pembelian	438.095.120,00
405	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0005	Baik	Tidak	Tidak					Tanah Hak Pakai	Pembelian	96.990.000,00
406	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0005	Baik	Bertingkat	Beton			09/12/2007			Pembelian	696.346.760,00
407	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0005	Baik		Beton	817					Pembelian	980.400.000,00
408	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0005	Baik								Pembelian	105.006.000,00
409	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0005	Baik	Tidak	Beton			09/11/2011	7000	Tanah Hak Pakai	Pembelian	1.075.290.000,00
410	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0005	Baik	Tidak	Beton			17/12/2015	13700	Tanah Milik Pemda	Hibah	320.731.000,00
411	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0005	Baik	Tidak	Beton			04/02/2016	20000		Hibah	300.635.000,00
412	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0005	Baik			665					Pembelian	1.010.088.500,00
413	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0005	Baik								Hibah	210.000.000,00
414	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0006	Kurang Baik	Tidak	Beton					Tanah Milik Pemda	Pembelian	985.680.000,00
415	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0006	Baik		Beton						Hibah	284.446.000,00
416	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0006	Baik		Beton						Pembelian	1.153.710.000,00
417	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0006	Baik	Bertingkat	Beton	168		09/12/2006	9050	Tanah Hak Pakai	Pembelian	256.868.000,00
418	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0006	Baik	Tidak	Beton					Tanah Milik Pemda	Hibah	69.037.000,00
419	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0006	Baik	Tidak	Beton			21/12/2016		Tanah Milik Pemda	Hibah	436.249.800,00
420	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0006	Baik								Pembelian	199.264.050,00
421	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0006	Baik	Bertingkat	Beton	413					Pembelian	1.166.565.000,00
422	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0006	Baik	Tidak	Beton			13/10/2017	20000		Hibah	452.256.000,00
423	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0006	Baik	Tidak	Beton			17/12/2018			Pembelian	1.393.017.009,20
424	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0006	Baik								Hibah	210.000.000,00
425	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0007	Baik	Bertingkat	Beton					Tanah Milik Pemda	Pembelian	744.840.000,00
426	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0007	Baik	Tidak	Beton						Hibah	386.280.000,00

No.	Unit Pengguna Barang Tahun 2019	Jenis Barang / Nama Barang	Kode Barang	Register	Kondisi bangunan (B,KB,RB)	Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak	Luas Lantai (M ²)	Letak/Lokasi Alamat	Tanggal Perolehan	Luas Bangunan (M ²)	Status Tanah	Asal usul	Harga Perolehan (Rp)
427	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0007	Baik	Tidak				28/11/2016			Hibah	263.336.000,00
428	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0007	Baik	Tidak	Beton	140		31/12/2013		Tanah Milik Pemda	Hibah	505.414.500,00
429	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0007	Baik	Tidak	Beton			08/12/2015	20000		Hibah	321.523.360,00
430	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0007	Baik	Bertingkat	Beton	634					Pembelian	1.166.565.000,00
431	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0007	Baik								Pembelian	319.633.589,00
432	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0008	Baik	Tidak	Beton						Hibah	311.429.000,00
433	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0008	Baik	Tidak	Beton	144		31/12/2003	9050	Tanah Hak Pakai	Pembelian	150.249.500,00
434	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0008	Baik	Tidak	Beton	342,5		21/08/2018		Tanah Milik Pemda	Hibah	762.967.000,00
435	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0008	Baik	Bertingkat	Beton	614					Pembelian	1.166.565.000,00
436	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0008	Baik	Tidak	Beton			08/12/2015	20000		Hibah	312.534.913,00
437	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0008	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	184.050.000,00
438	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0009	Baik	Tidak	Beton					Tanah Milik Pemda	Hibah	144.202.013,00
439	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0009	Baik	Tidak	Beton			31/12/2016			Hibah	160.365.360,00
440	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0009	Baik	Tidak	Beton				10000		Pembelian	23.849.000,00
441	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0009	Baik	Tidak	Beton			08/12/2015	20000		Hibah	324.390.246,00
442	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0009	Baik	Tidak	Beton	473					Hibah	66.000.000,00
443	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0009	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	538.862.065,00
444	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0010	Baik	Bertingkat	Beton			31/12/2016			Hibah	160.365.360,00
445	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0010	Baik		Beton					Tanah Hak Pakai	Pembelian	527.542.858,00
446	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0010	Baik	Bertingkat	Beton	1		31/12/2012	1000	Tanah Hak Pakai	Pembelian	74.574.000,00
447	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0010	Baik	Tidak	Beton			27/12/2018			Hibah	303.243.000,00
448	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0011	Baik	Tidak	Beton			27/12/2018			Hibah	303.243.000,00
449	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0012	Baik	Tidak		171					Pembelian	154.357.000,00
450	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0012	Baik								Pembelian	375.000.000,00
451	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0013	Baik	Bertingkat	Beton			05/02/2018			Pembelian	9.864.192.734,80
452	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0013	Baik	Tidak	Beton	1		31/12/2010	15650	Tanah Hak Pakai	Hibah	191.520.000,00
453	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0013	Baik		Beton			31/12/2019			Pembelian	400.000.000,00
454	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0014	Baik	Tidak	Tidak			31/12/2013	4922	Tanah Milik Pemda	Pembelian	202.510.000,00
455	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0014	Baik	Tidak	Beton						Hibah	171.486.000,00
456	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0014	Baik								Pembelian	854.500.000,00
457	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0014	Baik	Tidak	Beton	1		29/12/2017		Tanah Hak Pakai	Pembelian	371.146.222,00

No.	Unit Pengguna Barang Tahun 2019	Jenis Barang / Nama Barang	Kode Barang	Register	Kondisi bangunan (B,KB,RB)	Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak	Luas Lantai (M ²)	Letak/Lokasi Alamat	Tanggal Perolehan	Luas Bangunan (M ²)	Status Tanah	Asal usul	Harga Perolehan (Rp)
458	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0015	Baik	Tidak					25600		Hibah	355.872.032,00
459	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0015	Baik								Pembelian	172.943.000,00
460	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0015	Baik								Pembelian	854.500.000,00
461	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0015	Baik	Bertingkat	Beton						Pembelian	882.290.000,00
462	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0016	Baik								Pembelian	691.775.044,00
463	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0017	Baik								Pembelian	307.638.000,00
464	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0019	Baik		Beton						Pembelian	721.204.127,00
465	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0030	Baik								Pembelian	854.500.000,00
466	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain	03.11.01.10.004	0001	Baik	Tidak	Beton	120					Hibah	260.000.000,00
467	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain	03.11.01.10.004	0001	Baik	Tidak	Beton	200					Pembelian	295.271.000,00
468	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain	03.11.01.10.004	0001	Baik		Beton					Tanah Hak Pakai	Pembelian	59.520.000,00
469	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain	03.11.01.10.004	0001	Baik	Tidak	Beton	162		26/10/2011		Tanah Hak Pakai	Hibah	210.000.000,00
470	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain	03.11.01.10.004	0001	Baik	Tidak	Tidak					Tanah Hak Pakai	Pembelian	111.500.000,00
471	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain	03.11.01.10.004	0002	Baik	Tidak	Beton					Tanah Hak Pakai	Hibah	261.350.000,00
472	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain	03.11.01.10.004	0002	Baik	Tidak	Tidak	189		08/04/2013		Tanah Hak Pakai	Hibah	315.000.000,00
473	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain	03.11.01.10.004	0002	Baik	Tidak	Beton					Tanah Hak Pakai	Pembelian	66.144.625,00
474	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain	03.11.01.10.004	0003	Baik	Tidak	Beton	120		31/12/2011			Hibah	200.000.000,00
475	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain	03.11.01.10.004	0004	Baik		Beton					Tanah Milik Negara	Pembelian	66.144.625,00
476	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain	03.11.01.10.004	0004	Baik	Tidak	Beton						Hibah	209.310.000,00
477	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain	03.11.01.10.004	0006	Baik	Tidak	Beton	150					Hibah	381.629.000,00
478	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain	03.11.01.10.004	0007	Baik	Tidak	Beton						Hibah	150.000.000,00
479	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain	03.11.01.10.004	0009	Baik	Tidak	Beton	134					Hibah	130.813.000,00
480	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain	03.11.01.10.004	0010	Baik	Tidak	Beton	77					Hibah	83.594.000,00
481	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain	03.11.01.10.004	0011	Baik	Tidak	Beton	175					Hibah	175.199.000,00
482	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain	03.11.01.10.004	0012	Baik	Tidak	Beton	175					Hibah	174.029.000,00
483	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain	03.11.01.10.004	0013	Baik	Tidak	Beton	172					Hibah	228.784.000,00
484	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain	03.11.01.10.004	0014	Baik	Tidak	Beton	187,5					Hibah	200.029.250,00
485	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain	03.11.01.10.004	0015	Baik	Tidak	Beton	260					Hibah	256.678.000,00
486	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain	03.11.01.10.004	0016	Baik	Tidak	Beton	187,5					Hibah	182.889.000,00
487	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain	03.11.01.10.004	0017	Baik	Tidak	Beton	148					Hibah	244.538.000,00
488	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain	03.11.01.10.004	0018	Baik	Tidak	Beton	96					Hibah	84.658.000,00

No.	Unit Pengguna Barang Tahun 2019	Jenis Barang / Nama Barang	Kode Barang	Register	Kondisi bangunan (B,KB,RB)	Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak	Luas Lantai (M ²)	Letak/Lokasi Alamat	Tanggal Perolehan	Luas Bangunan (M ²)	Status Tanah	Asal usul	Harga Perolehan (Rp)
489	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain	03.11.01.10.004	0019	Baik	Tidak	Beton	56					Hibah	27.546.000,00
490	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain	03.11.01.10.004	0023	Baik	Tidak	Beton	153					Hibah	160.630.000,00
491	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain	03.11.01.10.004	0025	Baik	Tidak	Beton						Hibah	49.749.500,00
492	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Kamar Mandi	03.11.01.10.005	0001	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	69.330.000,00
493	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Kamar Mandi	03.11.01.10.005	0001	Baik								Pembelian	314.720.000,00
494	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Kamar Mandi	03.11.01.10.005	0001	Baik								Pembelian	100.000.000,00
495	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Kamar Mandi	03.11.01.10.005	0001	Baik								Pembelian	165.858.000,00
496	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Kamar Mandi	03.11.01.10.005	0001	Baik	Tidak	Beton						Hibah	25.000.000,00
497	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Kamar Mandi	03.11.01.10.005	0001	Baik								Pembelian	95.760.000,00
498	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Kamar Mandi	03.11.01.10.005	0001	Baik	Tidak	Beton	31					Pembelian	143.694.000,00
499	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Kamar Mandi	03.11.01.10.005	0002	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	48.190.000,00
500	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Kamar Mandi	03.11.01.10.005	0002	Baik		Beton	2480		17/12/2018	13700	Tanah Milik Pemda	Pembelian	148.365.250,00
501	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Kamar Mandi	03.11.01.10.005	0002	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	34.620.000,00
502	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Kamar Mandi	03.11.01.10.005	0002	Baik								Pembelian	105.000.000,00
503	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Kamar Mandi	03.11.01.10.005	0003	Baik	Bertingkat	Beton						Pembelian	64.010.000,00
504	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Kamar Mandi	03.11.01.10.005	0004	Baik								Pembelian	105.000.000,00
505	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Kamar Mandi	03.11.01.10.005	0004	Baik								Pembelian	100.000.000,00
506	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Olah Raga Terbuka Permanen	03.11.01.11.004	0001	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	98.116.600,00
507	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Olah Raga Terbuka Permanen	03.11.01.11.004	0001	Baik	Tidak	Tidak	420		12/08/2015		Tanah Hak Pakai	Pembelian	67.000.000,00
508	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Olah Raga Terbuka Permanen	03.11.01.11.004	0001	Baik	Tidak	Beton	400					Pembelian	734.712.000,00
509	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Olah Raga Terbuka Semi Permanen	03.11.01.11.005	0001	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	67.185.000,00
510	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	03.11.01.12.001	0001	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	109.673.000,00
511	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Gedung Pos Jaga Permanen	03.11.01.13.001	0001	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	26.000.000,00
512	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Gedung Pos Jaga Permanen	03.11.01.13.001	0001	Baik	Tidak	Beton	4					Pembelian	27.674.400,00
513	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	03.11.01.14.002	0001	Baik	Tidak	Tidak					Tanah Milik Pemda	Pembelian	23.762.000,00
514	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	03.11.01.14.002	0001	Baik	Tidak	Tidak						Pembelian	38.306.000,00
515	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	03.11.01.14.002	0002	Baik	Tidak	Tidak					Tanah Milik Pemda	Pembelian	71.500.000,00
516	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Garasi/Pool Lain-lain	03.11.01.14.004	0001	Baik	Tidak	Beton			27/11/2017	20000		Hibah	20.000.000,00
517	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	03.11.01.19.001	0001	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	270.409.000,00
518	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	03.11.01.19.001	0001	Baik	Bertingkat	Beton						Pembelian	197.500.000,00
519	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	03.11.01.19.001	0001	Baik	Tidak	Beton			16/10/2018		Tanah Hak Pakai	Hibah	289.062.000,00

No.	Unit Pengguna Barang Tahun 2019	Jenis Barang / Nama Barang	Kode Barang	Register	Kondisi bangunan (B,KB,RB)	Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak	Luas Lantai (M ²)	Letak/Lokasi Alamat	Tanggal Perolehan	Luas Bangunan (M ²)	Status Tanah	Asal usul	Harga Perolehan (Rp)
520	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	03.11.01.19.001	0001	Baik	Tidak	Beton			22/04/2013	13700	Tanah Milik Pemda	Hibah	160.000.000,00
521	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	03.11.01.19.001	0001	Baik	Tidak	Beton	84		19/12/2013		Tanah Hak Pakai	Pembelian	197.500.000,00
522	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	03.11.01.19.001	0001	Baik								Pembelian	211.145.431,00
523	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	03.11.01.19.001	0001	Baik								Pembelian	211.618.011,00
524	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	03.11.01.19.001	0002	Baik	Tidak	Beton	120		30/12/2013		Tanah Hak Pakai	Pembelian	211.063.000,00
525	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	03.11.01.19.001	0002	Baik		Beton						Hibah	160.000.000,00
526	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	03.11.01.19.001	0002	Baik								Pembelian	216.845.431,00
527	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Perpustakaan Lain-lain	03.11.01.19.005	0001	Baik	Tidak	Tidak						Tanah Milik Pemda	211.618.014,70
528	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	03.11.01.27.001	0002	Baik	Tidak	Beton	20					Hibah	85.000.000,00
529	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	03.11.01.27.001	0003	Baik	Tidak	Beton	28					Hibah	45.000.000,00
530	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	03.11.01.27.001	0004	Baik	Tidak	Beton	261					Hibah	64.000.000,00
531	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	03.11.01.27.001	0005	Baik	Tidak	Beton	132					Hibah	49.000.000,00
532	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	03.11.01.27.004	0001	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	125.000.000,00
533	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	03.11.01.27.004	0002	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	34.200.000,00
534	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	03.11.01.27.004	0003	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	38.602.000,00
535	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	03.11.01.27.004	0004	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	111.424.000,00
536	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	03.11.01.27.004	0005	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	80.627.000,00
537	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Asrama Permanen	03.11.02.05.001	0002	Baik								Pembelian	972.588.000,00
538	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Asrama Permanen	03.11.02.05.001	0011	Baik	Bertingkat	Beton			05/02/2018			Pembelian	6.836.791.719,00
539	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Asrama Permanen	03.11.02.05.001	0012	Baik	Bertingkat	Beton			05/02/2018			Pembelian	2.490.984.951,40
540	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Asrama Permanen	03.11.02.05.001	0013	Baik	Tidak	Beton			05/02/2018			Pembelian	957.330.594,70
541	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Hotel Permanen	03.11.02.06.001	0001	Baik	Bertingkat	Beton			06/12/2018			Pembelian	982.079.161,60
542	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Lain-lain	03.12.01.01.002	0001	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	149.261.000,00
543	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Lain-lain	03.12.01.01.002	0001	Baik	Tidak	Beton			07/12/2015	13700	Tanah Milik Pemda	Pembelian	31.000.000,00
544	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Lain-lain	03.12.01.01.002	0002	Baik	Bertingkat					5780	Tanah Hak Pakai	Hibah	250.000.000,00
545	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Lain-lain	03.12.01.01.002	0003	Baik	Bertingkat					5780	Tanah Hak Pakai	Hibah	98.880.000,00
546	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Lain-lain	03.12.01.01.002	0003	Baik	Tidak	Beton			20/09/2016		Tanah Milik Pemda	Pembelian	30.000.000,00
547	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Lain-lain	03.12.01.01.002	0004	Baik	Tidak	Beton			11/11/2019		Tanah Milik Pemda	Pembelian	187.495.850,00
548	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Lain-lain	03.12.01.01.002	0005	Baik	Tidak	Beton			14/10/2019			Hibah	114.000.000,00
549	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Tugu Pembangunan Lain-lain	03.12.02.02.002	0001	Baik								Pembelian	69.000.000,00
550	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Tugu Pembangunan Lain-lain	03.12.02.02.002	0001	Baik	Tidak	Beton	1556		31/12/2015		Tanah Hak Pakai	Hibah	59.529.673,10

No.	Unit Pengguna Barang Tahun 2019	Jenis Barang / Nama Barang	Kode Barang	Register	Kondisi bangunan (B,KB,RB)	Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak	Luas Lantai (M ²)	Letak/Lokasi Alamat	Tanggal Perolehan	Luas Bangunan (M ²)	Status Tanah	Asal usul	Harga Perolehan (Rp)
551	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Tugu Peringatan Lainnya	03.12.02.03.001	0002	Baik	Tidak	Beton						Hibah	56.550.500,00
552	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Candi Hindhu	03.12.03.01.001	0001	Baik	Tidak	Beton	36					Hibah	87.156.000,00
553	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Candi Hindu Lain-lain	03.12.03.01.002	0001	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	48.000.000,00
554	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Candi Hindu Lain-lain	03.12.03.01.002	0001	Baik	Tidak	Beton	30				Tanah Hak Pakai	Pembelian	400.000.000,00
555	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Candi Lainnya	03.12.03.03.001	0001	Baik		Beton						Hibah	202.989.845,00
556	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Candi Lainnya	03.12.03.03.001	0001	Baik	Tidak	Beton					Tanah Hak Pakai	Pembelian	126.483.000,00
557	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Candi Lainnya	03.12.03.03.001	0001	Baik		Beton			31/12/2014	13700	Tanah Milik Pemda	Hibah	150.000.000,00
558	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Candi Lainnya	03.12.03.03.001	0001	Baik								Pembelian	44.850.000,00
559	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Monomen/Bangunan Bersejarah Lainnya	03.12.04.01.001	0001	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	79.750.000,00
560	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Monomen/Bangunan Bersejarah Lainnya	03.12.04.01.001	0002	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	74.750.000,00
561	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Tugu Peringatan Lainnya	03.12.05.01.001	0001	Baik	Tidak	Tidak	56		31/12/2008	8000		Hibah	56.000.000,00
562	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Tugu/Tanda Batas Lain-lain	03.12.06.01.010	0001	Baik	Tidak	Beton	30120		31/12/2015		Tanah Hak Pakai	Hibah	88.180.679,80
563	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Tugu/Tanda Batas Lain-lain	03.12.06.01.010	0002	Baik	Tidak	Beton	12980		31/12/2015		Tanah Hak Pakai	Hibah	52.289.647,00
564	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA PROV.BALI	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.001	0001	Baik	Bertingkat	Beton						Hibah	1.238.000.000,00
565	DINAS KEHUTANAN PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.001	0003	Kurang Baik	Tidak	Beton	35			400	Tanah Milik Pemda	Pembelian	30.350.000,00
566	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI BALI	Gedung Pos Jaga Permanen	03.11.01.13.001	0003	Baik	Bertingkat	Beton			28/07/2006			Pembelian	80.384.900,00
567	DINAS TENAGA KERJA DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROV.BALI	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	03.11.01.01.004	0001	Baik								Pembelian	197.173.850,00
568	INSPEKTORAT	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.001	0001	Kurang Baik		Beton	1293					Pembelian	2.474.766.624,00
569	INSPEKTORAT	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	03.11.01.01.004	0001	Baik		Beton	50					Pembelian	100.728.000,00
570	INSPEKTORAT	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	03.11.01.01.004	0002	Baik		Beton	30					Pembelian	76.370.000,00
571	INSPEKTORAT	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	03.11.01.02.001	0001	Baik		Beton	15					Pembelian	30.000.000,00
572	INSPEKTORAT	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	03.11.01.08.001	0001	Baik		Beton	171					Pembelian	218.950.000,00
573	INSPEKTORAT	Bangunan Gedung Olah Raga Terbuka Permanen	03.11.01.11.004	0001	Kurang Baik		Tidak	2357,7					Pembelian	40.000.000,00
574	INSPEKTORAT	Gedung Pos Jaga Permanen	03.11.01.13.001	0001	Baik		Beton	30					Pembelian	59.946.000,00
575	INSPEKTORAT	Gedung Garasi/Pool Permanen	03.11.01.14.001	0001	Baik		Beton	60					Pembelian	44.100.000,00
576	INSPEKTORAT	Gedung Garasi/Pool Permanen	03.11.01.14.001	0002	Baik		Beton	72					Pembelian	81.998.000,00
577	INSPEKTORAT	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	03.11.01.27.001	0001	Kurang Baik		Beton	6					Pembelian	27.800.000,00
578	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Laboratorium Lain-lain	03.11.01.05.004	0001	Baik	Tidak	Beton	143,75		11/06/2013		Tanah Milik Pemda	Pembelian	396.773.000,00
579	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	03.11.01.01.004	0001	Baik					30/10/2013		Tanah Hak Pengelolaan	Pembelian	49.606.000,00

No.	Unit Pengguna Barang Tahun 2019	Jenis Barang / Nama Barang	Kode Barang	Register	Kondisi bangunan (B,KB,RB)	Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak	Luas Lantai (M ²)	Letak/Lokasi Alamat	Tanggal Perolehan	Luas Bangunan (M ²)	Status Tanah	Asal usul	Harga Perolehan (Rp)
580	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROV.BALI	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.001	0017	Baik	Tidak	Beton	485,55					Hibah	781.652.707,00
581	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROV.BALI	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	03.11.01.02.004	0001	Baik	Tidak	Beton					Tanah Milik Pemda	Pembelian	156.246.018,00
582	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROV.BALI	Candi Lainnya	03.12.03.03.001	0002	Baik								Pembelian	179.300.000,00
583	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROV.BALI	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	03.11.01.01.004	0008	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	31.445.129,00
584	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROV.BALI	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	03.11.01.01.004	0009	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	31.445.129,00
585	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROV.BALI	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.001	0004	Baik		Beton			15/04/2016		Tanah Milik Negara	Pembelian	52.250.000,00
586	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROV.BALI	Lain-lain	03.12.01.01.002	0001	Baik	Tidak	Beton			02/01/2006		Tanah Hak Pakai	Hibah	20.000.000,00
587	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.001	0004	Baik							Tanah Milik Pemda	Pembelian	74.275.000,00
588	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.001	0006	Baik							Tanah Milik Pemda	Pembelian	94.843.000,00
589	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.001	0011	Baik		Beton						Pembelian	716.295.550,00
590	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	03.11.01.01.004	0001	Baik		Beton						Pembelian	76.782.000,00
591	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	03.11.01.01.004	0004	Baik								Pembelian	111.710.000,00
592	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	03.11.01.01.004	0005	Baik							Tanah Milik Pemda	Pembelian	163.833.000,00
593	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	03.11.01.08.001	0042	Baik		Beton						Pembelian	185.892.000,00
594	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	03.11.01.08.001	0043	Baik		Beton						Pembelian	415.532.000,00
595	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Ibadah Lain-lain	03.11.01.08.004	0001	Baik		Beton						Pembelian	161.568.000,00
596	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Ibadah Lain-lain	03.11.01.08.004	0002	Baik		Beton						Pembelian	222.731.000,00
597	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Ibadah Lain-lain	03.11.01.08.004	0003	Baik		Beton						Pembelian	372.746.000,00
598	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BALI	Gedung Pos Jaga Permanen	03.11.01.13.001	0002	Baik		Beton	148					Pembelian	295.182.000,00
599	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BALI	Bangunan Gedung Garasi/Pool Lain-lain	03.11.01.14.004	0001	Baik	Tidak						Tanah Milik Pemda	Pembelian	710.349.000,00

No.	Unit Pengguna Barang Tahun 2019	Jenis Barang / Nama Barang	Kode Barang	Register	Kondisi bangunan (B,KB,RB)	Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak	Luas Lantai (M ²)	Letak/Lokasi Alamat	Tanggal Perolehan	Luas Bangunan (M ²)	Status Tanah	Asal usul	Harga Perolehan (Rp)
600	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BALI	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	03.11.01.27.004	0002	Baik		Beton						Pembelian	49.146.000,00
601	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BALI	Lain-lain	03.12.01.01.002	0003	Baik									521.000.000,00
602	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BALI	Lain-lain	03.12.01.01.002	0004	Baik									491.096.506,00
603	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BALI	Lain-lain	03.12.01.01.002	0005	Baik									45.767.000,00
604	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BALI	Lain-lain	03.12.01.01.002	0006	Baik									197.550.000,00
605	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BALI	Lain-lain	03.12.01.01.002	0007	Baik									286.825.000,00
606	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BALI	Lain-lain	03.12.01.01.002	0008	Baik	Tidak	Beton						Pembelian	64.700.000,00
607	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BALI	Lain-lain	03.12.01.01.002	0009	Baik		Beton						Pembelian	77.346.000,00
608	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BALI	Lain-lain	03.12.01.01.002	0010	Baik								Pembelian	89.804.000,00
609	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BALI	Gedung Pos Jaga Permanen	03.11.01.13.001	0001	Baik	Tidak	Beton			06/08/2019			Pembelian	49.295.000,00
Jumlah														210.708.890.916,20

Daftar Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang Tidak Memuat Informasi Secara Lengkap

No.	Unit Pengguna Barang Tahun 2019	Jenis Barang / Nama Barang	Kode Barang	Register	Konstruksi	Panjang (Km)	Lebar (Km)	Luas (Km ²)	Letak/Lokasi Alamat	Tanggal Dokumen	Nomor Dokumen	Status Tanah	Asal-Usul	Harga Perolehan (Rp)	Kondisi
1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Lain-lain	04.15.06.02.004	0001									Pembelian	22.755.000,00	Baik
2	BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BALI	Jalan Propinsi Lain-lain	04.13.01.02.010	0001									Pembelian	194.945.000,00	Baik
3	BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BALI	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Sedan	04.15.06.02.002	0001									Pembelian	71.398.170,00	Baik
4	BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BALI	Jaringan Cabang Distribusi lain-lain	04.16.01.03.004	0001		225	2	4		20/12/2017	1071 Tahun 2017		Pembelian	18.318.000,00	Baik
5	BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BALI	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Sedan	04.15.06.02.002	0001						27/11/2018	3879 tahun 2018		Pembelian	37.922.500,00	Baik
6	BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BALI	Jalan Khusus Lain-lain	04.13.01.05.010	0001				719		04/08/2017	470 Tahun 2017		Pembelian	188.826.000,00	Baik
7	BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BALI	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Kecil		0001						26/11/2018	3878 Tahun 2018	Tanah Milik Pemda	Pembelian	55.275.000,00	Baik
8	BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BALI	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Sedan	04.15.06.02.002	0001									Pembelian	64.785.000,00	Baik
9	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI BALI	Instalasi Air Bersih Lain-lain	04.15.01.05.005	0001									Pembelian	282.850.000,00	Baik
10	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI BALI	Instalasi Air Bersih Lain-lain	04.15.01.05.005	0002									Pembelian	39.540.000,00	Baik
11	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI BALI	Instansi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	04.15.06.03.004	0001									Pembelian	60.000.000,00	Baik
12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI BALI	Jaringan Transmisi Lain-lain	04.16.02.01.004	0001									Pembelian	12.224.100,00	Baik
13	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI BALI	Jaringan Transmisi Lain-lain	04.16.02.01.004	0002									Pembelian	184.498.000,00	Baik
14	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI BALI	Jaringan Telepon Di atas Tanah Kapasitas Kecil	04.16.03.01.001	0001									Pembelian	85.897.500,00	Baik
15	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN	Instansi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	04.15.06.03.004	0001								Tanah Milik Pemda	Pembelian	35.250.000,00	Baik
16	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN	Instansi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	04.15.06.03.004	0002								Tanah Milik Pemda	Pembelian	47.796.000,00	Baik
17	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Besar	04.15.06.03.003	0001									Pembelian	77.257.000,00	Baik
18	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Besar	04.15.06.03.003	0004									Pembelian	69.795.000,00	Baik
19	DINAS PARIWISATA	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Kecil	04.15.06.03.001	0001									Pembelian	72.261.255,00	Baik
20	DINAS PARIWISATA	Jaringan Distribusi Tegangan Di bawah 1KVA	04.16.02.02.003	0002						29/09/2015	027/3312/N/Dispar		Pembelian	25.000.000,00	Baik

No.	Unit Pengguna Barang Tahun 2019	Jenis Barang / Nama Barang	Kode Barang	Register	Konstruksi	Panjang (Km)	Lebar (Km)	Luas (Km ²)	Letak/Lokasi Alamat	Tanggal Dokumen	Nomor Dokumen	Status Tanah	Asal-Usul	Harga Perolehan (Rp)	Kondisi
21	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Sedang	04.15.06.02.002	0001						29/10/2015	027/3002/I/BPMP		Pembelian	49.395.734,00	Baik
22	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROV.BALI	Bangunan Pembawa Irigasi Lain-lain	04.14.01.03.008	0001								Tanah Milik Pemda	Pembelian	42.400.000,00	Baik
23	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROV.BALI	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	04.15.06.03.004	0001						31/12/2018		Tanah Milik Pemda	Pembelian	30.207.200,00	Baik
24	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI BALI	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Sedang	04.15.06.03.002	0001						28/03/2016		Tanah Milik Pemda	Pembelian	35.471.700,00	Baik
25	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI BALI	Instalasi	04.15.07.01.004	0001						01/08/2016		Tanah Milik Pemda	Pembelian	32.955.000,00	Baik
26	DINAS TENAGA KERJA DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROV.BALI	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga SuryaLain-lain	04.15.05.09.004	0001						04/10/2017			Pembelian	1.697.055.000,00	Baik
27	SEKRETARIAT DPRD	Jalan Khusus Lain-lain	04.13.01.05.010	0001	beton							Tanah Milik Pemda	Pembelian	41.114.164,00	Baik
28	SEKRETARIAT DPRD	Jalan Khusus Lain-lain	04.13.01.05.010	0002	PAPING, KORAL SIKAT			882.942		31/12/2015	027/83/DPRD/2015	Tanah Milik Pemda	Pembelian	278.979.516,00	Baik
29	SEKRETARIAT DPRD	Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Kecil	04.15.06.01.001	0002						26/10/2017	027/2670/Peng-Umum/Sekwan		Pembelian	26.544.900,00	Baik
30	SEKRETARIAT DPRD	Jaringan Distribusi Lain-lain	04.16.02.02.004	0002						30/04/2015	701/1254/DPRD	Tanah Milik Pemda	Pembelian	191.812.000,00	Baik
31	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Jalan Khusus Komplek	04.13.01.05.004	0001	Tempat Parkir					19/12/2016		Tanah Milik Pemda	Pembelian	37.440.000,00	Baik
32	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Jembatan Penyeberangan Orang	04.13.02.09.001	0001	Beton Bertulang		4						Hibah	104.530.000,00	Baik
33	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Pengambilan Air Bersih Lain-lain	04.14.06.02.013	0001									Pembelian	74.750.000,00	Baik
34	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Pengambilan Air Bersih Lain-lain	04.14.06.02.013	0001									Pembelian	75.197.000,00	Baik
35	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservok Air Umum	04.14.06.05.008	0001									Hibah	150.000.000,00	Baik
36	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Lain-lain	04.14.08.01.002	0001									Hibah	55.000.000,00	Baik
37	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Sumur Gali (SGL)	04.15.01.05.004	0001									Pembelian	14.139.267,00	Baik
38	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	PLTA Kapasitas Besar	04.15.05.01.003	0001								Tanah Milik Pemda	Pembelian	14.993.000,00	Baik
39	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Instalasi Listrik Tenaga Air Lain-lain	04.15.05.01.004	0001									Pembelian	25.171.000,00	Baik
40	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Kecil	04.15.06.01.001	0001									Pembelian	30.000.000,00	Baik
41	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Sedang	04.15.06.01.002	0002									Hibah	14.751.000,00	Baik

No.	Unit Pengguna Barang Tahun 2019	Jenis Barang / Nama Barang	Kode Barang	Register	Konstruksi	Panjang (Km)	Lebar (Km)	Luas (Km ²)	Letak/Lokasi Alamat	Tanggal Dokumen	Nomor Dokumen	Status Tanah	Asal-Usul	Harga Perolehan (Rp)	Kondisi
42	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Sedan	04.15.06.02.002	0001									Hibah	15.281.000,00	Baik
43	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Sedan	04.15.06.02.002	0001									Pembelian	49.000.000,00	Baik
44	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Lain-lain	04.15.06.02.004	0001						28/06/2019	28 Juni 2019	Tanah Milik Pemda	Pembelian	68.000.000,00	Baik
45	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Lain-lain	04.15.06.02.004	0001						03/05/2017		Tanah Milik Pemda	Pembelian	15.000.000,00	Baik
46	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Lain-lain	04.15.06.02.004	0002						14/12/2017		Tanah Milik Pemda	Pembelian	15.000.000,00	Baik
47	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Kecil	04.15.06.03.001	0001									Pembelian	33.022.000,00	Baik
48	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Sedang	04.15.06.03.002	0001									Pembelian	10.000.000,00	Baik
49	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Instalasi Komunikasi Elektronik (komlek)	04.15.07.01.003	0001									Pembelian	44.430.000,00	Baik
50	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Instalasi	04.15.07.01.004	0001						21/10/2019	027/23103/SMK 1 Gr/2019		Pembelian	49.800.000,00	Baik
51	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Instalasi	04.15.07.01.004	0001									Pembelian	11.974.909,00	Baik
52	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Instalasi Gardu Gas Lain-lain	04.15.08.01.003	0001									Pembelian	49.550.000,00	Baik
53	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Lain-lain	04.15.09.01.003	0001									Hibah	20.000.000,00	Baik
54	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Jaringan Pembawa Kapasitas Kecil	04.16.01.01.001	0001									Pembelian	15.491.000,00	Baik
55	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Jaringan Transmisi Tegangan Dibawah 100 KVA	04.16.02.01.003	0001						26/09/2019		Tanah Hak Pakai	Pembelian	30.000.000,00	Baik
56	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Jaringan Distribusi Tegangan 1 s/d 20 KVA	04.16.02.02.002	0002									Hibah	34.350.400,00	Baik
57	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Jaringan Distribusi Lain-lain	04.16.02.02.004	0001									Pembelian	18.564.000,00	Baik
58	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Jaringan Telepon Di atas Tanah Lain-lain	04.16.03.01.004	0001									Pembelian	20.000.000,00	Baik
59	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Jaringan Telepon Di bawah Tanah Kapasitas sedang	04.16.03.02.002	0001						24/11/2017		Tanah Milik Pemda	Pembelian	49.914.425,00	Baik
60	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BALI	Lampu Lalu lintas dan Marka Jalan Provinsi	04.13.01.02.011	0001									Pembelian	378.541.000,00	Baik
61	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BALI	Jembatan Propinsi lain-lain	04.13.02.02.010	0001									Pembelian	47.231.000,00	Baik
62	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BALI	Bangunan Pengaman Irigasi Lain-lain	04.14.01.05.003	0001									Pembelian	244.673.700,00	Baik

No.	Unit Pengguna Barang Tahun 2019	Jenis Barang / Nama Barang	Kode Barang	Register	Konstruksi	Panjang (Km)	Lebar (Km)	Luas (Km ²)	Letak/Lokasi Alamat	Tanggal Dokumen	Nomor Dokumen	Status Tanah	Asal-Usul	Harga Perolehan (Rp)	Kondisi
63	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BALI	Krib Pengaman Talud/Pantai	04.14.04.05.007	0001									Pembelian	3.378.002.000,00	Baik
64	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BALI	Krib Pengaman Talud/Pantai	04.14.04.05.007	0006						31/12/2015			Pembelian	4.757.979.000,00	Baik
65	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BALI	Bangunan Pengambilan dari Sumber Air	04.14.06.02.011	0001									Pembelian	187.748.000,00	Baik
66	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BALI	Bangunan Pengambilan dari Sumber Air	04.14.06.02.011	0002									Pembelian	639.505.000,00	Baik
67	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BALI	Instalasi Air Bersih Lain-lain	04.15.01.05.005	0001								Tanah Milik Pemda	Pembelian	162.151.000,00	Baik
68	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BALI	Instalasi Air Bersih Lain-lain	04.15.01.05.005	0005								Tanah Milik Pemda	Pembelian	39.549.000,00	Baik
69	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BALI	Instalasi Air Bersih Lain-lain	04.15.01.05.005	0006								Tanah Milik Pemda	Pembelian	24.724.000,00	Baik
70	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BALI	Instalasi Air Bersih Lain-lain	04.15.01.05.005	0017								Tanah Milik Pemda	Pembelian	300.630.000,00	Baik
71	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BALI	Instalasi Air Bersih Lain-lain	04.15.01.05.005	0035						24/04/2009	602.1/1693/DPU		Pembelian	88.716.000,00	Baik
72	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BALI	Instalasi Air Bersih Lain-lain	04.15.01.05.005	0036						18/05/2009	602.1/2441/DPU		Pembelian	238.727.000,00	Baik
73	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BALI	Instalasi Air Bersih Lain-lain	04.15.01.05.005	0039						11/11/2009	602.1/8728/DPU		Pembelian	143.869.000,00	Baik
74	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BALI	Instalasi Air Bersih Lain-lain	04.15.01.05.005	0040									Pembelian	222.774.000,00	Baik
75	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BALI	Instalasi Air Bersih Lain-lain	04.15.01.05.005	0041									Pembelian	35.000.000,00	Baik
76	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BALI	Instalasi Air Bersih Lain-lain	04.15.01.05.005	0045									Pembelian	63.000.000,00	Baik
77	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BALI	Instalasi Air Bersih Lain-lain	04.15.01.05.005	0046									Pembelian	131.929.000,00	Baik
78	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BALI	Instalasi Air Bersih Lain-lain	04.15.01.05.005	0047									Pembelian	210.017.000,00	Baik
79	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BALI	Instalasi Air Bersih Lain-lain	04.15.01.05.005	0048									Pembelian	337.774.000,00	Baik
80	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BALI	Instalasi Air Bersih Lain-lain	04.15.01.05.005	0051									Pembelian	100.723.038.560,00	Baik
81	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BALI	Instalasi Air Bersih Lain-lain	04.15.01.05.005	0052									Pembelian	407.882.000,00	Baik
82	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BALI	Instalasi Air Bersih Lain-lain	04.15.01.05.005	0053									Pembelian	349.016.000,00	Baik
83	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BALI	Instalasi Air Bersih Lain-lain	04.15.01.05.005	0054									Pembelian	417.534.000,00	Baik

No.	Unit Pengguna Barang Tahun 2019	Jenis Barang / Nama Barang	Kode Barang	Register	Konstruksi	Panjang (Km)	Lebar (Km)	Luas (Km ²)	Letak/Lokasi Alamat	Tanggal Dokumen	Nomor Dokumen	Status Tanah	Asal-Usul	Harga Perolehan (Rp)	Kondisi
84	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BALI	Instalasi Listrik Tenaga Biogas Lain-lain	04.15.05.10.004	0007									Pembelian	19.767.000,00	Baik
85	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BALI	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Lain-lain	04.15.06.02.004	0001									Pembelian	39.897.000,00	Baik
86	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BALI	Instalasi	04.15.07.01.004	0001									Pembelian	2.339.250.000,00	Baik
87	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BALI	Instalasi Air Bersih Lain-lain	04.15.01.05.005	0001						17/06/2016	602.1/192/UPT.PAM/2016		Pembelian	124.441.000,00	Baik
88	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BALI	Instalasi Air Bersih Lain-lain	04.15.01.05.005	0002						18/05/2016	028/BA-105/UPT.PAM/2016		Pembelian	173.171.000,00	Baik
89	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BALI	Instalasi Air Bersih Lain-lain	04.15.01.05.005	0004						09/09/2016	028/BA-277/UPT.PAM/2016		Pembelian	145.330.000,00	Baik
Jumlah														121.589.744.000,00	

Daftar Aset Tak Berwujud yang Tidak Mencantumkan Informasi Secara Lengkap

UNIT PENGGUNA BARANG TAHUN 2019	JENIS BARANG / NAMA BARANG	KODE BARANG	REGISTER	TAHUN PEROLEHAN	SPESIFIKASI	PENCIPTA	KONDISI	ASAL USUL	NILAI PEROLEHAN (Rp)
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI BALI	Perangkat Lunak Sistem Operasi	07.24.01.01.001	0002	2015				Pembelian	174.800.000,00
DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI	Perangkat Lunak Sistem Operasi	07.24.01.01.001	0002	2014				Pembelian	49.000.000,00
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI	Perangkat Lunak Sistem Operasi	07.24.01.01.001	0001	2013				Pembelian	450.000,00
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI	Perangkat Lunak Sistem Operasi	07.24.01.01.001	0002	2013				Pembelian	101.823.200,00
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BALI	Perangkat Lunak Sistem Operasi	07.24.01.01.001	0001	2013				Hibah	1.594.993.961,00
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BALI	Perangkat Lunak Sistem Operasi	07.24.01.01.001	0001	2015				Pembelian	49.406.000,00
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	Perangkat Lunak Sistem Operasi	07.24.01.01.001	0001	2018				Pembelian	11.959.409,00
JUMLAH									1.982.432.570,00

Rincian Penguasaan Kendaraan Bermotor Melebihi 12 Bulan Belum Balik Nama dan Dikenakan BBNKB

No.	NO_PENDAFTARAN	NO_REGISTER	NO_POLISI	NO_KTP 2019	ID_PROGRESIF 2019	NO_KTP 2018	ID_PROGRESIF 2018	TYPE_KB	NAMA (Inisial)	ALAMAT (Inisial)	NJKB (Rp)	HASIL PENGUJIAN	
												TARIF BBNKB	PENGENAAN BBNKB SEHARUSNYA
1	0109-04-2019/1194	0004409968	DK1856EC	3509260608800004	3509260608800004	3509260608800004	3509260608800004	GC 415V-APV DLX	AAA	JDB	78.000.000,00	1%	780.000,00
2	0504-02-2019/0215	0004409945	DK1084DV	5103060904760002	5103060904760002	5103060904760002	5103060904760002	GC 415V-APV DLX	AAA	JDB	78.000.000,00	1%	780.000,00
3	0502-05-2019/0545	0100161696	DK1569CU	5104071606920001	5104071606920001	5104071606920001	5104071606920001	NEW AVANZA 1.3G MT	ANM	JAN	124.000.000,00	1%	1.240.000,00
4	0116-12-2019/0236	0100104113	DK1364JD	5171041508000001	5171041508000001	5171041508000001	5171041508000001	NEW AVANZA 1.3G MT	ANM	JAN	124.000.000,00	1%	1.240.000,00
5	0103-10-2019/0130	0005735432	DK1668QA	5105025208880001	5105025208880001	5105025208880001	5105025208880001	KRMN ESTILO YL6 1.1L	ANP	JMI	68.000.000,00	1%	680.000,00
6	1326-08-2019/0466	0004276636	DK318YR	5106030107450337	5106030107450337	5106030107450337	5106030107450337	CORONA	AOY	JTN	37.000.000,00	1%	370.000,00
7	0222-10-2019/0536	0004288644	DK1840CM	5108057112710087	5108057112710087	5108057112710087	5108057112710087	COROLLA AE 109	AOY	JTN	86.000.000,00	1%	860.000,00
8	1911-07-2019/0160	0004744675	DK1242DC	5171042510680001	5171042510680001	5171042510680001	5171042510680001	CR-V RD5 2WD 2-4 AT	APJ	JAI	188.000.000,00	1%	1.880.000,00
9	0114-08-2019/0335	0004342199	DK1945JY	5171043012400001	5171043012400001	5171043012400001	5171043012400001	KF 40	APJ	JAI	48.000.000,00	1%	480.000,00
10	1916-12-2019/0016	0004082176	DK1348BG	5101115116100022	5101115116100022	5101115116100022	5101115116100022	KF 40 SUPER SHORT	APD	JIB	35.000.000,00	1%	350.000,00
11	0130-08-2019/0912	0008346424	DK1767DG	5102064606800003	5102064606800003	5102064606800003	5102064606800003	BRIO DD2 1.3 E MT	AJ	JRP	118.000.000,00	1%	1.180.000,00
12	0120-09-2019/0811	0008627969	DK1602AO	5171040806820001	5171040806820001	5171040806820001	5171040806820001	NEW AVANZA 1.3G MT	AJ	JRP	127.000.000,00	1%	1.270.000,00
13	1207-05-2019/0172	0004440032	DK1344CV	5104012310730002	5104012310730002	5104012310730002	5104012310730002	KIJANG INNOVA G	AN	JPN	138.000.000,00	1%	1.380.000,00
14	0108-08-2019/0510	0004184415	DK1354AR	5104035303800004	5104035303800004	5104035303800004	5104035303800004	KF 83 SUPER LGX	AN	JBP	104.000.000,00	1%	1.040.000,00
15	0114-05-2019/0952	0004648317	DK8024AJ	5105022808820001	5105022808820001	5105022808820001	5105022808820001	COLT DIESEL FE 304	AN	JPN	91.000.000,00	1%	910.000,00
16	0207-08-2019/0795	0004637732	DK8525AX	5108082307780003	5108082307780003	5108082307780003	5108082307780003	FE 349	AN	JPN	89.000.000,00	1%	890.000,00
17	0527-07-2019/0069	0008018183	DK1191XO	5105033112610078	5105033112610078	5105033112610078	5105033112610078	KARIMUN SL410_R	AQK	JKK	64.000.000,00	1%	640.000,00
18	0103-10-2019/0146	0005342060	DK846XQ	5171030801060001	5171030801060001	5171030801060001	5171030801060001	AVANZA 1300	AQK	JK9	70.000.000,00	1%	700.000,00
19	0125-11-2019/0456	0008111512	DK1738XO	5203071506920005	5203071506920005	5203071506920005	5203071506920005	JAZZ GD3 1.5 IDSI MT	AQK	JKK	88.000.000,00	1%	880.000,00
20	0209-05-2019/0142	0004725211	DK574EM	3509040206770010	3509040206770010	3509040206770010	3509040206770010	F500 RV TARUNA CSX	AT	JMY	69.000.000,00	1%	690.000,00
21	0105-09-2019/0887	0004653549	DK1667EP	3509122104700002	3509122104700002	3509122104700002	3509122104700002	GC415V APV DLX MT	AT	JYI	73.000.000,00	1%	730.000,00
22	1104-11-2019/0167	0004341546	DK980YI	5103042104800003	5103042104800003	5103042104800003	5103042104800003	FEROZA 2 WD	AT	JNS	34.000.000,00	1%	340.000,00
23	0125-02-2019/0854	0004297101	DK774YA	5104040606750004	5104040606750004	5104040606750004	5104040606750004	SB 416-2WD/ESCU DO	AT	JIN	65.000.000,00	1%	650.000,00
24	0227-09-2019/0208	0008629463	DK1723AO	5106044504750005	5106044504750005	5106044504750005	5106044504750005	AVANZA 1300 G	AT	JMY	115.000.000,00	1%	1.150.000,00
25	0125-09-2019/0333	0004125444	DK1991J	5107043112540062	5107043112540062	5107043112540062	5107043112540062	AVANZA G	AT	JYI	70.000.000,00	1%	700.000,00
26	0924-08-2019/0401	0004399248	DK1183DG	5107047112520199	5107047112520199	5107047112520199	5107047112520199	F 69 RV ZD	AT	JIN	47.000.000,00	1%	470.000,00
27	0228-12-2019/0068	0004663777	DK1593YE	5108011505890003	5108011505890003	5108011505890003	5108011505890003	AVANZA G	AT	JYI	70.000.000,00	1%	700.000,00

No.	NO_PENDAFTARAN	NO_REGISTER	NO_POLISI	NO_KTP 2019	ID_PROGRESIF 2019	NO_KTP 2018	ID_PROGRESIF 2018	TYPE_KB	NAMA (Inisial)	ALAMAT (Inisial)	NJKB (Rp)	HASIL PENGUJIAN	
												TARIF BBNKB	PENGENAAN BBNKB SEHARUSNYA
28	0430-09-2019/0083	0004356455	DK1040YJ	5108037112600107	5108037112600107	5108037112600107	5108037112600107	KF 40 SUPER	AT	JYI	39.000.000,00	1%	390.000,00
29	0105-07-2019/0331	0004526581	DK1769J	5108073112450011	5108073112450011	5108073112450011	5108073112450011	SL 410 R KARIMUN	AT	JYI	57.000.000,00	1%	570.000,00
30	0312-09-2019/0166	0005283551	DK749YI	5171022109640001	5171022109640001	5171022109640001	5171022109640001	FEROZA 2 WD	AT	JND	34.000.000,00	1%	340.000,00
31	0427-07-2019/0299	0004475630	DK469AE	5204520101710213	5204520101710213	5204520101710213	5204520101710213	FEROZA 2 WD	AT	JYI	39.000.000,00	1%	390.000,00
32	0511-04-2019/0230	0004781610	DK1452IA	5105025707570001	5105025707570001	5105025707570001	5105025707570001	F700RG-TX MT	AS	JBG	130.000.000,00	1%	1.300.000,00
33	0406-05-2019/0366	0005331134	DK1828CU	5108070701810004	5108070701810004	5108070701810004	5108070701810004	GC415V APV DLX MT	AS	JBG	88.000.000,00	1%	880.000,00
34	0126-02-2019/0347	0004413602	DK1730DW	5171014207750003	5171014207750003	5171014207750003	5171014207750003	FORTUNER 2.7 GAT LUX	AS	JGN	261.000.000,00	1%	2.610.000,00
35	0209-08-2019/0098	0004168200	DK1103CL	3578024510770001	3578024510770001	3578024510770001	3578024510770001	KUDA VB5W GLS	DK	JN6	86.000.000,00	1%	860.000,00
36	0427-08-2019/0126	0100215998	DK1853DG	5171021212580010	5171021212580010	5171021212580010	5171021212580010	NEW AVANZA VELOZ 1.5 A/T	DE	JPM	145.000.000,00	1%	1.450.000,00
37	0102-05-2019/0345	0005414635	DK1005DD	5102036312570006	5102036312570006	5102036312570006	5102036312570006	SL 410 R KARIMUN	DY	J1B	64.000.000,00	1%	640.000,00
38	0225-05-2019/0247	0005529788	DK8667AM	5103036901820003	5103036901820003	5103036901820003	5103036901820003	COLT L 300 DIESEL	DY	J1B	63.000.000,00	1%	630.000,00
39	0315-04-2019/0119	0004508784	DK9639BA	5103043101640002	5103043101640002	5103043101640002	5103043101640002	COLT T 120 SS	DY	JB2	47.000.000,00	1%	470.000,00
40	0122-04-2019/0200	0009057686	DK9985BN	5171011901730002	5171011901730002	5171011901730002	5171011901730002	S402RP-PMRFJJ-KJ	DDS	JS4	77.000.000,00	1%	770.000,00
41	0509-05-2019/0335	0004687336	DK1183DR	5105012810920001	5105012810920001	5105012810920001	5105012810920001	KRMN ESTILO YL6 1.1L	IKW	JTP	68.000.000,00	1%	680.000,00
42	0905-08-2019/0411	0004614181	DK1547QI	5171011409740003	5171011409740003	5171011409740003	5171011409740003	GC 415V-APV DLX	IKW	JPN	78.000.000,00	1%	780.000,00
43	0307-05-2019/0225	0005525426	DK1813IM	5171020801990003	5171020801990003	5171020801990003	5171020801990003	SL 410 R KARIMUN	IKW	JNP	54.000.000,00	1%	540.000,00
44	0126-03-2019/0577	0004138048	DK1770EA	5171036811810017	5171036811810017	5171036811810017	5171036811810017	KATANA STD/DX	IKW	J3D	34.000.000,00	1%	340.000,00
45	0904-02-2019/0189	0004357311	DK1970B	5102054312660001	5102054312660001	5102054312660001	5102054312660001	RUSH 1.5S	KYH	JND	130.000.000,00	1%	1.300.000,00
46	0123-03-2019/0188	0005508065	DK1068EB	5103055107880012	5103055107880012	5103055107880012	5103055107880012	CR-V RD4 2WD MT	KYH	JAN	155.000.000,00	1%	1.550.000,00
47	0128-01-2019/1230	0005746935	DK712IA	5171045707620002	5171045707620002	5171045707620002	5171045707620002	CRV RE1 2WD2.4AT CKD	KYH	JA1	219.000.000,00	1%	2.190.000,00
48	0125-09-2019/0158	0004597954	DK8011CW	3509162011860006	3509162011860006	3509162011860006	3509162011860006	NHR 55 2771 CC	KYP	JPI	84.000.000,00	1%	840.000,00
49	1130-10-2019/0134	0004626276	DK8819DD	3510091506700013	3510091506700013	3510091506700013	3510091506700013	DUTRO 130 HD	KG	GIB	110.000.000,00	1%	1.100.000,00
50	0308-11-2019/0383	0004498261	DK1629EW	5102071910770001	5102071910770001	5102071910770001	5102071910770001	YARIS 1.5 E	KG	GAI	113.000.000,00	1%	1.130.000,00
51	0521-11-2019/0398	0004628847	DK8191DD	5105041212840001	5105041212840001	5105041212840001	5105041212840001	DUTRO 130 HD	KG	GIB	119.000.000,00	1%	1.190.000,00
52	0711-10-2019/0196	0004743318	DK954XQ	5103061711750006	5103061711750006	5103061711750006	5103061711750006	JAZZ GD3 1.5 IDSI AT	KTP	JG8	103.000.000,00	1%	1.030.000,00
53	0709-01-2019/0331	1601290192	DK958BX	5108027112370069	5108027112370069	5108027112370069	5108027112370069	JUKE 1.5 4X2 A/T	KTP	JSG	184.000.000,00	1%	1.840.000,00
54	0109-04-2019/0359	0008561161	DK1438BN	5101023004680001	5101023004680001	5101023004680001	5101023004680001	ODYSSEY 2.4 L AT	KAT	JPM	228.000.000,00	1%	2.280.000,00
55	0120-02-2019/0452	0008425677	DK1699DV	5102053112520021	5102053112520021	5102053112520021	5102053112520021	AVANZA 1300 G	KAT	JPM	117.000.000,00	1%	1.170.000,00

No.	NO_PENDAFTARAN	NO_REGISTER	NO_POLISI	NO_KTP 2019	ID_PROGRESIF 2019	NO_KTP 2018	ID_PROGRESIF 2018	TYPE_KB	NAMA (Inisial)	ALAMAT (Inisial)	NJKB (Rp)	HASIL PENGUJIAN	
												TARIF BBNKB	PENGENAAN BBNKB SEHARUSNYA
56	0208-05-2019/0382	0008527988	DK1683BC	5104070409710001	5104070409710001	5104070409710001	5104070409710001	NEW PICANTO SE1.1LMT	KAT	JPM	76.000.000,00	1%	760.000,00
57	0106-05-2019/1130	0005795393	DK924XI	5171043012670009	5171043012670009	5171043012670009	5171043012670009	GC415V APV DLX MT	KAT	MN	78.000.000,00	1%	780.000,00
58	0202-02-2019/0084	1602050316	DK168EJ	5171046406840005	5171046406840005	5171046406840005	5171046406840005	LAND CRUISER 200 FULL SPEC A/T	KAT	JPM	1.146.000.000,00	1%	11.460.000,00
59	1701-03-2019/0034	0004731203	DK1567XE	3509211703780001	3509211703780001	3509211703780001	3509211703780001	GC415V APV DLX MT	LP	JN2	73.000.000,00	1%	730.000,00
60	0128-03-2019/0578	0004773019	DK1820XE	5102071512680001	5102071512680001	5102071512680001	5102071512680001	GC415V APV DLX MT	LP	JND	88.000.000,00	1%	880.000,00
61	0311-11-2019/0413	0005388651	DK1894XI	5103020203690008	5103020203690008	5103020203690008	5103020203690008	RS 415 SWIFT ST	LP	JN2	96.000.000,00	1%	960.000,00
62	1203-07-2019/0288	0004789426	DK1411XI	5106014909960007	5106014909960007	5106014909960007	5106014909960007	GC415V APV DLX MT	LP	JN2	76.000.000,00	1%	760.000,00
63	0119-12-2019/0718	0004694057	DK1248EZ	5171026909950003	5171026909950003	5171026909950003	5171026909950003	AVANZA 1300 G	LP	JN2	91.000.000,00	1%	910.000,00
64	0811-07-2019/0170	0005304303	DK1526XI	5171041801840009	5171041801840009	5171041801840009	5171041801840009	SL 410 R KARIMUN	LP	JN2	60.000.000,00	1%	600.000,00
65	0406-05-2019/0552	0005528072	DK1844YI	5104050101610004	5104050101610004	5104050101610004	5104050101610004	SL 410 R KARIMUN	LPA	JYN	69.000.000,00	1%	690.000,00
66	1412-06-2019/0167	0004231483	DK958XB	5108011201900005	5108011201900005	5108011201900005	5108011201900005	GC 415V-APV DLX	LPA	JND	69.000.000,00	1%	690.000,00
67	1414-05-2019/0363	0004739524	DK1101BP	5108091705770005	5108091705770005	5108091705770005	5108091705770005	GC415V APV DLX MT	LPA	JYN	76.000.000,00	1%	760.000,00
68	1202-04-2019/0243	0006451181	DK1882XQ	5171051505907750	5171051505907750	5171051505907750	5171051505907750	GC 415V - APV	LPA	JYN	76.000.000,00	1%	760.000,00
69	0406-02-2019/0105	0008032492	DK1623XQ	5316100401720012	5316100401720012	5316100401720012	5316100401720012	AVANZA 1500 S	LPA	JNT	89.000.000,00	1%	890.000,00
70	0515-07-2019/0321	0005326710	DK1546EM	5102040709740001	5102040709740001	5102040709740001	5102040709740001	SL 410 R KARIMUN	LP	JN2	60.000.000,00	1%	600.000,00
71	0503-06-2019/0149	0004747895	DK1185XI	5105047112790056	5105047112790056	5105047112790056	5105047112790056	SL 410 R KARIMUN	LP	JN2	54.000.000,00	1%	540.000,00
72	0930-10-2019/0385	0004626939	DK8524DC	3315010905880006	3315010905880006	3315010905880006	3315010905880006	T120SS PU 1.5FD COLT	LO	JNW	57.000.000,00	1%	570.000,00
73	0112-04-2019/0416	0008429544	DK8789AI	5108093110800001	5108093110800001	5108093110800001	5108093110800001	L300 PU FB-R (4X2) MT	LO	JNN	109.000.000,00	1%	1.090.000,00
74	0912-09-2019/0286	0008299778	DK1830IZ	5171043112550030	5171043112550030	5171043112550030	5171043112550030	NEW AVANZA VELOZ 1.5 A/T	LO	JNN	141.000.000,00	1%	1.410.000,00
75	0109-02-2019/0354	0009003648	DK9753BM	5203190302870005	5203190302870005	5203190302870005	5203190302870005	L300 PU FB-R (4X2) M/T	LO	JND	111.000.000,00	1%	1.110.000,00
76	0101-03-2019/0920	0005421173	DK1482DY	5102033112620024	5102033112620024	5102033112620024	5102033112620024	SE420-2WD ESCUDO 2.0	LW	JSG	103.000.000,00	1%	1.030.000,00
77	0113-08-2019/0326	0004618881	DK1462DH	5107065111860003	5107065111860003	5107065111860003	5107065111860003	SE 420 2WD ESCUDO	LW	JGN	111.000.000,00	1%	1.110.000,00
78	1408-08-2019/0758	0004222534	DK1421IE	5171011304750006	5171011304750006	5171011304750006	5171011304750006	STREAM S7A 1.7 AT	LW	JGN	133.000.000,00	1%	1.330.000,00

No.	NO_PENDAFTARAN	NO_REGISTER	NO_POLISI	NO_KTP 2019	ID_PROGRESIF 2019	NO_KTP 2018	ID_PROGRESIF 2018	TYPE_KB	NAMA (Inisial)	ALAMAT (Inisial)	NJKB (Rp)	HASIL PENGUJIAN	
												TARIF BBNKB	PENGENAAN BBNKB SEHARUSNYA
79	0103-06-2019/0619	0004685782	DK1947EH	5171031202810017	5171031202810017	5171031202810017	5171031202810017	CR-V RD 4 2 WD A/T	LW	JGN	163.000.000,00	1%	1.630.000,00
80	1129-08-2019/0189	0005667019	DK1322EP	5104010408630001	5104010408630001	5104010408630001	5104010408630001	STREAM STA 1.7 AT	LP	JBN	128.000.000,00	1%	1.280.000,00
81	0120-08-2019/0621	0008529302	DK8186AY	5171032408750005	5171032408750005	5171032408750005	5171032408750005	BASE 2.5L (4X4) MT	LP	JBN	92.000.000,00	1%	920.000,00
82	0915-10-2019/0138	0004443916	DK1450EK	5171040608600002	5171040608600002	5171040608600002	5171040608600002	F500 RV TARUNA CSX	LP	JND	76.000.000,00	1%	760.000,00
83	1323-05-2019/0408	0005521287	DK183BV	5105061606860068	5105061606860068	5105061606860068	5105061606860068	S 515 I	NPE	JGR	30.000.000,00	1%	300.000,00
84	0228-06-2019/0302	0004767469	DK169BW	5108027112500196	5108027112500196	5108027112500196	5108027112500196	S 515 i	NPE	JGR	30.000.000,00	1%	300.000,00
85	0127-05-2019/1388	0004766414	DK137BW	5171014703820012	5171014703820012	5171014703820012	5171014703820012	S 515 i	NPE	JGR	43.000.000,00	1%	430.000,00
86	1316-01-2019/0266	0004785446	DK148BN	5178035324426025	5178035324426025	5178035324426025	5178035324426025	S 515 i	NPE	JGR	30.000.000,00	1%	300.000,00
87	0321-08-2019/0319	0008293896	DK1418DF	5102062907680001	5102062907680001	5102062907680001	5102062907680001	AVANZA 1300 G	NPE	JKG	79.000.000,00	1%	790.000,00
88	0123-11-2019/0116	0008109720	DK1994IT	5104015602880001	5104015602880001	5104015602880001	5104015602880001	NEW AVANZA 1.3G MT	NPE	JGI	119.000.000,00	1%	1.190.000,00
89	0110-07-2019/0370	0008220372	DK1284DB	5107032404820003	5107032404820003	5107032404820003	5107032404820003	AVANZA 1300 G	NPE	JKG	104.000.000,00	1%	1.040.000,00
90	1314-06-2019/0167	0004772669	DK1335XI	5108023112650211	5108023112650211	5108023112650211	5108023112650211	AVANZA 1300 G	NPE	JGI	79.000.000,00	1%	790.000,00
91	0317-06-2019/0078	0004784393	DK1375XI	5171010510640005	5171010510640005	5171010510640005	5171010510640005	AVANZA 1300 G	NPE	JGI	79.000.000,00	1%	790.000,00
92	0124-04-2019/0402	0006637949	DK1945XQ	5171014411750004	5171014411750004	5171014411750004	5171014411750004	GC 415V-APV DLX	NPE	JKG	98.000.000,00	1%	980.000,00
93	0220-04-2019/0081	0009051964	DK1722BN	5171032006660001	5171032006660001	5171032006660001	5171032006660001	BRIO DD2 1.3 E MT	NPE	JKG	118.000.000,00	1%	1.180.000,00
94	0918-04-2019/0195	0008214096	DK1530CT	5171040607760003	5171040607760003	5171040607760003	5171040607760003	AVANZA 1300 G	NPE	JKG	117.000.000,00	1%	1.170.000,00
95	1219-09-2019/0122	0004807655	DK1998XI	5171041604770102	5171041604770102	5171041604770102	5171041604770102	SL 410 R-KARIMUN	NPE	JGI	51.000.000,00	1%	510.000,00
96	0130-07-2019/0987	0004730029	DK9979JE	5201010107670338	5201010107670338	5201010107670338	5201010107670338	S401RP-TMREJH-C	NPE	JGI	55.000.000,00	1%	550.000,00
97	0116-10-2019/1039	0008647602	DK1195AQ	5101054205660002	5101054205660002	5101054205660002	5101054205660002	B100RS-GQQFJ (4X2) A/T	AAN	JD1	80.000.000,00	1%	800.000,00
98	0919-07-2019/0574	0004612654	DK8404DG	5106014107370234	5106014107370234	5106014107370234	5106014107370234	ST 150 FUTURA	AAN	JD1	48.000.000,00	1%	480.000,00
99	0915-10-2019/0121	0004748932	DK1840IG	5105037112550274	5105037112550274	5105037112550274	5105037112550274	YARIS 1.5 S LIMITED A/T	AMI	JRS	165.000.000,00	1%	1.650.000,00
100	0107-05-2019/1227	0005796324	DK1231IB	5108017112470038	5108017112470038	5108017112470038	5108017112470038	GRAND LIVINA SV	AMR	JL	127.000.000,00	1%	1.270.000,00
101	0112-07-2019/1172	0004623211	DK1390EL	5108097112730128	5108097112730128	5108097112730128	5108097112730128	AVANZA G	AMR	JGK	74.000.000,00	1%	740.000,00
102	0122-04-2019/0733	0004820034	DK850IB	5101053012780032	5101053012780032	5101053012780032	5101053012780032	YARIS 1.5 S MT	AAN	JSN	152.000.000,00	1%	1.520.000,00
103	0126-08-2019/0015	0100034023	DK1889CE	5171025206910003	5171025206910003	5171025206910003	5171025206910003	AGYA 1.0 G A/T	AKA	JSS	97.000.000,00	1%	970.000,00
104	0515-03-2019/0169	0008188229	DK1377CR	3504055210800008	3504055210800008	3504055210800008	3504055210800008	YARIS 1.5 J AT	AGM	JKN	153.000.000,00	1%	1.530.000,00
105	0108-05-2019/0965	0004572583	DK1469YO	5102031211770001	5102031211770001	5102031211770001	5102031211770001	SL 410 R KARIMUN	AI	J G	57.000.000,00	1%	570.000,00
106	0110-09-2019/0834	0004187152	DK1929YO	5102256606660227	5102256606660227	5102256606660227	5102256606660227	SL 410 R KARIMUN	AI	JG/	60.000.000,00	1%	600.000,00
107	0110-05-2019/0792	0004593755	DK1916YI	5104012405810002	5104012405810002	5104012405810002	5104012405810002	SL 410 R KARIMUN	AI	JG/	57.000.000,00	1%	570.000,00

No.	NO_PENDAFTARAN	NO_REGISTER	NO_POLISI	NO_KTP 2019	ID_PROGRESIF 2019	NO_KTP 2018	ID_PROGRESIF 2018	TYPE_KB	NAMA (Inisial)	ALAMAT (Inisial)	NJKB (Rp)	HASIL PENGUJIAN	
												TARIF BBNKB	PENGENAAN BBNKB SEHARUSNYA
108	0106-02-2019/1477	0004628606	DK8241AB	5171031212610026	5171031212610026	5171031212610026	5171031212610026	COLT L300PU FB 4X2MT	AIO	JG/	91.000.000,00	1%	910.000,00
109	2506-05-2019/0023	0005424198	DK1614BY	5102054910750001	5102054910750001	5102054910750001	5102054910750001	KF 40 SUPER	ANH	JTN	48.000.000,00	1%	480.000,00
110	0115-04-2019/1194	0004620896	DK1713EE	5104013009870001	5104013009870001	5104013009870001	5104013009870001	JB420-G V JLX 2WD MT	ANM	JN	172.000.000,00	1%	1.720.000,00
111	0121-08-2019/0899	0005725366	DK1225DF	5171031411690001	5171031411690001	5171031411690001	5171031411690001	GC 415V-APV DLX	ANM	JND	78.000.000,00	1%	780.000,00
112	0209-05-2019/0698	0004252792	DK1907EG	5103051203630003	5103051203630003	5103051203630003	5103051203630003	GC 415V-APV DLX	ANW	JGI	112.000.000,00	1%	1.120.000,00
113	0119-08-2019/1264	0004780132	DK1596DA	5108044709960001	5108044709960001	5108044709960001	5108044709960001	GC415V APV DLX MT	ANW	JGI	112.000.000,00	1%	1.120.000,00
114	1201-04-2019/0161	0008182339	DK1349CR	5107041609890005	5107041609890005	5107041609890005	5107041609890005	F700RG-TX MT	#VALUE!	JGL	132.000.000,00	1%	1.320.000,00
115	0106-08-2019/1224	0009132411	DK1063BR	5107040312830002	5107040312830002	5107040312830002	5107040312830002	HONDA HR-V RU1 1.5E CVT CKD	AB	JGB	214.000.000,00	1%	2.140.000,00
116	0313-05-2019/0336	0004215982	DK8004DW	5102074905690001	5102074905690001	5102074905690001	5102074905690001	ST150 PICK UP	AG	KIK	38.000.000,00	1%	380.000,00
117	0331-10-2019/0116	0004667653	DK8254DK	5102091901800002	5102091901800002	5102091901800002	5102091901800002	RANGER DCAB XLT 2.5L	AG	KIK	150.000.000,00	1%	1.500.000,00
118	0901-10-2019/0372	0003730608	DK1622BH	5108017112300006	5108017112300006	5108017112300006	5108017112300006	F 521 RV TARUNA FGX	ARM	JMG	99.000.000,00	1%	990.000,00
119	0106-08-2019/1581	0004147022	DK1564EN	5171014405780004	5171014405780004	5171014405780004	5171014405780004	SJ 410	AS	JTG	34.000.000,00	1%	340.000,00
120	0111-11-2019/0239	0004798065	DK1864IH	5105013112520041	5105013112520041	5105013112520041	5105013112520041	YL6 4X2 MT	AS	JVN	90.000.000,00	1%	900.000,00
121	0108-06-2019/0136	0004247878	DK1225IC	5102017112560015	5102017112560015	5102017112560015	5102017112560015	SERENA H.WAY STAR AT	AH	JTB	221.000.000,00	1%	2.210.000,00
122	0116-05-2019/1857	0004261353	DK875ED	5101040502770007	5101040502770007	5101040502770007	5101040502770007	KUDA VB5W GLS DIESEL / DIAMOND DIES	AA	JND	86.000.000,00	1%	860.000,00
123	0514-03-2019/0377	0003363811	DK1449D	5171040706810002	5171040706810002	5171040706810002	5171040706810002	KF 83 SUPER	AA	JAY	94.000.000,00	1%	940.000,00
124	0513-06-2019/0115	0008000851	DK934IU	5105032611590001	5105032611590001	5105032611590001	5105032611590001	LUXIO 1.5 X A/T	AKP	JKN	117.000.000,00	1%	1.170.000,00
125	0220-12-2019/0510	0008378584	DK8661DT	5108093112810063	5108093112810063	5108093112810063	5108093112810063	ST150 PICK UP	AKP	JND	56.000.000,00	1%	560.000,00
126	1404-06-2019/0202	0005962566	DK1722CX	5108056412640001	5108056412640001	5108056412640001	5108056412640001	AVANZA 1300	ALA	JGG	78.000.000,00	1%	780.000,00
127	0730-08-2019/0391	0009146364	DK9958BQ	5171021412560001	5171021412560001	5171021412560001	5171021412560001	GC 415T (4X2) MT	ALA	J/T	68.000.000,00	1%	680.000,00
128	1126-04-2019/0009	0004621920	DK8432AI	5103040507770001	5103040507770001	5103040507770001	5103040507770001	ST 100	AAG	JNB	39.000.000,00	1%	390.000,00
129	0312-01-2019/0089	0004812104	DK180ID	5105037112520184	5105037112520184	5105037112520184	5105037112520184	F700RG-TX MT	AJ	JGV	130.000.000,00	1%	1.300.000,00
130	0121-08-2019/0656	0004772677	DK9805AZ	3509120708890007	3509120708890007	3509120708890007	3509120708890007	T120SS 1	A S	J K	66.000.000,00	1%	660.000,00
131	0122-08-2019/0494	0004758619	DK9674AZ	5171025006730005	5171025006730005	5171025006730005	5171025006730005	T120SS 1	A S	JII	60.000.000,00	1%	600.000,00
132	0130-09-2019/1163	0008639038	DK1536AP	3206020107830012	3206020107830012	3206020107830012	3206020107830012	NEW AVANZA 1.3G MT	DIK	KBK	127.000.000,00	1%	1.270.000,00
133	0126-08-2019/1312	0008607924	DK1916AM	5102085201890002	5102085201890002	5102085201890002	5102085201890002	NEW AVANZA VELOZ 1.5 M/T	IKW	JPN	138.000.000,00	1%	1.380.000,00

No.	NO_PENDAFTARAN	NO_REGISTER	NO_POLISI	NO_KTP 2019	ID_PROGRESIF 2019	NO_KTP 2018	ID_PROGRESIF 2018	TYPE_KB	NAMA (Inisial)	ALAMAT (Inisial)	NJKB (Rp)	HASIL PENGUJIAN		
												TARIF BBNKB	PENGENAAN BBNKB SEHARUSNYA	
134	3121-08-2019/0027	0005806796	DK1524ED	5108033112730059	5108033112730059	5108033112730059	5108033112730059	AVANZA G	IKW	JNP	74.000.000,00	1%	740.000,00	
135	1222-10-2019/0207	0004521944	DK1329CZ	5107071408860002	5107071408860002	5107071408860002	5107071408860002	AVANZA G	LAK	JWI	78.000.000,00	1%	780.000,00	
136	0118-01-2019/1015	0004610631	DK1526XQ	5171046709740001	5171046709740001	5171046709740001	5171046709740001	AVANZA 1300 G	LAK	JWI	115.000.000,00	1%	1.150.000,00	
JUMLAH														137.440.000,00

**RENCANA AKSI (*ACTION PLAN*) ATAS REKOMENDASI BPK RI
DALAM KONSEP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI TA 2019**

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan
SPI				
1	Kesalahan Penganggaran atas Realisasi Belanja Modal Sebesar Rp4.413.142.374,36	<p>BPK merekomendasikan Gubernur Bali agar memerintahkan:</p> <p>a. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Kepala Dinas Kesehatan dalam mengajukan RKA mengacu pada ketentuan penyajian belanja sesuai SAP;</p> <p>b. TAPD menganggarkan belanja modal mengacu pada pedoman penyusunan APBD.</p>	<p>a. Hasil reviu terhadap anggaran belanja Tahun 2020 agar sesuai dengan pos belanja modal dan belanja barang. Hasil reviu tersebut akan dituangkan dalam APBD Perubahan TA 2020.</p> <p>b. Hal ini telah tertuang dalam Petunjuk Teknis Penyusunan RKA yang diterbitkan tiap Tahun Anggaran sebagai acuan oleh SKPD dalam Penyusunan RKA dan akan dipertegas kembali dalam petunjuk teknis penyusunan RKA Tahun Anggaran 2021.</p>	<p>10 Juli 2020</p> <p>bulan Agustus 2020</p>
2.	Penganggaran dan Pertanggungjawaban Pemberian Hibah Belum Memadai	<p>BPK merekomendasikan Gubernur Bali agar memerintahkan:</p> <p>a. Kepala Dinas PUPRKP lebih optimal dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pemberian hibah agar penerima hibah mengelola dan menggunakan dananya, menyelesaikan kegiatan, serta melaporkan pertanggungjawaban hibah sesuai NPHD;</p> <p>b. Kepala Bappeda mengoptimalkan sistem aplikasi <i>E-Planning</i> supaya pencantuman alokasi anggaran bagi penerima hibah dalam APBD dapat sesuai dengan data keluaran aplikasi <i>E-Planning</i>; dan</p>	<p>a. Menunjuk satuan tugas yang khusus untuk menangani pengelolaan hibah, dan melakukan <i>monitoring</i> secara berkala, atas penggunaan dana hibah oleh penerima.</p> <p>b. Menyiapkan menu historis proposal yang diusulkan dan yang direkomendasikan oleh Perangkat Daerah, sehingga terdapat <i>record</i> data proposal awal dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah sebagai dasar pencantuman dalam lampiran APBD.</p>	<p>Bulan Agustus s.d Desember 2020</p> <p>15 Juni 2020</p>

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan
		c. TAPD lebih aktif berkoordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah <i>leading sector</i> mencari informasi lengkap dalam memberikan pertimbangan untuk pencantuman alokasi anggaran belanja hibah supaya tidak berulang kepada subyek yang sama setiap TA.	c. Melakukan sosialisasi kepada Perangkat Daerah <i>Leading Sector</i> untuk menginput rekomendasi pada <i>E-Planning</i> hibah.	15 Juni 2020
3.	Penetapan Rekening Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Milik Pemerintah Provinsi Bali Tidak Tertib	BPK merekomendasikan Gubernur Bali agar memerintahkan Kepala BPKAD agar: a. Lebih optimal dalam mengkoordinasikan izin pembukaan dan penetapan rekening sesuai data rekening yang valid; dan b. Menyusun SOP yang mengatur prosedur baku dalam pendaftaran, pembukaan, dan penutupan rekening Perangkat Daerah.	a. Melakukan rekonsiliasi Rekening Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Milik Pemerintah Provinsi Bali dengan pihak terkait (OPD, PT. Bank BPD Bali Cabang Renon dan Bank Penempatan Rek BLUD). b. Menyusun SOP yang mengatur prosedur baku dalam pendaftaran, pembukaan, dan penutupan rekening Perangkat Daerah	Bulan Desember 2020 Bulan Agustus 2020
4.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Provinsi Bali Belum Sepenuhnya Memadai	BPK merekomendasikan Gubernur Bali agar memerintahkan: a. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup berkoordinasi lebih intensif dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memperoleh BPKB atas 10 kendaraan bermotor dalam rangka pengamanan administrasi; b. Kepala BPBD, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas PUPR dan Kawasan Permukiman, serta Dinas	a. Bersurat kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia melalui Sekretaris Badan penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. b. Kepala Perangkat Daerah terkait, akan melaksanakan pencatatan secara rinci atas aset yang masih dicatat secara gabungan sesuai kebijakan akuntansi.	27 Juni 2020 10 Juni 2020

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan
		<p>Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga merinci aset yang dicatat secara gabungan menjadi per item satuan barang sesuai kebijakan akuntansi yang berlaku;</p> <p>c. Kepala Perangkat Daerah melengkapi informasi dalam KIB sesuai sistur penatausahaan BMD, pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 11 unit Pengguna Barang untuk aset Gedung dan Bangunan; 2) 14 unit Pengguna Barang untuk aset Jalan, Irigasi dan Jaringan; 3) 5 unit Pengguna Barang untuk Aset Tak Berwujud. 	<p>c. Kepala Perangkat Daerah terkait, akan melaksanakan pencatatan informasi pada KIB secara lengkap sesuai dengan sistur penatusahaan BMD</p>	<p>Bulan Juli 2020</p>
5	<p>Penyerahan Penguasaan Kendaraan Bermotor Melebihi 12 Bulan Belum Balik Nama</p>	<p>BPK merekomendasikan Gubernur Bali agar memerintahkan Kepala Bapenda menyusun SOP pajak BBNKB yang menetapkan antara lain prosedur baku balik nama atas penguasaan kendaraan bermotor melebihi 12 bulan secara berturut-turut sesuai Perda yang berlaku.</p>	<p>Memerintahkan para Kepala Bidang dan Kepala UPTD di Lingkungan Bapenda Provinsi Bali untuk menyusun <i>draft</i> SOP BBNKB dan melaksanakan rapat koordinasi dengan pihak Kepolisian dan Jasa Raharja membahas <i>draft</i> SOP BBNKB</p>	<p>8 Juni 2020 - 12 Juni 2020</p>
Kepatuhan				
1	<p>Pelaporan dan Pertanggungjawaban BKK Kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan Desa Belum Sesuai</p>	<p>BPK merekomendasikan Gubernur Bali agar memerintahkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Perangkat Daerah yang menjadi <i>leading sector</i> masing-masing bidang kegiatan BKK melaksanakan evaluasi secara memadai terhadap pelaporan dan pertanggungjawaban BKK sesuai 	<p>a. Kepala Perangkat Daerah terkait akan melaksanakan evaluasi secara lebih memadai terhadap laporan pertanggungjawaban BKK sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan</p>	<p>Bulan Juni s.d Desember 2020</p>

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan
	Petunjuk Teknis	<p>juknis yang telah ditetapkan sebagai pertimbangan dalam pemberian BKK tahun berikutnya;</p> <p>b. Kepala BPKAD lebih optimal dalam melaksanakan pemantauan LPj BKK yang menjadi pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran PPKD;</p> <p>c. Pemerintah Daerah penerima BKK mengembalikan dan menyetorkan sisa dana BKK sebesar Rp4.793.674.898,92 ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Bali sesuai juknis yang berlaku, dengan rincian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemerintah Kabupaten Bangli sebesar Rp632.629.279,00 untuk kegiatan penyelenggaraan akses free wifi; 2) Pemerintah Kabupaten Buleleng sebesar Rp450.472.000,00 untuk kegiatan penyelenggaraan akses free wifi dan sebesar Rp491.633.207,00 untuk kegiatan peningkatan jalan kabupaten dan pemeliharaan rutin; 3) Pemerintah Kabupaten Gianyar sebesar Rp756.486.926,00 untuk kegiatan penyelenggaraan akses free wifi; 	<p>sehingga dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam memberikan BKK pada tahun berikutnya</p> <p>b. Untuk tahun yang akan datang, akan mengingatkan kembali dengan bersurat kepada Kabupaten/Kota pada akhir tahun anggaran untuk segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan BKK sesuai yang tertuang dalam Petunjuk Teknis</p> <p>c. Bersurat kepada Bupati/ Walikota Nomor: 900/2987/Set-BPKAD tanggal 11 Mei 2020 perihal Penyampaian Pertanggungjawaban BKK, antara lain: dalam hal terdapat sisa anggaran agar disetor ke Rekening Kas Daerah Provinsi Bali dengan nomor 010.010000000-1.</p>	<p>Bulan November 2020</p> <p>Bulan November 2020</p>

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan
		<p>4) Pemerintah Kabupaten Jembrana sebesar Rp294.719.416,00 untuk kegiatan penyelenggaraan akses free wifi;</p> <p>5) Pemerintah Kabupaten Klungkung sebesar Rp443.339.299,00 untuk kegiatan penyelenggaraan akses free wifi; dan</p> <p>6) Pemerintah Kabupaten Tabanan sebesar Rp379.528.801,00 untuk kegiatan penyelenggaraan akses free wifi dan sebesar Rp1.344.865.970,92 untuk kegiatan peningkatan jalan.</p>		
2	Pengamanan Administrasi Bidang Tanah SMA/SMK Belum Memadai	<p>BPK merekomendasikan Gubernur Bali agar memerintahkan:</p> <p>a. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga berkoordinasi dengan pemerintah daerah, sekolah, dan/atau desa adat terkait dalam rangka pengamanan administrasi, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan serah terima atas tujuh bidang tanah sekolah yang belum diserahkan; 2) Melaksanakan serah terima bukti kepemilikan tanah atau sertifikat tanah atas 20 bidang tanah sekolah; 3) Memperoleh kelengkapan informasi nilai tanah pada tujuh sekolah yang telah diserahkan; <p>b. Kepala UPTD Pengelolaan BMD menyelesaikan proses sertifikasi atas 19 bidang tanah sekolah dan memproses balik nama 83 bidang tanah sekolah untuk</p>	<p>a. Memetakan permasalahan serta berkoordinasi dengan pihak-pihak pemilik kepentingan terkait penyelesaian serah terima atas tanah sekolah yang belum dilengkapi pengamanan administrasi</p> <p>b. Terhadap rekomendasi penyelesaian proses sertifikat, sebagai berikut :</p>	<p>20 Juli 2020</p> <p>Pengumpulan dokumen Juni s/d</p>

<https://denpasar.bpk.go.id>



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2019**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
KEPATUHAN TERHADAP
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**



Nomor : 70.C/LHP/XIX.DPS/05/2020
Tanggal : 28 Mei 2020

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Bali**

Jl. D.I. Panjaitan No. 2 Renon Denpasar 80000
Telp./Fax. (0361) 229193 / (0361) 229184, 256205



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2019**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

Nomor : 70.C/LHP/XIX.DPS/05/2020

Tanggal : 28 Mei 2020

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Bali**

Jalan D.I. Panjaitan No. 2 Renon Denpasar 80000
Telp. (0361) 229193 Fax. (0361) 229184, 256205

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
RESUME LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1
HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	3
1. Pelaporan dan Pertanggungjawaban BKK Kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan Desa Belum Sepenuhnya Sesuai Petunjuk Teknis.....	3
2. Pengamanan Administrasi Bidang Tanah SMA/SMK Belum Sepenuhnya Memadai.....	9
3. Pengelolaan Rumah Negara Pemerintah Provinsi Bali Belum Sesuai Ketentuan..	14
4. Bangunan Rusunawa Belum Dihilahkan Kepada Pemerintah Provinsi Bali.....	20
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Bantuan Keuangan TA 2019	3
Tabel 2. Penghunian Rumah Negara Belum Didukung SIP dan SK Gubernur	15

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pemerintah Kabupaten/Kota yang Belum Mengembalikan Sisa Dana BKK ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Bali
- Lampiran 2 Pelaporan Pertanggungjawaban BKK Pemerintah Daerah Lainnya Melebihi Batas Waktu yang Ditentukan
- Lampiran 3 Pelaporan Pertanggungjawaban BKK Desa Melebihi Batas Waktu yang Ditentukan
- Lampiran 4 Bidang Tanah Sekolah yang Belum Bersertifikat
- Lampiran 5 Bidang Tanah Sekolah yang Dokumen Sertifikatnya Belum Diserahkan ke Pemerintah Provinsi Bali
- Lampiran 6 Bidang Tanah Sekolah yang Belum Dibalik Nama
- Lampiran 7 Daftar Penghuni Rumah Negara yang Tidak Memiliki SIP
- Lampiran 8 Daftar Penghuni Rumah Negara yang Tidak Ditetapkan dengan Keputusan Gubernur
- Lampiran 9 Daftar Penghuni Rumah Negara Tidak Sesuai Peruntukan/Tipe Rumah Negara



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2019, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Nomor 70.A/LHP/XIX.DPS/05/2020 tanggal 28 Mei 2020 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 70.B/LHP/XIX.DPS/05/2020 tanggal 28 Mei 2020.

Sebagai bagian pemerolehan keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK melakukan pengujian kepatuhan pada Pemerintah Provinsi Bali terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan, serta ketidakpatutan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas kepatuhan terhadap keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Provinsi Bali. Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan adalah sebagai berikut.

1. Pelaporan dan pertanggungjawaban BKK kepada Pemerintah Daerah lainnya dan Desa belum sepenuhnya sesuai petunjuk teknis;
2. Pengamanan administrasi bidang tanah SMA/SMK belum sepenuhnya memadai;
3. Pengelolaan Rumah Negara Pemerintah Provinsi Bali belum sesuai ketentuan; dan
4. Bangunan Rusunawa belum dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi Bali.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur Bali antara lain agar memerintahkan:

1. Kepala Perangkat Daerah yang menjadi *leading sector* masing-masing bidang kegiatan BKK melaksanakan evaluasi secara memadai terhadap pelaporan dan pertanggungjawaban BKK sesuai juknis yang telah ditetapkan sebagai pertimbangan dalam pemberian BKK tahun berikutnya;
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga menyelesaikan proses sertifikasi atas 19 bidang tanah sekolah dan memproses balik nama 83 bidang tanah sekolah untuk pengamanan hukum;
3. Kepala Perangkat Daerah terkait selaku Pengguna Barang menerapkan pengamanan administrasi Rumah Negara berupa SIP dan SK Gubernur sesuai ketentuan yang berlaku; dan
4. Kepala Dinas PUPRKP berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Denpasar dalam rangka penyelesaian IMB Rusunawa.

Temuan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Denpasar, 18 Mei 2020
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Bali
Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan,



I Gusti Ngurah Satria Perwira, S.E., M.M., Ak., CA.
Register Negara Akuntan No. RNA-11643

**HASIL PEMERIKSAAN ATAS
KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Hasil pemeriksaan atas kepatuhan Pemerintah Provinsi Bali TA 2019 terhadap peraturan perundang-undangan mengungkapkan sebanyak empat temuan pemeriksaan, dengan rincian sebagai berikut.

1. Pelaporan dan Pertanggungjawaban BKK Kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan Desa Belum Sepenuhnya Sesuai Petunjuk Teknis

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Provinsi Bali (setelah diperiksa) untuk tahun yang berakhir s.d. 31 Desember 2019 menganggarkan Belanja Transfer Bantuan Keuangan sebesar Rp856.313.067.054,00 dengan realisasi sebesar Rp812.562.590.085,21 atau sebesar 94,89% dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1. Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2019

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2019 (Rp)	Realisasi Tahun 2019 (Rp)	Pencapaian (%)
1.	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	370.033.724.798,00	330.260.987.829,21	89,25
2.	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	483.773.275.000,00	479.795.535.000,00	99,18
3.	Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.506.067.256,00	2.506.067.256,00	100,00
	Jumlah	856.313.067.054,00	812.562.590.085,21	94,89

Pengelolaan pemberian Bantuan Keuangan mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak terduga Provinsi Bali. Dalam hal Belanja Bantuan Keuangan, Pergub tersebut menetapkan antara lain bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Gubernur dalam rangka mendukung kinerja Pemerintah Provinsi Bali, serta dibuatkan petunjuk teknis (juknis) pelaksanaannya oleh Perangkat Daerah.

Hasil pemeriksaan atas penerapan juknis terkait dalam pelaporan dan pertanggungjawaban realisasi Belanja Bantuan Khusus (BKK) TA 2019 diketahui beberapa permasalahan sebagai berikut.

a. Sisa dana BKK Pemerintah Daerah lainnya belum dikembalikan ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Bali

Secara umum, juknis BKK yang ditetapkan Perangkat Daerah terkait menetapkan antara lain proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, peruntukan atau spesifikasi teknis kegiatan, serta pokok-pokok pengelolaan dana BKK. Pokok-pokok pengelolaan dana BKK menetapkan ketentuan penggunaan dana, pelaporan fisik dan keuangan atau laporan pertanggungjawaban, dan penyetoran sisa dana setelah penyelesaian kegiatan.

Hasil pengujian terhadap laporan pertanggungjawaban BKK dan konfirmasi kepada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) pada sembilan Pemerintah Kabupaten/Kota diketahui bahwa terdapat sisa dana BKK Tahun Anggaran (TA) 2019 dari Pemerintah Provinsi Bali senilai total Rp4.793.674.898,92 pada enam kabupaten yang belum dikembalikan atau disetorkan oleh ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Bali sesuai juknis yang berlaku. Lebih lanjut, berdasarkan data realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2020 berupa pengembalian BKK TA 2019 diketahui bahwa sampai dengan berakhirnya pemeriksaan, keenam kabupaten tersebut belum menyetorkan sisa dana BKK dimaksud, dengan rincian disajikan pada **Lampiran 1**.

Berdasarkan bidang kegiatannya, pengembalian sisa dana BKK tersebut terkait dengan dua kegiatan, yaitu:

- 1) Bidang komunikasi dan informasi, berupa kegiatan penyelenggaraan akses *free wifi*, yaitu untuk pemasangan wifi pada puskesmas, obyek wisata dan desa adat, sesuai juknis ditetapkan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik; dan
- 2) Bidang jalan (bina marga), berupa kegiatan peningkatan jalan Patung Jagung – Titigalar, sesuai juknis ditetapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (perubahan organisasi di Tahun 2020 menjadi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman) Provinsi Bali.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman diperoleh keterangan bahwa bila terdapat sisa dana setelah penyelesaian kegiatan BKK terkait maka harus dikembalikan ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Bali, karena untuk alokasi penggunaan dana BKK tahun berikutnya akan ada penetapan Keputusan Gubernur tersendiri. Lebih lanjut diperoleh keterangan bahwa informasi terkait pencairan, *monitoring* penyampaian laporan pertanggungjawaban (LPj), dan sisa dana BKK dikelola oleh BPKAD Provinsi Bali selaku SKPKD.

b. Penyampaian LPj BKK Pemerintah Daerah lainnya melebihi batas waktu yang ditentukan

Pokok-pokok pengelolaan BKK dalam juknis menetapkan ketentuan penyampaian LPj paling lambat tiga bulan setelah pelaksanaan kegiatan, yaitu bulan Maret 2020 atas penyelesaian kegiatan BKK TA 2019. Laporan pertanggungjawaban disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (perubahan organisasi di Tahun 2020 menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/Bappeda) Provinsi Bali, dan Perangkat Daerah terkait sesuai bidang kegiatan BKK.

Hasil pengujian terhadap laporan *monitoring* penyampaian LPj yang dikelola Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat BPKAD dan surat pengantar penyampaian LPj dari Pemerintah

Kabupaten/Kota penerima BKK, diketahui terdapat empat kabupaten penerima BKK TA 2019 yang penyampaian laporan pertanggungjawabannya melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Umumnya, keempat kabupaten tersebut menyampaikan LPj pada akhir bulan April 2020, dengan rincian disajikan pada **Lampiran 2**.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman diperoleh keterangan bahwa *monitoring* penyampaian LPj dilaksanakan oleh BPKAD Provinsi Bali. Menurut penjelasan Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat BPKAD diperoleh informasi bahwa selama ini koordinasi terkait pelaporan pertanggungjawaban dengan Pemerintah Kabupaten/Kota penerima BKK belum menggunakan surat-menyurat.

c. Pelaporan pertanggungjawaban BKK Desa melebihi batas waktu yang ditentukan

BKK Desa adalah bantuan yang terkait bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan diperuntukkan bagi Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian, yang disalurkan langsung kepada 606 Desa se-Provinsi Bali selama Tahun 2019. Menurut juknis, penyelesaian kegiatan dan pelaporan dana BKK menjadi tanggung jawab masing-masing Perbekel (sebutan Kepala Desa).

Juknis BKK Desa Tahun 2019 yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (perubahan organisasi di Tahun 2020 menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil) Provinsi Bali, mengatur bahwa Perbekel menyampaikan LPj penggunaan dana BKK kepada Gubernur Bali melalui Kepala BPKAD dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali paling lambat tanggal 10 Januari 2020, serta ditembuskan kepada Bupati/Walikota melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota setempat. Selain itu, bagi Desa yang belum menyampaikan LPj pelaksanaan BKK Tahun 2019, pencairan BKK Tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan.

Hasil pengujian terhadap laporan *monitoring* penyampaian LPj yang dikelola Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat BPKAD diketahui bahwa terdapat 167 Desa yang menyampaikan laporan pertanggungjawabannya melebihi tanggal 10 Januari 2020. Desa-desa tersebut menyampaikan LPj antara tanggal 12 Januari s.d. 19 April 2020, dengan rincian disajikan pada **Lampiran 3**.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Pergub Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak terduga Provinsi Bali, pada:
 - 1) Pasal 9 ayat (3) yang menyatakan bahwa Bantuan keuangan yang bersifat khusus, peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Gubernur, dalam rangka mendukung kinerja Pemerintah Provinsi, serta dibuatkan petunjuk teknis pelaksanaannya oleh Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD);

2) Pasal 13

- a) Ayat (2) yang menyatakan bahwa SKPD/unit kerja yang membidangi wajib melaksanakan *monitoring* dan pengendalian kepada penerima bantuan;
 - b) Ayat (3) yang menyatakan bahwa bagi laporan pertanggungjawaban yang terlambat dan tidak sesuai dengan pedoman teknis agar diberikan peringatan baik secara lisan maupun tertulis;
 - c) Ayat (4) yang menyatakan bahwa apabila penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memperhatikan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dijadikan pertimbangan dalam memberikan bantuan lebih lanjut.
- b. Pergub Nomor 64 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja BPKAD di Tahun 2019, pada Pasal 6 huruf z yang menyatakan bahwa Menyelenggarakan verifikasi, menyampaikan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang keuangan dan aset daerah;
- c. Juknis Pelaksanaan Penggunaan Dana BKK Penyelenggaraan Akses *Free Wifi* di Delapan Kabupaten/Kota TA 2019, Bab II. Pokok-pokok Pengelolaan BKK, menyatakan antara lain:
- 1) Pada akhir pelaksanaan kegiatan, kabupaten penerima dana BKK selambat-lambatnya tiga bulan setelah pelaksanaan kegiatan, wajib menyampaikan LPj penggunaan dana BKK kepada Provinsi cq. Kepala BPKAD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Bali, serta Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali;
 - 2) Sisa anggaran kegiatan setelah proses pengadaan supaya disetor kembali ke Kas Daerah Provinsi Bali.
- d. Juknis Pelaksanaan BKK Bidang Jalan Provinsi Bali, Bab IV. Pokok-pokok Pengelolaan BKK, menyatakan antara lain:
- 1) Pada akhir pelaksanaan kegiatan, kabupaten/kota selambat-lambatnya tiga bulan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan BKK kepada Provinsi cq. BPKAD Provinsi Bali, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Bali, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali;
 - 2) Sisa anggaran setelah tender supaya disetorkan kembali ke Kas Daerah Provinsi Bali.
- e. Juknis Penggunaan Dana BKK Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah TA 2019, Bab II. Pokok-pokok Pengelolaan BKK, pada Angka 4. Pelaporan, menyatakan antara lain Pemerintah Kabupaten wajib menyampaikan LPj pemanfaatan BKK dari Pemerintah Provinsi Bali untuk

pelaksanaan program JKN PBI Daerah kepada Gubernur Bali melalui BPKAD Provinsi Bali paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya;

- f. Juknis BKK dalam rangka Pesta Kesenian Bali XLI Tahun 2019, II. Program, menyatakan antara lain Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten/Kota menerima pertanggungjawaban penggunaan dan peruntukan dana bantuan dari masing-masing Sekaa/Sanggar penerima bantuan;
- g. Juknis BKK kepada Kabupaten/Kota untuk Desa Pakraman, Subak, dan Subak Abian Tahun 2019, Angka 3.5 Penyelesaian Kegiatan dan Pelaporan, menyatakan antara lain Realisasi kegiatan dan biaya adalah rincian kegiatan dan penggunaan dana yang telah dilaksanakan di Desa Pakraman/Subak/Subak Abian. Perangkat Daerah pelaksana kegiatan membuat laporan pelaksanaan pemanfaatan dana BKK kepada Bupati/Walikota, dan Bupati/Walikota menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BKK dimaksud kepada Gubernur Bali melalui Kepala BPKAD Provinsi Bali paling lambat tanggal 10 Januari 2020;
- h. Juknis BKK Bidang Keciptakarya TA 2019, Bab II. Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Konstruksi, III.4 Pelaporan dan Evaluasi, menyatakan antara lain bahwa pada akhir pelaksanaan kegiatan, Kabupaten/Kota selambat-lambatnya tiga bulan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan BKK kepada Provinsi melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Provinsi Bali;
- i. Juknis Penggunaan BKK Alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Payangan pada Anggaran Perubahan TA 2019, III. Laporan, menyatakan bahwa Penerima BKK Bidang Kesehatan wajib membuat laporan capaian hasil kegiatan. Laporan disampaikan kepada Gubernur Bali melalui BPKAD Provinsi Bali, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, Pengembangan Provinsi Bali, serta Dinas Kesehatan Provinsi Bali;
- j. Juknis BKK Pengendalian Mobilisasi Penduduk Pendetang TA 2019, II. Pokok-pokok Pengelolaan BKK, menyatakan antara lain Menyampaikan laporan hasil operasional pengendalian mobilisasi penduduk secara periodik, yaitu bulanan, triwulan, semesteran, dan akhir Tahun 2019 yang disampaikan kepada Gubernur Bali melalui Disdukcapilkb Provinsi Bali;
- k. Juknis BKK kepada Desa untuk Desa Pakraman, Subak, dan Subak Abian Tahun 2019, Angka 4.5 Penyelesaian Kegiatan dan Pelaporan, menyatakan antara lain Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) membuat laporan pelaksanaan pemanfaatan dana BKK kepada Perbekel, selanjutnya Perbekel menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BKK dimaksud kepada Gubernur Bali melalui Kepala BPKAD Provinsi Bali melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali paling lambat tanggal 10 Januari 2020 yang ditembuskan kepada Bupati/Walikota melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten/Kota se-Bali.

Hal tersebut mengakibatkan:

- a. Pendapatan daerah sebesar Rp4.793.674.898,92 yang berupa pengembalian Belanja Transfer BKK belum dapat diterima Pemerintah Provinsi Bali; dan
- b. Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana BKK TA 2019 tidak dapat dilaksanakan secara tepat waktu dan tidak dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian BKK tahun berikutnya.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh:

- a. Kepala Perangkat Daerah di Provinsi Bali yang menjadi *leading sector* masing-masing bidang kegiatan BKK belum melaksanakan evaluasi secara memadai terhadap kesesuaian pelaporan dan pertanggungjawaban BKK dengan ketentuan dalam juknis yang telah ditetapkan sebagai pertimbangan dalam pemberian BKK tahun berikutnya;
- b. Kepala BPKAD belum optimal dalam melaksanakan pemantauan LPj BKK yang menjadi pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD); dan
- c. Penerima BKK Kabupaten dan BKK Desa dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana BKK TA 2019 belum sepenuhnya mengacu pada juknis yang telah ditetapkan.

Atas permasalahan tersebut, Gubernur Bali melalui Kepala BPKAD, Kepala Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil menyatakan sependapat dan selanjutnya Sekretaris Daerah telah bersurat kepada Bupati/Walikota terkait untuk menyetorkan sisa dana BKK ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Bali dan penyampaian LPj sesuai diatur dalam juknis.

BPK merekomendasikan Gubernur Bali agar memerintahkan:

- a. Kepala Perangkat Daerah yang menjadi *leading sector* masing-masing bidang kegiatan BKK melaksanakan evaluasi secara memadai terhadap pelaporan dan pertanggungjawaban BKK sesuai juknis yang telah ditetapkan sebagai pertimbangan dalam pemberian BKK tahun berikutnya;
- b. Kepala BPKAD lebih optimal dalam melaksanakan pemantauan LPj BKK yang menjadi pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran PPKD;
- c. Pemerintah Daerah penerima BKK mengembalikan dan menyetorkan sisa dana BKK sebesar Rp4.793.674.898,92 ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Bali sesuai juknis yang berlaku, dengan rincian:
 - 1) Pemerintah Kabupaten Bangli sebesar Rp632.629.279,00 untuk kegiatan penyelenggaraan akses *free wifi*;

- 2) Pemerintah Kabupaten Buleleng sebesar Rp450.472.000,00 untuk kegiatan penyelenggaraan akses *free* wifi dan sebesar Rp491.633.207,00 untuk kegiatan peningkatan jalan kabupaten dan pemeliharaan rutin;
- 3) Pemerintah Kabupaten Gianyar sebesar Rp756.486.926,00 untuk kegiatan penyelenggaraan akses *free* wifi;
- 4) Pemerintah Kabupaten Jembrana sebesar Rp294.719.416,00 untuk kegiatan penyelenggaraan akses *free* wifi;
- 5) Pemerintah Kabupaten Klungkung sebesar Rp443.339.299,00 untuk kegiatan penyelenggaraan akses *free* wifi; dan
- 6) Pemerintah Kabupaten Tabanan sebesar Rp379.528.801,00 untuk kegiatan penyelenggaraan akses *free* wifi dan sebesar Rp1.344.865.970,92 untuk kegiatan peningkatan jalan.

2. Pengamanan Administrasi Bidang Tanah SMA/SMK Belum Sepenuhnya Memadai

Sesuai pembagian urusan pemerintahan, pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Pengalihan atau serah terima kepada Pemerintah Provinsi Bali telah dilaksanakan sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) Personel, Sarana Prasarana dan Dokumen Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi Bali pada tanggal 27 September 2016.

Pemeriksaan terhadap dokumen prasarana berupa tanah yang telah diserahkan tersebut, ditemukan hal-hal sebagai berikut.

a. Terdapat bidang tanah sekolah yang belum diserahkan

Hasil pengujian diketahui terdapat satu sekolah yang bidang tanahnya tidak tercantum dalam lampiran BAST, yaitu SMAN 1 Kuta Selatan. Sehingga atas sekolah tersebut, tanahnya juga tidak tercantum dalam KIB Tanah.

Lebih lanjut diketahui terdapat enam sekolah yang bidang tanahnya tidak tercantum dalam lampiran BAST karena merupakan tanah desa adat, yaitu SMAN 2 Busungbiu, SMAN 2 Tejakula, SMKN 2 Seririt, SMKN 1 Kubutambahan, SMKN 1 Gerokgak, dan SMAN Satu Atap Lembongan yang keenamnya berada di Kabupaten Buleleng. Namun, total sebanyak tujuh bidang tanah sekolah yang belum diserahkan tersebut masih dalam proses penelusuran lebih lanjut oleh BPKAD dan Perangkat Daerah terkait.

b. Dokumen kepemilikan bidang tanah sekolah belum bersertifikat, belum diserahkan kepada dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Bali, serta tercatat tanpa informasi nilai tanah

Menurut BAST, Pemerintah Provinsi Bali telah menerima pengalihan pendidikan menengah untuk sebanyak 123 sekolah. Pemeriksaan terhadap dokumen kepemilikan dan pencatatan bidang tanah sekolah yang telah didukung BAST, diketahui beberapa hal sebagai berikut.

- 1) Terdapat 19 bidang tanah sekolah belum memiliki sertifikat

Hasil pengujian atas dokumen BAST, daftar aset tanah sekolah, dan hasil klarifikasi dengan Bidang Pengelolaan BMD pada BPKAD, diketahui terdapat 19 bidang tanah sekolah yang belum bersertifikat, dengan rincian sekolah disajikan pada **Lampiran 4**.

Berdasarkan keterangan dari Kepala UPTD Pengelolaan BMD, diperoleh informasi bahwa tanah sekolah yang belum bersertifikat telah ditindaklanjuti untuk diproses ke Kantor Pertanahan. Proses yang dimaksud masih dalam tahap verifikasi dan/atau pengukuran.

- 2) Terdapat 20 bukti kepemilikan atau sertifikat tanah sekolah belum diserahkan ke Pemerintah Provinsi Bali

Hasil pengujian secara uji petik atas fisik dokumen sertifikat dan BAST, diketahui terdapat 20 bidang tanah sekolah yang dokumen sertifikatnya belum diserahkan ke Pemerintah Provinsi Bali. Menurut keterangan Bidang Pengelolaan BMD pada BPKAD, diperoleh informasi dari 20 bidang tanah diantaranya sebanyak empat bidang tanah masih merupakan tanah hak milik desa adat, yaitu SMKN 3 Kintamani, SMKN 3 Bangli, SMKN 2 Kintamani, dan SMKN 1 Tembuku yang keempatnya berada di Kabupaten Bangli. Rincian bidang tanah sekolah yang dokumen sertifikatnya belum diserahkan ke Pemerintah Provinsi Bali disajikan pada **Lampiran 5**.

- 3) Kepemilikan atas 83 sertifikat tanah sekolah belum atas nama Pemerintah Provinsi Bali

Pengujian lebih lanjut secara uji petik terhadap dokumen sertifikat, diketahui terdapat 83 sertifikat tanah sekolah belum dilakukan proses balik nama sebagai milik Pemerintah Provinsi Bali. Bidang tanah tersebut masih atas nama pemerintah kabupaten/kota, Departemen Pendidikan Nasional c.q. Kanwil Pendidikan dan Kebudayaan, dan/atau bidang tanah dengan status Hak Milik. Rincian sertifikat tanah sekolah tersebut disajikan pada **Lampiran 6**.

Berdasarkan keterangan dari Kepala UPTD Pengelolaan BMD, diperoleh informasi bahwa tanah sekolah yang belum atas nama Pemerintah Provinsi sampai dengan saat ini belum ditindaklanjuti untuk diproses balik nama ke kantor pertanahan karena pihak Bidang Pengelolaan BMD pada BPKAD sampai saat ini belum memberikan rincian datanya kepada UPTD Pengelolaan BMD.

Sesuai pedoman pengelolaan BMD, tanah harus memiliki pengamanan hukum. Tanah yang semula bersertifikat atas nama pemerintah kabupaten/kota harus dipindahtangankan atau dialihkan kepada pemerintah provinsi sesuai kewenangannya. Pemindahtanganan atau pengalihan hak atas tanah tersebut harus didaftarkan atau dibalik nama di kantor pertanahan setempat sebagai jaminan kepastian hukum.

4) Bidang tanah tercatat tanpa informasi nilai tanah

Pengujian lebih lanjut terhadap pencatatan bidang tanah sekolah telah sesuai BAST namun belum didukung informasi nilai tanah atau bernilai nol, pada sebanyak tujuh sekolah yaitu SMAN 1 Susut, SMAN 1 Kintamani, SMKN 2 Tegalalang, SMAN 3 Amlapura, SMKN 1 Bebandem, SMKN 4 Bangli, dan SMKN 1 Kintamani. Sampai dengan berakhirnya pemeriksaan, BPKAD masih dalam proses koordinasi dengan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga serta sekolah-sekolah untuk menyajikan nilai wajar tanah.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015, pada Pasal 404 yang menyatakan bahwa Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan UU ini dilakukan paling lama dua tahun terhitung sejak UU ini diundangkan;
- b. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada:
 - 1) Pasal 10 huruf f yang menyatakan bahwa Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi BMD;
 - 2) Pasal 299
 - a) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Pengamanan administrasi tanah dilakukan dengan:
 - (1) Menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen bukti kepemilikan tanah secara tertib dan aman;
 - (2) Melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - (a) melengkapi bukti kepemilikan dan/atau menyimpan sertifikat tanah;
 - (b) membuat kartu identitas barang;
 - (c) melaksanakan inventarisasi/sensus barang milik daerah sekali dalam lima tahun serta melaporkan hasilnya; dan
 - (d) mencatat dalam Daftar Barang Pengelola/ Pengguna Barang/Kuasa Pengguna.
 - b) Ayat (4) yang menyatakan bahwa Pengamanan hukum dilakukan terhadap:
 - (1) tanah yang belum memiliki sertifikat; dan

- (2) tanah yang sudah memiliki sertifikat namun belum atas nama pemerintah daerah.
- 3) Pasal 302
- a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengamanan hukum terhadap tanah yang belum memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (4) huruf a dilakukan dengan cara:
- (1) apabila barang milik daerah telah didukung oleh dokumen awal kepemilikan, antara lain berupa *Letter C*, akta jual beli, akte hibah, atau dokumen setara lainnya, maka Pengelola Barang/Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang segera mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas nama pemerintah daerah kepada Badan Pertanahan Nasional/Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setempat/Kantor Pertanahan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (2) apabila barang milik daerah tidak didukung dengan dokumen kepemilikan, Pengelola Barang/Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang mengupayakan untuk memperoleh dokumen awal kepemilikan seperti riwayat tanah.
- b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengamanan hukum terhadap tanah yang sudah bersertifikat namun belum atas nama pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (4) huruf b dilakukan dengan cara Pengelola Barang/Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang segera mengajukan permohonan perubahan nama sertifikat hak atas tanah kepada kantor pertanahan setempat menjadi atas nama pemerintah daerah.
- c. Pergub Nomor 39 Tahun 2015 tentang Prosedur Tetap Pengamanan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, pada:
- 1) Pasal 1 ayat 14 yang menyatakan bahwa Dokumen penguasaan barang milik daerah adalah dokumen yang menyatakan bukti autentik, asal-usul perolehan atas penguasaan barang milik daerah yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum meliputi sertifikat tanah, bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB), berita acara serah terima barang, surat keputusan hibah/tukar menukar;
- 2) Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa Pengamanan administrasi terhadap barang tidak bergerak dilakukan dengan cara pencatatan dalam Buku Inventaris dan KIB.
- 3) Pasal 6
- a) Ayat 1 yang menyatakan bahwa Pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan dan tindakan hukum;
- b) Ayat 2 yang menyatakan bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum atas penguasaan barang milik

daerah berupa tanah wajib didasari dasar-dasar penguasaan hak yang sah berupa sertifikat;

- c) Ayat 3 yang menyatakan bahwa terhadap tanah aset Pemerintah Provinsi Bali yang belum bersertifikat/sertifikat hilang/belum dibalik nama, maka pengguna barang mengusulkan pensertifikatan kepada pengelola barang melalui pembantu pengelola barang dengan melampirkan persyaratan/bukti perolehan;
- d) Ayat 5 yang menyatakan bahwa untuk memudahkan mengetahui letak lokasi aset tanah penguasaan Pemerintah Provinsi Bali agar dibuatkan pemetaan yang menggambarkan letak tanah dan data penggunaan dilengkapi dengan foto kondisi fisik tanah serta didaftarkan ke Kantor Pertanahan untuk penerbitan Nomor Induk Bidang (NIB).

Hal tersebut mengakibatkan:

- a. KIB Tanah tidak dapat menyajikan sebanyak tujuh bidang tanah sekolah yang belum diserahkan;
- b. Tanah sekolah yang belum didukung sertifikat, sertifikat tanah sekolah yang belum diserahkan dan/atau yang belum atas nama Pemerintah Provinsi Bali menjadi rawan sengketa; dan
- c. KIB Tanah belum menyajikan nilai yang wajar atas tujuh bidang tanah sekolah yang bernilai nol atau tidak didukung informasi nilai tanah.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga selaku Pengguna Barang belum optimal dalam berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota, SMA/SMK terkait, dan/atau desa adat terkait serta inventarisasi hasil serah terima dalam rangka pengamanan administrasi; dan
- b. Kepala UPTD Pengelolaan BMD belum optimal dalam melaksanakan pengamanan hukum berupa sertifikasi aset tanah SMA/SMK.

Atas permasalahan tersebut, Gubernur Bali melalui Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga menyatakan sependapat dan akan berkoordinasi dengan sekolah, pemerintah daerah, dan desa adat terkait untuk penyerahan kepemilikan tanah dan pemenuhan informasi dalam KIB A, serta melakukan balik nama dan proses sertifikasi tanah di Kantor Pertanahan setempat.

BPK merekomendasikan Gubernur Bali agar memerintahkan:

- a. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga berkoordinasi dengan pemerintah daerah, sekolah, dan/atau desa adat terkait dalam rangka pengamanan administrasi, dengan:

- 1) Melaksanakan serah terima atas tujuh bidang tanah sekolah yang belum diserahkan;
 - 2) Melaksanakan serah terima bukti kepemilikan tanah atau sertifikat tanah atas 20 bidang tanah sekolah;
 - 3) Memperoleh kelengkapan informasi nilai tanah pada tujuh sekolah yang telah diserahkan; dan
- b. Kepala UPTD Pengelolaan BMD menyelesaikan proses sertifikasi atas 19 bidang tanah sekolah dan memproses balik nama 83 bidang tanah sekolah untuk pengamanan hukum.

3. Pengelolaan Rumah Negara Pemerintah Provinsi Bali Belum Sesuai Ketentuan

Rumah Negara merupakan bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan. Penatausahaan atas penggunaan Rumah Negara sebagian besar dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Barang Milik Daerah (PBMD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali. Selain UPTD PBMD, penatausahaan atas penggunaan Rumah Negara juga dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah antara lain Dinas Pendidikan (perubahan organisasi di Tahun 2020 menjadi Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga), Dinas Kesehatan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), dan Dinas Sosial (perubahan organisasi di Tahun 2020 menjadi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).

Pemerintah Provinsi Bali telah mengatur mekanisme penggunaan Rumah Negara dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghunian Bangunan Rumah Negara serta Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Daerah. Pengujian terhadap penggunaan Rumah Negara diketahui beberapa permasalahan sebagai berikut.

a. Terdapat penghunian Rumah Negara tidak didukung SIP dan penetapan Keputusan Gubernur

1) Rumah Negara Golongan I

Berdasarkan hasil pengujian dokumen penatausahaan Rumah Negara, diketahui bahwa penghunian Rumah Negara Golongan I yang diperuntukkan bagi jabatan tertentu tidak didukung dengan SIP Rumah Negara. Menurut ketentuannya, SIP untuk Rumah Negara Golongan I ditetapkan oleh Pengelola Barang, dan hak penghunian Rumah Negara berlaku sebagaimana ditetapkan dalam SIP. Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemanfaatan BMD pada UPTD PBMD BPKAD Provinsi Bali diperoleh informasi bahwa Rumah Negara Golongan I dihuni oleh Gubernur dan Wakil Gubernur.

2) Rumah Negara Golongan II

Pengujian lebih lanjut atas dokumen SIP dan Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang Izin Penghunian Rumah Negara Milik Pemerintah Provinsi Bali diketahui terdapat 180 penghunian Rumah Negara. Namun dari 180 penghunian tersebut, diantaranya sejumlah 88 penghunian belum didukung dengan SIP dan sejumlah 69 penghunian belum didukung dengan SK Gubernur. Rekapitulasi jumlah tersebut sesuai Perangkat Daerah yang mengelolanya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. Penghunian Rumah Negara Belum Didukung SIP dan SK Gubernur

No.	Perangkat Daerah Pengelola	Tanpa SIP	Tanpa SK
1.	BPKAD	39	54
2.	BPSDM	3	5
3.	Dinas Pendidikan	40	-
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	-
5.	Dinas Sosial	4	-
6.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	1	-
7.	Dinas Kesehatan	-	10
	Jumlah	88	69

Rincian disajikan pada **Lampiran 7** dan **Lampiran 8**

Menurut Pergub Nomor 26 Tahun 2018, setelah penghuni Rumah Negara Golongan II ditetapkan dalam Keputusan Gubernur, penghuniannya diatur lebih lanjut dalam SIP yang akan ditetapkan oleh Pengguna Barang bagi Rumah Negara yang berada pada lingkungan Perangkat Daerah terkait. Sehingga setiap penghunian yang telah didukung SIP, seharusnya nama penghuni Rumah Negara Golongan II tersebut tercantum dalam SK Gubernur.

b. Penghunian Rumah Negara tidak sesuai peruntukannya

Pergub Nomor 26 Tahun 2018 telah menetapkan tipe Rumah Negara (sesuai luas bangunan) berdasarkan peruntukannya. Peruntukan dimaksud adalah dimulai dari PNS Golongan III/b sampai dengan Eselon II/Pimpinan Tinggi Pratama. Hasil pengujian atas dokumen SIP, diketahui bahwa terdapat 36 penghunian Rumah Negara di luar lingkungan Perangkat Daerah yang dikelola oleh BPKAD namun tidak sesuai peruntukannya, dengan rincian disajikan pada **Lampiran 9**.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. PP Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas PP Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara, pada Pasal 8:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa untuk dapat menghuni Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memiliki SIP.
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa SIP sebagai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Pejabat yang berwenang pada instansi yang bersangkutan.

- b. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada:
- 1) Pasal 313:
 - a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Penetapan status penggunaan barang milik daerah berupa Rumah Negara ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.
 - b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Hak penghunian Rumah Negara berlaku sebagaimana ditetapkan dalam SIP, kecuali ditentukan lain dalam keputusan pencabutan SIP.
 - 2) Pasal 317 yang menyatakan bahwa Pengamanan administrasi barang milik daerah berupa Rumah Negara dilakukan dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib dan teratur atas dokumen, antara lain:
 - a) sertifikat atau surat keterangan hak atas tanah;
 - b) SIP;
 - c) keputusan Gubernur/Bupati/Walikota mengenai penetapan rumah negara golongan I, golongan II atau golongan III;
 - d) gambar/*legger* bangunan;
 - e) data daftar barang; dan
 - f) keputusan pencabutan SIP.
 - 3) Pasal 488
 - a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa BMD berupa Rumah Negara hanya dapat digunakan sebagai tempat tinggal pejabat atau pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan yang memiliki SIP;
 - b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengguna Barang wajib mengoptimalkan penggunaan barang milik daerah berupa Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - c) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Pengguna Barang Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II wajib menyerahkan BMD berupa Rumah Negara yang tidak digunakan kepada Gubernur/Bupati/Walikota.
- c. Pergub Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghunian Bangunan Rumah Negara serta Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Daerah, pada:
- 1) Pasal 1 angka 23 yang menyatakan bahwa Surat Izin Penghunian Rumah Negara yang selanjutnya disebut SIP adalah surat pemberian izin penghunian Rumah Negara kepada PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang telah memenuhi ketentuan;
 - 2) Pasal 3

- a) Ayat (2) yang menyatakan bahwa PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a merupakan PNS yang berdasarkan penetapannya memiliki hak menghuni Rumah Negara dan telah memiliki SIP;
 - b) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Penetapan penghunian Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- 3) Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Tipe Rumah Negara berdasarkan peruntukannya terdiri dari:
- a) Tipe A luas bangunan 200 m² sampai 250 m² diperuntukan bagi pejabat yang jabatannya setingkat Eselon II/Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b) Tipe B luas bangunan 100 m² sampai 199 m² diperuntukan bagi pejabat yang jabatannya setingkat Eselon III/Administrator;
 - c) Tipe C luas bangunan 72 m² sampai 99 m² diperuntukan bagi pejabat yang jabatannya setingkat Eselon IV/Pengawas atau PNS Golongan IV;
 - d) Tipe D luas bangunan 30 m² sampai 71 m² diperuntukan bagi PNS dengan Golongan III/b sampai Golongan III/d; dan
 - e) Tipe E luas bangunan 21 m² diperuntukan bagi PNS yang belum berkeluarga.
- 4) Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa Penghunian Rumah Negara Golongan II memiliki ketentuan sebagai berikut:
- a) berstatus PNS aktif dengan masa kerja sekurang-kurangnya 10 tahun pada Pemerintah Daerah;
 - b) belum memiliki rumah pribadi di tempat kerja yang di tugaskan, yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan bermaterai dan diketahui pimpinan perangkat daerah tempat bertugas;
 - c) mengajukan permohonan menempati Rumah Negara Golongan II kepada Gubernur;
 - d) telah ditetapkan oleh Gubernur dan memiliki SIP;
 - e) belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari negara berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - f) tidak sedang menghuni Rumah Negara lainnya; dan
 - g) Suami serta istri yang masing-masing berstatus sebagai PNS, hanya dapat menghuni 1 (satu) Rumah Negara dalam 1 (satu) kota/daerah yang sama.
- 5) Pasal 7
- a) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengelola Barang menugaskan Pejabat Penatausahaan Barang yang membidangi pengelolaan Barang Milik Daerah untuk melakukan pengkajian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;

- b) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Pengguna Barang melakukan pengkajian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
- 6) Pasal 8
- a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Penghuni Rumah Negara Golongan II ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Penghunian Rumah Negara Golongan II setelah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan SIP;
 - c) Ayat (4) yang menyatakan bahwa SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - (1) obyek penghunian;
 - (2) jangka waktu;
 - (3) hak dan kewajiban penghunian;
 - (4) larangan, dan
 - (5) sanksi.
 - d) Ayat (5) yang menyatakan bahwa SIP untuk Rumah Negara Golongan II ditetapkan oleh Pengelola Barang bagi Rumah Negara di luar lingkungan Perangkat Daerah dan Pengguna Barang bagi Rumah Negara yang berada pada lingkungan Perangkat Daerah.
- 7) Pasal 12 ayat (2) huruf g yang menyatakan bahwa Penghunian Rumah Negara Golongan II dan Golongan III berakhir apabila tidak ditempati oleh pemegang SIP.

Hal tersebut mengakibatkan:

- a. Risiko penyalahgunaan penghunian Rumah Negara yang tidak didukung SK Gubernur dan SIP; dan
- b. Penghunian yang tidak sesuai peruntukan menjadi tidak tertib dan tepat sasaran.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang:
 - 1) belum menetapkan SIP untuk Rumah Negara Golongan I sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 2) menetapkan SIP untuk Rumah Negara Golongan II di luar lingkungan Perangkat Daerah yang dikelola oleh BPKAD belum memperhatikan kesesuaian tipe Rumah Negara dengan peruntukannya mengacu pada Pergub yang berlaku;
- b. Kepala Perangkat Daerah terkait selaku Pengguna Barang belum menerapkan pengamanan administrasi Rumah Negara berupa SIP dan SK Gubernur sesuai ketentuan yang berlaku;

Atas permasalahan tersebut, Gubernur Bali melalui Kepala BPKAD menyatakan sependapat dan akan melakukan penataan penghunian sesuai ketentuan, serta menjelaskan bahwa penghunian Rumah Negara dapat dilakukan bila telah memiliki SIP.

BPK merekomendasikan Gubernur Bali agar memerintahkan:

- a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang:
 - 1) menetapkan SIP untuk Rumah Negara Golongan I sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 2) menetapkan SIP untuk Rumah Negara Golongan II di luar lingkungan Perangkat Daerah yang dikelola oleh BPKAD dengan memperhatikan kesesuaian tipe Rumah Negara dengan peruntukannya mengacu pada Pergub yang berlaku;
 - 3) menertibkan peruntukan Rumah Negara Golongan II agar tepat sasaran sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- b. Kepala Perangkat Daerah terkait selaku Pengguna Barang menerapkan pengamanan administrasi Rumah Negara berupa SIP dan SK Gubernur sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Bangunan Rusunawa Belum Dihilangkan Kepada Pemerintah Provinsi Bali

Dalam rangka memberikan pelayanan di bidang perumahan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) khususnya untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Bali yang tidak mampu menjangkau pemilikan tempat tinggal di wilayah Kota Denpasar, Dinas Pekerjaan Umum (perubahan organisasi di Tahun 2020 menjadi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/Dinas PUPR/PPK) Provinsi Bali mengusulkan pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa). Usulan tersebut ditujukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) c.q. Direktorat Jenderal (Ditjen) Penyediaan Perumahan melalui surat Nomor 648/12654/DPU.BALI tanggal 29 September 2015.

Pelaksanaan pembangunan Rusunawa dimulai pada Tahun 2016, sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Lahan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penyediaan Rumah Susun Reguler Ditjen Penyediaan Perumahan Nomor 593.1/1724/PPA.Aset tanggal 18 Mei 2016. Lokasi pembangunan Rusunawa berada di atas tanah atau lahan milik Pemerintah Provinsi Bali dengan sertifikat Hak Pakai Nomor 1 tanggal 8 September 1998 dengan ukuran lahan seluas 8.425 m² dan beralamat di Jalan Subak, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur.

Pada Tahun 2017, Direktur Jenderal (Dirjen) Penyediaan Perumahan pada Kementerian PUPR bersurat kepada Gubernur Bali melalui surat Nomor UM.0402-Dr/1164 tanggal 18 September 2017 perihal Pemanfaatan dan Penghunian

Rusunawa. Surat tersebut menginformasikan beberapa hal antara lain bahwa sehubungan dengan telah selesainya pembangunan Rusunawa dan akan diprosesnya serah terima aset Rusunawa berupa Hibah Barang Milik Negara (BMN) dari Kementerian PUPR kepada Pemerintah Provinsi Bali, adapun persyaratan administrasi Hibah yang harus segera dilengkapi, yaitu:

- a. Fotokopi Sertifikat Tanah;
- b. Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- c. Surat Keterangan Kebenaran Fotokopi Sertifikat Tanah dan Surat Keterangan Kebenaran Fotokopi IMB;
- d. Surat Pernyataan Bersedia Menerima BMN dari Pengguna Barang; dan
- e. Surat Keputusan (SK) Badan Pengelola Rusunawa.

Pemeriksaan atas serah terima aset Rusunawa diketahui bahwa sampai dengan 31 Desember 2019 belum terjadi serah terima berupa Hibah aset Rusunawa dari Kementerian PUPR kepada Pemerintah Provinsi Bali. Hal ini disebabkan Pemerintah Provinsi Bali belum dapat melengkapi dokumen persyaratan administrasi Hibah, yaitu IMB Rusunawa.

Lahan Rusunawa berada di wilayah administrasi Kota Denpasar. Hasil konfirmasi kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) Pemerintah Kota Denpasar, diperoleh informasi bahwa berdasarkan laporan Penertiban Bangun-Bangunan di Kecamatan Denpasar Timur pada bulan Agustus 2016 yang saat itu dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang dan Perumahan Pemerintah Kota Denpasar, menunjukkan terjadi pelanggaran IMB atas pembangunan Rusunawa. Atas pelanggaran tersebut, Dinas Tata Ruang dan Perumahan Pemerintah Kota Denpasar melalui Kepala Bidang Pengendalian dan Penataan Kota Denpasar telah mengirimkan Surat Peringatan (SP) sebanyak tiga kali kepada pihak pelaksana pekerjaan Rusunawa, yaitu SP 1 pada tanggal 30 Juni 2016, SP 2 pada tanggal 4 Agustus 2016, dan terakhir dengan SP 3 pada tanggal 25 Agustus 2016.

Menurut penjelasan Kepala Dinas PUPR/PPK Provinsi Bali diperoleh keterangan bahwa lahan untuk pembangunan Rusunawa telah sesuai usulan atau proposal di Tahun 2015, dan masih dalam proses menunggu revisi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Denpasar.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada Pasal 303 ayat (5) yang menyatakan bahwa Pengamanan hukum gedung dan/atau bangunan dengan melakukan pengurusan IMB, bagi bangunan yang belum memiliki IMB;
- b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun, pada:

- 1) Pasal 8
 - a) Ayat (1) menyatakan bahwa Persyaratan proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:
 - (1) Huruf c, yaitu dalam hal permohonan bantuan pembangunan rumah susun diajukan oleh kementerian/lembaga atau pemerintah daerah provinsi, proposal disertai dengan surat pernyataan dukungan dari pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - (2) Huruf f, yaitu surat pernyataan kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang wilayah daerah kabupaten/kota;
 - b) Ayat (4) yang menyatakan bahwa Surat pernyataan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - (1) proses perizinan dan penerbitan izin mendirikan bangunan;
 - (2) dukungan pengelolaan sampah;
 - (3) penerbitan sertifikat laik fungsi; dan
 - (4) fasilitasi penghunian.
- 2) Pasal 9 yang menyatakan bahwa Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
 - b) tersedia jalan akses ke lokasi untuk kepentingan kelancaran pembangunan dan pemanfaatan rumah susun;
 - c) bebas dari bencana banjir dan longsor;
 - d) tidak melanggar garis sempadan bangunan, sungai dan pantai;
 - e) tersedia pasokan daya listrik sesuai kebutuhan; dan
 - f) tersedia pasokan air minum atau sumber air bersih lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara, pada BAB II.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Rumah Negara, pada angka 2. Kelengkapan pendaftaran, antara lain fotokopi Surat IMB atau surat keterangan membangun dari instansi yang bersangkutan.

Hal tersebut mengakibatkan Pemerintah Provinsi Bali tidak dapat memanfaatkan bangunan Rusunawa dari Kementerian PUPR sesuai dengan rencana yang telah diusulkan.

Permasalahan tersebut disebabkan Kepala Dinas PUPRKP belum melaksanakan koordinasi penyelesaian IMB Rusunawa dengan Pemerintah Kota Denpasar.

Atas permasalahan tersebut, Gubernur Bali melalui Kepala Dinas PUPRKP menyatakan sependapat dan segera melaksanakan pengurusan IMB sambil menunggu Perda RUTR Provinsi Bali dan Perda RDTR Kota Denpasar sehingga bangunan Rusunawa dapat diserahterimakan.

BPK merekomendasikan Gubernur Bali agar:

- a. Melaksanakan pertemuan tripartit dengan Kementerian PUPR dan Pemerintah Kota Denpasar untuk membahas percepatan proses hibah bangunan Rusunawa; dan
- b. Memerintahkan Kepala Dinas PUPRKP berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Denpasar dalam rangka penyelesaian IMB Rusunawa.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pemerintah Kabupaten/Kota yang Belum Mengembalikan Sisa Dana BKK ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Bali

No.	No SP2D	Tanggal SP2D	Uraian	Kabupaten	Peruntukkan menurut SK Gubernur	No Keputusan Gubernur	Tanggal Keputusan Gubernur	Realisasi Belanja Pemrov	Laporan Pertanggungjawaban	Nilai Penggunaan (Rp)	Sisa Dana di Pemkab/kota (Rp)	Perlakuan Sisa Dana Sesuai Juknis
1	09515/SP2D/LS/4.01.00/2019	03/07/2019	Belanja bantuan keuangan khusus kepada Kabupaten Bangli dalam rangka penyelenggaraan akses free wifi untuk pemasangan wifi pada puskesmas, obyek wisata dan desa adat, sesuai Kep.Gub Bali No: 9/03-I/HK/2019, tgl 2/4/2019	Bangli	Penyelenggaraan akses free wifi untuk pemasangan wifi pada puskesmas, obyek wisata dan desa adat	9/03-I/HK/2019	02 April 2019	1.199.000.000,00	Pengadaan Infrastruktur Jaringan Komunikasi dan Informasi	566.370.721,00	632.629.279,00	Sisa anggaran kegiatan setelah proses pengadaan supaya disetor kembali ke Kasda Provinsi Bali
2	10565/SP2D/LS/4.01.00/2019	11/07/2019	Belanja bantuan keuangan khusus kepada Kabupaten Buleleng dalam rangka penyelenggaraan akses free wifi untuk pemasangan wifi pada puskesmas, obyek wisata dan desa adat, sesuai Kep.Gub Bali No: 9/03-I/HK/2019, tgl 2/4/2019	Buleleng	Penyelenggaraan akses free wifi untuk pemasangan wifi pada puskesmas, obyek wisata dan desa adat	9/03-I/HK/2019	02 April 2019	1.182.489.000,00	Penyelenggaraan free wifi di desa pakraman, puskesmas dan obyek wisata	732.017.000,00	450.472.000,00	Sisa anggaran kegiatan setelah proses pengadaan supaya disetor kembali ke Kasda Provinsi Bali
3	24709/SP2D/LS/4.01.00/2019	05/12/2019	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Buleleng, sesuai Kep.Gub Bali No:19/04-D/HK/2019, tanggal 14 Nopember 2019, TA. 2019	Buleleng	Peningkatan Jalan Kabupaten dan Pemeliharaan Rutin jalan	19/04-D/HK/2019	14 November 2019	9.868.358.704,00	Pemeliharaan rutin jalan dan Peningkatan Jalan	9.376.725.497,00	491.633.207,00	Sisa Anggaran setelah tender supaya disetorkan kembali ke Kas Daerah Provinsi Bali
4	13210/SP2D/LS/4.01.00/2019	12/08/2019	Belanja bantuan keuangan khusus kepada Kabupaten Gianyar dalam rangka penyelenggaraan akses free wifi untuk pemasangan wifi pada puskesmas, obyek wisata dan desa adat, sesuai Kep.Gub Bali No: 9/03-I/HK/2019, tgl 2/4/2019	Gianyar	Penyelenggaraan akses free wifi untuk pemasangan wifi pada puskesmas, obyek wisata dan desa adat	9/03-I/HK/2019	02 April 2019	1.908.496.800,00	penyelenggaraan akses free wifi untuk pemasangan wifi pada puskesmas, obyek wisata dan desa adat	1.152.009.874,00	756.486.926,00	Sisa anggaran kegiatan setelah proses pengadaan supaya disetor kembali ke Kasda Provinsi Bali
5	12735/SP2D/LS/4.01.00/2019	07/08/2019	Belanja bantuan keuangan khusus kepada Kabupaten Jembrana dalam rangka penyelenggaraan akses free wifi untuk pemasangan wifi pada puskesmas, obyek wisata dan desa adat, sesuai Kep.Gub Bali No: 9/03-I/HK/2019, tgl 2/4/2019	Jembrana	Penyelenggaraan akses free wifi untuk pemasangan wifi pada puskesmas, obyek wisata dan desa adat	9/03-I/HK/2019	02 April 2019	489.492.000,00	Terselenggaranya akses free wifi di puskesmas, objek wisata dan desa pakraman TA 2019 di Kabupaten Jembrana	194.772.584,00	294.719.416,00	Sisa anggaran kegiatan setelah proses pengadaan supaya disetor kembali ke Kasda Provinsi Bali
6	10282/SP2D/LS/4.01.00/2019	08/07/2019	Belanja bantuan keuangan khusus kepada Kabupaten Klungkung dalam rangka penyelenggaraan akses free wifi untuk pemasangan wifi pada puskesmas, obyek wisata dan desa adat, sesuai Kep.Gub Bali No: 9/03-I/HK/2019, tgl 2/4/2019	Klungkung	Penyelenggaraan akses free wifi untuk pemasangan wifi pada puskesmas, obyek wisata dan desa adat	9/03-I/HK/2019	02 April 2019	813.999.960,00	Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	370.660.661,00	443.339.299,00	Sisa anggaran kegiatan setelah proses pengadaan supaya disetor kembali ke Kasda Provinsi Bali
7	12549/SP2D/LS/4.01.00/2019	06/08/2019	Belanja bantuan keuangan khusus kepada Kabupaten Tabanan dalam rangka penyelenggaraan akses free wifi untuk pemasangan wifi pada puskesmas, obyek wisata dan desa adat, sesuai Kep.Gub Bali No: 9/03-I/HK/2019, tgl 2/4/2019	Tabanan	Penyelenggaraan akses free wifi untuk pemasangan wifi pada puskesmas, obyek wisata dan desa adat	9/03-I/HK/2019	02 April 2019	2.150.496.000,00	Penyelenggaraan akses free wifi untuk pemasangan wifi pada puskesmas, obyek wisata dan desa adat (393 titik)	1.770.967.199,00	379.528.801,00	Sisa anggaran kegiatan setelah proses pengadaan supaya disetor kembali ke Kasda Provinsi Bali
8	15033/SP2D/LS/4.01.00/2019	04/09/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten Tabanan untuk Peningkatan Jalan Patung Jagung - Titigalar, sesuai Kep.Gub.Bali No:8/03-D/HK/2019 tanggal 25/3/2019	Tabanan	Peningkatan Jalan Patung Jagung - Titigalar	7/03-D/HK/2019	05 Maret 2019	12.159.728.489,27	Peningkatan Jalan Patung Jagung-Senganan (Jalan 7 km dan Jembatan 40 m)	10.814.862.518,35	1.344.865.970,92	Sisa Anggaran setelah tender supaya disetorkan kembali ke Kas Daerah Provinsi Bali
Jumlah								29.772.060.953,27		24.978.386.054,35	4.793.674.898,92	

Pelaporan Pertanggungjawaban BKK Pemerintah Daerah Lainnya Melebihi Batas Waktu yang Ditentukan

No.	No SP2D	Tanggal SP2D	Uraian	Kabupaten	Peruntukkan menurut SK Gubernur	No Keputusan Gubernur (SK sdh diterima)	Tanggal Keputusan Gubernur	Realisasi Belanja Pemprov	Tanggal Penyampaian LPj ke BPKAD Pemprov	Keterangan
1	04451/SP2D/LS/4.0 1.00/2019	25/04/2019	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Bangli untuk pembayaran sharing iuran peserta JKN PBI Daerah, Bulan Januari s.d Maret 2019. Sesuai Kep. Gub. Bali 3/03-C/HK/2019, tanggal 21 Pebruari 2019	Bangli	pembayaran sharing iuran peserta JKN PBI Daerah, Bulan Januari s.d Maret 2019	3/03- C/HK/2019	21 February 2019	4.108.667.100,00	27 April 2020	Menurut juknis JKN PBI Tahun 2019, paling lambat LPj tanggal 10 Januari 2020
2	05170/SP2D/LS/4.0 1.00/2019	07/05/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten Bangli untuk sekaa/sanggar dalam rangka Pesta Kesenian Bali Tahun 2019, Sesuai Kep. Gub. Bali 4/03-K/HK/2019, tanggal 27 Pebruari 2019	Bangli	sekaa/sanggar dalam rangka Pesta Kesenian Bali Tahun 2019	4/03- K/HK/2019	27 February 2019	500.000.000,00	27 April 2020	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten/Kota menerima pertanggungjawaban dari penerima bantuan dan melaorkan ke Pemprov
3	05270/SP2D/LS/4.0 1.00/2019	08/05/2019	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Bangli untuk pembayaran sharing iuran peserta JKN PBI Daerah, Bulan April 2019. Sesuai Kep. Gub. Bali 3/03-C/HK/2019, tanggal 21 Pebruari 2019	Bangli	pembayaran sharing iuran peserta JKN PBI Daerah, Bulan April 2019	3/03- C/HK/2019	21 February 2019	1.420.174.560,00	27 April 2020	Menurut juknis JKN PBI Tahun 2019, paling lambat LPj tanggal 10 Januari 2020
4	06931/SP2D/LS/4.0 1.00/2019	28/05/2019	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Bangli untuk pembayaran sharing iuran peserta JKN PBI Daerah, Bulan Mei 2019. Sesuai Kep. Gub. Bali 3/03-C/HK/2019, tanggal 21 Pebruari 2019	Bangli	pembayaran sharing iuran peserta JKN PBI Daerah, Bulan Mei 2019	3/03- C/HK/2019	21 February 2019	1.441.182.990,00	27 April 2020	Menurut juknis JKN PBI Tahun 2019, paling lambat LPj tanggal 10 Januari 2020
5	09504/SP2D/LS/4.0 1.00/2019	03/07/2019	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Bangli untuk pembayaran sharing iuran peserta JKN PBI Daerah, Bulan Juni 2019. Sesuai Kep. Gub. Bali 3/03-C/HK/2019, tanggal 21 Pebruari 2019	Bangli	pembayaran sharing iuran peserta JKN PBI Daerah, Bulan Juni 2019	3/03- C/HK/2019	21 February 2019	1.433.710.980,00	27 April 2020	Menurut juknis JKN PBI Tahun 2019, paling lambat LPj tanggal 10 Januari 2020
6	09515/SP2D/LS/4.0 1.00/2019	03/07/2019	Belanja bantuan keuangan khusus kepada Kabupaten Bangli dalam rangka penyelenggaraan akses free wifi untuk pemasangan wifi pada puskesmas, obyek wisata dan desa adat, sesuai Kep.Gub Bali No: 9/03-I/HK/2019, tgl 2/4/2019	Bangli	Penyelenggaraan akses free wifi untuk pemasangan wifi pada puskesmas, obyek wisata dan desa adat	9/03- I/HK/2019	02 April 2019	1.199.000.000,00	27 April 2020	Menurut juknis penyelenggaraan akses free wifi, paling lambat LPj diserahkan tiga bulan setelah pelaksanaan kegiatan
7	11935/SP2D/LS/4.0 1.00/2019	01/08/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten Bangli untuk Subak Abian, sesuai Kep.Gub.Bali No: 6/03-S/HK/2019, tgl 27 Februari 2019	Bangli	Subak Abian	6/03- S/HK/2019	27 February 2019	150.000.000,00	27 April 2020	Menurut juknis BKK Desa Pakraman, Subak, dan Subak Abian Tahun 2019, paling lambat LPj tanggal 10 Januari 2020
8	11936/SP2D/LS/4.0 1.00/2019	01/08/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten Bangli untuk Desa Pakraman, sesuai Kep.Gub.Bali No: 6/03-S/HK/2019, tgl 27 Februari 2019	Bangli	Desa Pakraman	6/03- S/HK/2019	27 February 2019	1.750.000.000,00	27 April 2020	Menurut juknis BKK Desa Pakraman, Subak, dan Subak Abian Tahun 2019, paling lambat LPj tanggal 10 Januari 2020
9	11937/SP2D/LS/4.0 1.00/2019	01/08/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten Bangli untuk Subak, sesuai Kep.Gub.Bali No: 6/03-S/HK/2019, tgl 27 Februari 2019	Bangli	Subak	6/03- S/HK/2019	27 February 2019	850.000.000,00	27 April 2020	Menurut juknis BKK Desa Pakraman, Subak, dan Subak Abian Tahun 2019, paling lambat LPj tanggal 10 Januari 2020

No.	No SP2D	Tanggal SP2D	Uraian	Kabupaten	Peruntukkan menurut SK Gubernur	No Keputusan Gubernur (SK sdh diterima)	Tanggal Keputusan Gubernur	Realisasi Belanja Pemprov	Tanggal Penyampaian LPj ke BPKAD Pemprov	Keterangan
10	11975/SP2D/LS/4.0 1.00/2019	05/08/2019	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Bangli untuk pembayaran sharing iuran peserta JKN PBI Daerah, Bulan Juli 2019. Sesuai Kep. Gub. Bali 3/03-C/HK/2019, tanggal 21 Pebruari 2019	Bangli	pembayaran sharing iuran peserta JKN PBI Daerah, Bulan Juli 2019	3/03-C/HK/2019	21 February 2019	1.437.312.090,00	27 April 2020	Menurut juknis JKN PBI Tahun 2019, paling lambat LPj tanggal 10 Januari 2020
11	14068/SP2D/LS/4.0 1.00/2019	23/08/2019	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Bangli untuk pembayaran sharing iuran peserta JKN PBI Daerah, Bulan Agustus 2019. Sesuai Kep. Gub. Bali 3/03-C/HK/2019, tanggal 21 Pebruari 2019	Bangli	pembayaran sharing iuran peserta JKN PBI Daerah, Bulan Agustus 2019	3/03-C/HK/2019	21 February 2019	1.436.338.500,00	27 April 2020	Menurut juknis JKN PBI Tahun 2019, paling lambat LPj tanggal 10 Januari 2020
12	16395/SP2D/LS/4.0 1.00/2019	20/09/2019	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Bangli untuk pembayaran sharing iuran peserta JKN PBI Daerah, Bulan September 2019. Sesuai Kep. Gub. Bali 3/03-C/HK/2019, tanggal 21 Pebruari 2019	Bangli	pembayaran sharing iuran peserta JKN PBI Daerah, Bulan September 2019	3/03-C/HK/2019	21 February 2019	1.407.377.130,00	27 April 2020	Menurut juknis JKN PBI Tahun 2019, paling lambat LPj tanggal 10 Januari 2020
13	18628/SP2D/LS/4.0 1.00/2019	14/10/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten Bangli untuk Jasa Konsultan Supervisi Peningkatan Jalan Simpang Penulisan-Pinggian 6 KM, sesuai Kep. Gub. Bali No: 7/03-D/HK/2019, tgl 5/3/2019	Bangli	Jasa Konsultan Supervisi Peningkatan Jalan Simpang Penulisan-Pinggian 6 KM	7/03-D/HK/2019	05 March 2019	72.944.000,00	27 April 2020	Menurut juknis bidang jalan, selambat-lambatnya 3 bulan pada akhir pelaksanaan kegiatan
14	18629/SP2D/LS/4.0 1.00/2019	14/10/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten Bangli untuk Jasa Konsultan Perencanaan Pembuatan DED Peningkatan Jalan Simpang Penulisan-Pinggian 6 KM, sesuai Kep. Gub. Bali No: 7/03-D/HK/2019, tgl 5/3/2019	Bangli	Jasa Konsultan Perencanaan Pembuatan DED Peningkatan Jalan Simpang Penulisan-Pinggian 6 KM	7/03-D/HK/2019	05 March 2019	58.888.000,00	27 April 2020	Menurut juknis bidang jalan, selambat-lambatnya 3 bulan pada akhir pelaksanaan kegiatan
15	18630/SP2D/LS/4.0 1.00/2019	14/10/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten Bangli untuk Jasa Konsultan Perencanaan pembuatan DED Pembangunan Drainase tertutup pada ruas Jalan Lembean-Bunutin, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, sesuai Kep. Gub. Bali No: 7/03-D/HK/2019, tgl 5/3/2019	Bangli	Jasa Konsultan Perencanaan pembuatan DED Pembangunan Drainase tertutup pada ruas Jalan Lembean-Bunutin, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli	7/03-D/HK/2019	05 March 2019	43.907.000,00	27 April 2020	Menurut juknis bidang jalan, selambat-lambatnya 3 bulan pada akhir pelaksanaan kegiatan
16	18631/SP2D/LS/4.0 1.00/2019	14/10/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten Bangli untuk Jasa Konsultasi Pembangunan Jembatan Box Culvert pada ruas jalan Selulung-Kembang Sari, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, sesuai Kep. Gub. Bali No: 7/03-D/HK/2019, tgl 5/3/2019	Bangli	Jasa Konsultasi Pembangunan Jembatan Box Culvert pada ruas jalan Selulung-Kembang Sari, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli	7/03-D/HK/2019	05 March 2019	73.067.000,00	27 April 2020	Menurut juknis bidang jalan, selambat-lambatnya 3 bulan pada akhir pelaksanaan kegiatan
17	18661/SP2D/LS/4.0 1.00/2019	14/10/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten Bangli untuk Pembangunan Drainase tertutup pada ruas Jalan Lembean-Bunutin, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, sesuai Kep. Gub. Bali No: 7/03-D/HK/2019, tgl 5/3/2019	Bangli	Pembangunan Drainase tertutup pada ruas Jalan Lembean-Bunutin, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli	7/03-D/HK/2019	05 March 2019	813.998.000,00	27 April 2020	Menurut juknis bidang jalan, selambat-lambatnya 3 bulan pada akhir pelaksanaan kegiatan

No.	No SP2D	Tanggal SP2D	Uraian	Kabupaten	Peruntukkan menurut SK Gubernur	No Keputusan Gubernur (SK sdh diterima)	Tanggal Keputusan Gubernur	Realisasi Belanja Pemprov	Tanggal Penyampaian LPj ke BPKAD Pemprov	Keterangan
18	18691/SP2D/LS/4.0 1.00/2019	14/10/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten Bangli untuk Pembangunan Jembatan Box Culvert pada ruas jalan Selulung-Kembangsari, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, sesuai Kep. Gub. Bali No: 7/03-D/HK/2019, tgl 5/3/2019	Bangli	Pembangunan Jembatan Box Culvert pada ruas jalan Selulung-Kembangsari, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli	7/03-D/HK/2019	05 March 2019	1.616.876.000,00	27 April 2020	Menurut juknis bidang jalan, selambat-lambatnya 3 bulan pada akhir pelaksanaan kegiatan
19	18692/SP2D/LS/4.0 1.00/2019	14/10/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten Bangli untuk Peningkatan Jalan Simpang Penulisan - Pinggan 6 KM, sesuai Kep. Gub. Bali No: 7/03-D/HK/2019, tgl 5/3/2019	Bangli	Peningkatan Jalan Simpang Penulisan - Pinggan 6 KM	7/03-D/HK/2019	05 March 2019	10.691.453.893,00	27 April 2020	Menurut juknis bidang jalan, selambat-lambatnya 3 bulan pada akhir pelaksanaan kegiatan
20	19770/SP2D/LS/4.0 1.00/2019	29/10/2019	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Bangli untuk pembayaran sharing iuran peserta JKN PBI Daerah, Bulan Oktober 2019. Sesuai Kep. Gub. Bali 3/03-C/HK/2019, tanggal 21 Pebruari 2019	Bangli	pembayaran sharing iuran peserta JKN PBI Daerah, Bulan Oktober 2019	3/03-C/HK/2019	21 February 2019	1.410.884.400,00	27 April 2020	Menurut juknis JKN PBI Tahun 2019, paling lambat LPj tanggal 10 Januari 2020
21	23670/SP2D/LS/4.0 1.00/2019	02/12/2019	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Bangli untuk pembayaran sharing iuran peserta JKN PBI Daerah, Bulan Nopember 2019. Sesuai Kep. Gub. Bali 3/03-C/HK/2019, tanggal 21 Pebruari 2019	Bangli	pembayaran sharing iuran peserta JKN PBI Daerah, Bulan Nopember 2019	3/03-C/HK/2019	21 February 2019	1.409.805.240,00	27 April 2020	Menurut juknis JKN PBI Tahun 2019, paling lambat LPj tanggal 10 Januari 2020
22	25458/SP2D/LS/4.0 1.00/2019	09/12/2019	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Bangli untuk pembayaran sharing iuran peserta JKN PBI Daerah, Bulan Desember 2019. Sesuai Kep. Gub. Bali 3/03-C/HK/2019, tanggal 21 Pebruari 2019	Bangli	pembayaran sharing iuran peserta JKN PBI Daerah, Bulan Desember 2019	3/03-C/HK/2019	21 February 2019	1.420.972.200,00	27 April 2020	Menurut juknis JKN PBI Tahun 2019, paling lambat LPj tanggal 10 Januari 2020
23	04325/SP2D/LS/4.0 1.00/2019	22/04/2019	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Gianyar untuk pembayaran sharing iuran peserta JKN PBI Daerah, Bulan Januari s.d Maret 2019. Sesuai Kep. Gub. Bali 3/03-C/HK/2019, tanggal 21 Pebruari 2019	Gianyar	pembayaran sharing iuran peserta JKN PBI Daerah, Bulan Januari s.d Maret 2019	3/03-C/HK/2019	21 February 2019	3.349.867.200,00	15 Mei 2020	Menurut juknis JKN PBI Tahun 2019, paling lambat LPj tanggal 10 Januari 2020
24	08127/SP2D/LS/4.0 1.00/2019	13/06/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Sekaa/Sanggar dalam rangka Pesta Kesenian Bali kepada Kabupaten Gianyar, sesuai Kep.Gub.Bali No: 4/03-K/HK/2019, tgl 27 Pebruari 2019	Gianyar	Sekaa/Sanggar dalam rangka Pesta Kesenian Bali kepada Kabupaten Gianyar	4/03-K/HK/2019	27 February 2019	300.000.000,00	30 April 2020	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten/Kota menerima pertanggungjawaban dari penerima bantuan dan melaporkan ke Pemprov
25	08190/SP2D/LS/4.0 1.00/2019	14/06/2019	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Gianyar untuk pembayaran sharing iuran peserta JKN PBI Daerah, Bulan April dan Mei 2019. Sesuai Kep. Gub. Bali 3/03-C/HK/2019, tanggal 21 Pebruari 2019	Gianyar	pembayaran sharing iuran peserta JKN PBI Daerah, Bulan April dan Mei 2019	3/03-C/HK/2019	21 February 2019	2.215.268.000,00	15 Mei 2020	Menurut juknis JKN PBI Tahun 2019, paling lambat LPj tanggal 10 Januari 2020
26	13210/SP2D/LS/4.0 1.00/2019	12/08/2019	Belanja bantuan keuangan khusus kepada Kabupaten Gianyar dalam rangka penyelenggaraan akses free wifi untuk pemasangan wifi pada puskesmas, obyek wisata dan desa adat, sesuai Kep.Gub Bali No: 9/03-I/HK/2019, tgl 2/4/2019	Gianyar	penyelenggaraan akses free wifi untuk pemasangan wifi pada puskesmas, obyek wisata dan desa adat	9/03-I/HK/2019	02 April 2019	1.908.496.800,00	30 April 2020	Menurut juknis penyelenggaraan akses free wifi, paling lambat LPj diserahkan tiga bulan setelah pelaksanaan kegiatan

No.	No SP2D	Tanggal SP2D	Uraian	Kabupaten	Peruntukkan menurut SK Gubernur	No Keputusan Gubernur (SK sdh diterima)	Tanggal Keputusan Gubernur	Realisasi Belanja Pemprov	Tanggal Penyampaian LPj ke BPKAD Pemprov	Keterangan
27	13211/SP2D/LS/4.0 1.00/2019	12/08/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten Gianyar untuk Subak, sesuai Kep.Gub.Bali No: 6/03-S/HK/2019, tgl 27 Februari 2019	Gianyar	Subak	6/03-S/HK/2019	27 February 2019	1.900.000.000,00	15 Mei 2020	Menurut juknis BKK Desa Pakraman, Subak, dan Subak Abian Tahun 2019, paling lambat LPj tanggal 10 Januari 2020
28	13212/SP2D/LS/4.0 1.00/2019	12/08/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten Gianyar untuk Desa Pakraman, sesuai Kep.Gub.Bali No: 6/03-S/HK/2019, tgl 27 Februari 2019	Gianyar	Desa Pakraman	6/03-S/HK/2019	27 February 2019	4.250.000.000,00	30 April 2020	Menurut juknis BKK Desa Pakraman, Subak, dan Subak Abian Tahun 2019, paling lambat LPj tanggal 10 Januari 2020
29	13718/SP2D/LS/4.0 1.00/2019	19/08/2019	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Gianyar untuk pembayaran sharing iuran peserta JKN PBI Daerah, Bulan Juni dan Juli 2019. Sesuai Kep. Gub. Bali 3/03-C/HK/2019, tanggal 21 Pebruari 2019	Gianyar	pembayaran sharing iuran peserta JKN PBI Daerah, Bulan Juni dan Juli 2019	3/03-C/HK/2019	21 February 2019	2.197.217.600,00	15 Mei 2020	Menurut juknis JKN PBI Tahun 2019, paling lambat LPj tanggal 10 Januari 2020
30	29628/SP2D/LS/4.0 1.00/2019	26/12/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten Gianyar untuk pembangunan gedung olahraga (GOR) Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, sesuai Kep.Gub.Bali No: 8/03-D/HK/2019 tanggal 25/03/2019	Gianyar	pembangunan gedung olahraga (GOR) Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati	8/03-D/HK/2019	25 March 2019	2.908.450.000,00	15 Mei 2020	Menurut juknis bidang keciptakaryaan, selambat-lambatnya 3 bulan pada akhir pelaksanaan kegiatan
31	29629/SP2D/LS/4.0 1.00/2019	26/12/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten Gianyar untuk Pengadaan alat kesehatan pada Rumah Sakit Umum Payangan, sesuai Kep.Gub.Bali No: 13/03-C/HK/2019 tanggal 05/11/2019	Gianyar	Pengadaan alat kesehatan pada Rumah Sakit Umum Payangan	13/03-C/HK/2019	05 November 2019	7.497.164.815,00	30 April 2020	Penerima BKK wajib menyusun laporan capaian hasil kegiatan
32	29630/SP2D/LS/4.0 1.00/2019	26/12/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten Gianyar untuk peningkatan kualitas balai serbaguna Desa Kenderan, sesuai Kep.Gub.Bali No: 8/03-D/HK/2019 tanggal 25/03/2019	Gianyar	peningkatan kualitas balai serbaguna Desa Kenderan	8/03-D/HK/2019	25 March 2019	840.676.521,15	15 Mei 2020	Menurut juknis bidang keciptakaryaan, selambat-lambatnya 3 bulan pada akhir pelaksanaan kegiatan
33	06408/SP2D/LS/4.0 1.00/2019	20/05/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Sekaa/Sanggar dalam rangka Pesta Kesenian Bali kepada Kabupaten Jembrana, sesuai Kep.Gub.Bali No: 4/03-K/HK/2019, tgl 27 Pebruari 2019	Jembrana	Sekaa/Sanggar dalam rangka Pesta Kesenian Bali kepada Kabupaten Jembrana	4/03-K/HK/2019	27 February 2019	450.000.000,00	27 April 2020	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten/Kota menerima pertanggungjawaban dari penerima bantuan dan melaporkan ke Pemprov
34	06409/SP2D/LS/4.0 1.00/2019	20/05/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten Jembrana untuk pengendalian mobilisasi penduduk pendatang, sesuai Kep.Gub.Bali No: 2/03-Y/HK/2019, tanggal 13 Pebruari 2019, TA. 2019	Jembrana	pengendalian mobilisasi penduduk pendatang	2/03-Y/HK/2019	13 February 2019	500.000.000,00	27 April 2020	Laporan hasil operasional pengendalian mobilisasi penduduk disampaikan secara periodik, bulanan, triwulan, semester dan akhir Tahun
35	07953/SP2D/LS/4.0 1.00/2019	11/06/2019	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Jembrana untuk pembayaran sharing iuran peserta JKN PBI Daerah, Bulan Januari s.d Maret 2019. Sesuai Kep. Gub. Bali 3/03-C/HK/2019, tanggal 21 Pebruari 2019	Jembrana	pembayaran sharing iuran peserta JKN PBI Daerah, Bulan Januari s.d Maret 2019	3/03-C/HK/2019	21 February 2019	5.969.854.470,00	27 April 2020	Menurut juknis JKN PBI Tahun 2019, paling lambat LPj tanggal 10 Januari 2020
36	09664/SP2D/LS/4.0 1.00/2019	04/07/2019	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Jembrana untuk pembayaran sharing iuran peserta JKN PBI Daerah, Bulan April dan Mei 2019. Sesuai Kep. Gub. Bali 3/03-C/HK/2019, tanggal 21 Pebruari 2019	Jembrana	pembayaran sharing iuran peserta JKN PBI Daerah, Bulan April dan Mei 2019	3/03-C/HK/2019	21 February 2019	4.018.580.700,00	27 April 2020	Menurut juknis JKN PBI Tahun 2019, paling lambat LPj tanggal 10 Januari 2020

No.	No SP2D	Tanggal SP2D	Uraian	Kabupaten	Peruntukkan menurut SK Gubernur	No Keputusan Gubernur (SK sdh diterima)	Tanggal Keputusan Gubernur	Realisasi Belanja Pemprov	Tanggal Penyampaian LPj ke BPKAD Pemprov	Keterangan
37	12735/SP2D/LS/4.0 1.00/2019	07/08/2019	Belanja bantuan keuangan khusus kepada Kabupaten Jembrana dalam rangka penyelenggaraan akses free wifi untuk pemasangan wifi pada puskesmas, obyek wisata dan desa adat, sesuai Kep.Gub Bali No: 9/03-I/HK/2019, tgl 2/4/2019	Jembrana	penyelenggaraan akses free wifi untuk pemasangan wifi pada puskesmas, obyek wisata dan desa adat	9/03-I/HK/2019	02 April 2019	489.492.000,00	27 April 2020	Menurut juknis penyelenggaraan akses free wifi, paling lambat LPj diserahkan tiga bulan setelah pelaksanaan kegiatan
38	12779/SP2D/LS/4.0 1.00/2019	07/08/2019	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Jembrana untuk pembayaran sharing iuran peserta JKN PBI Daerah, Bulan Juli 2019. Sesuai Kep. Gub. Bali 3/03-C/HK/2019, tanggal 21 Pebruari 2019	Jembrana	pembayaran sharing iuran peserta JKN PBI Daerah, Bulan Juli 2019	3/03-C/HK/2019	21 February 2019	2.009.290.350,00	27 April 2020	Menurut juknis JKN PBI Tahun 2019, paling lambat LPj tanggal 10 Januari 2020
39	12780/SP2D/LS/4.0 1.00/2019	07/08/2019	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Jembrana untuk pembayaran sharing iuran peserta JKN PBI Daerah, Bulan Juni 2019. Sesuai Kep. Gub. Bali 3/03-C/HK/2019, tanggal 21 Pebruari 2019	Jembrana	pembayaran sharing iuran peserta JKN PBI Daerah, Bulan Juni 2019	3/03-C/HK/2019	21 February 2019	2.009.290.350,00	27 April 2020	Menurut juknis JKN PBI Tahun 2019, paling lambat LPj tanggal 10 Januari 2020
40	14616/SP2D/LS/4.0 1.00/2019	02/09/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten Jembrana untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian sesuai Kep.Gub.Bali No: 6/03-S/HK/2019, tgl 27 Februari 2019	Jembrana	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian	6/03-S/HK/2019	27 February 2019	3.750.000.000,00	27 April 2020	Menurut juknis BKK Desa Pakraman, Subak, dan Subak Abian Tahun 2019, paling lambat LPj tanggal 10 Januari 2020
41	14662/SP2D/LS/4.0 1.00/2019	02/09/2019	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Jembrana untuk pembayaran sharing iuran peserta JKN PBI Daerah, Bulan Agustus 2019. Sesuai Kep. Gub. Bali 3/03-C/HK/2019, tanggal 21 Pebruari 2019	Jembrana	pembayaran sharing iuran peserta JKN PBI Daerah, Bulan Agustus 2019	3/03-C/HK/2019	21 February 2019	2.009.290.350,00	27 April 2020	Menurut juknis JKN PBI Tahun 2019, paling lambat LPj tanggal 10 Januari 2020
42	16396/SP2D/LS/4.0 1.00/2019	20/09/2019	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Jembrana untuk pembayaran sharing iuran peserta JKN PBI Daerah, Bulan September 2019. Sesuai Kep. Gub. Bali 3/03-C/HK/2019, tanggal 21 Pebruari 2019	Jembrana	pembayaran sharing iuran peserta JKN PBI Daerah, Bulan September 2019	3/03-C/HK/2019	21 February 2019	2.009.290.350,00	27 April 2020	Menurut juknis JKN PBI Tahun 2019, paling lambat LPj tanggal 10 Januari 2020
43	19769/SP2D/LS/4.0 1.00/2019	29/10/2019	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Jembrana untuk pembayaran sharing iuran peserta JKN PBI Daerah, Bulan Oktober 2019. Sesuai Kep. Gub. Bali 3/03-C/HK/2019, tanggal 21 Pebruari 2019	Jembrana	pembayaran sharing iuran peserta JKN PBI Daerah, Bulan Oktober 2019	3/03-C/HK/2019	21 February 2019	2.009.290.350,00	27 April 2020	Menurut juknis JKN PBI Tahun 2019, paling lambat LPj tanggal 10 Januari 2020
44	25459/SP2D/LS/4.0 1.00/2019	09/12/2019	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Jembrana untuk pembayaran sharing iuran peserta JKN PBI Daerah, Bulan Nopember 2019. Sesuai Kep. Gub. Bali 3/03-C/HK/2019, tanggal 21 Pebruari 2019	Jembrana	pembayaran sharing iuran peserta JKN PBI Daerah, Bulan Nopember 2019	3/03-C/HK/2019	21 February 2019	2.009.290.350,00	27 April 2020	Menurut juknis JKN PBI Tahun 2019, paling lambat LPj tanggal 10 Januari 2020
45	25371/SP2D/LS/4.0 1.00/2019	09/12/2019	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Jembrana untuk Penyelenggaraan Festival Jegog Tahun 2019 Sesuai Kep. Gub. Bali 12/03-K/HK/2019, tanggal 5/11/2019	Jembrana	Penyelenggaraan Festival Jegog Tahun 2019	12/03-K/HK/2019	05 November 2019	1.000.000.000,00	27 April 2020	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten/Kota menerima pertanggungjawaban dari penerima bantuan dan melaporkan ke Pemrov
46	28460/SP2D/LS/4.0 1.00/2019	19/12/2019	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Jembrana untuk pembayaran sharing iuran peserta JKN PBI Daerah, Bulan Desember 2019. Sesuai Kep. Gub. Bali 3/03-C/HK/2019, tanggal 21 Pebruari 2019	Jembrana	pembayaran sharing iuran peserta JKN PBI Daerah, Bulan Desember 2019	3/03-C/HK/2019	21 February 2019	2.009.290.350,00	27 April 2020	Menurut juknis JKN PBI Tahun 2019, paling lambat LPj tanggal 10 Januari 2020

No.	No SP2D	Tanggal SP2D	Uraian	Kabupaten	Peruntukkan menurut SK Gubernur	No Keputusan Gubernur (SK sdh diterima)	Tanggal Keputusan Gubernur	Realisasi Belanja Pemprov	Tanggal Penyampaian LPj ke BPKAD Pemprov	Keterangan
47	04751/SP2D/LS/4.0 1.00/2019	03/05/2019	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Karangasem untuk pembayaran sharing iuran peserta JKN PBI Daerah, Bulan Januari s.d Maret 2019. Sesuai Kep. Gub. Bali 3/03-C/HK/2019, tanggal 21 Februari 2019	Karangasem	pembayaran sharing iuran peserta JKN PBI Daerah, Bulan Januari s.d Maret 2019	3/03-C/HK/2019	21 February 2019	7.030.293.390,00	28 April 2020	Menurut juknis JKN PBI Tahun 2019, paling lambat LPj tanggal 10 Januari 2020
48	08125/SP2D/LS/4.0 1.00/2019	13/06/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Sekaa/Sanggar dalam rangka Pesta Kesenian Bali kepada Kabupaten Karangasem, sesuai Kep.Gub.Bali No: 4/03-K/HK/2019, tgl 27 Pebruari 2019	Karangasem	Sekaa/Sanggar dalam rangka Pesta Kesenian Bali kepada Kabupaten Karangasem	4/03-K/HK/2019	27 February 2019	450.000.000,00	28 April 2020	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten/Kota menerima pertanggungjawaban dari penerima bantuan dan melaporkan ke Pemprov
49	08126/SP2D/LS/4.0 1.00/2019	13/06/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten Karangasem untuk pengendalian mobilisasi penduduk pendatang, sesuai Kep.Gub.Bali No: 2/03-Y/HK/2019, tanggal 13 Pebruari 2019, TA. 2019	Karangasem	pengendalian mobilisasi penduduk pendatang	2/03-Y/HK/2019	13 February 2019	300.000.000,00	28 April 2020	Laporan hasil operasional pengendalian mobilisasi penduduk disampaikan secara periodik, bulanan, triwulan, semester dan akhir Tahun
50	10284/SP2D/LS/4.0 1.00/2019	08/07/2019	Belanja bantuan keuangan khusus kepada Kabupaten Karangasem dalam rangka penyelenggaraan akses free wifi untuk pemasangan wifi pada puskesmas, obyek wisata dan desa adat, sesuai Kep.Gub Bali No: 9/03-I/HK/2019, tgl 2/4/2019	Karangasem	penyelenggaraan akses free wifi untuk pemasangan wifi pada puskesmas, obyek wisata dan desa adat	9/03-I/HK/2019	02 April 2019	1.193.500.000,00	28 April 2020	Menurut juknis penyelenggaraan akses free wifi, paling lambat LPj diserahkan tiga bulan setelah pelaksanaan kegiatan
51	10283/SP2D/LS/4.0 1.00/2019	08/07/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten Karangasem untuk Desa Pakraman, sesuai Kep.Gub.Bali No: 6/03-S/HK/2019, tgl 27 Februari 2019	Karangasem	Desa Pakraman	6/03-S/HK/2019	27 February 2019	3.000.000.000,00	28 April 2020	Menurut juknis BKK Desa Pakraman, Subak, dan Subak Abian Tahun 2019, paling lambat LPj tanggal 10 Januari 2020
52	10285/SP2D/LS/4.0 1.00/2019	08/07/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten Karangasem untuk Subak, sesuai Kep.Gub.Bali No: 6/03-S/HK/2019, tgl 27 Februari 2019	Karangasem	Subak	6/03-S/HK/2019	27 February 2019	1.150.000.000,00	28 April 2020	Menurut juknis BKK Desa Pakraman, Subak, dan Subak Abian Tahun 2019, paling lambat LPj tanggal 10 Januari 2020
53	11484/SP2D/LS/4.0 1.00/2019	22/07/2019	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Karangasem untuk pembayaran sharing iuran peserta JKN PBI Daerah, Bulan April s.d Juni 2019. Sesuai Kep. Gub. Bali 3/03-C/HK/2019, tanggal 21 Februari 2019	Karangasem	pembayaran sharing iuran peserta JKN PBI Daerah, Bulan April s.d Juni 2019	3/03-C/HK/2019	21 February 2019	7.710.445.710,00	28 April 2020	Menurut juknis JKN PBI Tahun 2019, paling lambat LPj tanggal 10 Januari 2020
54	18540/SP2D/LS/4.0 1.00/2019	11/10/2019	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Karangasem untuk pembayaran sharing iuran peserta JKN PBI Daerah Triwulan III Tahun 2019. Sesuai Kep. Gub. Bali 3/03-C/HK/2019, tanggal 21 Februari 2019	Karangasem	pembayaran sharing iuran peserta JKN PBI Daerah Triwulan III Tahun 2019	3/03-C/HK/2019	21 February 2019	7.686.575.160,00	28 April 2020	Menurut juknis JKN PBI Tahun 2019, paling lambat LPj tanggal 10 Januari 2020
55	20145/SP2D/LS/4.0 1.00/2019	05/11/2019	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Karangasem untuk pembayaran sharing iuran peserta JKN PBI Daerah, Bulan Oktober 2019. Sesuai Kep. Gub. Bali 3/03-C/HK/2019, tanggal 21 Februari 2019	Karangasem	pembayaran sharing iuran peserta JKN PBI Daerah, Bulan Oktober 2019	3/03-C/HK/2019	21 February 2019	2.379.242.820,00	28 April 2020	Menurut juknis JKN PBI Tahun 2019, paling lambat LPj tanggal 10 Januari 2020
56	29671/SP2D/LS/4.0 1.00/2019	26/12/2019	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Karangasem untuk pembayaran sharing iuran peserta JKN PBI Daerah, Bulan Nopember dan Desember 2019. Sesuai Kep. Gub. Bali 3/03-C/HK/2019, tanggal 21 Februari 2019	Karangasem	pembayaran sharing iuran peserta JKN PBI Daerah, Bulan Desember 2019	3/03-C/HK/2019	21 February 2019	4.784.115.690,00	28 April 2020	Menurut juknis JKN PBI Tahun 2019, paling lambat LPj tanggal 10 Januari 2020

Pelaporan Pertanggungjawaban BKK Desa Melebihi Batas Waktu yang Ditentukan

No.	No SP2D	Tanggal SP2D	Uraian	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Peruntukkan	Realisasi Belanja	Penyampaian LP			Nilai LPj (Rp)	Kelengkapan LPj
									Tanggal	Bulan	Tahun		
1	17024/SP2D/LS /4.01.00/2019	02/10/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Bongkasa, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-S/HK/2019 tanggal	Badung	Abiansemal	Bongkasa	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	600.000.000,00	12 / 1 / 2020			600.000.000,00	Lengkap
2	12666/SP2D/LS /4.01.00/2019	07/08/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Belok/Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-S/HK/2019 tanggal	Badung	Petang	Belok/Sidan	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	2.050.000.000,00	13 / 1 / 2020			2.050.000.000,00	Lengkap
3	10301/SP2D/LS /4.01.00/2019	08/07/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Mekar Bhuana, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-S/HK/2019 tanggal	Badung	Abiansemal	Mekar Bhuana	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	1.350.000.000,00	13 / 1 / 2020			1.350.000.000,00	Lengkap
4	09576/SP2D/LS /4.01.00/2019	03/07/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Sulangai, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian TA.2019 sesuai Kep Gub Bali No: 5/03-S/HK/2019, tgl 27/2/19	Badung	Petang	Sulangai	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian TA.2019	1.100.000.000,00	13 / 1 / 2020			1.100.000.000,00	Lengkap
5	12615/SP2D/LS /4.01.00/2019	07/08/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Bonyoh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-S/HK/2019 tanggal	Bangli	Kintamani	Bonyoh	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	400.000.000,00	13 / 1 / 2020			400.000.000,00	Lengkap
6	14076/SP2D/LS /4.01.00/2019	23/08/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Sera, Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-S/HK/2019 tanggal	Bangli	Kintamani	Sera	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	400.000.000,00	13 / 1 / 2020			400.000.000,00	Lengkap
7	11889/SP2D/LS /4.01.00/2019	29/07/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Susut, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-S/HK/2019 tanggal	Bangli	Susut	Susut	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	2.600.000.000,00	13 / 1 / 2020			2.600.000.000,00	Lengkap
8	11114/SP2D/LS /4.01.00/2019	15/07/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian TA.2019 sesuai Kep Gub Bali No: 5/03-S/HK/2019, tgl 27/2/19	Buleleng	Seririt	Banjarasem	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian TA.2019	950.000.000,00	13 / 1 / 2020			937.350.000,00	Lengkap
9	13687/SP2D/LS /4.01.00/2019	19/08/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-S/HK/2019 tanggal	Buleleng	Tejakula	Julah	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	350.000.000,00	13 / 1 / 2020			350.000.000,00	Lengkap
10	17481/SP2D/LS /4.01.00/2019	03/10/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Pedawa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-S/HK/2019 tanggal	Buleleng	Banjar	Pedawa	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	400.000.000,00	13 / 1 / 2020			400.000.000,00	Lengkap
11	13029/SP2D/LS /4.01.00/2019	12/08/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-S/HK/2019 tanggal	Buleleng	Sukasada	Sambangan	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	500.000.000,00	13 / 1 / 2020			500.000.000,00	Lengkap
12	12476/SP2D/LS /4.01.00/2019	06/08/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Batuan Kaler, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-S/HK/2019 tanggal	Gianyar	Sukawati	Batuan Kaler	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	550.000.000,00	13 / 1 / 2020			550.000.000,00	Lengkap
13	12614/SP2D/LS /4.01.00/2019	07/08/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Bona, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-S/HK/2019 tanggal	Gianyar	Blahbatuh	Bona	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	500.000.000,00	13 / 1 / 2020			500.000.000,00	Lengkap
14	12668/SP2D/LS /4.01.00/2019	07/08/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-S/HK/2019 tanggal	Gianyar	Payangan	Kelusa	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	1.050.000.000,00	13 / 1 / 2020			1.050.000.000,00	Lengkap
15	12669/SP2D/LS /4.01.00/2019	07/08/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Melinggh, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-S/HK/2019 tanggal	Gianyar	Payangan	Melinggh	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	1.400.000.000,00	13 / 1 / 2020			1.400.000.000,00	Lengkap
16	14098/SP2D/LS /4.01.00/2019	23/08/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-S/HK/2019 tanggal	Gianyar	Blahbatuh	Pering	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	1.750.000.000,00	13 / 1 / 2020			1.750.000.000,00	Lengkap
17	10792/SP2D/LS /4.01.00/2019	12/07/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Mendoyo Daging Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian TA.2019 sesuai Kep Gub Bali No: 5/03-S/HK/2019, tgl 27/2/19	Jembrana	Mendoyo	Mendoyo Daging Tukad	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian TA.2019	350.000.000,00	13 / 1 / 2020			350.000.000,00	Lengkap
18	09242/SP2D/LS /4.01.00/2019	28/06/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian TA.2019 sesuai Kep Gub Bali No: 5/03-S/HK/2019, tgl 27/2/19	Jembrana	Mendoyo	Mendoyo Dauh Tukad	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian TA.2019	500.000.000,00	13 / 1 / 2020			500.000.000,00	Lengkap
19	09671/SP2D/LS /4.01.00/2019	04/07/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-S/HK/2019 tanggal	Jembrana	Mendoyo	Pohsanten	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	550.000.000,00	13 / 1 / 2020			550.000.000,00	Lengkap
20	12673/SP2D/LS /4.01.00/2019	07/08/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Nangan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-S/HK/2019 tanggal	Karangasem	Rendang	Nongan	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	1.150.000.000,00	13 / 1 / 2020			1.150.000.000,00	Lengkap
21	11113/SP2D/LS /4.01.00/2019	15/07/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Pertama, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian TA.2019 sesuai Kep Gub Bali No: 5/03-S/HK/2019, tgl 27/2/19	Karangasem	Karangasem	Pertama	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian TA.2019	1.100.000.000,00	13 / 1 / 2020			1.100.000.000,00	Lengkap
22	15641/SP2D/LS /4.01.00/2019	09/09/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian TA.2019 sesuai Kep Gub Bali No: 5/03-S/HK/2019, tgl 27/2/19	Karangasem	Kubu	Tianyar Tengah	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian TA.2019	950.000.000,00	13 / 1 / 2020			950.000.000,00	Lengkap
23	14091/SP2D/LS /4.01.00/2019	23/08/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Pidpid, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-S/HK/2019 tanggal	Karangasem	Abang	Pidpid	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	50.000.000,00	13 / 1 / 2020			50.000.000,00	Lengkap
24	10312/SP2D/LS /4.01.00/2019	08/07/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-S/HK/2019 tanggal	Klungkung	Nusa Penida	Kutampi Kaler	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	800.000.000,00	13 / 1 / 2020			800.000.000,00	Lengkap

No.	No SP2D	Tanggal SP2D	Uraian	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Peruntukkan	Realisasi Belanja	Penyampaian LPJ			Nilai LPJ (Rp)	Kelengkapan LPJ
									Tanggal	Bulan	Tahun		
25	10265/SP2D/LS/4.01.00/2019	08/07/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-S/HK/2019 tanggal	Klungkung	Banjarangkan	Nyanglan	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	300.000.000,00	13 / 1 / 2020		300.000.000,00	Lengkap	
26	10307/SP2D/LS/4.01.00/2019	08/07/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Paksebal, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-S/HK/2019 tanggal	Klungkung	Dawan	Paksebal	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	400.000.000,00	13 / 1 / 2020		400.000.000,00	Lengkap	
27	10310/SP2D/LS/4.01.00/2019	08/07/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Timuhun, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-S/HK/2019 tanggal	Klungkung	Banjarangkan	Timuhun	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	300.000.000,00	13 / 1 / 2020		300.000.000,00	Lengkap	
28	13682/SP2D/LS/4.01.00/2019	19/08/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Belimbing, Kecamatan Pupuan, Kab. Tabanan untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-S/HK/2019 tanggal	Tabanan	Pupuan	Belimbing	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	1.100.000.000,00	13 / 1 / 2020		1.100.000.000,00	Lengkap	
29	15650/SP2D/LS/4.01.00/2019	09/09/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian TA.2019 sesuai Kep Gub Bali No: 5/03-S/HK/2019, tgl 27/2/19	Tabanan	Baturiti	Candikuning	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian TA.2019	1.450.000.000,00	13 / 1 / 2020		1.450.000.000,00	Lengkap	
30	10299/SP2D/LS/4.01.00/2019	08/07/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Darmasaba Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-S/HK/2019 tanggal	Badung	Abiansemal	Darmasaba	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	700.000.000,00	14 / 1 / 2020		700.000.000,00	Lengkap	
31	13076/SP2D/LS/4.01.00/2019	12/08/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Sembung, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-S/HK/2019 tanggal	Badung	Mengwi	Sembung	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	1.050.000.000,00	14 / 1 / 2020		1.050.000.000,00	Lengkap	
32	11890/SP2D/LS/4.01.00/2019	29/07/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-S/HK/2019 tanggal	Bangli	Susut	Sulahan	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	2.550.000.000,00	14 / 1 / 2020		2.550.000.000,00	Lengkap	
33	09287/SP2D/LS/4.01.00/2019	01/07/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Penglatan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian TA.2019 sesuai Kep Gub Bali No: 5/03-S/HK/2019, tgl 27/2/19	Buleleng	Buleleng	Penglatan	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian TA.2019	350.000.000,00	14 / 1 / 2020		350.000.000,00	Lengkap	
34	13027/SP2D/LS/4.01.00/2019	12/08/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Petandakan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-S/HK/2019 tanggal	Buleleng	Buleleng	Petandakan	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	450.000.000,00	14 / 1 / 2020		450.000.000,00	Lengkap	
35	14613/SP2D/LS/4.01.00/2019	02/09/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Poh Bergong, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-S/HK/2019 tanggal	Buleleng	Buleleng	Poh Bergong	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	550.000.000,00	14 / 1 / 2020		550.000.000,00	Lengkap	
36	15234/SP2D/LS/4.01.00/2019	04/09/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-S/HK/2019 tanggal	Buleleng	Sukasada	Selat	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	850.000.000,00	14 / 1 / 2020		850.000.000,00	Lengkap	
37	11925/SP2D/LS/4.01.00/2019	30/07/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-S/HK/2019 tanggal	Buleleng	Tejakula	Sembiran	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	600.000.000,00	14 / 1 / 2020		600.000.000,00	Lengkap	
38	08575/SP2D/LS/4.01.00/2019	20/08/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian TA.2019 sesuai Kep Gub Bali No: 5/03-S/HK/2019, tgl 27/2/19	Buleleng	Gerokgak	Sumberklampok	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian TA.2019	250.000.000,00	14 / 1 / 2020		250.000.000,00	Lengkap	
39	10787/SP2D/LS/4.01.00/2019	12/07/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Pering Sari, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-S/HK/2019 tanggal	Karangasem	Selat	Pering Sari	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	900.000.000,00	14 / 1 / 2020		900.000.000,00	Lengkap	
40	14092/SP2D/LS/4.01.00/2019	23/08/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Sukadana, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-S/HK/2019 tanggal	Karangasem	Kubu	Sukadana	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	1.750.000.000,00	14 / 1 / 2020		1.750.000.000,00	Lengkap	
41	11120/SP2D/LS/4.01.00/2019	15/07/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian TA.2019 sesuai Kep Gub Bali No: 5/03-S/HK/2019, tgl 27/2/19	Klungkung	Banjarangkan	Takmung	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian TA.2019	1.700.000.000,00	14 / 1 / 2020		1.700.000.000,00	Lengkap	
42	11412/SP2D/LS/4.01.00/2019	22/07/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-S/HK/2019 tanggal	Klungkung	Banjarangkan	Tusan	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	850.000.000,00	14 / 1 / 2020		850.000.000,00	Lengkap	
43	12483/SP2D/LS/4.01.00/2019	06/08/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Sumerta Kauh, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-S/HK/2019 tanggal	Kota Denpasar	Denpasar Timur	Sumerta Kauh	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	250.000.000,00	14 / 1 / 2020		250.000.000,00	Lengkap	
44	13160/SP2D/LS/4.01.00/2019	12/08/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Samsam, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-S/HK/2019 tanggal	Tabanan	Kerambitan	Samsam	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	1.300.000.000,00	14 / 1 / 2020		1.300.000.000,00	Lengkap	
45	11421/SP2D/LS/4.01.00/2019	22/07/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Gulingan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-S/HK/2019 tanggal	Badung	Mengwi	Gulingan	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	600.000.000,00	15 / 1 / 2020		600.000.000,00	Lengkap	
46	11321/SP2D/LS/4.01.00/2019	17/07/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-S/HK/2019 tanggal	Badung	Mengwi	Mengwitani	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	600.000.000,00	15 / 1 / 2020		600.000.000,00	Lengkap	
47	10298/SP2D/LS/4.01.00/2019	08/07/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Abiansemal Dauh yeh Cani, Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-S/HK/2019 tanggal	Badung	Abiansemal	Abiansemal Dauh yeh Cani	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	150.000.000,00	15 / 1 / 2020		150.000.000,00	Lengkap	
48	11887/SP2D/LS/4.01.00/2019	29/07/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Penglumbaran, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-S/HK/2019 tanggal	Bangli	Susut	Penglumbaran	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	1.850.000.000,00	15 / 1 / 2020		1.850.000.000,00	Lengkap	

No.	No SP2D	Tanggal SP2D	Uraian	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Peruntukkan	Realisasi Belanja	Penyampaian LPJ			Nilai LPJ (Rp)	Kelengkapan LPJ
									Tanggal	Bulan	Tahun		
49	13685/SP2D/LS/4.01.00/2019	19/08/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) Kepada Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-SHK/2019 tanggal	Buleleng	Kubutambahan	Kubutambahan	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	700.000.000,00	15 / 1 / 2020			700.000.000,00	Lengkap
50	14085/SP2D/LS/4.01.00/2019	23/08/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) Kepada Desa Telaga, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-SHK/2019 tanggal	Buleleng	Busungbiu	Telaga	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	350.000.000,00	15 / 1 / 2020			350.000.000,00	Lengkap
51	16722/SP2D/LS/4.01.00/2019	26/09/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) Kepada Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-SHK/2019 tanggal	Buleleng	Banjar	Temukus	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	500.000.000,00	15 / 1 / 2020			500.000.000,00	Lengkap
52	17142/SP2D/LS/4.01.00/2019	02/10/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) Kepada Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-SHK/2019 tanggal	Kota Denpasar	Denpasar Selatan	Sanur Kauh	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	350.000.000,00	15 / 1 / 2020			350.000.000,00	Lengkap
53	13122/SP2D/LS/4.01.00/2019	12/08/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) Kepada Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-SHK/2019 tanggal	Tabanan	Kediri	Banjar Anyar	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	1.200.000.000,00	15 / 1 / 2020			1.200.000.000,00	Lengkap
54	12228/SP2D/LS/4.01.00/2019	02/08/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) Kepada Desa Antosari, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-SHK/2019 tanggal	Tabanan	Selemadeg Barat	Antosari	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	800.000.000,00	15 / 1 / 2020			800.000.000,00	Lengkap
55	11802/SP2D/LS/4.01.00/2019	29/07/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) Kepada Desa Kukum, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-SHK/2019 tanggal	Badung	Mengwi	Kukum	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	800.000.000,00	16 / 1 / 2020			800.000.000,00	Lengkap
56	12665/SP2D/LS/4.01.00/2019	07/08/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) Kepada Desa Jehem, Kecamatan Tembuk, Kabupaten Bangli untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-SHK/2019 tanggal	Bangli	Tembuku	Jehem	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	2.900.000.000,00	16 / 1 / 2020			2.900.000.000,00	Lengkap
57	11891/SP2D/LS/4.01.00/2019	29/07/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) Kepada Desa Tamanbali, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-SHK/2019 tanggal	Bangli	Bangli	Tamanbali	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	1.970.100.000,00	16 / 1 / 2020			1.809.220.000,00	Lengkap
58	10804/SP2D/LS/4.01.00/2019	12/07/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) kepada Desa Jinengdalem, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian TA.2019 sesuai Kep Gub Bali No: 5/03-SHK/2019, tgl 27/2/19	Buleleng	Buleleng	Jinengdalem	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian TA.2019	400.000.000,00	16 / 1 / 2020			400.000.000,00	Lengkap
59	09585/SP2D/LS/4.01.00/2019	04/07/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) Kepada Desa Mayong Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-SHK/2019 tanggal	Buleleng	Seririt	Mayong	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	400.000.000,00	16 / 1 / 2020			400.000.000,00	Lengkap
60	08497/SP2D/LS/4.01.00/2019	20/06/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) kepada Desa Munduk Bestala, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian TA.2019 sesuai Kep Gub Bali No: 5/03-SHK/2019, tgl 27/2/19	Buleleng	Seririt	Munduk Bestala	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian TA.2019	350.000.000,00	16 / 1 / 2020			350.000.000,00	Lengkap
61	12475/SP2D/LS/4.01.00/2019	06/08/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) Kepada Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-SHK/2019 tanggal	Gianyar	Sukawati	Batubulan Kangin	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	900.000.000,00	16 / 1 / 2020			900.000.000,00	Lengkap
62	13420/SP2D/LS/4.01.00/2019	15/08/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) Kepada Desa Buah Kaja, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-SHK/2019 tanggal	Gianyar	Payangan	Buahan Kaja	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	2.650.000.000,00	16 / 1 / 2020			2.650.000.000,00	Lengkap
63	11885/SP2D/LS/4.01.00/2019	30/07/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) Kepada Desa Pejeng Kangin, Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-SHK/2019 tanggal	Gianyar	Tampaksiring	Pejeng Kangin	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	1.550.000.000,00	16 / 1 / 2020			1.550.000.000,00	Lengkap
64	16717/SP2D/LS/4.01.00/2019	26/09/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) Kepada Desa Sangkan Gunung, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-SHK/2019 tanggal	Karangasem	Sidemen	Sangkan Gunung	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	1.650.000.000,00	16 / 1 / 2020			1.650.000.000,00	Lengkap
65	15642/SP2D/LS/4.01.00/2019	09/09/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) kepada Desa Sinduwati, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian TA.2019 sesuai Kep Gub Bali No: 5/03-SHK/2019, tgl 27/2/19	Karangasem	Sidemen	Sinduwati	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian TA.2019	450.000.000,00	16 / 1 / 2020			450.000.000,00	Lengkap
66	11048/SP2D/LS/4.01.00/2019	15/07/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) kepada Desa Klungku, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian TA.2019 sesuai Kep Gub Bali No: 5/03-SHK/2019, tgl 27/2/19	Klungkung	Nusa Penida	Klumpu	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian TA.2019	1.100.000.000,00	16 / 1 / 2020			1.100.000.000,00	Lengkap
67	11812/SP2D/LS/4.01.00/2019	29/07/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) Kepada Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-SHK/2019 tanggal	Klungkung	Nusa Penida	Ped	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	800.000.000,00	16 / 1 / 2020			800.000.000,00	Lengkap
68	11068/SP2D/LS/4.01.00/2019	15/07/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) kepada Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian TA.2019 sesuai Kep Gub Bali No: 5/03-SHK/2019, tgl 27/2/19	Klungkung	Dawan	Pikat	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian TA.2019	1.000.000.000,00	16 / 1 / 2020			1.000.000.000,00	Lengkap
69	11117/SP2D/LS/4.01.00/2019	15/07/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) kepada Desa Tohpati, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian TA.2019 sesuai Kep Gub Bali No: 5/03-SHK/2019, tgl 27/2/19	Klungkung	Banjarangkan	Tohpati	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian TA.2019	300.000.000,00	16 / 1 / 2020			300.000.000,00	Lengkap
70	15653/SP2D/LS/4.01.00/2019	09/09/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) kepada Desa Bangli, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian TA.2019 sesuai Kep Gub Bali No: 5/03-SHK/2019, tgl 27/2/19	Tabanan	Baturiti	Bangli	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian TA.2019	2.100.000.000,00	16 / 1 / 2020			2.100.000.000,00	Lengkap
71	11795/SP2D/LS/4.01.00/2019	29/07/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) Kepada Desa Selabih, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-SHK/2019 tanggal	Tabanan	Selemadeg Barat	Selabih	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	400.000.000,00	16 / 1 / 2020			400.000.000,00	Lengkap
72	11404/SP2D/LS/4.01.00/2019	22/07/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) Kepada Desa Subamia, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-SHK/2019 tanggal	Tabanan	Tabanan	Subamia	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	450.000.000,00	16 / 1 / 2020			450.000.000,00	Lengkap
73	12618/SP2D/LS/4.01.00/2019	07/08/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) Kepada Desa Langgahan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-SHK/2019 tanggal	Bangli	Kintamani	Langgahan	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	500.000.000,00	17 / 1 / 2020			500.000.000,00	Lengkap

No.	No SP2D	Tanggal SP2D	Uraian	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Peruntukkan	Realisasi Belanja	Penyampaian LPJ			Nilai LPJ (Rp)	Kelengkapan LPJ		
									Tanggal	Bulan	Tahun				
74	14615/SP2D/LS/4.01.00/2019	02/09/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) Kepada Desa Sekumpul, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-SHK/2019 tanggal	Buleleng	Sawan	Sekumpul	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	650.000.000,00	17	/	1	/	2020	650.000.000,00	Lengkap
75	14097/SP2D/LS/4.01.00/2019	23/08/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) Kepada Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-SHK/2019 tanggal	Gianyar	Blahbatuh	Medahan	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	900.000.000,00	17	/	1	/	2020	900.000.000,00	Lengkap
76	11810/SP2D/LS/4.01.00/2019	29/07/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) Kepada Desa Jumpai, Kecamatan Jumpai, Kabupaten Klungkung untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-SHK/2019 tanggal	Klungkung	Klungkung	Jumpai	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	250.000.000,00	17	/	1	/	2020	250.000.000,00	Lengkap
77	16085/SP2D/LS/4.01.00/2019	13/09/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) Kepada Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-SHK/2019 tanggal	Kota Denpasar	Denpasar Selatan	Pemogan	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	600.000.000,00	17	/	1	/	2020	600.000.000,00	Lengkap
78	16373/SP2D/LS/4.01.00/2019	19/09/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) Kepada Desa Peraan Tengah, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-SHK/2019 tanggal	Tabanan	Baturiti	Peraan Tengah	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	1.100.000.000,00	17	/	1	/	2020	1.100.000.000,00	Lengkap
79	16101/SP2D/LS/4.01.00/2019	13/09/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) Kepada Desa Selanbawak, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-SHK/2019 tanggal	Tabanan	Marga	Selanbawak	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	300.000.000,00	17	/	1	/	2020	300.000.000,00	Lengkap
80	12867/SP2D/LS/4.01.00/2019	07/08/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) Kepada Desa Mambal, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-SHK/2019 tanggal	Badung	Abiansemal	Mambal	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	1.050.000.000,00	20	/	1	/	2020	940.000.000,00	Lengkap
81	15643/SP2D/LS/4.01.00/2019	09/09/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) kepada Desa Munggu Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian TA.2019 sesuai Kep Gub Bali No: 5/03-SHK/2019, tgl 27/2/19	Badung	Mengwi	Munggu	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian TA.2019	850.000.000,00	20	/	1	/	2020	850.000.000,00	Lengkap
82	13037/SP2D/LS/4.01.00/2019	12/08/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) Kepada Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-SHK/2019 tanggal	Bangli	Tembuku	Bangbang	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	1.250.000.000,00	20	/	1	/	2020	1.250.000.000,00	Lengkap
83	12621/SP2D/LS/4.01.00/2019	07/08/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) Kepada Desa Batur Tengah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-SHK/2019 tanggal	Bangli	Kintamani	Batur Tengah	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	350.000.000,00	20	/	1	/	2020	350.000.000,00	Lengkap
84	17482/SP2D/LS/4.01.00/2019	03/10/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) Kepada Desa Cempaga, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-SHK/2019 tanggal	Buleleng	Banjar	Cempaga	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	350.000.000,00	20	/	1	/	2020	350.000.000,00	Lengkap
85	16102/SP2D/LS/4.01.00/2019	13/09/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) Kepada Desa Belega, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-SHK/2019 tanggal	Gianyar	Blahbatuh	Belega	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	900.000.000,00	20	/	1	/	2020	900.000.000,00	Lengkap
86	11422/SP2D/LS/4.01.00/2019	22/07/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) Kepada Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-SHK/2019 tanggal	Badung	Mengwi	Buduk	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	450.000.000,00	21	/	1	/	2020	450.000.000,00	Lengkap
87	14598/SP2D/LS/4.01.00/2019	02/09/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) Kepada Desa Werd Bhuwana, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-SHK/2019 tanggal	Badung	Mengwi	Werd Bhuwana	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	800.000.000,00	21	/	1	/	2020	800.000.000,00	Lengkap
88	16724/SP2D/LS/4.01.00/2019	26/09/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) Kepada Desa Ayunan, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-SHK/2019 tanggal	Badung	Abiansemal	Ayunan	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	650.000.000,00	21	/	1	/	2020	650.000.000,00	Lengkap
89	11959/SP2D/LS/4.01.00/2019	02/08/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) kepada Desa Tembuku, Kec. Tembuku, Kab. Bangli untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai Kep Gub No 5/03-SHK/2019	Bangli	Tembuku	Tembuku	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	2.100.000.000,00	21	/	1	/	2020	2.100.000.000,00	Lengkap
90	13131/SP2D/LS/4.01.00/2019	12/08/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) Kepada Desa Bonthing, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-SHK/2019 tanggal	Buleleng	Kubutambahan	Bonthing	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	600.000.000,00	21	/	1	/	2020	600.000.000,00	Lengkap
91	13913/SP2D/LS/4.01.00/2019	21/08/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) Kepada Desa Tambakan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-SHK/2019 tanggal	Buleleng	Kubutambahan	Tambakan	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	500.000.000,00	21	/	1	/	2020	500.000.000,00	Lengkap
92	13032/SP2D/LS/4.01.00/2019	12/08/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) Kepada Desa Pejeng Kaja, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-SHK/2019 tanggal	Gianyar	Tampaksiring	Pejeng Kaja	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	1.450.000.000,00	21	/	1	/	2020	1.450.000.000,00	Lengkap
93	14015/SP2D/LS/4.01.00/2019	23/08/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) Kepada Desa Pejeng, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-SHK/2019 tanggal	Gianyar	Tampaksiring	Pejeng	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	1.050.000.000,00	21	/	1	/	2020	1.050.000.000,00	Lengkap
94	09867/SP2D/LS/4.01.00/2019	05/07/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) Kepada Desa Sulang, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-SHK/2019 tanggal	Klungkung	Dawan	Sulang	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	750.000.000,00	21	/	1	/	2020	750.000.000,00	Lengkap
95	11877/SP2D/LS/4.01.00/2019	29/07/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) Kepada Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-SHK/2019 tanggal	Tabanan	Baturiti	Baturiti	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	1.150.000.000,00	21	/	1	/	2020	1.150.000.000,00	Lengkap
96	15451/SP2D/LS/4.01.00/2019	05/09/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) Kepada Desa Sengaran, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-SHK/2019 tanggal	Tabanan	Penebel	Sengaran	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	2.550.000.000,00	21	/	1	/	2020	2.550.000.000,00	Lengkap
97	11798/SP2D/LS/4.01.00/2019	29/07/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) Kepada Desa Sibanggede, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-SHK/2019 tanggal	Badung	Abiansemal	Sibanggede	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	550.000.000,00	22	/	1	/	2020	550.000.000,00	Lengkap

No.	No SP2D	Tanggal SP2D	Uraian	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Peruntukkan	Realisasi Belanja	Penyampaian LPJ			Nilai LPJ (Rp)	Kelengkapan LPJ
									Tanggal	Bulan	Tahun		
98	17025/SP2D/LS/4.01.00/2019	02/10/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) Kepada Desa Abiansemal, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-S/HK/2019 tanggal	Badung	Abiansemal	Abiansemal	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	600.000.000,00	22 / 1 / 2020			600.000.000,00	Lengkap
99	14607/SP2D/LS/4.01.00/2019	02/09/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) Kepada Desa Pujon Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-S/HK/2019 tanggal	Bangli	Susut	Apuan	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	1.000.000.000,00	22 / 1 / 2020			1.000.000.000,00	Lengkap
100	17022/SP2D/LS/4.01.00/2019	02/10/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) Kepada Desa Kertha Buana, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-S/HK/2019 tanggal	Karangasem	Sidemen	Kertha Buana	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	300.000.000,00	22 / 1 / 2020			300.000.000,00	Lengkap
101	08503/SP2D/LS/4.01.00/2019	20/06/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) kepada Desa Bongkasa Pertiwi, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali No: 5/03-S/HK/2019, tgl 27/2/19	Badung	Abiansemal	Bongkasa Pertiwi	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian TA.2019	300.000.000,00	27 / 1 / 2020			300.000.000,00	Lengkap
102	11426/SP2D/LS/4.01.00/2019	22/07/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) Kepada Desa Suwug, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-S/HK/2019 tanggal	Buleleng	Sawan	Suwug	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	600.000.000,00	27 / 1 / 2020			600.000.000,00	Lengkap
103	14619/SP2D/LS/4.01.00/2019	02/09/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) Kepada Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-S/HK/2019 tanggal	Buleleng	Tejakula	Tejakula	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	300.000.000,00	27 / 1 / 2020			300.000.000,00	Lengkap
104	17023/SP2D/LS/4.01.00/2019	02/10/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) Kepada Desa Labasari, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-S/HK/2019 tanggal	Karangasem	Abang	Labasari	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	550.000.000,00	27 / 1 / 2020			550.000.000,00	Lengkap
105	11118/SP2D/LS/4.01.00/2019	15/07/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) kepada Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian TA.2019 sesuai Kep Gub Bali No: 5/03-S/HK/2019, tgl 27/2/19	Klungkung	Klungkung	Selat	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian TA.2019	2.050.000.000,00	27 / 1 / 2020			2.050.000.000,00	Lengkap
106	10249/SP2D/LS/4.01.00/2019	08/07/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) Kepada Desa Marga Dauh Puri, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-S/HK/2019 tanggal	Tabanan	Marga	Marga Dauh Puri	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	600.000.000,00	27 / 1 / 2020			600.000.000,00	Lengkap
107	11402/SP2D/LS/4.01.00/2019	22/07/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) Kepada Desa Pupan Sawah, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-S/HK/2019 tanggal	Tabanan	Selemadeg	Pupan Sawah	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	1.100.000.000,00	27 / 1 / 2020			1.100.000.000,00	Lengkap
108	10242/SP2D/LS/4.01.00/2019	08/07/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) kepada Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian TA.2019 sesuai Kep Gub Bali No: 5/03-S/HK/2019, tgl 27/2/19	Gianyar	Tampaksiring	Manukaya	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian TA.2019	3.250.000.000,00	28 / 1 / 2020			3.250.000.000,00	Lengkap
109	16727/SP2D/LS/4.01.00/2019	26/09/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) Kepada Desa Panglungkarung, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-S/HK/2019 tanggal	Tabanan	Kerambitan	Panglungkarung	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	850.000.000,00	28 / 1 / 2020			850.000.000,00	Lengkap
110	12741/SP2D/LS/4.01.00/2019	07/08/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) Kepada Desa Payangan, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-S/HK/2019 tanggal	Tabanan	Marga	Payangan	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	1.200.000.000,00	28 / 1 / 2020			1.200.000.000,00	Lengkap
111	14079/SP2D/LS/4.01.00/2019	23/08/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) Kepada Desa Angantaka, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-S/HK/2019 tanggal	Badung	Abiansemal	Angantaka	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	600.000.000,00	29 / 1 / 2020			600.000.000,00	Lengkap
112	12616/SP2D/LS/4.01.00/2019	07/08/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) Kepada Desa Belanga, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-S/HK/2019 tanggal	Bangli	Kintamani	Belanga	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	450.000.000,00	29 / 1 / 2020			450.000.000,00	Lengkap
113	16661/SP2D/LS/4.01.00/2019	26/09/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) Kepada Desa Tri Eka Buana, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-S/HK/2019 tanggal	Karangasem	Sidemen	Tri Eka Buana	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	400.000.000,00	29 / 1 / 2020			400.000.000,00	Lengkap
114	11419/SP2D/LS/4.01.00/2019	22/07/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) Kepada Desa Tegalmengkeb Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-S/HK/2019 tanggal	Tabanan	Selemadeg Timur	Tegalmengkeb	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	1.450.000.000,00	29 / 1 / 2020			1.450.000.000,00	Lengkap
115	17480/SP2D/LS/4.01.00/2019	03/10/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) Kepada Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-S/HK/2019 tanggal	Badung	Kuta Selatan	Pecatu	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	1.000.000.000,00	30 / 1 / 2020			1.000.000.000,00	Lengkap
116	16244/SP2D/LS/4.01.00/2019	17/09/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) Kepada Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-S/HK/2019 tanggal	Buleleng	Sukasada	Pegayaman	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	350.000.000,00	30 / 1 / 2020			350.000.000,00	Lengkap
117	11320/SP2D/LS/4.01.00/2019	17/07/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) Kepada Desa Singapadu, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-S/HK/2019 tanggal	Gianyar	Sukawati	Singapadu	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	750.000.000,00	30 / 1 / 2020			750.000.000,00	Lengkap
118	10291/SP2D/LS/4.01.00/2019	08/07/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) kepada Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian TA.2019 sesuai Kep Gub Bali No: 5/03-S/HK/2019, tgl 27/2/19	Jembrana	Mendoyo	Penyaringan	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian TA.2019	1.350.000.000,00	30 / 1 / 2020			1.350.000.000,00	Lengkap
119	11405/SP2D/LS/4.01.00/2019	22/07/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) Kepada Desa Batutiti, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-S/HK/2019 tanggal	Tabanan	Kerambitan	Batutiti	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	250.000.000,00	30 / 1 / 2020			250.000.000,00	Lengkap
120	11876/SP2D/LS/4.01.00/2019	29/07/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) Kepada Desa Dalang, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-S/HK/2019 tanggal	Tabanan	Selemadeg Timur	Dalang	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	1.850.000.000,00	30 / 1 / 2020			1.850.000.000,00	Lengkap
121	18881/SP2D/LS/4.01.00/2019	16/10/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) Kepada Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-S/HK/2019 tanggal	Badung	Kuta Selatan	Ungasan	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	250.000.000,00	31 / 1 / 2020			250.000.000,00	Lengkap
122	12619/SP2D/LS/4.01.00/2019	07/08/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) Kepada Desa Buahhan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-S/HK/2019 tanggal	Bangli	Kintamani	Buahan	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	700.000.000,00	31 / 1 / 2020			700.000.000,00	Lengkap

No.	No SP2D	Tanggal SP2D	Uraian	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Peruntukkan	Realisasi Belanja	Penyampaian LPJ			Nilai LPJ (Rp)	Kelengkapan LPJ
									Tanggal	Bulan	Tahun		
123	10803/SP2D/LS/4.01.00/2019	12/07/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) Kepada Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-SHK/2019 tanggal	Buleleng	Sawan	Bebetin	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	900.000.000,00	31 / 1 / 2020		900.000.000,00	Lengkap	
124	12746/SP2D/LS/4.01.00/2019	07/08/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) Kepada Desa Sumita, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-SHK/2019 tanggal	Gianyar	Gianyar	Sumita	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	800.000.000,00	31 / 1 / 2020		800.000.000,00	Lengkap	
125	14074/SP2D/LS/4.01.00/2019	26/08/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) Kepada Desa Songan B, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-SHK/2019 tanggal	Bangli	Kintamani	Songan B	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	750.000.000,00	3 / 2 / 2020		750.000.000,00	Lengkap	
126	13038/SP2D/LS/4.01.00/2019	12/08/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) Kepada Desa Undisan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-SHK/2019 tanggal	Bangli	Tembuku	Undisan	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	1.200.000.000,00	3 / 2 / 2020		1.200.000.000,00	Lengkap	
127	12609/SP2D/LS/4.01.00/2019	07/08/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) Kepada Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-SHK/2019 tanggal	Buleleng	Sukasada	Panji Anom	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	350.000.000,00	3 / 2 / 2020		350.000.000,00	Lengkap	
128	11886/SP2D/LS/4.01.00/2019	29/07/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) Kepada Desa Batuan, Kecamatan sukawati Kabupaten Gianyar untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-SHK/2019 tanggal	Gianyar	Sukawati	Batuan	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	1.450.000.000,00	3 / 2 / 2020		1.450.000.000,00	Lengkap	
129	08945/SP2D/LS/4.01.00/2019	26/06/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) kepada Desa Perancak, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian TA.2019 sesuai Kep Gub Bali No: 5/03-SHK/2019, tgl 27/2/19	Jembrana	Jembrana	Perancak	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian TA.2019	300.000.000,00	3 / 2 / 2020		300.000.000,00	Lengkap	
130	15640/SP2D/LS/4.01.00/2019	09/09/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) kepada Desa Bukit, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian TA.2019 sesuai Kep Gub Bali No: 5/03-SHK/2019, tgl 27/2/19	Karangasem	Karangasem	Bukit	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian TA.2019	1.500.000.000,00	3 / 2 / 2020		1.500.000.000,00	Lengkap	
131	17205/SP2D/LS/4.01.00/2019	02/10/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) Kepada Desa Batu Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-SHK/2019 tanggal	Bangli	Kintamani	Batu Selatan	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	300.000.000,00	5 / 2 / 2020		300.000.000,00	Lengkap	
132	16103/SP2D/LS/4.01.00/2019	13/09/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) Kepada Desa Belandingan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-SHK/2019 tanggal	Bangli	Kintamani	Belandingan	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	350.000.000,00	5 / 2 / 2020		350.000.000,00	Lengkap	
133	11828/SP2D/LS/4.01.00/2019	29/07/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) Kepada Desa Daup, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-SHK/2019 tanggal	Bangli	Kintamani	Daup	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	400.000.000,00	5 / 2 / 2020		400.000.000,00	Lengkap	
134	13127/SP2D/LS/4.01.00/2019	12/08/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) Kepada Desa Sanding, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-SHK/2019 tanggal	Gianyar	Tampaksiring	Sanding	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	500.000.000,00	5 / 2 / 2020		500.000.000,00	Lengkap	
135	14640/SP2D/LS/4.01.00/2019	02/09/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) Kepada Desa Belalang, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-SHK/2019 tanggal	Tabanan	Kediri	Belalang	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	350.000.000,00	5 / 2 / 2020		350.000.000,00	Lengkap	
136	13692/SP2D/LS/4.01.00/2019	19/08/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) Kepada Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-SHK/2019 tanggal	Gianyar	Blahbatuh	Keramas	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	800.000.000,00	6 / 2 / 2020		800.000.000,00	Lengkap	
137	16118/SP2D/LS/4.01.00/2019	13/09/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) Kepada Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-SHK/2019 tanggal	Karangasem	Kubu	Ban	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	5.000.000.000,00	6 / 2 / 2020		5.000.000.000,00	Lengkap	
138	11102/SP2D/LS/4.01.00/2019	15/07/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) kepada Desa Wisma Kerta, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian TA.2019 sesuai Kep Gub Bali No: 5/03-SHK/2019, tgl 27/2/19	Karangasem	Sidemen	Wisma Kerta	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian TA.2019	800.000.000,00	6 / 2 / 2020		706.500.000,00	Lengkap	
139	10245/SP2D/LS/4.01.00/2019	08/07/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) kepada Desa Keliki, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian TA.2019 sesuai Kep Gub Bali No: 5/03-SHK/2019, tgl 27/2/19	Gianyar	Tegallalang	Keliki	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian TA.2019	850.000.000,00	10 / 2 / 2020		850.000.000,00	Lengkap	
140	11064/SP2D/LS/4.01.00/2019	15/07/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) kepada Desa Besan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian TA.2019 sesuai Kep Gub Bali No: 5/03-SHK/2019, tgl 27/2/19	Klungkung	Dawan	Besan	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian TA.2019	350.000.000,00	10 / 2 / 2020		350.000.000,00	Lengkap	
141	11087/SP2D/LS/4.01.00/2019	15/07/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) kepada Desa Bengkel Sari, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian TA.2019 sesuai Kep Gub Bali No: 5/03-SHK/2019, tgl 27/2/19	Tabanan	Selemadeg Barat	Bengkel Sari	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian TA.2019	1.000.000.000,00	10 / 2 / 2020		1.000.000.000,00	Lengkap	
142	15449/SP2D/LS/4.01.00/2019	05/09/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) Kepada Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-SHK/2019 tanggal	Gianyar	Sukawati	Batubulan	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	1.800.000.000,00	11 / 2 / 2020		1.800.000.000,00	Lengkap	
143	15646/SP2D/LS/4.01.00/2019	09/09/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) kepada Desa Sebatu, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian TA.2019 sesuai Kep Gub Bali No: 5/03-SHK/2019, tgl 27/2/19	Gianyar	Tegallalang	Sebatu	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian TA.2019	2.850.000.000,00	11 / 2 / 2020		2.850.000.000,00	Lengkap	
144	11884/SP2D/LS/4.01.00/2019	29/07/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) Kepada Desa Petak Kaja, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai Keputusan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-SHK/2019 tanggal	Gianyar	Gianyar	Petak Kaja	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	1.500.000.000,00	12 / 2 / 2020		1.500.000.000,00	Lengkap	
145	16317/SP2D/LS/4.01.00/2019	19/09/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) Kepada Desa Selat, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-SHK/2019 tanggal	Badung	Abiansemal	Selat	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	300.000.000,00	13 / 2 / 2020		300.000.000,00	Lengkap	
146	12749/SP2D/LS/4.01.00/2019	07/08/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) Kepada Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-SHK/2019 tanggal	Gianyar	Blahbatuh	Buruan	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	2.450.000.000,00	13 / 2 / 2020		2.450.000.000,00	Lengkap	
147	13694/SP2D/LS/4.01.00/2019	19/08/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) Kepada Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-SHK/2019 tanggal	Gianyar	Sukawati	Sukawati	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	900.000.000,00	17 / 2 / 2020		900.000.000,00	Lengkap	
148	14637/SP2D/LS/4.01.00/2019	02/09/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BK) Kepada Desa Tangkup, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-SHK/2019 tanggal	Karangasem	Sidemen	Tangkap	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	1.100.000.000,00	17 / 2 / 2020		1.100.000.000,00	Lengkap	

No.	No SP2D	Tanggal SP2D	Uraian	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Peruntukkan	Realisasi Belanja	Penyampaian LPJ			Nilai LPJ (Rp)	Kelengkapan LPJ
									Tanggal	Bulan	Tahun		
149	13026/SP2D/LS/4.01.00/2019	12/08/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-S/HK/2019 tanggal	Buleleng	Kubutambahan	Tamblang	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	900.000.000,00	24	2	2020	900.000.000,00	Lengkap
150	11881/SP2D/LS/4.01.00/2019	29/07/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-S/HK/2019 tanggal	Gianyar	Tampaksiring	Tampaksiring	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	2.750.000.000,00	24	2	2020	2.750.000.000,00	Lengkap
151	14599/SP2D/LS/4.01.00/2019	02/09/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-S/HK/2019 tanggal	Badung	Mengwi	Cemagi	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	1.050.000.000,00	5	3	2020	1.040.000.000,00	Lengkap
152	14596/SP2D/LS/4.01.00/2019	02/09/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-S/HK/2019 tanggal	Bangli	Tembuku	Yangapi	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	1.250.000.000,00	5	3	2020	1.250.000.000,00	Lengkap
153	13408/SP2D/LS/4.01.00/2019	15/08/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-S/HK/2019 tanggal	Gianyar	Blahbatuh	Blahbatuh	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	1.550.000.000,00	5	3	2020	1.550.000.000,00	Lengkap
154	10809/SP2D/LS/4.01.00/2019	12/07/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Marga Dajan Puri, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-S/HK/2019 tanggal	Tabanan	Marga	Marga Dajan Puri	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	550.000.000,00	5	3	2020	550.000.000,00	Lengkap
155	16726/SP2D/LS/4.01.00/2019	26/09/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-S/HK/2019 tanggal	Bangli	Kintamani	Songan A	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	50.000.000,00	10	3	2020	50.000.000,00	Lengkap
156	09530/SP2D/LS/4.01.00/2019	08/07/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Mengening, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian TA.2019 sesuai Kep Gub Bali No: 5/03-S/HK/2019, tgl 27/2/19	Buleleng	Kubutambahan	Mengening	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian TA.2019	300.000.000,00	10	3	2020	300.000.000,00	Lengkap
157	11878/SP2D/LS/4.01.00/2019	29/07/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Menanga, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-S/HK/2019 tanggal	Karangasem	Rendang	Menanga	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	1.950.000.000,00	12	3	2020	1.950.000.000,00	Lengkap
158	14080/SP2D/LS/4.01.00/2019	23/08/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Pangsan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-S/HK/2019 tanggal	Badung	Petang	Pangsan	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	450.000.000,00	13	3	2020	450.000.000,00	Lengkap
159	12364/SP2D/LS/4.01.00/2019	02/08/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Dausa, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-S/HK/2019 tanggal	Bangli	Kintamani	Dausa	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	1.100.000.000,00	16	3	2020	1.073.650.000,00	Lengkap
160	13409/SP2D/LS/4.01.00/2019	15/08/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Satra, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-S/HK/2019 tanggal	Bangli	Kintamani	Satra	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	2.000.000.000,00	16	3	2020	2.000.000.000,00	Lengkap
161	11815/SP2D/LS/4.01.00/2019	29/07/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Pengastulan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-S/HK/2019 tanggal	Buleleng	Seririt	Pengastulan	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	300.000.000,00	16	3	2020	300.000.000,00	Lengkap
162	20627/SP2D/LS/4.01.00/2019	07/11/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-S/HK/2019 tanggal	Bangli	Tembuku	Peninjoan	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	3.100.000.000,00	8	4	2020	3.100.000.000,00	Lengkap
163	14603/SP2D/LS/4.01.00/2019	02/09/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Kutuh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-S/HK/2019 tanggal	Bangli	Kintamani	Kutuh	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	700.000.000,00	14	4	2020	700.000.000,00	Lengkap
164	08469/SP2D/LS/4.01.00/2019	19/06/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Kallianget, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian TA.2019 sesuai Kep Gub Bali No: 5/03-S/HK/2019, tgl 27/2/19	Buleleng	Seririt	Kallianget	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian TA.2019	500.000.000,00	14	4	2020	500.000.000,00	Lengkap
165	11922/SP2D/LS/4.01.00/2019	30/07/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Barua, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-S/HK/2019 tanggal	Bangli	Kintamani	Barua	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	300.000.000,00	17	4	2020	300.000.000,00	Lengkap
166	15647/SP2D/LS/4.01.00/2019	09/09/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Mengani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian TA.2019 sesuai Kep Gub Bali No: 5/03-S/HK/2019, tgl 27/2/19	Bangli	Kintamani	Mengani	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian TA.2019	350.000.000,00	17	4	2020	340.000.000,00	Lengkap
167	12670/SP2D/LS/4.01.00/2019	07/08/2019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Lotunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Kep. Gub. Bali Nomor 5/03-S/HK/2019 tanggal	Gianyar	Ubud	Lotunduh	Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019	1.700.000.000,00	19	4	2020	1.700.000.000,00	Lengkap
Jumlah								159.770.100.000,00				159.346.720.000,00	

Bidang Tanah Sekolah yang Belum Bersertifikat

No.	Nama Kabupaten	Nama Sekolah	Luas yang Tercatat di KIB
1	Badung	SMAN 2 Mengwi	7.700,00
2	Badung	SMAN 1 Kuta Utara	9.890,00
3	Bangli	SMK N 2 BANGLI	8.750,00
4	Bangli	SMK N 1 SUSUT	3.000,00
5	Buleleng	SMAN 1 Kubutambahan	2.000,00
6	Buleleng	SMAN 1 Kubutambahan	700,00
7	Buleleng	SMKN 1 Seririt	5.000,00
8	Buleleng	SMAN 3 Singaraja	14.310,00
9	Gianyar	SMAN 1 Blahbatuh	2.729,00
10	Gianyar	SMAN 1 Gianyar	10.000,00
11	Gianyar	SMAN 1 Ubud	9.050,00
12	Gianyar	SMKN 1 Sukawati	1.080,00
13	Jembrana	SMKN 3 Negara	6.900,00
14	Klungkung	SMA SATAP Klumpu	7.000,00
15	Klungkung	SMKN 1 Klungkung	13.900,00
16	Klungkung	SMAN 1 Nusa Penida	14.950,00
17	Tabanan	SMKN 2 Tabanan	1.200,00
18	Tabanan	SMAN 1 Baturiti	7.945,00
19	Buleleng	SMAN 1 BANJAR	n/a

**Bidang Tanah Sekolah yang Dokumen Sertifikatnya
Belum Diserahkan ke Pemerintah Provinsi Bali**

No.	Kabupaten/Kota	Nama Sekolah	Luas (m²)	Keterangan
1	Bangli	SMAN 2 BANGLI	12.500	
2	Bangli	SMKN 3 KINTAMANI	15.000	Tanah hak milik Desa Adat
3	Bangli	SMKN 3 BANGLI	144.000	Tanah hak milik Desa Adat
4	Bangli	SMKN 2 KINTAMANI	2.500	Tanah hak milik Desa Adat
5	Bangli	SMKN 1 TEMBUKU	1.600	Tanah hak milik Desa Adat
6	Denpasar	SMAN 6 DENPASAR	2.200	
7	Denpasar	SMKN 4 DENPASAR	4.922	
8	Denpasar	SMAN 4 DENPASAR	8.200	
9	Denpasar	SMKN 5 DENPASAR	12.245	
10	Denpasar	SMKN 3 DENPASAR	30.000	
11	Denpasar	SMAN 2 DENPASAR	7.960	
12	Denpasar	SMKN 1 DENPASAR	16.680	
13	Gianyar	SMAN 1 Tegalalang	4.200	
14	Gianyar	SMAN 1 Payangan	12.201	
15	Bangli	SMAN 1 Tampaksiring	NULL	
16	Jembrana	SMAN 1 Melaya	20.000	
17	Karangasem	SMKN 1 KUBU	12.500	
18	Karangasem	SMAN 2 AMLAPURA	300	
19	Karangasem	SMAN 2 AMLAPURA	1.730	
20	Karangasem	SMAN 2 AMLAPURA	900	

Bidang Tanah Sekolah yang Kepemilikannya Belum Balik Nama

No.	Kabupaten	Sekolah	Luas (M2)	Lokasi	Sertifikat atas nama	No dan Tanggal Sertifikat	Tgl. Perolehan
1	Badung	SMAN 1 Abiansemal	9.950,00	Jalan Majapahit, Blahkiuh, Abiansemal	Departemen Pendidikan dan Kebudayaan cq Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bali di Denpasar	SHP No. 11 tanggal 21 Juni 1990	31/12/1982
2	Badung	SMAN 1 Mengwi	4.100,00	Desa Mengwi, Kec. Mengwi Jl. Gunung Agung No.3 Mengwi	Pemkab Badung	No. 22 tanggal 4 Agustus 2016	31/12/1978
3	Badung	SMAN 1 Petang	13.700,00	BR. PETANG TENGAH, DESA PETANG, KECAMATAN PETANG	Pemkab Badung	No. 16 tanggal 10 Oktober 2014	11/06/1989
4	Badung	SMKN 1 Petang	9.730,00	Desa Pelaga, Kec. Petang, Kab. Badung	Pemkab Badung	No. 11 tanggal 30 September 2014	30/09/2014
5	Badung	SMAN 1 Mengwi	5.900,00	Desa Mengwi, Kec. Mengwi Jl.Gunung Agung No.3 Mengwi	Pemkab Badung	No. 20 tanggal 2 Mei 2016	31/12/1978
6	Badung	SMAN 1 Abiansemal	900,00	Jalan Majapahit, Blahkiuh, Abiansemal	SHM an I Gusti Nyoman Gunartha		31/12/2015
7	Bangli	SMK N 1 BANGLI	10.000,00	DESA KAWAN,KEC. BANGLI , KAB. BANGLI .JL. BRIGJEN NGURAH RAI BANGLI	Departemen Pendidikan dan Kebudayaan cq Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bali di Denpasar	SHP No 79 tanggal 18 Mei 1994	18/05/1994
8	Buleleng	SMKN 1 Sukasada	250,00	Desa Sambangan, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng, Bali	Departemen Pendidikan dan Kebudayaan cq Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bali di Denpasar	SHP No 4 tanggal 1 Mei 1997	01/05/1997
9	Buleleng	SMKN 1 Sukasada	3.000,00	Desa Sambangan, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng, Bali	Departemen Pendidikan dan Kebudayaan cq Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bali di Denpasar	SHP No 5 tanggal 1 Mei 1997	31/12/1997
10	Buleleng	SMAN 4 Singaraja	1.615,00	Banjar Jawa, Kec.Buleleng,Kab.buleleng, Jalan Melati Singaraja	Departemen Pendidikan dan Kebudayaan cq Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bali di Denpasar	SHP No 16 tanggal 23 Januari 1992	10/07/1991
11	Buleleng	SMKN 1 Sukasada	11.750,00	Desa Sambangan, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng, Bali	Departemen Pendidikan dan Kebudayaan cq Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bali di Denpasar	SHP No 5 tanggal 1 Mei 1997	31/12/1997
12	Buleleng	SMAN 1 Seririt	4.000,00	Ds. Seririt Kec. Seririt Kab. Buleleng Jln Diponegoro No. 100 Seririt	Departemen Pendidikan dan Kebudayaan cq Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bali di Denpasar	SHP No 19 tanggal 25 September 1995	25/09/1993
13	Buleleng	SMKN 3 Singaraja	40.000,00	Banyuning Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng. Jalan Gempol	Departemen Pendidikan dan Kebudayaan cq Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bali di Denpasar	SHP No 19 tanggal 8 Mei 1995	31/12/1984
14	Buleleng	SMKN 1 Singaraja	5.975,00	Jl.Pramuka No.6 Singaraja, Kelurahan Banjar Bali, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.	Departemen Pendidikan dan Kebudayaan cq Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bali di Denpasar	SHP No 84 tanggal 10 April 1996	31/12/1996
15	Buleleng	SMAN 2 Singaraja	9.600,00	Desa Baktiseraga kec.Buleleng Kab.Buleleng	Departemen Pendidikan dan Kebudayaan cq Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bali di Denpasar	SHP No. 6 tanggal 11 Desember 1986	31/12/1984
16	Buleleng	SMAN 1 Singaraja	4.650,00	JLn. Pramuka No. 4 Singaraja	Departemen Pendidikan dan Kebudayaan cq Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bali di Denpasar	SHP No 85 tanggal 3 Oktober 1996	31/12/1958
17	Buleleng	SMAN 1 Sawan	12.000,00	Desa Sangsit, Kec. Sawan, Kab. Buleleng, Jl. Raya Abasan	Departemen Pendidikan dan Kebudayaan cq Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bali di Denpasar	SHP No 1 tanggal 28 September 2001	28/09/2001
18	Buleleng	SMKN 2 Singaraja	10.000,00	Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Jalan Srikandi No. 9	Departemen Pendidikan dan Kebudayaan cq Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bali di Denpasar	SHP No. 5 tanggal 11 Desember 1986	31/12/1986
19	Buleleng	SMAN 1 Tejakula	15.000,00	Desa Tejakula, Kec. Tejakula Kab Buleleng;; Jln. Singaraja-Amlapura.	Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bali di Denpasar	SHP No 178 tanggal 29 Januari 1990	31/12/1987
20	Buleleng	SMAN 1 Seririt	2.900,00	Ds. Seririt Kec. Seririt Kab. Buleleng Jln. Diponegoro No. 100 Seririt	Pemerintah Kabupaten Buleleng	SHP No 11 tanggal 16 Mei 2016	31/12/1967
21	Buleleng	SMKN 1 Sawan	13.700,00	Desa Menyali,Kec.Sawan,Kab.Buleleng	Pemerintah Kabupaten Buleleng	SHP No 1 tanggal 28 Maret 2014	28/03/2014
22	Buleleng	SMAN 1 Gerokgak	10.450,00	Jalan Made Gelagah, Banjar Dinas Tukadpule Desa Sanggalangit, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng	Pemerintah Kabupaten Buleleng	SHP No 4 tanggal 30 Agustus 2016	30/08/2016
23	Buleleng	SMAN 2 Banjar	10.000,00	Desa Banjar Tegeha, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Jln. Banteng	Pemerintah Kabupaten Buleleng	SHP No. 2 tanggal 5 April 2015	31/12/2002
24	Buleleng	SMKN 1 Tejakula	8.000,00	Desa Penuktukan, Kec Tejakula, Kab Buleleng	Pemerintah Kabupaten Buleleng	SHP No 4 tanggal 21 September 2015	31/12/2010
25	Buleleng	SMAN 1 Sukasada	5.840,00	jaln Jelantik Gingsir No. 81 B Sukasada	Pemerintah Kabupaten Buleleng	SHP No 15 tanggal 24 Oktober 2018	31/12/2003
26	Buleleng	SMAN 4 Singaraja	500,00	Banjar Jawa, Kec. Buleleng,Kab Buleleng, Jalan Melati Singaraja	Pemerintah Kabupaten Buleleng	SHP No 131 tanggal 20 September 2017	26/08/2014
27	Buleleng	SMKN 1 Busungbiu	5.185,00	Desa Telaga, Kecamatan Bussungbiu	Pemerintah Kabupaten Buleleng	SHP No 35 tanggal 21 September 2015	31/12/2014
28	Buleleng	SMAN 1 Busungbiu	5.780,00	Banjar Dinas Kelod,Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng.	Pemerintah Kabupaten Buleleng	SHP No 28 tanggal 29 April 2016	31/12/1980
29	Buleleng	SMKN 1 Busungbiu	3.075,00	Desa Telaga, Kecamatan Busungbiu	Pemerintah Kabupaten Buleleng	SHP No 36 tanggal 19 Januari 2016	31/12/2014
30	Buleleng	SMAN 1 Singaraja	4.380,00	Jln. Pramuka No. 4 Singaraja	Pemerintah Kabupaten Buleleng	SHP No 7 tanggal 5 Maret 2009	31/12/2009
31	Buleleng	SMAN 2 Gerokgak	700,00	Desa Pemuteran Kecamatan Gerokgak	SHM an I Nyoman Dangin Swidnya	SHM tanggal 6 April 2010	

No.	Kabupaten	Sekolah	Luas (M2)	Lokasi	Sertifikat atas nama	No dan Tanggal Sertifikat	Tgl. Perolehan
32	Denpasar	SMAN 8 DENPASAR	13.820,00	Br. Umadesa Peguyangan Kaja Denpasar Utara Kota Denpasar	Pemerintah Kota Denpasar	SHP No 20 tanggal 26 Oktober 2015	31/12/2004
33	Denpasar	SMKN 2 DENPASAR	10.587,00	Jl . Pendidikan No. 28 Sidakarya	Pemerintah Kota Denpasar	SHP No 78 tanggal 26 Maret 2015	26/03/2015
34	Denpasar	SMAN 5 DENPASAR	24.948,00	Jl Sanitasi No 2 Sidakarya Denpasar Selatan	Pemerintah Kota Denpasar	SHP No 77 tanggal 19 Maret 2015	31/12/2000
35	Denpasar	SMAN 7 DENPASAR	14,80	Jalan Kamboja No 9 Denpasar, Kec. Denpasar Utara, Desa. Dangin Puri Kangin	Pemerintah Kota Denpasar	SHP No 58 tanggal 22 Maret 2013	31/12/1959
36	Denpasar	SMAN 1 Denpasar	15.720,00	Desa Dangin Puri Kangin Kecamatan Denpasar Utara	Pemerintah Kota Denpasar	SHP No 61 tanggal 17 Maret 2015	
37	Denpasar	SMAN 3 Denpasar	9.195,00	Desa Sumerta Kaja Kec. Denpasar Timur	Pemerintah Kota Denpasar	SHP No 8 tanggal 6 Februari 2013	
38	Gianyar	SMAN 1 Sukawati	12.261,00	Jln. Lettu W. Suta Sukawati	Departemen Pendidikan dan Kebudayaan cq Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bali di Denpasar	SHP No 9 tanggal 16 Juni 1991	31/12/1987
39	Gianyar	SMKN 1 Gianyar	3.350,00	Jln.Mulawarman,Kelurahan Abianbase Gianyar	Departemen Pendidikan dan Kebudayaan cq Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bali di Denpasar	SHP No 11 tanggal 26 Maret 1996	31/12/1976
40	Gianyar	SMKN 2 Sukawati	18.950,00	Desa Batubulan,Sukawati,Gianyar,Bali	Departemen Pendidikan dan Kebudayaan cq Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bali di Denpasar	SHP No 18 tanggal 7 Juli 1999	07/07/1999
41	Gianyar	SMKN 1 Sukawati	19.630,00	Jl. Kampus SMK Bali,Desa Batubulan,Kecamatan,Sukawati	Departemen Pendidikan dan Kebudayaan cq Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bali di Denpasar	SHP No 16 tanggal 24 Mei 1999	24/05/1999
42	Gianyar	SMKN 3 Sukawati	29,14	Jln.Taak Indah, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati	Departemen Pendidikan dan Kebudayaan cq Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bali di Denpasar	SHP No 17 tanggal 14 Mei 1999	31/12/1979
43	Jembrana	SMAN 1 Mendoyo	25.600,00	Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Jalan Semanggong	Departemen Pendidikan dan Kebudayaan cq Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bali di Denpasar	SHP No 8 tanggal 27 Februari 1985	27/02/1985
44	Jembrana	SMAN 1 Negara	3.000,00	Jln. Ngurah Rai 155 Negara	Departemen Pendidikan dan Kebudayaan cq Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bali di Denpasar	SHP No 17 tanggal 9 Agustus 1984	07/12/1965
45	Jembrana	SMAN 1 Negara	7.450,00	Jln.Ngurah Rai No.155 Negara	Departemen Pendidikan dan Kebudayaan cq Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bali di Denpasar	SHP No 41 tanggal 23 September 1989	07/10/1965
46	Jembrana	SMKN 5 Negara	5.820,00	Desa Pekutatan	Departemen Pendidikan dan Kebudayaan cq Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bali di Denpasar	SHP No 8 tanggal 23 September 1993	
47	Jembrana	SMAN 2 Mendoyo	1.000,00	Desa Penyaringan, Kecamatan mendoyo, Kabupaten Jembrana	Pemerintah Kabupaten Jembrana	SHP No 35 tanggal 30 Juni 2014	30/06/2014
48	Jembrana	SMKN 1 Negara	10.810,00	Kelurahan Baler-bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana.	Pemerintah Kabupaten Jembrana	SHP No 1 tanggal 26 Mei 1982	26/05/1982
49	Jembrana	SMAN 1 Pekutatan	15.650,00	Desa Pekutatan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana (Jln Pekutatan-Pupuan)	Pemerintah Kabupaten Jembrana	SHP No 1 tanggal 29 Mei 2002	31/12/2001
50	Jembrana	SMKN 2 Negara	93.870,00	SMK Negeri 2 Negara	Pemerintah Kabupaten Jembrana	SHP No 20 tanggal 20 Mei 2016	31/12/1988
51	Jembrana	SMAN 2 Negara	11.665,00	KELURAHAN DAUHWARU, KECAMATAN JEMBRANA, KABUPATEN JEMBRANA, JALAN MAYOR SUGIANYAR CIVIC CENTRE.	Pemerintah Kabupaten Jembrana	SHP No 119 tanggal 14 September 2017	31/12/1982
52	Karangasem	SMA N 1 SELAT	11.560,00	Bangbang biaung Duda Selat Karangasem	Departemen Pendidikan dan Kebudayaan cq Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bali di Denpasar	SHP No 6 tanggal 20 September 1997	30/12/1995
53	Karangasem	SMA N 2 AMLAPURA	16.870,00	Jl. Untung surapati Amlapura, Bali	Departemen Pendidikan dan Kebudayaan cq Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bali di Denpasar	SHP No 32 tanggal 25 November 1988	02/01/1984
54	Karangasem	SMK N 1 ABANG	13.410,00	Tista - Abang - Karangasem	Pemerintah Kabuapten Karangasem	SHP No 25 tanggal 16 Oktober 2013	31/12/1995
55	Karangasem	SMA N 1 KUBU	10.570,00	DESA SUKADANA,KEC.KUBU,KAB.KARANGASEM	Pemerintah Kabuapten Karangasem	SHP No 112 tanggal 16 Oktober 2013	31/12/1992
56	Karangasem	SMA N 1 RENDANG	10.000,00	Desa Rendang,Kecamatan Rendang,Kabupaten Karangasem	Pemerintah Kabuapten Karangasem	SHP No 28 tanggal 24 Agustus 2016	31/12/1997
57	Karangasem	SMA N 1 BEBANDEM	1.015.000,00	Jalan Raya jungutan, Desa Jungutan Bebandem	Pemerintah Kabuapten Karangasem	SHP No 32 tanggal 5 Maret 2014	31/12/2003
58	Karangasem	SMA N 1 BEBANDEM	4.950,00	Jalan Raya Jungutan Desa Jungutan Bebandem	Pemerintah Kabuapten Karangasem	SHP No 34 tanggal 23 November 2015	31/12/2013
59	Karangasem	SMK N 1 AMLAPURA	20.000,00	Kelurahan Padang Kerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem	Pemerintah Kabuapten Karangasem	SHP No 28 tanggal 24 Juni i2013	31/12/2013
60	Karangasem	SMK N 1 MANGGIS	6.520,00	SMKN 1 Manggis	Sekolah Menengah Atas Negeri Karangasem	SHP No 85 tanggal 25 November 1988	07/01/1991
61	Klungkung	SMAN SATAP Nusa Penida	13,55	Desa Tanglad, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung	Departemen Pendidikan dan Kebudayaan cq Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bali di Denpasar	SHP No 3 tanggal 29 Desember 1997	31/12/1987
62	Klungkung	SMAN 1 Semarapura	6.550,00	JLN FLAMBOYAN NO 63 SEMARAPURA	Departemen Pendidikan dan Kebudayaan cq Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bali di Denpasar	SHP No 41 tanggal 1 September 1994	31/03/1994

No.	Kabupaten	Sekolah	Luas (M2)	Lokasi	Sertifikat atas nama	No dan Tanggal Sertifikat	Tgl. Perolehan
63	Klungkung	SMAN 1 Dawan	11.700,00	Gunaksa Dawan Klungkung	Departemen Pendidikan dan Kebudayaan cq Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bali di Denpasar	SHP No 3 tanggal 30 Januari 1987	31/12/1984
64	Klungkung	SMAN 2 Semarapura	2.060,00	Jl. Dewi Sartika No. 16, Desa Besang Kangin, Kel. Semarapura Kaja, Kec. Klungkung	Departemen Pendidikan dan Kebudayaan cq Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bali di Denpasar	SHP No 24 tanggal 23 September 1983	23/09/1983
65	Tabanan	SMAN 1 Penebel	12.925,00	Jl. Pitera No. 49, Penebel, Tabanan	Departemen Pekerjaan Umum Cq. Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum Provinsi Bali di Denpasar	SHP No 6 tanggal 26 Januari 1989	26/01/1989
66	Tabanan	SMKN 1 Tabanan	2.000,00	Jl Bedahulu No.2 Tabanan	Departemen Pendidikan dan Kebudayaan cq Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bali di Denpasar	SHP No 29 tanggal 12 November 1985	31/12/1985
67	Tabanan	SMAN 2 Tabanan	1.400,00	BR. GROKGAK GEDE DELOD PEKEN TABANAN	Departemen Pendidikan dan Kebudayaan cq Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bali di Denpasar	SHP No 31 tanggal 12 November 1985	31/12/1985
68	Tabanan	SMAN 1 Pupuan	1.120,00	Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan	Departemen Pendidikan dan Kebudayaan cq Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bali di Denpasar	SHP No 22 tanggal 18 Agustus 1998	02/01/1998
69	Tabanan	SMAN 1 Selamadeg	21.000,00	Bajera, Selamadeg, Tabanan	Departemen Pendidikan dan Kebudayaan cq Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bali di Denpasar	SHP No 8 tanggal 14 Januari 1988	31/12/1988
70	Tabanan	SMAN 1 Marga	10.000,00	Br. Kuwum Ancak, Desa Kuwum, Kec Marga, Tabanan	Departemen Pendidikan dan Kebudayaan cq Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bali di Denpasar	SHP No 4 tanggal 24 Januari 2000	24/01/2000
71	Tabanan	SMAN 2 Tabanan	7.750,00	Br. Grokgak Gede Delod Peken Tabanan	Departemen Pendidikan dan Kebudayaan cq Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bali di Denpasar	SHP No 28 tanggal 12 November 1985	31/12/1985
72	Tabanan	SMKN 3 Tabanan	550,00	Desa Bantas, Selamadeg Timur	I Wayan Suwastawa	SHM No 1309 tanggal 4 Oktober 2007	31/12/2007
73	Tabanan	SMKN 3 Tabanan	2.975,00	Desa Bantas, Selamadeg Timur	I Wayan Suwastawa	Tanah warisan	31/12/2007
74	Tabanan	SMKN 1 Tabanan	4.175,00	Jl. Diponegoro No 11 tabanan	Pemerintah Kabupaten Tabanan	SHP No 2 tanggal 15 Maret 1979	31/12/1979
75	Tabanan	SMKN 2 Tabanan	900,00	BR. UMADIWANG DESA BATANNYUH MARGA TABANAN	Pemerintah Kabupaten Tabanan	SHP No 1 tanggal 21 Februari 2008	31/12/2008
76	Tabanan	SMAN 1 Tabanan	400,00	Jln. Gunung Agung No. 122 Tabanan	Pemerintah Kabupaten Tabanan	SHP No 35 tanggal 12 Juni 1999	31/12/1999
77	Tabanan	SMAN 1 Kediri	400,00	Banjar Anyar, Kediri, Jl. Bingin Ambe	Pemerintah Kabupaten Tabanan	SHP No 45 tanggal 20 Maret 2017	31/12/2009
78	Tabanan	SMAN 1 Kediri	665,00	Banjar Anyar, Kediri, Jl. Bingin Ambe	Pemerintah Kabupaten Tabanan	SHP No 37 tanggal 25 Juli 2011	31/12/2010
79	Tabanan	SMAN 2 Tabanan	2.700,00	Br. Grokgak Gede Delod Peken Tabanan	Pemerintah Kabupaten Tabanan	SHP No 97 tanggal 29 Desember 2009	31/12/2009
80	Tabanan	SMKN 3 Tabanan	5.000,00	Desa Bantas, Selamadeg Timur	Pemerintah Kabupaten Tabanan	SHP No 12 tanggal 5 Februari 2008	31/12/2008
81	Tabanan	SMAN 1 Kediri	6.975,00	Banjar Anyar, Kediri, Jl. Bingin Ambe	Pemerintah Kabupaten Tabanan	SHP No 26 tanggal 28 Agustus 2006	31/12/1998
82	Tabanan	SMAN 1 Tabanan	19,80	Jalan Gunung Agung, No.122 Tabanan	Pemerintah Kabupaten Tabanan	SHP No 34 tanggal 12 Juni 1999	31/12/1999
83	Karangasem	SMAN 1 Sidemen Karangasem	9.740,00	N/A	N/A	N/A	N/A

Daftar Penghuni Rumah Negara yang Tidak Memiliki SIP

No.	PD Pengelola	Nama Penghuni (Inisial)	Instansi Penghuni	Lokasi	SIP	Keputusan Gubernur	Nilai Sewa (Rp)	Masa Berlaku Hingga	Tipe Rumah Negara	Golongan Rumah Negara
1	BPKAD	AAGAS	Dinas Kelautan dan Perikanan	JI Sri Karya No 4 Denpasar	n/a	SK No. 1680/04-D/HK/2018 tanggal 16 Mei 2018	200.000,00	10 Desember 2019	C	II
2	BPKAD	AM	Dinas Kehutanan	JI Patih Nambi No 1 Ubung Kaja	n/a	SK No. 1680/04-D/HK/2018 tanggal 16 Mei 2018	300.000,00	16 Februari 2020	C	II
3	BPKAD	AAINS	Biro Organisasi Setda	JI Nusa Lembongan No 5 Denpasar	n/a	SK No 1053/04-D/HK/2018 tanggal 21 Februari 2018	450.000,00	21 Februari 2020	B	II
4	BPKAD	AARS	UPT Bapenda di Kab Buleleng	JI Raya Rajawali No 27 Singaraka	n/a	SK No 1053/04-D/HK/2018 tanggal 21 Februari 2018	300.000,00	21 Februari 2020	C	II
5	BPKAD	AH	Biro Umum	JI Hayam Wuruk Gang Nagasari No 149/4D Denpasar	n/a	SK No 1852/04-D/HK/2017 tanggal 9 November 2017	300.000,00	09 November 2019	C	II
6	BPKAD	CIMR	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	JI Nangka Selatan Gang XI No 1 B Denpasar	n/a	SK No. 1680/04-D/HK/2018 tanggal 16 Mei 2018	300.000,00	27 Januari 2020	C	II
7	BPKAD	CGAS	Biro Humas dan Protokol Setda	JI Hayam Wuruk No 149, 5B Denpasar	n/a	SK No 2338/04-D/HK/2018 tanggal 1 November 2018	100.000,00	06 September 2020	E	II
8	BPKAD	DKDA	BPKAD	JI Raya Sesetan No 248K Denpasar	n/a	SK No 178/04-D/HK/2018 tanggal 2 Januari 2018	450.000,00	02 Januari 2020	B	II
9	BPKAD	DNM	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	JI Nangka Selatan Gang XI no 53 F	n/a	SK Gub No 1747/04-D/HK/2018 tanggal 6 Juni 2018	200.000,00	27 Juni 2020	D	II
10	BPKAD	DGS	UPT KPH Dinas Kehutanan	JI Ratna No 11 Singaraja	n/a	SK No 1053/04-D/HK/2018 tanggal 21 Februari 2018	400.000,00	21 Februari 2020	B	II
11	BPKAD	GNR	Dinas Kehutanan	JI Patih Nambi No 8 Ubung Kaja Denpasar	n/a	SK Gub No 1747/04-D/HK/2018 tanggal 6 Juni 2018	300.000,00	27 Juni 2020	C	II
12	BPKAD	IGAA	UPT KPH Bali Utara Dinas Kehutanan	JI Tasbih No 7 Singaraja	n/a	SK No 1852/04-D/HK/2017 tanggal 9 November 2017	200.000,00	09 November 2019	D	II
13	BPKAD	IGD	Biro Umum Setda	JI Anyelir No 37 Denpasar	n/a	SK No 178/04-D/HK/2018 tanggal 2 Januari 2018	650.000,00	02 Januari 2020	A	II
14	BPKAD	IKA	Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Setda	JI Kerta Dalem Sari No 3X Sidakarya	n/a	SK No 178/04-D/HK/2018 tanggal 2 Januari 2018	650.000,00	02 Januari 2020	A	II
15	BPKAD	IKW	Dinas Tenaga Kerja dan ESDM	JI Hayam Wuruk No 194 A Denpasar	n/a	SK No 1053/04-D/HK/2018 tanggal 21 Februari 2018	300.000,00	21 Februari 2020	C	II
16	BPKAD	IMAM	Biro Humas dan Protokol Setda	JI Raya Benoa Pesanggaran No 695 Denpasar	n/a	SK No 1053/04-D/HK/2018 tanggal 21 Februari 2018	450.000,00	21 Februari 2020	B	II
17	BPKAD	IMAm	UPT KPH Bali Utara Dinas Kehutanan	JI Merpati No 4 Singaraja	n/a	SK Gub No 1747/04-D/HK/2018 tanggal 6 Juni 2018	100.000,00	27 Juni 2020	E	II
18	BPKAD	IMArt	Sekretariat DPRD	JI Nangka Selatan Gang XI/53 E Denpasar	n/a	SK No 1852/04-D/HK/2017 tanggal 9 November 2017	200.000,00	09 November 2019	D	II
19	BPKAD	IMBA	Biro Administrasi Setda	JI Patih Nambi No 3 Ubung Kaja	n/a	SK No. 1680/04-D/HK/2018 tanggal 16 Mei 2018	300.000,00	10 Desember 2019	C	II
20	BPKAD	IMSua	Satpol PP	JI Hayam Wuruk Gang Nagasari No 149/4F Denpasar	n/a	SK No 178/04-D/HK/2018 tanggal 2 Januari 2018	300.000,00	02 Januari 2020	C	II
21	BPKAD	IMSuk	Biro Administrasi Setda	JI Hayam Wuruk Gang Nagasari No 29 Denpasar	n/a	SK No. 1680/04-D/HK/2018 tanggal 16 Mei 2018	300.000,00	14 April 2020	C	II
22	BPKAD	INW	Dinas Tenaga Kerja dan ESDM	JI Hayam Wuruk No 194C Denpasar	n/a	SK No. 1680/04-D/HK/2018 tanggal 16 Mei 2018	200.000,00	16 Februari 2020	D	II
23	BPKAD	INSud	Biro Umum Setda	JI Bumi Ayu V No 110 Sanur Denpasar	n/a	SK No 1053/04-D/HK/2018 tanggal 21 Februari 2018	300.000,00	21 Februari 2020	C	II
24	BPKAD	INSum	Biro Organisasi Setda	JI Kecubung Gg Teratai No 194 Denpasar	n/a	SK No 2338/04-D/HK/2018 tanggal 1 November 2018	200.000,00	31 Oktober 2020	D	II
25	BPKAD	INW	UPT KPH Bali Utara Dinas Kehutanan	JI Merpati No 19 Singaraja	n/a	SK No. 1680/04-D/HK/2018 tanggal 16 Mei 2018	100.000,00	09 Mei 2020	E	II

No.	PD Pengelola	Nama Penghuni (Inisial)	Instansi Penghuni	Lokasi	SIP	Keputusan Gubernur	Nilai Sewa (Rp)	Masa Berlaku Hingga	Tipe Rumah Negara	Golongan Rumah Negara
26	BPKAD	IWK	Biro Kesejahteraan Rakyat Setda	JI Penyaringan No 11F Sanur	n/a	SK Gub No 1747/04-D/HK/2018 tanggal 6 Juni 2018	300.000,00	27 Juni 2020	C	II
27	BPKAD	IWS	Sekretariat DPRD	JI Badak No 2 Denpasar	n/a	SK No 178/04-D/HK/2018 tanggal 2 Januari 2018	650.000,00	02 Januari 2020	A	II
28	BPKAD	IBKGS	UPT Dinas Pendidikan Kab Buleleng	JI Merpati No 19 Singaraja	n/a	SK No. 1680/04-D/HK/2018 tanggal 16 Mei 2018	100.000,00	09 Mei 2020	E	II
29	BPKAD	IGAKKJS	Biro Hukum Setda	JI Kerta Dalem No 3X/5 Sidakarya Denpasar	n/a	SK No 1053/04-D/HK/2018 tanggal 21 Februari 2018	450.000,00	21 Februari 2020	B	II
30	BPKAD	JW	Satpol PP	JI Kecubung Gang Teratai No 195 F Denpasar	n/a	SK No 1852/04-D/HK/2017 tanggal 9 November 2017	200.000,00	09 November 2019	D	II
31	BPKAD	KGYA	Biro Administrasi Setda	JI Tukad Yeh Aya IX/Gang A.1 No 28 Denpasar	n/a	SK No. 1680/04-D/HK/2018 tanggal 16 Mei 2018	100.000,00	14 April 2020	E	II
32	BPKAD	KRD	BPKAD	JI Patih Nambi No 5 Ubung kaja Denpasar	n/a	SK No 1053/04-D/HK/2018 tanggal 21 Februari 2018	300.000,00	21 Februari 2020	C	II
33	BPKAD	KS	UPT BPSBTPH	JI Puduk No 3 Denpasar	n/a	SK No 2338/04-D/HK/2018 tanggal 1 November 2018	300.000,00	31 Oktober 2020	C	II
34	BPKAD	LN	Bapeda Litbang	JI Kerta Dalem No 3X Denpasar	n/a	SK No 1852/04-D/HK/2017 tanggal 9 November 2017	450.000,00	09 November 2019	B	II
35	BPKAD	MW	Dinas Kehutanan	JI Danau Tempe No 33 Blok B4 Sidakarya Denpasar	n/a	SK No 1053/04-D/HK/2018 tanggal 21 Februari 2018	100.000,00	21 Februari 2020	E	II
36	BPKAD	NKS	UPT Bapenda di kab Badung	JI Patih Nambi No 13 Ubung kaja Denpasar	n/a	SK No. 1680/04-D/HK/2018 tanggal 16 Mei 2018	300.000,00	27 Juni 2020	C	II
37	BPKAD	NMK	Dinas Tenaga Kerja dan ESDM	JI Hayam Wuruk No 194B Denpasar	n/a	SK No. 1680/04-D/HK/2018 tanggal 16 Mei 2018	300.000,00	27 Juni 2020	C	II
38	BPKAD	NMN	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	JI Raya Sesetan Gg Gurita III/8 Denpasar	n/a	SK No. 1680/04-D/HK/2018 tanggal 16 Mei 2018	300.000,00	14 April 2020	C	II
39	BPKAD	NT	Dinas Tenaga Kerja dan ESDM	JI Pulau Kae No 11 Denpasar	n/a	SK No. 1680/04-D/HK/2018 tanggal 16 Mei 2018	450.000,00	09 Mei 2020	B	II
40	BPSDM	IGAGA	UPT Bapenda Provinsi Kab Badung	JI Raya Sesetan No 248 (Ex BLPP)	n/a	SK No. 1680/04-D/HK/2018 tanggal 16 Mei 2018	100.000,00	09 Mei 2020	E	II
41	BPSDM	IKS	Biro Administrasi Pengadaan Barang Setda	JI Raya Sesetan No 516	n/a	SK Gub No 1747/04-D/HK/2018 tanggal 6 Juni 2018	100.000,00	27 Juni 2020	E	II
42	BPSDM	IBGS	Inspektorat	JI Raya Sesetan (Perum Ex BLPP Denpasar)	n/a	SK No 178/04-D/HK/2018 tanggal 2 Januari 2018	100.000,00	02 Januari 2020	E	II
43	Dinas Pendidikan	ANKR	Dinas Pendidikan Provinsi Bali (SLB Negeri 1 Badung)	JI Bypass Ngurah Rai Perumahan SLB Negeri 1 Badung D11	n/a	SK Gub No 1747/04-D/HK/2018 tanggal 6 Juni 2018	300.000,00	27 Juni 2020	C	II
44	Dinas Pendidikan	AMA	Dinas Pendidikan Provinsi Bali (SLB Negeri 1 Badung)	JI Bypass Ngurah Rai Perumahan SLB Negeri 1 Badung E	n/a	SK Gub No 1747/04-D/HK/2018 tanggal 6 Juni 2018	300.000,00	27 Juni 2020	C	II
45	Dinas Pendidikan	APDAS	Dinas Pendidikan Provinsi Bali (SLB Negeri 1 Badung)	JI Bypass Ngurah Rai Perumahan SLB Negeri 1 Badung E	n/a	SK Gub No 1747/04-D/HK/2018 tanggal 6 Juni 2018	300.000,00	27 Juni 2020	C	II
46	Dinas Pendidikan	DP	Dinas Pendidikan Provinsi Bali (SLB Negeri 1 Badung)	JI Bypass Ngurah Rai Perumahan SLB Negeri 1 Badung D4	n/a	SK Gub No 1747/04-D/HK/2018 tanggal 6 Juni 2018	300.000,00	27 Juni 2020	C	II
47	Dinas Pendidikan	DAMS	SLB Negeri 1 Gianyar	JI Erlangga Gianyar	n/a	SK Gub No 1747/04-D/HK/2018 tanggal 6 Juni 2018	100.000,00	21 Februari 2020	E	II
48	Dinas Pendidikan	Nad	Dinas Pendidikan Provinsi Bali (SLB Negeri 1 Badung)	JI Bypass Ngurah Rai Perumahan SLB Negeri 1 Badung D1	n/a	SK Gub No 1747/04-D/HK/2018 tanggal 6 Juni 2018	300.000,00	27 Juni 2020	C	II
49	Dinas Pendidikan	IMS	SLB Negeri 1 Bangli	JI Erlangga No. 16 A Bangli	n/a	SK Gub No 1747/04-D/HK/2018 tanggal 6 Juni 2018	125.000,00	21 Februari 2020	D	II
50	Dinas Pendidikan	INS	Dinas Pendidikan Provinsi Bali (SLB Negeri 1 Badung)	JI Bypass Ngurah Rai Perumahan SLB Negeri 1 Badung D3	n/a	SK Gub No 1747/04-D/HK/2018 tanggal 6 Juni 2018	300.000,00	27 Juni 2020	C	II
51	Dinas Pendidikan	KAS	SLB Negeri 1 Karangasem	JI Nenas Subagan Amlapura	n/a	SK Gub No 1747/04-D/HK/2018 tanggal 6 Juni 2018	125.000,00	21 Februari 2020	D	II

No.	PD Pengelola	Nama Penghuni (Inisial)	Instansi Penghuni	Lokasi	SIP	Keputusan Gubernur	Nilai Sewa (Rp)	Masa Berlaku Hingga	Tipe Rumah Negara	Golongan Rumah Negara
52	Dinas Pendidikan	Suw	SLB Negeri 1 Bangli	Jl Erlangga No. 16 A Bangli	n/a	SK Gub No 1747/04-D/HK/2018 tanggal 6 Juni 2018	125.000,00	21 Februari 2020	D	II
53	Dinas Pendidikan	EdP	Dinas Pendidikan Provinsi Bali (SLB Negeri 1 Badung)	Jl Bypass Ngurah Rai Perumahan SLB Negeri 1 Badung D10	n/a	SK Gub No 1747/04-D/HK/2018 tanggal 6 Juni 2018	300.000,00	27 Juni 2020	C	II
54	Dinas Pendidikan	EmP	Dinas Pendidikan Provinsi Bali (SLB Negeri 1 Badung)	Jl Bypass Ngurah Rai Perumahan SLB Negeri 1 Badung E	n/a	SK Gub No 1747/04-D/HK/2018 tanggal 6 Juni 2018	300.000,00	27 Juni 2020	C	II
55	Dinas Pendidikan	EM	Dinas Pendidikan Provinsi Bali (SLB Negeri 1 Badung)	Jl Bypass Ngurah Rai Perumahan SLB Negeri 1 Badung C2	n/a	SK Gub No 1747/04-D/HK/2018 tanggal 6 Juni 2018	300.000,00	27 Juni 2020	C	II
56	Dinas Pendidikan	IDNJ	SLB Negeri 1 Karangasem	Jl Nenas Subagan Amlapura	n/a	SK Gub No 1747/04-D/HK/2018 tanggal 6 Juni 2018	125.000,00	21 Februari 2020	D	II
57	Dinas Pendidikan	IGATS	Dinas Pendidikan Provinsi Bali (SLB Negeri 1 Badung)	Jl Bypass Ngurah Rai Perumahan SLB Negeri 1 Badung E	n/a	SK Gub No 1747/04-D/HK/2018 tanggal 6 Juni 2018	300.000,00	27 Juni 2020	C	II
58	Dinas Pendidikan	IGPSY	SLB Negeri 1 Karangasem	Jl Nenas Subagan Amlapura	n/a	SK Gub No 1747/04-D/HK/2018 tanggal 6 Juni 2018	125.000,00	21 Februari 2020	D	II
59	Dinas Pendidikan	IGNA	Dinas Pendidikan Provinsi Bali (SLB Negeri 1 Badung)	Jl Bypass Ngurah Rai Perumahan SLB Negeri 1 Badung D8	n/a	SK Gub No 1747/04-D/HK/2018 tanggal 6 Juni 2018	300.000,00	27 Juni 2020	C	II
60	Dinas Pendidikan	IKK	SLB Negeri 1 Klungkung	Jl Kebo Iwa Semarapura	n/a	SK Gub No 1747/04-D/HK/2018 tanggal 6 Juni 2018	125.000,00	21 Februari 2020	D	II
61	Dinas Pendidikan	IKB	SLB Negeri 1 Gianyar	Jl Erlangga Gianyar	n/a	SK Gub No 1747/04-D/HK/2018 tanggal 6 Juni 2018	100.000,00	21 Februari 2020	E	II
62	Dinas Pendidikan	IKD	Dinas Pendidikan Provinsi Bali (SLB Negeri 1 Badung)	Jl Bypass Ngurah Rai Perumahan SLB Negeri 1 Badung D5	n/a	SK Gub No 1747/04-D/HK/2018 tanggal 6 Juni 2018	300.000,00	27 Juni 2020	C	II
63	Dinas Pendidikan	IKM	Dinas Pendidikan Provinsi Bali (SLB Negeri 1 Badung)	Jl Bypass Ngurah Rai Perumahan SLB Negeri 1 Badung C3	n/a	SK Gub No 1747/04-D/HK/2018 tanggal 6 Juni 2018	300.000,00	27 Juni 2020	C	II
64	Dinas Pendidikan	IMAS	SLB Negeri 1 Karangasem	Jl Nenas Subagan Amlapura	n/a	SK Gub No 1747/04-D/HK/2018 tanggal 6 Juni 2018	125.000,00	21 Februari 2020	D	II
65	Dinas Pendidikan	IPP	Dinas Pendidikan Provinsi Bali (SLB Negeri 1 Badung)	Jl Bypass Ngurah Rai Perumahan SLB Negeri 1 Badung E	n/a	SK Gub No 1747/04-D/HK/2018 tanggal 6 Juni 2018	300.000,00	27 Juni 2020	C	II
66	Dinas Pendidikan	KSM	Dinas Pendidikan Provinsi Bali (SLB Negeri 1 Badung)	Jl Bypass Ngurah Rai Perumahan SLB Negeri 1 Badung D12	n/a	SK Gub No 1747/04-D/HK/2018 tanggal 6 Juni 2018	300.000,00	27 Juni 2020	C	II
67	Dinas Pendidikan	LS	Dinas Pendidikan Provinsi Bali (SLB Negeri 1 Badung)	Jl Bypass Ngurah Rai Perumahan SLB Negeri 1 Badung C4	n/a	SK Gub No 1747/04-D/HK/2018 tanggal 6 Juni 2018	300.000,00	27 Juni 2020	C	II
68	Dinas Pendidikan	MW	Dinas Pendidikan Provinsi Bali (SLB Negeri 1 Badung)	Jl Bypass Ngurah Rai Perumahan SLB Negeri 1 Badung E	n/a	SK Gub No 1747/04-D/HK/2018 tanggal 6 Juni 2018	300.000,00	27 Juni 2020	C	II
69	Dinas Pendidikan	NKSEU	Dinas Pendidikan Provinsi Bali (SLB Negeri 1 Badung)	Jl Bypass Ngurah Rai Perumahan SLB Negeri 1 Badung E	n/a	SK Gub No 1747/04-D/HK/2018 tanggal 6 Juni 2018	300.000,00	27 Juni 2020	C	II
70	Dinas Pendidikan	NMH	Dinas Pendidikan Provinsi Bali (SLB Negeri 1 Badung)	Jl Bypass Ngurah Rai Perumahan SLB Negeri 1 Badung D2	n/a	SK Gub No 1747/04-D/HK/2018 tanggal 6 Juni 2018	300.000,00	27 Juni 2020	C	II
71	Dinas Pendidikan	NNAS	Dinas Pendidikan Provinsi Bali (SLB Negeri 1 Badung)	Jl Bypass Ngurah Rai Perumahan SLB Negeri 1 Badung E	n/a	SK Gub No 1747/04-D/HK/2018 tanggal 6 Juni 2018	300.000,00	27 Juni 2020	C	II
72	Dinas Pendidikan	NWA	SLB Negeri 1 Gianyar	Jl Erlangga Gianyar	n/a	SK Gub No 1747/04-D/HK/2018 tanggal 6 Juni 2018	125.000,00	21 Februari 2020	D	II
73	Dinas Pendidikan	Nur	SLB Negeri 1 Karangasem	Jl Nenas Subagan Amlapura	n/a	SK Gub No 1747/04-D/HK/2018 tanggal 6 Juni 2018	125.000,00	21 Februari 2020	D	II
74	Dinas Pendidikan	NSas	SLB Negeri 1 Buleleng	Jl Veteran No. 11 A Singaraja	n/a	SK Gub No 1747/04-D/HK/2018 tanggal 6 Juni 2018	100.000,00	21 Februari 2020	E	II
75	Dinas Pendidikan	NSri	Dinas Pendidikan Provinsi Bali (SLB Negeri 1 Badung)	Jl Bypass Ngurah Rai Perumahan SLB Negeri 1 Badung D7	n/a	SK Gub No 1747/04-D/HK/2018 tanggal 6 Juni 2018	300.000,00	27 Juni 2020	C	II
76	Dinas Pendidikan	PL	SLB Negeri 1 Klungkung	Jl Kebo Iwa Semarapura	n/a	SK Gub No 1747/04-D/HK/2018 tanggal 6 Juni 2018	125.000,00	21 Februari 2020	D	II
77	Dinas Pendidikan	RW	Dinas Pendidikan Provinsi Bali (SLB Negeri 1 Badung)	Jl Bypass Ngurah Rai Perumahan SLB Negeri 1 Badung E	n/a	SK Gub No 1747/04-D/HK/2018 tanggal 6 Juni 2018	300.000,00	27 Juni 2020	C	II

No.	PD Pengelola	Nama Penghuni (Inisial)	Instansi Penghuni	Lokasi	SIP	Keputusan Gubernur	Nilai Sewa (Rp)	Masa Berlaku Hingga	Tipe Rumah Negara	Golongan Rumah Negara
78	Dinas Pendidikan	SKA	SLB Negeri 1 Karangasem	JI Nenas Subagan Amlapura	n/a	SK Gub No 1747/04-D/HK/2018 tanggal 6 Juni 2018	125.000,00	21 Februari 2020	D	II
79	Dinas Pendidikan	Sud	Dinas Pendidikan Provinsi Bali (SLB Negeri 1 Badung)	JI Bypass Ngurah Rai Perumahan SLB Negeri 1 Badung D9	n/a	SK Gub No 1747/04-D/HK/2018 tanggal 6 Juni 2018	300.000,00	27 Juni 2020	C	II
80	Dinas Pendidikan	Sum	Dinas Pendidikan Provinsi Bali (SLB Negeri 1 Badung)	JI Bypass Ngurah Rai Perumahan SLB Negeri 1 Badung C1	n/a	SK Gub No 1747/04-D/HK/2018 tanggal 6 Juni 2018	300.000,00	27 Juni 2020	C	II
81	Dinas Pendidikan	TNL	SLB Negeri 1 Klungkung	JI Kebo Iwa Semarapura	n/a	SK Gub No 1747/04-D/HK/2018 tanggal 6 Juni 2018	125.000,00	21 Februari 2020	D	II
82	Dinas Pendidikan	WR	Dinas Pendidikan Provinsi Bali (SLB Negeri 1 Badung)	JI Bypass Ngurah Rai Perumahan SLB Negeri 1 Badung D6	n/a	SK Gub No 1747/04-D/HK/2018 tanggal 6 Juni 2018	300.000,00	27 Juni 2020	C	II
83	Dinas PUPR	IKS	UPT Trans Sarbagita Dinas Perhubungan	JI Tukad Alas Arum No 9 Sesetan Denpasar	n/a	SK No. 1680/04-D/HK/2018 tanggal 16 Mei 2018	300.000,00	09 Mei 2020	C	II
84	Dinas Sosial	AASAC	Dinas Sosial	JI Tegal Harum No 2 Biaung Kesiman Denpasar	n/a	SK Gub No 1745/01-I/HK/2014 tanggal 1 Oktober 2014	300.000,00	n/a	D	II
85	Dinas Sosial	IGS	Dinas Sosial	JI Raya Pamogan	n/a	SK Gub No 1538/01-I/HK/2016 tanggal 27 Juni 2016	100.000,00	n/a	E	II
86	Dinas Sosial	IKW	Dinas Sosial	JI raya Pamogan N0 209 Denpasar	n/a	SK Gub No 1949/01-I/HK/2016 tanggal 31 Oktober 2016	100.000,00	n/a	E	II
87	Dinas Sosial	NWS	UPT Pelayanan Dinas Sosial	JI Raya Pamogan No 209 Denpasar	n/a	SK Gub No 1538/01-I/HK/2016 tanggal 27 Juni 2016	100.000,00	n/a	E	II
88	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	INK	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	JI Gurita IV Sesetan No 203 C Denpasar	n/a	SK No 1959/04-D/HK/2018 tanggal 19 Juli 2018	300.000,00	27 Juni 2020	C	II

Daftar Penghuni Rumah Negara yang Tidak Ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

No.	PD Pengelola	Nama Penghuni (Inisial)	Instansi Penghuni	Pangkat/Gol	Lokasi	LB (m ²)	SIP	Keputusan Gubernur	Nilai Sewa (Rp)	Masa Berlaku Hingga	Tipe Rumah Negara	Golongan Rumah Negara
1	BPKAD	AAIMN	Bapenda Prov Bali	IV/a	Jalan Gurita II No 12 Pegok, Sesetan Denpasar	120	593/210/UPT.P2.BPKAD Tgl 22-01-2019	n/a	450.000,00	22 Februari 2021	B	II
2	BPKAD	AH	Biro Hukum dan HAM Setda Prov Bali	IV/a	Jalan Kecubung Gang Tertai No 195F Denpasar	42	593/209/UPT.P2.BPKAD Tgl 22-01-2019	n/a	200.000,00	22 Februari 2021	D	II
3	BPKAD	AS	UPTD Tahura Dishut Prov Bali	III/c	Jalan Patih Nambi No 15 Ubung Kaja Denpasar	70	593/200/UPT.P2.BPKAD Tgl 21-01-2019	n/a	300.000,00	21 Februari 2021	C	II
4	BPKAD	CGASA	Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Bali	III/c	Jln Hayam Wuruk 149. 5 B Gg Naga Sari Denpasar	36	593/72/UPT.P2.BPKAD Tgl 09-01-2019	n/a	100.000,00	06 September 2020	E	II
5	BPKAD	DPA	BPKAD Prov Bali	III/c	Jalan Pucuk 7 Denpasar	108,5	593/2539/UPTD.PBMD Tgl 07-10-2019	n/a	300.000,00	07 Oktober 2021	C	II
6	BPKAD	NP	Biro Umum Setda Prov. Bali	IV/a	Jl. Dahlia No. 2 C Singaraja	36	593/276/UPT.P2.BPKAD Tgl 30-01-2019	n/a	100.000,00	09 Mei 2020	E	II
7	BPKAD	IGK	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman Prov Bali	IV/b	Jln Hayam Wuruk No. 151/D Denpasar	72	593/3040/UPTD.PBMD Tgl 05-11-2019	n/a	300.000,00	01 November 2021	E	II
8	BPKAD	IGKP	BPKAD	III/a	Jl Pucuk No 7 Denpasar	108,5	593/293/UPTD.PBMD	n/a	300.000,00	07 Oktober 2021	B	II
9	BPKAD	IGPSG	SatPol PP Provinsi Bali	IV/a	Jalan Tukad Jo Gadin No 8/C Denpasar	67	593/197/UPT.P2.BPKAD Tgl 21-01-2019	n/a	300.000,00	27 Juni 2020	D	II
10	BPKAD	IGS	Sekretariat DPRD Prov Bali	IV/B	Jln Iman Bonjol No 150 Denpasar	150	593/3041/UPTD.PBMD Tgl 05-11-2019	n/a	450.000,00	05 November 2021	B	II
11	BPKAD	IGBNA	Bapenda Provinsi Bali	III/a	Jl. Dahlia No. 3 Singaraja	38	593/1811/UPTD.PBMD Tgl 07-08-2019	n/a	100.000,00	09 Mei 2021	E	II
12	BPKAD	IGAAS	Dinas Tanaman Pangan,Hortikultura dan	II/c	Jln Soka 27 Denpasar	120	593/2129/UPTD.PBMD Tgl 02-09-2019	n/a	450.000,00	16 Februari 2020	B	II
13	BPKAD	IKH	Satpol PP Provinsi Bali	III/b	Jalan Tukad Jo Gading No. 8 B Denpasar	58	593/77/UPT.P2.BPKAD Tgl 09-01-2019	n/a	200.000,00	09 Mei 2020	D	II
14	BPKAD	IKMA	Dinas Peternakan Prov. Bali	II/c	Jl. Srikarya No. 16 A Denpasar	50	593/239/UPT.P2.BPKAD Tgl 24-01-2019	n/a	200.000,00	16 Februari 2020	D	II
15	BPKAD	IMBA	Biro Adm. Pengadaan Barang / Jasa Setda Prov.	IV/a	Jalan Patih Nambi No 3 Ubung Kaja Denpasar	70	593/23/UPT.P2.BPKAD Tgl 07-01-2019	n/a	300.000,00	16 Februari 2020	C	II
16	BPKAD	IMS	Bappeda Litbang Prov Bali	III/c	Jln Raya Sesetan Gang Gurita I/5 Denpasar	80	593/2543/UPTD.PBMD Tgl 07-10-2019	n/a	300.000,00	10 Oktober 2021	C	II
17	BPKAD	INDrmt	Biro Humas Setda Prov. Bali	II/c	Jln Raya Sesetan No. 248/516 E Denpasar	70	593/241/UPT.P2.BPKAD Tgl 24-01-2019	n/a	300.000,00	29 Desember 2020	C	II
18	BPKAD	INDrmy	Biro PBJ Setda Prov. Bali	III/a	Jln Raya Sesetan Gang Gurita I/17 Denpasar	50	593/212/UPT.P2.BPKAD Tgl 22-01-2019	n/a	200.000,00	08 Desember 2020	D	II
19	BPKAD	INSua	Bapenda Prov. Bali	II/b	Jl. Srikarya No. 16 B Denpasar	50	593/195/UPT.P2.BPKAD Tgl 21-01-2019	n/a	200.000,00	08 Desember 2020	D	II
20	BPKAD	INSum	Biro Organisasi Setda Prov. Bali	II/c	Jalan Kecubung Gang Tertai No 194 Denpasar	54	593/66/UPT.P2.BPKAD Tgl 09-01-2019	n/a	200.000,00	31 Oktober 2020	D	II
21	BPKAD	IPAP	Disdukcapil dan KB Prov Bali	III/c	Jalan Pucuk 9 Denpasar	108,5	593/2145/UPTD.PBMD Tgl 02-09-2019	n/a	300.000,00	09 September 2021	C	II
22	BPKAD	IWEW	Disdukcapil dan KB Prov Bali	IV/b	Jalan Patih Nambi No 2 Ubung Kaja Denpasar	70	593/1810/UPTD.PBMD Tgl 07-08-2019	n/a	300.000,00	07 Februari 2021	C	II
23	BPKAD	IWK	Dinas Peternakan Prov. Bali	III/b	Jln Raya Sesetan No. 248 C Denpasar	70	593/2128/UPTD.PBMD Tgl 02-09-2019	n/a	300.000,00	08 September 2021	C	II
24	BPKAD	IWP	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. Bali	II/c	Jalan Soka, Gang Kertapura No. III/3 C Denpasar	100	593/1831/UPTD.PBMD Tgl 07-08-2019	n/a	300.000,00	08 September 2021	C	II
25	BPKAD	IANNP	Sekretariat DPRD Provinsi Bali	III/c	Jalan Kecubung gang Tertai No 189 Denpasar	72	593/2542/UPTD.PBMD Tgl 07-10-2019	n/a	300.000,00	09 September 2021	C	II
26	BPKAD	Ibr	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Prov Bali	III/a	Jln Penyaringan 11 B Sanur Kauh Denpasar	120	593/3466/UPTD.PBMD Tgl 05-12-2019	n/a	300.000,00	24 Juni 2021	B	II
27	BPKAD	IBMW	Dinas Kehutanan Prov. Bali	II/c	Jalan Danau Tempe 33 Blok A.5 (Asrama Jaga Wana)	30	593/2144/UPTD.PBMD Tgl 02-09-2019	n/a	100.000,00	02 September 2021	E	II
28	BPKAD	IBSM	Biro Humas dan Protokol Setda	IV/a	Jl Hayam Wuruk GG Nagasari No 3C Denpasar	72	593/1095/UPTD.PBMD	n/a	300.000,00	14 Mei 2021	C	II

No.	PD Pengelola	Nama Penghuni (Inisial)	Instansi Penghuni	Pangkat/Gol	Lokasi	LB (m ²)	SIP	Keputusan Gubernur	Nilai Sewa (Rp)	Masa Berlaku Hingga	Tipe Rumah Negara	Golongan Rumah Negara
29	BPKAD	IBKWN	Biro PBJ Setda Prov Bali	III/c	Jalan Patih Nambi No 7 Ubung Kaja Denpasar	70	593/199/UPT.P2.BPKAD Tgl 21-01-2019	n/a	300.000,00	21 Februari 2021	C	II
30	BPKAD	KL	BKD Prov Bali	IV/d	Jalan Patih Nambi No 10 Ubung Kaja Denpasar	70	593/3037/UPTD.PBMD Tgl 05-11-2019	n/a	300.000,00	05 November 2021	C	II
31	BPKAD	MES	Dinas Tanaman Pangan,Hortikultura dan	IV/a	Jalan Patih Nambi No 16 Ubung Kaja Denpasar	70	593/1647/UPTD.PBMD Tgl 11-07-2019	n/a	300.000,00	03 September 2021	C	II
32	BPKAD	IMG	Dinas Kehutanan Prov. Bali	IV/d	Jalan Nangka Selatan No. 73 Denpasar	109,26	593/1690/UPTD.PBMD Tgl 17-07-2019	n/a	450.000,00	07 Februari 2021	B	II
33	BPKAD	IMN	Dinas Kehutanan Prov. Bali	III/d	Jalan Danau Tempe 33 Blok A.1 (Asrama Jaga Wana)	30	593/3043/UPTD.PBMD Tgl 05-11-2019	n/a	100.000,00	31 Desember 2020	E	II
34	BPKAD	INS	Dinas Tenaga Kerja dan ESDM prov Bali	III/d	Jln Raya Sesetan No. 248/516 E Denpasar	70	593/74/UPT.P2.BPKAD Tgl 09-01-2019	n/a	300.000,00	31 Oktober 2020	C	II
35	BPKAD	MH	UPTD Tahura Dishut Prov Bali	IV/a	Jalan Patih Nambi No 18 Ubung Kaja Denpasar	70	593/273/UPT.P2.BPKAD Tgl 30-01-2019	n/a	300.000,00	08 Desember 2020	C	II
36	BPKAD	PS	Dinas Kehutanan Prov. Bali	IV/b	Jalan Kerta Dalem Sari II 3X4, Sidakarya Denpasar	120	593/75/UPT.P2.BPKAD Tgl 09-01-2019	n/a	450.000,00	08 Desember 2020	B	II
37	BPKAD	KN	UPTD PMBD, BPKAD Prov Bali	IV/a	Jln Nangka Gg.XI 53 E Denpasar	54	593/3042/UPTD.PBMD Tgl 05-11-2019	n/a	200.000,00	04 November 2021	D	II
38	BPKAD	KS	BPKAD Provinsi Bali	II/c	Jl.Raya Sesetan Gg. Gurita III/6	66	593/194/UPT.P2.BPKAD Tgl 21-01-2019	n/a	300.000,00	24 April 2020	C	II
39	BPKAD	KW	Dinas Kehutanan Prov. Bali	III/a	Jalan Danau Tempe 33 Blok A4 (Asrama Jaga Wana)	30	593/3466/UPTD.PBMD Tgl 05-12-2019	n/a	100.000,00	15 Desember 2021	E	II
40	BPKAD	KYA	Biro Kesra Setda Prov. Bali	II/c	Jln Gurita IV No.2 Sesetan Denpasar	70	593/196/UPT.P2.BPKAD Tgl 21-01-2019	n/a	300.000,00	27-022020	C	II
41	BPKAD	KS	Biro Hukum dan HAM Setda Prov Bali	III/c	Jalan Puduk No 3 Denpasar	100	593/2343/UPTD.PBMD Tgl 23-09-2019	n/a	300.000,00	19 September 2021	C	II
42	BPKAD	LNW	BPKAD Prov Bali	IV/a	Jalan Kerta Dalem No. 3X3, Sidakarya Denpasar	120	593/3463/UPTD.PBMD Tgl 05-12-2019	n/a	450.000,00	10 November 2021	B	II
43	BPKAD	MS	Bapenda Prov. Bali	III/c	Jln Raya Sesetan Gang Gurita II/2 Denpasar	70	593/76/UPT.P2.BPKAD Tgl 09-01-2019	n/a	300.000,00	08 Desember 2020	C	II
44	BPKAD	MG	Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Bali	IV/a	Jln Hayam Wuruk Gg. Nagasari No. 3C Denpasar	72	593/1095/UPTD.PBMD Tgl 14-05-2019	n/a	300.000,00	14 Mei 2021	C	II
45	BPKAD	NKN	Dinas Kesehatan Prov Bali	II/d	Jalan Pulau Bawean 30 Denpasar	70	593/198/UPT.P2.BPKAD Tgl 21-01-2019	n/a	300.000,00	29 Desember 2020	C	II
46	BPKAD	NKAG	UPT Musium Bali	II/c	Jalan Batuyang 78 B Batubulan Gianyar	73,5	593/211/UPT.P2.BPKAD Tgl 22-01-2019	n/a	300.000,00	31 Oktober 2020	C	II
47	BPKAD	NMSY	Dinas dukcapil dan KB Prov Bali	IV/a	Jalan Tukad Yeh Aya Gg.IX A1 No. 20	67	593/73/UPT.P2.BPKAD Tgl 09-01-2019	n/a	300.000,00	31 Oktober 2020	C	II
48	BPKAD	NMM	Dinas Asrip dan Perpustakaan Prov Bali	III/d	Jalan Patih Nambi No 17 Ubung Kaja Denpasar	70	593/1646/UPTD.PBMD Tgl 11-07-2019	n/a	300.000,00	31 Oktober 2020	C	II
49	BPKAD	NNS	UPTD Bapenda Kota Denpasar	III/a	Jln Nangka Selatan Gg. XI / I A Denpasar	66	593/208/UPT.P2.BPKAD Tgl 22-01-2019	n/a	300.000,00	22 Februari 2021	C	II
50	BPKAD	NWA	Badan Pendapatan Daerah Prov. Bali	III/c	Jalan Soka Gang Kertapura III No.3 Kesiman, Denpasar	36	593/1649/UPTD.PBMD Tgl 11-08-2019	n/a	100.000,00	08 September 2021	E	II
51	BPKAD	PEP	BPKAD Prov Bali	III/a	Jl Tukad Yeh Aya IX/ Gg. A.1 No. 26 Denpasar	67	593/3465/UPTD.PBMD Tgl 05-12-2019	n/a	300.000,00	15 Desember 2021	C	II
52	BPKAD	PM	Dis. Perhubungan Prov Bali	III/d	Jalan Gurita I No 9 Sesetan Denpasar	70,24	593/2127/UPTD.PBMD Tgl 02-09-2019	n/a	300.000,00	30 Oktober 2021	C	II
53	BPKAD	SMPA	Biro Perekonomian Setda Prov. Bali	III/d	Jl. Gurita IV No. 7 Denpasar	304	593/275/UPT.P2.BPKAD Tgl 30-01-2019	n/a	650.000,00	29 Desember 2020	A	II
54	BPKAD	TBP	Biro Perekonomian Setda Prov. Bali	III/c	Jalan Danau Tempe No.33 Blok C3 (Asrama Jaga Wana)	30	593/2541/UPTD.PBMD Tgl 07-10-2019	n/a	100.000,00	12 September 2021	E	II
55	BPSDM	ES	BPSDM	III/d	Jl Gurita IV Komplek Pertanian No 248 H Sesetan	70	592/092/BPSDM	n/a	300.000,00	31 Desember 2020	D	II
56	BPSDM	IMS	Dinas Pendidikan	III/d	Jl Raya Sesetan 516F	32	593/096/Sekretariat/BPSDM	n/a	100.000,00	31 Desember 2020	D	II
57	BPSDM	INY	BPSDM	III/b	Jl Gurita IV/516 G	45	593/097/Sekretariat/BPSDM	n/a	200.000,00	31 Desember 2020	D	II
58	BPSDM	IPI	BPSDM	III/c	Jl Raya Sesetan No 516	36	593/094/BPSDM	n/a	200.000,00	31 Desember 2020	D	II

No.	PD Pengelola	Nama Penghuni (Inisial)	Instansi Penghuni	Pangkat/Gol	Lokasi	LB (m ²)	SIP	Keputusan Gubernur	Nilai Sewa (Rp)	Masa Berlaku Hingga	Tipe Rumah Negara	Golongan Rumah Negara
59	BPSDM	IAPS	Dinas Ketahanan Pangan	IV/a	Jl Raya Sesetan No 190	32	593/095/Sekretariat/BPSDM	n/a	100.000,00	31 Desember 2020	D	II
60	Dinas Kesehatan	AAGR	Dinas Kesehatan	III/c	Jl Gemitir Biaung No 3	50	012.4/1319/Umum.Diskes	n/a	200.000,00	01 November 2020	D	II
61	Dinas Kesehatan	AAIAM	Dinas Kesehatan	III/b	Jl Gemitir Biaung No 6	36	012.4/1320/Umum.Diskes	n/a	100.000,00	01 November 2020	E	II
62	Dinas Kesehatan	BUW	Dinas Kesehatan	III/c	Jl Gemitir Biaung No 11	50	012.4/1321/Umum.Diskes	n/a	200.000,00	01 November 2020	D	II
63	Dinas Kesehatan	CIDA	Dinas Kesehatan	III/d	Jl Gemitir Biaung No 9	50	012.4/1326/Umum.Diskes	n/a	200.000,00	01 November 2020	D	II
64	Dinas Kesehatan	DPA	Dinas Kesehatan	IV/a	Jl Gemitir Biaung No 7	50	012.4/1323/Umum.Diskes	n/a	200.000,00	01 November 2020	D	II
65	Dinas Kesehatan	IMS	Dinas Kesehatan	III/b	Jl Gemitir Biaung No 10	36	012.4/1327/Umum.Diskes	n/a	100.000,00	01 November 2020	E	II
66	Dinas Kesehatan	INTPS	Dinas Kesehatan	III/c	Jl Gemitir Biaung No 4	36	012.4/1328/Umum.Diskes	n/a	100.000,00	01 November 2020	E	II
67	Dinas Kesehatan	KM	Dinas Kesehatan	III/b	Jl Gemitir Biaung No 2	36	012.4/1325/Umum.Diskes	n/a	100.000,00	01 November 2020	E	II
68	Dinas Kesehatan	NPGY	Dinas Kesehatan	IV/a	Jl Gemitir Biaung No 5	50	012.4/1322/Umum.Diskes	n/a	200.000,00	01 November 2020	D	II
69	Dinas Kesehatan	NWJ	Dinas Kesehatan	III/c	Jl Gemitir Biaung No 8	36	012.4/1324/Umum.Diskes	n/a	100.000,00	01 November 2020	E	II

Daftar Penghuni Rumah Negara Tidak Sesuai Peruntukan/Tipe Rumah Negara

No.	PD Pengelola	Nama Penghuni (Instal)	Instansi Penghuni	Pangkat/Gol	Lokasi	LB	SIP	Keputusan Gubernur	Nilai Sewa (Rp)	Masa Berlaku Hingga	Tipe Rumah Negara	Golongan Rumah Negara	Keterangan
1	BPKAD	GAA	Dinas Perindag Prov Bali	III/a Staf	Jln Hayam Wuruk 149. 5E. Gg Naga sari Denpasar	72	593/29/UPT.P2.BPKAD Tgl 07-01-2019	SK No 1959/04-D/HK/2018 tanggal 19 Juli 2018	300.000,00	09 Juli 2020	C	II	PNS Gol. III/a ke Bawah Belum Dapat Menghuni Rumah Dinas
2	BPKAD	IGKP	BPKAD	III/a Staf	Jl Pucuk No 7 Denpasar	108,5	593/293/UPTD.PBMD	n/a	300.000,00	07 Oktober 2021	B	II	PNS Gol. III/a ke Bawah Belum Dapat Menghuni Rumah Dinas
3	BPKAD	IGAMPK	Badan Pendapatan Daerah Prov. Bali	II/b Staf	Jl. Srikeya No. 14/16 Denpasar	50	593/28/UPT.P2.BPKAD Tgl 07-01-2019	SK No 1959/04-D/HK/2018 tanggal 19 Juli 2018	200.000,00	27 Juni 2020	D	II	PNS Gol. III/a ke Bawah Belum Dapat Menghuni Rumah Dinas
4	BPKAD	IGBNA	Bapenda Provinsi Bali	III/a Staf	Jl. Dahlia No. 3 Singaraja	38	593/1811/UPTD.PBMD Tgl 07-08-2019	n/a	100.000,00	09 Mei 2021	E	II	PNS Gol. III/a ke Bawah Belum Dapat Menghuni Rumah Dinas
5	BPKAD	IGAAS	Dinas Tanaman Pangan,Hortikultura dan Perkebunan Prov. Bali	II/c Staf	Jln Soka 27 Denpasar	120	593/2129/UPTD.PBMD Tgl 02-09-2019	n/a	450.000,00	16 Februari 2020	B	II	PNS Gol. III/a ke Bawah Belum Dapat Menghuni Rumah Dinas
6	BPKAD	IKMA	Dinas Peternakan Prov. Bali	II/c Staf	Jl. Srikeya No. 16 A Denpasar	50	593/239/UPT.P2.BPKAD Tgl 24-01-2019	n/a	200.000,00	16 Februari 2020	D	II	PNS Gol. III/a ke Bawah Belum Dapat Menghuni Rumah Dinas
7	BPKAD	INDrmt	Biro Humas Setda Prov. Bali	II/c Staf	Jln Raya Sesetan No. 248/516 E Denpasar	70	593/241/UPT.P2.BPKAD Tgl 24-01-2019	n/a	300.000,00	29 Desember 2020	D	II	PNS Gol. III/a ke Bawah Belum Dapat Menghuni Rumah Dinas
8	BPKAD	INDrmy	Biro PBJ Setda Prov. Bali	III/a Staf	Jln Raya Sesetan Gang Gurita I/17 Denpasar	50	593/212/UPT.P2.BPKAD Tgl 22-01-2019	n/a	200.000,00	08 Desember 2020	D	II	PNS Gol. III/a ke Bawah Belum Dapat Menghuni Rumah Dinas
9	BPKAD	INSua	Bapenda Prov. Bali	II/b Staf	Jl. Srikeya No. 16 B Denpasar	50	593/195/UPT.P2.BPKAD Tgl 21-01-2019	n/a	200.000,00	08 Desember 2020	D	II	PNS Gol. III/a ke Bawah Belum Dapat Menghuni Rumah Dinas
10	BPKAD	INSum	Biro Organisasi Setda Prov. Bali	II/c Staf	Jalan Kecubung Gang Tertai No 194 Denpasar	54	593/66/UPT.P2.BPKAD Tgl 09-01-2019	n/a	200.000,00	31 Oktober 2020	D	II	PNS Gol. III/a ke Bawah Belum Dapat Menghuni Rumah Dinas
11	BPKAD	IPTN	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Prov Bali	II/d Staf	Jln Penyaringan 11 D, Sanur Kauh Denpasar	70	593/1815/UPTD.PBMD Tgl 07-08-2019	SK No 1959/04-D/HK/2018 tanggal 19 Juli 2018	300.000,00	19 Juli 2020	D	II	PNS Gol. III/a ke Bawah Belum Dapat Menghuni Rumah Dinas
12	BPKAD	IWP	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. Bali	II/c Staf	Jalan Soka, Gang Kertapura No. III/3 C Denpasar	100	593/1831/UPTD.PBMD Tgl 07-08-2019	n/a	300.000,00	08 September 2021	B	II	PNS Gol. III/a ke Bawah Belum Dapat Menghuni Rumah Dinas
13	BPKAD	Ibr	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Prov Bali	III/a Staf	Jln Penyaringan 11 B Sanur Kauh Denpasar	120	593/3466/UPTD.PBMD Tgl 05-12-2019	n/a	300.000,00	24 Juni 2021	B	II	PNS Gol. III/a ke Bawah Belum Dapat Menghuni Rumah Dinas
14	BPKAD	IAKY	Dinas Kehutanan	II/c Staf	Jalan Tukad Yeh Aya IX No. 22 Denpasar	67	593/69/UPT.P2.BPKAD Tgl 09-01-2019	SK No 2338/04-D/HK/2018 tanggal 1 November 2018	300.000,00	27 Juni 2020	C	II	PNS Gol. III/a ke Bawah Belum Dapat Menghuni Rumah Dinas
15	BPKAD	IBMW	Dinas Kehutanan Prov. Bali	II/c Staf	Jalan Danau Tempe 33 Blok A.5 (Asrama Jaga Wana)	30	593/2144/UPTD.PBMD Tgl 02-09-2019	n/a	100.000,00	02 September 2021	D	II	PNS Gol. III/a ke Bawah Belum Dapat Menghuni Rumah Dinas
16	BPKAD	KDA	Dinas Kesehatan Prov. Bali	II/d Staf	Jalan Patih Nambi No 4 Ubung Kaja Denpasar	70	593/24/UPT.P2.BPKAD Tgl 07-01-2019	SK No 1959/04-D/HK/2018 tanggal 19 Juli 2018	300.000,00	09 Juli 2020	C	II	PNS Gol. III/a ke Bawah Belum Dapat Menghuni Rumah Dinas
17	BPKAD	KS	BPKAD Provinsi Bali	II/c Staf	Jl.Raya Sesetan Gg. Gurita III/6	66	593/194/UPT.P2.BPKAD Tgl 21-01-2019	n/a	300.000,00	24 April 2020	D	II	PNS Gol. III/a ke Bawah Belum Dapat Menghuni Rumah Dinas
18	BPKAD	KWid	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Prov Bali	III/a Staf	Jln Penyaringan 11 E, Sanur Kauh Denpasar	70	593/19/UPT.P2.BPKAD Tgl 07-01-2019	SK No 1959/04-D/HK/2018 tanggal 19 Juli 2018	300.000,00	23 Juni 2019	D	II	PNS Gol. III/a ke Bawah Belum Dapat Menghuni Rumah Dinas
19	BPKAD	KWit	Dinas Kehutanan Prov. Bali	III/a Staf	Jalan Danau Tempe 33 Blok A4 (Asrama Jaga Wana)	30	593/3466/UPTD.PBMD Tgl 05-12-2019	n/a	100.000,00	15 Desember 2021	D	II	PNS Gol. III/a ke Bawah Belum Dapat Menghuni Rumah Dinas
20	BPKAD	KYA	Biro Kesra Setda Prov. Bali	II/c Staf	Jln Gurita IV No.2 Sesetan Denpasar	70	593/196/UPT.P2.BPKAD Tgl 21-01-2019	n/a	300.000,00	27-02-2020	D	II	PNS Gol. III/a ke Bawah Belum Dapat Menghuni Rumah Dinas
21	BPKAD	NKN	Dinas Kesehatan Prov Bali	II/d Staf	Jalan Pulau Bawean 30 Denpasar	70	593/198/UPT.P2.BPKAD Tgl 21-01-2019	n/a	300.000,00	29 Desember 2020	D	II	PNS Gol. III/a ke Bawah Belum Dapat Menghuni Rumah Dinas
22	BPKAD	NKAG	UPT Musium Bali	II/c Staf	Jalan Batuyang 78 B Batubulan Gianyar	73,5	593/211/UPT.P2.BPKAD Tgl 22-01-2019	n/a	300.000,00	31 Oktober 2020	C	II	PNS Gol. III/a ke Bawah Belum Dapat Menghuni Rumah Dinas
23	BPKAD	NKB	Dinas Kehutanan Prov. Bali	II/c Staf	Jalan Patih Nambi No 9 Ubung Kaja Denpasar	70	593/68/UPT.P2.BPKAD Tgl 09-01-2019	SK No 2338/04-D/HK/2018 tanggal 1 November 2018	300.000,00	27 Juni 2020	D	II	PNS Gol. III/a ke Bawah Belum Dapat Menghuni Rumah Dinas
24	BPKAD	NND	Dinas Pariwisata Prov. Bali	II/c Staf	Jln Penyaringan 11 A, Sanur Kauh Denpasar	70	593/20/UPT.P2.BPKAD Tgl 07-01-2019	SK No 1959/04-D/HK/2018 tanggal 19 Juli 2018	450.000,00	27 Juni 2019	D	II	PNS Gol. III/a ke Bawah Belum Dapat Menghuni Rumah Dinas
25	BPKAD	NNP	Biro Organisasi Setda Prov. Bali	II/c Staf	Jalan Kecubung Gang Tertai No 192 Denpasar	37	593/67/UPT.P2.BPKAD Tgl 09-01-2019	SK No 2338/04-D/HK/2018 tanggal 1 November 2018	100.000,00	31 Oktober 2020	D	II	PNS Gol. III/a ke Bawah Belum Dapat Menghuni Rumah Dinas
26	BPKAD	NNS	UPTD Bapenda Kota Denpasar	III/a Staf	Jln Nangka Selatan Gg. XI / I A Denpasar	66	593/208/UPT.P2.BPKAD Tgl 22-01-2019	n/a	300.000,00	22 Februari 2021	D	II	PNS Gol. III/a ke Bawah Belum Dapat Menghuni Rumah Dinas
27	BPKAD	NPSR	Bapenda Prov Bali	III/a Staf	Jalan Anyelir No. 1 Denpasar	100	593/26/UPT.P2.BPKAD Tgl 07-01-2019	SK No 1959/04-D/HK/2018 tanggal 19 Juli 2018	300.000,00	09 Juli 2020	B	II	PNS Gol. III/a ke Bawah Belum Dapat Menghuni Rumah Dinas
28	BPKAD	PEP	BPKAD Prov Bali	III/a Staf	Jl Tukad Yeh Aya IX/ Gg. A.1 No. 26	67	593/3465/UPTD.PBMD Tgl 05-12-2019	n/a	300.000,00	15 Desember 2021	D	II	PNS Gol. III/a ke Bawah Belum Dapat Menghuni Rumah Dinas
29	BPKAD	VES	Dinas Pariwisata Prov. Bali	III/a Staf	Jalan Gurita I No 9B Pegok,Sesetan Denpasar	70	593/3464/UPTD.PBMD Tgl 05-12-2019	SK No 178/04-D/HK/2018 tanggal 2 Januari 2018	300.000,00	03 Januari 2022	D	II	PNS Gol. III/a ke Bawah Belum Dapat Menghuni Rumah Dinas
30	BPKAD	AAIM	Bapenda Prov Bali	IV/a Kasubag	Jalan Gurita II No 12 Pegok, Sesetan Denpasar	120	593/210/UPT.P2.BPKAD Tgl 22-01-2019	n/a	450.000,00	22-02-2021	B	II	Seharusnya menghuni Rumah Dinas Tipe C (Luas 72-99)
31	BPKAD	IMS	Dinas Sosial Provinsi Bali	III/d Kepala Seksi	Jl Tukad Yeh Penet II No 9 Renon Denpasar	120	593/27/UPT.P2.BPKAD Tgl 07-01-2019	SK No 1959/04-D/HK/2018 tanggal 19 Juli 2018	450.000,00	23-06-2019	B	II	Seharusnya menghuni Rumah Dinas Tipe C (Luas 72-99)
32	BPKAD	IPAP	Disdukcapil dan KB Prov Bali	III/c Kepala Seksi	Jalan Pucuk 9 Denpasar	108,5	593/2145/UPTD.PBMD Tgl 02-09-2019	n/a	300.000,00	09-09-2021	B	II	Seharusnya menghuni Rumah Dinas Tipe C (Luas 72-99)
33	BPKAD	KS	Biro Hukum dan HAM Setda Prov Bali	III/c	Jalan Puduk No 3 Denpasar	100	593/2343/UPTD.PBMD Tgl 23-09-2019	n/a	300.000,00	19-09-2021	B	II	Seharusnya menghuni Rumah Dinas Tipe D (Luas 30-71)
34	BPKAD	LN	BPKAD Prov Bali	IV/a Eselon IV	Jalan Kerta Dalem No. 3X3, Sidakarya Denpasar	120	593/3463/UPTD.PBMD Tgl 05-12-2019	n/a	450.000,00	10-11-2021	B	II	Seharusnya menghuni Rumah Dinas Tipe C (Luas 72-99)
35	BPKAD	NLKG	BPKAD Provinsi Bali	III/c	Jalan Kecubung Gang Tertai No 193 Denpasar	80	593/3039/UPTD.PBMD Tgl 05-11-2019	SK No 1852/04-D/HK/2017 tanggal 9 November 2017	300.000,00	10-11-2021	C	II	Seharusnya menghuni Rumah Dinas Tipe D (Luas 30-71)
36	BPKAD	SMP	Biro Perekonomian Setda Prov. Bali	III/d Kasubag	Jl. Gurita IV No. 7 Denpasar	304	593/275/UPT.P2.BPKAD Tgl 30-01-2019	n/a	650.000,00	29-12-2020	A	II	Seharusnya menghuni Rumah Dinas Tipe C (Luas 72-99)

**RENCANA AKSI (*ACTION PLAN*) ATAS REKOMENDASI BPK RI
DALAM KONSEP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI TA 2019**

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan
SPI				
1	Kesalahan Penganggaran atas Realisasi Belanja Modal Sebesar Rp4.413.142.374,36	<p>BPK merekomendasikan Gubernur Bali agar memerintahkan:</p> <p>a. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Kepala Dinas Kesehatan dalam mengajukan RKA mengacu pada ketentuan penyajian belanja sesuai SAP;</p> <p>b. TAPD menganggarkan belanja modal mengacu pada pedoman penyusunan APBD.</p>	<p>a. Hasil reviu terhadap anggaran belanja Tahun 2020 agar sesuai dengan pos belanja modal dan belanja barang. Hasil reviu tersebut akan dituangkan dalam APBD Perubahan TA 2020.</p> <p>b. Hal ini telah tertuang dalam Petunjuk Teknis Penyusunan RKA yang diterbitkan tiap Tahun Anggaran sebagai acuan oleh SKPD dalam Penyusunan RKA dan akan dipertegas kembali dalam petunjuk teknis penyusunan RKA Tahun Anggaran 2021.</p>	<p>10 Juli 2020</p> <p>bulan Agustus 2020</p>
2.	Penganggaran dan Pertanggungjawaban Pemberian Hibah Belum Memadai	<p>BPK merekomendasikan Gubernur Bali agar memerintahkan:</p> <p>a. Kepala Dinas PUPRKP lebih optimal dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pemberian hibah agar penerima hibah mengelola dan menggunakan dananya, menyelesaikan kegiatan, serta melaporkan pertanggungjawaban hibah sesuai NPHD;</p> <p>b. Kepala Bappeda mengoptimalkan sistem aplikasi <i>E-Planning</i> supaya pencantuman alokasi anggaran bagi penerima hibah dalam APBD dapat sesuai dengan data keluaran aplikasi <i>E-Planning</i>; dan</p>	<p>a. Menunjuk satuan tugas yang khusus untuk menangani pengelolaan hibah, dan melakukan <i>monitoring</i> secara berkala, atas penggunaan dana hibah oleh penerima.</p> <p>b. Menyiapkan menu historis proposal yang diusulkan dan yang direkomendasikan oleh Perangkat Daerah, sehingga terdapat <i>record</i> data proposal awal dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah sebagai dasar pencantuman dalam lampiran APBD.</p>	<p>Bulan Agustus s.d Desember 2020</p> <p>15 Juni 2020</p>

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan
		c. TAPD lebih aktif berkoordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah <i>leading sector</i> mencari informasi lengkap dalam memberikan pertimbangan untuk pencantuman alokasi anggaran belanja hibah supaya tidak berulang kepada subyek yang sama setiap TA.	c. Melakukan sosialisasi kepada Perangkat Daerah <i>Leading Sector</i> untuk menginput rekomendasi pada <i>E-Planning</i> hibah.	15 Juni 2020
3.	Penetapan Rekening Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Milik Pemerintah Provinsi Bali Tidak Tertib	BPK merekomendasikan Gubernur Bali agar memerintahkan Kepala BPKAD agar: a. Lebih optimal dalam mengkoordinasikan izin pembukaan dan penetapan rekening sesuai data rekening yang valid; dan b. Menyusun SOP yang mengatur prosedur baku dalam pendaftaran, pembukaan, dan penutupan rekening Perangkat Daerah.	a. Melakukan rekonsiliasi Rekening Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Milik Pemerintah Provinsi Bali dengan pihak terkait (OPD, PT. Bank BPD Bali Cabang Renon dan Bank Penempatan Rek BLUD). b. Menyusun SOP yang mengatur prosedur baku dalam pendaftaran, pembukaan, dan penutupan rekening Perangkat Daerah	Bulan Desember 2020 Bulan Agustus 2020
4.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Provinsi Bali Belum Sepenuhnya Memadai	BPK merekomendasikan Gubernur Bali agar memerintahkan: a. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup berkoordinasi lebih intensif dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memperoleh BPKB atas 10 kendaraan bermotor dalam rangka pengamanan administrasi; b. Kepala BPBD, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas PUPR dan Kawasan Permukiman, serta Dinas	a. Bersurat kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia melalui Sekretaris Badan penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. b. Kepala Perangkat Daerah terkait, akan melaksanakan pencatatan secara rinci atas aset yang masih dicatat secara gabungan sesuai kebijakan akuntansi.	27 Juni 2020 10 Juni 2020

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan
		Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga merinci aset yang dicatat secara gabungan menjadi per item satuan barang sesuai kebijakan akuntansi yang berlaku; c. Kepala Perangkat Daerah melengkapi informasi dalam KIB sesuai sistur penatausahaan BMD, pada: 1) 11 unit Pengguna Barang untuk aset Gedung dan Bangunan; 2) 14 unit Pengguna Barang untuk aset Jalan, Irigasi dan Jaringan; 3) 5 unit Pengguna Barang untuk Aset Tak Berwujud.	c. Kepala Perangkat Daerah terkait, akan melaksanakan pencatatan informasi pada KIB secara lengkap sesuai dengan sistur penatusahaan BMD	Bulan Juli 2020
5	Penyerahan Penguasaan Kendaraan Bermotor Melebihi 12 Bulan Belum Balik Nama	BPK merekomendasikan Gubernur Bali agar memerintahkan Kepala Bapenda menyusun SOP pajak BBNKB yang menetapkan antara lain prosedur baku balik nama atas penguasaan kendaraan bermotor melebihi 12 bulan secara berturut-turut sesuai Perda yang berlaku.	Memerintahkan para Kepala Bidang dan Kepala UPTD di Lingkungan Bapenda Provinsi Bali untuk menyusun <i>draft</i> SOP BBNKB dan melaksanakan rapat koordinasi dengan pihak Kepolisian dan Jasa Raharja membahas <i>draft</i> SOP BBNKB	8 Juni 2020 - 12 Juni 2020
Kepatuhan				
1	Pelaporan dan Pertanggungjawaban BKK Kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan Desa Belum Sesuai	BPK merekomendasikan Gubernur Bali agar memerintahkan: a. Kepala Perangkat Daerah yang menjadi <i>leading sector</i> masing-masing bidang kegiatan BKK melaksanakan evaluasi secara memadai terhadap pelaporan dan pertanggungjawaban BKK sesuai	a. Kepala Perangkat Daerah terkait akan melaksanakan evaluasi secara lebih memadai terhadap laporan pertanggungjawaban BKK sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan	Bulan Juni s.d Desember 2020

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan
	Petunjuk Teknis	<p>juknis yang telah ditetapkan sebagai pertimbangan dalam pemberian BKK tahun berikutnya;</p> <p>b. Kepala BPKAD lebih optimal dalam melaksanakan pemantauan LPj BKK yang menjadi pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran PPKD;</p> <p>c. Pemerintah Daerah penerima BKK mengembalikan dan menyetorkan sisa dana BKK sebesar Rp4.793.674.898,92 ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Bali sesuai juknis yang berlaku, dengan rincian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemerintah Kabupaten Bangli sebesar Rp632.629.279,00 untuk kegiatan penyelenggaraan akses free wifi; 2) Pemerintah Kabupaten Buleleng sebesar Rp450.472.000,00 untuk kegiatan penyelenggaraan akses free wifi dan sebesar Rp491.633.207,00 untuk kegiatan peningkatan jalan kabupaten dan pemeliharaan rutin; 3) Pemerintah Kabupaten Gianyar sebesar Rp756.486.926,00 untuk kegiatan penyelenggaraan akses free wifi; 	<p>sehingga dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam memberikan BKK pada tahun berikutnya</p> <p>b. Untuk tahun yang akan datang, akan mengingatkan kembali dengan bersurat kepada Kabupaten/Kota pada akhir tahun anggaran untuk segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan BKK sesuai yang tertuang dalam Petunjuk Teknis</p> <p>c. Bersurat kepada Bupati/ Walikota Nomor: 900/2987/Set-BPKAD tanggal 11 Mei 2020 perihal Penyampaian Pertanggungjawaban BKK, antara lain: dalam hal terdapat sisa anggaran agar disetor ke Rekening Kas Daerah Provinsi Bali dengan nomor 010.010000000-1.</p>	<p>Bulan November 2020</p> <p>Bulan November 2020</p>

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan
		<p>4) Pemerintah Kabupaten Jembrana sebesar Rp294.719.416,00 untuk kegiatan penyelenggaraan akses free wifi;</p> <p>5) Pemerintah Kabupaten Klungkung sebesar Rp443.339.299,00 untuk kegiatan penyelenggaraan akses free wifi; dan</p> <p>6) Pemerintah Kabupaten Tabanan sebesar Rp379.528.801,00 untuk kegiatan penyelenggaraan akses free wifi dan sebesar Rp1.344.865.970,92 untuk kegiatan peningkatan jalan.</p>		
2	Pengamanan Administrasi Bidang Tanah SMA/SMK Belum Memadai	<p>BPK merekomendasikan Gubernur Bali agar memerintahkan:</p> <p>a. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga berkoordinasi dengan pemerintah daerah, sekolah, dan/atau desa adat terkait dalam rangka pengamanan administrasi, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan serah terima atas tujuh bidang tanah sekolah yang belum diserahkan; 2) Melaksanakan serah terima bukti kepemilikan tanah atau sertifikat tanah atas 20 bidang tanah sekolah; 3) Memperoleh kelengkapan informasi nilai tanah pada tujuh sekolah yang telah diserahkan; <p>b. Kepala UPTD Pengelolaan BMD menyelesaikan proses sertifikasi atas 19 bidang tanah sekolah dan memproses balik nama 83 bidang tanah sekolah untuk</p>	<p>a. Memetakan permasalahan serta berkoordinasi dengan pihak-pihak pemilik kepentingan terkait penyelesaian serah terima atas tanah sekolah yang belum dilengkapi pengamanan administrasi</p> <p>b. Terhadap rekomendasi penyelesaian proses sertifikat, sebagai berikut :</p>	<p>20 Juli 2020</p> <p>Pengumpulan dokumen Juni s/d</p>

<https://denpasar.bpk.go.id>